SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 134 TAHUN 2022

TENTANG

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;

b. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, telah disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu dilakukan pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;

Mengingat: . . .

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
4. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dokumen pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 merupakan bagian dari dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, yang telah dimutakhirkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

(1) Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, memuat pemutakhiran:
   a. Narasi;
   b. Matriks Pembangunan yang memuat Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas dengan penjabaran sasaran, indikator, target, dan alokasi pendanaannya serta instansi pelaksana; dan
   c. Matriks Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* yang memuat Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* pada Prioritas Nasional beserta alokasi pendanaannya.

(2) Ketentuan . . .

(2) Ketentuan mengenai Narasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Ketentuan mengenai Matriks Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(4) Ketentuan mengenai Matriks Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

(1) Dokumen pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan oleh:

a. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional;

b. menteri/kepala lembaga, untuk melakukan perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2023; dan

c. pemerintah daerah, sebagai pedoman pelaksanaan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah Tahun 2023.

(2) Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2022

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 242

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Ayudia Silvanna Djaman

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 134 TAHUN 2022
TENTANG
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2023

# NARASI
# RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023

SK No 117931 A

**PRESIDEN**
**REPUBLIK INDONESIA**

# PEMUTAKHIRAN NARASI
# RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 1 | Perubahan alinea kedua dalam halaman I.2 | Melalui RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk memberikan arahan pada (1) kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, (2) kerangka pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional. Penyusunan RKP mengacu pada regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. RKP Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Sesuai Pasal 7 pada Perpres tersebut, dilakukan pemutakhiran RKP Tahun 2023 dengan berdasarkan Undang-Undang APBN yang telah ditetapkan melalui UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. |
| 2 | Perubahan alinea kedua dalam halaman II.3 | Dari 14 indikator sasaran PN 1, sebanyak tujuh indikator telah tercapai, yaitu indikator penjaminan akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatan; nilai devisa pariwisata; kontribusi produk domestik bruto (PDB) pariwisata; penyediaan lapangan kerja per tahun; pertumbuhan ekspor industri pengolahan; pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa; serta rasio perpajakan terhadap PDB. Sementara itu, tujuh indikator lainnya belum tercapai, yaitu porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional; skor pola pangan harapan; rasio kewirausahaan nasional; pertumbuhan PDB pertanian; pertumbuhan PDB industri pengolahan; kontribusi PDB industri pengolahan; dan pertumbuhan investasi (PMTB). |
| 3 | Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.3 | Dari enam indikator sasaran PN 2, sebanyak satu indikator telah tercapai, yaitu laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sementara itu, lima indikator lainnya belum tercapai, namun sebagian besar kinerjanya sudah di atas 90 persen. Kelima indikator tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) KTI; persentase penduduk miskin KTI; IPM Kawasan Barat Indonesia (KBI); laju pertumbuhan PDRB KBI; dan persentase penduduk miskin KBI. |
| 4 | Perubahan alinea keempat dalam halaman II.3 | Dari 24 indikator sasaran PN 3, 13 indikator telah tercapai, yaitu angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR) (per wanita usia subur usia 15-49 tahun); persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK); proporsi penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial; Angka Kematian Ibu (AKI); insidensi tuberkulosis; prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun; persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun; rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas; Indeks Perlindungan Anak (IPA); persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif; persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas; jumlah Perguruan Tinggi (PT) yang masuk ke dalam *World Class University* (PT) Top 300; dan jumlah PT yang masuk ke dalam *World Class University* (PT) Top 500. Sementara itu, tujuh indikator lainnya belum tercapai, namun sebagian besar kinerjanya sudah di atas 90 persen, yaitu proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah; prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita; harapan lama sekolah; Indeks Pembangunan Gender (IPG); Indeks |



SK No 168002 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | Pembangunan Pemuda (IPP); proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi; serta peringkat *Global Innovation Index*. |
| 5 | Perubahan alinea pertama dalam halaman II.4 | Dari tujuh indikator sasaran PN 4, sebanyak empat indikator telah tercapai, yaitu Indeks Capaian Revolusi Mental; Indeks Pembangunan Kebudayaan; Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas); dan nilai budaya literasi. Sementara itu, tiga indikator lainnya belum tercapai, namun kinerjanya sudah di atas 90 persen, yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama; Indeks Pembangunan Keluarga; dan median usia kawin pertama perempuan. |
| 6 | Perubahan alinea kedua dalam halaman II.4 | Dari sepuluh indikator sasaran PN 5, sebanyak empat indikator telah tercapai, yaitu penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010; persentase pemenuhan kebutuhan air baku; persentase rute pelayaran yang saling terhubung *(loop)*; dan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan. Sementara itu, enam indikator lainnya belum tercapai, namun sebagian besar kinerjanya sudah di atas 90 persen, yaitu rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau; persentase luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi; waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau; rasio elektrifikasi; rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik; dan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G). |
| 7 | Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.4 | Indikator yang telah tercapai yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sementara itu, indikator lainnya yang belum tercapai yaitu penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB. |
| 8 | Perubahan alinea keempat dalam halaman II.4 | Dari delapan indikator sasaran PN 7, sebanyak enam indikator telah tercapai. Keenam indikator tersebut adalah Indeks Demokrasi Indonesia; tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah; Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional; persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas (K/L); persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas (provinsi); dan persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi. Sementara itu, satu indikator lainnya belum tercapai yaitu persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas (kabupaten/kota). |
| 9 | Perubahan alinea kedua dalam halaman II.6 | Aktivitas perdagangan dunia mengalami peningkatan tajam pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020, karena didorong oleh pemulihan permintaan global pada tahun 2021. Hal ini tecermin dari peningkatan yang tinggi pada *Baltic Dry Index* (BDI). Namun, gangguan rantai pasok yang melanda dunia menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan dunia yang terjadi sejak Oktober 2021. Aktivitas perdagangan dunia pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan hingga bulan Mei, sebelum kembali mengalami penurunan akibat masih berlanjutnya konflik Rusia dan Ukraina. Volume perdagangan dunia pada tahun 2021 meningkat 9,7 persen, setelah terkontraksi 5,2 persen pada tahun 2020[1]. Di sisi lain, *Purchasing Managers' Index* (PMI), baik *Manufacturing* maupun *Services* mampu bertahan di zona ekspansi di atas level 50 sepanjang tahun 2021 dan semester I tahun 2022, sementara pada semester II tahun 2022 menunjukkan tanda penurunan.<br>[1] *Trade Statistics and Outlook* WTO (Oktober 2022) |



SK No 168003 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 10 | Perubahan Gambar 2.3 dalam halaman II.7 | Gambar 2.3<br>*Baltic Dry Index* (BDI)<br> 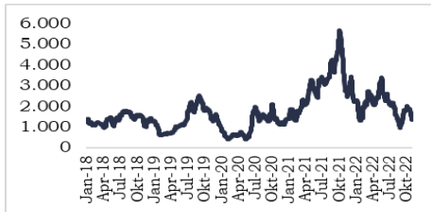 <br><br>Sumber: Bloomberg, IHS Markit, November 2022. |
| 11 | Perubahan Gambar 2.4 dalam halaman II.7 | Gambar 2.4<br>PMI Global<br> 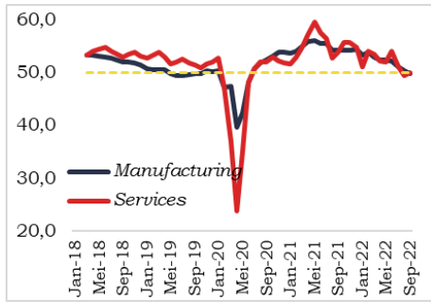 <br><br>Sumber: Bloomberg, IHS Markit, November 2022. |
| 12 | Perubahan alinea pertama dalam halaman II.7 | Volatilitas pasar keuangan global pada tahun 2021 menurun dibandingkan tahun 2020, tecermin dari penurunan *Chicago Board Option Exchange's Volatility Index* (CBOE VIX *Index*) yang mendekati level prapandemi. Namun, pada awal tahun 2022, volatilitas pasar keuangan global kembali meningkat. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan CBOE VIX *Index* yang dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian global akibat perang Rusia dan Ukraina. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2020, kondisi pasar saham global meningkat tajam pada tahun 2021 yang tecermin dari peningkatan *Morgan Stanley Capital International All Country World Index* (MSCI ACWI Index). Namun pada tahun 2022, pasar saham global kembali turun, dengan terjadinya penurunan MSCI ACWI *Index* seiring kekhawatiran investor terhadap perkembangan varian baru COVID-19 serta kebijakan pengurangan stimulus dan pengetatan suku bunga oleh berbagai negara dalam upaya pengendalian inflasi yang semakin meningkat. |
| 13 | Perubahan Gambar 2.5 dalam halaman II.7 | Gambar 2.5<br>CBOE VIX dan MSCI ACWI *Index*<br> 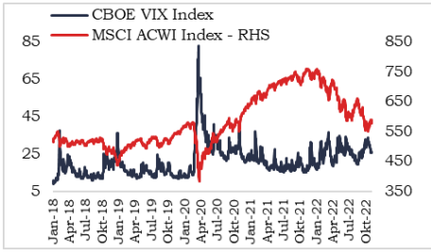 <br> |



SK No 168004 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 14 | Perubahan Gambar 2.6 dalam halaman II.7 | Gambar 2.6<br>*Monetary Base* (Persen, *yoy*)<br> 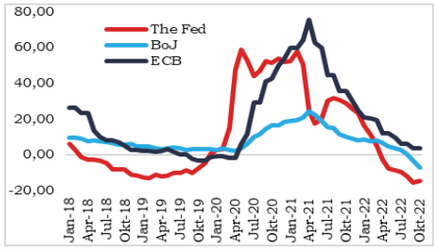 <br> |
| 15 | Perubahan alinea kedua dalam halaman II.7 | Bank sentral utama dunia, seperti The Fed, Bank of Japan, dan European Central Bank mempertahankan suku bunganya di level rendah pada tahun 2021, sehingga terjadi peningkatan *monetary base* dan likuiditas global. Namun, hingga akhir Oktober tahun 2022, *monetary base* menunjukkan penurunan, dipicu oleh sikap The Fed yang memutuskan untuk mengurangi pembelian aset serta menaikkan suku bunga. Keputusan The Fed disebabkan oleh tekanan inflasi yang semakin tinggi serta pemulihan pada pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Tekanan inflasi yang tinggi juga mendorong sebagian besar bank sentral dunia melakukan kebijakan menaikkan suku bunga. |
| 16 | Perubahan alinea pertama dalam halaman II.8 | Harga-harga komoditas mengalami peningkatan yang tinggi, seiring dengan pemulihan ekonomi global pada tahun 2021. Pemulihan permintaan global juga disertai dengan bergesernya fokus kebutuhan energi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Peningkatan harga logam, tidak hanya dipicu oleh pemulihan ekonomi, tetapi juga dorongan penggunaan energi bersih dan hijau secara global yang mendorong tingginya permintaan. Harga *Crude Palm Oil* (CPO) mengalami penurunan pada semester II tahun 2022, setelah meningkat tinggi dipicu oleh terbatasnya jumlah pasokan. Sementara itu, harga minyak mentah masih tetap tinggi, utamanya disebabkan oleh konflik Rusia dan Ukraina. Dampak konflik tersebut terus meluas dan memicu sanksi antara Rusia dan negara-negara lain khususnya Eropa dan Amerika Serikat. |
| 17 | Perubahan Gambar 2.7 dalam halaman II.8 | Gambar 2.7<br>Harga Komoditas Internasional<br> 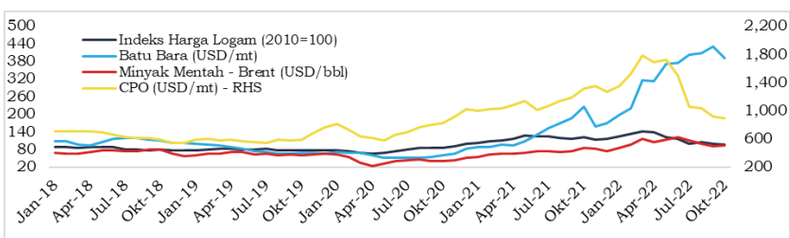 <br><br>Sumber: World Bank Commodities Price Data, November 2022. |
| 18 | Perubahan alinea pertama dalam halaman II.9 | Dari sisi moneter, pada tahun 2020 dan 2021 bank sentral di beberapa negara menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif melalui penurunan suku bunga dan *quantitative easing* untuk menahan dampak pandemi COVID-19. Seiring pemulihan ekonomi yang terjadi pada tahun 2021 serta tekanan inflasi yang persisten pada tahun 2022, beberapa bank sentral negara mulai melakukan normalisasi suku bunga. Peningkatan inflasi dan |

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | pemulihan pada pasar tenaga kerja mendorong bank sentral untuk menaikkan suku bunga pada tahun 2022. |
| 19 | Perubahan Tabel 2.2 dalam halaman II.9 | |

Tabel 2.2
Kebijakan Suku Bunga Negara Dunia

| Negara | November 2022 (Persen) | Kenaikan Suku Bunga Selama Pandemi COVID-19 |
|---|---|---|
| Rusia | 7,50 | 9 kali |
| Korea Selatan | 3,25 | 9 kali |
| Inggris | 3,00 | 8 kali |
| Amerika Serikat (AS) | 4,00 | 6 kali |
| Filipina | 5,00 | 6 kali |
| India | 5,90 | 4 kali |
| Malaysia | 2,75 | 4 kali |
| Indonesia | 5,25 | 4 kali |
| European Union | 2,00 | 3 kali |
| Vietnam | 6,00 | 2 kali |
| Cina | 2,75 | Belum Ada Kenaikan |
| Jepang | (0,10) | Belum Ada Kenaikan |

Sumber: CEIC, November 2022.

Catatan: Angka dalam kurung "(x,x)" bernilai negatif.

20 Perubahan Tabel 2.3 dalam halaman II.11

Tabel 2.3
Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2021–2022 (Persen, *yoy*)

| Uraian | 2021 1) | | 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Realisasi Pertumbuhan | Sumber Pertumbuhan | RPJMN 2) | *Outlook* Pertumbuhan 3) | Sumber Pertumbuhan 3) |
| Pertumbuhan PDB | 3,7 | 3,7 | 5,4–5,7 | 5,4 | 5,4 |
| Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT | 2,0 | 1,1 | 5,2–5,4 | 4,8 | 2,5 |
| Konsumsi Pemerintah | 4,2 | 0,3 | 4,5–4,6 | (3,4) | (0,3) |
| Investasi (PMTB) | 3,8 | 1,2 | 5,8–6,2 | 4,1 | 1,3 |
| Ekspor Barang dan Jasa | 24,0 | 4,7 | 3,9–4,2 | 17,7 | 4,1 |
| Impor Barang dan Jasa | 23,3 | (3,4) | 4,4–4,6 | 15,6 | 3,0 |

Sumber: 1) Badan Pusat Statistik (BPS), 2022, 2) RPJMN 2020–2024; dan 3) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas, November 2022

21 Perubahan alinea pertama dalam halaman II.11

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diprakirakan meningkat sebesar 5,4 persen, sejalan dengan akselerasi konsumsi masyarakat dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal pemerintah dan tingginya potensi ekspor. Optimisme ekonomi tahun 2022 didorong oleh aktivitas ekonomi yang terus meningkat sejalan dengan percepatan vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas, dan stimulus kebijakan yang berlanjut. Meski demikian, target pemulihan tersebut masih dihadapkan pada risiko penyebaran varian baru COVID-19, *permanent scar* yang dialami oleh dunia usaha dan sosial, normalisasi

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | kebijakan baik fiskal dan moneter, serta gangguan rantai pasok, dan krisis energi |
| 22 | Perubahan alinea kedua dalam halaman II.11 | Keberhasilan pengendalian COVID-19 dan kebijakan penanganannya akan menjadi kunci peningkatan keyakinan masyarakat serta dunia usaha yang kemudian dapat meningkatkan komponen pertumbuhan. Konsumsi masyarakat diprakirakan meningkat dengan tumbuh sebesar 4,8 persen, ditopang oleh terkendalinya penyebaran COVID-19 seiring dengan tercapainya imunitas massal dan berangsur pulihnya mobilitas masyarakat. Kinerja ekspor barang dan jasa juga tetap akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dengan masih akan tingginya permintaan dan harga komoditas global, dengan pertumbuhan sebesar 17,7 persen. Investasi pada tahun 2022 diprakirakan akan meningkat dan tumbuh sebesar 4,1 persen, sebagai kunci peningkatan kapasitas produktif perekonomian. Konsumsi pemerintah diprakirakan terkontraksi sebesar 3,4 persen, dipicu oleh mulai berkurangnya program stimulus dan belanja penanganan pandemi seiring dengan kondisi pandemi yang mengarah ke endemi. |
| 23 | Perubahan Tabel 2.4 dalam halaman II.12 | Tabel 2.4<br>Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2021–2022 (Persen, *yoy*) |

| Uraian | 2021[1)] | | 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Realisasi Pertumbuhan | Sumber Pertumbuhan | RPJMN[2)] | *Outlook* Pertumbuhan[3)] | Sumber Pertumbuhan[3)] |
| Pertumbuhan PDB | 3,7 | 3,7 | 5,4–5,7 | 5,4 | 5,4 |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1,8 | 0,2 | 3,7–3,8 | 1,6[a)] | 0,2 |
| Pertambangan dan Penggalian | 4,0 | 0,3 | 1,9–1,9 | 3,5[a)] | 0,3 |
| Industri Pengolahan | 3,4 | 0,7 | 5,2–5,5 | 4,9[a)] | 1,0 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 5,5 | 0,1 | 5,2–5,2 | 7,7[a)] | 0,1 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 5,0 | 0,0 | 4,3–4,4 | 3,8[a)] | 0,0 |
| Konstruksi | 2,8 | 0,3 | 5,8–6,1 | 2,1[a)] | 0,2 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 4,7 | 0,6 | 5,6–6,0 | 5,2[a)] | 0,7 |
| Transportasi dan Pergudangan | 3,2 | 0,1 | 7,1–7,4 | 17,3[a)] | 0,6 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 3,9 | 0,1 | 6,1–6,3 | 12,0[a)] | 0,3 |
| Informasi dan Komunikasi | 6,8 | 0,4 | 7,7–8,8 | 7,3[a)] | 0,5 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,6 | 0,1 | 6,4–6,9 | 1,6[a)] | 0,1 |
| *Real Estate* | 2,8 | 0,1 | 5,0–5,0 | 1,9[a)] | 0,1 |
| Jasa Perusahaan | 0,7 | 0,0 | 8,4–8,4 | 7,7[a)] | 0,1 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | (0,3) | (0,0) | 4,8–5,1 | 2,8[a)] | 0,1 |



SK No 168007 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 24 | Perubahan Tabel 2.4 dalam halaman II.13 | |

| Uraian | 2021[1)] | | 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Realisasi Pertumbuhan | Sumber Pertumbuhan | RPJMN[2)] | *Outlook* Pertumbuhan[3)] | Sumber Pertumbuhan[3)] |
| Jasa Pendidikan | 0,1 | 0,0 | 5,2–5,2 | 1,3[a)] | 0,0 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 10,5 | 0,1 | 7,6–8,0 | 2,0[a)] | 0,0 |
| Jasa Lainnya | 2,1 | 0,0 | 9,3–9,5 | 7,8[a)] | 0,1 |

Sumber: 1) BPS, 2022; 2) RPJMN Tahun 2020–2024; 3) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas, November 2022.

Keterangan: a) Terdapat penyesuaian angka *outlook* pertumbuhan 2022 dari sasaran pertumbuhan pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022 berdasarkan perkembangan perekonomian terkini hingga November 2022.

| | | |
|---|---|---|
| 25 | Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.14 | Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2021 mencatatkan surplus tinggi mencapai US$13,5 miliar. Capaian tersebut dikontribusikan oleh surplus neraca transaksi berjalan sebesar US$3,5 miliar atau 0,3 persen dari PDB. Surplus pada neraca transaksi berjalan tersebut menjadi capaian yang sangat penting sejak surplus terakhir dicapai pada tahun 2011. Selain itu, neraca transaksi modal dan finansial juga turut berkontribusi mencatat surplus sebesar US$12,4 miliar. |
| 26 | Perubahan alinea keempat dalam halaman II.14 | Selanjutnya, kinerja transaksi berjalan yang mengalami surplus pada tahun 2021 didorong oleh surplus tinggi pada neraca barang mencapai US$43,8 miliar, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2020 sebesar US$28,3 miliar. Kinerja positif neraca barang terakselerasi di tengah fenomena *commodity supercycle* yang mendorong harga komoditas internasional meningkat. Lebih lanjut, neraca pendapatan sekunder juga berkontribusi positif dengan mencatat surplus sebesar US$6,3 miliar. Adapun kenaikan surplus neraca berjalan lebih jauh masih tertahan oleh meningkatnya defisit neraca jasa–jasa mencapai US$14,6 miliar, sejalan dengan masih tertekannya neraca jasa perjalanan dan kenaikan defisit jasa transportasi. Selain itu, neraca pendapatan primer juga masih persisten mengalami defisit mencapai US$32,0 miliar, seiring dengan meningkatnya imbal hasil investasi yang masuk ke dalam perekonomian domestik. |
| 27 | Perubahan alinea pertama dalam halaman II.15 | Neraca transaksi modal dan finansial juga menunjukkan kinerja positif sepanjang tahun 2021. Kinerja positif tersebut didorong oleh surplus yang meningkat pada investasi langsung dan investasi portofolio yang masing-masing mencapai US$17,4 miliar dan US$5,1 miliar yang mana capaian keduanya meningkat dibandingkan dengan tahun 2020. Positifnya kinerja investasi langsung dan investasi portofolio mencerminkan keyakinan investor terhadap prospek pemulihan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2021 meskipun masih dalam kondisi tekanan pandemi COVID-19 terutama varian Delta pada triwulan III tahun 2021. Perkembangan tersebut kemudian mendorong cadangan devisa meningkat mencapai US$144,9 miliar atau setara dengan pembiayaan 8 (delapan) bulan impor. |



SK No 168008 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|

28 Perubahan Tabel 2.5 dalam halaman II.15

Tabel 2.5
Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2021–2022 (US$ Miliar)

| Uraian | 2021[1)] | *Outlook* 2022[2)] |
|---|---|---|
| Neraca Pembayaran Secara Keseluruhan | 13,5 | (12,2) |
| Neraca Transaksi Berjalan | 3,5 | 3,2 |
| (% PDB) | 0,3 | 0,3 |
| Neraca Perdagangan Barang | 43,8 | 52,1 |
| Neraca Perdagangan Jasa | (14,6) | (18,5) |
| Neraca Pendapatan Primer | (32,0) | (36,4) |
| Neraca Pendapatan Sekunder | 6,3 | 6,0 |
| Neraca Modal dan Finansial | 12,4 | (13,8) |
| Investasi Langsung | 17,4 | 13,7 |
| Investasi Portofolio | 5,1 | (9,7) |
| Investasi Lainnya | (10,4) | (17,8) |
| Posisi Cadangan Devisa | 144,9 | 132,7 |
| - dalam bulan impor | 8,0 | 5,6 |

Sumber: 1) Bank Indonesia, 2021; 2) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas, November 2022.

Keterangan: Terdapat penyesuaian angka *outlook* 2022 dari sasaran pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022 berdasarkan perkembangan perekonomian terkini hingga November 2022.

Catatan: Angka dalam kurung "(x,x)" bernilai negatif.

29 Perubahan alinea kedua dalam halaman II.15

Pada tahun 2022, NPI diprakirakan menghadapi tekanan ketidakpastian dunia terutama dampak dari perang Rusia-Ukraina yang menjalar dari isu geopolitik menjadi krisis ekonomi, pangan, dan sosial. Lebih lanjut, berbagai sanksi ekonomi dari Blok Barat kepada Rusia membuat ketidakpastian dunia semakin tinggi, di antaranya menyebabkan rantai pasok dunia terganggu dan mendorong terjadinya kelangkaan bahan baku produksi di berbagai negara produsen industri. Hal tersebut berimplikasi pada kenaikan harga-harga di dunia yang pada akhirnya meningkatkan inflasi secara signifikan. Konsekuensinya, berbagai bank sentral di negara maju meningkatkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan kebijakan ini berdampak kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia karena menyebabkan tekanan pada neraca modal dan finansial melalui *capital outflow*. Meskipun demikian, kinerja perdagangan Indonesia diprakirakan masih akan kuat sehingga mampu menahan pendalaman defisit kinerja NPI secara keseluruhan, tecermin dari tren surplus neraca transaksi berjalan yang masih berlanjut.

30 Perubahan alinea pertama dalam halaman II.16

Berdasarkan perkembangan isu strategis di tingkat global dan domestik, *outlook* NPI tahun 2022 relatif masih kuat di tengah situasi ketidakpastian dunia yang tinggi. Neraca secara keseluruhan akan defisit pada kisaran US$12,2 miliar. Kinerja tersebut dikontribusikan oleh keberlanjutan surplus neraca transaksi berjalan sekitar US$3,2 miliar atau setara dengan 0,3 persen dari PDB. Perkembangan neraca barang masih akan tinggi mencapai sebesar US$52,1 miliar, seiring dengan fenomena *commodity supercycle* yang masih berlanjut meskipun sedikit mengalami perlambatan. Neraca jasa-jasa akan mengalami defisit sekitar US$18,5 miliar. Sementara neraca pendapatan primer masih akan menjadi komponen yang menyumbangkan defisit paling tinggi pada neraca transaksi berjalan mencapai kisaran US$36,4 miliar, sejalan dengan pembayaran imbal hasil



SK No 168009 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | investasi langsung dan investasi portofolio. Adapun neraca pendapatan sekunder akan mencapai sekitar US$6,0 miliar. |
| 31 | Perubahan alinea kedua dalam halaman II.16 | Selanjutnya, neraca transaksi modal dan finansial akan mengalami defisit dengan prakiraan mencapai sekitar US$13,8 miliar. Kondisi tersebut utamanya diakibatkan oleh fenomena *capital outflow* di tengah kenaikan suku bunga di negara-negara maju sehingga investasi portofolio mengalami defisit pada kisaran US$9,7 miliar. Sementara itu, investasi langsung akan mencapai surplus pada kisaran US$13,7 miliar, sejalan dengan target investasi langsung serta berbagai proyek strategis nasional yang ditawarkan kepada investor dalam rangka mendorong penguatan integrasi ekonomi domestik dan daya saing nasional. Adapun cadangan devisa diprakirakan mencapai sekitar US$132,7 miliar atau setara dengan pembiayaan impor selama 5,6 bulan. |
| 32 | Perubahan alinea kedua dalam halaman II.17 | Pada tahun 2022, fokus APBN diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pendapatan negara dan hibah diprakirakan mencapai Rp2.436,9 triliun. Penerimaan perpajakan pada tahun 2022 diprakirakan sebesar Rp1.924,9 triliun atau 10,3 persen PDB. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diprakirakan mencapai Rp510,9 triliun atau 2,7 persen PDB. Belanja negara diprakirakan mencapai Rp3.169,1 triliun atau 17,0 persen PDB, dengan belanja pemerintah pusat diprakirakan sebesar Rp2.370,0 triliun atau 12,7 persen PDB serta belanja TKD diprakirakan mencapai Rp799,1 triliun atau 4,3 persen PDB. Program PC-PEN tetap dilakukan dan direncanakan dialokasikan sebesar Rp455,6 triliun, yang direncanakan terbagi dalam tiga klaster, yaitu (a) penanganan kesehatan sebesar Rp122,5 triliun; (b) perlindungan masyarakat sebesar Rp154,8 triliun; dan (c) penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp178,3 triliun. |
| 33 | Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.17 | Dengan pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran pada tahun 2022 ditargetkan mencapai 3,9 persen PDB atau sebesar Rp732,2 triliun. Pembiayaan anggaran masih didominasi oleh pembiayaan utang sebesar Rp757,6 triliun, pembiayaan investasi sebesar negatif Rp154,2 triliun dan SAL sekitar Rp127,3 triliun. |



SK No 168010 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 34 | Perubahan Tabel 2.6 dalam halaman II.17 | Tabel 2.6<br>Gambaran APBN (Persen PDB) |

| Uraian | Realisasi 2021 | 2022 *Outlook* |
|---|---|---|
| Pendapatan Negara dan Hibah | 11,9 | 13,0 |
| Penerimaan Perpajakan | 9,1 | 10,3 |
| PNBP | 2,7 | 2,7 |
| Belanja Negara | 16,4 | 17,0 |
| Belanja Pemerintah Pusat | 11,8 | 12,7 |
| TKD | 4,6 | 4,3 |
| Keseimbangan Primer | (2,5) | (1,8) |
| Surplus / (Defisit) | (4,6) | (3,9) |
| Rasio Utang | 40,7 | 41,3 |

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022 dan *Outlook* Kementerian Keuangan untuk Tahun 2022 berdasarkan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama oleh Kementerian Keuangan, diolah.

Catatan: Angka dalam kurung "(x,x)" bernilai negatif.

| | | |
|---|---|---|
| 35 | Perubahan alinea keempat dalam halaman II.18 | Pada triwulan II-2022, inflasi tahunan (*yoy*) April-Juni tercatat 3,47 persen, 3,55 persen, dan 4,35 persen, mengalami tren peningkatan hingga melampaui rentang sasaran tahun 2022 pada realisasi bulan Juni. Peningkatan inflasi tahunan disebabkan oleh *base effect* inflasi 2021 yang rendah, kenaikan harga komoditas pangan dan energi global akibat konflik geopolitik Rusia dan Ukraina, disertai kenaikan permintaan seiring dengan periode bulan Ramadan dan HBKN Idul Fitri. |
| 36 | Penambahan alinea setelah alinea keempat dalam halaman II.18 | Sepanjang triwulan III-2022, inflasi tahunan (*yoy*) melanjutkan tren peningkatan dan berada di atas rentang sasaran tahun 2022. Pada Juli-September secara berturut-turut tingkat inflasi mencapai 4,94 persen, 4,69 persen, dan 5,95 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh berlanjutnya kenaikan harga komoditas pangan dan energi serta konflik Rusia dan Ukraina yang belum selesai, kebijakan proteksionisme pangan di beberapa negara, dan kebijakan Zero COVID-19 di Cina yang semakin mendisrupsi rantai pasok global. Tekanan inflasi semakin tinggi dengan diberlakukannya penyesuaian harga BBM bersubsidi pada awal September 2022. Memasuki triwulan IV-2022, inflasi tahunan (*yoy*) pada Oktober menunjukkan penurunan mencapai 5,71 persen meskipun masih tinggi berada di luar rentang sasaran 2022, hal ini didukung oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan seiring dengan musim panen serta langkah-langkah pengendalian harga yang ditempuh oleh pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, dan mitra strategis lainnya melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). |
| 37 | Perubahan alinea kelima dalam halaman II.18 | Inflasi tahun 2022 dihadapkan pada sejumlah risiko kenaikan, di antaranya (a) tren lonjakan inflasi global; (b) kenaikan harga komoditas energi dan pangan global; (c) kebijakan *Administered Prices*: penyesuaian harga BBM bersubsidi, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Tarif Tenaga Listrik (TTL), serta kebijakan cukai tembakau; (d) pelemahan nilai tukar Rupiah yang dapat mendorong kenaikan *imported inflation*; (e) faktor cuaca dan permasalahan struktural inflasi (seperti pola tanam, logistik, pengelolaan pascapanen, dan lain-lain); serta (f) tren musiman, kenaikan harga pada |



SK No 168011 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | saat HBKN. Di sisi lain, terdapat potensi penurunan inflasi sejalan dengan semakin agresifnya normalisasi kebijakan moneter The Fed dan bank sentral di beberapa negara yang kemudian direspon Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga acuan *BI-7 Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR). Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, pada tahun 2022 inflasi diprakirakan sebesar 5,7 persen (*yoy*), lebih tinggi dari tahun 2021, dan melampaui batas atas sasaran inflasi yang ditetapkan yaitu sebesar 2,0-4,0 persen (*yoy*). |
| 38 | Penambahan alinea setelah alinea pertama dalam halaman II.19 | Presiden RI dalam Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2022, menyampaikan arahan kepada K/L/D untuk (a) memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data makro dan mikro serta data detail; (b) memperluas kerja sama antardaerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah melalui peran TPIP dan TPID dalam mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta menjadi fasilitator untuk mendorong kerja sama antardaerah dalam pengendalian inflasi; (c) menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antardaerah dan termasuk menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat; (d) mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah; serta (e) mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. |
| 39 | Perubahan Gambar 2.13 dalam halaman II.19 | Gambar 2.13<br>Perkembangan Inflasi Bulanan<br>(Persen, *yoy*)<br> 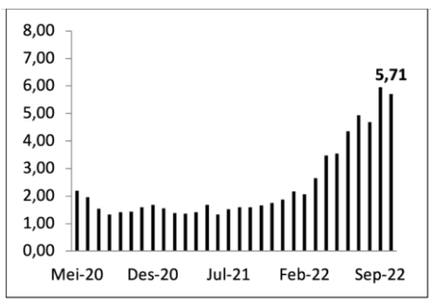 <br> |
| 40 | Perubahan Gambar 2.14 dalam halaman II.19 | Gambar 2.14<br>Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen (Persen, *yoy*)<br> 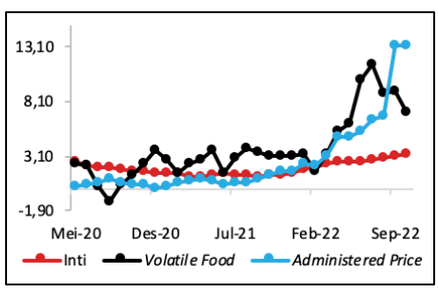 <br> |



SK No 168012 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 41 | Penambahan alinea setelah alinea keempat dalam halaman II.19 | Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah berlanjut pada triwulan III-2022 sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global dipengaruhi pengetatan kebijakan moneter yang semakin agresif di berbagai negara, terutama Amerika Serikat (AS) untuk merespons tekanan inflasi dan perlambatan ekonomi global. Kondisi ini mendorong aliran modal asing keluar dan berdampak pada pelemahan Rupiah. Hingga triwulan III-2022, nilai tukar Rupiah secara rata-rata mencapai Rp14.607 per US$, atau melemah sebesar 2,09 persen terhadap rata-rata di periode yang sama pada tahun 2021.<br><br>Memasuki triwulan IV-2022, pelemahan nilai tukar Rupiah berlanjut utamanya dipengaruhi oleh pergerakan *Fed Funds Rate* (FFR) yang diprakirakan terus meningkat di tahun 2023. Hal ini berdampak pada penguatan dollar AS dan pelemahan mata uang negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Per 24 November nilai tukar Rupiah mencapai Rp15.687 per US$ atau terdepresiasi sebesar 9,98 persen (*ytd*). |
| 42 | Perubahan alinea pertama dalam halaman II.20 | Pada tahun 2022 nilai tukar Rupiah diprakirakan tetap terkendali pada kisaran Rp14.950 per US$, berada pada rentang Rp14.600-15.000 per US$ ditopang oleh kondisi fundamental perekonomian domestik yang terjaga. |
| 43 | Perubahan Gambar 2.15 dalam halaman II.20 | Gambar 2.15<br>Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US$ (Rp/US$)<br> 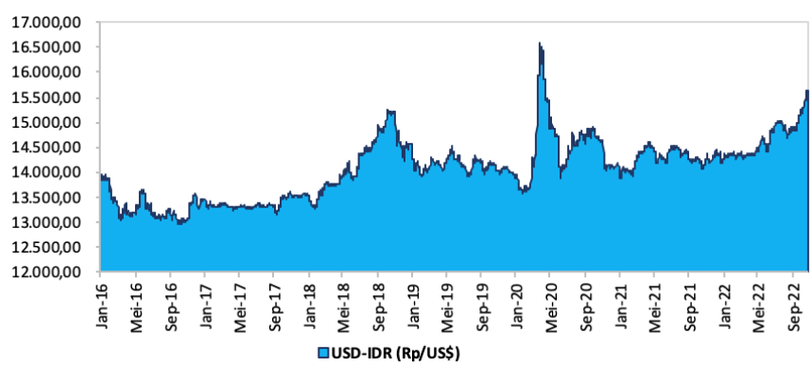 <br> |
| 44 | Perubahan alinea kedua dalam halaman II.20 | Respons kebijakan moneter ditempuh Bank Indonesia dengan meningkatkan suku bunga acuan BI7DRR secara bertahap dari semula dipertahankan pada level 3,50 persen hingga Juli 2022, menjadi 3,75 persen, 4,25 persen, 4,75 persen, dan 5,25 persen pada periode Agustus-November 2022 sebagaimana hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG). Keputusan menaikkan BI7DRR secara bertahap merupakan langkah yang tepat mempertimbangkan (a) tekanan inflasi global dan domestik yang tinggi sehingga menyebabkan inflasi jauh berada diatas rentang sasaran inflasi nasional 2022 yaitu 2,0-4,0 persen (*yoy*); (b) semakin tingginya ketidakpastian ekonomi global akibat berlanjutnya perang Rusia-Ukraina, kebijakan proteksionisme pangan, krisis energi, dan Zero COVID-19 *Policy* di Cina yang semakin mendisrupsi rantai pasok global; (c) urgensi untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik supaya tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi dunia; serta (d) perlunya menjaga likuiditas perekonomian tetap memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia kedepannya diprakirakan akan kembali meningkatkan suku bunga acuan secara bertahap, seiring dengan |



SK No 168013 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | pengetatan kebijakan moneter The Fed yang semakin agresif dengan tetap memperhatikan kondisi makroekonomi dan keuangan domestik. |
| 45 | Perubahan alinea kelima dalam halaman II.20 | Pada tahun 2021 hingga awal tahun 2022, kondisi pasar modal domestik mencatatkan kinerja yang sangat positif, bahkan lebih baik dibanding kinerja bursa saham Malaysia, Singapura, dan Filipina. Kinerja positif tersebut tecermin dari peningkatan pertumbuhan indeks harga saham gabungan yang tinggi, pertumbuhan jumlah investor yang meningkat pesat, serta penghimpunan dana yang mencapai rekor tertinggi selama ini. Per 21 Oktober 2022, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di level 7.017,77 atau tumbuh sebesar 5,83 persen (*ytd*). Sementara itu, kapitalisasi pasar saham mencapai Rp9.311,24 triliun atau meningkat sebesar 12,83 persen (*yoy*). Capaian tersebut salah satunya didukung oleh adanya peningkatan jumlah investor pasar modal yang signifikan di sepanjang tahun 2022. Per 31 Agustus 2022, jumlah investor sebanyak 9,54 juta atau meningkat sebesar 27,38 persen dibandingkan Desember 2021 yang tercatat hanya sebesar 7,49 juta. Jika dibandingkan dengan jumlah investor tahun 2017, jumlah ini meningkat hampir sembilan kali lipat per Agustus 2022, *yield* obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun sempat mengalami perbaikan dan nilainya relatif terus menurun sepanjang tahun 2021 dan mulai meningkat kembali pada awal 2022. |
| 46 | Perubahan Gambar 2.16 dalam halaman II.21 | Gambar 2.16<br>Perkembangan *Yield Government Bonds*<br> 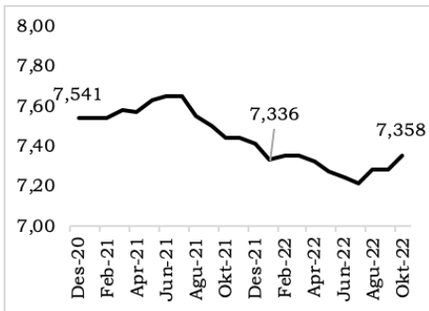 <br> |
| 47 | Perubahan Gambar 2.17 dalam halaman II.21 | Gambar 2.17<br>Perkembangan IHSG<br> 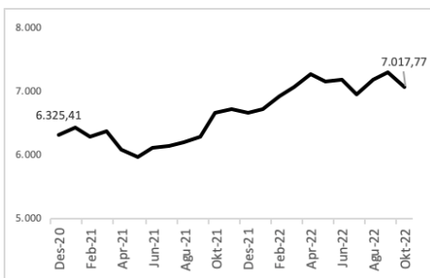 <br> |
| 48 | Perubahan alinea kedua dalam halaman II.21 | Penyaluran kredit perlahan terus mengalami peningkatan hingga tumbuh sebesar 10,71 persen pada triwulan II-2022. Jika ditinjau lebih lanjut berdasarkan lapangan usaha penerima kredit, sebagian besar kredit disalurkan kepada sektor industri pengolahan (23,4 persen) dan perdagangan besar dan eceran (23,0 persen). Selanjutnya, kredit perbankan juga disalurkan kepada UMKM, melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah disalurkan sebesar Rp263,79 triliun (63,45 persen dari target tahun |



SK No 168014 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | 2022 sebesar Rp373,13 triliun) dan diberikan kepada 4,99 juta debitur per Agustus 2022. Berbeda dengan kredit non-UMKM, penyaluran KUR didominasi oleh sektor perdagangan, yaitu sebesar 43,9 persen per Agustus tahun 2022. |
| 49 | Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.21 | Sementara itu, dari sisi penghimpunan dana, per Juli 2022, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sedikit mengalami penurunan dan sudah berada di bawah level *double digit*. Namun demikian, penghimpunan DPK mayoritas berada pada Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 4 (KBMI 4) yaitu 51,5 persen dari total DPK dan KBMI 3 (24,9 persen dari total DPK). Tingginya pertumbuhan DPK masih mencerminkan perilaku berjaga-jaga (*precautionary*) masyarakat dalam menghadapi pandemi. Di sisi lain, dalam menghadapi pertumbuhan DPK yang tinggi, perbankan terlihat masih meminimalisir risiko. Hal tersebut tecermin dari pergerakan portofolio investasi perbankan yang cenderung memilih berinvestasi pada *risk-free asset* seperti obligasi daripada menyalurkan kredit ke sektor riil. |
| 50 | Perubahan Gambar 2.18 dalam halaman II.22 | Gambar 2.18<br>Pertumbuhan Kredit dan DPK<br> 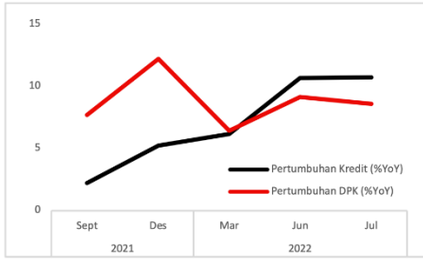 |
| 51 | Perubahan Gambar 2.19 dalam halaman II.22 | Gambar 2.19<br>Rasio Kredit Bermasalah<br> 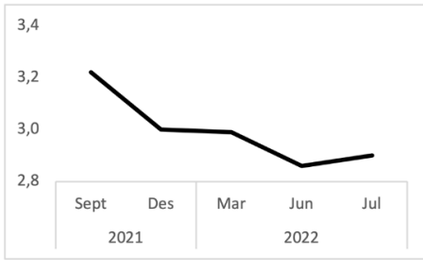 |
| 52 | Perubahan alinea pertama dalam halaman II.22 | Sejalan dengan itu, kinerja sektor keuangan syariah terjaga positif hingga pertengahan 2022. Kondisi tersebut tecermin pada peningkatan total aset jasa keuangan syariah (tidak termasuk saham) per Juli 2022 yang mencapai angka Rp2.178,07 triliun atau tumbuh 14,19 persen (*yoy*). Perkembangan positif sektor perbankan syariah, pasar modal syariah dan industri keuangan non-bank (IKNB) syariah didukung oleh pemulihan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kualitas fungsi intermediasi perbankan termasuk ke sektor UMKM, peningkatan inovasi digital, serta meningkatnya literasi masyarakat terkait instrumen investasi termasuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). |



SK No 168015 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 53 | Perubahan Tabel 2.7 dalam halaman II.22 | Tabel 2.7<br>*Outlook* Pencapaian Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2022 (Persen) |

| Uraian | 2021[1)] | *Outlook* 2022[2)] |
|---|---|---|
| Sasaran Pembangunan | | |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) | 6,49 | 5,86[a)] |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 9,71 | 8,5–9,0 |
| Rasio Gini (nilai) | 0,381 | 0,376–0,378 |
| IPM (nilai) | 72,29 | 72,73[b)] |
| Penurunan Emisi GRK | 26,02 | 26,87 |
| Indikator Pembangunan | | |
| Nilai Tukar Petani (NTP) | 104,64 | 103–105 |
| Nilai Tukar Nelayan (NTN) | 104,69 | 104–106 |

Sumber: 1) Capaian indikator pembangunan tahun 2021 merupakan perhitungan BPS, sementara khusus penurunan Emisi GRK merupakan perhitungan Kementerian PPN/Bappenas; 2) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas, November 2022.

Keterangan: a) Angka realisasi, b) Terdapat penyesuaian angka *outlook* IPM 2022 dari sasaran IPM pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022 berdasarkan rilis beberapa data ekonomi terbaru hingga November 2022.

| | | |
|---|---|---|
| 54 | Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.23 | Memasuki tahun 2022, seiring dengan tren beralihnya status pandemi menjadi endemi serta kelanjutan proses pemulihan perekonomian, TPT mengalami penurunan sebesar 0,63 poin persentase menjadi 5,86 persen. Agar peluang para pencari kerja mendapatkan kembali pekerjaannya dapat meningkat, Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan dengan skema "semi-bantuan sosial" pada semester I dan dilanjutkan dengan pelaksanaan sesuai desain awal Kartu Prakerja sebagai sarana peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja pada semester II. Selain itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, pada Februari 2022 pemerintah bersama-sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mulai menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. |
| 55 | Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.24 | Kondisi ketimpangan setelah bulan September 2020 mengalami perbaikan secara perlahan. Hal ini terjadi karena kondisi perekonomian Indonesia yang semakin membaik jika dibandingkan pada masa awal pandemi. Pada bulan Maret 2021, berdasarkan data BPS, rasio gini berada pada level 0,384 atau menurun sebanyak 0,001 dari bulan September 2020. Kemudian, rasio gini berhasil turun di angka 0,381 pada bulan September 2021 atau turun sebesar 0,003 dibandingkan dengan kondisi 6 bulan sebelumnya. Namun demikian, kondisi rasio gini pada bulan Maret 2022 mengalami kenaikan menjadi 0,384. Hal ini karena kecepatan pulih kelompok masyarakat berpendapatan tinggi lebih cepat dibandingkan dengan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. |
| 56 | Perubahan alinea kedua dalam halaman II.25 | Pada tahun 2022, aktivitas perekonomian diprakirakan terus mendekati kondisi normal seiring dengan dilakukannya upaya penanganan pandemi COVID-19 yang semakin kuat dan semakin meluasnya program vaksinasi kepada masyarakat, dengan *outlook* pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen. Adapun program dan kegiatan pemerintah pada tahun 2022 masih terus difokuskan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Sementara itu, aksi pembangunan rendah karbon juga terus diperkuat agar berjalan optimal untuk mengurangi *trade-off* dari aktivitas ekonomi yang semakin kuat. |



SK No 168016 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 57 | Perubahan gambar 2.20 dalam halaman II.25 | Gambar 2.20<br>Proyeksi Potensi Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)<br> 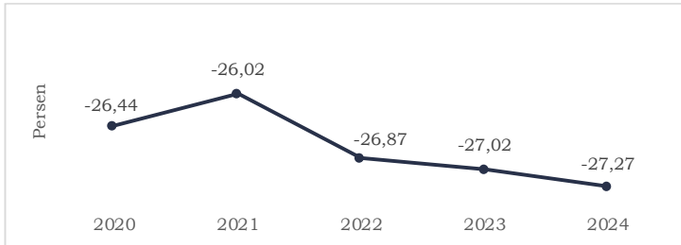 <br><br>Sumber: Hasil Analisis dan Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas, November 2022. |
| 58 | Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.25 | Proses pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial di tahun 2022 diproyeksikan akan berdampak pada meningkatnya emisi GRK di tahun tersebut. Namun, dengan semakin luasnya upaya penerapan pembangunan rendah karbon sebagai tulang punggung ekonomi hijau, maka diproyeksikan penurunan emisi GRK akan dapat menguat dari 26,02 persen pada tahun 2021 menjadi 26,87 persen pada tahun 2022. Beberapa penguatan aksi pembangunan rendah karbon dilakukan melalui upaya aksi restorasi gambut dan reforestasi, serta perluasan penerapan energi terbarukan. |
| 59 | Perubahan Gambar 2.21 dalam halaman II.26 | Gambar 2.21<br>Perkembangan Nilai Tukar Petani<br> 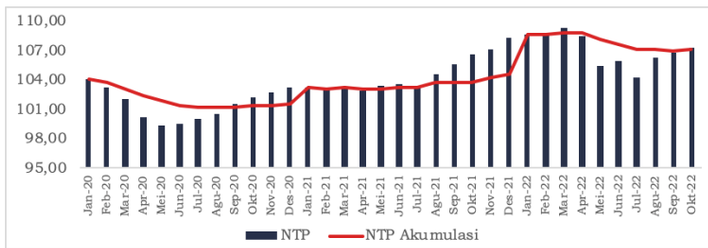 <br><br>Sumber: BPS, November 2022 (diolah). |
| 60 | Perubahan alinea kedua dalam halaman II.26 | Pada tahun 2022, NTN Januari-Oktober 2022 mencapai 106,73 atau mengalami pertumbuhan sebesar 2,28 persen dibandingkan NTN tahun 2021 pada periode yang sama, yaitu 104,35. Dengan tren pertumbuhan tersebut, diharapkan NTN hingga akhir tahun 2022 mampu mencapai target yang telah ditetapkan senilai 104–106. |
| 61 | Perubahan Gambar 2.22 dalam halaman II.26 | Gambar 2.22<br>Perkembangan Nilai Tukar Nelayan<br> 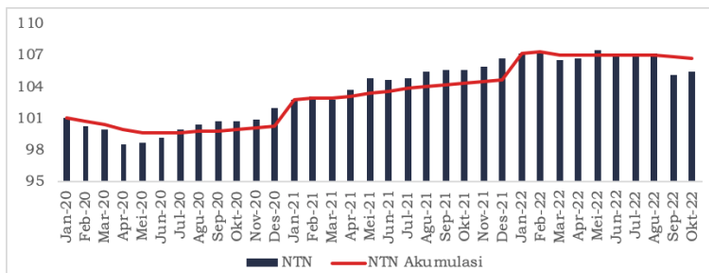 <br><br>Sumber: BPS dan KKP, November 2022 (tahun dasar 2018=100). |



SK No 168017 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 62 | Perubahan alinea kedua dalam halaman II.27 | Memasuki tahun 2022, Wilayah Jawa-Bali dihadapkan pada tantangan peningkatan kasus COVID-19 varian Omicron. Namun, dampak ekonomi akibat peningkatan kasus akibat varian Omicron diprakirakan tidak seberat dampak dari varian Delta. Wilayah Jawa-Bali diprakirakan dapat tumbuh sebesar 5,5 persen, sejalan dengan membaiknya ekspor, permintaan domestik, dan investasi. Peningkatan ekspor diprakirakan sejalan dengan membaiknya aktivitas perdagangan dunia, sementara peningkatan permintaan domestik didukung oleh adanya peningkatan keyakinan konsumen, pemulihan aktivitas wisatawan nusantara, meluasnya program vaksinasi, berlanjutnya program bantuan sosial, serta pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat. Peningkatan kinerja investasi didorong oleh berlanjutnya berbagai pembangunan PSN, di antaranya Tol Serang–Panimbang, Tol Serpong–Balaraja, Tol Jogja–Bawen, Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap, Kawasan Industri Terpadu Batang, dan Pelabuhan Patimban. Perbaikan kinerja perekonomian juga diharapkan turut mendorong penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,1–8,7 persen. Membaiknya kinerja perekonomian Wilayah Jawa-Bali tahun 2022 mampu menurunkan tingkat pengangguran menjadi 6,6 persen. |
| 63 | Perubahan alinea keempat dalam halaman II.27 | Pada 2022, pertumbuhan Wilayah Sumatera diprakirakan akan didorong oleh peningkatan permintaan komoditas primer, seiring dengan pemulihan ekonomi global dan proyeksi harga yang tetap tinggi untuk minyak kelapa sawit, karet olahan, minyak mentah, dan batu bara. Berlanjutnya proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan Tol Trans Sumatera, pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, serta realisasi investasi swasta, diprakirakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera sebesar 4,5 persen. Membaiknya kondisi perekonomian yang diiringi oleh perbaikan akurasi data dan perluasan program-program perlindungan sosial diharapkan dapat mencapai target penurunan kemiskinan hingga 9,0–9,5 persen di Sumatera. Prospek pertumbuhan ekonomi tersebut dapat menurunkan TPT Wilayah Sumatera menjadi 5,4 persen. |
| 64 | Perubahan alinea kedua dalam halaman II.28 | Wilayah Kalimantan pada tahun 2022 diprakirakan akan tumbuh sebesar 4,6 persen yang didorong oleh beroperasinya Pelabuhan Kijing, pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*food estate*), pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pembangunan kawasan industri hijau, dan berlanjutnya hilirisasi olahan tambang. Aktivitas ekonomi tersebut diharapkan berdampak secara inklusif sehingga menyumbang pada penurunan kemiskinan di Wilayah Kalimantan menjadi 5,2–5,8 persen. Prospek pertumbuhan ekonomi tersebut dapat menurunkan TPT Wilayah Kalimantan menjadi 5,0 persen. |
| 65 | Perubahan alinea keempat dalam halaman II.28 | Pada Tahun 2022, Wilayah Nusa Tenggara diprakirakan tumbuh sebesar 5,2 persen yang sejalan dengan arah pemulihan ekonomi. Ekspor tembaga dari Nusa Tenggara Barat (NTB) diprakirakan tetap solid seiring dengan tetap kuatnya permintaan dari Cina sebagai mitra dagang utama. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga sejalan dengan dilaksanakannya proyek investasi pemerintah dan swasta, antara lain proyek jalan tol, hotel di sejumlah destinasi wisata, revitalisasi Bandara Komodo, serta proyek hilirisasi pertambangan tembaga. Dampak dari berbagai kebijakan tersebut diharapkan dapat menyumbang pada penurunan kemiskinan ke kondisi awal sebelum pandemi yaitu di kisaran angka 15,0–15,9 persen. Seiring dengan pemulihan ekonomi di Wilayah Nusa Tenggara, TPT di wilayah tersebut pun menurun menjadi 3,1 persen. |



SK No 168018 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 66 | Perubahan alinea keenam dalam halaman II.28 | Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua pada tahun 2022 diprakirakan tumbuh masing-masing sebesar 6,9; 14,8; dan 7,3 persen. Pertumbuhan Sulawesi didorong oleh prospek permintaan negara mitra dagang utama, khususnya Cina, yang diprakirakan akan terus meningkat, baik untuk tembaga maupun besi baja. Hilirisasi di Morowali yang dapat meningkatkan nilai tambah dan produktivitas masih berlanjut seiring dengan konstruksi usaha industri logam dasar, serta barang logam bukan mesin dan peralatannya. Perbaikan konsumsi, peningkatan kinerja ekspor komoditas utama, serta rencana pengembangan lumbung ikan nasional diprakirakan mampu mendorong pertumbuhan Wilayah Maluku. Sementara, pertumbuhan ekonomi Papua diprakirakan akan didorong oleh perbaikan pada sektor pertambangan. Selain kegiatan ekonomi, Sulawesi, Maluku dan Papua merupakan wilayah-wilayah dengan tingkat pemutakhiran data yang masih rendah. Dengan adanya perbaikan akurasi data penyaluran bantuan pemerintah diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan masing-masing menjadi 9,2–9,8 persen, 12,0–12,5 persen, dan 23,5–24,0 persen. Berbagai perbaikan aktivitas ekonomi di Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua mampu menyerap tenaga kerja dan menurunkan TPT di wilayah tersebut masing-masing menjadi 4,1 persen, 5,7 persen, dan 3,4 persen. Untuk mendukung proses pemulihan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia, upaya strategis ketenagakerjaan diarahkan pada program peningkatan keahlian tenaga kerja melalui reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, penguatan sistem informasi pasar kerja, dan penguatan sistem perlindungan sosial pekerja. |
| 67 | Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.29 | Proses pemulihan ekonomi di tahun 2022, meskipun diawali dengan munculnya varian Omicron COVID-19, TPT menurun menjadi 5,86 persen pada tingkat nasional. TPT untuk wilayah Sumatera menurun menjadi 5,4 persen, Jawa-Bali 6,6 persen, Nusa Tenggara 3,1 persen, Kalimantan 5,0 persen, Sulawesi 4,1 persen, Maluku 5,7 persen, dan Papua 3,4 persen. |
| 68 | Perubahan Tabel 2.8 dalam halaman II.29 | Tabel 2.8<br>Pembangunan Wilayah Tahun 2021–2022 |

| Wilayah | 2021[a)] | *Outlook* 2022[b)] |
|---|---|---|
| Sumatera | | |
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 3,2 | 4,5[d)] |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 9,8[c)] | 9,0–9,5[d)] |
| Tingkat Pengangguran (%) | 5,6 | 5,4[a)] |
| Jawa-Bali | | |
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 3,5 | 5,5[d)] |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 9,0[c)] | 8,1–8,7[d)] |
| Tingkat Pengangguran (%) | 7,4 | 6,6[a)] |
| Nusa Tenggara | | |
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 2,4 | 5,2[d)] |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 17,2[c)] | 15,0–15,9[d)] |
| Tingkat Pengangguran (%) | 3,4 | 3,1[a)] |



SK No 168019 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 69 | Perubahan Tabel 2.8 dalam halaman II.30 | |

| Wilayah | 2021[a)] | *Outlook* 2022[b)] |
|---|---|---|
| Kalimantan | | |
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 3,2 | 4,6[d)] |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 5,8[c)] | 5,2–5,8[d)] |
| Tingkat Pengangguran (%) | 5,6 | 5,0[a)] |
| Sulawesi | | |
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,7 | 6,9[d)] |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 10,0[c)] | 9,2–9,8[d)] |
| Tingkat Pengangguran (%) | 5,0 | 4,1[a)] |
| Maluku | | |
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 9,4 | 14,8[d)] |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 12,2[c)] | 12,0–12,5[d)] |
| Tingkat Pengangguran (%) | 6,0 | 5,7[a)] |
| Papua | | |
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 10,3 | 7,3[d)] |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 26,1[c)] | 23,5–24,0 |
| Tingkat Pengangguran (%) | 3,8 | 3,4[a)] |

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas.

Keterangan: a) Angka realisasi; b) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas, November 2022; c) Perhitungan Bappenas berdasarkan Susenas September 2021; dan d) Terdapat penyesuaian angka *outlook* 2022 dari sasaran pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022 berdasarkan perkembangan perekonomian terkini hingga November 2022.

| | | |
|---|---|---|
| 70 | Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.31 | Dari sisi moneter-fiskal, normalisasi kebijakan moneter yang semakin agresif sebagai respons atas tingginya tekanan inflasi disertai kontraksi kebijakan fiskal sebagai upaya menurunkan defisit anggaran telah menyebabkan ketatnya likuiditas global. Kondisi tersebut menyebabkan aliran modal keluar (*capital outflow*) dari negara-negara berkembang (*emerging markets*) sehingga berdampak pada pelemahan nilai tukar mata uang di beberapa negara. Perkembangan pada akhir 2022, Bank Sentral Amerika Serikat telah menaikkan *The Fed Fund Rate* sebanyak 3,0 persen poin dan mengumumkan kemungkinan untuk menaikkan kembali suku bunga acuan lebih lanjut di tahun 2023. Sementara itu, Bank Sentral Eropa, Korea, Norwegia, Rusia, dan Selandia Baru sudah menaikkan suku bunga yang disebabkan oleh tekanan inflasi seiring dengan lonjakan harga energi dan pangan global, peningkatan aktivitas ekonomi, serta indikasi munculnya risiko stabilitas keuangan. |
| 71 | Perubahan alinea kelima dalam halaman II.31 | Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia diprakirakan mengalami perlambatan pada tahun 2022, setelah mengalami rebound di tahun 2021. International Monetary Fund (IMF, Oktober 2022) kembali menurunkan prakiraan pertumbuhan ekonomi global menjadi sebesar 3,2 persen dari 2,7 persen pada tahun 2022, dipicu oleh tekanan inflasi yang tinggi di berbagai negara, pengetatan kondisi keuangan global, serta perang Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan. Lembaga internasional lain, World Bank dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 masing-masing sebesar 2,9 dan 3,0 persen. |



SK No 168020 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 72 | Perubahan Gambar 2.23 dalam halaman II.31 | Gambar 2.23<br>Pertumbuhan Ekonomi Global (Persen, *yoy*)<br> 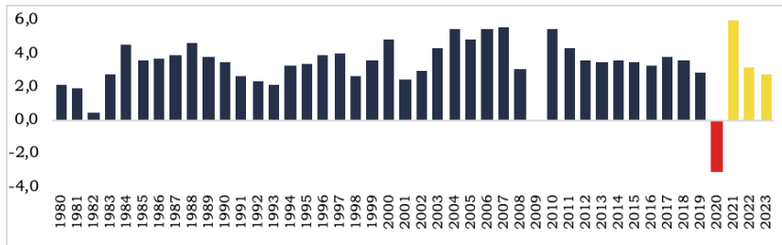 <br><br>Sumber: WEO IMF, Oktober 2022. |
| 73 | Perubahan alinea kelima dalam halaman II.32 | Selain itu, ekspor barang dan jasa Indonesia pada tahun 2023 diprakirakan tumbuh positif, namun tidak sebesar tahun 2022. Pertumbuhan ekspor barang diprakirakan lebih rendah pada tahun 2023 disebabkan oleh (a) pertumbuhan negara mitra yang diprakirakan positif namun lebih rendah dibandingkan tahun 2022; (b) pertumbuhan harga komoditas yang diprakirakan tidak setinggi di tahun 2022; dan (c) eskalasi politik Eropa Timur yang dapat mengganggu ketidakstabilan *supply-demand* beberapa komoditas penting seperti minyak bumi dan gandum. Sementara itu, risiko penyebaran COVID-19 masih akan memperlambat aktivitas perdagangan jasa yang sudah mulai pulih seiring pembukaan *border* di beberapa destinasi wisata. Pada tahun 2023, walaupun perekonomian negara mitra dagang diprakirakan semakin pulih seiring dengan tingkat vaksinasi yang semakin tinggi, besaran dampaknya terhadap peningkatan ekspor Indonesia masih dibayang-bayangi oleh proteksionisme yang mungkin akan tetap tinggi. Beberapa produk komoditas Indonesia diprakirakan masih akan mengalami hambatan ekspor di beberapa negara akibat isu lingkungan dan *sustainability* yang akan semakin meningkat. Sementara itu, kinerja ekspor non-komoditas masih terkendala berbagai permasalahan di dalam negeri, di antaranya terkait dengan isu produktivitas dan daya saing, akses bahan baku domestik dan impor, kemampuan inovasi, akses pembiayaan dan investasi, akses pasar dan *buyer*, serta integrasi program fasilitasi promosi ekspor antar kementerian/lembaga. |
| 74 | Perubahan alinea pertama dalam halaman II.33 | Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,5 persen pada tahun 2023. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan GNI per kapita (*Atlas Method*) menjadi US$4.760–4.770 pada tahun 2023, mampu mempertahankan posisi Indonesia pada kategori *upper-middle income countries*. |



SK No 168021 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 75 | Perubahan Tabel 2.9 dalam halaman II.33 | |

Tabel 2.9
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2023

| Uraian | 2021 | 2022 *Outlook* | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RPJMN | Sasaran |
| Perkiraan Besaran-Besaran Pokok | | | | |
| Pertumbuhan PDB (%, *yoy*) | 3,7 | 5,4 | 6,0–6,3 | 5,3–5,5 |
| Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (%, *yoy*): Akhir Periode | 1,87 | 5,7 | 2,8 | 2,0–4,0 |
| Neraca Pembayaran | | | | |
| Cadangan Devisa (US$ miliar) | 144,9 | 132,7[c)] | 146,8 | 129,8–134,4 |
| - dalam bulan impor | 8,0 | 5,6[c)] | 6,8 | 5,3–5,3 |
| Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB) | 0,3 | 0,3[c)] | (1,9) | 0,1–(0,0) |
| Keuangan Negara | | | | |
| Penerimaan Perpajakan (% PDB) | 9,1 | 10,3[a)] | 10,5–11,7 | 9,6[b)] |
| Keseimbangan Primer (% PDB) | (2,5) | (1,8)[a)] | 0,2–0,0 | (0,7)[b)] |
| Surplus/Defisit APBN (% PDB) | (4,6) | (3,9)[a)] | (1,6)–(1,7) | (2,8)[b)] |
| Stok Utang Pemerintah (% PDB) | 40,7 | 41,3[a)] | 28,9–29,6 | 40,6[b)] |
| PMTB/Investasi | | | | |
| Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%) | 3,8 | 4,1 | 7,2–7,8 | 6,1–6,3 |
| Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun) | 901,0 | 968,4 | 1294,1 | 1.200–1.300 |
| Nilai Realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan (Rp Triliun) | 325,4 | 352,5 | 573,2 | 396–420 |

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|

76 Perubahan Tabel 2.9 dalam halaman II.34

| Uraian | 2021 | 2022 *Outlook* | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RPJMN | Sasaran |
| Target Pembangunan | | | | |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 6,49 | 5,86[c)] | 4,0–4,6 | 5,3–6,0 |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 9,71 | 8,5–9,0 | 7,0–7,5 | 7,5–8,5 |
| Rasio Gini (nilai) | 0,381 | 0,376–0,378 | 0,374–0,377 | 0,375–0,378 |
| Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 72,29 | 72,73[d)] | 74,77[c)] | 73,31–73,49 |
| Penurunan Emisi GRK | 26,02 | 26,87 | 26,80 | 27,02 |
| Indikator Pembangunan | | | | |
| Nilai Tukar Petani (NTP) | 104,64 | 103–105 | 104 | 105–107 |
| Nilai Tukar Nelayan (NTN) | 104,69 | 104–106 | 106 | 107–108 |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, November 2022.

Keterangan: a) *Outlook* Kementerian Keuangan untuk Tahun 2022 berdasarkan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama oleh Kementerian Keuangan, b) Angka Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas, c) Angka realisasi 2022, dan d) Terdapat penyesuaian angka *outlook* 2022 dari sasaran pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022 berdasarkan perkembangan perekonomian terkini hingga November 2022.

77 Perubahan alinea pertama dalam Halaman II.34

Stabilitas makro ekonomi tahun 2023 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan pascapandemi COVID-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0–4,0 persen (*yoy*) dan nilai tukar Rupiah diprakirakan berada pada rentang Rp14.900,00–Rp15.400 per US$.

78 Perubahan alinea pertama dalam halaman II.36

Dari sisi pengeluaran (Tabel 2.10), pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diharapkan akan mampu tumbuh 5,3–5,5 persen. Investasi dan ekspor diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi tahun 2023 untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian Indonesia. Tren investasi hijau akan semakin menguat pada tahun 2023 seiring dengan adanya komitmen global untuk mencapai pembangunan rendah karbon. Pemulihan ekonomi hijau pasca COVID-19 mulai menjadi arah kebijakan di berbagai negara. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, investasi (PMTB) diprakirakan tumbuh sebesar 6,1–6,3 persen, dengan target realisasi PMA dan PMDN sebesar Rp1.200–1.300 triliun pada tahun 2023. Untuk mencapai target tersebut, strategi akan diarahkan melalui (i) peningkatan investasi skala besar yang menyerap tenaga kerja banyak; (ii) peningkatan investasi pada sektor industri pengolahan; dan (iii) pengintegrasian sistem perizinan di tingkat pusat pada sistem *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA) dan implementasi sistem perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) di daerah.



SK No 168023 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 79 | Perubahan Tabel 2.10 dalam halaman II.36 | |

Tabel 2.10
Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran Tahun 2023 (Persen, *yoy*)

| Uraian | RPJMN[a)] | Sasaran 2023[b)] | Sumber Pertumbuhan |
|---|---|---|---|
| Pertumbuhan PDB | 6,0–6,3 | 5,3–5,5 | 5,3–5,5 |
| Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT | 5,7–5,9 | 5,2–5,4 | 2,8–2,9 |
| Konsumsi Pemerintah | 4,8–5,1 | 0,8–1,3 | 0,1–0,1[c)] |
| Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) | 7,2–7,8 | 6,1–6,3 | 1,9–2,0 |
| Ekspor Barang dan Jasa | 5,3–5,6 | 5,3–6,6 | 1,4–1,7 |
| Impor Barang dan Jasa | 5,0–5,1 | 7,1–7,5 | 1,5–1,6 |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, November 2022.

Keterangan: a) RPJMN Tahun 2020–2024; b) Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu, 2022, c) Perbedaan angka desimal dalam *range* terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma.

| | | |
|---|---|---|
| 80 | Perubahan alinea kedua dalam halaman II.36 | Konsumsi masyarakat juga diprakirakan tumbuh positif mencapai 5,2–5,4 persen, didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat seiring dengan terkendalinya penanganan pandemi COVID-19. Peningkatan aktivitas masyarakat tersebut akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Tingkat inflasi yang tetap terkendali juga mendorong masyarakat untuk melakukan aktivitas konsumsi. Selain itu, membaiknya perekonomian juga mendorong tumbuh positifnya konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah diprakirakan tumbuh pada kisaran 0,8–1,3 persen, sehingga tetap dapat memberi dorongan pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan konsumsi pemerintah didukung oleh kebijakan fiskal yang akomodatif, meski di saat yang bersamaan defisit fiskal akan kembali dijaga di bawah 3 persen terhadap PDB. |
| 81 | Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.36 | Ekspor barang dan jasa diprakirakan akan tetap tumbuh tinggi pada kisaran 5,3–6,6 persen. Pemulihan permintaan global serta optimisme pemulihan ekonomi yang terus berlanjut menjadi faktor pendorong tetap tingginya pertumbuhan ekspor. Sementara itu, impor barang dan jasa diprakirakan akan tumbuh 7,1–7,5 persen, mencerminkan aktivitas ekonomi domestik yang menguat. Hal ini didorong oleh peningkatan kebutuhan bahan baku/penolong untuk industri pengolahan, barang modal untuk investasi, serta konsumsi dalam negeri. |



SK No 168024 A

**PRESIDEN**
**REPUBLIK INDONESIA**

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 82 | Perubahan Tabel 2.11 dalam halaman II.37 | |

Tabel 2.11
Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2023 (Persen, *yoy*)

| Uraian | RPJMN[a)] | Sasaran 2023[b)] | Sumber Pertumbuhan |
|---|---|---|---|
| Pertumbuhan PDB | 6,0–6,3 | 5,3–5,5 | 5,3–5,5 |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 3,9–4,0 | 3,2–3,6 | 0,4–0,4[c)] |
| Pertambangan dan Penggalian | 2,0–2,1 | 3,0–3,2 | 0,2–0,2[c)] |
| Industri Pengolahan | 7,1–7,5 | 5,3–5,6 | 1,1–1,1[c)] |
| Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih | 5,5–6,0 | 5,6–5,9 | 0,1–0,1[c)] |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 4,7–4,8 | 3,8–4,0 | 0,0–0,0[c)] |
| Konstruksi | 6,4–6,7 | 6,6–6,7 | 0,6–0,6[c)] |
| Perdagangan besar dan eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6,2–6,7 | 5,0–5,4 | 0,7–0,7[c)] |
| Transportasi dan Pergudangan | 7,5–7,9 | 7,8–8,0 | 0,3–0,3[c)] |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 6,5–6,7 | 5,5–6,0 | 0,2–0,2[c)] |
| Informasi dan Komunikasi | 8,9–9,4 | 7,6–7,9 | 0,5–0,5[c)] |
| Jasa Keuangan | 7,1–7,7 | 3,4–3,6 | 0,1–0,1[c)] |
| *Real Estate* | 5,3–5,3 | 3,4–3,8 | 0,1–0,1[c)] |
| Jasa Perusahaan | 8,5–8,7 | 4,7–4,9 | 0,1–0,1[c)] |
| Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib | 5,2–5,5 | 2,8–3,0 | 0,1–0,1[c)] |
| Jasa Pendidikan | 5,5–5,6 | 2,5–2,8 | 0,1–0,1[c)] |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 8,4–8,5 | 8,7–8,9 | 0,1–0,1[c)] |
| Jasa Lainnya | 9,6–9,6 | 7,6–7,7 | 0,1–0,1[c)] |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, November 2022

Keterangan: a) RPJMN Tahun 2020–2024; b) Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu, 2022; dan c) Perbedaan angka desimal dalam *range* terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma.

| | | |
|---|---|---|
| 83 | Perubahan alinea pertama dalam halaman II.37 dan alinea pertama dalam halaman II.38 | Di sisi lapangan usaha, subsektor industri diprakirakan dapat mengalami pemulihan secara bertahap, baik dari sisi rantai pasok dan akses pasar seiring dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi global dan domestik. Pada tahun 2023, sektor industri pengolahan diprakirakan tumbuh sebesar 5,3–5,6 persen. Faktor-faktor pendorong pertumbuhan industri pengolahan pada tahun 2023 antara lain (i) pemulihan industri makanan dan minuman seiring dengan peningkatan mobilitas dan pemulihan daya beli masyarakat; (ii) pemulihan daya beli masyarakat terutama untuk produk makanan, minuman, tekstil dan pakaian jadi, serta produk-produk tahan lama (*durable*); (iii) peningkatan permintaan terhadap produk industri pengolahan, baik permintaan dalam negeri maupun luar negeri; (iv) dukungan belanja pemerintah dan pemerintah daerah untuk produk dalam negeri, termasuk untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai; (v) peningkatan utilisasi produksi; (vi) kestabilan rantai pasok untuk menjamin ketersediaan bahan baku; (vii) operasionalisasi Kawasan Industri (KI) dan *Smelter*; (viii) peningkatan efisiensi sejalan dengan adopsi teknologi dalam proses produksi; (ix) penguatan rantai pasok dan produk industri halal; serta (x) peningkatan penerapan ekonomi sirkular sebagai bagian dari transisi penerapan industri hijau. |

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 84 | Perubahan alinea kedua dalam halaman II.38 | Sektor pertanian yang mampu bertahan dan tumbuh positif selama pandemi COVID-19, diprakirakan akan terakselerasi dengan pertumbuhan pada kisaran 3,2–3,6 persen. Pertumbuhan sektor pertanian didorong oleh berlanjutnya kebijakan pengembangan *Food Estate* (FE) serta program Gerakan 3 Kali Ekspor (Gratieks) Pertanian dalam upaya meningkatkan investasi dan ekspor produk sektor pertanian. Sementara itu, sektor konstruksi diprakirakan akan tumbuh tinggi pada kisaran 6,6–6,7 persen, didukung oleh pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara pada 2023 dan berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas lainnya. Sektor pertambangan akan meningkat pada kisaran 3,0–3,2 persen, seiring dengan peningkatan produksi pertambangan non–migas dan operasionalisasi KI yang memerlukan logam dasar. Sektor perdagangan akan pulih dan diprakirakan tumbuh pada kisaran 5,0–5,4 persen, didorong oleh semakin pulihnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat serta semakin kuatnya peran UMKM. Sementara itu, sektor informasi dan komunikasi diprakirakan akan tumbuh sebesar 7,6–7,9 persen, didorong oleh tren digitalisasi, peningkatan konsumsi digital, serta peningkatan kebutuhan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). |
| 85 | Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.38 | Peningkatan produktivitas di sektor pariwisata akan didorong oleh pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sejalan dengan pemulihan mobilitas masyarakat. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum akan meningkat pada kisaran 5,5–6,0 persen, didukung oleh pelaksanaan *event* dan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE) internasional, beserta pelaksanaan festival nasional sebagai pendorong kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Penambahan jalur dan frekuensi penerbangan, dan perbaikan kebijakan visa termasuk untuk bisnis/investor dan MICE juga diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. |
| 86 | Perubahan alinea kedua dalam halaman II.39 | Peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan dilaksanakan melalui strategi (i) perluasan penerapan protokol kesehatan dan standar layanan yang baik; (ii) pengembangan pola perjalanan yang mudah diakses; (iii) penguatan rantai pasok dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif; (iv) peningkatan diversifikasi atraksi di 5 Destinasi Super Prioritas dengan dukungan investasi pariwisata, *event* dan MICE; (v) penguatan desa wisata melalui penguatan narasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan diversifikasi produk dan layanan; (vi) percepatan digitalisasi usaha dan produk kreatif; (vii) *scaling-up start-up* ekonomi kreatif dan digital yang didukung akses pembiayaan berbasis HKI; (viii) *upskilling* dan *reskilling* SDM pariwisata serta ekonomi kreatif dan digital; (ix) penguatan ekspor gastronomi melalui "*Indonesia Spice Up The World*"; (x) perluasan Gerakan Bangga Buatan Indonesia; (xi) pengembangan kota/klaster kreatif; (xii) penguatan ekosistem perfilman; serta (xii) pengembangan program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI). |
| 87 | Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.39 | Pada tahun 2023, ketidakpastian global diprakirakan akan berangsur-angsur membaik dan kondusif seiring dengan meredanya ketegangan isu geopolitik dan progres transisi pandemi COVID-19 menuju fase endemi. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong aktivitas perdagangan internasional serta tingkat likuiditas global yang lebih tinggi. Sektor pariwisata akan semakin menggeliat didorong pelonggaran yang terus dilakukan termasuk berakhirnya penerapan protokol kesehatan, yang didukung kuat oleh jumlah penduduk yang divaksinasi lengkap telah mencapai target. Perkembangan berbagai proyek strategis juga diharapkan memperkuat perkembangan daya saing nasional terutama dalam mendorong integrasi |



SK No 168026 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | ekonomi domestik. Tingkat perdagangan dan investasi juga diprakirakan akan meningkat seiring dengan kebijakan hilirisasi ekspor yang semakin meningkat serta kondisi pasar keuangan yang kondusif dan fundamental ekonomi yang semakin kuat sehingga akan semakin banyak mengundang investor. Lebih lanjut, reformasi birokrasi dan reformasi kelembagaan yang terus didorong pemerintah akan semakin memantik perkembangan investasi yang lebih tinggi di Indonesia. |
| 88 | Perubahan Tabel 2.12 dalam halaman II.40 | Tabel 2.12<br>Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2023 (US$ Miliar) |

| Uraian | RPJMN[1] | Sasaran[2] |
|---|---|---|
| Neraca Pembayaran Secara Keseluruhan | - | (2,9)–1,7 |
| Neraca Transaksi Berjalan | (30,0) | 1,9–(0,2) |
| (% PDB) | (1,9) | 0,1–(0,0) |
| Barang | 7,5 | 40,4–44,9 |
| Jasa-jasa | (4,9) | (15,7)–(15,1) |
| Pendapatan Primer | (40,6) | (33,4)–(31,7) |
| Pendapatan Sekunder | 8,0 | 6,1–6,3 |
| Neraca Transaksi Modal dan Finansial | 38,0 | (3,3)–3,5 |
| Investasi Langsung | 27,4 | 14,0–15,0 |
| Investasi Portofolio | 20,0 | (8,0)–(4,1) |
| Investasi Lainnya | (9,5) | (9,3)–(7,4) |
| Posisi Cadangan Devisa | 146,8 | 129,8–134,4 |
| - Dalam bulan impor | 6,8 | 5,3–5,3 |

Sumber: 1) RPJMN Tahun 2020–2024; 2) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas, November 2022.
Catatan: Angka dalam kurung "(x,x)" bernilai negatif.

| | | |
|---|---|---|
| 89 | Perubahan alinea pertama dalam halaman II.40 | Dengan kondisi tersebut, Indonesia diprakirakan akan mengalami stabilitas eksternal yang relatif tetap kuat pada tahun 2023 di tengah masih tingginya ketidakpastian dunia. Neraca secara keseluruhan diprakirakan mencapai US$(2,9)–1,7 miliar. Capaian tersebut akan ditopang oleh neraca transaksi berjalan yang akan mengalami sedikit penurunan menjadi sekitar US$1,9–(0,2) miliar atau setara dengan 0,1–(0,0) persen dari PDB. Sementara itu, transaksi modal dan finansial akan mencapai kisaran US$(3,3)–3,5 miliar. Perkembangan tersebut kemudian akan mendorong cadangan devisa mencapai sekitar US$129,8–134,4 miliar yang cukup untuk membiayai 5,3–5,3 bulan impor serta berada di atas standar kecukupan internasional. |
| 90 | Perubahan alinea kedua dalam halaman II.40 | Postur makro fiskal 2023 diarahkan konsolidatif dengan mempertimbangkan defisit kembali pada maksimal 3 persen PDB, namun pelaksanaannya tetap akomodatif mendukung pemantapan *recovery* dan transformasi ekonomi. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, kebijakan fiskal tahun 2023 diuraikan sebagai berikut |
| 91 | Perubahan poin (i) alinea ketiga dalam halaman II.40 | (i) Pendapatan Negara dan Hibah<br>Pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai 11,7 persen dari PDB, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 9,6 persen dari PDB dan PNBP sebesar 2,1 persen dari PDB. |



SK No 168027 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 92 | Perubahan poin (ii) alinea kedua dalam halaman II.41 | (ii) Belanja Negara<br>Pada tahun 2023, belanja negara ditargetkan mencapai 14,5 persen PDB, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 10,7 persen PDB dan TKD sebesar 3,9 persen PDB. Kebijakan belanja negara diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja *(spending better)* agar lebih efisien dan produktif, yang dilaksanakan melalui<br>(1) mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia yang terampil, produktif, dan berdaya saing, melalui: (a) peningkatan kualitas pendidikan, (b) transformasi sistem kesehatan, dan (c) akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif;<br>(2) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi;<br>(3) meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program bansos dan subsidi;<br>(4) meningkatkan efektivitas implementasi reformasi birokrasi;<br>(5) melanjutkan efisiensi belanja barang yang bersifat nonprioritas;<br>(6) meningkatkan sinkronisasi dan penajaman belanja bantuan pemerintah;<br>(7) mengantisipasi dan memitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN, bencana, dan kegiatan mendesak lainnya;<br>(8) memperkuat keterkaitan antara berbagai program prioritas dalam RKP dengan kebijakan di belanja pemerintah pusat;<br>(9) meningkatkan kualitas layanan publik di daerah dan untuk mengatasi kesenjangan kemampuan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah dan daerah dalam melaksanakan pembangunan;<br>(10) meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui pengurangan *vertical imbalance* serta upaya penanganan eksternalitas negatif dan perbaikan lingkungan antara lain melalui penguatan kebijakan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit. |
| 93 | Perubahan Tabel 2.13 dalam halaman II.42 | Tabel 2.13<br>Sasaran Fiskal Tahun 2023 (Persen PDB) |

| Uraian | RPJMN[a)] | Sasaran[b)] |
|---|---|---|
| Pendapatan Negara dan Hibah | 12,8–14,1 | 11,7 |
| Penerimaan Perpajakan | 10,5–11,7 | 9,6 |
| PNBP | 2,2–2,3 | 2,1 |
| Belanja Negara | 14,3–15,8 | 14,5 |
| Belanja Pemerintah Pusat | 9,4–10,7 | 10,7 |
| TKD | 4,9–5,1 | 3,9 |
| Keseimbangan Primer | 0,2–0,0 | (0,7) |
| Surplus/Defisit | (1,6)–(1,7) | (2,8) |
| Rasio Utang | 28,9–29,6 | 40,6[c)] |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2022.

Keterangan: a) RPJMN Tahun 2020–2024; b) Laporan Panitia Kerja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya; c) Angka Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas.

Catatan: Angka dalam kurung "(x,x)" bernilai negatif.



SK No 168028 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 94 | Perubahan alinea kedua dalam halaman II.42 | Di tengah risiko perlambatan ekonomi dunia akibat tingginya inflasi, kebijakan pengendalian inflasi tahun 2023 diarahkan pada upaya menjaga 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi) yang mendukung upaya peningkatan daya saing perekonomian pascapandemi COVID-19. |
| 95 | Perubahan alinea kedua dalam halaman II.43 | Selanjutnya, untuk mitigasi risiko peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global yang berasal dari normalisasi kebijakan moneter The Fed dan sejumlah negara Advanced Economies (AEs) pada tahun 2023, maka kebijakan nilai tukar Rupiah diarahkan pada bauran kebijakan moneter yang selaras dengan kebijakan fiskal, makroprudensial, sektor keuangan, dan sektor riil (terutama ekspor). Bauran kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dilakukan dengan cara (i) memperkuat *triple intervention* di pasar valas; (ii) memperkuat strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas *stance* kebijakan moneter akomodatif; (iii) menjaga inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil; (iv) menetapkan tingkat suku bunga BI7DRR yang optimal untuk menjangkar ekspektasi inflasi dan mendukung pemulihan ekonomi nasional; (v) mendorong akselerasi transmisi kebijakan moneter melalui akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2025; (vi) pengembangan ekonomi keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi keuangan syariah; (vii) mendorong percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional; serta (viii) memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerja sama *cross border payment connectivity,* fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas. Upaya-upaya tersebut ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan mekanisme pasar. |
| 96 | Perubahan alinea keenam dalam halaman II.43 | Prospek pemulihan ekonomi tahun 2023 yang relatif positif di seluruh wilayah diprakirakan dapat menurunkan TPT wilayah Sumatera pada kisaran 4,6–5,1 persen, Jawa-Bali 5,9–6,3 persen, Nusa Tenggara 2,5–2,8 persen, Kalimantan 4,2–4,4 persen, Sulawesi 3,7–4,0 persen, Maluku 5,1–5,3 persen, dan Papua 2,7–3,2 persen. |
| 97 | Perubahan alinea keenam dalam halaman II.44 dan alinea pertama halaman II.45 | Untuk mengantisipasi dan mendorong upaya pemulihan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19, terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah guna optimalisasi pertumbuhan perekonomian yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga diharapkan dapat mendorong pengurangan angka rasio gini ke depannya sesuai target yang diproyeksikan. Intervensi kebijakan afirmasi terhadap kelompok berpenghasilan 40 persen ke bawah diwujudkan melalui (1) menyempurnakan pengembangan registrasi sosial-ekonomi di provinsi masing-masing; (2) peningkatan akurasi penargetan bantuan sosial; (3) integrasi dan penyederhanaan program serta penyaluran bantuan sosial secara digital, cepat, dan responsif kebencanaan; (4) penguatan kelembagaan pelatihan vokasi di provinsi disertai pemenuhan kebutuhan pasar kerja melalui perluasan lapangan kerja; (5) penguatan permodalan bagi pelaku UMKM sebagai salah satu penggerak utama ekonomi kelompok menengah; (6) penguatan kebijakan fiskal untuk redistribusi yang merata, yang utamanya ditujukan untuk kelompok berpenghasilan tinggi; (7) peningkatan daya beli masyarakat terutama kelas menengah ke bawah melalui reformasi perlindungan sosial; dan (8) reformasi agraria bagi petani yang tidak memiliki lahan di kabupaten/kota. |



SK No 168029 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 98 | Perubahan alinea kelima dalam halaman II.46 | Pada tahun 2023, NTP dijaga pada kisaran 105-107. Dengan nilai NTP tersebut, menunjukkan adanya kestabilan kesejahteraan petani. Kebijakan untuk menjaga NTP pada nilai 105-107 diarahkan pada kegiatan-kegiatan produktivitas pangan dan pertanian serta penciptaan nilai tambah pertanian melalui (1) jaminan ketersediaan sarana produksi peningkatan Indeks Pertanaman (IP); (2) penguatan peran penyuluh pertanian dan modernisasi pertanian (pertanian presisi, pertanian digital); (3) pembentukan korporasi petani dan nelayan; (4) *food estate* (kawasan sentra produksi pangan); (5) efisiensi distribusi pangan melalui penguatan konektivitas produksi (jalan usaha tani) dan sistem logistik pangan; (6) pertanian regeneratif, rendah karbon, dan berketahanan iklim; (7) standardisasi proses dan produk pertanian serta penyediaan sarana produksi karantina; (8) transformasi sistem pangan lokal dan perkotaan serta pengembangan pertanian keluarga; (9) percepatan transformasi platform *e-commerce* pertanian/rantai pasok *online*; (10) pengolahan primer produksi pangan dan pertanian, dan regenerasi petani; serta (11) revitalisasi kesehatan lahan dengan pengembangan teknologi pemupukan organik berasal dari bahan nabati, hewani darat dan laut. |
| 99 | Perubahan alinea kedua dalam halaman II.47 | Pada tahun 2023, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI) diprakirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Akselerasi pertumbuhan ekonomi KTI merupakan kontribusi dari membaiknya kinerja pertambangan, dampak program hilirisasi pertambangan yang mampu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, mulai beroperasinya Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru, operasionalisasi smelter baru, implementasi program lumbung ikan nasional, serta kinerja *food estate*. Harga komoditas internasional, khususnya baja dan besi yang diproyeksikan akan tetap tinggi, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi KTI. Pertumbuhan ekonomi di Wilayah KTI diprakirakan sebesar 6,4–6,9 persen, sementara di KBI pertumbuhan diprakirakan sebesar 5,0–5,2 persen. |
| 100 | Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.47 | Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara pada 2023 diprakirakan mencapai 5,8–6,2 persen, didorong oleh peningkatan produksi tembaga, peningkatan ekspor konsentrat tembaga sebagai hasil program hilirisasi, serta peningkatan sektor pariwisata yang didukung oleh beroperasinya KEK Mandalika, terminal *multipurpose* Labuan Bajo, serta pembangunan infrastruktur Bandara Komodo. Sejalan dengan target pertumbuhan tersebut, tingkat kemiskinan diprakirakan akan menurun hingga 13,8–14,8 persen dan tingkat pengangguran menurun hingga 2,5–2,8 persen. |
| 101 | Perubahan alinea keempat dalam halaman II.47 | Ekonomi Wilayah Kalimantan diprakirakan tumbuh 5,2–5,5 persen. Pertumbuhan wilayah ini didukung oleh keberlanjutan proyek pengembangan kawasan sentra produksi pangan (*food estate*) Kalimantan Tengah, pengembangan kawasan industri hijau, proyek pembangunan infrastruktur pendukung IKN, operasionalisasi Pelabuhan Kijing, dan pengembangan Kawasan Industri yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di antaranya KI Landak, KI Ketapang, KI Jorong, KI Tanah Kuning, serta proyek hilirisasi sektor energi termasuk biodiesel. Peningkatan ekspor minyak kelapa sawit, kayu, dan batu bara seiring dengan pemulihan ekonomi global diprakirakan juga memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Kalimantan. Kegiatan ekonomi ini diprakirakan dapat juga menyumbang pada penurunan angka kemiskinan hingga di angka 4,3–5,1 persen. Keberlanjutan proyek di Wilayah Kalimantan diprakirakan akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja |



SK No 168030 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | baru di wilayah tersebut dan mampu menurunkan TPT hingga pada kisaran 4,2–4,4 persen. |
| 102 | Perubahan alinea kelima dalam halaman II.47 | Pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sulawesi pada tahun 2023 diproyeksikan mencapai 7,4–8,0 persen. Selanjutnya, TPT diproyeksikan menurun pada kisaran 3,7–4,0 persen. Mulai beroperasinya KI Bantaeng, KI Morowali, KI Konawe, KEK Palu, KEK Likupang, KEK Bitung, operasionalisasi smelter, dan peningkatan harga komoditas baja dan besi serta produk turunannya, merupakan faktor yang mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka pengangguran. Selain dari aktivitas kegiatan ekonomi, perbaikan data dan perluasan cakupan registrasi sosial ekonomi untuk meningkatkan akurasi penargetan program-program perlindungan sosial diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi 8,3–8,8 persen. |
| 103 | Perubahan alinea pertama dalam halaman II.48 | Implementasi program lumbung ikan nasional, peningkatan produksi feronikel, dan pembangunan pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik diprakirakan akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi diprakirakan mencapai sebesar 10,9-11,8 persen. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut ditargetkan dapat menyumbang pada penurunan angka kemiskinan menjadi sebesar 10,6–11,4 persen dan menurunkan angka TPT pada kisaran 5,1–5,3 persen. |
| 104 | Perubahan alinea kedua dalam halaman II.48 | Pertumbuhan ekonomi Papua tahun 2023 diprakirakan akan mencapai 7,2–7,8 persen, didorong oleh perbaikan kinerja dan produktivitas pertambangan tembaga dan emas. Peningkatan investasi seiring dengan implementasi Proyek Strategis Nasional, di antaranya KEK Sorong, KI Teluk Bintuni, pembangunan Bandara Siboru Fakfak, Bandara Nabire Baru dan Pelabuhan Internasional Seget di Kabupaten Sorong juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Papua. Sejalan dengan hal tersebut, perbaikan penyaluran program-program perlindungan sosial yang diiringi oleh perbaikan infrastruktur dasar diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di angka 22,0–23,6 persen. Penguatan perekonomian di Papua diprakirakan mampu menurunkan TPT di wilayah tersebut hingga pada kisaran 2,7–3,2 persen. |
| 105 | Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.48 | Meskipun pertumbuhan KBI diproyeksikan lebih rendah dibandingkan KTI, pertumbuhan tersebut tetap menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi karena kontribusinya yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Sumatera diprakirakan akan didorong oleh adanya peningkatan volume ekspor seiring dengan tetap tingginya harga komoditas CPO dan batu bara. Hal ini didukung oleh adanya komitmen perjanjian perdagangan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang berpotensi untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan kerja sama Indonesia dengan Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Beroperasinya beberapa KI/KEK, berlanjutnya pembangunan proyek jalan Tol Trans Sumatera, dan peningkatan investasi swasta dalam proses hilirisasi industri, juga akan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Sumatera. Pertumbuhan ekonomi diprakirakan tumbuh sebesar 4,5–4,8 persen pada tahun 2023. Aktivitas ekonomi ini diharapkan dapat juga berdampak secara inklusif untuk seluruh penduduk terutama penduduk miskin dan rentan sehingga dapat menyumbang pada penurunan kemiskinan sebesar 8,2–8,6 persen. TPT di Wilayah Sumatera pun diprakirakan menurun menjadi 4,6–5,1 persen. |



SK No 168031 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 106 | Perubahan alinea keempat dalam halaman II.48 | Sementara itu, ekonomi Wilayah Jawa-Bali pada tahun 2023 diprakirakan tumbuh 5,2–5,4 persen. Pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa ditopang oleh beberapa faktor, termasuk dilanjutkannya proyek infrastruktur strategi yang mendorong peningkatan investasi, seperti operasionalisasi KI Terpadu Batang, pengembangan KEK Lido, KEK Gresik, dan KEK Singhasari. Peningkatan efisiensi sistem logistik mendorong meningkatnya permintaan barang dan jasa di pasar domestik maupun pasar dunia. Perekonomian di Bali diprakirakan akan mulai pulih perlahan, didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan relaksasi perjalanan internasional seiring dengan meredanya pandemi COVID-19. Peningkatan aktivitas ekonomi yang terus didukung oleh perbaikan dan penguatan program-program afirmasi diharapkan dapat menurunkan kemiskinan di Wilayah Jawa-Bali menjadi 6,9–7,6 persen. Peningkatan aktivitas ekonomi ini pun diprakirakan akan mampu menurunkan TPT di Wilayah Jawa-Bali hingga pada kisaran 5,9–6,3 persen. Untuk mendukung proses pemulihan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia, upaya strategis ketenagakerjaan diarahkan pada program peningkatan keahlian tenaga kerja melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, pembangunan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi, dan penguatan sistem perlindungan sosial bagi para pekerja. |



SK No 168032 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 107 | Perubahan Tabel 2.14 dalam halaman II.49 | |

Tabel 2.14
Sasaran Pembangunan Wilayah Tahun 2023

| Wilayah | RPJMN[a] | 2023[b] |
|---|---|---|
| Sumatera | | |
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6,0 | 4,5–4,8 |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 7,76[c] | 8,2–8,6 |
| Tingkat Pengangguran (%) | 3,6 | 4,6–5,1 |
| Jawa-Bali | | |
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,9 | 5,2–5,4 |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 6,50[c] | 6,9–7,6 |
| Tingkat Pengangguran (%) | 4,1 | 5,9–6,3 |
| Nusa Tenggara | | |
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6,0 | 5,8–6,2 |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 12,75[c] | 13,8–14,8 |
| Tingkat Pengangguran (%) | 2,1 | 2,5–2,8 |
| Kalimantan | | |
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6,7 | 5,2–5,5 |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 3,72[c] | 4,3–5,1 |
| Tingkat Pengangguran (%) | 3,4 | 4,2–4,4 |
| Sulawesi | | |
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 7,6 | 7,4–8,0 |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 7,74[c] | 8,3–8,8 |
| Tingkat Pengangguran (%) | 3,5 | 3,7–4,0 |
| Maluku | | |
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 7,3 | 10,9–11,8 |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 9,45[c] | 10,6–11,4 |
| Tingkat Pengangguran (%) | 4,6 | 5,1–5,3 |
| Papua | | |
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6,6 | 7,2–7,8 |
| Tingkat Kemiskinan (%) | 18,67[c] | 22,0–23,6 |
| Tingkat Pengangguran (%) | 2,5 | 2,7–3,2 |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, November 2022.

Keterangan: a) Pertumbuhan ekonomi merupakan rata-rata tahun 2020–2024, sementara tingkat pengangguran merupakan target 2024 pada RPJMN Tahun 2020–2024; b) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas, November 2022; c) *Trajectory* RPJMN Tahun 2020-2024 di tahun 2023.



SK No 168033 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|

108 Perubahan Gambar 2.24 dalam halaman II.50

Gambar 2.24
Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi Tahun 2023

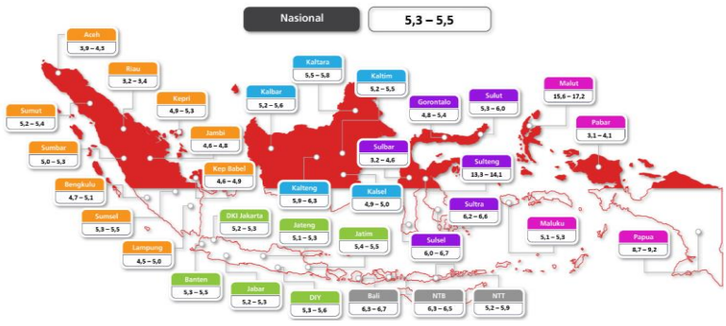


Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, November 2022.

109 Perubahan alinea pertama dalam halaman II.50

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2023, dibutuhkan investasi Rp6.591,6–6.702,9 triliun, yang bersumber dari investasi pemerintah, BUMN, dan swasta. Dari total kebutuhan investasi, sekitar 87,1–88,3 persen dipenuhi oleh dunia usaha swasta dan masyarakat. Sementara itu, investasi pemerintah dan BUMN diprakirakan akan berkontribusi masing-masing pada kisaran 5,0–5,1 dan 6,7–7,8 persen dari total investasi yang dibutuhkan.

110 Perubahan Tabel 2.15 dalam halaman II.50

Tabel 2.15
Kebutuhan Investasi Tahun 2023 (Persen)

| Uraian | *Share* (Persen) | Nilai (triliun) |
|---|---|---|
| (1) Investasi Pemerintah | 5,0–5,1 | 329,4–341,3 |
| (2) Investasi BUMN | 6,7–7,8 | 441,1–525,0 |
| (3) Investasi Swasta | 88,3–87,1 | 5.821,1–5.836,6 |
| Total Kebutuhan Investasi | | 6.591,6–6.702,9 |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, November 2022.

111 Perubahan alinea pertama dalam halaman II.51

Untuk memenuhi kebutuhan investasi pada tahun 2023, dibutuhkan sumber pembiayaan yang dapat diperoleh dari instrumen pembiayaan investasi seperti kredit perbankan, penerbitan saham, penerbitan obligasi, dana internal BUMN, serta dana internal masyarakat. Dana internal masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam sumber pembiayaan dalam negeri, yaitu sebesar 75,7–72,8 persen dari total pembiayaan investasi.

112 Perubahan Tabel 2.16 dalam halaman II.51

Tabel 2.16
Sumber Pembiayaan Investasi Tahun 2023 (Persen)

| Uraian | *Share* (Persen) |
|---|---|
| Kredit Perbankan | 6,4–7,2 |
| Penerbitan Saham | 1,2–1,2 |
| Penerbitan Obligasi | 12,3–13,7 |
| Dana Internal BUMN | 4,4–5,2 |
| Dana Internal Masyarakat | 75,7–72,8 |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, November 2022.



SK No 168034 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 113 | Perubahan alinea kedua dalam halaman II.52 | Penjelasan rinci terhadap masing-masing Proyek Investasi BUMN ini dituangkan dalam dokumen Rencana Investasi Prioritas BUMN Tahun 2023 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. |
| 114 | Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.52 | Tahun 2023 merupakan tahun untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dalam mendorong transformasi ekonomi. Akselerasi pertumbuhan ekonomi salah satunya didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian, dengan keberlanjutan proyek prioritas BUMN maupun dengan adanya proyek prioritas BUMN baru, dan juga didorong oleh kebijakan strategis baik dari sisi pemerintah maupun BUMN, diharapkan investasi BUMN diproyeksikan dapat berkontribusi lebih tinggi sebesar Rp441,0-Rp525,0 triliun. |
| 115 | Perubahan alinea keempat dalam halaman II.52 | Saat ini, terdapat 119 proyek investasi BUMN yang mendukung *Major Project* pada RKP Tahun 2023 berasal dari kelanjutan proyek pada RKP Tahun 2022 dan penambahan usulan proyek dari BUMN dan Kementerian BUMN terkait, dengan total jumlah BUMN yang terlibat sebanyak 61 BUMN dan total nilai investasi sebesar Rp290,51 triliun. Proyek Prioritas BUMN juga mendukung pencapaian 12 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) yaitu: Tanpa Kemiskinan; Tanpa Kelaparan; Kehidupan Sehat dan Sejahtera; Air Bersih dan Sanitasi Layak; Energi Bersih dan Terjangkau; Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Berkurangnya Kesenjangan; Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; Ekosistem Daratan; serta Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. |
| 116 | Perubahan Gambar 2.25 dalam halaman II.52 | Gambar 2.25<br>Gambaran Umum Proyek Prioritas BUMN<br> 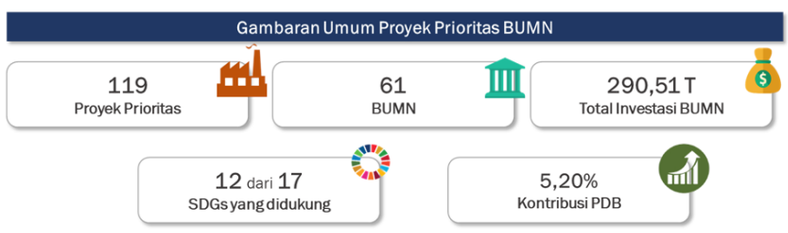 <br><br>Sumber: BUMN terkait, proyeksi awal Kementerian PPN/Bappenas.<br>Catatan: Data proyek BUMN per tanggal 30 November 2022. |



SK No 168035 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 117 | Perubahan Gambar 2.26 dalam halaman II.53 | Gambar 2.26<br>Kontribusi BUMN dalam Prioritas Nasional<br> <br><br>Sumber: BUMN terkait, proyeksi awal Kementerian PPN/Bappenas.<br>Catatan: Data proyek BUMN per tanggal 30 November 2022. |
| 118 | Perubahan alinea pertama dalam halaman II.53 | Proyek Prioritas BUMN dilakukan secara merata pada seluruh pulau di Indonesia. Pada tahun 2023, terdapat 14 Proyek Prioritas BUMN yang dilaksanakan di Pulau Sumatera dan Kepulauan Riau dengan total investasi tahun 2023 sekitar Rp77,86 triliun. Di Pulau Jawa, terdapat 51 Proyek Prioritas BUMN dengan total investasi sekitar Rp72,51 triliun pada tahun 2023, 18 Proyek Prioritas BUMN di Pulau Kalimantan dengan total investasi tahun 2023 sekitar Rp37,61 triliun. Lima Proyek Prioritas BUMN di Pulau Sulawesi dan Maluku dengan total investasi tahun 2023 sekitar Rp5,47 triliun, 9 Proyek Prioritas BUMN di Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan total investasi tahun 2023 sekitar Rp8,36 triliun, dan 1 Proyek Prioritas BUMN di Pulau Papua dengan total investasi tahun 2023 sekitar Rp0,40 triliun. Selain itu, terdapat 21 proyek yang dilaksanakan lintas wilayah di Indonesia dengan total nilai investasi tahun 2023 sebesar Rp88,64 triliun. |
| 119 | Perubahan Gambar 2.27 dalam halaman II.53 | Gambar 2.27<br>Sebaran Proyek Prioritas BUMN di Seluruh Indonesia<br> <br><br>Sumber: BUMN terkait, proyeksi awal Kementerian PPN/Bappenas.<br>Catatan: Data proyek BUMN per tanggal 30 November 2022. |

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 120 | Perubahan alinea pertama dalam halaman II.54 | Prioritas Nasional 1 bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Kebijakan pembangunan pada PN 1 diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Untuk itu, terdapat 44 Proyek Prioritas BUMN dengan total nilai investasi sebesar Rp63,98 triliun yang mendukung terlaksananya sasaran dan indikator pembangunan pada PN 1. |
| 121 | Perubahan alinea kedua dalam halaman II.54 | Prioritas Nasional 2 bertujuan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Kebijakan pembangunan wilayah pada PN 2 diarahkan untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Terdapat 12 Proyek Prioritas BUMN dengan total nilai investasi sebesar Rp6,86 triliun yang mendukung *Major Project* pada PN 2. |
| 122 | Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.54 | Prioritas Nasional 3 bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Pembangunan SDM pada tahun 2023 akan ditekankan pada Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*, Pembangunan *Science Technopark* (Optimalisasi *Triple Helix* di 4 *Major* Universitas), serta Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0. Untuk mencapai sasaran dan indikator yang akan diwujudkan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, terdapat 4 Proyek Prioritas BUMN dengan total nilai investasi sebesar Rp2,16 triliun yang mendukung *Major Project* pada PN 3. |
| 123 | Perubahan alinea kelima dalam halaman II.54 | Prioritas Nasional 5 bertujuan untuk memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Pembangunan infrastruktur tahun 2023 akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui program prioritas pada pengembangan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, Infrastruktur Perkotaan, Energi dan Ketenagalistrikan, serta Transformasi Digital. Untuk mencapai sasaran dan indikator yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, terdapat 58 Proyek Prioritas BUMN dengan total nilai investasi sebesar Rp215,95 triliun yang mendukung *Major Project* pada PN 5. |



SK No 168037 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 124 | Perubahan Tabel 2.17 dalam halaman II.54 | |

Tabel 2.17
Daftar Jumlah Proyek Investasi BUMN dalam *Major Project*

| PN | No. | *Major Project* | Jumlah Proyek Investasi BUMN | Nilai Proyek (Rp Triliun) |
|---|---|---|---|---|
| PN 1 | 1 | Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi | 7 proyek | 0,94 |
| | 2 | Destinasi Pariwisata Prioritas | 13 proyek | 24,74 |
| | 3 | Industri 4.0 pada 7 Subsektor Industri Prioritas | 10 proyek | 5,09 |
| | 4 | Kawasan Industri Prioritas dan Smelter | 7 proyek | 31,64 |
| | 5 | Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan | 3 proyek | 0,21 |
| | 6 | Lain-lain di luar *Major Project*[1] | 4 proyek | 1,36 |
| PN 2 | 7 | Pembangunan Ibu Kota Nusantara | 9 proyek | 2,51 |
| | 8 | Pembangunan Wilayah Batam–Bintan | 1 proyek | 2,65 |
| | 9 | Pemulihan Pasca Bencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda | 1 proyek | 0,20 |
| | 10 | Lain-lain di luar *Major Project*[1] | 1 proyek | 1,50 |



SK No 168038 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 125 | Perubahan Tabel 2.17 dalam halaman II.55 | |

| PN | No. | *Major Project* | Jumlah Proyek Investasi BUMN | Nilai Proyek (Rp Triliun) |
|---|---|---|---|---|
| PN 3 | 11 | Reformasi Sistem Kesehatan Nasional | 4 proyek | 2,16 |
| PN 4 | 12 | Lain-lain di luar *Major Project*[1] | 1 proyek | 1,56 |
| PN 5 | 13 | Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) | 4 proyek | 6,27 |
| | 14 | Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah | 1 proyek | 1,24 |
| | 15 | Jalan Tol Trans Sumatera Aceh – Lampung | 1 proyek | 11,29 |
| | 16 | Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu | 5 proyek | 4,45 |
| | 17 | KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta–Semarang dan Jakarta–Bandung) | 1 proyek | 0,88 |
| | 18 | Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak | 10 proyek | 79,58 |
| | 19 | Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA | 13 proyek | 81,33 |
| | 20 | Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) | 4 proyek | 1,20 |
| | 21 | Transformasi Digital | 4 proyek | 9,11 |
| | 22 | Sistem Angkutan Umum Massal di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar | 2 proyek | 10,39 |
| | 24 | Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa | 1 proyek | 0,34 |
| | 25 | Lain-lain di luar *Major Project*[1] | 12 proyek | 9,87 |
| | | Total | 119 proyek | 290,51 |

Keterangan:

[1]) Proyek yang mendukung Prioritas Nasional namun tidak terkait dengan *Major Project* tertentu.

Catatan: Data proyek BUMN per tanggal 30 November 2022

| | | |
|---|---|---|
| 126 | Penambahan alinea, Gambar 2.27.A dan Tabel 2.17.A setelah Tabel 2.17 dalam halaman II.55 | Selain proyek-proyek prioritas BUMN dalam RKP tahun 2023, terdapat beberapa proyek prioritas BUMN lainnya yang sedang dilaksanakan ataupun direncanakan untuk beberapa tahun ke depan. Diantaranya yaitu, PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dalam pengembangan pesawat N219 dan N219 Amphibi (N219A) serta PT Kilang Pertamina Internasional yang merencanakan proyek *Refinery Development Master Plan* (RDMP) Plaju di tahun 2026.<br><br>PT Dirgantara Indonesia (PT DI) saat ini mengembangkan pesawat N219 dan N219 Amphibi (N219A) sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri untuk pesawat komersial. Pemerintah menggunakan N219 dan N219A sebagai salah satu *flagship* dalam rangka menginisiasi pelaksanaan Transformasi Ekonomi Indonesia, melalui strategi industrialisasi yang mencakup pembangunan industri dalam negeri yang memiliki kandungan teknologi tinggi sekaligus berbasis SDM terampil. Pengembangan pesawat N219 dan N219A dapat mendukung pelaksanaan strategi 1 yaitu menciptakan SDM yang berdaya saing (termasuk |

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|

pengembangan dan pemanfaatan teknologi) dan strategi 2 yaitu Produktivitas Sektor Ekonomi yang berkaitan dengan industrialisasi. Penggunaan pesawat ini di dalam negeri juga dapat mendukung strategi 5 Integrasi Ekonomi Domestik, khususnya dalam penyediaan moda transportasi untuk distribusi produk dalam negeri, barang dan jasa, serta talenta untuk menjangkau daerah terpencil, pulau-pulau kecil, dan daerah perbatasan.

Dukungan pemerintah untuk pengembangan pesawat N219 dan N219A diberikan dalam bentuk penyusunan Peta Jalan Ekosistem Industri Kedirgantaraan 2022-2045 yang mencakup empat pilar yaitu Industri Pesawat Terbang, Industri Komponen dan Rantai Pasok, *Maintenance, Repair, Overhaul,* dan Purnajual, serta Jasa Penerbangan dan Kebandarudaraan, serta penyiapan payung hukum untuk menggerakkan ekosistem dalam empat pilar tersebut. Pemerintah juga berencana menyediakan pendanaan tambahan untuk melengkapi kebutuhan anggaran untuk mendukung peningkatan kapasitas dan *final assembly line.* Alokasi anggaran yang disediakan Pemerintah mencakup Penyertaan Modal Negara sebesar Rp543 miliar untuk PT DI, serta melengkapi investasi yang dibutuhkan proyek N219A.

Berbagai dukungan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong komersialisasi dan pengiriman pertama produk N219 kepada konsumen pada tahun 2024 dan penyelesaian *design* N219A pada tahun 2024. Pemerintah juga akan mendukung komersialisasi N219 dan N219A melalui *pilot project* yang akan dilaksanakan dalam rangka Transformasi Ekonomi Kepulauan Riau dimana 2 jenis pesawat tersebut digunakan untuk menghubungkan konektivitas antar pulau di provinsi tersebut.

Sebagai salah satu proyek strategis BUMN, RDMP Plaju merupakan proyek investasi BUMN yang direncanakan akan dilaksanakan *Engineering Procurement and Construction* (EPC) di tahun 2026 dengan tujuan meningkatkan efisiensi energi dan meningkatkan produk bensin dengan kapasitas yang lebih tinggi. Saat ini proyek RDMP Plaju masih dalam tahapan penyelesaian *pre-feasibility study* dan ditargetkan selesai di tahun 2028 dengan nilai investasi keseluruhan sebesar US$2,00 miliar.

Selain investasi yang dilakukan langsung oleh BUMN dalam mendukung Prioritas Nasional, Pemerintah juga melakukan investasi ke BUMN melalui Penanaman Modal Negara (PMN). PMN pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp45,83 triliun. PMN tersebut terdiri dari Rp42,81 triliun secara tunai dan Rp3,02 triliun non-tunai.

Gambar 2.27.A
Penyertaan Modal Negara Tahun 2019 – 2023 (Rp Triliun)

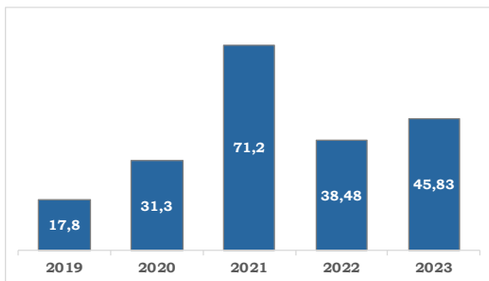


Sumber: Buku II Nota Keuangan APBN 2023 dan Kementerian BUMN.



SK No 168040 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|

Tabel 2.17.A
Penyaluran PMN ke BUMN di Tahun 2023

| No. | BUMN | Penggunaan PMN | Alokasi (Rp Triliun) |
|---|---|---|---|
| A | PMN Tunai | | |
| 1 | PT Hutama Karya (Persero) | Mendukung pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap I dan II untuk ruas Betung-Tempino-Jambi dan Ruas Rengat-Pekanbaru | 28,9 |
| 2 | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | Mendukung proyek sektor transimisi dan distribusi termasuk pelaksanaan program listrik desa | 10,0 |
| 3 | PT LEN Industri (Persero) | | 1,75 |
| | - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) | Peningkatan kapasitas produksi pesawat CN 235, N219, dan peremajaan fasilitas pendukung produksi | 0,54 |
| | - Di luar PTDI | Mendukung pencapaian target priontas pembangunan bidang pertahanan dan keamanan | 1,21 |
| 4 | Perum LPPNPI | Menjaga keberlanjutan perusahaan dalam menjamin keselamatan penerbangan serta kebutuhan untuk menjamin *availability* dan *reliability* fasilitas navigasi penerbangan | 0,65 |
| 5 | PT Sarana Multigriya Finansial | Mendukung program Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) | 1,50 |
| Total PMN Tunai | | | 42,81 |
| B | PMN Non-Tunai | | |
| 6 | PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) | Konversi piutang dana investasi (RDI), Subsidiary Loan Agreement (SLA), dan eks-BPPN untuk mendapatkan alternatif pendanaan yang lebih murah sehingga mengurangi ketergantungan impor, menjaga stabilitas harga pangan, dan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) | 2,56 |
| 7 | PT LEN Industri (Persero) | Konversi piutang RDI dan SLA untuk mendukung pencapaian target priontas pembangunan bidang pertahanan dan keamanan | 0,45 |
| Total PMN Non-Tunai | | | 3,02 |

Sumber: Buku II Nota Keuangan Beserta APBN Tahun Anggaran 2023

| | | |
|---|---|---|
| 127 | Perubahan alinea pertama dalam halaman II.55 | Investasi memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, kontribusi investasi dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDB rata-rata mencapai 31,65 persen. Pemulihan ekonomi Indonesia di tahun 2021 pun salah satunya didorong oleh investasi. Pertumbuhan PMTB terus menunjukkan tren yang positif sejak triwulan II-2021 didorong oleh tingkat kepercayaan investor yang membaik. Sehingga, sampai dengan triwulan III-2022 pertumbuhan PMTB mampu mencapai 4,05 persen dan nilainya sudah lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun 2019. Hal tersebut menandakan kinerja investasi mulai pulih ke level sebelum pandemi. |



SK No 168042 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 128 | Penambahan alinea setelah alinea pertama dalam halaman II.55 | Berdasarkan subkomponennya, realisasi PMTB di Indonesia masih didominasi oleh subkomponen Bangunan, yang secara kumulatif hingga triwulan III-2022 mencapai 72,96 persen terhadap total PMTB. Sementara itu, subkomponen Mesin dan Peralatan serta subkomponen Kendaraan menyusul di peringkat kedua dan ketiga dengan proporsi masing-masing sebesar 12,53 persen dan 5,52 persen. Meskipun demikian, subkomponen Mesin dan Peralatan hingga triwulan III-2022 mampu mencatatkan pertumbuhan yang tinggi, yakni mencapai 24,04 persen (*c-to-c*). Hal ini menandakan kualitas investasi yang semakin mengarah ke sektor produktif. |
| 129 | Perubahan Gambar 2.28 dalam halaman II.56 | Gambar 2.28<br>Perkembangan Realisasi PMTB per Sub Komponen<br>Tahun 2018-2022 (Rp Triliun)<br> 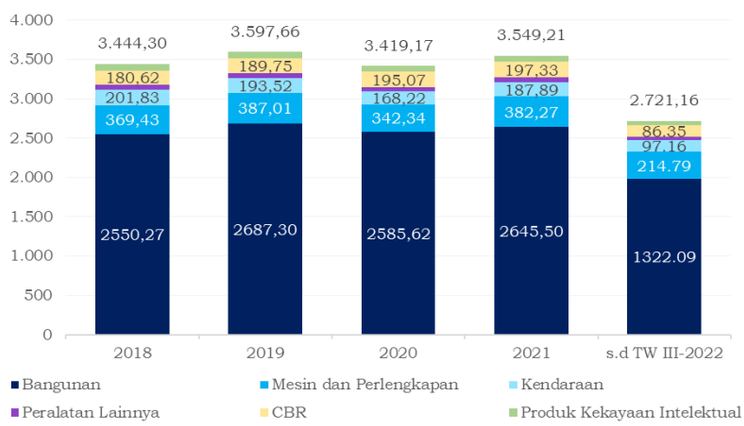 <br><br>Sumber: BPS, 2022. |
| 130 | Perubahan alinea pertama dalam halaman II.56 | Berdasarkan sektor institusi, sebagian besar investasi PMTB tahun 2018 dilakukan oleh swasta, baik sektor non-finansial maupun sektor finansial, yakni sebesar 67,00 persen, dan investasi rumah tangga sebesar 15,80 persen. Sementara itu, peranan investasi pemerintah dan BUMN terhadap total investasi PMTB masing-masing hanya pada kisaran 8,56 persen dan 7,09 persen. Hal ini menunjukkan bahwa investasi swasta sangat penting dalam membangun perekonomian yang kokoh. |
| 131 | Perubahan alinea kedua dalam halaman II.56 | Sejalan dengan perkembangan PMTB, realisasi investasi berupa Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pun terus menunjukkan peningkatan. Pada periode Januari-September 2022, pertumbuhan nilai realisasi PMA dan PMDN tercatat sebesar 35,34 persen (*yoy*), atau setara dengan 21,52 persen dari PMTB. Dalam perkembangannya, kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN pun semakin meningkat, dari 45,63 persen pada tahun 2018 menjadi 46,29 persen pada periode sampai dengan triwulan III-2022. |



SK No 168043 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 132 | Perubahan Gambar 2.29 dalam halaman II.56 | Gambar 2.29<br>Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) Indonesia Tahun 2018-2022<br>(Rp Triliun)<br> 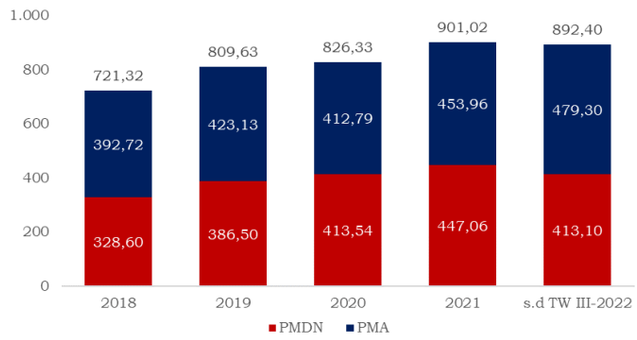 <br><br>Sumber: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2022. |
| 133 | Perubahan alinea pertama dalam halaman II.57 | Dilihat berdasarkan sektornya, pertumbuhan investasi PMA dan PMDN di sektor sekunder (industri pengolahan) menunjukkan kenaikan cukup tinggi sampai dengan triwulan III-2022, yakni mencapai 54,77 persen (*c-to-c*). Hal ini menandakan kualitas investasi yang semakin baik, karena investasi di sektor ini diharapkan mampu memberikan dampak lebih besar bagi perekonomian. Secara lebih khusus, investasi terbesar di sektor sekunder sampai dengan triwulan III-2022 adalah sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar Rp135,64 triliun, atau tumbuh 62,01 persen *(c-to-c)*; sektor industri makanan sebesar Rp66,64 triliun, atau tumbuh 32,49 persen *(c-to-c)*; dan sektor industri kimia dan farmasi sebesar Rp61,25 triliun, atau tumbuh 94,47 persen *(c-to-c)*. |
| 134 | Perubahan Gambar 2.30 dalam halaman II.57 | Gambar 2.30<br>Top 5 Sektor Industri dengan Realisasi Investasi Tertinggi Periode Januari-September Tahun 2022 (Rp Triliun)<br> 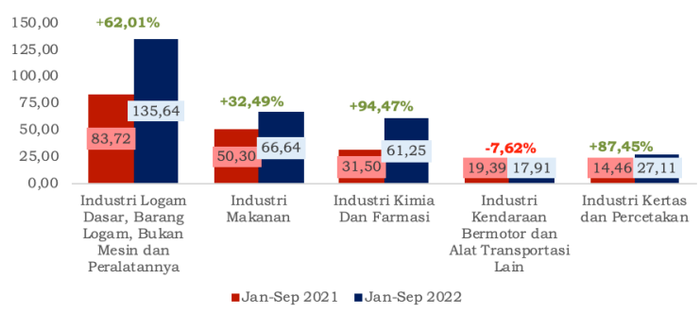 <br><br>Sumber: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2022. |
| 135 | Perubahan alinea kedua dalam halaman II.57 | Tingginya realisasi investasi pada tahun 2021 dan 2022 turut memberikan dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Pada tahun 2021, investasi swasta di Indonesia berhasil menciptakan 1,2 juta lapangan pekerjaan, yang terdiri dari 627 ribu lapangan pekerjaan yang dihasilkan oleh aktivitas PMDN dan 581 ribu lapangan pekerjaan yang dihasilkan oleh aktivitas PMA. Sampai dengan triwulan III-2022, total penyerapan tenaga kerja dari total realisasi PMA dan PMDN telah mencapai 965 ribu orang, lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yaitu sebesar 912 ribu orang. |



SK No 168044 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 136 | Perubahan Gambar 2.31 dalam halaman II.57 | Gambar 2.31<br>Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Investasi (PMA dan PMDN) 2018 – 2022 (Ribu Orang)<br> 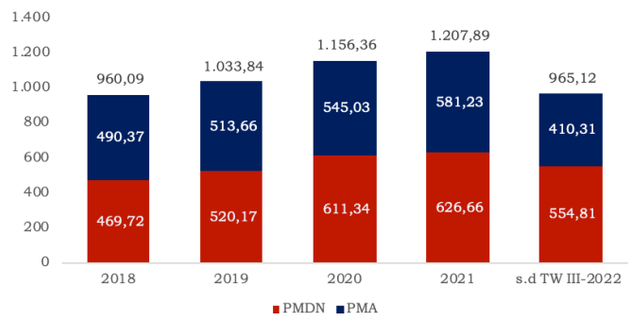 <br><br>Sumber: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2022. |
| 137 | Perubahan alinea pertama dalam halaman II.58 | Dari aspek spasial, mayoritas proyek investasi PMA dan PMDN sampai dengan triwulan III-2022 masih berada di pulau Jawa, yaitu 117.289 proyek dari total 190.837 proyek investasi, dengan total nilai investasi mencapai Rp426,63 triliun. Selanjutnya, disusul oleh pulau Sumatera dengan 31.320 proyek bernilai investasi Rp186,05 triliun, lalu Sulawesi dan Maluku dengan 13.531 proyek bernilai investasi Rp162,87 triliun. Sedangkan untuk wilayah dengan realisasi investasi terendah pada tahun 2022 adalah Papua dengan 1.660 proyek bernilai investasi Rp17,05 triliun. |
| 138 | Menghapus alinea kedua dalam halaman II.58 | (dihapus) |
| 139 | Perubahan Gambar 2.32 dalam halaman II.58 | Gambar 2.32<br>Sebaran Spasial Investasi PMA dan PMDN<br>Tahun 2022<br> 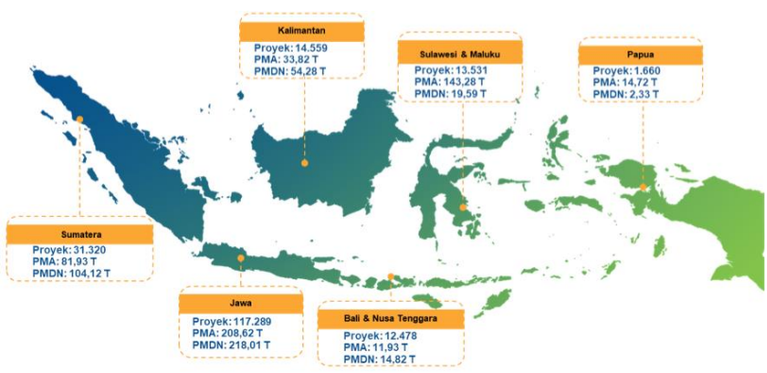 <br><br>Sumber: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2022. |
| 140 | Penghapusan alinea ketiga dalam halaman II.58 | (dihapus) |



SK No 168045 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 141 | Perubahan alinea pertama dalam halaman II.59 | Kinerja investasi diharapkan dapat terus terjaga sepanjang tahun 2022, dan berlanjut pada tahun 2023. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan mencapai 5,3-5,5 persen dengan salah satu sumber pertumbuhannya adalah investasi yang ditargetkan tumbuh sebesar 6,1-6,3 persen. Untuk mencapai angka pertumbuhan tersebut, investasi swasta/masyarakat diharapkan dapat berkontribusi sekitar 87,08-88,31 persen atau senilai Rp5.821,14-Rp5.836,62 triliun, dari total kebutuhan investasi tahun 2023 yang mencapai Rp6.591,58-Rp6.702,93 triliun. |
| 142 | Penambahan alinea, Gambar 2.32.A, Gambar 2.32.B, Tabel 2.17.B, dan Gambar 2.32.C setelah alinea pertama dalam halaman II.59 | Peran penting investasi swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi diharapkan tercermin dari besaran penanaman modal asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN). Pada tahun 2023, realisasi PMA dan PMDN ditargetkan mencapai Rp1.200-Rp1.300 triliun, atau setara dengan 19,42–20,96 persen PMTB. Porsi realisasi PMA dan PMDN terhadap PMTB di tahun 2023 tersebut lebih tinggi dibandingkan periode 5 (lima) tahun sebelumnya, yang memiliki rata-rata sebesar 15,55 persen.<br><br>Potensi keterlibatan peran investasi swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang sedemikian besar tersebut utamanya akan diarahkan pada percepatan realisasi proyek-proyek investasi swasta yang dapat meningkatkan produktivitas perekonomian sekaligus mendorong inklusivitas, seperti investasi pada sektor industri pengolahan terutama yang berorientasi ekspor dan/atau mengubah kompleksitas ekspor nasional, investasi pada sektor digital dan berbasis teknologi, serta investasi yang memberikan efek pengganda bagi perekonomian.<br><br>(3) Data Proyek Investasi Swasta yang Terindikasi Mendukung PN dan MP di Tahun 2023<br><br>Dari total target realisasi PMA dan PMDN sebesar Rp1.200-Rp1.300 triliun, terdapat beberapa proyek investasi swasta yang mendukung Prioritas Nasional dan *Major Project*, yang selanjutnya disebut Proyek Prioritas Investasi Swasta. Proses identifikasi ini bertujuan agar proyek investasi swasta tidak hanya berperan dalam mendorong perekonomian nasional, namun juga selaras dengan arah kebijakan pembangunan yang direncanakan Pemerintah pada tahun 2023.<br><br>Pada tahun 2023, terdapat 89 Proyek Prioritas Investasi Swasta yang mendukung Prioritas Nasional Tahun 2023, terutama Prioritas Nasional 1 (PN 1) dan Prioritas Nasional 5 (PN 5). Proyek-proyek tersebut melibatkan 82 badan usaha milik swasta dengan prakiraan total nilai investasi mencapai Rp1.229,44 triliun. Kontribusi Proyek Prioritas Investasi Swasta diprakirakan sekitar 14,25 persen terhadap PDB.<br><br>Gambar 2.32.A<br>Gambaran Umum Proyek Prioritas Swasta Teridentifikasi<br> 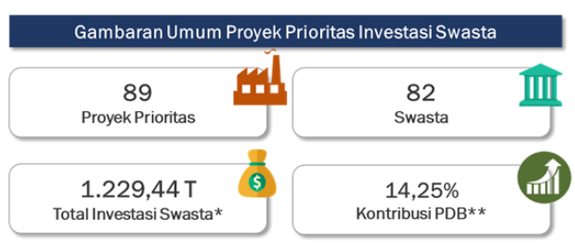 <br><br>Sumber: Hasil identifikasi Kementerian PPN/Bappenas.<br><br>Catatan: *Data Proyek Prioritas Investasi Swasta per 18 Desember 2022; **Perhitungan Indikatif. |



SK No 168046 A

Gambar 2.32.B
Kontribusi Swasta dalam Prioritas Nasional

Sumber: Hasil identifikasi Kementerian PPN/Bappenas.

Catatan: *Data Proyek Prioritas Investasi Swasta per tanggal 18 Desember 2022.

Pada PN 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan, terdapat 85 Proyek Prioritas Investasi Swasta dengan prakiraan total nilai investasi sebesar Rp1.215,41 triliun. Proyek-proyek pada PN ini akan mendukung percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT), percepatan dan optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dan smelter, serta peningkatan produktivitas di sektor industri pengolahan dan pariwisata. Proyek investasi pada PN 1 juga mencakup proyek hulu minyak dan gas yang dapat mendukung ketersediaan energi untuk aktivitas sektor ekonomi. Dari 85 Proyek Prioritas Investasi Swasta, terdapat 39 proyek yang teridentifikasi mendukung *Major Project* di PN 1 dengan prakiraan total nilai investasi sebesar Rp1.044,26 triliun.

Pada PN 5 - Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar, terdapat 4 Proyek Prioritas Investasi Swasta dengan total nilai investasi sebesar Rp14,03 triliun. Proyek-proyek pada PN ini akan mendukung arah kebijakan pembangunan konektivitas dalam mendukung produktivitas untuk transformasi ekonomi serta pembangunan infrastruktur TIK sebagai bagian dari transformasi digital. Dari 4 Proyek Prioritas Investasi Swasta, terdapat 2 proyek yang teridentifikasi mendukung *Major Project* di PN 5 dengan prakiraan total nilai investasi sebesar Rp3,43 triliun.

Tabel 2.17.B
Daftar Jumlah Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam *Major Project*

| PN | No. | *Major Project* | Jumlah Proyek Prioritas Investasi Swasta* | Nilai Proyek (Rp triliun) |
|---|---|---|---|---|
| PN 1 | 1 | Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi | 7 proyek | 5,36 |
| | 2 | Destinasi Pariwisata Prioritas | 4 proyek | 0,21 |
| | 3 | Industri 4.0 pada 7 Subsektor Industri Prioritas | 12 proyek | 12,89 |
| | 4 | Kawasan Industri Prioritas dan Smelter | 16 proyek | 1.025,80 |
| | 5 | Lain-lain di luar Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*)[1] | 46 proyek | 171,15 |
| PN 5 | 6 | Transformasi Digital | 2 proyek | 3,43 |
| | 7 | Lain-lain di luar Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*)[1] | 2 proyek | 10,60 |
| | | Total | 89 proyek | 1.229,44** |

Keterangan:

[1]) Proyek yang mendukung Prioritas Nasional namun tidak terkait dengan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) tertentu

Catatan:

*Hasil pemetaan Proyek Prioritas Investasi Swasta untuk setiap Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) terdapat pada Matriks Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Investasi Swasta Prioritas.

**Data Proyek Prioritas Investasi Swasta per 18 Desember 2022

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, Proyek Prioritas Investasi Swasta yang teridentifikasi mendukung Prioritas Nasional akan dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia. Sebaran spasial Proyek Prioritas Investasi Swasta tahun 2023 adalah: (1) 25 proyek yang dilaksanakan di Pulau Sumatera dengan total nilai investasi sebesar Rp15,62 triliun; (2) 22 proyek di Pulau Jawa dengan total nilai investasi sebesar Rp58,47 triliun; (3) 10 proyek di Pulau Kalimantan dengan total nilai investasi sebesar Rp957,04 triliun; (4) 23 proyek di Pulau Sulawesi dan Maluku dengan total nilai investasi sebesar Rp184,56 triliun; (5) 3 proyek di Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan total nilai investasi sebesar Rp170,0 miliar, serta (6) 3 proyek yang dilaksanakan lintas wilayah dengan total nilai investasi sebesar Rp5,34 triliun.

Gambar 2.32.C
Sebaran Proyek Prioritas Investasi Swasta di Seluruh Indonesia

Sumber: Hasil identifikasi Kementerian PPN/Bappenas.
Catatan: *Data Proyek Prioritas Investasi Swasta per 18 Desember 2022.

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | Terdapat beberapa proyek prioritas swasta yang menjadi fokus percepatan. Di antara proyek-proyek tersebut adalah proyek pembangunan industri kimia terintegrasi dan proyek pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.<br><br>Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia saat ini sedang mengadakan proyek pembangunan industri petrokimia terintegrasi sebagai upaya memenuhi kebutuhan plastik nasional yang terus meningkat. Proyek ini ditargetkan selesai pada tahun 2027 dengan total investasi sebesar Rp65,80 triliun. Produk yang dihasilkan berupa Etilen dan turunannya dengan estimasi total kapasitas sebesar 5,93 juta ton per tahun. Pembangunan industri petrokimia terintegrasi turut mendukung Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan serta *Major Project* Kawasan Industri Prioritas dan Smelter. Dengan dukungan ini, diharapkan proyek industri petrokimia terintegrasi dapat turut mendukung kebijakan dan strategi pembangunan untuk beberapa tahun ke depan.<br><br>Proyek industri petrokimia terintegrasi akan memberikan beberapa dampak terhadap perekonomian Indonesia, antara lain penghematan devisa negara, peningkatan PDB, dan penyerapan tenaga kerja. Penghematan devisa melalui substitusi plastik impor diestimasikan mencapai US$6 miliar per tahun. Proyek ini juga akan memiliki dampak langsung terhadap PDB sebesar Rp41 triliun. Selain itu, proyek ini diestimasikan akan menyerap tenaga kerja sebesar 25.000 pekerja selama pembangunan proyek dan 830 pekerja tetap setelah pembangunan selesai.<br><br>Proyek prioritas swasta berikutnya adalah proyek pengembangan dan pengelolaan kawasan industri yang akan menampung perusahaan industri pengolahan logam dan komposit, industri baterai kendaraan listrik, industri panel surya, dan industri petrokimia dalam lahan seluas 10.000 hektar. Konstruksi utama kawasan industri ini ditargetkan selesai pada tahun 2024, dan pengembangan kawasan industri ditargetkan selesai pada tahun 2029. Total investasi proyek pengembangan dan pengelolaan kawasan industri ini diestimasikan sebesar Rp1.953,60 triliun. Dukungan pemerintah untuk pengembangan dan pengelolaan kawasan industri ini diberikan dalam bentuk penetapan proyek dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Permenko Perekonomian No.9/2022.<br><br>Pengembangan dan pengelolaan kawasan industri 10.000 hektar ini turut mendukung Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan serta *Major Project* Kawasan Industri Prioritas dan Smelter. Proyek ini beserta perusahaan di dalamnya ditargetkan akan melibatkan sekitar 100.000 pekerja selama masa konstruksi dan sekitar 60.000 pekerja pada fase operasi. Selain itu, proyek ini turut melibatkan beberapa proyek energi hijau seperti PLTA 10 GW dan panel surya 10 GW sebagai sumber energi terbarukan bagi perusahaan di kawasan industri. |



SK No 168049 A

**PRESIDEN**
**REPUBLIK INDONESIA**

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|

143 Perubahan Tabel 2.18 dalam halaman II.63

Tabel 2.18
Target Pengembangan Wilayah Sumatera Per Provinsi Tahun 2023 (Persen)

| Indikator | Target Tahun 2023 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aceh | Sumut | Sumbar | Riau | Jambi | Sumsel | Bengkulu | Lampung | Kep. Babel | Kep. Riau |
| Pertumbuhan Ekonomi[a)] | 3,9–4,3 | 5,2–5,4 | 5,0–5,3 | 3,2–3,4 | 4,6–4,8 | 5,3–5,5 | 4,7–5,1 | 4,5–5,0 | 4,6–4,9 | 4,9–5,3 |
| Tingkat Kemiskinan[b)] | 13,71–14,00 | 7,25–7,50 | 4,65–6,00 | 6,00–6,50 | 6,25–6,50 | 10,85–11,00 | 12,95–13,50 | 9,68–10,20 | 3,48–3,50 | 4,35–5,00 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka[b)] | 4,9–5,3 | 5,2–5,9 | 5,4–6,0 | 3,9–4,3 | 3,8–3,8 | 4,1–4,6 | 3,0–3,5 | 3,6–4,3 | 3,8–4,4 | 7,9–8,2 |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Target tahun 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022 dan b) Target tahun 2023 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.

144 Perubahan Tabel 2.19 dalam halaman II.65

Tabel 2.19
Target Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi Tahun 2023 (Persen)

| Indikator | Target Tahun 2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DKI Jakarta | Jawa Barat | Jawa Tengah | D. I. Yogyakarta | Jawa Timur | Banten | Bali |
| Pertumbuhan Ekonomi[a)] | 5,2–5,3 | 5,2–5,3 | 5,1–5,3 | 5,3–5,6 | 5,4–5,5 | 5,3–5,5 | 6,3–6,7 |
| Tingkat Kemiskinan[b)] | 3,00–3,50 | 5,64–6,25 | 9,35–10,00 | 10,51–11,00 | 8,65–9,50 | 3,95–5,00 | 1,90–2,00 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka[b)] | 7,0-7,0 | 8,1–8,2 | 4,6–5,3 | 3,1–3,3 | 4,2–4,7 | 8,0–8,2 | 3,5–4.2 |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Target tahun 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022 dan b) Target tahun 2023 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.

145 Perubahan Tabel 2.20 dalam halaman II.67

Tabel 2.20
Target Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Per Provinsi Tahun 2023 (Persen)

| Indikator | Target Tahun 2023 | |
|---|---|---|
| | Nusa Tenggara Barat | Nusa Tenggara Timur |
| Pertumbuhan Ekonomi[a)] | 6,3–6,5 | 5,2–5,9 |
| Tingkat Kemiskinan[b)] | 11,85–13,00 | 15,56–16,50 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka[b)] | 2,2–2,6 | 2,8–3,1 |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Target tahun 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022 dan b) Target tahun 2023 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|

146 Perubahan Tabel 2.21 dalam halaman II.69

Tabel 2.21
Target Pengembangan Wilayah Kalimantan Per Provinsi Tahun 2023 (Persen)

| Indikator | Target Tahun 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kalimantan Barat | Kalimantan Tengah | Kalimantan Selatan | Kalimantan Timur | Kalimantan Utara |
| Pertumbuhan Ekonomi[a)] | 5,2–5,6 | 5,9–6,3 | 4,9–5,0 | 5,2–5,5 | 5,5–5,8 |
| Tingkat Kemiskinan[b)] | 5,25–6,00 | 3,85–4,50 | 3,44–4,00 | 4,11–5,30 | 4,31–6,00 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka[b)] | 4,2–4,4 | 3,6–3,6 | 3,9–4,0 | 5,1–5,7 | 4,0–4,2 |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Target tahun 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022 dan b) Target tahun 2023 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.

147 Perubahan Tabel 2.22 dalam halaman II.70

Tabel 2.22
Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Per Provinsi Tahun 2023 (Persen)

| Indikator | Target Tahun 2023 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sulawesi Utara | Sulawesi Tengah | Sulawesi Selatan | Sulawesi Tenggara | Gorontalo | Sulawesi Barat |
| Pertumbuhan Ekonomi[a)] | 5,3–6,0 | 13,3–14,1 | 6,0–6,7 | 6,2-6,6 | 4,8–5,4 | 3,2–4,6 |
| Tingkat Kemiskinan[b)] | 5,83–6,50 | 8,85–9,50 | 7,75–8,00 | 9,15–10,00 | 12,87–14,00 | 9,51-10,00 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka[b)] | 6,1–6,2 | 2,7–2,8 | 4,1–4,4 | 3,0–3,2 | 2,2–2,6 | 2,0–2,2 |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Target tahun 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022 dan b) Target tahun 2023 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.

148 Perubahan Tabel 2.23 dalam halaman II.72

Tabel 2.23
Target Pengembangan Wilayah Maluku Per Provinsi Tahun 2023 (Persen)

| Indikator | Target Tahun 2023 | |
|---|---|---|
| | Maluku | Maluku Utara |
| Pertumbuhan Ekonomi[a)] | 5,1–5,3 | 15,6–17,2 |
| Tingkat Kemiskinan[b)] | 14,78–15,50 | 4,64–5,70 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka[b)] | 6,1–6,3 | 3,7–3,9 |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Target tahun 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022 dan b) Target tahun 2023 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.

149 Perubahan alinea pertama dalam halaman II.73

Pengembangan Wilayah Papua difokuskan pada (1) mempercepat pembangunan kesejahteraan dengan pendekatan berbasis tujuh wilayah adat yaitu Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay melalui penyediaan pelayanan dasar serta perluasan akses di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesempatan kerja bagi Orang Asli Papua; (2) memfasilitasi transformasi ekonomi wilayah khususnya melalui hilirisasi komoditas unggulan pertanian; (3) mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus berlandaskan pendekatan budaya dan kondisi sosio-ekologis Wilayah Papua; (4) memperkuat kerja sama dan kemitraan antardaerah melalui pendekatan berbasis wilayah adat; (5) mengoptimalkan sistem nilai dan norma dalam wilayah adat untuk



SK No 168051 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | memfasilitasi aktivitas sosial ekonomi serta pergerakan penduduk dan barang; serta (6) memperkuat peran distrik sebagai pusat data informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat adat, pusat inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan daerah. Untuk itu, strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Papua sebagai berikut<br>(1) melanjutkan pembangunan jaringan infrastruktur yang terintegrasi antara pusat-pusat produksi rakyat dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, seperti KEK Sorong dan KI Teluk Bintuni, dengan terus mendorong percepatan operasionalisasi kawasan, realisasi investasi, dan kerja sama dengan pemerintah daerah;<br>(2) mempercepat pengembangan kawasan perkotaan pada kawasan yang potensial untuk dikembangkan, termasuk pembangunan Kota Baru Sorong dan kota sedang Jayapura yang ditujukan sebagai penggerak ekonomi wilayah serta pusat pelayanan dasar dan ekonomi dengan fokus pada pengembangan transportasi publik perkotaan, air minum dan sanitasi, drainase, serta pengelolaan sampah dan limbah yang aman;<br>(3) mempercepat pembangunan dan pengembangan kawasan di Ibu Kota Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya yang merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) pemekaran Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;<br>(4) mendorong produktivitas komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan seperti sagu, kopi, kakao, pala, kenaf, sapi, kelapa, perikanan tangkap, dan perikanan budi daya dalam rangka penyiapan basis industri manufaktur dan industri jasa, serta pengembangan sentra produksi pangan (*food estate*) di Merauke;<br>(5) mendorong ekonomi kemaritiman di DPP Raja Ampat dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cendrawasih dengan mempercepat pengembangan sentra kelautan perikanan terpadu dan pariwisata bahari;<br>(6) mempercepat pengembangan kapasitas dan keterampilan hidup pemuda Papua untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi lokal melalui peningkatan keterampilan sumber daya manusia, kewirausahaan, pelatihan vokasi, pengembangan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*skill development center*), serta pengembangan kreativitas dan inovasi pemuda asli Papua;<br>(7) meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama, pengembangan sumber pembiayaan alternatif dan investasi daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional Wilayah Papua;<br>(8) meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah adat/ulayat serta peningkatan daya dukung lingkungan dan kawasan konservasi untuk pembangunan rendah karbon;<br>(9) mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun RDTR sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah. |
| 150 | Perubahan alinea kedua dalam halaman II.73 dan alinea pertama dalam halaman II.74 | Selanjutnya, untuk strategi pemerataan intrawilayah Papua sebagai berikut<br>(1) memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, dalam rangka menuju Papua Sehat melalui percepatan peningkatan upaya kesehatan masyarakat, akses, kualitas, dan tata kelola pelayanan kesehatan; serta pemenuhan tenaga kesehatan secara merata di wilayah Papua;<br>(2) memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu |

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | bekerja sama, dalam rangka menuju Papua Cerdas melalui percepatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan serta pemenuhan tenaga pendidik secara merata di Wilayah Papua;<br>(3) meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, dalam rangka menuju Papua Produktif melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dan kesempatan kerja; peningkatan daya saing industri, perdagangan, dan realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan daerah; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial untuk kehidupan yang adil dan merata; serta pengembangan pemerataan kawasan ekonomi;<br>(4) memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan SPM di bidang sosial, perumahan rakyat, dan trantibumlinmas terutama di lokasi afirmatif seperti daerah tertinggal dan kawasan perbatasan dengan memperluas cakupan dan kualitas pelayanan dasar, serta terus melakukan kebijakan pengembangan *mobile health services* dan sekolah alam dengan pendekatan *culture based learning;*<br>(5) mempercepat pembangunan daerah tertinggal serta kawasan perbatasan termasuk kampung dengan pendekatan pembangunan berbasis wilayah adat dan distrik;<br>(6) meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan kampung (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan sektor unggulan kewilayahan Papua serta peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel;<br>(7) mengoptimalkan, fungsi dan peran GWPP, dalam memperkuat sinergi pusat–daerah, peningkatan daya saing dan inovasi daerah;<br>(8) mengoptimalkan perencanaan dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua melalui koordinasi penyusunan rencana aksi percepatan pembangunan Papua 2023-2024;<br>(9) mewujudkan iklim investasi yang kondusif melalui penguatan keamanan dan ketertiban. |
| 151 | Perubahan Tabel 2.24 dalam halaman II.74 | Tabel 2.24<br>Target Pengembangan Wilayah Papua Per Provinsi Tahun 2023 (Persen)<br>Indikator: Pertumbuhan Ekonomi[a)]; Tingkat Kemiskinan[b)]; Tingkat Pengangguran Terbuka[b)]<br>Target Tahun 2023 — Papua Barat: 3,1–4,1; 17,05–19,00; 5,1–5,3<br>Target Tahun 2023 — Papua: 8,7–9,2; 23,45–25,00; 2,1–2,7<br>Sumber: Kementenan PPN/Bappenas, 2022.<br>Keterangan: a) Target tahun 2023 merupakan *assessment* Kementenan PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022 dan b) Target tahun 2023 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah. |
| 152 | Perubahan alinea keenam dalam halaman II.76 dan alinea pertama dalam halaman II.77 | Kebijakan TKD pada tahun 2023 secara umum diarahkan untuk<br>(1) meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah;<br>(2) memperkuat kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan;<br>(3) meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (*local taxing power)* dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat; |



SK No 168053 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | (4) mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan melalui (a) pemanfaatan *creative financing* (pinjaman daerah, penerbitan obligasi daerah, dan/atau KPBU); (b) melakukan *integrated funding* (kerja sama pembangunan antardaerah, hibah daerah, sinergi belanja pusat, TKD, dan APBD); dan (c) pengembangan pembiayaan berkelanjutan. |
| 153 | Perubahan alinea kedua dalam halaman II.77 | Penggunaan TKD diarahkan untuk mendukung sektor-sektor prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, dengan tujuan pemerataan layanan khususnya pemenuhan SPM, perbaikan infrastruktur publik, dan pencapaian prioritas nasional. Selain itu, pemerintah akan mengalihkan alokasi program, kegiatan, dan anggaran kementerian yang telah menjadi urusan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), kepada pemerintah daerah secara bertahap. |
| 154 | Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.77 | Dana Bagi Hasil adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Arah kebijakan DBH TA 2023 adalah<br>(a) melanjutkan kebijakan DBH *earmarked* (DBH CHT dan DBH DR) untuk sektor-sektor prioritas dengan perluasan dan fleksibilitas penggunaan sesuai peraturan perundangan;<br>(b) mendukung upaya pelestarian lingkungan serta penguatan penerimaan negara melalui kebijakan pengalokasian dan penyaluran DBH berdasarkan kinerja daerah;<br>(c) meningkatkan akurasi perencanaan APBD melalui alokasi DBH berdasarkan realisasi T-1 sesuai ketentuan perundang-undangan;<br>(d) pengalokasian DBH menerapkan persentase pembagian baru sesuai UU HKPD serta lebih memperhatikan keadilan distribusi alokasi TKD untuk daerah penghasil, daerah berbatasan, daerah pengolah, serta daerah lainnya dalam 1 wilayah provinsi;<br>(e) penambahan jenis DBH lainnya yaitu DBH perkebunan sawit, antara lain untuk dukungan infrastruktur termasuk jalan dan industri sawit di daerah;<br>(f) memperkuat proses transparansi dalam penghitungan DBH. |
| 155 | Perubahan alinea keempat dalam halaman II.77 dan alinea pertama dalam halaman II.78 | Dana Alokasi Umum adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah. Arah kebijakan DAU TA 2023 adalah sebagai berikut<br>(a) penguatan keuangan daerah melalui kebijakan pagu DAU berdasarkan UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD);<br>(b) peningkatan pemerataan keuangan daerah dan mendorong peningkatan PAD melalui kebijakan formula DAU yang didasarkan pada satuan biaya, target layanan, potensi pendapatan dan karakteristik daerah (antara lain populasi, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, karakteristik kepulauan, pariwisata, ketahanan pangan, konservasi hutan) serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah;<br>(c) meningkatkan layanan publik daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, serta mendukung pendanaan kelurahan melalui |



SK No 168054 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*);<br>(d) meningkatkan kualitas belanja daerah melalui asistensi kepada pemda mengenai pengelolaan DAU sesuai ketentuan perundang-undangan. |
| 156 | Penambahan alinea setelah alinea pertama dalam halaman II.78 | Dana Alokasi Umum didorong untuk meningkatkan kinerja pengelolaan belanja APBD di antaranya melalui penyaluran DAU berbasis kinerja anggaran. |
| 157 | Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.78 | Dana Alokasi Khusus Fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah. Arah kebijakan DAK Fisik TA 2023, adalah<br>(a) mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar serta tematik tertentu dengan tujuan:<br>(i) pencapaian Prioritas Nasional (PN);<br>(ii) percepatan pembangunan daerah;<br>(iii) mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah; dan<br>(iv) mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.<br>(b) mempertajam implementasi konsep tematik berbasis pendekatan holistik, integratif dan spasial dalam rangka pencapaian *outcome* yang optimal;<br>(c) meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam proses perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi DAK Fisik;<br>(d) meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi dan penyaluran berbasis kinerja serta penguatan kualitas pengawasan;<br>(e) memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh APBD, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya;<br>(f) menentukan kebijakan DAK Fisik yang terintegrasi antara satu bidang dengan bidang lainnya;<br>(g) pemerintah dalam pengelolaan DAK Fisik untuk mempercepat pembangunan daerah, dilaksanakan dengan mengimplementasikan kebijakan afirmatif pada pengalokasian DAK Fisik. |
| 158 | Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.79 | Dana Alokasi Khusus Nonfisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah. Kebijakan DAK Nonfisik TA 2023 diarahkan untuk<br>(a) melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK Nonfisik yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi;<br>(b) melanjutkan penguatan bidang pendidikan melalui (i) penerapan unit *cost* majemuk bagi dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan; (ii) perluasan sasaran tunjangan guru dengan penambahan output guru PPPK untuk Dana TPG, Tamsil Guru, dan TKG; dan (iii) pengalokasian DAK Nonfisik berbasis kinerja untuk Dana BOS Kinerja dan Dana BOP Kinerja;<br>(c) penguatan bidang kesehatan melalui (i) penyaluran langsung Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dari RKUN ke Rekening Puskesmas dan (ii) peningkatan kualitas dan ketepatan data pelayanan UKM di tingkat puskesmas dengan menambahkan rincian menu Insentif Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM); |



SK No 168055 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | (d) Dana Alokasi Khusus Nonfisik bersifat penugasan sesuai prioritas nasional. |
| 159 | Perubahan alinea keempat dalam halaman II.79 | Penjabaran arah kebijakan tersebut dituangkan dalam kelompok DAK Nonfisik untuk mendukung operasionalisasi layanan pendidikan dan kesehatan, serta kelompok DAK Nonfisik yang mendukung pertumbuhan ekonomi sesuai dengan prioritas nasional atau amanat regulasi lainnya. |
| 160 | Penambahan alinea setelah alinea keempat dalam halaman II.79 | DAK Nonfisik terdiri dari<br>(a) Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang terdiri dari (i) Bantuan Operasional Sekolah (BOS), (ii) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), dan (iii) BOP Pendidikan Kesetaraan;<br>(b) Tunjangan Guru ASND yang terdiri dari Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASND dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND di Daerah Khusus;<br>(c) BOP Museum dan Taman Budaya;<br>(d) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);<br>(e) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB);<br>(f) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK;<br>(g) Dana Pelayanan Kepariwisataan;<br>(h) Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah;<br>(i) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;<br>(j) Dana Fasilitasi Penanaman Modal;<br>(k) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan<br>(l) Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM. |
| 161 | Perubahan alinea kelima dalam halaman II.79 | Hibah Daerah digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah dan pemerintah daerah. Kebijakan Hibah Daerah TA 2023 diarahkan untuk<br>(a) mendukung penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan sanitasi, irigasi, pertanian, lingkungan hidup, dan jalan daerah;<br>(b) sinkronisasi dan sinergi pendanaan untuk mendukung penyediaan infrastruktur daerah;<br>(c) menguatkan peran Hibah Daerah dalam mendukung penanganan kondisi bencana serta sebagai instrumen antisipatif atas perubahan kondisi perekonomian;<br>(d) menguatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Hibah serta peningkatan koordinasi dengan K/L dan pemda untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, penyaluran hibah kepada daerah dan mengoptimalkan *output*. |
| 162 | Perubahan alinea kedua dalam halaman II.80 | Jenis Hibah Daerah TA 2023 antara lain<br>(a) Hibah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, yaitu:<br>(i) *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* (IPDMIP);<br>(ii) *Mass Rapid Transit* (MRT) Project;<br>(iii) *Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling Up Initiative* (READ-SI);<br>(iv) *The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project* (UPLAND);<br>(v) Hibah Air Minum Berbasis Kinerja/*National Urban Water Supply Project* (NUWSP).<br>(b) Hibah Daerah yang bersumber dari Hibah Luar Negeri, yaitu |



SK No 168056 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | (i) Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia;<br>(ii) Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang/*Palembang City Sewerage Project* (PCSP);<br>(iii) *Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape* (Bio CF ISFL).<br>(c) Hibah Dalam Negeri yang Dihibahkan, yaitu:<br>(i) *Nationwide Water Hibah Program*;<br>(ii) Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat);<br>(iii) Hibah Jalan Daerah. |
| 163 | Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.80 | Dana Otonomi Khusus merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang mengenai Otonomi Khusus. Arah kebijakan Dana Otsus TA 2023 adalah sebagai berikut<br>(a) meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Otsus dengan mengacu kepada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2023-2024 dengan target dan capaian keluaran yang jelas dan terukur serta disinergikan dengan sumber penerimaan di luar penerimaan Otsus;<br>(b) meningkatkan kinerja penggunaan Dana Otsus Aceh melalui perbaikan pengaturan tata kelola;<br>(c) Dana Otsus Aceh untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh dialokasikan setara dengan 1 persen dari Pagu DAU sebagaimana diatur dalam UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan<br>(d) pembangunan sistem informasi pengelolaan Dana Otsus yang terintegrasi dengan prinsip interoperabilitas antarsistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik. |
| 164 | Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.81 | Pemanfaatan penerimaan daerah dalam rangka Otsus Papua terdiri atas (a) tambahan DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar selisih antara 70 persen (tujuh puluh persen) dengan persentase DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam bagian daerah sesuai UU No. 1/2022; (b) Dana Otsus sebesar 2,25 persen (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon alokasi DAU Nasional; dan (c) Dana Tambahan Infrastruktur yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan (besaran DTI ditetapkan antara Pemerintah Pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran). Pengalokasian Dana Otsus Papua dilakukan berdasarkan kewilayahan, kependudukan, kesulitan geografis, indikator capaian pembangunan, serta kinerja pengelolaan. Selain kebijakan pemanfaatan tersebut, arah kebijakan umum Dana Otsus provinsi di Wilayah Papua dalam meningkatkan penatakelolaan adalah sebagai berikut<br>(a) menetapkan pengalokasian Dana Otsus Papua sebesar 2,25 persen dari pagu DAU Nasional, hal ini sesuai dengan UU No. 2/2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;<br>(b) mengarahkan penggunaan Dana Otsus Papua dalam bentuk 1 persen *block grant* dan 1,25 persen *performance based grant* berdasarkan kinerja penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;<br>(c) meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Wilayah Papua dengan mengacu pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan |



SK No 168057 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | Papua (RAPPP) Tahun 2023-2024 yang dapat menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan belanja pemerintah; menggunakan sistem informasi pengelolaan Dana Otsus yang terintegrasi berbasis prinsip interoperabilitas; serta mempertimbangkan hasil sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otsus di Wilayah Papua oleh Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua/ Badan Pengarah Papua; dan<br>(d) meningkatkan pengawasan pelaksanaan Dana Otsus dengan melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan masyarakat. |
| 165 | Perubahan alinea kedua dalam halaman II.82 | Dana Keistimewaan DIY adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan DIY sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang mengenai keistimewaan Yogyakarta. Arah kebijakan Dana Keistimewaan DIY TA 2023 sebagai berikut<br>(a) melanjutkan peningkatan kualitas perencanaan penggunaan Dana Keistimewaan yang mengacu kepada Rencana Induk yang selaras dengan program/kebijakan belanja pemerintah yang relevan;<br>(b) melanjutkan penguatan sinergi kegiatan antara belanja K/L dengan belanja Dana Keistimewaan;<br>(c) melanjutkan peningkatan pemantauan dan evaluasi dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Dana Keistimewaan DIY;<br>(d) membangun sistem informasi tata kelola Dana Keistimewaan yang terintegrasi antara SIKD dengan APBD. |
| 166 | Penambahan alinea setelah alinea kedua dalam halaman II.82 | Arah kebijakan Dana Keistimewaan meliputi peningkatan pemantauan dan evaluasi dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Dana Keistimewaan yang diselaraskan dengan prioritas nasional, prioritas daerah, dan pencapaian target *outcome* pusat–daerah, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas pembangunan masing-masing kabupaten/kota di DIY. Sinergi kegiatan antara belanja K/L dengan belanja Dana Keistimewaan, dilakukan dengan memperhatikan (1) penguatan dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan budaya dan adat; (2) penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima; serta (3) pencapaian ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan daerah. |
| 167 | Perubahan alinea ketiga dalam halaman II.82 dan alinea pertama dalam halaman II.83 | Dana Desa (DD) adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Arah kebijakan Dana Desa TA 2023 adalah sebagai berikut<br>(a) penyempurnaan kebijakan penganggaran DD dengan memperhatikan<br>(i) kebutuhan masing-masing desa sesuai dengan kewenangan desa;<br>(ii) *performance based* dalam melaksanakan pengelolaan DD dan dukungan desa dalam menyinergikan penggunaan DD sesuai kebijakan dan prioritas nasional melalui penilaian kinerja desa dalam penghitungan alokasi kinerja.<br>(b) pengalokasian DD berdasarkan formula dan pengalokasian sebagian DD secara terpisah pada tahun anggaran berjalan berdasarkan kriteria tertentu.<br>(c) penentuan fokus penggunaan DD yang disinkronisasikan dengan prioritas nasional, utamanya untuk |



SK No 168058 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | (i) program pemulihan ekonomi, yaitu perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem maksimal 25 persen;<br>(ii) bantuan permodalan kepada BUMDes untuk menggerakkan perekonomian desa;<br>(iii) penggunaan sebagian DD untuk dana operasional pemerintah desa;<br>(iv) dukungan program sektor prioritas di desa termasuk penanganan *stunting*, mendukung ketahanan pangan dan hewani termasuk pembangunan lumbung pangan desa dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa. |
| 168 | Penambahan alinea setelah alinea pertama dalam halaman II.83 | Arah kebijakan penggunaan DD juga meliputi arahan pemanfaatan DD untuk peningkatan produktivitas melalui diversifikasi ekonomi desa, peningkatan produksi pertanian bernilai tinggi dan berkualitas ekspor, intensifikasi pertanian, perluasan kesempatan dan lapangan kerja yang layak, serta peningkatan kapasitas masyarakat desa melalui pelatihan vokasional dan manajerial. Selain itu, penggunaan DD juga diarahkan untuk memperkuat dukungan fasilitas ekonomi dan lingkungan perdesaan terutama bagi desa tertinggal dan berkembang melalui pembangunan/rehabilitasi pasar desa dan sarana prasarana kelompok usaha masyarakat desa, pembangunan sistem pembuangan dan daur ulang sampah, serta penguatan ketahanan bencana. Terakhir, penggunaan DD diarahkan untuk meningkatkan akses pelayanan dasar desa terutama untuk fasilitas kesehatan dan jaringan air bersih dan sanitasi, serta elektrifikasi melalui energi baru terbarukan berkelanjutan berskala desa. Pertimbangan arah kebijakan DD tersebut menyesuaikan dengan tema dan arah kebijakan RKP 2023 yang telah dibahas melalui hasil forum *multilateral meeting* dana desa. Untuk memperbaiki mekanisme penyaluran DD dilakukan dengan (i) memisahkan penyaluran DD *earmarked* dan *non-earmarked* berdasarkan kinerja pelaksanaan; (ii) melanjutkan penyaluran DD secara langsung dari RKUN ke RKD; (iii) melanjutkan pemberian *reward* penyaluran DD dalam dua tahap kepada desa berstatus mandiri; dan (iv) melanjutkan penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran DD jika terdapat desa bermasalah atau kepala desa menyalahgunakan DD. |
| 169 | Penambahan alinea sebelum alinea pertama dalam halaman III.16 | Lebih lanjut, dalam rangka mendukung capaian Prioritas Nasional (PN), pemerintah menyusun kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional yang terdiri dari 200 proyek dan 12 program, dengan rincian PN 1 didukung 26 proyek dan 6 program, PN 2 didukung 7 proyek dan 2 program, PN 3 didukung 3 proyek, PN 5 didukung 163 proyek dan 4 program, serta PN 7 didukung 1 proyek. |
| 170 | Perubahan Infografis Sasaran Pembangunan dalam halaman III.10 | 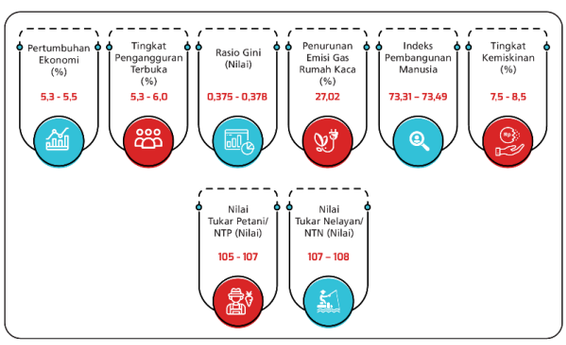 |



SK No 168059 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 171 | Perubahan Infografis Tema RKP Tahun 2023 dalam halaman III.10 | |
| 172 | Perubahan Infografis Strategi Pembangunan Tahun 2023 dalam halaman III.11 | |

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 173 | Perubahan Infografis *Major Project* Kawasan Industri Prioritas dan Smelter dalam halaman III.18 | 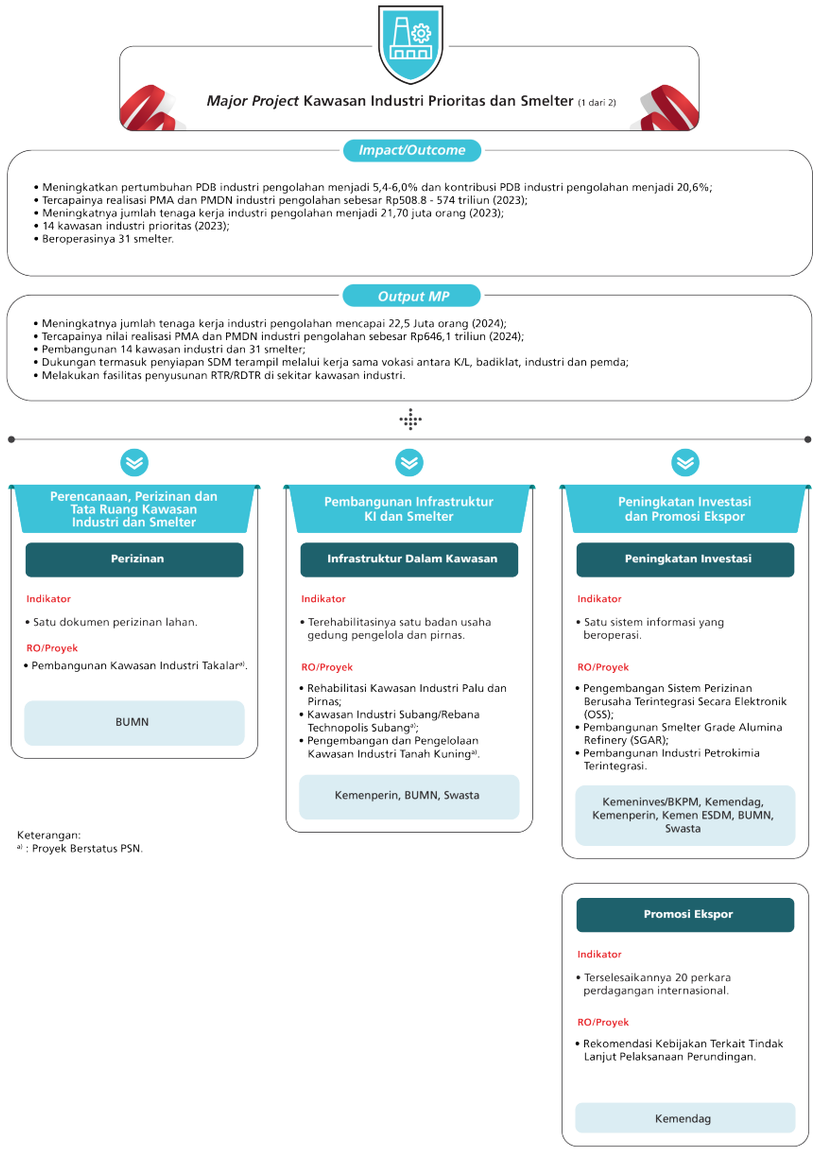 |





SK No 168061 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|

***Major Project* Kawasan Industri Prioritas dan Smelter** (2 dari 2)

***Impact/Outcome***

- Meningkatkan pertumbuhan PDB industri pengolahan menjadi 5,4-6,0% dan kontribusi PDB industri pengolahan menjadi 20,6%;
- Tercapainya realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan sebesar Rp508.8 - 574 triliun (2023);
- Meningkatnya jumlah tenaga kerja industri pengolahan menjadi 21,70 juta orang (2023);
- 14 kawasan industri prioritas (2023);
- Beroperasinya 31 smelter.

***Output MP***

- Meningkatnya jumlah tenaga kerja industri pengolahan mencapai 22,5 Juta orang (2024);
- Tercapainya nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan sebesar Rp646,1 triliun (2024);
- Pembangunan 14 kawasan industri dan 31 smelter;
- Dukungan termasuk penyiapan SDM terampil melalui kerja sama vokasi antara K/L, badiklat, industri dan pemda;
- Melakukan fasilitas penyusunan RTR/RDTR di sekitar kawasan industri.

**Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Penyediaan SDM**

**Penyediaan SDM**

**Indikator**

- Penyerapan mahasiswa dan lulusan DI s/d S1 kerja sama dengan Industri sebanyak 10.754 orang.

**RO/Proyek**

- Mahasiswa dan Lulusan Program DII, DIII dan DIV Reguler;
- Mahasiswa dan Lulusan Program DI Kerjasama Industri.

Kemenperin

**Harmonisasi Regulasi dan Lainnya**

**Harmonisasi Regulasi**

**Indikator**

- Satu dokumen rekomendasi kebijakan.

**RO/Proyek**

- Rekomendasi Kebijakan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan;
- Tingkat Implementasi P3DN dan Peningkatan TKDN pada Subsektor Pertambangan Mineral;
- Industri Smelter Logam Bukan Besi yang termonitor dan terevaluasi perkembangannya.

Kemendag, Kemenperin, Kemen ESDM



SK No 168062 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 174 | Perubahan Infografis *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM (1 dari 3) dalam halaman III.19 | |

***Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM** (1 dari 6)

**Impact/Outcome**

- Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan meningkat dari 19,89% pada tahun 2019 menjadi 21,44% di tahun 2023 dan 22,00% pada tahun 2024;
- Pertumbuhan wirausaha meningkat dari 1,71% pada tahun 2019 menjadi 2,74% pada tahun 2023 dan 2,90% pada tahun 2024;
- Mendukung kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,40% pada tahun 2023 dan 5,50% pada tahun 2024;
- Mendukung kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas sebesar 16,4% pada tahun 2023 dan 17% pada tahun 2024.

**Output MP**

- Jumlah kredit UMKM mencapai Rp1.470.716 miliar pada tahun 2023 dan Rp1.589.319 miliar pada tahun 2024;
- Tercetaknya 1.453.731 wirausaha di tahun 2023 dan 1.495.890 wirausaha di tahun 2024 di 10 lokasi MP Pengelolaan Terpadu UMKM (Provinsi Aceh, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan);
- Terbangunnya 10 rumah produksi bersama/*factory sharing*;
- Terwujudnya peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar untuk 10 koperasi pengelola Rumah Produksi Bersama.

**Aceh**

**Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama**

Indikator
- Terbangunnya 1 rumah produksi bersama/*factory sharing*.

RO/Proyek
- Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan.

Kemendag, Kemenperin

**Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan**

Indikator
- Terlaksananya dukungan fasilitasi *factory sharing* untuk 1 koperasi.

RO/Proyek
- Dukungan Fasilitasi *Factory Sharing*.

Kemen KUKM, Kemen ATR/BPN, Kemeninves/BKPM, Kemendag, Kemenperin, KPPU

**Kurasi dan Standardisasi Produk**

Indikator
- Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan standardisasi dan sertifikasi produk untuk 1.358 UMKM.

RO/Proyek
- Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk.

Kemen KUKM, Kemenag, Kemendag

**Penyediaan Akses Pembiayaan**

Indikator
- Terlaksananya penyaluran dana bergulir kepada 1 koperasi.

RO/Proyek
- Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirausaha.

Kemen KUKM, Kemendes PDTT

**Pendampingan SDM UMKM**

Indikator
- Terlaksananya pelatihan bagi 80 UMKM sektor prioritas.

RO/Proyek
- Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan.

Kemen KUKM, BSN, Kemen ATR/BPN, Kemendes PDTT, Kemnaker, Kemen PPPA, Kemendikbudristek, Kemenperin

**Regulasi dan Pendataan UMKM**

Indikator
- Terwujudnya sistem informasi terintegrasi data tunggal UMKM.

RO/Proyek
- Pendataan Lengkap KUMKM.

Kemen KUKM, Kemenperin

**Jawa Tengah**

**Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama**

Indikator
- Terbangunnya 1 rumah produksi bersama/*factory sharing*.

RO/Proyek
- IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan.

Kemendag, Kemenperin

**Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan**

Indikator
- Terlaksananya dukungan fasilitasi *factory sharing* untuk 1 koperasi.

RO/Proyek
- Dukungan Fasilitasi *Factory Sharing*.

Kemen KUKM, Kemen ATR/BPN, Kemeninves/BKPM, Kemenkominfo, Kemendag, Kemenperin, KPPU

**Kurasi dan Standardisasi Produk**

Indikator
- Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan standardisasi dan sertifikasi produk untuk 1.358 UMKM.

RO/Proyek
- Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk.

Kemen KUKM, BSN, Kemenag, Kemendag

**Penyediaan Akses Pembiayaan**

Indikator
- Terlaksananya penyaluran dana bergulir kepada 1 koperasi.

RO/Proyek
- Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirausaha.

Kemen KUKM, Kemendes PDTT

**Pendampingan SDM UMKM**

Indikator
- Terlaksananya pelatihan bagi 60 UMKM sektor prioritas.

RO/Proyek
- Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan.

Kemen KUKM, BSN, Kemen ATR/BPN, Kemendes PDTT, Kemnaker, Kemen PPPA, Kemendikbudristek, Kemenperin

**Regulasi dan Pendataan UMKM**

Indikator
- Terwujudnya sistem informasi terintegrasi data tunggal UMKM.

RO/Proyek
- Pendataan Lengkap KUMKM.

Kemen KUKM, Kemenperin



SK No 168063 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|

## *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM (2 dari 6)

### *Impact/Outcome*

- Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan meningkat dari 19,89% pada tahun 2019 menjadi 21,44% di tahun 2023 dan 22,00% pada tahun 2024;
- Pertumbuhan wirausaha meningkat dari 1,71% pada tahun 2019 menjadi 2,74% pada tahun 2023 dan 2,90% pada tahun 2024;
- Mendukung kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,40% pada tahun 2023 dan 5,50% pada tahun 2024;
- Mendukung kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas sebesar 16,4% pada tahun 2023 dan 17% pada tahun 2024.

### *Output MP*

- Jumlah kredit UMKM mencapai Rp1.470.716 miliar pada tahun 2023 dan Rp1.589.319 miliar pada tahun 2024;
- Tercetaknya 1.453.731 wirausaha di tahun 2023 dan 1.495.890 wirausaha di tahun 2024 di 10 lokasi MP Pengelolaan Terpadu UMKM (Provinsi Aceh, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan);
- Terbangunnya 10 rumah produksi bersama/*factory sharing*;
- Terwujudnya peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar untuk 10 koperasi pengelola Rumah Produksi Bersama.

### Nusa Tenggara Timur

#### Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama

Indikator
- Terbangunnya 1 rumah produksi bersama/*factory sharing*.

RO/Proyek
- IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan.

Kemendag, Kemenperin

#### Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan

Indikator
- Terlaksananya dukungan fasilitasi *factory sharing* untuk 1 koperasi.

RO/Proyek
- Dukungan Fasilitasi *Factory Sharing*.

Kemen KUKM, Kemen ATR/BPN, Kemeninves/BKPM, Kemenkominfo, Kemendag, Kemenperin, KPPU

#### Kurasi dan Standardisasi Produk

Indikator
- Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan standardisasi dan sertifikasi produk untuk 1.358 UMKM.

RO/Proyek
- Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk.

Kemen KUKM, BSN, Kemenag, Kemendag

#### Penyediaan Akses Pembiayaan

Indikator
- Terlaksananya penyaluran dana bergulir kepada 1 koperasi.

RO/Proyek
- Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirausaha.

Kemen KUKM, Kemendes PDTT

#### Pendampingan SDM UMKM

Indikator
- Terlaksananya pelatihan bagi 60 UMKM sektor prioritas.

RO/Proyek
- Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan.

Kemen KUKM, BSN, Kemen ATR/BPN, Kemendes PDTT, Kemnaker, Kemen PPPA, Kemendikbudristek, Kemenperin

#### Regulasi dan Pendataan UMKM

Indikator
- Terwujudnya sistem informasi terintegrasi data tunggal UMKM.

RO/Proyek
- Pendataan Lengkap KUMKM.

Kemen KUKM, Kemenperin

### Kalimantan Timur

#### Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama

Indikator
- Terbangunnya 1 rumah produksi bersama/*factory sharing*.

RO/Proyek
- IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan.

Kemendag, Kemenperin

#### Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan

Indikator
- Terlaksananya dukungan fasilitasi *factory sharing* untuk 1 koperasi.

RO/Proyek
- Dukungan Fasilitasi *Factory Sharing*.

Kemen KUKM, Kemen ATR/BPN, Kemeninves/BKPM, Kemendag, Kemenperin, KPPU

#### Kurasi dan Standardisasi Produk

Indikator
- Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan standardisasi dan sertifikasi produk untuk 1.358 UMKM.

RO/Proyek
- Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk.

Kemen KUKM, BSN, Kemenag, Kemendag

#### Penyediaan Akses Pembiayaan

Indikator
- Terlaksananya penyaluran dana bergulir kepada 1 koperasi.

RO/Proyek
- Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirausaha.

Kemen KUKM, Kemendes PDTT

#### Pendampingan SDM UMKM

Indikator
- Terlaksananya pelatihan bagi 60 UMKM sektor prioritas.

RO/Proyek
- Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan.

Kemen KUKM, BPOM, Kemen ATR/BPN, Kemendes PDTT, Kemnaker, Kemen PPPA, Kemendikbudristek, Kemenperin

#### Regulasi dan Pendataan UMKM

Indikator
- Terwujudnya sistem informasi terintegrasi data tunggal UMKM.

RO/Proyek
- Pendataan Lengkap KUMKM.

Kemen KUKM, Kemenperin

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 175 | Perubahan Infografis *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM (2 dari 3) dalam halaman III.20 | |

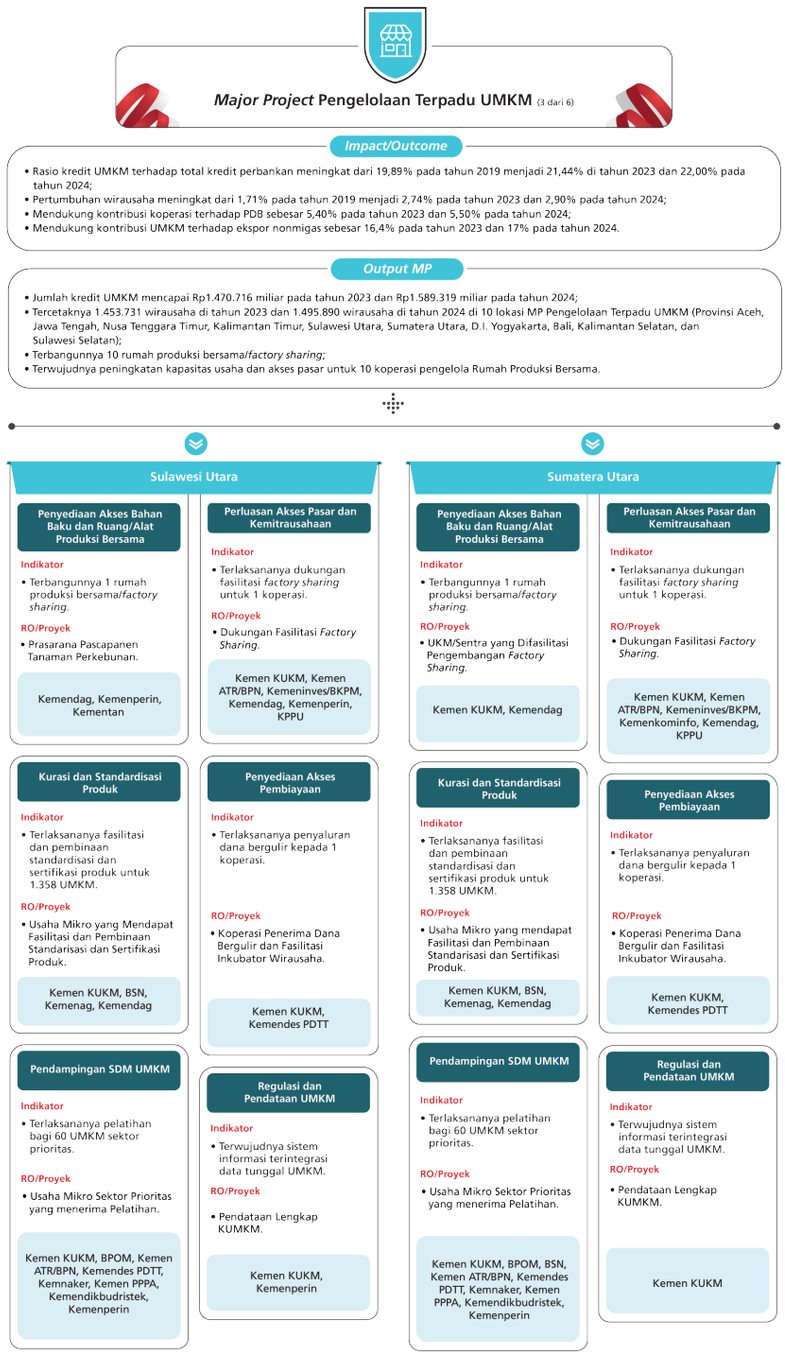




SK No 168065 A

## *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM (4 dari 6)

### *Impact/Outcome*

- Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan meningkat dari 19,89% pada tahun 2019 menjadi 21,44% di tahun 2023 dan 22,00% pada tahun 2024;
- Pertumbuhan wirausaha meningkat dari 1,71% pada tahun 2019 menjadi 2,74% pada tahun 2023 dan 2,90% pada tahun 2024;
- Mendukung kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,40% pada tahun 2023 dan 5,50% pada tahun 2024;
- Mendukung kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas sebesar 16,4% pada tahun 2023 dan 17% pada tahun 2024.

### *Output MP*

- Jumlah kredit UMKM mencapai Rp1.470.716 miliar pada tahun 2023 dan Rp1.589.319 miliar pada tahun 2024;
- Tercetaknya 1.453.731 wirausaha di tahun 2023 dan 1.495.890 wirausaha di tahun 2024 di 10 lokasi MP Pengelolaan Terpadu UMKM (Provinsi Aceh, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan);
- Terbangunnya 10 rumah produksi bersama/*factory sharing*;
- Terwujudnya peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar untuk 10 koperasi pengelola Rumah Produksi Bersama.

### DI Yogyakarta

#### Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama

Indikator
- Terbangunnya 1 rumah produksi bersama/*factory sharing*.

RO/Proyek
- UKM/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan *Factory Sharing*.

Kemen KUKM, Kemendag

#### Penyediaan Akses Pembiayaan

Indikator
- Terlaksananya penyaluran dana bergulir kepada 1 koperasi.

RO/Proyek
- Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirausaha.

Kemen KUKM, Kemendes PDTT

#### Kurasi dan Standardisasi Produk

Indikator
- Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan standardisasi dan sertifikasi produk untuk 1.358 UMKM.

RO/Proyek
- Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk.

Kemen KUKM, BSN, Kemenag, Kemendag

#### Regulasi dan Pendataan UMKM

Indikator
- Terwujudnya sistem informasi terintegrasi data tunggal UMKM.

RO/Proyek
- Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM.

Kemen KUKM

#### Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan

Indikator
- Terlaksananya dukungan fasilitasi *factory sharing* untuk 1 koperasi.

RO/Proyek
- Dukungan Fasilitasi *Factory Sharing*.

Kemen KUKM, Kemen ATR/BPN, Kemeninves/BKPM, Kemendag, KPPU

#### Pendampingan SDM UMKM

Indikator
- Terlaksananya pelatihan bagi 60 UMKM sektor prioritas.

RO/Proyek
- Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan.

Kemen KUKM, BPOM, BSN, Kemen ATR/BPN, Kemendes PDTT, Kemnaker, Kemen PPPA, Kemendikbudristek, Kemendag, Kemenperin

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 176 | Perubahan Infografis *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM (3 dari 3) dalam halaman III.21 | |

***Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM** (5 dari 6)

**Impact/Outcome**

- Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan meningkat dari 19,89% pada tahun 2019 menjadi 21,44% di tahun 2023 dan 22,00% pada tahun 2024;
- Pertumbuhan wirausaha meningkat dari 1,71% pada tahun 2019 menjadi 2,74% pada tahun 2023 dan 2,90% pada tahun 2024;
- Mendukung kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,40% pada tahun 2023 dan 5,50% pada tahun 2024;
- Mendukung kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas sebesar 16,4% pada tahun 2023 dan 17% pada tahun 2024.

**Output MP**

- Jumlah kredit UMKM mencapai Rp1.470.716 miliar pada tahun 2023 dan Rp1.589.319 miliar pada tahun 2024;
- Tercetaknya 1.453.731 wirausaha di tahun 2023 dan 1.495.890 wirausaha di tahun 2024 di 10 lokasi MP Pengelolaan Terpadu UMKM (Provinsi Aceh, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan);
- Terbangunnya 10 rumah produksi bersama/*factory sharing*;
- Terwujudnya peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar untuk 10 koperasi pengelola Rumah Produksi Bersama.

**Bali**

**Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama**

Indikator
- Terbangunnya 1 rumah produksi bersama/*factory sharing*.

RO/Proyek
- UKM/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan *Factory Sharing*.

Kemen KUKM, Kemendag, Kementan

**Penyediaan Akses Pembiayaan**

Indikator
- Terlaksananya penyaluran dana bergulir kepada 1 koperasi.

RO/Proyek
- Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirausaha.

Kemen KUKM, Kemendes PDTT

**Kurasi dan Standardisasi Produk**

Indikator
- Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan standardisasi dan sertifikasi produk untuk 1.358 UMKM.

RO/Proyek
- Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk.

Kemen KUKM, BSN, Kemenag, Kemendag

**Regulasi dan Pendataan UMKM**

Indikator
- Terwujudnya sistem informasi terintegrasi data tunggal UMKM.

RO/Proyek
- Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM.

Kemen KUKM

**Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan**

Indikator
- Terlaksananya dukungan fasilitasi *factory sharing* untuk 1 koperasi.

RO/Proyek
- Dukungan Fasilitasi *Factory Sharing*.

Kemen KUKM, Kemen ATR/BPN, Kemeninves/BKPM, Kemendag, KPPU

**Pendampingan SDM UMKM**

Indikator
- Terlaksananya pelatihan bagi 60 UMKM sektor prioritas.

RO/Proyek
- Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan.

Kemen KUKM, BPOM, BSN, Kemen ATR/BPN, Kemendes PDTT, Kemnaker, Kemen PPPA, Kemendikbudristek, Kemenperin

**Kalimantan Selatan**

**Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama**

Indikator
- Terbangunnya 1 rumah produksi bersama/*factory sharing*.

RO/Proyek
- UKM/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan *Factory Sharing*.

Kemen KUKM, Kemendag

**Penyediaan Akses Pembiayaan**

Indikator
- Terlaksananya penyaluran dana bergulir kepada 1 koperasi.

RO/Proyek
- Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirausaha.

Kemen KUKM, Kemendes PDTT

**Kurasi dan Standardisasi Produk**

Indikator
- Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan standardisasi dan sertifikasi produk untuk 1.358 UMKM.

RO/Proyek
- Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk.

Kemen KUKM, BSN, Kemenag, Kemendag

**Regulasi dan Pendataan UMKM**

Indikator
- Terwujudnya sistem informasi terintegrasi data tunggal UMKM.

RO/Proyek
- Pendataan Lengkap KUMKM.

Kemen KUKM

**Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan**

Indikator
- Terlaksananya dukungan fasilitasi *factory sharing* untuk 1 koperasi.

RO/Proyek
- Dukungan Fasilitasi *Factory Sharing*.

Kemen KUKM, Kemen ATR/BPN, Kemeninves/BKPM, Kemendag, KPPU

**Pendampingan SDM UMKM**

Indikator
- Terlaksananya pelatihan bagi 60 UMKM sektor prioritas.

RO/Proyek
- Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan.

Kemen KUKM, BPOM, BSN, Kemen ATR/BPN, Kemendes PDTT, Kemnaker, Kemen PPPA, Kemendikbudristek, Kemenperin



SK No 168067 A

## *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM (6 dari 6)

### *Impact/Outcome*

- Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan meningkat dari 19,89% pada tahun 2019 menjadi 21,44% di tahun 2023 dan 22,00% pada tahun 2024;
- Pertumbuhan wirausaha meningkat dari 1,71% pada tahun 2019 menjadi 2,74% pada tahun 2023 dan 2,90% pada tahun 2024;
- Mendukung kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,40% pada tahun 2023 dan 5,50% pada tahun 2024;
- Mendukung kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas sebesar 16,4% pada tahun 2023 dan 17% pada tahun 2024.

### *Output MP*

- Jumlah kredit UMKM mencapai Rp1.470.716 miliar pada tahun 2023 dan Rp1.589.319 miliar pada tahun 2024;
- Tercetaknya 1.453.731 wirausaha di tahun 2023 dan 1.495.890 wirausaha di tahun 2024 di 10 lokasi MP Pengelolaan Terpadu UMKM (Provinsi Aceh, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan);
- Terbangunnya 10 rumah produksi bersama/*factory sharing*;
- Terwujudnya peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar untuk 10 koperasi pengelola Rumah Produksi Bersama.

### Sulawesi Selatan

#### Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama

**Indikator**

- Terbangunnya 1 rumah produksi bersama/*factory sharing*.

**RO/Proyek**

- UKM/Sentra Yang difasilitasi Pengembangan *Factory Sharing*.

Kemen KUKM, Kemen KP, Kemendag

#### Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan

**Indikator**

- Terlaksananya dukungan fasilitasi *factory sharing* untuk 1 koperasi.

**RO/Proyek**

- Dukungan Fasilitasi *Factory Sharing*.

Kemen KUKM, Kemen ATR/BPN, Kemeninves/BKPM, Kemen PUPR, Kemendag, KPPU

#### Kurasi dan Standardisasi Produk

**Indikator**

- Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan standardisasi dan sertifikasi produk untuk 1.358 UMKM.

**RO/Proyek**

- Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk.

Kemen KUKM, BSN, Kemenag, Kemendag

#### Penyediaan Akses Pembiayaan

**Indikator**

- Terlaksananya penyaluran dana bergulir kepada 1 koperasi.

**RO/Proyek**

- Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirausaha.

Kemen KUKM, Kemendes PDTT

#### Pendampingan SDM UMKM

**Indikator**

- Terlaksananya pelatihan bagi 60 UMKM sektor prioritas.

**RO/Proyek**

- Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan;
- Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Proritas (DAK).

Kemen KUKM, BPOM, BSN, Pemda, Kemen ATR/BPN, Kemendes PDTT, Kemnaker, Kemen PPPA, Kemendikbudristek, Kemenperin

#### Regulasi dan Pendataan UMKM

**Indikator**

- Terwujudnya sistem informasi terintegrasi data tunggal UMKM.

**RO/Proyek**

- Pendataan Lengkap KUMKM.

Kemen KUKM

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 177 | Perubahan Infografis *Major Project Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan) (1 dari 2) dalam halaman III.22 | |

***Major Project Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan)** (1 dari 3)

**Impact/Outcome**

- Meningkatnya ketersediaan beras (2023: 45,4 juta ton, 2024: 46,84 juta ton nasional);
- Produksi Jagung (2023: 34,12 juta ton, 2024: 35,27 juta ton nasional);
- Peningkatan Nilai Tukar Petani (*baseline* 2020: 101,65; 2023: 105 – 107, 2024: 105, nasional);
- Peningkatan Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian (2023: Rp 57 juta/orang/tahun, 2024: Rp59,8 juta/orang/tahun, nasional);
- Tercapainya produksi padi 356,9 ribu ton GKG (2023) di Kalimantan Tengah (2024: 501,3 ribu ton GKG);
- Meningkatnya luas tanam padi 38.000 ha pada tahun 2023 dan terbangunnya Kawasan *Food Estate* seluas 148.000 ha pada tahun 2024 di Kalimantan Tengah.

**Output MP**

- Meningkatnya produktivitas 5,3% per tahun (pemenuhan target ditujukan khusus di lokus Kalimantan Tengah);
- Meningkatnya indeks pertanaman (IP) 5% per tahun (pemenuhan target ditujukan khusus di lokus Kalimantan Tengah);
- Terbangunnya Kawasan *Food Estate* seluas 148.000 ha pada tahun 2024 (Kalimantan Tengah).

## Kalimantan Tengah

### Geospasial

Indikator

- Tersedianya kawasan untuk *Food Estate* di Kalimantan Tengah.

RO/Proyek

- Peta Tematik Pertanahan dan Ruang;
- SHAT Non Sistematis Kategori 3;
- PBT Non Sistematis Kategori 3;
- Jembatan yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan;
- Lahan yang dibuka untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan;
- Jembatan yang dibangun di Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan;
- Jalan Non- Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan;
- Jalan - Tematik Pengembangan *Food Estate*;
- Bantuan Catu Pangan untuk Transmigran dalam Mendukung Ketahanan Pangan (*Food Estate*)[a)];
- Bantuan Sarana Produksi Pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP Pada Kawasan Transmigrasi Yang Mendukung *Food Estate*[a)];
- Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate;*
- Pertanian - Tematik Pengembangan *Food Estate;*
- Kehutanan - Tematik Pengembangan *Food Estate*.

Kemen ATR/BPN, Kemendes PDTT, Pemda

### *Off Farm*

Indikator

- Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian di Kalimantan Tengah.

RO/Proyek

- Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan;
- Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan.

Kementan

### *On Farm*

Indikator

- Meningkatnya produktivitas pertanian di kawasan *Food Estate* Kalimantan Tengah.

RO/Proyek

- Kawasan Padi;
- Benih sumber padi yang dihasilkan;
- Lahan Pertanian Pangan Produktif (*Food Estate*);
- Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan[a)];
- Areal Penanganan DPI.

Kementan

## Sumatera Utara

### Geospasial

Indikator

- Tersedianya kawasan untuk *Food Estate* di Sumatera Utara.

RO/Proyek

- Peta Tematik Pertanahan dan Ruang;
- SHAT Non Sistematis Kategori 3;
- PBT Non Sistematis Kategori 3;
- Jalan - Tematik Pengembangan *Food Estate;*
- Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate;*
- Pertanian - Tematik Pengembangan *Food Estate;*
- Kehutanan - Tematik Pengembangan *Food Estate.*

Kemen ATR/BPN, Pemda

### *On Farm*

Indikator

- Meningkatnya produktivitas pertanian di kawasan *Food Estate* Sumatera Utara.

RO/Proyek

- Areal Pengendalian OPT Hortikultura;
- Optimasi Lahan[a)].

Kementan

Keterangan:
[a)] : Proyek Berstatus PSN.



SK No 168069 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|

***Major Project Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan)** (2 dari 3)

***Impact/Outcome***

- Meningkatnya ketersediaan beras (2023: 45,4 juta ton, 2024: 46,84 juta ton nasional);
- Produksi Jagung (2023: 34,12 juta ton, 2024: 35,27 juta ton nasional);
- Peningkatan Nilai Tukar Petani (*baseline* 2020: 101,65; 2023: 105 – 107, 2024: 105, nasional);
- Peningkatan Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian (2023: Rp 57 juta/orang/tahun, 2024: Rp59,8 juta/orang/tahun, nasional);
- Tercapainya produksi padi 356,9 ribu ton GKG (2023) di Kalimantan Tengah (2024: 501,3 ribu ton GKG);
- Meningkatnya luas tanam padi 38.000 ha pada tahun 2023 dan terbangunnya Kawasan *Food Estate* seluas 148.000 ha pada tahun 2024 di Kalimantan Tengah.

***Output MP***

- Meningkatnya produktivitas 5,3% per tahun (pemenuhan target ditujukan khusus di lokus Kalimantan Tengah);
- Meningkatnya indeks pertanaman (IP) 5% per tahun (pemenuhan target ditujukan khusus di lokus Kalimantan Tengah);
- Terbangunnya Kawasan *Food Estate* seluas 148.000 ha pada tahun 2024 (Kalimantan Tengah).

**Sumatera Selatan**

**Geospasial**

**Indikator**

- Tersedianya kawasan untuk *Food Estate* di Sumatera Selatan.

**RO/Proyek**

- Peta Tematik Pertanahan dan Ruang;
- Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate;*
- Pertanian - Tematik Pengembangan *Food Estate;*

Kemen ATR/BPN, Pemda

***On Farm***

**Indikator**

- Meningkatnya produktivitas pertanian di kawasan *Food Estate* Sumatera Selatan.

**RO/Proyek**

- Kawasan Padi;
- Benih sumber padi yang dihasilkan;
- Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan[a];
- Areal Penanganan DPI.

Kementan

Keterangan:
[a] : Proyek Berstatus PSN.



SK No 168070 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 178 | Perubahan Infografis *Major Project Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan) (2 dari 2) dalam halaman III.23 | ***Major Project Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan)** (3 dari 3)<br><br>***Impact/Outcome***<br>• Meningkatnya ketersediaan beras (2023: 45,4 juta ton, 2024: 46,84 juta ton nasional);<br>• Produksi Jagung (2023: 34,12 juta ton, 2024: 35,27 juta ton nasional);<br>• Peningkatan Nilai Tukar Petani (*baseline* 2020: 101,65; 2023: 105 – 107, 2024: 105, nasional);<br>• Peningkatan Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian (2023: Rp 57 juta/orang/tahun, 2024: Rp59,8 juta/orang/tahun, nasional);<br>• Tercapainya produksi padi 356,9 ribu ton GKG (2023) di Kalimantan Tengah (2024: 501,3 ribu ton GKG);<br>• Meningkatnya luas tanam padi 38.000 ha pada tahun 2023 dan terbangunnya Kawasan *Food Estate* seluas 148.000 ha pada tahun 2024 di Kalimantan Tengah.<br><br>***Output MP***<br>• Meningkatnya produktivitas 5,3% per tahun (pemenuhan target ditujukan khusus di lokus Kalimantan Tengah);<br>• Meningkatnya indeks pertanaman (IP) 5% per tahun (pemenuhan target ditujukan khusus di lokus Kalimantan Tengah);<br>• Terbangunnya Kawasan *Food Estate* seluas 148.000 ha pada tahun 2024 (Kalimantan Tengah).<br><br>**Nusa Tenggara Timur**<br>**Geospasial**<br>Indikator<br>• Tersedianya kawasan untuk *Food Estate* di Nusa Tenggara Timur.<br>RO/Proyek<br>• Peta Tematik Pertanahan dan Ruang;<br>• SHAT Non Sistematis Kategori 1;<br>• PBT Non Sistematis Kategori 1;<br>• Jalan - Tematik Pengembangan *Food Estate;*<br>• Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate;*<br>• Pertanian - Tematik Pengembangan *Food Estate;*<br>• Kehutanan - Tematik Pengembangan *Food Estate.*<br>Kemen ATR/BPN, Pemda<br><br>**Papua**<br>**Geospasial**<br>Indikator<br>• Tersedianya kawasan untuk *Food Estate* di Papua<br>RO/Proyek<br>• Peta Tematik Pertanahan dan Ruang;<br>• Jalan - Tematik Pengembangan *Food Estate;*<br>• Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate;*<br>• Pertanian - Tematik Pengembangan *Food Estate;*<br>• Kehutanan - Tematik Pengembangan *Food Estate.*<br>Kemen ATR/BPN, Pemda<br><br>***On Farm***<br>Indikator<br>• Meningkatnya produktivitas pertanian di kawasan *Food Estate* Nusa Tenggara Timur.<br>RO/Proyek<br>• Kawasan Padi;<br>• Kawasan Jagung;<br>• Benih sumber padi yang dihasilkan;<br>• Benih sumber jagung yang dihasilkan;<br>• Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan[a)];<br>• Areal Penanganan DPI;<br>• Kawasan Kelapa[a)].<br>Kementan<br><br>***On Farm***<br>Indikator<br>• Meningkatnya Produktivitas Pertanian di kawasan *Food Estate* Papua.<br>RO/Proyek<br>• Kawasan Padi;<br>• Benih sumber padi yang dihasilkan;<br>• Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan[a)];<br>• Areal Penanganan DPI;<br>• Optimasi Lahan[a)];<br>• Kawasan Kelapa.<br>Kementan<br><br>Keterangan:<br>[a)] : Proyek Berstatus PSN. |



SK No 168071 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 179 | Perubahan Infografis *Major Project* Destinasi Pariwisata Prioritas (1 dari 2) dalam halaman III.24 | |

***Major Project* Destinasi Pariwisata Prioritas** (1 dari 3)

**Impact/Outcome**

- Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDB menjadi 4,10% (2023);
- Meningkatnya devisa sektor pariwisata sebesar 2,07-5,95 miliar US$ (2023);
- Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara menjadi 1.200-1.400 juta perjalanan (2023);
- Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 3,5-7,4 juta kunjungan (2023);
- Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata 21,93 juta orang (2023);
- Terbangunnya infrastruktur dasar dan aksesibilitas kunci untuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP); dan
- Peningkatan proporsi kunjungan wisatawan di 5 DPSP terhadap total kunjungan wisatawan menjadi sebesar 32%.

**Output MP**

- Meningkatnya kontribusi PDB sektor pariwisata 4,50% tahun 2024;
- Meningkatnya devisa sektor pariwisata sebesar 7,38-13,08 miliar US$ tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara menjadi 1.250-1.500 juta perjalanan pada tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 9,5-14,3 juta kunjungan pada tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata 22,08 juta orang pada tahun 2024.

**Perintisan Destinasi Pariwisata**

**Pengembangan Atraksi (Alam, Budaya, Buatan)**

Indikator
- Terlaksananya pengembangan diversifikasi atraksi mendukung DPP.

RO/Proyek
- Destinasi Wisata Alam Prioritas, Wisata Alam *Science, Academic, Voluntary, Education* yang Dikembangkan[a];
- Warisan Budaya yang Dilindungi;
- Sarana Prasarana Wisata Bahari[a].

Kemendag, Kemen KP, Kemen LHK, Kemenpora, Kemendikbudristek, Pemda

**Pembangunan Jalan di DPP**

**Pembangunan Sarana Prasarana Konektivitas Jalan, Darat, dan KA**

Indikator
- Terbangunnya aksesibilitas darat menuju kawasan DPP.

RO/Proyek
- Peningkatan Jalur KA lintas Kisaran-Rantau Prapat Tahap I (Kisaran-Mambangmuda);
- Reaktivasi Jalur Kereta Api Antara Stasiun Semarang Tawang-Pelabuhan Tanjung Mas;
- Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulonprogo[a];
- Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen[a].

Kemenhub, BUMN, Pemda

**Pembangunan Bandara dan Pelabuhan**

**Pembangunan Sarana Prasarana Konektivitas Laut**

Indikator
- Terbangunnya aksesibilitas laut menuju kawasan DPP.

RO/Proyek
- Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati Kab. Raja Ampat Tahap II - SBSN;
- Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta Kab. Raja Ampat Tahap II - SBSN;
- Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Teluk dalam Tahap V;
- Pemenuhan Kapal Pemburu Cepat (PN).

Kemenhub, POLRI

**Pembangunan Sarana Prasarana Konektivitas Udara**

Indikator
- Terbangunnya aksesibilitas udara menuju kawasan DPP.

RO/Proyek
- Pengembangan Bandar Udara DEO Sorong, Papua Barat - PN;
- Pengembangan Bandar Udara Matahora - PN;
- Pengembangan Bandar Udara Morotai - PN.

Kemenhub

Keterangan:
[a] : Proyek Berstatus PSN.



SK No 168072 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 180 | Perubahan Infografis *Major Project* Destinasi Pariwisata Prioritas (2 dari 2) dalam halaman III.25 | 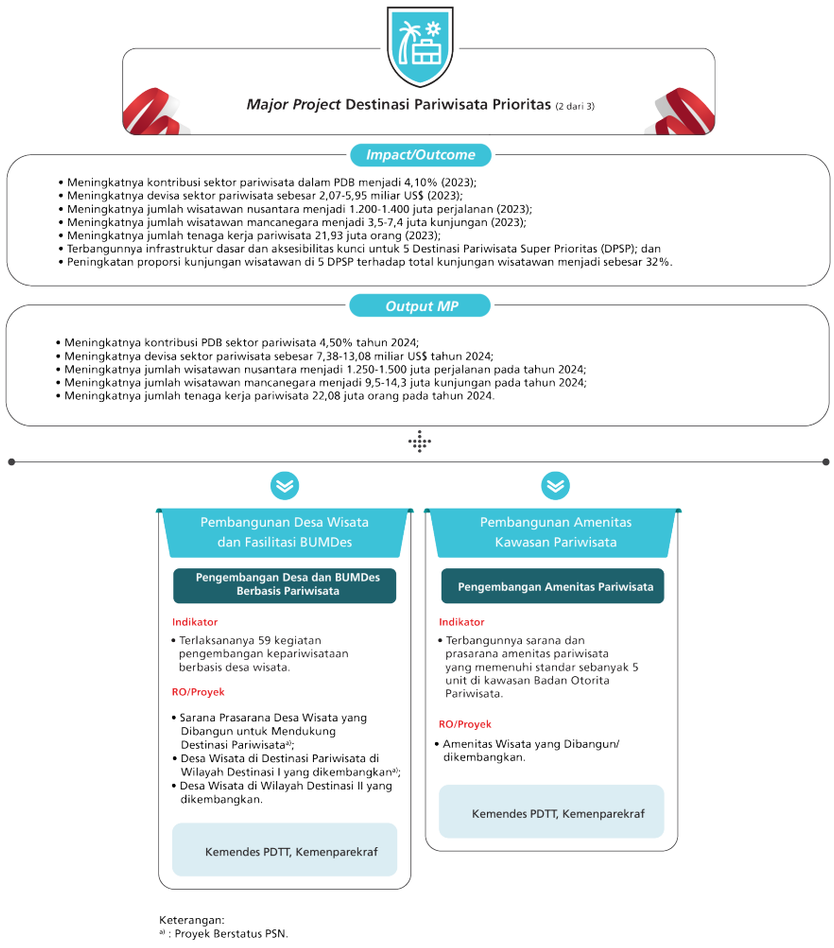 <br>Keterangan:<br>[a] : Proyek Berstatus PSN. |



SK No 168073 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|

***Major Project* Destinasi Pariwisata Prioritas** (3 dari 3)

**Impact/Outcome**

- Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDB menjadi 4,10% (2023);
- Meningkatnya devisa sektor pariwisata sebesar 2,07-5,95 miliar US$ (2023);
- Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara menjadi 1.200-1.400 juta perjalanan (2023);
- Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 3,5-7,4 juta kunjungan (2023);
- Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata 21,93 juta orang (2023);
- Terbangunnya infrastruktur dasar dan aksesibilitas kunci untuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP); dan
- Peningkatan proporsi kunjungan wisatawan di 5 DPSP terhadap total kunjungan wisatawan menjadi sebesar 32%.

**Output MP**

- Meningkatnya kontribusi PDB sektor pariwisata 4,50% tahun 2024;
- Meningkatnya devisa sektor pariwisata sebesar 7,38-13,08 miliar US$ tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara menjadi 1.250-1.500 juta perjalanan pada tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 9,5-14,3 juta kunjungan pada tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata 22,08 juta orang pada tahun 2024.

**Pembangunan dalam Wilayah dan Kawasan**

**Pengembangan Infrastruktur Wilayah**

Indikator

- Terlaksananya penataan infrastruktur yang mendukung kawasan pariwisata.

RO/Proyek

- *Be Creative* District (BCD) yang Dikembangkan;
- Penataan Kawasan Destinasi Wisata Danau Toba, Borobudur, Wakatobi, dan Bromo-Tengger-Semeru;
- Pengembangan Kawasan Pariwisata TanaMori;
- Warisan Geologi dan Geopark Nasional yang Ditetapkan;
- Kabupaten/Kota Kreatif yang Dikembangkan;
- Akses Internet;
- Amenitas dan Aksesibilitas yang Dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Danau Toba, Badan Otorita Borobudur, dan Badan Otorita Labuan Bajo Flores*).

Kemen ESDM, Kemenkominfo Kemenparekraf/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemen PUPR, POLRI, BUMN, Swasta, Pemda

**Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Indikator

- Terlaksananya 27 kegiatan promosi pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di 3 kawasan Badan Otorita Pariwisata.

RO/Proyek

- Produk Wisata dan Kegiatan *(Events)* di Kawasan Badan Otorita Danau Toba, Badan Otorita Borobudur dan Badan Otoritas Labuan Bajo Flores yang Dipromosi dan Dipublikasikan;
- Bahan Rumusan Skema Insentif bagi Industri kreatif Kuliner, Kriya , Desain Interior, Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk dan Fesyen;
- Industri Kecil dan Menengah serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas;
- Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan.

Kemenparekraf, Kemen KUKM, Pemda

**Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Indikator

- Terlaksananya pengembangan dan peningkatan kapasitas SDP pariwisata dan ekonomi kreatif untuk 32 UMKM di 3 kawasan Badan Otorita Pariwisata.

RO/Proyek

- Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja;
- Standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Anak dalam PHAPL yang Ramah Anak.

Kemenparekraf, Kemenaker, Kemen PPA, Kemen LHK

**Penguatan Kelembagaan, Regulasi, Investasi, dan Pemasaran**

Indikator

- Terbentuknya peraturan presiden untuk dokumen ITMP mendukung DPP.

RO/Proyek

- *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) pada Destinasi Pariwisata Prioritas;
- Rencana Induk Destinasi Pariwisata Prioritas (ITMP);
- Potensial Investor yang Difasilitasi Badan Otorita Danau Toba, Borobudur, dan Labuan Bajo Flores.

Kemeninves/BKPM, Kemenparekraf

Keterangan:
*) : Proyek Berstatus PSN.

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 181 | Perubahan Infografis *Major Project* Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi dalam halaman III.26 | |

***Major Project* Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi** (1 dari 2)

**Impact/Outcome**

- Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menjadi 17,9% pada 2023 dan menuju 23% pada 2024;
- Tercapainya intensitas energi primer sebesar Rp135,2 SBM/miliar pada tahun 2023 dan Rp133,8 SBM/miliar pada tahun 2024;
- Penurunan emisi GRK sektor energi sebesar 12,8% pada tahun 2023 dan 13,2% pada tahun 2024 terhadap *baseline* (BAU).

**Output MP**

- Pembangunan PLT ET 1,8 gigawatt (lokasi tersebar sesuai RUPTL 2021-2030);
- Pembangunan PLTS Terpadu daerah 3T sebanyak 12 unit, dan 2 unit PLTS Atap di Gedung K/L;
- Tersedianya 1 rekomendasi volume *biofuel* untuk domestik;
- Tersusunnya Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan label hemat energi pada peralatan pemanfaat energi.

**Pembangunan Aneka Energi Terbarukan**

**Pembangunan PLT Air**

Indikator
- Terbangunnya PLT air 409,3 MW.

RO/Proyek
- PLTMH;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan: Pembangunan PLT Air;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan: Pembangunan PLT Minihidro.

Kemen ESDM, BUMN, Swasta

**Pembangunan PLT Bayu**

Indikator
- Terbangunnya PLT bayu 33 MW.

RO/Proyek
- Monitoring TKDN PLT Bayu;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan: Pembangunan PLT Bayu.

Kemen ESDM, BUMN

**Pembangunan PLT Surya**

Indikator
- Terbangunnya PLT surya 1.308 MW.

RO/Proyek
- PLTS Terpadu;
- PLTS Atap K/L;
- Infrastruktur Energi Terbarukan – Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan: Pembangunan PLT Surya.

Kemen ESDM, KPPPA, Kemenpora, Pemda, BUMN, Swasta

**Pengembangan Riset dan Inovasi**

Indikator
- 4 Peta Data (470 MW).

RO/Proyek
- Peta Potensi EBT dalam Rangka Percepatan Investasi PLT Bayu, Hidro dan Biomassa;
- Diklat Masyarakat Bidang EBTKE;
- Diklat Industri Bidang EBTKE;
- Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Ketenagalistrikan dan EBTKE.

Kemen ESDM

Keterangan:
a) : Proyek Berstatus PSN.

**Pembangunan Bioenergi**

**Pembangunan PLT Bioenergi**

Indikator
- Terbangunnya PLT bioenergi 87 MW.

RO/Proyek
- Monitoring TKDN Bidang Bioenergi;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan: Pembangunan PLT Biomassa;
- Pembangunan Pabrik BioCNG Kapasitas 210 MMBTU/Hari di PKS Mayang PTPN IV;
- Penanaman Biomassa untuk mendukung Rencana Proyek Strategis: *New Factory* dan Komersialisasi Produk Biomassa;
- Pembangunan Pabrik Serbuk Kayu (*Cofiring*).

Kemen ESDM, BUMN, Swasta

**Pembangunan *Greenfuel***

Indikator
- Volume biofuel untuk domestik 10,65 juta KL.

RO/Proyek
- Volume Biofuel untuk Domestik;
- *Green Diesel Bio Refinery* Revamping RU IV Cilacap (*Phase* 2)[a];
- Pengembangan Pabrik Katalis Merah Putih PT Katalis Sinergi Indonesia[a];
- Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat;
- Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel (PN);
- Pembangunan Pabrik Biodiesel Kapasitas 1500 Ton RBDPO/Hari di KEK Sei Mangke.

Kemen ESDM, Kementan, Kemenkeu, BUMN



SK No 168075 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|

***Major Project* Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi** (2 dari 2)

**Impact/Outcome**

- Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menjadi 17,9% pada 2023 dan menuju 23% pada 2024;
- Tercapainya intensitas energi primer sebesar Rp135,2 SBM/miliar pada tahun 2023 dan Rp133,8 SBM/miliar pada tahun 2024;
- Penurunan emisi GRK sektor energi sebesar 12,8% pada tahun 2023 dan 13,2% pada tahun 2024 terhadap *baseline* (BAU).

**Output MP**

- Pembangunan PLT ET 1,8 gigawatt (lokasi tersebar sesuai RUPTL 2021-2030);
- Pembangunan PLTS Terpadu daerah 3T sebanyak 12 unit, dan 2 unit PLTS Atap di Gedung K/L;
- Tersedianya 1 rekomendasi volume *biofuel* untuk domestik;
- Tersusunnya Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan label hemat energi pada peralatan pemanfaat energi.

**Pembangunan Panas Bumi**

**Pembangunan PLT Panas Bumi**

Indikator

- Terbangunnya PLTP 20 MW.

RO/Proyek

- Penawaran Wilayah Panas Bumi;
- Penetapan Wilayah Panas Bumi;
- Monitoring TKDN Bidang Panas Bumi;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan: Pembangunan PLT Panas Bumi.

Kemen ESDM, BUMN, Swasta

**Peningkatan Kualitas Data Panas Bumi**

Indikator

- 3 Rekomendasi keprospekan.

RO/Proyek

- Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi.

Kemen ESDM

**Konservasi Energi**

**Standar/Regulasi**

Indikator

- 1 Rekomendasi Kebijakan/ 0,8 SBM/Miliar Rupiah

RO/Proyek

- Penurunan Intensitas Energi Final;
- Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat Energi;
- Reduksi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor ESDM
- Kendaraan Listrik Hasil Konversi.

Kemen ESDM

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 182 | Perubahan Infografis *Major Project* Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay dalam halaman III.27 | |

***Major Project* Wilayah Adat Papua:**
**Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay** (1 dari 2)

***Impact/Outcome***

- Meningkatnya rata-rata IPM di Wilayah Adat Laa Pago sebesar 50,2-50,7 dan rata-rata IPM di Wilayah Adat Domberay sebesar 64,3-64,8 pada tahun 2023;
- Meningkatnya rata-rata IPM di Wilayah Adat Laa Pago sebesar 51,2-51,7 dan rata-rata IPM di Wilayah Adat Domberay sebesar 65,0-65,5 pada tahun 2024.

***Output MP***

- Pengembangan 8 Bandara;
- Pembangunan 2 Pelabuhan Penyeberangan;
- Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong 20,7 km;
- Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Provinsi Papua dan Papua Barat 200 orang;
- Perluasan Kawasan Sagu (300 ha), Kopi (100 ha), dan Kakao (100 ha).

**Pengembangan Kawasan**

**Infrastruktur Kawasan**

Indikator
- Terbangunnya air baku di KEK Sorong sepanjang 10,3 km.

RO/Proyek
- Air Baku KEK Sorong yang Dibangun;
- Sarana Perumahan yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi;
- Jalan Non-Status yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi.

Kemen PUPR, Kemendes PDTT

**Produksi Komoditas**

Indikator
- Terlaksananya perluasan kawasan sagu hingga 300 ha, kawasan kopi hingga 100 ha, dan kawasan kakao hingga 100 ha.

RO/Proyek
- Kawasan Sagu;
- Kawasan Kopi;
- Kawasan Kakao.

Kementan, Kemendes PDTT

**Kampung Terpadu**

Indikator
- Terlaksananya peningkatan kapasitas 714 kelompok masyarakat melalui Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD).

RO/Proyek
- Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Melalui Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD).

Kemendes PDTT

**Industri**

Indikator
- Terfasilitasinya 1 kegiatan dalam pengembangan industri di Teluk Bintuni.

RO/Proyek
- Fasilitasi Investor dalam Rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni;
- Wirausaha Industri yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi Melalui Dana Dekonsentrasi;
- IKM yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk Melalui Dana Dekonsentrasi.

Kemenperin

**Pariwisata**

Indikator
- Terbangunnya 1 unit sarana prasarana desa wisata.

RO/Proyek
- Sarana Prasarana Desa Wisata yang Dibangun untuk Mendukung Destinasi Pariwisata.

Kemendes PDTT

**Infrastruktur Pendukung**

**Energi dan TIK**

Indikator
- Terbangunnya BTS 4G/*Lastmile* di 191 titik/lokasi.

RO/Proyek
- BTS 4G / Lastmile Papua dan Papua Barat;
- Pemasangan Sambungan Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T;
- Pengadaan Sarana Pendukung Teknologi dan Media Baru Siaran Radio Prioritas Nasional (PN).

Kemen ESDM, Kemenkominfo, LPP RI

**Infrastruktur Jalan**

Indikator
- Terbangunnya Jalan Trans Papua Merauke-Sorong sepanjang 20,7 km.

RO/Proyek
- Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN AMBUNI - KARUAN;
- Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi.

Kemen PUPR, Pemda

**Infrastruktur Bandar Udara**

Indikator
- Terlaksananya pengembangan 8 bandara.

RO/Proyek
- Pengembangan Bandar Udara Anggi;
- Pengembangan Bandar Udara Wamena Tahap III;
- Pengembangan Bandar Udara Rendani.

Kemenhub

**Infrastruktur Pelabuhan**

Indikator
- Terbangunnya 2 pelabuhan penyebrangan.

RO/Proyek
- Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati Kab. Raja Ampat Tahap II;
- Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta Kab. Raja Ampat Tahap II.

Kemenhub

**Angkutan Udara Perintis**

Indikator
- Tersedianya 82 layanan angkutan udara perintis.

RO/Proyek
- Angkutan Udara Perintis;
- Angkutan BBM Angkutan Udara Perintis;
- Angkutan Kargo Perintis (MP).

Kemenhub

Keterangan:
a) : Target merupakan alokasi se-wilayah Papua
b) : Target merupakan target nasional



SK No 168077 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|

## *Major Project* Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay (2 dari 2)

### *Impact/Outcome*

- Meningkatnya rata-rata IPM di Wilayah Adat Laa Pago sebesar 50,2-50,7 dan rata-rata IPM di Wilayah Adat Domberay sebesar 64,3-64,8 pada tahun 2023;
- Meningkatnya rata-rata IPM di Wilayah Adat Laa Pago sebesar 51,2-51,7 dan rata-rata IPM di Wilayah Adat Domberay sebesar 65,0-65,5 pada tahun 2024.

### *Output MP*

- Pengembangan 8 Bandara;
- Pembangunan 2 Pelabuhan Penyeberangan;
- Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong 20,7 km;
- Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Provinsi Papua dan Papua Barat 200 orang;
- Perluasan Kawasan Sagu (300 ha), Kopi (100 ha), dan Kakao (100 ha).

### Infrastruktur Dasar

**Infrastruktur Permukiman**

Indikator
- Terbangunnya air baku di Kabupaten Lanny Jaya sepanjang 6 km.

RO/Proyek
- Penyediaan Air Baku di Kabupaten Lanny Jaya yang Dibangun.

Kemen PUPR

### Pendidikan

**Tenaga Pendidik**

Indikator
- Terlaksananya pendampingan pembelajaran bagi guru dan tenaga kependidikan sebanyak 1200 orang[a].

RO/Proyek
- Guru dan Tenaga Kependidikan yang Mendapat Pendampingan Pembelajaran.

Kemendikbudristek, Kemenag

**Beasiswa Peserta Didik**

Indikator
- Tersalurkannya Beasiswa ADEM kepada 3048 orang[b];
- Tersalurkannya beasiswa ADIK kepada 7417 orang[b].

RO/Proyek
- Siswa Penerima Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM);
- Mahasiswa Yang mendapatkan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK).

Kemendikbudristek

**Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**

Indikator
- Terlaksananya PBK kerja sama sebanyak 80 orang.

RO/Proyek
- PBK Kerjasama dengan Dunia Industri;
- Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten;
- Pelatihan Peningkatan Produktivitas.

Kemnaker, Kemen KP, Kemendes PDTT, Kementan

### Kesehatan

**Tenaga Medis**

Indikator
- Terlaksananya penugasan khusus tenaga kesehatan sebanyak 200 orang[a].

RO/Proyek
- Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat (SDM);
- Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat (SDM).

Kemenkes

**Beasiswa**

Indikator
- Tersalurkannya bantuan pendidikan PPDS/PDGS kepada 100 orang[a].

RO/Proyek
- Bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/ Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PDGS) Papua dan Papua Barat.

Kemenkes

Keterangan:
a) : Target merupakan alokasi se-wilayah Papua
b) : Target merupakan target nasional



SK No 168078 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 183 | Perubahan Infografis *Major Project* Pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam halaman III.28 | |

***Major Project* Pembangunan Ibu Kota Nusantara** (1 dari 2)

**Impact/Outcome**

Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan 5,2 - 5,5% pada tahun 2023 dan 5,40% pada tahun 2024 (*baseline* 2019: 4,96%).

**Output MP**

- Rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS sekitarnya;
- Pemulihan ekosistem area IKN;
- Konservasi kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi;
- Terlaksananya pelepasan kawasan hutan pembangunan IKN;
- Terlaksananya pengamanan Ibu Kota Negara;
- Pemetaan / penilaian potensi dan kompetensi ASN;
- Tersusunnya dokumen sanksi administratif pelanggaran pemanfaatan ruang di IKN;
- Tersusunnya materi teknis dan Ranperda (PK/Revisi) RTRW Prov/Kab/Kota hasil bimbingan teknis di Pulau Kalimantan - Provinsi Kalimantan Timur;
- Terpetakannya bidang tanah bersertifikat yang akan dibangun di kawasan IKN;
- Tersusunnya dokumen kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan telekomunikasi di IKN;
- Tersusunnya standar instrument pengelolaan hutan berkelanjutan di IKN;
- Tersusunnya dokumen rencana induk, studi perencanaan teknis, OBC untuk pembangunan infrastruktur konektivitas di IKN;
- Tersusunnya hasil analisis dan konsep fasilitas pelayanan kesehatan di IKN;
- Terlaksananya pembangunan gedung dan penataan kawasan IKN;
- Terbangunnnya infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas di IKN;
- Terbangunnya Bendungan Sepaku Semoi;
- Terbangunnya Jaringan Interkoneksi (listrik);
- Terbangunnya Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi;
- Terbangunnya Infrastruktur ICT di Kawasan Ibu Kota Negara;
- Terbangunnya Jaringan Telekomunikasi di Ibu Kota Negara;
- Terbangunannya Infrastruktur Gas Bumi di IKN;
- Terlaksananya Pembangunan SPAM IKN;
- Terbangunnya sistem pengelolaan sanitasi di IKN;
- Terbangunnya infrastruktur air baku;
- Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi oleh unit pelayanan teknis pusat;
- Tersusunnya rekomendasi kebijakan pengawalan/pengendalian desain sistem pertanahan dan keamanan, serta infrastruktur TIK di Ibu Kota Negara Baru;
- Tersusunnya peta peluang investasi proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan di Ibu Kota Negara (IKN) bidang infrastruktur, jasa kawasan, manufaktur, dan sumber daya alam.

**Penyiapan Regulasi dan Kebijakan**

**Regulasi dan Kebijakan**

Indikator

- Jumlah dokumen regulasi, rekomendasi kebijakan, dan NSPK yang disusun.

RO/Proyek

- Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di IKN;
- Rekomendasi Kebijakan untuk Mendukung Penyelenggaraan Telekomunikasi di IKN;
- Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (IKN);
- Rekomendasi Kebijakan Pengawalan/Pengendalian Desain Sistem Pertahanan Ibu Kota Negara Baru;
- Rekomendasi Kebijakan Pengawalan/Pengendalian Desain Sistem Keamanan IbuKota Negara Baru;
- Rekomendasi Kebijakan Pengawalan/Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Ibukota Negara Baru;
- Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Kepala Otorita IKN;
- Rekomendasi Penataan Ulang Penggunaan BMN oleh K/L (*Asset Rearrangement*) di Jakarta (PN);
- Rekomendasi Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Ibu Kota Negara Lama (PN).

Kemenkeu, Kemen ATR/BPN, Kemenkominfo, Kemen LHK, Kemenko Polhukam

**Perencanaan dan Penyiapan Lahan**

**Penyiapan lahan**

Indikator

- Luas lahan IKN yang siap bangun, Luas ruang hijau di IKN.

RO/Proyek

- Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk IKN;
- Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS sekitarnya;
- Pemulihan Ekosistem Area IKN;
- Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi;
- SHAT PTSL Kategori 3 - Provinsi Kalimantan Timur.

Kemen LHK, Kemen ATR/BPN

**Perencanaan Kawasan dan Infrastruktur**

Indikator

- Jumlah dokumen studi, rencana, materi teknis, serta rencana teknis kawasan dan infrastruktur.

RO/Proyek

- Materi Teknis dan Ranperda (PK/Revisi) RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Pulau Kalimantan;
- Studi Penyesuaian KA Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggan Balikpapan - KIPP dengan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Nasional IKN;
- Penyusunan OBC rencana penyelenggaraan KA Bandara Sepinggan - KPIP dan Pengembangan KA perkotaan Balikpapan - IKN Phase 2;
- Penyusunan OBC Rencana Penyelenggaraan KA Antarkota Trans Kalimantan Segmen Simpang Petung - Balikpapan - Samarinda;
- Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Ibu Kota Negara (IKN) Bidang Infrastruktur;
- Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Dukungan IKN) (Prioritas Nasional) - Pusat;
- Sistem Transportasi Ibukota Nusantara - Provinsi Kalimantan Timur;
- Koordinasi Penyiapan Analisis dan Konsep Fasilitas Pelayanan Kesehatan di IKN.

Kemen ATR/BPN, Kemenhub, Kemenkes, Kemen Investasi/BKPM

Keterangan:
a) : Proyek Berstatus PSN



SK No 168079 A

## *Major Project* Pembangunan Ibu Kota Nusantara (2 dari 2)

### *Impact/Outcome*

Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan 5,2 - 5,5% pada tahun 2023 dan 5,40% pada tahun 2024 (*baseline* 2019: 4,96%).

### *Output MP*

- Rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS sekitarnya;
- Pemulihan ekosistem area IKN;
- Konservasi kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi;
- Terlaksananya pelepasan kawasan hutan pembangunan IKN;
- Terlaksananya pengamanan Ibu Kota Negara;
- Pemetaan / penilaian potensi dan kompetensi ASN;
- Tersusunnya dokumen sanksi administratif pelanggaran pemanfaatan ruang di IKN;
- Tersusunnya materi teknis dan Ranperda (PK/Revisi) RTRW Prov/Kab/Kota hasil bimbingan teknis di Pulau Kalimantan - Provinsi Kalimantan Timur;
- Terpetakannya bidang tanah bersertifikat yang akan dibangun di kawasan IKN;
- Tersusunnya dokumen kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan telekomunikasi di IKN;
- Tersusunnya standar instrument pengelolaan hutan berkelanjutan di IKN;
- Tersusunnya dokumen rencana induk, studi perencanaan teknis, OBC untuk pembangunan infrastruktur konektivitas di IKN;
- Tersusunnya hasil analisis dan konsep fasilitas pelayanan kesehatan di IKN;
- Terlaksananya pembangunan gedung dan penataan kawasan IKN;
- Terbangunnya infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas di IKN;
- Terbangunnya Bendungan Sepaku Semoi;
- Terbangunnya Jaringan Interkoneksi (listrik);
- Terbangunnya Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi;
- Terbangunnya Infrastruktur ICT di Kawasan Ibu Kota Negara;
- Terbangunnya Jaringan Telekomunikasi di Ibu Kota Negara;
- Terbangunannya Infrastruktur Gas Bumi di IKN;
- Terlaksananya Pembangunan SPAM IKN;
- Terbangunnya sistem pengelolaan sanitasi di IKN;
- Terbangunnya infrastruktur air baku;
- Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi oleh unit pelayanan teknis pusat;
- Tersusunnya rekomendasi kebijakan pengawalan/pengendalian desain sistem pertanahan dan keamanan, serta infrastruktur TIK di Ibu Kota Negara Baru;
- Tersusunnya peta peluang investasi proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan di Ibu Kota Negara (IKN) bidang infrastruktur, jasa kawasan, manufaktur, dan sumber daya alam.

### Pengembangan Kawasan dan SDM

#### Pengamanan

Indikator
- Jumlah layanan pengamanan di kawasan IKN.

RO/Proyek
- Pengamanan Ibu Kota Negara (IKN) (PN).

POLRI

#### Infrastruktur

Indikator
- Jumlah unit infrastruktur terbangun di kawasan IKN.

RO/Proyek
- Pembangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN-Kab. Penajam Paser Utara;
- Pembangunan SPAM IKN Provinsi Kalimantan Timur;
- Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi[a)];
- Dukungan Infrastruktur IKN - Jalan *Bypass* Pasar Sepaku: Paket Jalan *Shortcut* Pasar Sepaku (IKN);
- Sistem Pengelolaan Sanitasi IKN - Provinsi Kalimantan Timur;
- Pembangunan Jaringan Interkoneksi (listrik);
- Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi;
- Pembangunan Infrastruktur ICT di Kawasan Ibu Kota Negara;
- Pembangunan Jaringan Telekomunikasi di Ibu Kota Negara;
- Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sungai Sepaku Kab. Penajam Paser Utara yang dibangun (IKN);
- Prasarana air baku IKN yang dibangun;
- Dukungan Infrastruktur IKN - Dermaga Logistik Ibu Kota Negara (IKN);
- Dukungan Infrastruktur IKN - Jalan *Bypass* Pasar Sepaku: Paket Jalan *Shortcut* Pasar Sepaku (IKN);
- Dukungan Infrastruktur IKN - Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek;
- Dukungan Pertamina Group dalam Penyediaan Infrastruktur Gas Bumi di IKN.

Kemen PUPR, Kemenhub, BUMN, Kemen LHK

#### SDM

Indikator
- Jumlah program pemetaan dan peningkatan kapasitas SDM.

RO/Proyek
- Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Penataan Arsip Persiapan Pemindahan IKN;
- Pemetaan/Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN;
- PBK UPTP - Kota Samarinda;
- PBK Provinsi Kalimantan Timur.

ANRI, BKN, Kemnaker

Keterangan:
a) : Proyek Berstatus PSN



SK No 168080 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 184 | Perubahan Infografis *Major Project* Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dalam halaman III.29 | |

***Major Project* Reformasi Sistem Perlindungan Sosial**

**Impact/Outcome**

- Penurunan angka tingkat kemiskinan menjadi 7,5-8,5% di tahun 2023 dan 6-7% di tahun 2024;
- Penurunan angka penduduk miskin ekstrem menjadi 1,5-2,0% di tahun 2023 dan 0-1% di tahun 2024.

**Output MP**

- Cakupan 100% daerah melaksanakan Registrasi Sosial Ekonomi di tahun 2022, 2023, dan 2024;
- Terbangunnya skema digitalisasi bantuan sosial;
- Terbangunnya skema perlindungan sosial adaptif untuk penanganan bencana;
- Cakupan 70% desa/kelurahan menggunakan digitalisasi monografi desa/kelurahan untuk perencanaan penganggaran berbasis bukti;
- Penyelenggaraan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan di 300 kabupaten/kota tahun 2023 dan 514 kabupaten/kota tahun 2024;
- Meningkatnya cakupan instansi yang mendapatkan pemahaman program jaminan sosial tenaga kerja;
- Peningkatan cakupan kepesertaan program jaminan sosial sebesar 13,3 juta peserta;
- Penyaluran program sembako bagi 15,6 juta KPM di tahun 2023 dan 2024;
- Penyaluran program keluarga harapan bagi 10 juta KPM di tahun 2023 dan 2024.

**Pengembangan Registrasi Sosial Ekonomi**

**Peningkatan Cakupan Data dari Desa/Kelurahan**

Indikator

- Terbangunnya data registrasi sosial ekonomi di 514 kabupaten/kota.

RO/Proyek

- Pendampingan Desa;
- Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM;
- Publikasi/Laporan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi.

Kemendes PDTT, Kemendagri, Kemen KUKM, Kemensos, BPS

**Pengelolaan Data**

Indikator

- Meningkatnya kabupaten/Kota yang menyelenggarakan layanan pengaduan penanggulangan kemiskinan di 514 kabupaten/kota.

RO/Proyek

- Kabupaten/Kota yang Mengembangkan SLRT;
- Desa/Kelurahan yang Menyelenggarakan Puskesos.

Kemensos, Kemenkes, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, Pemerintah Desa/Kelurahan

**Sinkronisasi dan Integrasi Data untuk Penargetan Perlindungan Sosial**

Indikator

- Terlaksananya pembangunan *Data Center* Nasional di 2 titik/lokasi.

RO/Proyek

- Daerah yang Menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam SIPD Bidang Perencanaan Anggaran;
- Sistem Informasi Bidang Kebencanaan;
- *Data Center* Nasional.

Kemendagri, BNPB, Kemenkominfo, Kemensos, Kemen LHK

**Penguatan Integrasi Kepesertaan dan Informasi Jaminan Sosial**

**Integrasi dan Perluasan Kepesertaan**

Indikator

- Meningkatnya cakupan instansi atau wadah/kelompok pekerja yang mendapatkan pemahaman program jaminan sosial tenaga kerja sebesar 600 lembaga.

RO/Proyek

- Instansi Pengguna Pegawai Non-PNS dan Wadah/Kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah yang Mendapatkan Pemahaman Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Kemnaker, Kemenko PMK

**Integrasi Data Jaminan Sosial**

Indikator

- Meningkatnya cakupan kepesertaan program jaminan sosial sebesar 13,3 juta peserta.

RO/Proyek

- Cakupan Penduduk yang Menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS;
- Nelayan yang Diidentifikasi Identitasnya dalam Rangka Perlindungan Nelayan;
- Pelayanan Koneksitas *Warehouse* Berbasis NIK Nasional.

Kemenkes, Kemen KP, Kemendagri

**Penguatan Bantuan Sosial**

**Perluasan Pilihan KPM dan Pengembangan Skema Penyaluran**

Indikator

- Meningkatnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang padan dengan data administrasi kependudukan sebesar 100%.

RO/Proyek

- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- Rekomendasi Pengembangan Desa Digital melalui *Smart Village*;
- Literasi Digital.

Kemensos, Kemendes PDTT, Kemenkominfo, Kemenkeu

**Integrasi dan Transformasi Program Bantuan Sosial**

Indikator

- Tersalurkannya bantuan sosial sembako kepada 10 juta keluarga.

RO/Proyek

- Keluarga yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat;
- KPM yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako;
- Penyediaan Elpiji 3 kg yang Tepat Sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran;
- Siswa Madrasah MI/MTs/MA Penerima PIP;
- Siswa SD/SMP/SMA yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar.

Kemensos, Kemen ESDM, Kemendikbudristek, Kemenag, Kemen PUPR

**Penguatan Sistem Pendukung**

Indikator

- Meningkatnya cakupan akses internet di 7.474 titik/lokasi.

RO/Proyek

- Akses Internet;
- Sumber Daya Manusia yang Dikelola.

Kemensos, Kemenkominfo, Kementan, Kemenkes, Kemendes PDTT, BKKBN, Kemen LHK



SK No 168081 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 185 | Perubahan Infografis *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional dalam halaman III.30 | |

***Major Project*** **Reformasi Sistem Kesehatan Nasional**

***Impact/Outcome***

- Menurunnya insidensi tuberkulosis menjadi 211/100.000 penduduk pada tahun 2023 dan 190/100.000 penduduk pada tahun 2024;
- Puskesmas tanpa dokter menjadi 0% pada tahun 2023 dan tahun 2024;
- Tercapainya pemenuhan 42 RS Rujukan Nasional pada tahun 2023 dan tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah kab/kota eliminasi malaria menjadi 385 kab/kota pada tahun 2023 dan 405 kab/kota pada tahun 2024;
- Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan menjadi 75% pada tahun 2023 dan 90% pada tahun 2024;
- Meningkatnya puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebanyak 71% puskesmas pada tahun 2023 dan 83% puskesmas pada tahun 2024;
- Meningkatnya ketersediaan minimal 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya di 85% RSUD kab/kota pada tahun 2023 dan 90% RSUD kab/kota pada tahun 2024;
- Terakreditasinya 90% FKTP dan 95% RS pada tahun 2023 dan 100% FKTP dan 100% RS pada tahun 2024;
- Terwujudnya integrasi dan digitalisasi sistem informasi surveilans menjadi 90% pada tahun 2023 dan 100% pada tahun 2024.

***Output MP***

- Cakupan TB *Treatment Coverage* menjadi 90% pada tahun 2023 dan 2024;
- Kab/kota dengan API Malaria < 1.000 penduduk menjadi 495 kab/kota pada tahun 2023 dan 500 kab/kota pada tahun 2024;
- Kab/kota mencapai 80% imunisasi dasar lengkap menjadi 471 kab/kota pada tahun 2023 dan 488 kab/kota pada tahun 2024;
- Jumlah dokter *pasca internsip* dan lulusan dokter spesialis yang didayagunakan sebanyak 800 dokter dan 660 dokter spesialis pada tahun 2023 serta 1.000 dokter dan 660 dokter spesialis pada tahun 2024;
- Jumlah FKTP dan RS memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 6.110 FKTP dan 1.169 RS pada tahun 2023 serta 5.706 FKTP dan 991 RS pada tahun 2024;
- Jumlah bahan baku obat dan obat 10 terbesar yang diproduksi dalam negeri sebanyak 14 molekul pada tahun 2023 dan 20 molekul pada tahun 2024;
- RS milik pemerintah daerah yang memenuhi Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA) sesuai standar menjadi 95% pada tahun 2023 dan 100% pada tahun 2024;
- Rekomendasi surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan sebesar 95% pada tahun 2023 dan 100% pada tahun 2024;
- Belanja kesehatan promotif preventif dalam JKN menjadi 12% pada tahun 2023 dan 15% pada tahun 2024;
- Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan terintegrasi menjadi 200 sistem pada tahun 2023 dan 300 sistem pada tahun 2024.

**Pendidikan dan Penempatan Tenaga Kesehatan**

Indikator
- Jumlah dokter *pasca internsip* dan lulusan dokter spesialis yang didayagunakan sebanyak 800 dokter dan 660 dokter spesialis pada tahun 2023 serta 1.000 dokter dan 660 dokter spesialis pada tahun 2024.

RO/Proyek
- Pendayagunaan Dokter Spesialis;
- Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim dan Individu.

Kemenkes, KemenPAN RB, BKN

**Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan**

Indikator
- Jumlah bahan baku obat dan obat 10 terbesar yang diproduksi dalam negeri sebanyak 14 molekul pada tahun 2023 dan 20 molekul pada tahun 2024.

RO/Proyek
- Promosi Pemanfaatan Alat Kesehatan Dalam Negeri;
- Industri Bahan Baku Obat yang Memproduksi 10 Molekul Obat Sesuai Kebutuhan Dalam Negeri.

Kemenkes, Kemenperin, BPOM, BUMN

**Inovasi Pembiayaan Kesehatan**

Indikator
- Belanja kesehatan promotif preventif dalam JKN menjadi 12% pada tahun 2023 dan 15% pada tahun 2024.

RO/Proyek
- *Review* dan Evaluasi Tarif INA CBG dan Kapitasi pada Program JKN;
- Peningkatan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam Mendukung Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan.

Kemenkes, BPJS Kesehatan

**Peningkatan Kapasitas RS dan Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan**

Indikator
- Jumlah RS memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 1.169 RS pada tahun 2023 serta 991 RS pada tahun 2024;
- RS milik pemerintah daerah yang memenuhi Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA) sesuai standar menjadi 95% pada tahun 2023 dan 100% pada tahun 2024.

RO/Proyek
- Peningkatan Kapasitas dan Penyediaan Sarpras dan Alat RS termasuk RS TNI dan Polri;
- Peningkatan Kualitas Pelayanan RS *Holding* BUMN.

Kemenkes, Kemhan, Polri, Kemenhub, Kemen ESDM, Kemenkominfo, BUMN, Pemda

**Penguatan Keamanan dan Ketahanan Kesehatan**

Indikator
- Rekomendasi surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan sebesar 95% pada tahun 2023 dan 100% pada tahun 2024.

RO/Proyek
- Surveilans dan Deteksi Dini Penyakit Infeksi *Emerging*;
- Penyediaan Sarana Pendukung Surveilans di Laboratorium termasuk Lab POM.

Kemenkes, Kementan, BPOM, BRIN, Pemda

**Digitalisasi dan Pemberdayaan Masyarakat**

Indikator
- Jumlah sistem data kesehatan Indonesia yang terstandar dan terintegrasi menjadi 200 sistem pada tahun 2023 dan 300 sistem pada tahun 2024.

RO/Proyek
- Integrasi dan Pengembangan Sistem Data Kesehatan;
- Pemberdayaan Masyarakat Germas di Berbagai Tatanan.

Kemenkes, BUMN

**Penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)**

Indikator
- Jumlah FKTP memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 6.110 FKTP pada tahun 2023 serta 5.706 FKTP pada tahun 2024.

RO/Proyek
- Akreditasi Puskesmas dan FKTP swasta;
- Pemenuhan Peningkatan Standar SPA Puskesmas;
- Penguatan Sistem Kesehatan.

Kemenkes, Pemda

**Pengendalian Penyakit dan Perluasan Imunisasi**

Indikator
- Cakupan TB *treatment coverage* menjadi 90% pada tahun 2023 dan 2024;
- Kab/kota dengan API Malaria < 1.000 penduduk menjadi 495 kab/kota pada tahun 2023 dan 500 kab/kota pada tahun 2024;
- Kab/kota mencapai 80% imunisasi dasar lengkap menjadi 471 kab/kota pada tahun 2023 dan 488 kab/kota pada tahun 2024.

RO/Proyek
- Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- Paket Penyediaan Vaksin Imunisasi Rutin Dasar dan Lanjutan.

Kemenkes, BPOM, Kemnaker, Kemen PUPR, Pemda



SK No 168082 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 186 | Perubahan Infografis *Major Project* Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 dalam halaman III.31 | 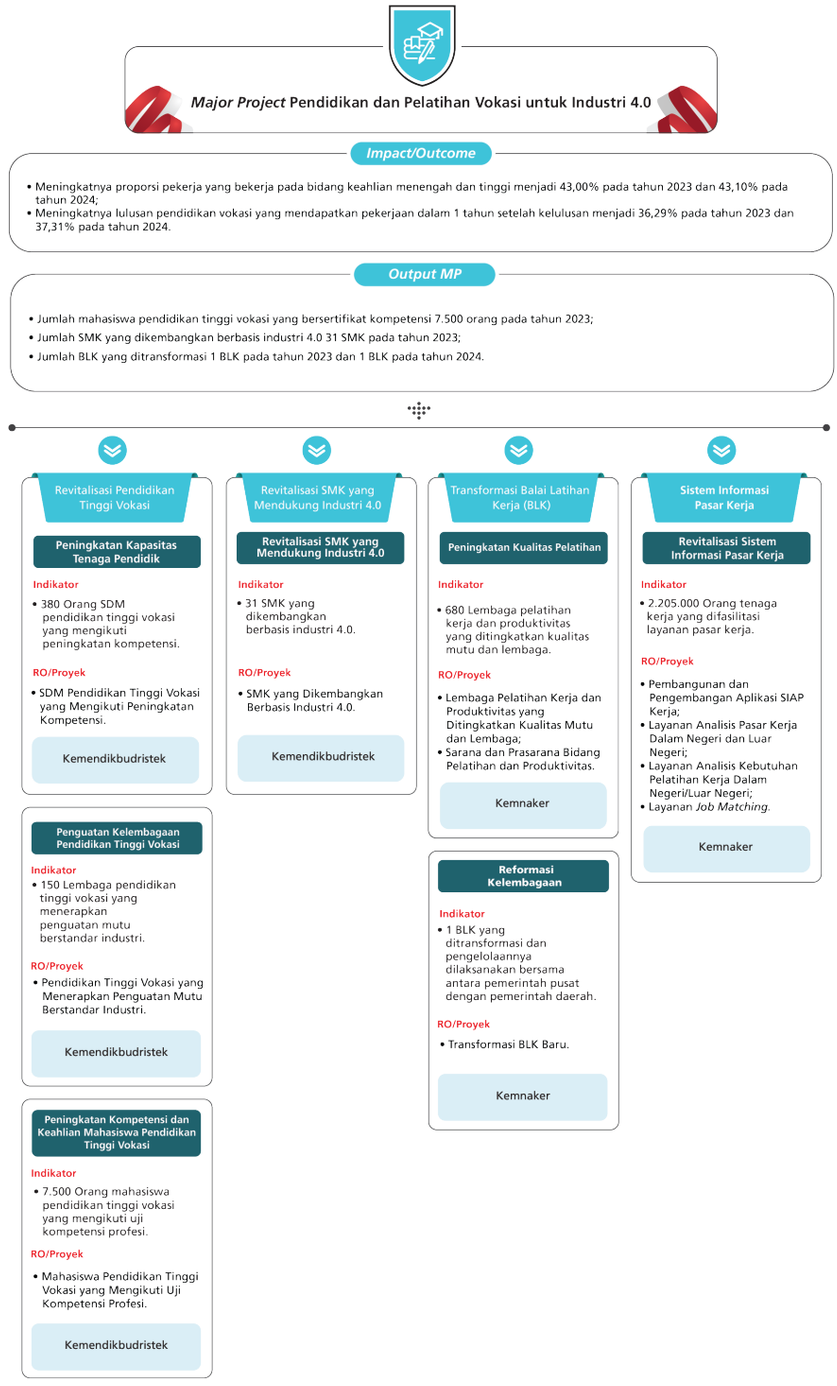 |





SK No 168083 A

**PRESIDEN**
**REPUBLIK INDONESIA**

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 187 | Perubahan Infografis *Major Project* Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting* dalam halaman III.32 | |

***Major Project*** **Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting***

***Impact/Outcome***

- Menurunkan angka prevalensi *stunting* pada balita menjadi 17,5% tahun 2023 dan 14% pada tahun 2024;
- Menurunkan angka prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada balita sebesar 7,3% tahun 2023 dan 7% pada tahun 2024;
- Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) hingga 194 tahun 2023 dan 183 tahun 2024 per 100.000 kasus kelahiran hidup.

***Output MP***

- Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan sebesar 75% tahun 2023 dan 90% di tahun 2024;
- Persentase cakupan peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 27,57% tahun 2023 dan 28,39% di tahun 2024;
- Persentase cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 93% tahun 2023 dan 95% di tahun 2024;
- Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan sebesar 471 tahun 2023 dan 488 tahun 2024;
- Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (*Drop Out*/DO) sebesar 21,59% tahun 2023 dan 20% di tahun 2024;
- Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) sebesar 11,5% pada 2023 dan 10% pada 2024;
- Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif sebesar 55% pada tahun 2023 dan 80% pada tahun 2024;
- Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembanganya sebesar 80% pada tahun 2023 dan 90% pada tahun 2024.

**Pemenuhan Intervensi Spesifik *Stunting***

Indikator

- Persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK) sebesar 11,5% pada 2023;
- Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif sebesar 55% pada 2023;
- Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembanganya sebesar 80% pada 2023.

RO/Proyek

- Ibu Hamil KEK dan Balita Kurus yang Mendapat Makanan Tambahan;
- Suplementasi Gizi Mikro Balita Kurus;
- Penyediaan dan Konsumsi Tablet Tambah Darah untuk Ibu Hamil dan Remaja Putri;
- Surveilans Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Kemenkes

**Pemenuhan Intervensi Sensitif *Stunting* pada Sasaran Prioritas**

Indikator

- 10 juta keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat;
- 170.080 sambungan rumah (SR) air minum berbasis masyarakat;
- 601.085 orang mendapatkan pelatihan dan *refreshing* dalam rangka percepatan penurunan *stunting*.

RO/Proyek

- Keluarga yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat;
- KPM yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan;
- Pembangunan Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat;
- Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan 1.000 HPK;
- Pelatihan dan *Refreshing* dalam Rangka Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Pemberdayaan Kampung KB dalam Rangka Penurunan *Stunting*.

Kemenkes, Kemensos, Kementerian PUPR, BKKBN, Kemendagri, Kemendes PDTT, Kemendikbudristek, Kemen KP, Kemenkominfo, BPOM, BNPP, BRIN, Kemenag, Kemen PPPA

**Penguatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Maternal**

Indikator

- Persentase cakupan peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebesar 27,57% tahun 2023;
- Persentase cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 93%tahun 2023;
- Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (*Drop Out*/DO) sebesar 21,59% tahun 2023.

RO/Proyek

- Skrining Layak Hamil bagi PUS di Kab/Kota Lokus AKI AKB;
- Bimtek Peningkatan Pelayanan KB Pasca Persalinan;
- Pembinaan RS PONEK;
- Pembinaan Operasi *Sectio Caesaria* Darurat dalam Waktu ≤30 menit untuk RS;
- Peningkatan Kapasitas Surveilans gizi dan KIA untuk Nakes/NonNakes;
- Faskes yang Terpenuhi Ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon);
- Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting*.

Kemenkes, BKKBN, Kemendagri, Kemen PPPA, Pemda



SK No 168084 A

**PRESIDEN**
**REPUBLIK INDONESIA**

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 188 | Perubahan Infografis *Major Project* Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu dalam halaman III.33 | 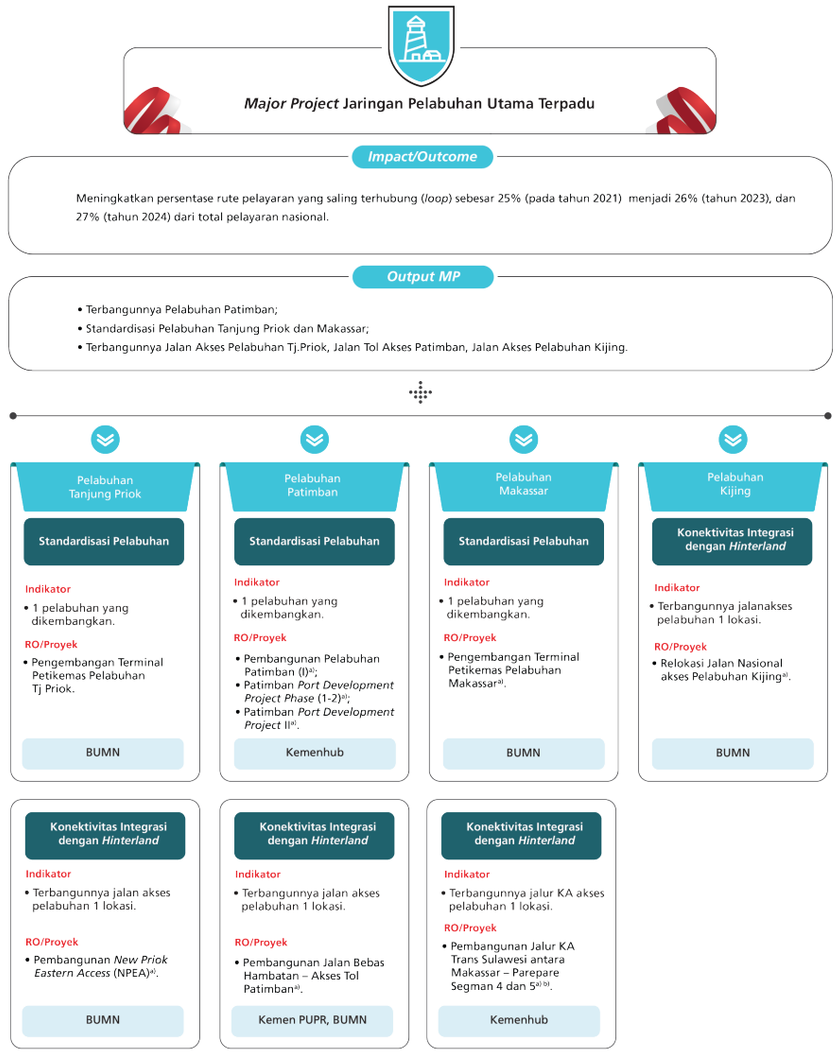 |



a) Proyek Berstatus PSN
b) Pelaksanaan Setelah Tahun 2024



SK No 168085 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 189 | Perubahan Infografis *Major Project* Transformasi Digital (1 dari 4) dalam halaman III.34 | 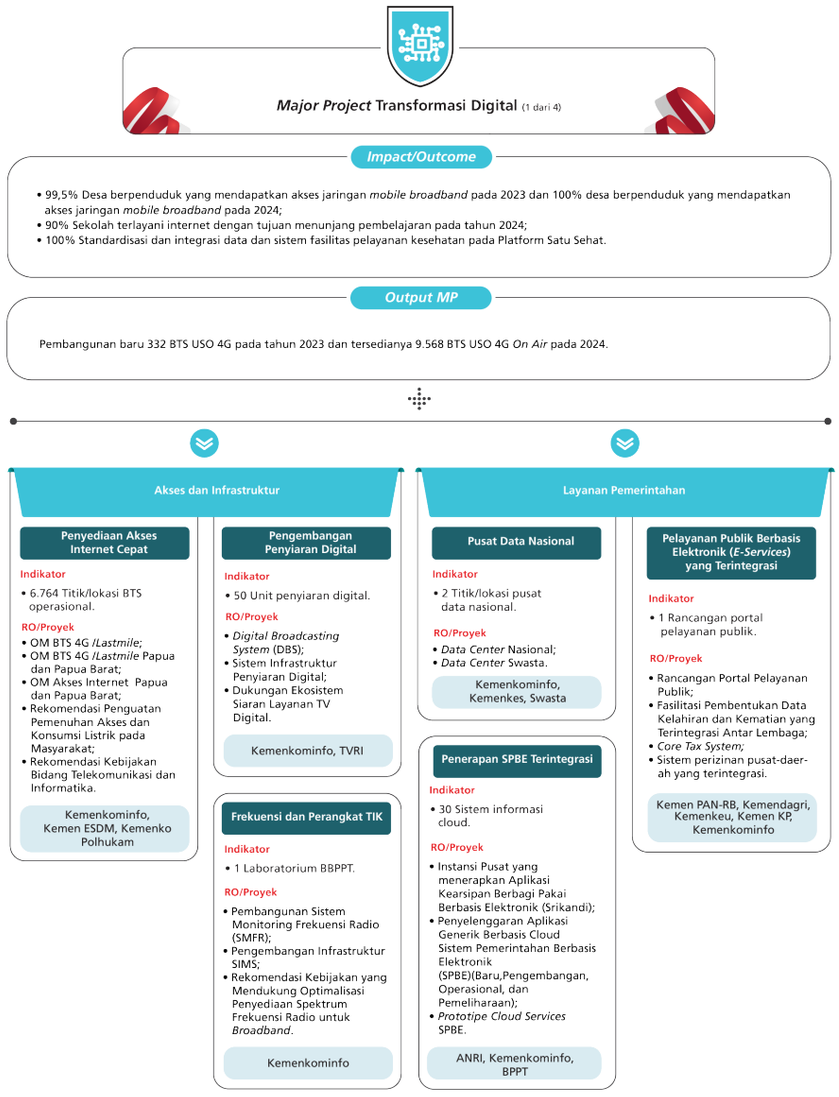 |





SK No 168086 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 190 | Perubahan Infografis *Major Project* Transformasi Digital (2 dari 4) dalam halaman III.34 | 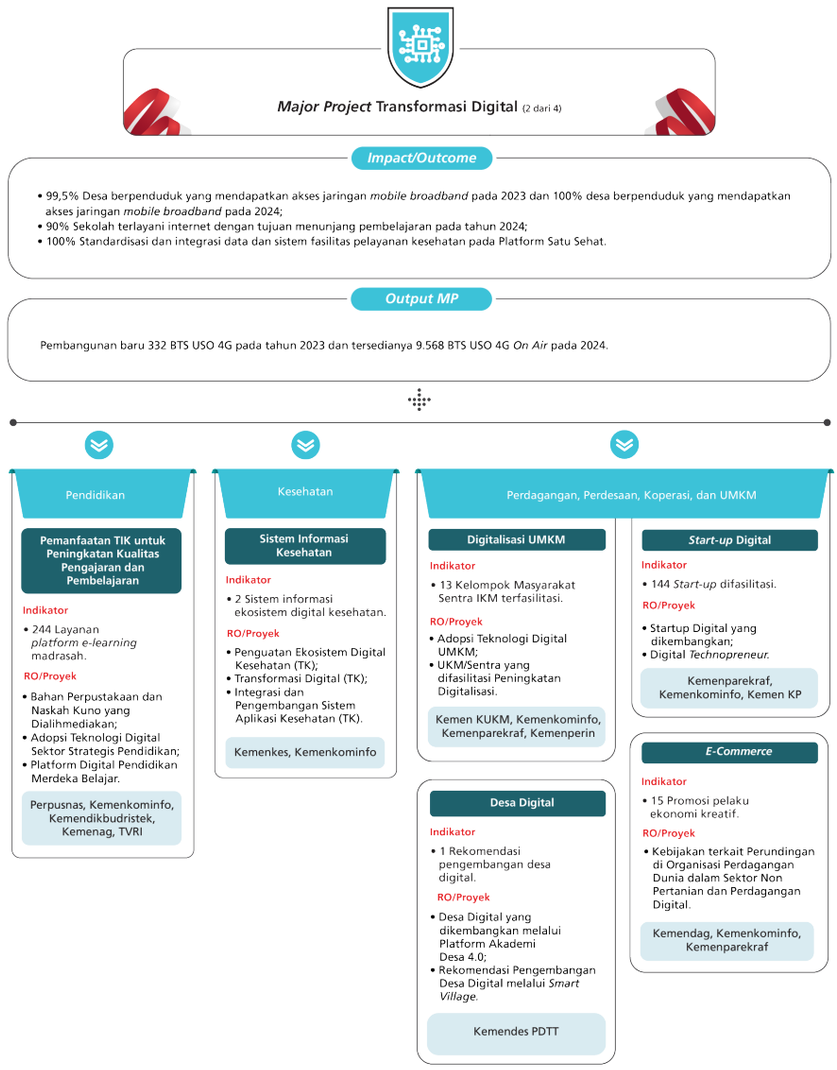 |





SK No 168087 A

**PRESIDEN**
**REPUBLIK INDONESIA**

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 191 | Perubahan Infografis *Major Project* Transformasi Digital (3 dari 4) dalam halaman III.34 | 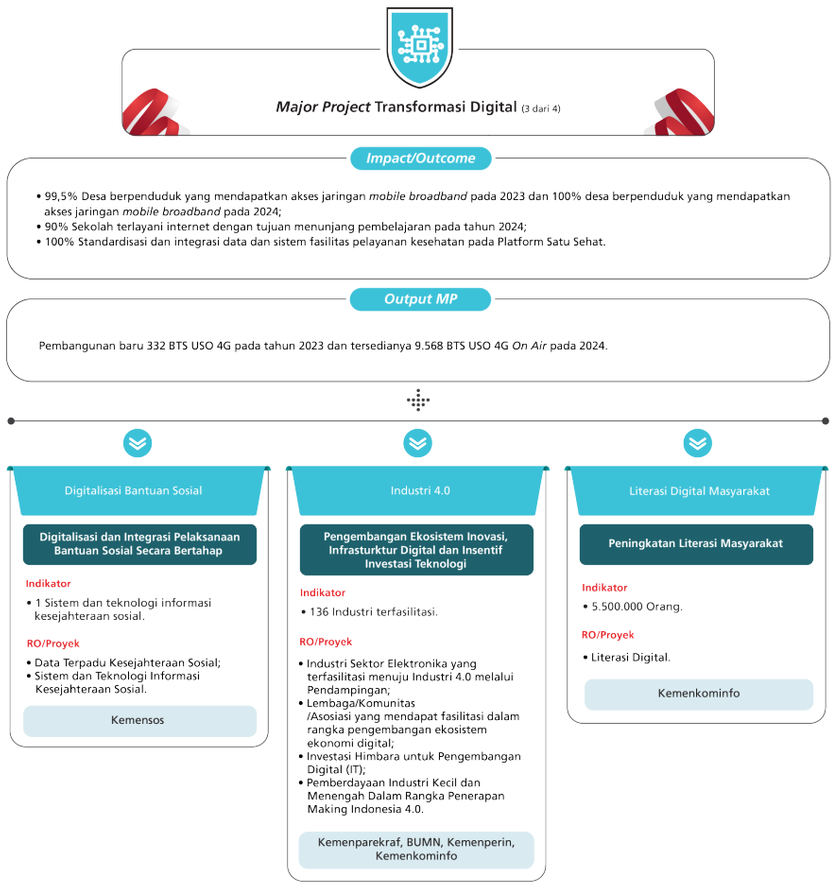 |



SK No 168088 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 192 | Perubahan Infografis *Major Project* Transformasi Digital (4 dari 4) dalam halaman III.35 | 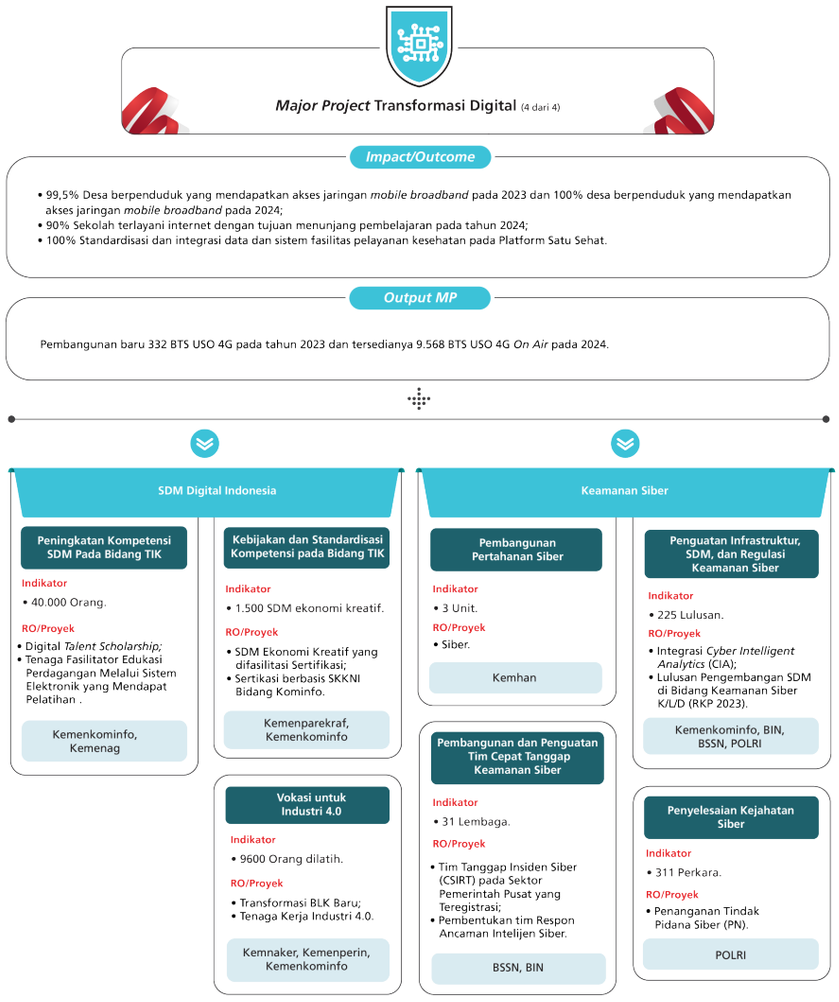 |





SK No 168089 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 193 | Perubahan Infografis *Major Project* Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dalam halaman III.36 | 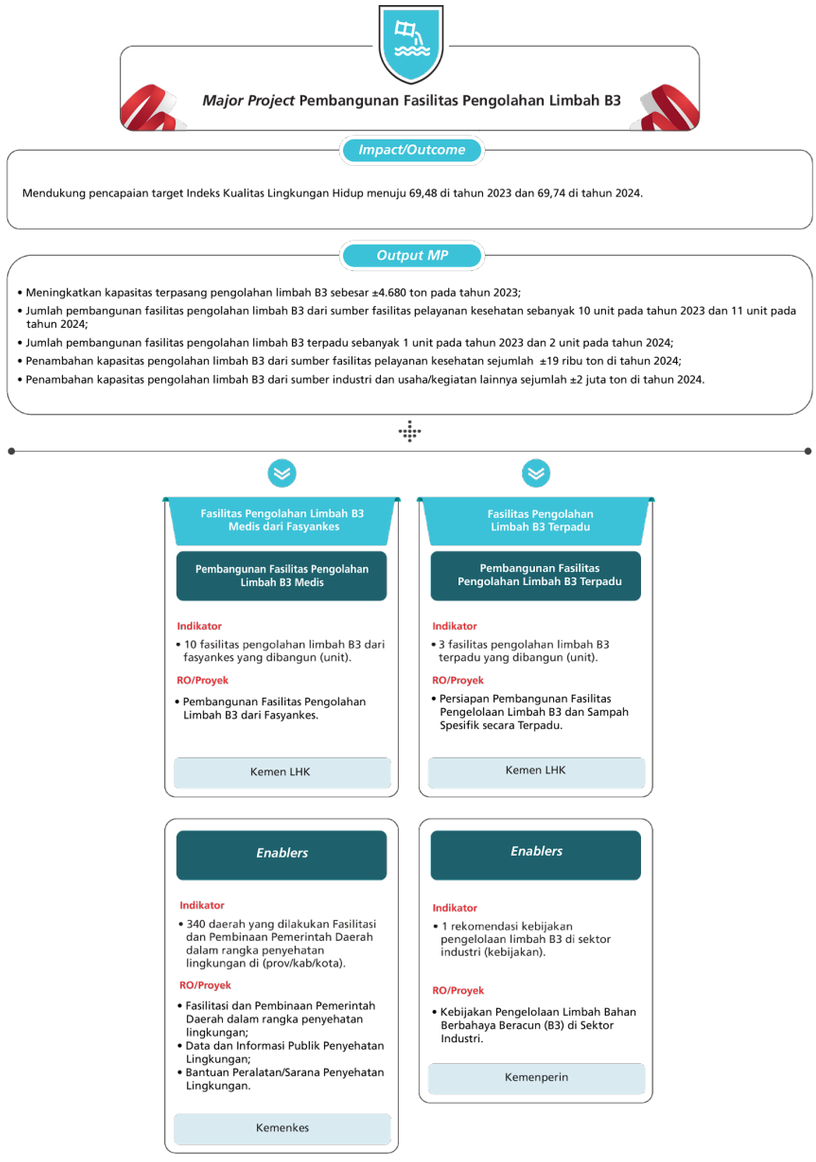 |
| 194 | Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.3 | Untuk mendukung peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan, tantangan yang dihadapi pada fokus peningkatan produktivitas di antaranya (1) masih perlunya penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dari aspek pendataan stok perikanan dan perizinan untuk usaha perikanan; (2) produktivitas perikanan, baik perikanan tangkap maupun budi daya masih belum optimal akibat usaha perikanan yang ada cenderung tersebar dan berskala kecil, dengan menggunakan teknologi tradisional, serta sarana dan prasarana pendukung yang ada belum memadai; (3) kurangnya ketersediaan bahan baku yang berkualitas untuk industri pengolahan yang belum didukung dengan rantai dingin yang terintegrasi dari hulu ke hilir sehingga distribusi produk perikanan masih terkendala; serta (4) masih belum optimalnya pemanfaatan jasa kelautan non perikanan. Sedangkan tantangan pada fokus inklusif meliputi |

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | kapasitas SDM kelautan dan perikanan yang masih perlu ditingkatkan, minimnya literasi finansial, akses pendanaan dan perlindungan usaha yang masih rendah, dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan yang masih lemah. |
| 195 | Perubahan alinea keempat dalam halaman IV.3 dan alinea pertama dalam halaman IV.4 | Untuk mendukung peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, beberapa sektor utama yang akan didorong adalah industri, pariwisata, dan investasi. Tantangan yang dihadapi sektor industri dan pariwisata adalah berbagai risiko baik di tingkat global maupun dalam negeri di tahun 2022. Pemulihan industri pengolahan berlangsung lebih cepat, namun menghadapi tantangan perlu ditingkatkannya produktivitas, risiko berlanjutnya gangguan rantai pasok global, peningkatan harga bahan baku sebagai dampak peningkatan harga komoditas, serta percepatan revitalisasi industri bernilai tambah tinggi. Pada fokus peningkatan nilai tambah yang berkelanjutan, tantangan di sektor industri pengolahan adalah percepatan pembangunan ekosistem untuk produksi dan adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Sementara itu pada fokus inklusif, tantangan yang dihadapi oleh sektor industri pengolahan yaitu masih perlu ditingkatkannya penggunaan produk-produk industri pengolahan dalam negeri dan aktivitas industri pengolahan di luar Pulau Jawa. Tantangan terkait pemulihan di sektor pariwisata berkaitan dengan prosesnya yang berjalan bertahap. Pembukaan Bali di tahun 2022 menjadi tonggak untuk peningkatan aksesibilitas yang disertai dengan kesiapan pengelolaan risiko dari pergerakan wisatawan.<br><br>Tantangan pemulihan tersebut juga berkaitan dengan perlunya peningkatan aspek berkelanjutan di sektor pariwisata yang masih difokuskan pada efektivitas penanganan kasus COVID-19, serta konsistensi penerapan standar *Cleanliness, Health, Safety and Environmental sustainability* (CHSE) di destinasi dan industri pariwisata. Keberhasilan pemulihan pariwisata akan berdampak positif bagi peningkatan produktivitas di sektor-sektor terkait dalam rantai pasoknya, serta perluasan peluang yang lebih inklusif bagi partisipasi usaha pariwisata berbasis masyarakat.<br><br>Selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh sektor investasi pada fokus produktivitas di antaranya (1) Proses penyesuaian UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) berpotensi berpengaruh pada kepercayaan investor karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UUCK adalah inkonstitusional bersyarat dan diberikan waktu 2 tahun untuk memperbaikinya, (2) tantangan berikutnya soal status lahan dan juga kemudahan perizinan, serta (3) fasilitas dan juga insentif yang tepat sasaran diperlukan dalam menarik investor. Selain itu perlu dilakukan langkah-langkah yang efektif dalam menarik minat investor dan tidak hanya menjadi sebatas minat namun dapat menjadi sebuah realisasi investasi. Tren ekonomi dunia yang mengarah pada ekonomi hijau juga menjadi tantangan baru untuk menentukan arah kebijakan yang mengadopsi pemahaman tentang *Green Economy*. |
| 196 | Perubahan alinea ketiga dalam halaman IV.4 | Untuk penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, tantangan yang dihadapi pada fokus produktivitas di antaranya (1) normalisasi kebijakan (pengetatan likuiditas) yang diambil oleh bank sentral khususnya Federal Reserve berpotensi memengaruhi kondisi likuiditas dan aliran modal ke Indonesia, (2) risiko kredit yang juga belum sepenuhnya pulih sehingga berpotensi mengurangi penyaluran kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha dan pembiayaan APBN, (3) masih rendahnya rasio perpajakan terhadap PDB yang disebabkan belum tergalinya potensi pajak dan kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih belum optimal, (4) belum optimalnya |



SK No 168091 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | kebijakan alokasi TKD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, (5) terbatasnya kemampuan UMKM untuk mengadopsi teknologi bagi pengembangan usahanya, dan (6) keandalan dan pemerataan konektivitas untuk mendukung tingginya arus pengiriman barang. Selanjutnya, tantangan pada fokus inklusif yaitu (1) transformasi digital pada sektor keuangan; (2) ketimpangan antara inklusi dengan literasi keuangan; (3) banyaknya kasus penipuan dan pelanggaran perlindungan konsumen; (4) kurang efektifnya kinerja logistik yang menyebabkan tingginya variasi harga bahan pokok dan barang penting; (5) akselerasi ekonomi digital yang ditandai transaksi perdagangan yang minim mobilitas berbasis *e-commerce*; (6) belum termanfaatkannya secara optimal sarana perdagangan yang sudah dibangun; serta (7) semakin dinamis dan berkembangnya komoditas baru dalam ekonomi digital, seperti adanya *crypto currencies* dan munculnya metaverse. Tantangan yang dihadapi pada fokus berkelanjutan di antaranya (1) belum optimalnya pembiayaan hijau dan (2) belum optimalnya penerapan pariwisata berkelanjutan. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan nasional salah satunya melalui subsidi, baik energi maupun non-energi. Kebijakan subsidi menjadi bagian dari kebijakan belanja negara di tahun 2023 yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan sebagai upaya percepatan transformasi ekonomi. |
| 197 | Perubahan Tabel 4.1 dalam halaman IV.5 | |

Tabel 4.1
Sasaran, Indikator, dan Target
PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

| No. | Sasaran/Indikator | *Baseline* | Realisasi | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan | | | | | | |
| 1.1 | Porsi EBT dalam bauran energi nasional (%) | 9,18 | 11,20 | 11,70 | 15,70 | 17,90 | ~23,00 |
| 1.2 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (nilai) | 87,90 | 86,30 | 87,20 | 92,40 | 94,00 | 95,20 |
| 1.3 | Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan (WPP) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2. | Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian | | | | | | |
| 2.1 | Rasio kewirausahaan nasional (%) | 3,27 | 2,93 | 2,89 | 3,18[b)] | 3,21[b)] | 3,23[b)] |
| 2.2 | Pertumbuhan PDB pertanian (%)[f)] | 3,61 | 1,77 | 1,84 | 3,60–3,80 | 3,2–3,6 | 4,00–4,10 |
| 2.3 | Pertumbuhan PDB perikanan (%) | 5,81 | 0,73 | 5,45 | 4,00–6,00 | 5,00–6,00 | 8,71 |
| 2.4 | Pertumbuhan PDB industri pengolahan (9.2.1) (%) | 3,8 | -2,93 | 3,39 | 5,30–5,70 | 5,30–5,60 | 8,10 |
| 2.5 | Kontribusi PDB industri pengolahan (9.2.1)[a)] (%) | 19,70 | 19,87 | 19,25 | 19,90 | 20,60 | 21,00 |
| 2.6 | Nilai devisa pariwisata (8.9.1)[c)a)] (miliar US$) | 19,7 | 3,38 | 0,52 | 0,86–1,71 | 2,07–9,05 | 7,38–13,08 |



SK No 168092 A

**PRESIDEN**
**REPUBLIK INDONESIA**

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|

198 Perubahan Tabel 4.1 dalam halaman IV.6

| No. | Sasaran/Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.7 | Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1)[a] (%) | 4,97 | 2,24 | 2,40[g] | 3,60 | 4,10 | 4,50 |
| 2.8 | Penyediaan lapangan kerja per tahun (juta orang) | 2,47 | -0,30 | 2,60 | 2,6–3,1 | 2,7–3,1[e] | 2,7–3,0 |
| 2.9 | Pertumbuhan investasi (PMTB) (%) | 4,4 | -4,9 | 3,8 | 5,4–6,3 | 6,1-6,3 | 5,8–7,7 |
| 2.10 | Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%) | -2,60 | 3,61 | 35,11 | 8,45 | 11,18 | 10,10 |
| 2.11 | Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%) | -0,9 | -7,7 | 24,0 | 5,1–5,5 | 5,3–6,6 | 6,2 |
| 2.12 | Rasio perpajakan terhadap PDB (17.1.1)[a] (%) | 9,76 | 8,33 | 9,12[c] | 9,55 | 9,60[h] | 10,22–10,71[d] |

Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024; Rencana Strategis K/L Tahun 2020-2024; Pemutakhiran RKP 2022;

Keterangan: a) Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global untuk *Sustainable Development Goals* (SDGs); b) Penyesuaian target Rasio Kewirausahaan Nasional sesuai dengan hasil *exercise* Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan capaian 2020-2021 yang kurang dari target akibat pandemi COVID-19; c) Angka Realisasi LKPP *Audited*; d) Angka Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas; e) Angka target tahun 2023 masih dalam perhitungan; f) Indikator pertumbuhan PDB pertanian sama dengan pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan, dan perikanan; g) Angka Proyeksi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekraf; serta h) Angka berdasarkan UU No.28/2022 tentang APBN tahun 2023.

199 Perubahan Tabel 4.2 dalam halaman IV.7

Tabel 4.2
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari
PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

| No. | Sasaran/Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) | | | | | | | |
| Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) | | | | | | | |
| 1.1 | Kapasitas terpasang pembangkit EBT (gigawatt) - kumulatif | 10,29 | 10,50 | 11,15 | 13,91 | 14,31 | 19,20 |
| 1.2 | Pemanfaatan *biofuel* untuk domestik (juta kilo liter) | 6,39 | 8,40 | 9,30 | 9,60 | 10,65 | 17,40 |
| PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi | | | | | | | |
| Meningkatnya kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi | | | | | | | |
| 2.1 | Produktivitas air (*water productivity)* (kg/m$^3$)[g] | N/A[f] | 3,34[1] | 3,51[1] | 3,57[1] | 3,63 | 3,67[1] |



SK No 168093 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 200 | Perubahan Tabel 4.2 dalam halaman IV.8 | |

| No. | Sasaran/Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan | | | | | | | |
| Meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan | | | | | | | |
| 3.1 | Nilai Tukar Petani (NTP) | 100,90 | 101,65 | 104,64 | 103,00–105,00 | 105,00–107,00 | 105,00 |
| 3.2 | Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/kapita/hari) | 2.138,00 | 2.125,00 | 2.143,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 3.3 | Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari) | 62,87 | 62,05 | 62,28 | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
| 3.4 | *Prevalence of Undernourishment (PoU)* (%) | 7,63 | 8,34 | 8,49 | 5,50 | 5,20 | 5,00 |
| 3.5 | *Food Insecurity Experience Scale (FIES)* (%) | 5,42 | 5,12 | 4,79 | 4,50 | 4,20 | 4,00 |
| PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan | | | | | | | |
| Meningkatnya pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan | | | | | | | |
| 4.1 | Konservasi kawasan kelautan (14.5.1)a) (juta ha) | 23,14 | 24,11 | 28,41 | 25,10 | 29,10 | 30,00 |
| 4.2 | Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1)[a)] (%) | 52,87 | 51,78 | 51,93[c)] | ≤72 | ≤76 | ≤80 |
| 4.3 | Produksi perikanan (juta ton) | 22,76 | 21,83 | 21,84[c)] | 29,42 | 30,58 | 32,75 |
| 4.4 | Produksi garam (juta ton) | 2,85 | 1,37 | 1,09 | 2,60 | 2,00 | 3,40 |
| 4.5 | Nilai Tukar Nelayan | 100,23 | 100,22 | 104,69 | 104,00–106,00 | 107,00–108,00 | 107,00 |
| PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi | | | | | | | |
| Menguatnya kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi | | | | | | | |
| 5.1 | Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan (%)(8.10.1)[c) d)] | 19,89[1)] | 19,67 | 21,02 | 20,88 | 21,44 | 22,00 |



SK No 168094 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 201 | Perubahan Tabel 4.2 dalam halaman IV.9 | |

| No. | Sasaran/Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5.2 | Pertumbuhan wirausaha (%) | 1,71[1)] | -7,17 | 0,08 | 2,57[b)] | 2,74[b)] | 2,90[b)] |
| 5.3 | Kontribusi koperasi terhadap PDB (%) | 5,54 | 6,20 | 6,20 | 5,30 | 5,40 | 5,50 |
| PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi | | | | | | | |
| Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi | | | | | | | |
| 6.1 | Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas (%) | 4,34 | -2,52 | 3,67 | 5,30–5,70 | 5,50–5,90 | 8,40 |
| 6.2 | Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas (%) | 17,58 | 17,88 | 17,36 | 18,00–18,10 | 18,80 | 18,90 |
| 6.3 | Nilai tambah ekonomi kreatif (triliun rupiah) | 1.153,4 | 1.134,9 | 1.191,0 | 1.236,0 | 1.279,0 | 1.347,0 |
| 6.4 | Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta orang) | 18,90 | 17,48 | 18,69 | 20,90 | 21,70 | 22,50 |
| 6.5 | Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja (9.2.2)[a)] (%) | 14,96 | 13,61 | 14,30 | 15,00 | 15,50 | 15,70 |
| 6.6 | Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2)[a)] (juta orang) | 20,8 | 20,4 | 21,2 | 21,64 | 21,93 | 22,08 |
| 6.7 | Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (juta orang) | 19,50 | 19,39 | 21,90 | 22,29 | 22,59 | 22,74 |
| 6.8 | Nilai realisasi PMA dan PMDN (triliun rupiah) | 809,6 | 826,3 | 901,0 | 968,4 | 1.200–1.300 | 1.239,3 |
| 6.9 | Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (triliun rupiah) | 215,9 | 272,9 | 325,4 | 352,5 | 396–420 | 646,1 |
| 6.10 | Pertumbuhan PDB pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian (%) | 3,31 | 2,13 | 1,08 | 3,60–3,80 | 3,60–3,80 | 3,60–3,80 |



SK No 168095 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 202 | Perubahan Tabel 4.2 dalam halaman IV.10 | |

| No. | Sasaran/Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) | | | | | | | |
| Meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) | | | | | | | |
| 7.1 | Neraca perdagangan barang (miliar US$) | 3,5 | 28,3 | 43,8 | 31,4–31,7[1)] | 40,4–44,9 | 15,0[2)] |
| 7.2 | Pertumbuhan ekspor nonmigas (%) | -4,3 | -0,6 | 41,5 | 0,8–1,2[1)] | 1,2-3,7 | 9,8[2)] |
| 7.3 | Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1)[a)] (juta kunjungan) | 16,11 | 4,05 | 1,56 | 1,8–3,6 | 3,5–7,4 | 9,5–14,3 |
| 7.4 | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (juta perjalanan)[j)] | 722,16 | 524,60 | 603,02 | 633–703 | 1.200–1.400 | 1.250–1.500 |
| 7.5 | Pertumbuhan ekspor produk industri berteknologi tinggi (%)[e)] | -8,2 | 2,4 | 37,7 | 8,2–10,1[1)] | 8,5–10,7 | 11,5 |
| PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi | | | | | | | |
| Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi | | | | | | | |
| 8.1 | Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (%) | 4,24 | 4,51 | 4,34 | 4,55–4,56 | 4,15–4,21 | 4,57–4,58 |
| 8.2 | Skor *logistic performance index* (skor) | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,4[1)] | 3,4[2)] | 3,5[2)] |
| 8.3 | Rasio M2/PDB (%) | 44,7 | 46,4 | 48,0 | 48,3–49,4 | 48,2–48,9 | 50,7–51,4 |
| 8.4 | Peringkat *travel and tourism development index* (peringkat) | 40 | N/A[1)] | 32 | N/A[1)] | 29–34 | N/A[1)] |
| 8.5 | Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax administration system*) (%) | 0 | 1,97 | 29 | 66[j)] | 96[j)] | 100 |



SK No 168096 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 203 | Perubahan Tabel 4.2 dalam halaman IV.11 | |

| No. | Sasaran/Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 8.6 | Imbal hasil (*yield*) surat berharga negara (%) | 7,30 | 6,99 | 6,37 | menu-run | menu-run | menu-run |
| 8.7 | Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat (%) | 10,38 | 26,05 | 26,18 | 28,94 | 31,94 | 34,94 |
| 8.8 | Penyediaan data ekonomi dan sosial yang berkualitas (*database*)[g] | 5[k] | 8[k] | 6[k] | 6[k] | 8 | 8 |

Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024; Rencana Strategis K/L Tahun 2020-2024; Pemutakhiran RKP 2022; 1) Target Pemutakhiran RKP 2022; dan 2) Target Pemutakhiran RPJMN 2020-2024.

Keterangan: a) Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global untuk *Sustainable Development Goals* (SDGs); b) Penyesuaian target Pertumbuhan Wirausaha sesuai dengan hasil *exercise* Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan capaian 2020 – 2021 yang kurang dari target akibat pandemi COVID-19; c) Angka dalam kurung pada indikator menunjukkan indikator SDGs; d) Indikator pada level KP yang baru diusulkan untuk naik menjadi indikator level PP; e) Angka realisasi 2021 sementara; f) Indikator baru ada pada tahun 2020/data belum rilis; g) Angka realisasi 2021 dan target 2023 masih dikonfirmasi; g) Indikator baru pada level PP; i) Perhitungan menggunakan metodologi baru menggunakan teknologi *Mobile Positioning Data* (MPD); j) Berdasarkan hasil *Trilateral Meeting* Renja Kementerian Keuangan TA 2022; k) Merupakan angka target dan realisasi indikator pada level KP; dan l) Data TTDI terbit 2 tahun sekali pada tahun ganjil.

204 Perubahan alinea pertama dalam halaman IV.11

(1) pada PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT, transisi menuju energi rendah karbon yang mendukung fokus peningkatan produktivitas dilaksanakan melalui berbagai strategi yaitu (a) optimalisasi penambahan kapasitas terpasang PLT EBT terutama di daerah defisit listrik melalui mobilisasi berbagai skema pendanaan dan insentif fiskal, (b) peningkatan kualitas cadangan migas dan potensi EBT secara masif sebagai bentuk dukungan penurunan risiko (*derisking*) dan pemenuhan energi nasional dengan pelibatan berbagai pemangku kepentingan, (c) optimalisasi produksi *biofuel* disertai kebijakan *demand management* dalam negeri, serta (d) pengembangan energi baru terutama *Dimethyl Ether* (DME) dan *green hydrogen*. Sedangkan strategi yang mendukung fokus inklusif dalam transisi energi rendah karbon, antara lain (a) penyelesaian segala hambatan dan permasalahan pembangunan PLT energi terbarukan (ET) *on-grid* yang sudah termuat dalam RUPTL PLN 2021-2030, serta pembangunan PLT ET *off-grid* untuk daerah 3T, (b) restrukturisasi subsidi energi fosil ke subsidi EBT secara bertahap, dan (c) penguatan kewenangan Pemda dalam pengelolaan EBT skala kecil. Sementara itu, strategi lain dalam pemenuhan kebutuhan energi untuk mendukung fokus pembangunan berkelanjutan yang dilakukan adalah (a) fasilitasi dan implementasi perjanjian jual beli listrik dengan harga beli EBT yang berkeadilan, (b) pengembangan teknologi penyimpanan energi, dan (c) mempercepat implementasi penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) termasuk kebijakan pendukungnya.

205 Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.12

(3) pada PP Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan, strategi yang dilakukan pada fokus peningkatan produktivitas yaitu (a) peningkatan ketersediaan pangan dengan mengutamakan dari produksi dalam negeri guna mengurangi ketergantungan impor terutama kedelai, pengawalan produksi, produksi pangan yang beragam, pengembangan kawasan sentra produksi pangan, peningkatan produktivitas komoditas pertanian, penyediaan sarana produksi peningkatan Indeks Pertanaman (IP), perbaikan kualitas dan penguatan sistem perbenihan tanaman, dan Ekosistem pengembangan padi hibrida untuk mengatasi stagnasi produktivitas padi; (b) pemanfaatan digital dan pertanian presisi dalam sistem pertanian hulu-hilir serta penguatan data



SK No 168097 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | petani; dan (c) mendorong terciptanya sumber daya manusia pertanian yang berdaya saing dengan penguatan kelembagaan pertanian (korporasi petani), peningkatan peran penyuluh pertanian dan modernisasi pertanian untuk menarik minat petani muda dan efisiensi tenaga kerja pertanian. Selanjutnya, strategi yang dilakukan pada fokus inklusif di antaranya (a) penguatan tata kelola sistem pangan dengan penguatan sistem logistik pangan nasional dan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan; (b) peningkatan kualitas konsumsi pangan dengan percepatan peningkatan nilai Pola Pangan Harapan (PPH) dan peningkatan konsumsi sayur dan buah; serta (c) pengembangan pertanian keluarga. Pada fokus berkelanjutan, strategi yang dilakukan yaitu menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dengan upaya konservasi lahan produktif, budi daya rendah karbon, penerapan pertanian regeneratif, penerapan prinsip ekonomi sirkular, dan peningkatan layanan dan fungsi karantina nasional yang terintegrasi dalam kelembagaaan satu atap dengan berbasiskan sarana dan prasarana sistem ketertelusuran. |
| 206 | Perubahan alinea ketiga dalam halaman IV.12 | (4) PP Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan dilaksanakan melalui pengelolaan yang berkelanjutan baik dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Strategi yang dilakukan pada fokus produktivitas mencakup (a) penguatan kelembagaan pengelola WPP, penguatan data stok sumber daya ikan, dan penataan perizinan usaha perikanan; (b) pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi kepada nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar, serta pengembangan usaha perikanan berbasis sentra dalam bentuk klaster kawasan tambak udang dan bandeng, kampung perikanan budidaya, dan kampung nelayan; (c) penyediaan sarana dan prasarana perikanan termasuk pelabuhan perikanan ramah lingkungan dan pasar ikan bertaraf internasional; (d) penguatan sistem logistik ikan melalui peningkatan ketelusuran produk, penyediaan sarana dan prasarana rantai dingin, sistem resi gudang untuk produk perikanan, serta penguatan jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan sehingga tercipta rantai pasok produk kelautan dan perikanan bernilai tinggi yang lebih efisien dan berkelanjutan dari hulu ke hilir; (e) penguatan penerapan teknologi dan pendataan, serta penumbuhan iklim inovasi di sektor kelautan dan perikanan penguatan kelembagaan usaha; serta (f) pemanfaatan jasa kelautan, termasuk garam, wisata bahari dan pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). Adapun strategi pada fokus inklusif meliputi penguatan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan melalui pengembangan korporasi, perlindungan dan penyuluhan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan termasuk digitalisasi usaha kelautan dan perikanan. |
| 207 | Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.13 | (6) pada PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi, strategi yang mendukung fokus produktivitas mencakup (a) perbaikan rantai pasok dan *reskilling* dan *upskilling* tenaga kerja; (b) peningkatan lokalisasi produk dan bahan baku impor; (c) akselerasi hilirisasi komoditas mineral dan batu bara melalui pembangunan smelter dan infrastruktur pendukung; (d) pengembangan pertambangan rakyat yang bernilai tambah; (e) peningkatan kualitas dan inovasi produk yang didukung komersialisasi hasil riset dan penguatan infrastruktur kualitas; (f) penguatan ekosistem pemampu industri bernilai tambah dan berteknologi tinggi, termasuk industri kedirgantaraan; (g) percepatan pembangunan infrastruktur, amenitas dan atraksi di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas dengan dukungan investasi, *event*, dan *meeting, incentive, conference and exhibition*; (h) *scaling-up start-up* ekonomi kreatif dan digital yang didukung akses pembiayaan berbasis |



SK No 168098 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | HKI dan investasi; (i) akselerasi pengembangan industri perfilman melalui berbagai skema pendanaan dan insentif fiskal; (j) penguatan ekosistem industri berbasis konten, terutama film; (k) harmonisasi dan simplifikasi peraturan yang menghambat investasi di level pusat dan daerah sesuai dengan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja untuk meningkatkan kepercayaan investor dan menjamin kepastian usaha; (l) percepatan penyelesaian isu status lahan, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); (m) penguatan peran satgas investasi melalui pendampingan dan penyelesaian permasalahan investasi; (n) pengintegrasian sistem perizinan di tingkat pusat pada sistem OSS RBA dan implementasi sistem perizinan melalui sistem OSS di daerah; (o) peningkatan investasi skala besar dan menyerap tenaga kerja, utamanya pada sektor industri pengolahan; (p) penyusunan peta potensi daerah guna efektif mendukung promosi investasi kepada investor; (q) peningkatan investasi yang berbasis ekspor dan sektor teknologi informasi dan komunikasi; (r) peningkatan efektivitas dan ketepatan sasaran insentif untuk investor, serta (s) penguatan hilirisasi komoditas pertanian, didukung dengan perbaikan kualitas dan kuantitas produksi dan penguatan sistem perbenihan melalui penyediaan sarana pengujian kemurnian benih dan pengembangan *nursery* perkebunan serta penguatan yurisdiksi berkelanjutan. Selanjutnya strategi yang mendukung fokus inklusif yakni (a) pengembangan produk dan industri halal sesuai Master Plan Industri Halal; (b) penguatan desa wisata; (c) fasilitasi peningkatan kualifikasi produk untuk dapat dicantumkan dalam *e-catalogue*; (d) percepatan penyiapan dan peningkatan investasi utamanya di kawasan industri di luar Jawa, dan (e) revitalisasi infrastruktur ekonomi kreatif termasuk klaster/kota kreatif dan regenerasi kota warisan. Selanjutnya strategi yang mendukung fokus berkelanjutan yakni (a) investasi terkait dengan pengembangan KBLBB dan ekosistem KBLBB; (b) mendorong industri dalam ekosistem KBLBB termasuk di dalamnya industri baterai dan produksi kendaraan bermotor dalam negeri; (c) peningkatan konsistensi penerapan CHSE di destinasi dan industri pariwisata; dan (d) fasilitasi kemudahan investasi hijau. Khusus untuk pemulihan pariwisata, strategi yang akan dilaksanakan yaitu (a) penambahan kemudahan aksesibilitas melalui penambahan frekuensi penerbangan dan moda transportasi lainnya; (b) perbaikan kebijakan visa kunjungan termasuk untuk tujuan bisnis/investasi dan MICE; (c) pengembangan wisata medis; dan (d) fasilitasi peningkatan wisatawan nusantara melalui penyelenggaraan *event* dan kerja sama insentif. |
| 208 | Perubahan alinea ketiga dalam halaman IV.13 | (7) pada PP Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan TKDN, peningkatan produktivitas perekonomian melalui ekspor barang dan jasa utamanya dilakukan dengan meningkatkan ekspor produk manufaktur dan jasa melalui Gerakan "Ayo Ekspor" serta meningkatkan partisipasi dalam rantai nilai global (*Global Value Chain*/GVC). Dalam rangka mendukung fokus produktivitas, strategi yang dilaksanakan mencakup (a) promosi perdagangan yang berfokus pada produk olahan bernilai tambah, (b) penguatan konektivitas domestik dan logistik ekspor; (c) peningkatan ekspor ekonomi kreatif dan digital, (d) penguatan ekspor gastronomi melalui "*Indonesia Spice Up the World*", serta (e) pemanfaatan teknologi digital dan *online channel (e-commerce)*. Dalam rangka mendukung fokus inklusif, strategi yang dilaksanakan mencakup (a) penyiapan ekosistem dan infrastruktur ekspor, (b) penguatan informasi ekspor melalui integrasi layanan informasi dan intelijen ekspor menuju *one-stop service export*, (c) fasilitasi UKM produsen untuk berpartisipasi dalam GVC, (d) diversifikasi pembiayaan ekspor, (e) redesain program pendidikan dan pelatihan ekspor yang berfokus pada kebutuhan |



SK No 168099 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | eksportir, dan (f) pengembangan program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI). |
| 209 | Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.14 | (8) pada PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, strategi yang mendukung fokus produktivitas meliputi (a) penguatan regulasi sektor keuangan; (b) peningkatan penyaluran kredit atau pembiayaan kepada sektor riil (termasuk pada UMKM); (c) perluasan penerapan industri 4.0 dan digitalisasi; (d) peningkatan efisiensi dan penguatan ekosistem logistik melalui *National Logistic Ecosystem* (NLE) yang didukung integrasi transportasi dan perdagangan antarpulau antardaerah; (e) peningkatan perencanaan dan pemanfaatan sarana prasarana perdagangan dalam negeri; (f) penyiapan ekosistem untuk perdagangan komoditas baru, seperti *crypto* dan *metaverse*; (g) penguatan kebijakan *asymmetric fiscal incentive* dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi; (h) penggalian potensi dengan ekstensifikasi dan intensifikasi untuk penguatan basis pemajakan; (i) reformasi administrasi perpajakan (*coretax system*); (j) peningkatan kepatuhan wajib pajak; serta (k) peningkatan kualitas pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD berbasis kinerja). Dalam rangka mendukung fokus inklusif, strategi yang dilaksanakan meliputi (a) peningkatan edukasi, literasi, serta digitalisasi sektor keuangan dengan tetap memerhatikan aspek perlindungan konsumen; (b) perluasan basis investor ritel; (c) penguatan ketahanan dan kesehatan industri jasa keuangan; (d) integrasi data pasokan antarpulau/antardaerah; (e) redesain program edukasi perlindungan konsumen yang lebih bersifat *multi-channel*; (f) penguatan teknologi informasi untuk peningkatan efisiensi logistik nasional dan dunia usaha; (g) penerapan pajak layanan digital dalam rangka meningkatkan penerimaan negara; (h) peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik terkait perkembangan ekonomi dan sosial; (i) pelaksanaan sensus pertanian 2023 untuk menyediakan data pokok pertanian nasional; dan (j) penguatan pembinaan statistik sektoral untuk mendorong integrasi dan sinkronisasi kegiatan statistik yang sesuai dengan kaidah Satu Data Indonesia. Dalam rangka mendukung fokus berkelanjutan, strategi yang dilaksanakan meliputi (a) peningkatan pembiayaan hijau dan berkelanjutan termasuk percepatan pembiayaan ekosistem KBLBB serta (b) perluasan penerapan pariwisata berkelanjutan. |



SK No 168100 A

**PRESIDEN**
**REPUBLIK INDONESIA**

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 210 | Perubahan Infografis *Major Project* Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi dalam halaman IV.15 | **MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi**<br>• Target porsi bauran energi terbarukan dalam bauran energi primer nasional mencapai 23% di tahun 2025 (RUEN). Sampai dengan tahun 2021, capaian porsi bauran energi terbarukan dalam bauran energi primer nasional baru mencapai 12,2%;<br>• Potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 419,3 gigawatt. Pemanfaatan energi terbarukan sampai dengan tahun 2021 baru mencapai 12,4 gigawatt;<br>• Indonesia memiliki perkebunan sawit rakyat mencapai 5,8 juta ha. Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia;<br>• Intensitas energi final (indikator konservasi energi) ditargetkan turun 1%/tahun sampai dengan tahun 2025 (KEN dan RUEN);<br>• Pengurangan emisi GRK sektor energi ditargetkan mencapai 116 juta ton $CO_2$.<br>**Urgensi**<br>**Lokasi**<br>• Pusat;<br>• Tersebar 34 provinsi.<br>**Pelaksana**<br>**Penanggung Jawab Proyek:**<br>• Kemen ESDM dan Badan Usaha.<br>**Lintas K/L/D:**<br>• Kementan, Kemenkeu, Kemenpora, Kemen PPPA, dan Pemda.<br>**Pendanaan dan Investasi**<br>**Sumber:**<br>K/L, DAK, BUMN dan Swasta.<br>**Alokasi:**<br>Rp3.976,58 M [K/L dan DAK];<br>Rp939,1 M [BUMN];<br>Rp5.360,23 M [Swasta][a].<br>***Highlight* Proyek**<br>**Pembangunan PLT Air:**<br>• PLTMH [K/L];<br>**Pembangunan PLT Surya:**<br>• PLTS Terpadu [K/L];<br>• PLTS Atap K/L [K/L];<br>• Infrastruktur Energi Terbarukan – Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi [DAK].<br>**Pembangunan PLT Bayu:**<br>• Monitoring TKDN PLT Bayu [K/L];<br>• Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan: Pembangunan PLT Bayu [BUMN].<br>**Pengembangan Riset dan Inovasi:**<br>• Peta Potensi EBT dalam Rangka Percepatan Investasi PLT Bayu, Hidro dan Biomassa [K/L].<br>**Pembangunan PLT Bioenergi:**<br>• Pembangunan Pabrik Serbuk Kayu (*Cofiring*) [BUMN].<br>**Pembangunan Greenfuel:**<br>• Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel [K/L];<br>• Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat [K/L].<br>**Pembangunan PLT Panas Bumi:**<br>• Penawaran Wilayah Panas Bumi [K/L];<br>• Penetapan Wilayah Panas Bumi [K/L];<br>• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi [Swasta].<br>**Peningkatan Kualitas Data Panas Bumi:**<br>• Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi [K/L].<br>**Standar/Regulasi:**<br>• Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat Energi [K/L].<br>***Impact/ Outcome/ Output***<br>• Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menjadi 17,9 persen pada 2023 dan menuju 23 persen pada 2024;<br>• Tercapainya intensitas energi primer sebesar 135,2 SBM/Miliar rupiah pada tahun 2023 dan 133,8 SBM/Miliar rupiah pada tahun 2024;<br>• Penurunan emisi GRK sektor energi sebesar 12,8 persen pada tahun 2023 dan 13,2 persen pada tahun 2024 terhadap *baseline* (BAU).<br>Keterangan:<br>a) Data Proyek Prioritas Investasi Swasta per 24 November 2022. |
| 211 | Perubahan Infografis *Major Project Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan) dalam halaman IV.15 | **MP *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan)**<br>• Adanya kemungkinan dampak pandemi COVID-19 yang berpengaruh buruk terhadap ketahanan pangan sebagaimana peringatan dini *Food and Agriculture Organization* (FAO) kepada seluruh pemimpin negara;<br>• Sebelum pandemi, diperkirakan sekitar 820 juta orang di dunia telah menderita akibat kekurangan pangan;<br>• Adanya peningkatan jumlah penduduk disertai dengan peningkatan jumlah kebutuhan pangan.<br>**Urgensi**<br>**Lokasi**<br>7 lokasi *Food Estate*<br>Banyuasin, Belu, Humbang Hasundutan, Kapuas, Merauke, Pulang Pisau, dan Sumba Tengah.<br>**Pelaksana**<br>**Penanggung Jawab Proyek:**<br>• Kementan<br>**Lintas K/L/D:**<br>• Kementan, Kemendes PDTT, Kemen ATR/BPN, Pemda.<br>**Pendanaan dan Investasi**<br>**Sumber:**<br>K/L dan DAK.<br>**Alokasi:**<br>Rp1.551,53 M [K/L dan DAK].<br>***Highlight* Proyek**<br>**Geospasial**<br>• Peta Tematik Pertanahan dan Ruang [K/L];<br>• Jalan - Tematik Pengembangan *Food Estate* (DAK);<br>• Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate* (DAK);<br>• Pertanian - Tematik Pengembangan *Food Estate* (DAK).<br>***On Farm***<br>• Optimasi Lahan[a] [K/L];<br>• Lahan Pertanian Pangan Produktif (*Food Estate*) [K/L];<br>• Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan[a] [K/L];<br>• Areal Penanganan DPI [K/L];<br>***Off Farm***<br>• Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan [K/L];<br>• Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan [K/L].<br>***Impact/ Outcome/ Output***<br>• Meningkatkan ketersediaan beras (2023: 45,4 juta ton, nasional; 2024: 46,84 juta ton, nasional);<br>• Produksi jagung (2023: 34,12 juta ton, 2024: 35,27 juta ton, nasional);<br>• Peningkatan Nilai Tukar Petani (2023: 105–107; 2024: 105, nasional);<br>• Peningkatan Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian (2023: Rp57 juta/orang/tahun, 2024: Rp59,8 juta/orang/tahun, nasional);<br>• Meningkatnya produktivitas 5,3% per tahun di Kalimantan Tengah;<br>• Tercapainya produksi padi 356,9 ribu ton GKG (2023) di Kalimantan Tengah (2024: 501,3 ribu ton GKG);<br>• Meningkatnya indeks pertanaman (IP) 5% per tahun di Kalimantan Tengah;<br>• Meningkatnya luas tanam padi 38.000 ha pada tahun 2023 dan terbangunnya Kawasan *Food Estate* seluas 148.000 ha pada tahun 2024 di Kalimantan Tengah.<br>Keterangan:<br>a) Proyek berstatus PSN. |

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 212 | Perubahan Infografis *Major Project* Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional dalam halaman IV.16 | **MP Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional**<br>• Produktivitas perikanan tangkap masih rendah, hal ini ditunjukkan oleh tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang belum optimal. Produksi perikanan tangkap laut tahun 2019 mencapai 7,8 juta ton (62,3% MSY). Batas optimal pemanfaatan sumber daya ikan adalah 80% MSY (FAO, 1995);<br>• Pada tahun 2019, ekspor perikanan baru mencapai 4,94 miliar US$, atau berada di posisi 15 negara-negara eksportir produk perikanan. Untuk masuk ke dalam 5 besar eksportir produk perikanan, nilai ekspor produk perikanan perlu ditingkatkan, setidaknya mencapai >USD8 miliar. Terdapat hambatan nontarif ekspor perikanan antara lain berupa keamanan produk pangan/sertifikasi produk;<br>• Infrastruktur pelabuhan perikanan tangkap belum memiliki fasilitas yang memadai sesuai standar internasional yang berdampak pada mutu dan nilai tambah hasil tangkapan yang didaratkan.<br>**Urgensi**<br>**Lokasi**: Kab. Minahasa Utara, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Maluku.<br>**Pelaksana**<br>**Penanggung Jawab Proyek:**<br>• Kemen KP (untuk Minahasa Utara dan Rokan Hilir) dan Kemenhub (untuk Maluku).<br>**Lintas K/L/D:**<br>• Kemen ESDM , Kemen ATR/BPN dan Pemda.<br>**Pendanaan dan Investasi**<br>**Sumber:** K/L dan DAK.<br>**Alokasi:** Rp81,00 M [K/L dan DAK].<br>***Highlight* Proyek**<br>**Pembangunan Infrastruktur pendukung (jalan, air, listrik)**<br>• Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah - Provinsi Maluku [K/L];<br>• Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi [K/L].<br>**Pembangunan pelabuhan perikanan dan pasar ikan**<br>• Rekomendasi Kebijakan Pendampingan *Major Project* [K/L];<br>• Pelabuhan Perikanan yang terintergrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan [K/L].<br>**Penguatan armada kapal, sistem logistik dan industri pengolahan**<br>• Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) [DAK];<br>• Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan [K/L];<br>• Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan [K/L].<br>**Penguatan data stok perikanan**<br>• Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia [WPPNRI] yang operasional [K/L].<br>***Impact/ Outcome/ Output***<br>• Produksi perikanan tangkap 9,00 juta ton pada tahun 2023 dan 10,10 juta ton pada 2024;<br>• Nilai Tukar Nelayan 107–108 pada tahun 2023 dan 107 pada tahun 2024;<br>• Nilai ekspor hasil perikanan 7,66 miliar US$ pada tahun 2023 dan 8,0 miliar US$ pada tahun 2024;<br>• Terbangunnya 3 pelabuhan perikanan terintegrasi pada tahun 2024. |
| 213 | Perubahan Infografis *Major Project* Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan dalam halaman IV.16 | **MP Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan**<br>• Belum terintegrasinya 1.029 klaster komoditas pertanian berbasis produksi pertanian dengan akses pasar;<br>• Akses sumber daya produktif rendah: akses KUR untuk sektor pertanian hanya 23%;<br>• Adanya keterbatasan nelayan untuk mengakses skema perkreditan, permodalan, teknologi, dan pasar.<br>**Urgensi**<br>**Lokasi**: 150 Klaster Korporasi di Provinsi: Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, Provinsi D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara<br>**Pelaksana**<br>**Penanggung Jawab Proyek:**<br>• Kementan dan Kemen KP.<br>**Lintas K/L/D:**<br>• Kementan, Kemen KP, BUMN, Pemda.<br>**Pendanaan dan Investasi**<br>**Sumber:** K/L, DAK, dan BUMN.<br>**Alokasi:** Rp7.518,12 M [K/L dan DAK]; Rp213,14 M [BUMN].<br>***Highlight* Proyek**<br>**Penerapan *Good Agricultural Practices and Precision Farming*/Agro Maritim 4.0**<br>• Model Pertanian Modern [K/L];<br>• Pengembangan Ekosistem Pertanian Berbasis Digital (*Agriculture Ecosystem* 4.0) [BUMN];<br>• Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) [DAK];<br>• Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) [DAK];<br>• Sarana produksi dan usaha di Kampung Perikanan Budidaya yang dikembangkan (MP Korporasi) [K/L].<br>**Fasilitasi Pengolahan**<br>• Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan [K/L].<br>**Penguatan Kelembagaan Petani dan Nelayan**<br>• Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor [K/L];<br>• Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya (MP Korporasi) [K/L].<br>***Impact/ Outcome/ Output***<br>• Peningkatan Nilai Tukar Petani (2023: 105–107; 2024: 105);<br>• Peningkatan Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian (2023: Rp57 Juta/Orang/Tahun, 2024: Rp59,8 Juta/Orang/Tahun);<br>• Peningkatan Nilai Tukar Nelayan (2023: 107–108; 2024: 107);<br>• Terbentuk korporasi petani dan nelayan (2023: 150 korporasi dan 2024: 350 korporasi). |

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 214 | Perubahan Infografis *Major Project* Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng dalam halaman IV.17 | **MP Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng**<br>• Udang merupakan komoditas utama perikanan Indonesia. Pada tahun 2019 nilai ekspor udang nasional mencapai 1,72 miliar US$ (34,83 persen total ekspor perikanan nasional) dengan negara tujuan utama AS dan Jepang;<br>• Indonesia adalah negara produsen udang terbesar kedua setelah Cina. Pada tahun 2018, produksi udang Indonesia mencapai 908 ribu ton atau 11,8% produksi udang dunia;<br>• Bandeng merupakan komoditas unggulan dengan pasar domestik;<br>• Potensi lahan budi daya air payau Indonesia sebesar 2,96 juta hektar baru dimanfaatkan sekitar 756,92 ribu ha, atau 25,58% (2018);<br>• Pemanfaatan lahan budi daya masih dilakukan secara tradisional, sehingga rata-rata produktivitas lahan hanya mencapai 1,5 ton/ha/tahun.<br>**Urgensi**<br>**Lokasi**: Banten, Pantai Utara Jabar, Pantai Utara Jateng, Pantai Utara Jatim, Sulsel, Lampung, dan NTB.<br>**Impact/ Outcome/ Output**<br>• Peningkatan produksi ikan budi daya 9,48 juta ton pada 2023 dan 10,32 pada 2024;<br>• Peningkatan kesejahteraan pembudi daya ikan (Nilai Tukar Pembudi Daya Ikan 104 pada tahun 2023 dan 105 pada tahun 2024);<br>• Nilai ekspor hasil perikanan 7,66 miliar US$ pada tahun 2023 dan 8,0 miliar US$ pada 2024 (udang menyumbang 35–40%);<br>• Jumlah kluster kawasan sentra produksi perikanan budi daya komoditas unggulan (termasuk kluster udang) sebanyak 50 kawasan di tahun 2024.<br>**Pelaksana**<br>**Penanggung Jawab Proyek:**<br>• Kemen KP, Pemda.<br>**Lintas K/L/D:**<br>• Kemen PUPR dan Kemen ATR/BPN.<br>**Pendanaan dan Investasi**<br>**Sumber:** K/L dan DAK.<br>**Alokasi:** Rp396,55 M (K/L dan DAK)<br>***Highlight* Proyek**<br>**Pembangunan Infrastruktur Kolam dan Saluran Irigasi Tambak**<br>• Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang disalurkan ke masyarakat [K/L];<br>• Kluster Kawasan di Lokasi *Major Project* Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng [K/L];<br>• Irigasi Perikanan yang Dikelola secara Partisipatif (PITAP)[K/L];<br>• Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) [DAK];<br>• Prasarana Produksi Perikanan Budidaya di UPT [K/L];<br>• Daerah Irigasi Glapan yang Direhabilitasi [K/L].<br>**Pengembangan Benih dan Induk Berkualitas Tinggi**<br>• Benih Udang yang Disalurkan ke Masyarakat [K/L];<br>• Benih Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat [K/L].<br>**Penguatan Perizinan dan Pemasaran**<br>• SHAT Non Sistematis Kategori 4 [K/L];<br>• SHAT Non Sistematis Kategori 5 [K/L];<br>• PBT Non Sistematis Kategori 4 [K/L];<br>• PBT Non Sistematis Kategori 5 [K/L];<br>• Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional [K/L]. |
| 215 | Perubahan Infografis *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM dalam halaman IV.17 | **MP Pengelolaan Terpadu UMKM**<br>• UMKM berkontribusi pada 57% PDB Nasional serta menyerap 97% dari total jumlah pekerja;<br>• Pelaksanaan program pengembangan UMKM tersebar di berbagai K/L, dan belum terintegrasi dengan baik;<br>• UMKM menghadapi kendala pada berbagai aspek usaha di antaranya bahan baku, proses produksi, pembiayaan, pemasaran, teknologi, dan SDM;<br>• UMK yang menjalin kemitraan, termasuk berjejaring dalam rantai nilai global masih rendah, yaitu sebesar 7%;<br>• Kontribusi ekspor UMKM masih sebesar 14% terhadap total ekspor Indonesia.<br>**Urgensi**<br>**Lokasi**: Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Sulawesi Selatan.<br>**Impact/ Outcome/ Output**<br>• Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan meningkat dari 19,89% pada tahun 2019 menjadi 21,44% di tahun 2023 dan 22,00% pada tahun 2024;<br>• Pertumbuhan wirausaha meningkat dari 1,71% pada tahun 2019 menjadi 2,74% pada tahun 2023 dan 2,90% pada tahun 2024;<br>• Mendukung kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,40% pada tahun 2023 dan 5,50% pada tahun 2024;<br>• Mendukung kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas sebesar 16,4% pada tahun 2023 dan 17% pada tahun 2024;<br>• Terbangunnya 10 Rumah Produksi Bersama/*Factory Sharing;*<br>• Terwujudnya peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar untuk 10 akses pengelola Rumah Produksi Bersama<br>**Pelaksana**<br>**Penanggung Jawab Proyek:**<br>• Kemen KUKM<br>**Lintas K/L/D:**<br>• BPOM, BSN, Kemenag, Kemen ATR/BPN, Kemendes PDTT, Kemeninves/BKPM, Kemen KP, Kemnaker, Kemenkominfo, Kemen PUPR, Kemen PPPA, Kemendikbudristek, Kemendag, Kemenperin, Kementan, dan KPPU dan Pemda.<br>**Pendanaan dan Investasi**<br>**Sumber:** K/L<br>**Alokasi:** Rp1.397,34 M [K/L]<br>***Highlight* Proyek**<br>**Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama**<br>• UKM/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan *Factory Sharing* [K/L].<br>**Kurasi dan Standardisasi Produk**<br>• Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk [K/L].<br>**Pendampingan SDM UMKM**<br>• Usaha Mikro Sektor Prioritas yang Menerima Pelatihan [K/L].<br>**Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan**<br>• Dukungan Fasilitasi *Factory Sharing* [K/L].<br>**Penyediaan Akses Pembiayaan**<br>• Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirausaha [K/L].<br>**Regulasi dan Pendataan UMKM**<br>• Pendataan Lengkap KUMKM [K/L]. |



SK No 168103 A

**PRESIDEN**
**REPUBLIK INDONESIA**

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 216 | Perubahan Infografis *Major Project* Industri 4.0 pada 7 Subsektor Industri Prioritas dalam halaman IV.18 | **MP Industri 4.0 pada 7 Subsektor Industri Prioritas**<br>**Urgensi**<br>• Kontribusi PDB industri menurun menjadi <20% dengan rata-rata pertumbuhan PDB yang lebih rendah dari pertumbuhan nasional;<br>• Produktivitas tenaga kerja industri meningkat namun dalam laju lebih rendah dari pertumbuhan produktivitas di negara lain;<br>• Kontribusi ekspor industri Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara sejajar; dan<br>• Potensi pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri sangat besar.<br>**Lokasi**<br>Terbuka untuk 34 provinsi dengan fokus pada 7 subsektor prioritas (industri tekstil, industri makanan dan minuman, industri kimia, industri farmasi, industri elektronika, industri otomotif, dan industri alat kesehatan).<br>**Impact/ Outcome/ Output**<br>• Meningkatkan pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas menjadi 8,40% dan kontribusi PDB industri pengolahan non migas menjadi 18,90% (2024);<br>• Meningkatkan pertumbuhan ekspor produk industri pengolahan menjadi 11,18%(2023);<br>• Meningkatnya rerata Indonesia *Industry* 4.0 *Readiness Index* menjadi ≥ 3.0 (2023);<br>• Meningkatnya perusahaan dengan nilai Indonesia *Industry* 4.0 *Readiness Index* menjadi ≥ 3.0 sebanyak 52 perusahaan (2023).<br>Keterangan:<br>a) Data Proyek Prioritas Investasi Swasta per 24 November 2022.<br>**Pelaksana**<br>**Penanggung Jawab Proyek:**<br>• Kemenperin.<br>**Lintas K/L/D:**<br>• Kemeninves/BKPM, Kemen KP, Kemenparekraf, Kemendag, BSN, KPPU, Badan Usaha dan Swasta.<br>**Pendanaan dan Investasi**<br>**Sumber:**<br>K/L, BUMN, dan Swasta.<br>**Alokasi:**<br>Rp356,42 M [K/L];<br>Rp5.086,96 M [BUMN];<br>Rp12.889,30 M [Swasta][a].<br>***Highlight* Proyek**<br>**Harmonisasi Peraturan dan Kebijakan**<br>• Kebijakan Penurunan Hambatan Akses Pasar [K/L].<br>**Perbaikan Alur Aliran Material**<br>• Perbaikan Rantai Pasok di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar [K/L].<br>**Pembentukan Ekosistem Inovasi dan Adopsi Teknologi**<br>• Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan [K/L].<br>**Pemberdayaan UMKM**<br>• UMKM yang Difasilitasi dalam Inkubator Bisnis [K/L].<br>**Penerapan Standar Berkelanjutan**<br>• Pembangunan Pabrik Kendaraan Listrik [Swasta];<br>• Pembangunan Pabrik Baterai Kendaraan Listrik [Swasta].<br>**Peningkatan Investasi dan Promosi Ekspor**<br>• Pembangunan Pabrik Petrokimia [Swasta];<br>• Pembangunan Pabrik Semikonduktor[Swasta];<br>• Pembangunan Fasilitas Produksi Kimia Dasar *Intermediate* dan Bahan Baku Obat (BBO) [BUMN];<br>• Pembangunan Pabrik Methanol Papua Barat [BUMN]. |
| 217 | Perubahan Infografis *Major Project* Kawasan Industri Prioritas dan Smelter dalam halaman IV.18 | **MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter**<br>**Urgensi**<br>• Nilai kontribusi PDB industri pengolahan menurun dibawah nilai 20%, dengan rata-rata pertumbuhan PDB yang lebih rendah dari pertumbuhan nasional;<br>• Tingginya ketergantungan impor di mana sekitar 71% impor Indonesia adalah bahan baku dan produk antara untuk industri;<br>• Kontribusi ekspor industri Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara sejajar;<br>• Masih rendahnya investasi yang mendukung hilirisasi sumber daya alam, termasuk mineral; dan<br>• Kebutuhan peningkatan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi dalam bentuk kawasan industri dan smelter di luar Pulau Jawa.<br>**Lokasi**<br>**Kawasan Industri**<br>14 kawasan industri yang terletak di Provinsi: Sumatera Utara, Kep. Riau (2), Riau, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten.<br>**Smelter**<br>Smelter terletak di Provinsi: (2) Nusa Tenggara Barat, (3) Kalimantan Tengah, (8) Kalimantan Barat, (1) Kalimantan Selatan, (6) Maluku Utara, (1) Sulawesi Selatan, (4) Sulawesi Tengah, (7) Sulawesi Tenggara, dan Jawa Timur.<br>**Impact/ Outcome/ Output**<br>• Meningkatkan pertumbuhan PDB industri pengolahan menjadi 5,4–6,0% dan kontribusi PDB industri pengolahan menjadi 20,6%;<br>• Tercapainya realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan sebesar 508,8–574 triliun (2023) dan Rp646,1 triliun (2024);<br>• Meningkatnya jumlah tenaga kerja industri pengolahan menjadi 21,70 juta orang (2023) dan 22,5 juta orang (2024);<br>• Beroperasinya 14 Kawasan Industri Prioritas (2023);<br>• Beroperasinya 31 Smelter.<br>Keterangan:<br>a) Proyek berstatus PSN dan<br>b) Data Proyek Prioritas Investasi Swasta per 24 November 2022.<br>**Pelaksana**<br>**Penanggung Jawab Proyek:**<br>• Kemenperin, Kemen ESDM, Pemda, Badan Usaha dan Swasta.<br>**Lintas K/L/D:**<br>• Kemenperin, Kemeninves/BKPM, Kemendag, Kemen ESDM, Pemda, Badan Usaha, dan Swasta.<br>**Pendanaan dan Investasi**<br>**Sumber:**<br>K/L, BUMN, dan Swasta.<br>**Alokasi:**<br>Rp173,40 M [K/L];<br>Rp31.639,69 M [BUMN];<br>Rp1.025.802,08 M [Swasta][b].<br>***Highlight* Proyek**<br>**Perizinan**<br>• Pembangunan Kawasan Industri Takalar[a] [BUMN].<br>**Infrastruktur Dalam Kawasan**<br>• Rehabilitasi Kawasan Industri Palu dan Pirnas [K/L];<br>• Kawasan Industri Subang/Rebana *Technopolis* Subang [a] [BUMN];<br>• Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Industri Tanah Kuning[a] [Swasta].<br>**Peningkatan Investasi**<br>• Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) [K/L];<br>• Pembangunan Smelter Grade Alumina *Refinery* (SGAR) [BUMN];<br>• Pembangunan Industri Petrokimia Terintegrasi [Swasta].<br>**Promosi Ekspor**<br>• Rekomendasi Kebijakan terkait Tindak Lanjut Pelaksanaan Perundingan [K/L].<br>**Penyediaan SDM**<br>• Mahasiswa dan Lulusan Program DI Kerjasama Industri [K/L].<br>**Harmonisasi Regulasi**<br>• Tingkat Implementasi P3DN dan Peningkatan TKDN pada Subsektor Pertambangan Mineral [K/L]. |



SK No 168104 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 218 | Perubahan Infografis *Major Project* Destinasi Pariwisata Prioritas dalam halaman IV.19 | 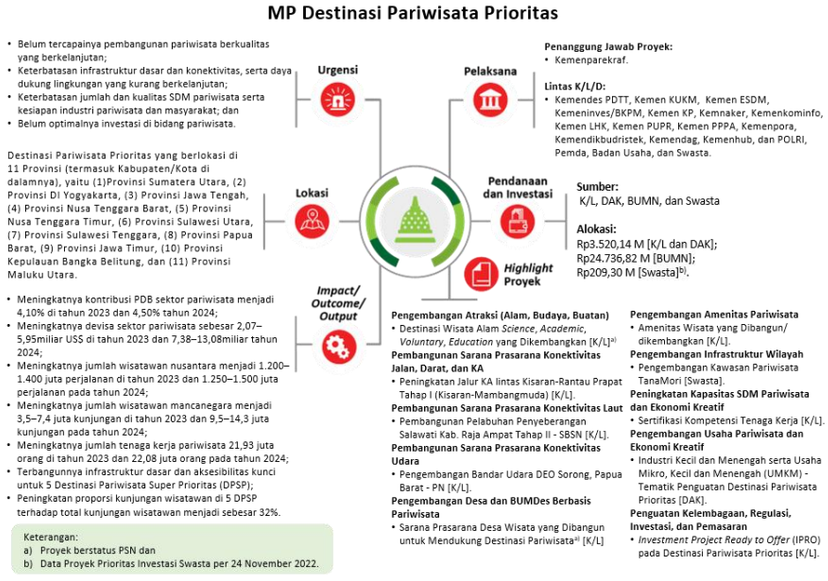 |
| 219 | Perubahan alinea pertama dalam halaman IV.19 | Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.<br>(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian;<br>(2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Raja Ampat;<br>(3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Labuan Bajo;<br>(4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bromo-Tengger-Semeru;<br>(5) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Wakatobi;<br>(6) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Toba;<br>(7) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan;<br>(8) Rancangan Peraturan Presiden tentang Industri Digital;<br>(9) Peraturan Presiden Tentang Transformasi Ekonomi Bali; dan<br>(10) Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen. |

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 220 | Perubahan Tabel 4.3 dalam halaman IV.21 | |

Tabel 4.3
Sasaran, Indikator dan Target
PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

| No. | Sasaran/Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) | | | | | | |
| 1.1 | Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI (%/tahun)[a)] | 3,86 | -0,82 | 4,86 | 5,79–6,15 | 6,4–6,9 | 7,90 |
| 1.2 | IPM KTI (nilai min–maks)[b)] | 60,84–76,61 | 60,44–76,24 | 60,62–76,88 | 62,06–78,11 | 62,54–78,18 | 63,94–79,25 |
| 1.3 | Persentase penduduk miskin KTI (%) [c)] | 11,60 | 11,99 | 11,62 | 10,97 | 9,4–10,2 | 7,13 |
| 2 | Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) | | | | | | |
| 2.1 | Laju pertumbuhan PDRB KBI (%/tahun)[a)] | 5,23 | -2,30 | 3,43 | 4,99–5,33 | 5,0–5,2 | 6,30 |
| 2.2 | IPM KBI (nilai min–maks)[b)] | 69,57–80,76 | 69,69–80,77 | 69,90–81,11 | 70,51–82,99 | 70,48–82,43 | 71,90–84,23 |
| 2.3 | Persentase penduduk miskin KBI (%)[c)] | 8,61 | 9,74 | 9,23 | 8,64 | 7,3–7,9 | 6,33 |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2022 merupakan angka sasaran dalam dokumen pemutakhiran RKP 2022. Angka tahun 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022. Angka tahun 2024 merupakan angka sasaran yang mengacu pada dokumen RPJMN 2020–2024; b) Angka tahun 2020 dan 2021 adalah angka realisasi (BPS). Angka tahun 2022 merupakan angka sasaran dalam dokumen pemutakhiran RKP 2022. Angka 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah. Angka tahun 2024 adalah indikator RPJMN 2020–2024; c) Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan angka realisasi pada tahun tersebut (BPS, diolah). Angka tahun 2022 merupakan angka sasaran dalam dokumen pemutakhiran RKP 2022. Angka 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan *outlook* tingkat kemiskinan dengan mempertimbangkan dampak COVID-19. Angka tahun 2024 adalah target yang ingin dicapai pada tahun 2024. Jumlah digit untuk semua angka menyesuaikan dengan target nasional.



SK No 168106 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 221 | Perubahan Tabel 4.4 dalam halaman IV.22 | |

Tabel 4.4
Indikator Pembangunan Kewilayahan

| No. | Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (nilai) | N/A[a)] | -0,29[b)] | -0,34[b)] | >1 | >1 | >1 |
| 2 | Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan | | | | | | |
| | Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) (jumlah destinasi) | 10[c)] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 (kumu-latif) |
| | Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Revitalisasi (jumlah destinasi) | N/A[d)] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 (kumu-latif) |
| | KEK berbasis pariwisata dan industri (kawasan) | 15 (kumu-latif nasional) | 12 | 14 | 14 (kumu-latif) | 18 (kumu-latif) | 18 (kumu-latif) |
| | KI Prioritas dan KI Pengembangan (jumlah KI) | 8 (kumu-latif nasional) | 5 | 11 | 11 (kumu-latif) | 15 (kumu-latif) | 27 (kumu-latif) |
| | Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (jumlah KPBPB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Persentase pengembangan sektor unggulan per tahun[e)] | | | | | | |
| | Kelapa Sawit (%) | 9,9 | -2,9 | 2,4 | 5,9 | N/A[f)] | 6,0 |
| | Kakao (%) | -4,3 | -1,9 | -2,0 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
| | Kopi (%) | -0,5 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | Kelapa (%) | -0,01 | -1,2 | 1,5 | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
| | Tebu (%) | 2,6 | 11,0 | 13,5 | 6,0 | 1,5 | 1,5 |
| | Karet (%) | -9,1 | -12,6 | 8,2 | 0,9 | 1,9 | 1,9 |
| | Lada (%) | -0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| | Pala (%) | -7,7 | -0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | Cengkeh (%) | 7,5 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | Perikanan Tangkap (%)[g)] | -0,4 | -4,7 | 3,5** | 22,8 | 1,4 | 12,2 |
| | Perikanan Budidaya (%)[g)] | -1,6 | -3,8 | -1,6** | 40,6 | 5,1 | 4,8 |
| | Garam (%)[g)] | 5,6 | -51,9 | -20,4** | 138,5 | -23,1 | 70,0 |



SK No 168107 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 222 | Perubahan Tabel 4.4 dalam halaman IV.23 | |

| No. | Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4 | Jumlah Wilayah Metropolitan (WM) di luar Jawa yang direncanakan (WM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan (WM) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya (WM) | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara (ha) | N/A[h)] | N/A[h)] | N/A[h)] | 6.671[i)] | 6.671[i)] | 6.671[i)] |
| 8 | Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)/Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) (kota) | 20 | 11 | 52 | 52 | 52 | 52[j)] |
| 9 | Jumlah Kota Baru yang dibangun (kota) | 11[k)] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | Jumlah Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang diselesaikan (dokumen Peninjauan Kembali) | 0 | 0 | 1* | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Jumlah Perpres Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan yang diselesaikan (revisi) (materi teknis dan RPerpres) | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 12 | Jumlah Rencana Detail Tata Ruang di Ibu Kota Nusantara (IKN) (jumlah materi teknis dan Rancangan Peraturan) | 0 | 2 | 2* | 1 | 5 | 0 |
| 13 | Jumlah Dokumen Harmonisasi RPerpres Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara yang diselesaikan (dokumen) | 0 | 0 | 0* | 1[l)] | 0 | 0 |
| 14 | Jumlah Dokumen Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Kepala Otorita IKN (dokumen harmonisasi ranperka badan otorita RDTR IKN) | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |



SK No 168108 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 223 | Perubahan Tabel 4.4 dalam halaman IV.24 | |

| No. | Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 15 | Rata-rata nilai indeks desa untuk mengukur perkembangan status desa (nilai) | 56,52 (Mandiri 1.444; Berkembang 54.291; Tertinggal 19.152) | 58,71 | 60,05 | 61,00 | 61,50 | 62,05 (Mandiri 6.444; Berkembang 59.291; Tertinggal 9.152) |
| 16 | Persentase kemiskinan perdesaan (%) | 12,60 | 13,20 | 12,53 | 11,20–11,70 | 10,80–11,20 | 9,90–10,40 |
| 17 | Jumlah Badan Usaha Milik (BUM) Desa yang dikembangkan (BUM Desa) | 1272 | 245 | 503 | 500 | 3350 | 6200 |
| 18 | Jumlah Badan Usaha Milik (BUM) Desa Bersama yang dikembangkan (BUM Desa Bersama) | 65 | 1 | 8 | 72 | 126 | 180 |
| 19 | Rata-rata nilai indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) (nilai) | 51,10 | 61, 32[m)] | 61,32[m)] | 55,66 | 58,40 | 58,70 |
| 20 | Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi (nilai) | 46,55 | 48,74[n)] | 51,85[n)] | 53,12 | 55,31 | 57,50 |
| 21 | Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya (kecamatan) | 187 | 222[o)] | 56[o)] | 112[p)] | 176[p)] | 222 |
| 22 | Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) (nilai) | 0,42 | 0,43[o)] | 0,45[o)] | 0,47 | 0,50 | 0,52 |
| 23 | Jumlah daerah tertinggal (kabupaten) | 62 | 62 | 62[q)] | 62[q)] | 62[q)] | 37 (terentaskan 25 kabupaten) |
| 24 | Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%) | 25,85 | 25,32 | 25,5 | 24,3–24,8 | 24,0–24,5 | 23,5–24,0 |



SK No 168109 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 224 | Perubahan Tabel 4.4 dalam halaman IV.25 | |

| No. | Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 25 | Rata-rata IPM di daerah tertinggal (nilai) | 58,91 | 59,02 | 59,33 | 60,7–61,2 | 61,5–62 | 62,2–62,7 |
| 26 | Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (%) | N/A[r)] | 29 | 42 | 50 | 75 | 100 |
| 27 | Jumlah daerah yang memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prima berbasis elektronik (kabupaten/kota) | 159 | 22[s)] | 84[t)] | 74 | 76 | 76 |
| 28 | Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (daerah) | 313 | 17 | 257 | 409 | 455 | 542 |
| 29 | Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas (daerah) | 102 | 218 | 494 | 318 | 475 | 542 |
| 30 | Persentase capaian SPM di daerah (%) | 74,24 | 66,05[u)] | 69,55[v)] | 82,85 | 90,90 | 100 |
| 31 | Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi ($km^2$) | 49.728 (nasional) | 4.903 | 0 | 0 | 366.702[w)] | 1.120.802[w)] |
| 32 | Cakupan peta RBI skala 1:5.000 ($km^2$) | 40.216 (nasional) | 17.956,79 | 13.207 | 0 | 1.805[w)] | 991.046[w)] |
| 33 | Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan (kesepakatan) | 0 | 209 | 4.339 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 34 | Jumlah layanan data *center* jaringan informasi geospasial nasional beroperasi (layanan) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Jumlah daerah yang melaksanakan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (daerah) | 9 | 14 | 34 | 51 | 46 | 86 |
| 36 | Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi (%) | 12 | 34,25[x)] | 65,13 | 24 | 30 | 36 |
| 37 | Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda Pajak Dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam rangka memberikan kemudahan investasi (daerah) | 34 | 50 | 192 | 318 | 426 | 542 |



SK No 168110 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 225 | Perubahan Tabel 4.4 dalam halaman IV.26 | |

| No. | Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Target 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (ha) | 17.817.153,60 (kumulatif) | 24.279.103,73 (kumulatif) | 2.240.576 (4.481.153 Bidang) | 2.443.986 (4.887.971 Bidang) | 2.426.354 (4.852.708 Bidang) | 10.274.866 |
| 39 | Luas cakupan peta dasar pertanahan (ha) | 33.972.698,12 (kumulatif) | 35.721.146,84 (kumulatif) | 1.532.250 | 2.022.250 | 2.524.043[y)] | 7.110.790 |
| 40 | Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker) | 0 | 156 | 82 | 90 | 62 | 492 (kumulatif) |
| 41 | Panjang kawasan hutan yang dilakukan perapatan batas (km) | 3.179 | 1.339 | 2.386,37 | 2.906,47 | 519 | 5.000 |
| 42 | Terbentuk dan operasional lembaga Bank Tanah (lembaga) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi untuk penetapan peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat (provinsi) | 10 | 3 | 33 | 33 | 10 | 33 |
| 44 | Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bimbingan teknis peninjauan kembali/ penyusunan Rencana Tata Ruang (materi teknis dan Raperda RTR) | 59 (nasional) | 25 | 26 | 51 | 47 | 42 |
| 45 | Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bantuan teknis penyusunan materi Teknis RDTR (materi Teknis dan Ranperkada RDTR) | 15 (nasional) | 9 | 0* | 0 | 19 | 5 |
| 46 | Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bantuan teknis penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahan Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KRB/ KPPN) (Materi Teknis dan Ranperkada RDTR) | 13 (nasional) | 5 | 16* | 12 | 0 | 10 |
| 47 | Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bimbingan teknis Penyusunan RDTR (materi teknis dan Ranperkada RDTR) | 99 | 25 | 81 | 182 | 96 | 313 |



SK No 168111 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|

226 Perubahan Tabel 4.4 dalam halaman IV.27

| No. | Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 48 | Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi) | 36 | 40 | 38 | 48 | 54 | 43 |
| 49 | Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan (materi teknis dan RPerpres) | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 50 | Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara yang diselesaikan (materi teknis dan RPerpres) | 4 (nasional) | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Keterangan: a) Nilai *baseline* rasio investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) tidak tercantum dalam RPJMN 2020-2024, selain itu *baseline*nya bernilai N/A juga dikarenakan ketidaktersediaan data yang mengakibatkan belum dapat dilakukannya perhitungan rasio investasi kawasan; b) Perhitungan realisasi rasio pertumbuhan investasi kawasan hanya dilakukan pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB); c) Jumlah DPP yang difasilitasi; d) Destinasi Pariwisata Pengembangan baru masuk dalam RPJMN 2020-2024, sehingga tahun 2019 belum terdapat ditentukan nilai *baseline*nya; e) Angka sangat sementara. Merupakan perhitungan awal yang didapat dari sektor Kementerian PPN/Bappenas untuk dikoordinasikan dan dimutakhirkan kembali bersama sektor di Kementerian PPN/Bappenas; f) Intervensi tidak lagi berlanjut di tahun anggaran 2023; g) Angka *baseline* 2019, realisasi 2020, realisasi 2021 untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya mengacu pada pemutakhiran data perikanan yang telah divalidasi pada satu data KKP (statistik.kkp.go.id) yang diakses 4 November 2022. Angka *baseline* 2019, realisasi 2020, realisasi 2021 untuk garam disesuaikan dengan Laporan Kinerja KKP Tahun 2021 rilis Februari 2022 dan Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2022, KKP rilis Januari 2022; h) Proses pengkajian, perencanaan, dan penyiapan regulasi sehingga belum dilakukan pembangunan; i) Sesuai dengan Tahap I di dalam Lampiran II UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara; j) Sesuai dengan lampiran IV Peraturan Presiden No. 18/2020 tentang RPJMN 2020–2024; k) Tahap perencanaan (penyusunan Materi Teknis RDTR); l) Angka target 2022 termutakhir dari dokumen perpres pemutakhiran RKP Tahun 2022, penentuan target belum selesai di tahun 2021 karena menunggu disahkannya UU IKN, kegiatan perlu dilanjutkan ke 2022; m) Jika mengacu pada pemutakhiran keterangan yang termuat adalah Rata-rata Pengukuran IPKP Tahun 2020 dari 36 KPPN dari total 62 KPPN; n) Sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kemendes PDTT No. 132/PRC.04.01/III/ 2022 tanggal 31 Maret 2022; o) Sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP No. PRC/30.04/2416/XI/2021 tanggal 16 November 2021 dan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP No. HMS.65/1705/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022; p) Jumlah kecamatan lokasi prioritas (lokpri) yang difokuskan pembangunannya berdasarkan Rancangan Perpres Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWNKP) Tahun 2020–2024. Progres pembangunan berdasarkan laporan capaian PBWNKP yang dirilis BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan); q) Sesuai PP No. 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, evaluasi dan penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap lima tahun, yaitu pada akhir pelaksanaan RPJMN, sehingga jumlah daerah tertinggal untuk tahun 2021-2023 tidak mengalami perubahan atau tetap 62 kabupaten; r) *Baseline* N/A karena ketika terjadi bencana belum dimungkinkan untuk dilakukan pengukuran kerusakan serta kerugian antara kondisi sebelum dan sesudah; s) Setelah adanya pemotongan anggaran akibat COVID-19, target diturunkan menjadi level provinsi; t) Rekapitulasi Perkembangan Pelaksanaan Prioritas Nasional Triwulan IV TA. 2021 pada lingkup Kemendagri; u) Rekapitulasi capaian penerapan SPM yang disampaikan oleh Ditjen Bina Bangda Kemendagri, pada Desember 2021; v) Rekapitulasi capaian penerapan SPM yang disampaikan oleh Ditjen Bina Bangda Kemendagri, pada Mei 2022; w) Kegiatan dilaksanakan dengan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara (KPBUMN). Alokasi anggaran sepenuhnya berasal dari investasi BUMN; x) Sesuai SK Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4672 Tahun 2020 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota 2020; y) Target ini merupakan target luas Peta Bidang Tanah (PBT) pada pelaksanaan PTSL, yang didalamnya mencakup peta dasar pertanahan; *) Hingga TW III; **) Data Sementara.



SK No 168112 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 227 | Perubahan Tabel 4.5 dalam halaman IV.28 | |

Tabel 4.5
Sasaran, Indikator dan Target PP pada
PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
dan Menjamin Pemerataan

| No. | Sasaran/Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera | | | | | | | |
| Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sumatera | | | | | | | |
| 1.1 | Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sumatera (%/tahun)[a)] | 4,55 | -1,20 | 3,18 | 4,43–4,74 | 4,5–4,8 | 5,60 |
| 1.2 | IPM Provinsi di Wilayah Sumatera (nilai min–maks) [b)] | 69,57–75,48 | 69,69–75,59 | 69,90–75,79 | 70,51–76,91 | 70,48–77,01 | 71,90–78,19 |
| 1.3 | Persentase penduduk miskin Wilayah Sumatera (%) [c)] | 9,82 | 10,22 | 9,75 | 9,13 | 8,2–8,6 | 7,06 |
| PP 2. Pembangunan Wilayah Jawa-Bali | | | | | | | |
| Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Jawa-Bali | | | | | | | |
| 2.1 | Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa-Bali (%/tahun)[a)] | 5,47 | -2,68 | 3,52 | 5,20–5,55 | 5,2–5,4 | 6,30 |



SK No 168113 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 228 | Perubahan Tabel 4.5 dalam halaman IV.29 | |

| No. | Sasaran/Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.2 | IPM Provinsi di Wilayah Jawa-Bali (nilai min–maks) b) | 71,50–80,76 | 71,71–80,77 | 72,14–81,11 | 73,26–82,99 | 73,05–82,43 | 74,60–84,23 |
| 2.3 | Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa-Bali (%) c) | 8,16 | 9,56 | 9,03 | 8,45 | 6,9–7,6 | 6,05 |
| PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara | | | | | | | |
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Nusa Tenggara | | | | | | | |
| 3.1 | Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Nusa Tenggara (%/tahun) a) | 4,47 | -0,71 | 2,39 | 5,12–5,47 | 5,8–6,2 | 5,10 |
| 3.2 | IPM Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara (nilai min–maks) b) | 65,23–68,14 | 65,19–68,25 | 65,28–68,65 | 66,87–70,20 | 66,63–69,59 | 68,35–71,91 |
| 3.3 | Persentase penduduk miskin Wilayah Nusa Tenggara (%) c) | 17,38 | 17,81 | 17,22 | 16,75 | 13,8–14,8 | 10,69 |
| PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan | | | | | | | |
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kalimantan | | | | | | | |
| 4.1 | Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan (%/tahun) a) | 4,96 | -2,28 | 3,18 | 5,22–5,52 | 5,2–5,5 | 5,40 |
| 4.2 | IPM Provinsi di Wilayah Kalimantan (nilai min–maks) b) | 67,65–76,61 | 67,66–76,24 | 67,90–76,88 | 69,60–78,11 | 68,91–78,18 | 71,22–79,25 |
| 4.3 | Persentase penduduk miskin Wilayah Kalimantan (%) c) | 5,81 | 6,16 | 5,84 | 5,15 | 4,3–5,1 | 2,91 |
| PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi | | | | | | | |
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sulawesi | | | | | | | |
| 5.1 | Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sulawesi (%/tahun) a) | 6,95 | 0,23 | 5,67 | 6,58–7,07 | 7,4–8,0 | 6,90 |
| 5.2 | IPM Provinsi di Wilayah Sulawesi (nilai min–maks)b) | 65,73–72,99 | 66,11–72,93 | 66,36–73,30 | 67,72–74,48 | 67,73–74,45 | 69,41–75,83 |
| 5.3 | Persentase penduduk miskin Wilayah Sulawesi (%) c) | 10,06 | 10,41 | 10,04 | 9,58 | 8,3–8,8 | 6,48 |
| PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku | | | | | | | |
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Maluku | | | | | | | |
| 6.1 | Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Maluku (%/tahun) a) | 5,79 | 1,98 | 9,41 | 6,66–6,99 | 10,9–11,8 | 6,00 |



SK No 168114 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|

229 Perubahan Tabel 4.5 dalam halaman IV.30

| No. | Sasaran/Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Target 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | IPM Provinsi di Wilayah Maluku (nilai min–maks)[b)] | 68,70–69,45 | 68,49–69,49 | 68,76–69,71 | 70,92–71,08 | 70,71–71,18 | 72,25–72,33 |
| 6.3 | Persentase penduduk miskin Wilayah Maluku (%) [c)] | 13,24 | 13,45 | 12,20 | 12,19 | 10,6–11,4 | 8,21 |
| PP 7. Pembangunan Wilayah Papua | | | | | | | |
| Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua | | | | | | | |
| 7.1 | Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Papua (%/tahun) [a)] | -10,69 | 1,40 | 10,29 | 5,92–6,26 | 7,2–7,8 | 6,00 |
| 7.2 | IPM Provinsi di Wilayah Papua (nilai min–maks) [b)] | 60,84–64,70 | 60,44–65,09 | 60,62–65,26 | 62,06–65,92 | 62,54–66,55 | 63,94–67,24 |
| 7.3 | Persentase penduduk miskin Wilayah Papua (%) [c)] | 25,43 | 25,65 | 26,12 | 23,84 | 22,0–23,6 | 16,29 |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2022 merupakan angka sasaran dalam dokumen pemutakhiran RKP 2022. Angka 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022. Angka tahun 2024 merupakan angka sasaran yang mengacu pada dokumen RPJMN 2020–2024; b) Angka tahun 2020 dan 2021 adalah angka realisasi (BPS). Angka tahun 2022 merupakan angka sasaran dalam dokumen pemutakhiran RKP 2022. Angka 2023 merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah. Angka tahun 2024 adalah indikator RPJMN 2020–2024; c) Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan angka realisasi pada tahun tersebut (BPS, diolah). Angka tahun 2022 merupakan angka sasaran dalam dokumen pemutakhiran RKP 2022. Angka 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan *outlook* tingkat kemiskinan dengan mempertimbangkan dampak COVID-19. Angka tahun 2024 adalah target yang ingin dicapai pada tahun 2024. Jumlah digit untuk semua angka menyesuaikan dengan target nasional.

230 Perubahan alinea ketiga dalam halaman IV.32 dan alinea pertama dalam halaman IV.33

Upaya untuk Pembangunan Wilayah Sumatera akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK Arun Lhokseumawe dan KPBPB Sabang yang berlokasi di Provinsi Aceh; KI/KEK Sei Mangkei dan DPP Danau Toba dan sekitarnya yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara; KI Bintan *Aerospace*, KI/KEK Galang Batang, Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam-Bintan, KPBPB Batam-Bintan-Karimun, KEK Nongsa, serta KEK Batam Aero *Technic* yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau; KI Sadai dan DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; KI Tenayan yang berlokasi di Provinsi Riau serta Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat;

(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas kakao, karet, kelapa, kopi, pala, lada, tebu, cengkeh, pengembangan perikanan tangkap serta perikanan budidaya. Pengembangan sektor unggulan perikanan budi daya dilakukan dengan melakukan revitalisasi dan pengembangan tambak udang dan bandeng, memberikan calon induk unggul ikan air tawar, ikan air payau, udang, serta benih ikan air tawar, udang, ikan air payau, ikan air laut serta pemberian sarana produksi usaha yang akan disalurkan kepada masyarakat;

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan di 2 wilayah metropolitan (WM Medan dan WM Palembang), 5 kota besar (Padang, Pekanbaru, Batam, Jambi, Bandar Lampung), 12 kota sedang (Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Pematangsiantar, Gunungsitoli, Dumai, Bukittinggi, Tanjungpinang, Bengkulu, Lubuklinggau, Prabumulih, Pangkalpinang) dan 3 kota kecil (Sabang, Sibolga, Solok);

(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi PKSN Sabang, PKSN Bengkalis, dan PKSN Ranai, dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur pada PKSN Sabang dan PKSN Bengkalis; penanganan terhadap 36 kecamatan lokasi prioritas



SK No 168115 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | perbatasan negara di Wilayah Sumatera; revitalisasi 12 kawasan transmigrasi yang terdiri atas 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Aceh (Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantara di Kabupaten Aceh Tengah, Kawasan Transmigrasi Samar Kilang di Kabupaten Bener Meriah, Kawasan Transmigrasi Selaut di Kabupaten Simeuleu), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Sumatera Barat (Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan), 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan (Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan di Kabupaten Ogan Ilir, Kawasan Transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, dan Kawasan Transmigrasi Kikim di Kabupaten Lahat), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Jambi (Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu di Kabupaten Bungo), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Bengkulu (Kawasan Transmigrasi Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang di Kabupaten Bangka Selatan), dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Lampung (Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu di Kabupaten Tulang Bawang dan Kawasan Transmigrasi Mesuji di Kabupaten Mesuji); pembangunan 14 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang pada tahun 2023 difokuskan pada 4 KPPN yaitu KPPN Aceh Timur, KPPN Samosir, KPPN Bintan dan KPPN Bangka Selatan; pengentasan 3.097 desa tertinggal dan peningkatan 1.156 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 7 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 5 kabupaten di tahun 2023 seperti pada Tabel 4.6; dan<br>(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan capaian rata-rata penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, sosial, dan pekerjaan umum) peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sumatera, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota termasuk pengoptimalan pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota dan RDTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN), serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar. |
| 231 | Perubahan alinea ketiga dalam halaman IV.34 dan alinea pertama dalam halaman IV.35 | Upaya untuk Pembangunan Wilayah Jawa-Bali akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:<br>(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada DPP Borobudur dan sekitarnya yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); KEK Kendal dan KI Terpadu Batang yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah; KEK Singhasari, KEK Gresik, DPP Bromo-Tengger-Semeru, dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur; KI Pancapuri dan KEK Tanjung Lesung yang berlokasi di Provinsi Banten; KI Subang dan KEK Lido yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat; Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran yang berlokasi di Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat; serta Revitalisasi Destinasi Pariwisata Bali yang berlokasi di Provinsi Bali; |



SK No 168116 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | (2) Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas, pala, cengkeh, kopi, tebu, kelapa, kakao, garam, pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Pengembangan perikanan budidaya dilakukan dengan melakukan revitalisasi dan pengembangan kluster tambak udang dan bandeng, memberikan calon induk unggul udang, ikan air tawar, ikan air payau dan benih udang, ikan air laut, ikan air tawar, ikan air payau, dan kepiting, serta sarana produksi usaha yang akan disalurkan kepada masyarakat;<br>(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada 5 Wilayah Metropolitan yaitu WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, WM Surabaya, WM Denpasar; Kota Baru Maja; 3 kota besar (Serang, Surakarta, dan Malang) dan 11 kota sedang (Cilegon, Sukabumi, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Magelang, Yogyakarta, Kediri, Batu, Pasuruan, dan Probolinggo);<br>(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada 5 KPPN pada tahun 2023 yaitu KPPN Banyuwangi, KPPN Buleleng, KPPN Magelang, KPPN Pandeglang, dan KPPN Pamekasan dari total 8 KPPN; percepatan pembangunan 197 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 2.893 desa berkembang menjadi desa mandiri; dan<br>(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, trantibumlinmas, dan pekerjaan umum), peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Jawa-Bali, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota termasuk pengoptimalan pelaksanaan kebijakan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta berlandaskan Grand Design Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta 2022–2042, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar. |
| 232 | Perubahan alinea pertama dalam halaman IV.36 dan alinea pertama dalam halaman IV.37 | Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Nusa Tenggara dapat dilihat pada Gambar 4.6. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:<br>(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada DPP Labuan Bajo yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;<br>(2) Pengembangan Sektor Unggulan difokuskan pada peningkatan produktivitas kopi, kelapa, kakao, tebu, garam, dan perikanan budidaya yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Pengembangan perikanan budidaya dilakukan dengan memberikan benih ikan air laut dan ikan air tawar, melakukan revitalisasi dan pengembangan kluster tambak udang dan bandeng, serta memberikan sarana produksi usaha yang disalurkan kepada masyarakat. Pengembangan komoditas cengkeh juga akan didorong |



SK No 168117 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | melalui keterlibatan berbagai pihak dan integrasi sumber pendanaan non-APBN;<br>(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada Kota Besar (Mataram) dan Kota Sedang (Kupang);<br>(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan khususnya PKSN Atambua di Kabupaten Belu dan PKSN Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, termasuk pembangunan infrastrukturnya; serta penanganan terhadap 24 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Nusa Tenggara; 5 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi yang terdiri atas 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kawasan Transmigrasi Tambora di Kabupaten Bima dan Kawasan Transmigrasi Labangka di Kabupaten Sumbawa) dan 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur/Tanyu Manu di Kabupaten Malaka, Kawasan Transmigrasi Ponu di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kawasan Transmigrasi Melolo di Kabupaten Sumba Timur); 3 KPPN yang difokuskan untuk dikembangkan pada tahun 2023 yaitu KPPN Dompu, KPPN Manggarai Barat, dan KPPN Lombok Utara dari total KPPN sejumlah 7 KPPN; 1.079 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang, dan peningkatan 143 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 14 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 7 kabupaten di tahun 2023 seperti pada Tabel 4.7; dan<br>(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, sosial, pekerjaan umum), peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Nusa Tenggara, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar. |
| 233 | Perubahan alinea pertama dalam halaman IV.38 dan alinea pertama dalam halaman IV.39 | Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Kalimantan, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Kawasan Kalimantan dapat dilihat pada Gambar 4.7. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Kalimantan akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:<br>(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur; KI Ketapang dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-Singkawang yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat; KI Tanah Kuning yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Utara; serta KI Surya Borneo yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah;<br>(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas karet, kelapa, lada, kopi, serta perikanan budidaya. Perikanan budidaya dikembangkan dengan memberikan calon induk unggul ikan air tawar, benih ikan air tawar dan sarana produksi usaha |



SK No 168118 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | yang disalurkan ke masyarakat. Pengembangan komoditas kakao juga akan didorong melalui keterlibatan berbagai pihak dan integrasi sumber pendanaan non-APBN; |
| | | (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan dengan fokus pada pembangunan Ibu Kota Nusantara dan kota besar yang menjadi wilayah mitra (Balikpapan dan Samarinda), pengembangan WM Banjarmasin, pembangunan Kota Baru Tanjung Selor, pengembangan kota besar (Pontianak) dan tiga kota sedang (Singkawang, Palangkaraya, Tarakan); |
| | | (4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 6 PKSN yaitu PKSN Paloh Aruk, PKSN Jagoi Babang, PKSN Nunukan, PKSN Long Midang, PKSN Tou Lumbis, dan PKSN Long Nawang, dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur pada PKSN Paloh Aruk, PKSN Long Nawang, dan PKSN Nunukan; serta penanganan terhadap 35 kecamatan lokasi prioritas perbatasan Wilayah Kalimantan, 9 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi yang terdiri atas 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Barat (Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya di Kabupaten Kubu Raya, Kawasan Transmigrasi Gerbang Mas Perkasa dan Kawasan Transmigrasi Subah di Kabupaten Sambas), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Tengah (Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya di Kabupaten Lamandau), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Selatan (Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala), 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kawasan Transmigrasi Kerang di Kabupaten Paser dan Kawasan Transmigrasi Maloy Kaliorang di Kabupaten Kutai Timur), dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Utara (Kawasan Transmigrasi Salim Batu di Kabupaten Bulungan dan Kawasan Transmigrasi Seimenggaris di Kabupaten Nunukan); 1 kawasan transmigrasi yang mendukung pengembangan food estate yaitu Kawasan Transmigrasi Lamunti Dadahup di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai direktif Presiden dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional; pengembangan 11 KPPN yang pada tahun 2023 difokuskan pada 2 KPPN yaitu KPPN Berau dan KPPN Barito Kuala; 1.460 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang dan peningkatan 232 desa berkembang menjadi desa mandiri; dan |
| | | (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, trantibumlinmas, dan pekerjaan umum), peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Kalimantan, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja, dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota, dan RDTR Ibu Kota Nusantara, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar. |



SK No 168119 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 234 | Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.39 dan alinea pertama dalam halaman IV.40 | Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Sulawesi, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Gambar 4.8. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Sulawesi akan didukung dengan KP sebagai berikut:<br>(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK/KI Palu yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah; KEK Bitung sebagai pusat industrialisasi/hilirisasi komoditas unggulan wilayah dan DPP Manado-Likupang/KEK Likupang yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara; KI Takalar dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar-Selayar yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan; serta DPP Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai kawasan pariwisata unggulan;<br>(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas lada, pala, cengkeh, kakao, kopi, kelapa, garam, tebu, dan perikanan budidaya. Perikanan budidaya dikembangkan dengan melakukan revitalisasi dan pengembangan kawasan tambak udang dan bandeng, memberikan calon induk unggul ikan air payau, benih ikan air tawar, ikan air payau, ikan air laut, udang, dan kepiting, serta sarana produksi usaha dan perbenihan ikan yang disalurkan kepada masyarakat;<br>(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pengembangan wilayah metropolitan (WM Makassar dan WM Manado); lima kota sedang (Gorontalo, Palu, Parepare, Palopo, dan Kendari); dan satu kawasan perkotaan kecil, yaitu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Mamuju;<br>(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi PKSN Melonguane dan PKSN Tahuna, termasuk pembangunan infrastrukturnya; serta penanganan terhadap 15 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Sulawesi; revitalisasi 18 kawasan transmigrasi yang terdiri atas 4 kawasan transmigrasi di Provinsi Gorontalo (Kawasan Transmigrasi Sumalata di Kabupaten Gorontalo Utara, Kawasan Transmigrasi Pulubala di Kabupaten Gorontalo, Kawasan Transmigrasi Paguyuman Pantai dan Kawasan Transmigrasi Pawonsari di Kabupaten Boalemo), 6 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tengah (Kawasan Transmigrasi Palolo di Kabupaten Sigi, Kawasan Transmigrasi Bungku di Kabupaten Morowali, Kawasan Transmigrasi Air Terang di Kabupaten Buol, Kawasan Transmigrasi Tampo Lore di Kabupaten Poso, Kawasan Transmigrasi Padauloyo di Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya di Kabupaten Parigi Moutong), 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Barat (Kawasan Transmigrasi Tobadak di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kawasan Transmigrasi Sarudu Baras di Kabupaten Pasang Kayu), 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Kawasan Transmigrasi Tinanggea di Kabupaten Konawe Selatan, Kawasan Transmigrasi Mutiara di Kabupaten Muna, dan Kawasan Transmigrasi Asinua-Routa di Kabupaten Konawe), dan 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan (Kawasan Transmigrasi Bekkae/Gilireng di Kabupaten Wajo, Kawasan Transmigrasi Masamba di Kabupaten Luwu Utara, dan Kawasan Transmigrasi Mahalona di Kabupaten Luwu Timur); pengembangan 16 KPPN yang pada tahun 2023 difokuskan pada 2 KPPN yaitu KPPN Minahasa Utara dan KPPN Pinrang; 1.043 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang dan peningkatan 507 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 3 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat |



SK No 168120 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | pembangunannya dan menjadi fokus intervensi di tahun 2023 seperti pada Tabel 4.8; dan<br>(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, sosial, dan trantibumlinmas) peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sulawesi, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, Peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja, dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar. |
| 235 | Perubahan alinea pertama dalam halaman IV.41 dan alinea pertama dalam halaman IV.42 | Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Maluku, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Maluku dapat dilihat pada Gambar 4.9. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Maluku akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:<br>(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KI Teluk Weda dan DPP Morotai/KEK Morotai yang berlokasi di Provinsi Maluku Utara;<br>(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas cengkeh, pala, kelapa, pengembangan perikanan tangkap, dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap dikembangkan melalui pemberian bantuan sarana pengembangan usaha nelayan dan perikanan budidaya dikembangkan melalui pemberian benih ikan air laut serta sarana produksi usaha dan perbenihan ikan yang akan disalurkan ke masyarakat;<br>(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pembangunan pusat pertumbuhan baru dilakukan melalui pembangunan satu kota baru (Sofifi), dan pengembangan dua kota sedang (Ternate dan Ambon), serta satu kota kecil (Tual);<br>(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 2 PKSN yaitu PKSN Daruba dan PKSN Saumlaki, dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur pada PKSN Daruba; pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 29 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Maluku; revitalisasi 3 kawasan transmigrasi yang terdiri atas 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Maluku (Kawasan Transmigrasi Kobisonta di Kabupaten Maluku Tengah) dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Maluku Utara (Kawasan Transmigrasi Mangole di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai di Kabupaten Pulau Morotai), pengembangan 2 KPPN yang pada tahun 2023 difokuskan pada 1 KPPN yaitu KPPN Morotai; 675 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang dan peningkatan 39 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 8 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 6 kabupaten di tahun 2023 seperti pada Tabel 4.9; dan<br>(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya |



SK No 168121 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | bidang sosial, perumahan rakyat, dan trantibumlinmas), peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Maluku, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja, dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi daerah dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR Kepulauan, RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota, dan RDTR KPN, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar. |
| 236 | Perubahan alinea pertama dalam halaman IV.43 dan alinea pertama dalam halaman IV.44 | Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Papua, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Papua dapat dilihat pada Gambar 4.10 dan Upaya Pembangunan Wilayah Papua akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:<br>(1) Pengembangan Kawasan Strategis melalui fasilitasi investasi pengembangan KI Teluk Bintuni, fasilitasi penyelesaian masalah strategis KEK Sorong, dan pengembangan DPP Raja Ampat yang berlokasi di Provinsi Papua Barat; serta pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cendrawasih yang berlokasi di Provinsi Papua;<br>(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas sagu, kopi, kakao, pala, dan perikanan budidaya melalui pemberian sarana produksi usaha yang disalurkan kepada masyarakat. Pengembangan komoditas perikanan tangkap, sapi dan kenaf juga akan didorong melalui keterlibatan berbagai pihak dan integrasi sumber pendanaan non-APBN;<br>(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pembangunan satu kota baru (Sorong) dan satu kota sedang (Jayapura);<br>(4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 3 PKSN yaitu PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke; pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 27 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Papua; revitalisasi 5 kawasan transmigrasi yang terdiri atas 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Papua Barat (Kawasan Transmigrasi Werianggi Werabur di Kabupaten Teluk Wondama dan Kawasan Transmigrasi Bomberay-Tomage di Kabupaten Fak-Fak), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Papua (Kawasan Transmigrasi Senggi di Kabupaten Keerom), dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Papua Selatan (Kawasan Transmigrasi Salor dan Kawasan Transmigrasi Muting/Jagebob di Kabupaten Merauke); pengembangan 4 KPPN yang pada tahun 2023 difokuskan pada 2 KPPN yaitu KPPN Kota Jayapura dan KPPN Raja Ampat; percepatan pembangunan 2.449 kampung tertinggal menjadi kampung berkembang, dan peningkatan 30 kampung berkembang menjadi kampung mandiri; serta 3O kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 23 kabupaten di tahun 2023 seperti pada Tabel 4.10; dan<br>(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang sosial, trantibumlinmas, dan perumahan rakyat), peningkatan |



SK No 168122 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Papua, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota termasuk pengoptimalan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua bagi pelayanan publik dan pengembangan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja, dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi), percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR Pulau, RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota, dan RDTR KPN, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar. |
| 237 | Perubahan Gambar 4.10 dalam halaman IV.44 | Gambar 4.10<br>Peta Pembangunan Wilayah Papua<br> 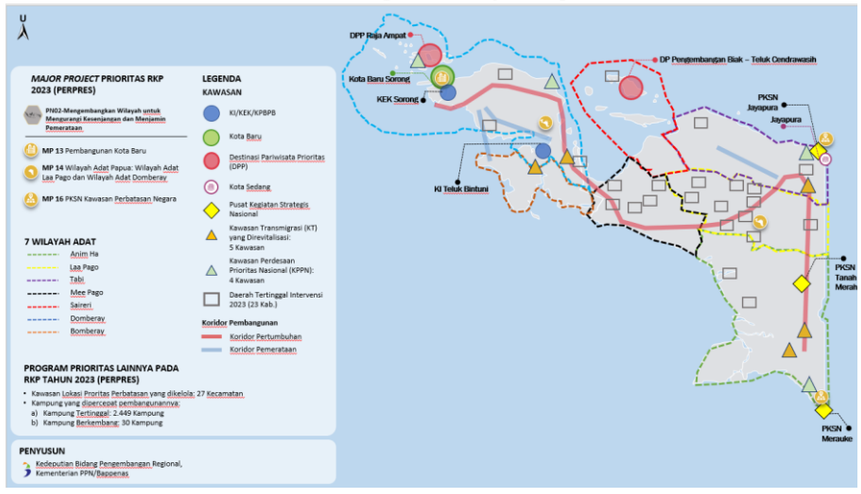 <br> |
| 238 | Perubahan Infografis *Major Project* Pembangunan Wilayah Batam-Bintan dalam halaman IV.45 | **MP Pembangunan Wilayah Batam-Bintan**<br> 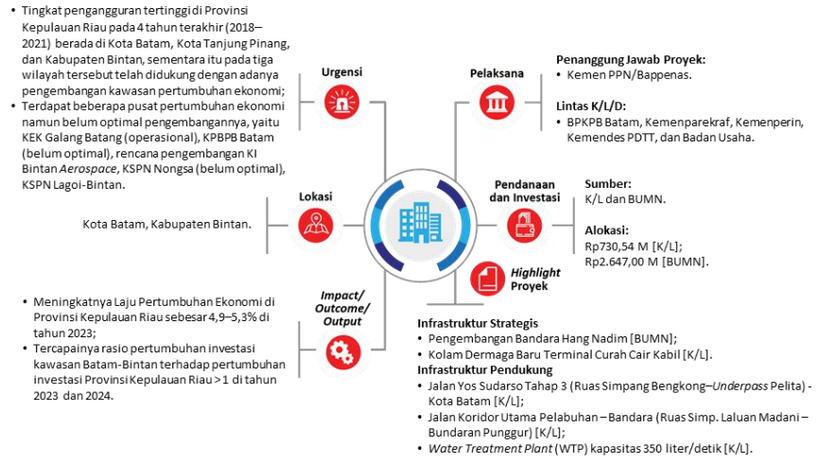 <br> |

**PRESIDEN**
**REPUBLIK INDONESIA**

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 239 | Perubahan Infografis *Major Project* Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar dalam halaman IV.45 | **MP Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar**<br> 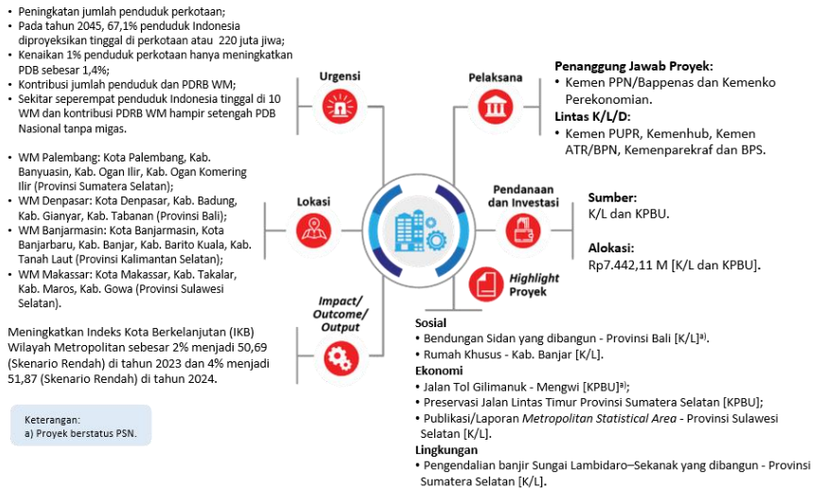 <br> |
| 240 | Perubahan Infografis *Major Project* Pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam halaman IV.46 | **MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara**<br> 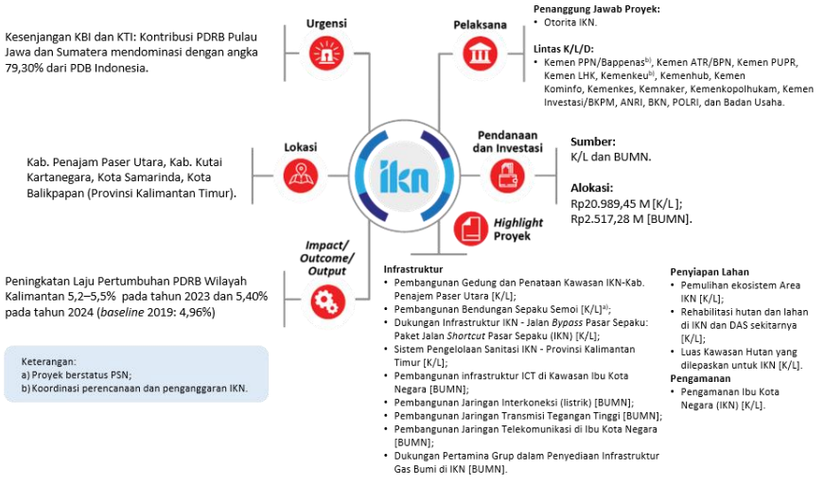 <br> |



SK No 168124 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 241 | Perubahan Infografis *Major Project* Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi dan Sorong dalam halaman IV.46 | **MP Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong**<br> 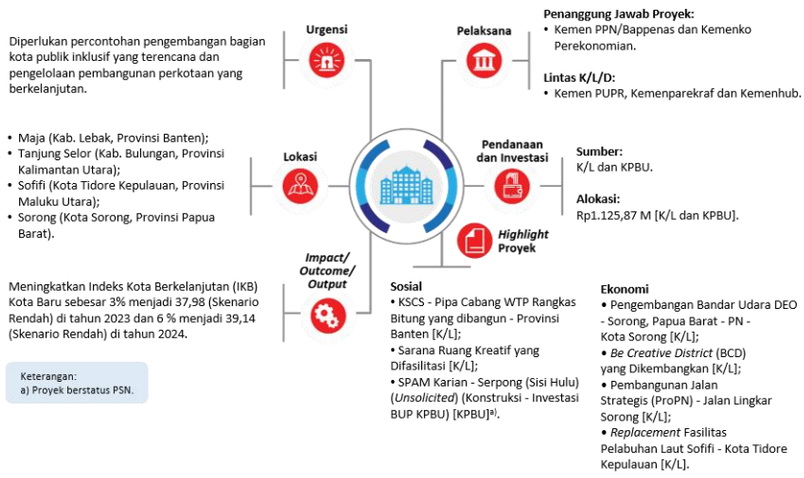 <br> |
| 242 | Perubahan Infografis *Major Project* Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay dalam halaman IV.47 | **MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay**<br> 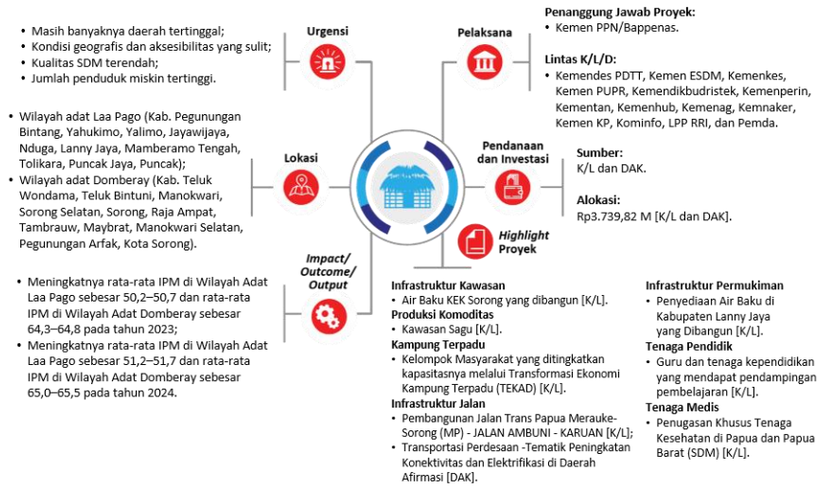 <br> |

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 243 | Perubahan Infografis *Major Project* Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda dalam halaman IV.47 | **MP Pemulihan Pascabencana:**<br>**Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda**<br> <br> |
| 244 | Perubahan Infografis *Major Project* PKSN Kawasan Perbatasan Negara dalam halaman IV.48 | **MP PKSN Kawasan Perbatasan Negara**<br> 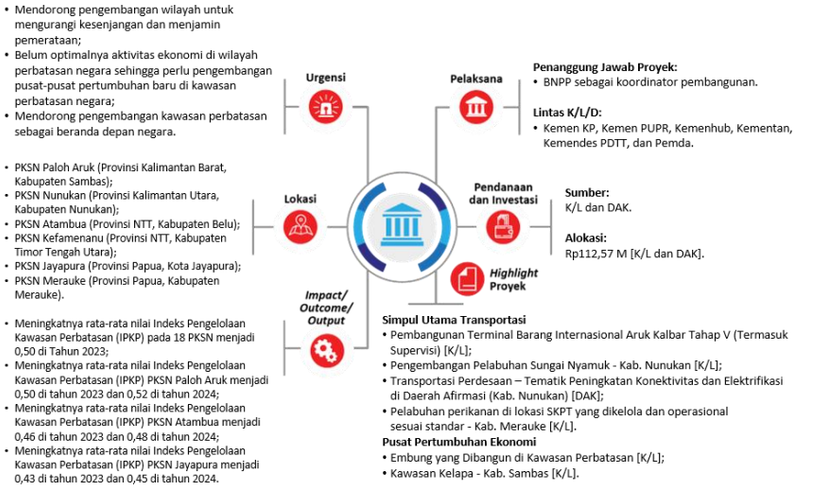 <br> |

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 245 | Perubahan Infografis *Major Project* Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria) dalam halaman IV.48 | |
| 246 | Perubahan alinea pertama dalam halaman IV.49 | Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan adalah:<br>(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan;<br>(2) Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Perubahan Undang-Undang No. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia;<br>(3) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;<br>(4) Revisi Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita);<br>(5) Revisi Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2014 tentang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya;<br>(6) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembagian Wilayah Ibu Kota Nusantara;<br>(7) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemindahan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional;<br>(8) Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Subak-Bali *Landscape*;<br>(9) Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Ekosistem Leuser;<br>(10) Revisi Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;<br>(11) Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Selatan;<br>(12) Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Utara;<br>(13) Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Simpang Samboja;<br>(14) Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Kuala Samboja; |



SK No 168127 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | (15) Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Muara Jawa. |
| 247 | Perubahan alinea keempat dalam halaman IV.51 | (2) Reformasi sistem perlindungan sosial, yang difokuskan pada penyempurnaan penyelenggaraan program bantuan dan jaminan sosial yang lebih akurat, terintegrasi, dan adaptif dengan strategi yang terdiri dari<br>(a) perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial akan difokuskan kepada sektor informal dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui mekanisme kolaboratif dan pemberian subsidi iuran (PBI) bagi pekerja miskin dan tidak mampu;<br>(b) perluasan akses pelayanan dan penguatan tata kelola kelembagaan antarpenyelenggara jaminan sosial dan pemangku kepentingan terkait;<br>(c) peningkatan keterlibatan aktif serta kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan pemutakhiran, perluasan, dan transformasi data penduduk miskin dan rentan menjadi registrasi sosial-ekonomi melalui monografi desa/kelurahan digital secara berkala untuk meningkatkan ketepatan sasaran program, termasuk dalam penghapusan kemiskinan ekstrem;<br>(d) penguatan integrasi dan digitalisasi penyaluran program bantuan sosial;<br>(e) pengembangan mekanisme graduasi terintegrasi program-program bantuan sosial;<br>(f) perluasan asesmen dan penjangkauan rehabilitasi sosial yang terintegrasi terhadap kelompok rentan, seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja sektor informal, korban bencana, penduduk terdampak pandemi COVID-19, korban perdagangan manusia, korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), penderita HIV/AIDS, dan kelompok rentan lainnya;<br>(g) pengembangan perlindungan sosial yang adaptif terhadap bencana, termasuk bencana pandemi;<br>(h) transformasi subsidi energi (LPG 3 kg dan listrik) menjadi bantuan sosial agar program lebih efektif, tepat sasaran, dan adaptif; dan<br>(i) integrasi dan peningkatan kesinambungan data, pemantauan dan evaluasi, serta pengembangan skema pembiayaan program perlindungan sosial yang berkesinambungan. |
| 248 | Perubahan alinea kelima dalam halaman IV.51 dan alinea pertama dalam halaman IV.52 | (3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan fokus pada<br>(a) peningkatan kesehatan ibu dan anak, KB dan kesehatan reproduksi, serta pelayanan kesehatan usia lanjut melalui penguatan sistem rujukan maternal, pendampingan ibu hamil dengan risiko tinggi, penguatan kapasitas pelayanan antenatal, neonatal, persalinan, pascapersalinan dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, revitalisasi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi melalui pengembangan akses ke poskesdes dan Pelayanan KB di RS (PKBRS), perluasan jangkauan di wilayah khusus dan sasaran khusus serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), pendampingan kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup untuk mengurangi risiko "4 terlalu" serta penggunaan KB pasca persalinan;<br>(b) percepatan penurunan *stunting* dan *wasting* melalui peningkatan kualitas dan cakupan intervensi spesifik antara lain perbaikan gizi remaja putri, ibu hamil, dan balita, pendampingan pemerintah |



SK No 168128 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | daerah dan keluarga melalui satgas *stunting* dan tim pendamping keluarga, peningkatan kualitas pelayanan posyandu, penyediaan data intervensi, serta penajaman sasaran intervensi sensitif dengan fokus pada daerah dengan jumlah dan prevalensi balita *stunting* tinggi;<br>(c) pengendalian penyakit melalui pencegahan dan penemuan kasus penyakit menular seperti TB, HIV/AIDS, kusta, malaria dan penyakit tropis terabaikan, skrining atau deteksi dini faktor risiko dan penyakit tidak menular dan pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, serta tata laksana kasus secara komprehensif;<br>(d) pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit melalui penguatan dan perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap, penambahan antigen baru, register imunisasi, peningkatan kapasitas laboratorium dalam deteksi dini dan respons KLB, serta pemenuhan sarana prasarana terutama rantai dingin dan tenaga imunisasi;<br>(e) pemantapan reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan ketahanan kesehatan, inovasi pendidikan tenaga kesehatan melalui peningkatan kuota mahasiswa dan academic health system untuk percepatan produksi tenaga kesehatan, serta inovasi pendayagunaannya melalui salah satunya beasiswa wajib penempatan, perluasan kuota ASN tenaga kesehatan dan redistribusi tenaga kesehatan, inovasi pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan berkualitas melalui penyediaan puskesmas di setiap kecamatan, pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama terutama di daerah sulit akses serta pengembangan RS Rujukan Nasional dan RS dengan layanan unggulan secara merata dan digitalisasi pelayanan kesehatan serta percepatan akreditasi dengan pelibatan pemerintah daerah, peningkatan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, serta penguatan pengawasan obat dan makanan; dan<br>(f) peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional. |
| 249 | Perubahan alinea keempat dalam halaman IV.53 dan alinea pertama dalam halaman IV.54 | (6) Mengentaskan kemiskinan. Penguatan akses penduduk miskin dan rentan terhadap aset produktif, pemberdayaan usaha, dan akses pembiayaan untuk mendukung akselerasi peningkatan ekonomi bagi penduduk miskin dan rentan, serta menghapus kemiskinan ekstrem, melalui<br>(a) peningkatan keperantaraan akses pasar bagi pelaku usaha miskin dan rentan melalui pendampingan inkubasi bisnis dan akses permodalan;<br>(b) peningkatan akses penduduk miskin dan rentan pada aset produktif, termasuk lahan, pendampingan pada reforma agraria dan perhutanan sosial;<br>(c) peningkatan dukungan yang inklusif bagi kelompok penduduk miskin dan rentan, termasuk anak, penyandang disabilitas, lansia, korban perdagangan manusia, korban penyalahgunaan NAPZA, penderita HIV/AIDS, korban bencana termasuk penduduk terdampak pandemi COVID-19 dan kelompok rentan lainnya untuk memperoleh akses pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan; dan<br>(d) pengurangan kemiskinan ekstrem secara khusus didorong melalui perencanaan dan pemberdayaan kolaboratif di tingkat desa/kelurahan melalui Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan dan Registrasi Sosial-Ekonomi. Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2022, pelaksanaan pendataan awal Regsosek dilakukan oleh BPS di |



SK No 168129 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | tahun 2022 di seluruh wilayah kabupaten/kota dan hasil pendataan akan disampaikan kepada Bappenas tahun 2023. |
| 250 | Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.54 | (7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing, melalui<br>(a) reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja melalui reorientasi dari *supply-driven* menjadi *demand-driven* (*link and match*) dengan strategi dan pendekatan yang komprehensif, terintegrasi, serta terkoordinasi sebagaimana diatur dalam Perpres No. 68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi agar kualitas lulusan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi memiliki tingkat produktivitas, keterampilan, dan daya saing yang tinggi dalam memasuki dunia kerja;<br>(b) pengembangan sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan berkelas dunia;<br>(c) peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui pengembangan prodi yang adaptif dan transformasi kurikulum dan pembelajaran yang berorientasi kompetensi dan mampu menjawab kebutuhan masa depan;<br>(d) penguatan pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi swasta dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi;<br>(e) penguatan kapabilitas riset dan inovasi melalui dukungan sarana dan prasarana strategis, peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM iptek (dosen, peneliti, dan perekayasa), serta penguatan ekosistem riset dan inovasi khususnya jaringan dengan industri di antaranya melalui kerja sama inovasi *Triple-Helix* di *Science Techno Park* (STP);<br>(f) pemfokusan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pencapaian target *flagship* Prioritas Riset Nasional 2020–2024 serta mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi; dan<br>(g) perbaikan pembinaan olahraga di antaranya melalui penguatan pembinaan atlet *elite* jangka panjang melalui penyelenggaraan *training centre*, mendorong penyusunan regulasi desain olahraga di daerah, penyelenggaraan *event* olahraga internasional, mendorong penataan dan pengembangan wadah serta peningkatan kualitas pembinaan atlet usia muda melalui satuan pendidikan di daerah serta memfokuskan pembinaan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan sesuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional. |



SK No 168130 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 251 | Perubahan Tabel 4.11 dalam halaman IV.55 | |

Tabel 4.11
Sasaran, Indikator, dan Target
PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

| No. | Sasaran/Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan | | | | | | |
| 1.1 | Angka Kelahiran Total *(Total Fertility Rate/ TFR)* (per wanita usia subur usia 15–49 tahun) | 2,28[1)] | 2,40[2)] | 2,24[3)] | 2,21 | 2,19 | 2,10 |
| 1.2 | Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%) | 95,17[4)] | 99,11[5)] | 99,21[5)] | 99,00 | 99,00 | 100,00 |
| 2 | Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk | | | | | | |
| 2.1 | Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial (%) | | | | | | |
| | 2.1.1 Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%) | 83,61[6)] | 82,07[6)] | 86,96[6)] | 87,00 | 91,00 | 98,00 |
| | 2.1.2 Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%) | 58,60[4)] | 65,10[4)] | 64,31[4)] | 75,00 | 78,00 | 80,00 |
| 3 | Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan | | | | | | |
| 3.1 | Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) | 305[1)] | 230[a)] | 217[b)] | 205 | 194 | 183 |
| 3.2 | Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup) | 24,00[2)] | 20,6[a)] | 19,50[b)] | 18,60 | 17,6 | 16,00 |
| 3.3 | Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | 27,67[7)] | 24,10[a)] | 24,37[7)] | 18,40 | 17,50 | 14 |
| 3.4 | Insidensi *tuberkulosis* (per 100.000 penduduk) | 312[8)] | 301[8)] | 354[8)] | 231 | 211 | 190 |
| 3.5 | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota) | 285[9)] | 320[9)] | 347[9)] | 365 | 385 | 405 |



SK No 168131 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 252 | Perubahan Tabel 4.11 dalam halaman IV.56 | |

| No. | Sasaran/Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3.6 | Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta (kabupaten/kota) | 368[9)] | 401[9)] | 415[9)] | 458 | 482 | 514 |
| 3.7 | Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%) | 21,80[10)] | 21,80[a)] | 21,80[b)] | 21,80 | 21,80 | 21,80 |
| 3.8 | Persentase merokok penduduk usia 10–18 tahun (%) | 9,10[10)] | 9,10[a)] | 9,00[b)] | 8,90 | 8,80 | 8,70 |
| 3.9 | Nilai rata-rata hasil PISA: | | | | | | |
| | 3.9.1 Membaca | 371[11)] | N/A[11)] | N/A[11)] | 394 | 394 | 396 |
| | 3.9.2 Matematika | 379[11)] | N/A[11)] | N/A[11)] | 385 | 385 | 388 |
| | 3.9.3 Sains | 396[11)] | N/A[11)] | N/A[11)] | 399 | 399 | 402 |
| 3.10 | Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun) | 8,75[4)] | 8,90[4)] | 8,97[4)] | 9,13 | 9,24 | 9,36 |
| 3.11 | Harapan lama sekolah (tahun) | 12,95[4)] | 12,98[4)] | 13,08[4)] | 13,57 | 13,22 | 13,30 |
| 4 | Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda | | | | | | |
| 4.1 | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | 62,72[12)] | 66,89[12)] | 66,10[12)] | 69,87 | 71,66 | 73,49 |
| 4.2 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 91,07[13)] | 91,06[13)] | 91,27[13)] | 91,11–91,35 | 91,17–91,44 | 91,24–91,54 |
| 4.3 | Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) | 52,67[14)] | 51,00[14)] | 53,33[14)] | 55,61 | 56,65 | 57,67 |
| 5 | Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan | | | | | | |
| 5.1 | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (%) | 30,40[4)] | 31,85[4)] | 35,83[4)] | 36,00 | 38,00 | 40,00 |
| 6 | Meningkatnya produktivitas dan daya saing | | | | | | |
| 6.1 | Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%) | 43,72[15)] | 44,35[15)] | 45,69[15)] | 46,87 | 48,00 | 49,75 |
| 6.2 | Jumlah PT yang masuk ke dalam *world class university* (PT): | | | | | | |



SK No 168132 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 253 | Perubahan Tabel 4.11 dalam halaman IV.57 | |

| No. | Sasaran/Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 6.2.1 Top 200 | 0[16)] | 0[16)] | 0[16)] | 0 | 0 | 1 |
| | 6.2.2 Top 300 | 1[16)] | 1[16)] | 1 [16)] | 1 | 1 | 2 |
| | 6.2.3 Top 500 | 2[16)] | 2 [16)] | 2 [16)] | 2 | 2 | 3 |
| 6.3 | Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%) | 40,60[15)] | 40,02[15)] | 40,39[15)] | 41,92 | 43,00 | 43,10 |
| 6.4 | Peringkat *Global Innovation Index* | 85[17)] | 85[17)] | 87[17)] | 80–85 | 75–80 | 75–80 |

Sumber: 1) Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), 2015; 2) Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017; 3) Pendataan Keluarga (PK), 2021; 4) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2019, 2020, 2021; 5) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), 2020; 6) Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2019, 2020; 7) Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), 2019 & 2021; 8) *Global Tuberculosis Report*, 2020-2022; 9) Kemenkes, 2018, 2019, 2020, TW IV 2021; 10) Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2018; 11) *Programme for International Student Assessment* (PISA), 2018 dilaksanakan setiap 3 tahun sekali (2015, 2018, dan pelaksanaan tahun 2021 diundur ke tahun 2022); 12) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 2019, 2020, 2021; 13) BPS, 2019, 2020, 2021; 14) Diolah dari Susenas KOR dan Sakernas, 2021 serta Susenas MSBP, 2021; 15) Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2019, 2020, 2021; 16) QS *World University Rankings*, 2019–2021; 17) INSEAD-WIPO *Global Innovation Index Report*, 2019-2021.

Keterangan: a) Merupakan angka target 2020 dalam Perpres Pemutakhiran RKP 2021; b) Merupakan angka target 2021 dalam Perpres Pemutakhiran RKP 2022.



SK No 168133 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 254 | Perubahan Tabel 4.12 dalam halaman IV.61 | |

| No. | Sasaran/Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3.14 | Persentase rumah sakit terakreditasi (%) | 70[12)] | 88,00[12)] | 88,40[12)] | 95 | 95 | 100 |
| 3.15 | Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%) | 23[12)] | 39,60[12)] | 48,86[12)] | 65 | 71 | 83 |
| 3.16 | Persentase RSUD kab/kota memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya (%) | 61,70[12)] | 69,77[2)] | 75,31[12)] | 80 | 85 | 90 |
| 3.17 | Persentase obat memenuhi syarat (%) | 78,60[13)] | 90,60[13)] | 95,21[13)] | 92,25 | 96 | 97 |
| 3.18 | Persentase makanan memenuhi syarat (%) | 76[13)] | 79,68[13)] | 85,59[13)] | 83 | 86 | 88 |
| PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas | | | | | | | |
| Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas | | | | | | | |
| 4.1 | Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya (rasio) | | | | | | |
| 4.1.1 | SMA/SMK/MA Sederajat | 0,77[3)] | 0,77[3)] | 0,76 | 0,81 | 0,82 | 0,83 |
| 4.1.2 | Pendidikan Tinggi | 0,18[3)] | 0,28[3)] | 0,29[3)] | 0,30 | 0,31 | 0,32 |
| 4.2 | Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%) | | | | | | |
| 4.2.1 | Membaca | 30,10[14)] | N/A[14)] | N/A[14)] | 33,00 | 33,00 | 34,10 |
| 4.2.2 | Matematika | 28,10[14)] | N/A[14)] | N/A[14)] | 30,00 | 30,00 | 30,90 |
| 4.2.3 | Sains | 40,00[14)] | N/A[14)] | N/A[14)] | 42,60 | 42,60 | 44,00 |
| 4.3 | Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi (%) | | | | | | |
| 4.3.1 | Literasi | 53,20[15)] | 53,20[15)] | 52,54[23)] | 55,43 | 58,31 | 61,20 |
| 4.3.2 | Numerasi | 22,90[15)] | 22,90[15)] | 32,29[23)] | 35,67 | 39,41 | 43,54 |



SK No 168134 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 255 | Perubahan Tabel 4.12 dalam halaman IV.62 | |

| No. | Sasaran/Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.4 | Tingkat penyelesaian pendidikan (%) | | | | | | |
| | 4.4.1 SD/MI/sederajat | 95,48[16)] | 96,00[16)] | 97,37 | 97,93 | 98,41 | 98,94 |
| | 4.4.2 SMP/MTs/sederajat | 85,23[16)] | 87,89[16)] | 88,88 | 90,54 | 91,08 | 93,33 |
| | 4.4.3 SMA/SMK/MA/ sederajat | 58,33[16)] | 63,95[16)] | 65,94 | 69,08 | 69,68 | 71,71 |
| 4.5 | Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (%) | 63,30[3)] | 62,48[3)] | 61,93 | 62,74 | 63,55 | 64,38 |
| 4.6 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT) (%) | 30,28[3)] | 30,85[3)] | 31,19[1)] | 31,52 | 31,89 | 32,28 |
| PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda | | | | | | | |
| Menguatnya perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, berwirausaha, dan pencegahan perilaku berisiko | | | | | | | |
| 5.1 | Persentase perempuan umur 20–24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%) | 10,82[3)] | 10,35[3)] | 9,23[3)] | 9,44 | 9,08 | 8,74 |
| 5.2 | Prevalensi anak usia 13–17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) | Laki-laki 61,70<br>Perem-puan 62,00[17)] | Menu-run[d)] | Laki-laki 34,00<br>Perem-puan 41,05[f)] | menu-run | menu-run | menu-run |
| 5.3 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 75,24[18)] | 75,57[18)] | 76,26[18)] | 75,57–76,73 | 75,60–77,18 | 79,16–81,21 |
| 5.4 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%) | 51,89[19)] | 53,13[19)] | 53,34[19)] | 53,76 | 54,38 | 55,00 |
| 5.5 | Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15–64 tahun di 12 bulan terakhir (%) | 9,40[20)] | menu-run[d)] | 8,70[20)] | menu-run | menu-run | menu-run |
| 5.6 | Persentase pemuda (16–30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir (%) | 81,36[21)] | 81,36[g)] | 70,49[21)] | mening-kat | mening-kat | 82,58[b)] |



SK No 168135 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 256 | Perubahan Tabel 4.12 dalam halaman IV.63 | |

| No. | Sasaran/Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5.7 | Persentase pemuda berumur 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir (%) | 6,36[21)] | 6,36[g)] | 4,84[21)] | mening-kat | mening-kat | 6,72 |
| 5.8 | Persentase pemuda (16–30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan *white collar* (%) | 0,47[19)] | 0,44[19)] | 0,41[19)] | 0,45 | 0,50 | 0,55 |
| 5.9 | Proporsi pemuda usia 16–30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16–30 tahun (%) | 8,78[3)] | 8,58 | 10,23 | N/A* | 7,05 | 6,87 |
| PP 6. Pengentasan Kemiskinan | | | | | | | |
| Memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan | | | | | | | |
| 6.1 | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha (%) | 23[3)] | 21,60[3)] | 20,55[3)] | 40 | 45 | 50 |
| 6.2 | Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses kepemilikan tanah (rumah tangga) | 668.040[22)] | 290.902 | 444.147 | 419.935 | 261.136 | 201.890 |
| PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing | | | | | | | |
| Meningkatnya produktivitas dan daya saing | | | | | | | |
| 7.1 | Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang) | 0,78[24a)] | 5,94[24b)] | 6,45[24c)] | 3,30[24d)] | 2,60 | 2,80 |
| 7.2 | Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (%) | 42,76[19)] | 40,46[19)] | 34,34[19)] | 35,30 | 36,29 | 37,31 |
| 7.3 | Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan (%) | 44,02[19)] | 58,21[19)] | 58,39[19)] | 59,71 | 60,71 | 61,71 |
| 7.4 | Jumlah prototipe dari perguruan tinggi (prototipe) | 94[25)] | 22 | 13 | 219 | 231 | 243 |
| 7.5 | Jumlah produk inovasi dari *tenant* Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina (produk) | 143[25)] | 158[25)] | 139[26)] | 400 | 550 | 600 |



SK No 168137 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|

257 Perubahan Tabel 4.12 dalam halaman IV.65

| No. | Sasaran/Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 7.15 | Peringkat pada Asian Games | 4[35] | N/A[36] | N/A[36] | N/A[36] | 12 | N/A[36] |
| 7.16 | Peringkat pada Asian Para Games | 5[37] | N/A[36] | N/A[36] | N/A[36] | 8 | N/A[36] |

Sumber: 1) Kemensos, 2019, 2020, 2021; 2) Kementerian PPN/Bappenas, 2019, 2020, 2021; 3) Susenas, 2019, 2020, 2021, 2022; 4) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kemendagri, 2020; 5) Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), 2019, 2020, 2021; 6) BPJS Ketenagakerjaan, 2019, 2020; 7) SDKI, 2017; 8) Perhitungan BKKBN, 2020; 9) Pendataan Keluarga (PK), 2021; 10) Riskesdas, 2018; 11) Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), 2021; 12) Kemenkes, 2018, 2019, 2020, TW IV 2021; 13) BPOM, 2019-2021; 14) *Programme for International Student Assessment* (PISA), 2018 dilaksanakan setiap 3 tahun sekali (2015, 2018, dan pelaksanaan tahun 2021 diundur ke tahun 2022); 15) Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), 2016; 16) Susenas 2019 dan 2020 berdasarkan metode perhitungan UNESCO *Institute for Statistics*; 17) Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR), 2018 (*baseline*) dan 2021; 18) BPS, 2019, 2020, 2021; 19) Sakernas, 2019, 2020, 2021; 20) Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN), 2016 (*baseline*) dan 2021; 21) Susenas, Modul Sosial Budaya dan Pendidikan, 2018, 2021; 22) Kementerian ATR/BPN, 2019; 23) Asesmen Nasional 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 24a) Tanpa Kartu Prakerja; 24b) Realisasi pelaksanaan pelatihan vokasi pada 13 Kementerian/Lembaga (430.870 orang) dan Kartu Prakerja (5,5 juta orang); 24c) Realisasi pelaksanaan pelatihan vokasi pada 11 Kementerian/Lembaga (515.442 orang) dan Kartu Prakerja (5,93 juta orang); 24d) Revisi target dengan rincian 2,7 juta penerima Kartu Prakerja skema "semi-bantuan sosial", 100 ribu penerima Kartu Prakerja skema peningkatan keahlian, dan 500 ribu dilaksanakan Kementerian/Lembaga; 25) Kemenristekdikti/BRIN, 2017–2018; 26) BRIN, 2022; 27) KemenkumHAM, 2018; 28) Ditjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM; 29) Kemenristekdikti, LIPI, BPPT, 2018; 30) Kemendikbudristek dan BRIN, 2022; 31) KNAPP, 2018; 32) Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas; 33) Kemenristekdikti dan LPNK IPTEK, 2019; 34) LPNK IPTEK, 2020; 35) Asian Games, 2018; 36) Tidak dipertandingkan pada tahun dimaksud; 37) Asian Para Games, 2018.

Keterangan: a) pemutakhiran (data realisasi); b) pemutakhiran target; c) pemutakhiran metode perhitungan dengan data pembilang jumlah peserta pekerja formal dan informal di BPJS Ketenagakerjaan dan data penyebut jumlah penduduk bekerja semesta berdasarkan segmentasi PPU, PBPU, dan Jasa Konstruksi; d) merupakan target 2020 dalam Perpres Pemutakhiran RKP 2021; e) merupakan target 2021 dalam Perpres Pemutakhiran RKP 2022; f) SNPHAR 2021; g) *baseline* sesuai Susenas MSBP, 2018 (data tersedia tiga tahunan); N/A* Indikator bukan merupakan indikator program prioritas pada RKP Tahun 2022; N/A** Data tidak tersedia karena indikator baru diaplikasikan dalam RPJMN 2020-2024 di tahun 2020.

258 Perubahan Infografis *Major Project* Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting* dalam halaman IV.66

**MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting***

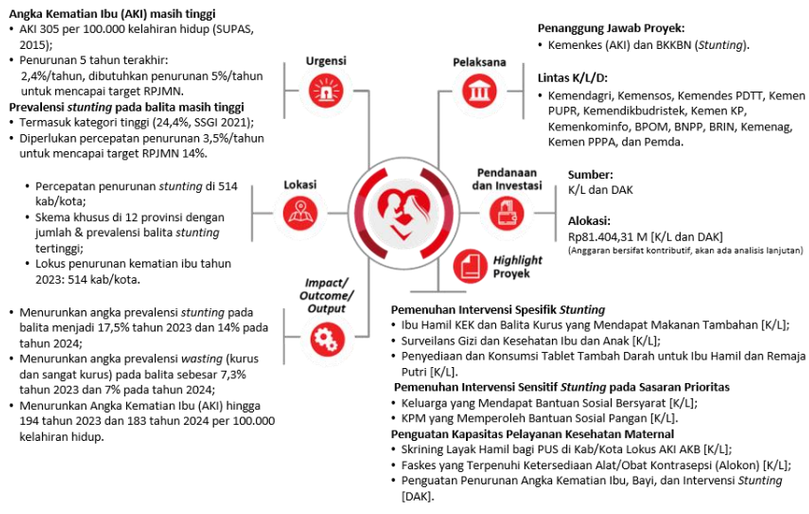




SK No 168138 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 259 | Perubahan Infografis *Major Project* Pembangunan *Science Technopark* (Optimalisasi *Triple Helix* di 4 *Major* Universitas) dalam halaman IV.66 | 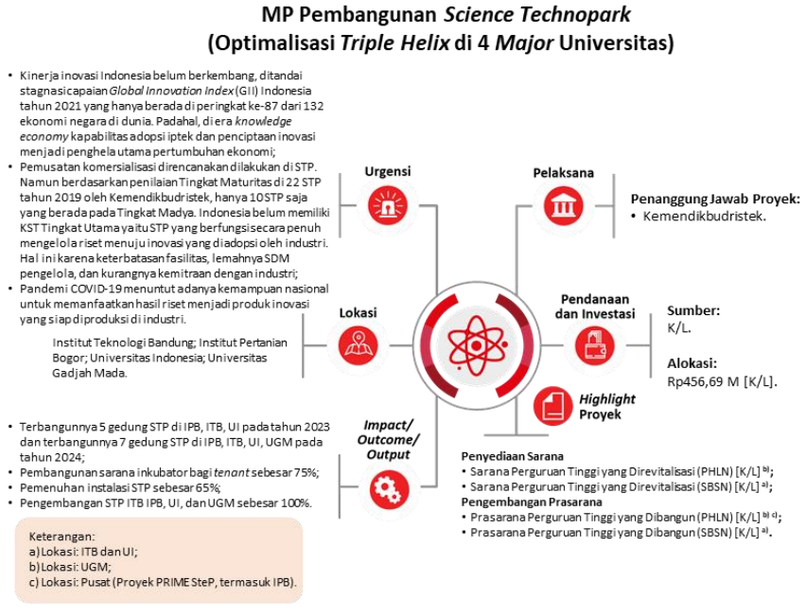 |
| 260 | Perubahan Infografis *Major Project* Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 dalam halaman IV.67 | 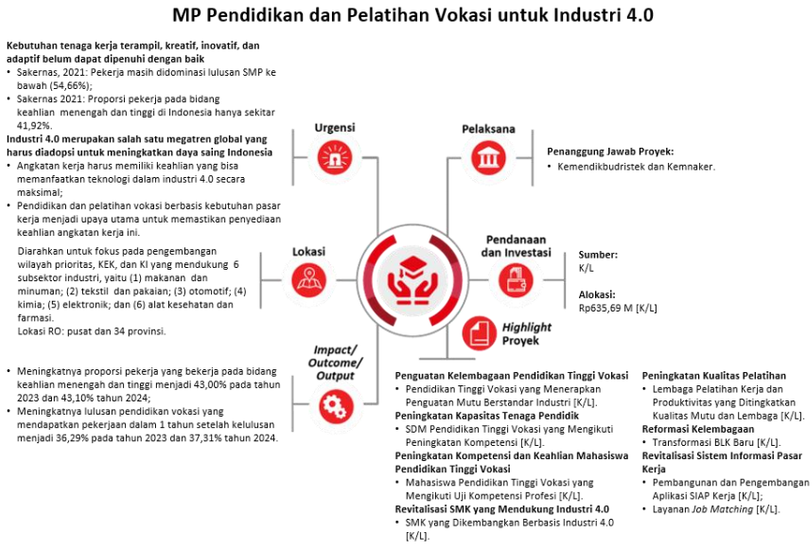 |

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 261 | Perubahan Infografis *Major Project* Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dalam halaman IV.67 | 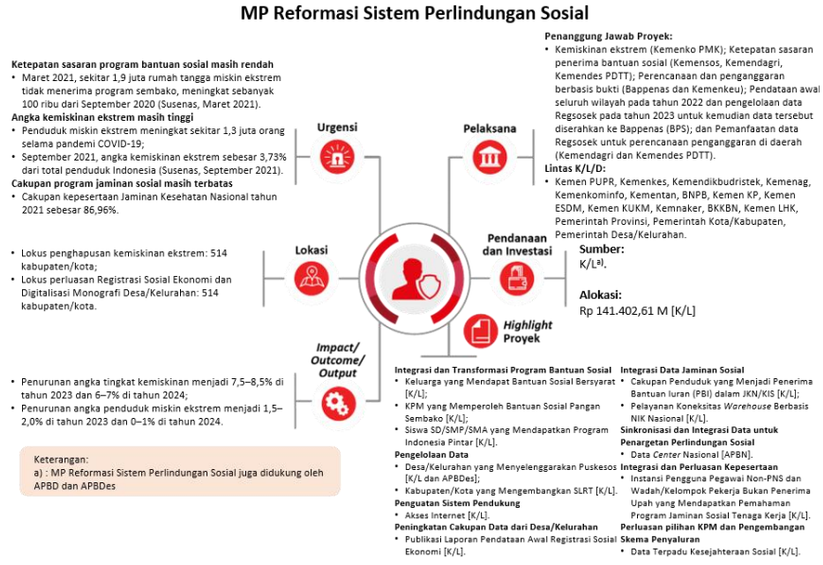 |
| 262 | Perubahan Infografis *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional dalam halaman IV.68 | 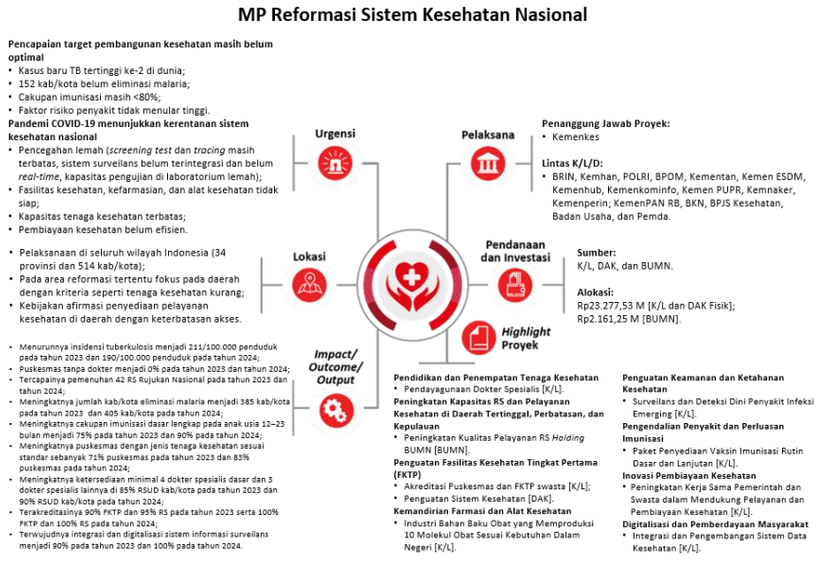 |
| 263 | Perubahan alinea pertama dalam halaman IV.68 | Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.<br>(1) Pembentukan Gugus Tugas Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek);<br>(2) Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKNV); dan<br>(3) Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV). |

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 264 | Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.68 | Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.<br>(1) Rancangan Peraturan Menteri PPN tentang Pembentukan Gugus Tugas Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek); dan<br>(2) Rancangan PP tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. |
| 265 | Perubahan alinea pertama dalam halaman IV.69 | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan pada RKP Tahun 2023 difokuskan pada penguatan modal sosial dan budaya dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Modal sosial dan budaya mampu membangun relasi sosial yang harmonis, serta memperkuat solidaritas dan daya rekat masyarakat untuk saling tolong-menolong, kerja sama, gotong royong, dan kolaborasi antarwarga dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Pada masa pandemi, ketahanan sosial budaya masyarakat Indonesia mengalami peningkatan. Berdasarkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), Dimensi Ketahanan Sosial Budaya meningkat dari 73,55 pada tahun 2019 menjadi 74,01 pada tahun 2020. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kemampuan yang baik dalam mengembangkan dan memanfaatkan nilai, pengetahuan, dan praktik budaya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Apabila dilihat dari kondisi keluarga Indonesia, saat ini berada pada kategori keluarga berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga) yang berada pada rentang 40-70, tepatnya pada tahun 2021 sebesar 54,01 atau meningkat dibanding tahun 2020 yang capaiannya sebesar 53,94. Indeks Pembangunan Keluarga merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga, serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. |
| 266 | Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.69 | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan pada tahun 2023 masih menghadapi sejumlah tantangan. Dalam upaya penguatan gerakan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, menghadapi tantangan antara lain (1) belum optimalnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) penyelenggaraan tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan *responsive* belum optimal; (3) proses internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental melalui pendidikan agama dan pendidikan karakter kurang optimal; (4) belum optimalnya peran keluarga dalam pengasuhan berbasis hak anak, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pendewasaan usia perkawinan untuk mencegah perkawinan anak, layanan konseling keluarga, serta penguatan perawatan jangka panjang bagi lansia untuk memperkuat sistem sosial keluarga dan masyarakat; (5) masih terbatasnya pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di K/L, dan kabupaten/kota serta pelaksanaan lima program GNRM di tingkat daerah; serta (6) kurangnya daya tarik koperasi sebagai pondasi ekonomi kerakyatan yang belum adaptif dengan perkembangan zaman, sehingga diperlukan modernisasi koperasi untuk meningkatkan citra koperasi sebagai lembaga ekonomi yang dikelola secara profesional dalam mewujudkan kemandirian ekonomi. |



SK No 168141 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 267 | Perubahan alinea ketiga dalam halaman IV.70 | Untuk itu, pada tahun 2023 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan diarahkan sebagai berikut<br>(1) Memperkuat pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila melalui<br>(a) penguatan pendidikan karakter yang mendorong tumbuhnya nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti, serta jiwa nasionalisme dan patriotisme peserta didik dengan upaya (i) perluasan pengajaran dan pembelajaran dengan penguatan pendidikan karakter, dan peningkatan pemahaman terkait cinta lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan; (ii) peningkatan kualitas pendidikan agama, pendidikan moral, dan budi pekerti; serta (iii) pengembangan integrasi nilai-nilai karakter unggul dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di satuan pendidikan;<br>(b) penguatan pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;<br>(c) peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya melalui penerapan penguatan budaya kerja ASN;<br>(d) penerapan disiplin, *reward,* dan *punishment* dalam birokrasi melalui upaya penegakan disiplin dan penerapan kebijakan manajemen penghargaan ASN berbasis kinerja;<br>(e) peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pembentukan karakter melalui (i) Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pembangunan keluarga; (ii) pengasuhan berbasis hak anak dan perlindungan anak dari tindak kekerasan; (iii) peningkatan kualitas remaja, promosi pendewasaan usia perkawinan, dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, serta edukasi kepada keluarga yang memiliki remaja, termasuk remaja dengan kebutuhan khusus; (iv) penyediaan layanan konseling keluarga; dan (v) peningkatan kapasitas keluarga lansia dalam pendampingan pelayanan ramah lansia sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga;<br>(f) penguatan peran gugus tugas serta pusat-pusat perubahan revolusi mental di K/L dan daerah untuk menginternalisasikan nilai esensial revolusi mental beserta kelima program GNRM di masyarakat dan memperkuat jejaring pelaksanaan GNRM dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai esensial revolusi mental; serta<br>(g) penguatan gerakan ekonomi kerakyatan melalui perluasan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Gerakan Bangga Buatan Indonesia, serta modernisasi koperasi yang meliputi (i) penguatan kelembagaan koperasi; (ii) pengadopsian teknologi; (iii) peningkatan kapasitas SDM perkoperasian melalui pendidikan dan pelatihan; (iv) fasilitasi akses pembiayaan, kemitraan dan pemasaran; serta (v) penciptaan wirausaha baru yang inovatif dan berdaya saing. |
| 268 | Perubahan poin (2) alinea keempat dalam halaman IV.70 dan alinea pertama dalam halaman IV.71 | (2) Memperkuat pemajuan kebudayaan untuk mengembangkan nilai luhur budaya bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui (a) pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan warisan budaya tak benda dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis kebudayaan; (b) pengembangan ekosistem budaya rempah dari hulu ke hilir untuk memperkuat diplomasi dan meneguhkan Indonesia sebagai poros maritim dunia; (c) pengembangan sarana prasarana kebudayaan, meliputi revitalisasi museum, taman budaya, sanggar, dan kelompok seni budaya, serta pemanfaatan gedung pemerintah yang tidak terpakai |



SK No 168142 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | sebagai pusat kegiatan seni budaya; (d) pengembangan manajemen talenta nasional seni budaya; (e) penguatan peran pemerintah daerah dalam pengembangan ekosistem seni dan budaya lokal, termasuk fasilitasi pelaku seni budaya di daerah; (f) pengembangan media baru berbasis Teknologi Informasi (TI) untuk memperluas wahana ekspresi budaya, termasuk penyediaan platform pendukung proses berkarya bagi para seniman, pelaku budaya, dan pekerja kreatif; dan (g) penataan dan digitalisasi arsip persiapan pemindahan IKN di K/L untuk menjaga kelestarian arsip dan dapat menjadi sumber pembelajaran di masa depan. |
| 269 | Perubahan tabel 4.13 dalam halaman IV.72 | |

| No. | Sasaran/Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Target 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan | | | | | | |
| 2.1 | Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai) | 55,91 | 54,65 | 51,90 | 59,71 | 61,20 | 62,70 |
| 3 | Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial | | | | | | |
| 3.1 | Indeks Pembangunan Masyarakat (nilai) | 0,61 (2018) | 0,62[a)] | 0,63[a)] | 0,64 | 0,65 | 0,65 |
| 4 | Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat | | | | | | |
| 4.1 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai) | 73,83 | 67,46 | 72,39 | 74,70 | 75,00 | 75,80 |
| 5 | Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa | | | | | | |
| 5.1 | Indeks Pembangunan Keluarga (nilai) | 53,57 (2018) | 53,94 | 54,01 | 57,00 | 59,00 | 61,00 |
| 5.2 | Median Usia Kawin Pertama Perempuan (tahun) | 21,80 (2017) | 20,70 | 20,70 | 22,00 | 22,10 | 22,10 |
| 6 | Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif | | | | | | |
| 6.1 | Nilai Budaya Literasi (nilai) | 59,11 | 61,63 | 54,29 | 65,70 | 68,37 | 71,04 |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko PMK, Kemendikbudristek, Kemenag, BKKBN, BPS, BPIP, 2019–2022.

Keterangan: a) Berdasarkan angka proyeksi.



SK No 168143 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|

270 Perubahan tabel 4.14 dalam halaman IV.74

| No. | Sasaran/Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Target 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter | | | | | | | |
| 1.11 | Indeks Kerentanan Keluarga (nilai) | 12,29 | 11,92 | 10,95 | 11,00 | 10,50 | 10,00 |
| 1.12 | Indeks Karakter Remaja (nilai) | N/A | 79,60 | 72,97 | 68,92 | 69,42 | 69,92 |
| PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia | | | | | | | |
| Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan | | | | | | | |
| 2.1 | Nilai Dimensi Warisan Budaya (nilai) | 43,89 | 41,00 | 46,63 | 52,11 | 54,85 | 57,60 |
| 2.2 | Nilai Dimensi Ekspresi Budaya (nilai) | 37,14 | 35,82 | 27,13 | 38,19 | 38,60 | 39,01 |
| 2.3 | Nilai Dimensi Ekonomi Budaya (nilai) | 33,79 | 26,96 | 20,69 | 43,52 | 46,76 | 50,00 |
| PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial | | | | | | | |
| Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, inklusif, dan moderat di kalangan umat beragama | | | | | | | |
| 3.1 | Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji (nilai) | 85,91 | N/A[b)] | N/A[b)] | 85,97 | 85,99 | 86,00 |
| 3.2 | Indeks Kepuasan Layanan KUA (nilai) | 77,28 | 78,00[c)] | 78,90 | 82,00 | 83,00 | 84,00 |
| 3.3 | Nilai Dimensi Toleransi (nilai) | 72,37 | 64,15 | 68,72 | 72,29 | 72,59 | 73,39 |
| 3.4 | Nilai Dimensi Kesetaraan (nilai) | 73,72 | 69,54 | 75,03 | 76,23 | 76,53 | 77,33 |
| 3.5 | Nilai Dimensi Kerja Sama (nilai) | 75,40 | 68,68 | 73,41 | 75,86 | 76,16 | 76,96 |
| PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter | | | | | | | |
| Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif | | | | | | | |
| 4.1 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (nilai) | 10,12 | 12,93 | 13,54 | 13,00 | 15,00 | 15,00 |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko PMK, Kemendikbudristek, Kemenag, Perpusnas, BKKBN, BPS, BPIP, 2019-2022.

Keterangan: a) Berdasarkan angka proyeksi, b) Tahun 2020 dan 2021, Ibadah Haji tidak dilaksanakan akibat pandemi COVID-19, dan c) Survei hanya dilakukan di Pulau Jawa akibat pandemi COVID-19.

271 Penghapusan subbab 4.1.4.5 dalam halaman IV.75

(dihapus)

272 Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.77

Selain itu, dalam upaya penyelenggaraan keselamatan transportasi, tantangan yang dihadapi pada moda jalan adalah terbatasnya ketersediaan data terpadu sebagai basis perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), tingginya rasio fatalitas kecelakaan di jalan raya, serta kejadian kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas khususnya *Over Dimension Over Load* (ODOL), masih banyaknya daerah rawan kecelakaan (*blackspot*) yang belum tertangani secara baik, terpadu, dan komprehensif, serta lambatnya penanganan bagi korban kecelakaan. Pada moda transportasi perkeretaapian masih terdapat isu terbatasnya kemampuan penanganan kebutuhan pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian prasarana maupun keselamatan perjalanan perkeretaapian. Pada moda



SK No 168144 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | transportasi laut dan penyeberangan, masih kerap terjadi kecelakaan kapal pada jalur utama maupun *feeder* pelayaran akibat keterbatasan spesifikasi kapal, sarana navigasi, fasilitas keselamatan pelayaran, dan rendahnya kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kelaikan pelayaran. Demikian pula dengan moda transportasi udara yang masih terkendala dalam keterbatasan sistem navigasi. Penyelenggaraan pencarian dan pertolongan pada peristiwa kecelakaan dan bencana dihadapkan pada kendala terbatasnya jumlah dan kualitas sarana, prasarana dan SDM pencarian dan pertolongan. |
| 273 | Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.79 | Arah kebijakan untuk penyelenggaraan keselamatan dan keamanan transportasi serta pencarian dan pertolongan, yaitu (1) Mendorong pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) No. 1/2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ), yang di dalamnya termasuk penetapan Rencana Aksi Keselamatan (RAK) LLAJ oleh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah, pelaksanaan integrasi data dan sistem informasi Keselamatan LLAJ, penanganan daerah rawan kecelakaan (*blackspot*) secara terpadu melalui penanganan infrastruktur jalan dan penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan, serta penetapan waktu respons penanganan kegawatdaruratan sejak terjadinya kecelakaan; (2) Meningkatkan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi antara lain pemenuhan kebutuhan *Infrastructure Maintenance and Operation* (IMO) prasarana perkeretaapian, penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran, penyediaan dan modernisasi sistem monitoring fasilitas *Surveillance* dan navigasi penerbangan terintegrasi; serta (3) meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM serta pemenuhan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana di bidang pencarian dan pertolongan. |
| 274 | Perubahan alinea ketiga dalam halaman IV.79 | Arah kebijakan pembangunan konektivitas dalam mendukung produktivitas untuk transformasi ekonomi antara lain (1) melanjutkan pembangunan jalan tol, jalan baru dan pembangunan jalur kereta api ganda maupun jalur baru pada koridor utama angkutan penumpang dan logistik, termasuk kereta api cepat untuk penumpang antar kota-kota besar di Pulau Jawa, serta pembangunan akses jalan dan kereta api ke simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal) dengan memperhatikan aspek kemanfaatan; (2) menyediakan konektivitas multimoda mendukung kawasan prioritas (*food estate*, industri dan pariwisata); (3) melakukan standardisasi pelabuhan utama meliputi infrastruktur, fasilitas dan kinerja pelabuhan utama simpul angkutan domestik, integrasi pelabuhan dan kawasan industri serta reformasi tarif jasa pelabuhan; (4) melanjutkan pembangunan bandara baru, peningkatan kapasitas bandara primer dan jaringan *hub and spoke* penerbangan, serta pembangunan bandara perairan (*waterbase airport*) untuk mendukung destinasi pariwisata kepulauan; (5) melaksanakan pembangunan pelabuhan penyeberangan baru maupun lanjutan serta peningkatan kapasitas pelabuhan penyeberangan; (6) menyediakan infrastruktur dan layanan transportasi layanan transportasi di wilayah 3T, termasuk keperintisan meliputi darat, kereta api, laut, dan udara, serta program tol laut bersubsidi dan jembatan udara; (7) meningkatkan infrastruktur konektivitas milik daerah dalam mendukung prioritas nasional, melalui optimalisasi peran APBD, pemanfaatan skema DAK dan program hibah untuk penanganan jalan daerah, rehabilitasi prasarana pelabuhan yang melayani angkutan penumpang dan barang; serta (8) melakukan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun dan sinkronisasi antar infrastruktur lainnya. |



SK No 168145 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 275 | Perubahan alinea keempat dalam halaman IV.79 dan alinea pertama dalam halaman IV.80 | Arah kebijakan pembangunan infrastruktur perkotaan difokuskan pada pengembangan sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan, terutama dalam penataan beberapa aspek yang selaras dengan prinsip pembangunan mobilitas perkotaan, yaitu (1) dalam aspek kelembagaan, pemerintah daerah di suatu wilayah metropolitan didorong untuk mengembangkan kelembagaan pengelola transportasi perkotaan yang memiliki kewenangan perencanaan, pengelolaan, dan pengoperasian angkutan umum lintas wilayah administrasi; (2) dalam aspek perencanaan, pemerintah daerah di wilayah metropolitan didorong agar menyusun Rencana Mobilitas Perkotaan (RMP) terpadu sebagai dasar pembangunan angkutan massal perkotaan yang berbasis wilayah fungsional dengan berfokus pada aksesibilitas pusat kegiatan sosial dan ekonomi; (3) dalam aspek pendanaan, dikembangkan skema pendanaan pembangunan sistem angkutan umum massal perkotaan yang memastikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, mengoptimalkan partisipasi badan usaha, serta memberikan ruang bagi dukungan pendanaan pemerintah pusat dengan tetap menjamin kepemilikan (*ownership*) serta keberlanjutan pengelolaan dan pengoperasian oleh pemerintah daerah; (4) mengembangkan angkutan komuter meliputi *Mass Rapid Transit* (MRT), *Light Rapid Transit* (LRT), Kereta Rel Listrik (KRL), dan layanan *Bus Rapid Transit* (BRT) di wilayah perkotaan; (5) melaksanakan program dukungan penyelenggaraan angkutan umum massal melalui skema *Buy the Service* (BTS) dan *Public Service Obligation* (PSO); serta (6) mendorong penguatan infrastruktur TIK dengan teknologi terbaru dan mekanisme pemakaian bersama infrastruktur pasif dalam mendukung pengembangan kota cerdas (*smart city*). |
| 276 | Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.80 | Arah kebijakan pembangunan energi dan ketenagalistrikan dalam mendukung transisi energi untuk menuju sistem energi rendah karbon mencakup (1) mengembangkan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan termasuk pemanfaatan energi terbarukan dan pengembangan konservasi energi untuk mencapai akses universal dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau; (2) menyediakan subsidi, stimulus tarif listrik, dan bantuan penyediaan akses listrik untuk meringankan beban kelompok masyarakat tidak mampu dan/atau berada di daerah 3T, serta mengembangkan kebijakan tarif yang berkelanjutan; (3) memperluas pemanfaatan tenaga listrik (*electrification*) untuk sektor transportasi (*e-vehicle* dan *charging station*), rumah tangga, dan industri; (4) mendorong implementasi kebijakan harga beli listrik dari energi terbarukan dan mengoptimalkan insentif fiskal dan non fiskal yang ada termasuk dana transfer daerah dan penerapan perdagangan karbon (*carbon trade*); (5) melakukan percepatan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi seperti ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi serta pengembangan dan pembangunan kilang minyak; (6) optimalisasi pemerataan akses BBM dan gas bumi melalui pelaksanaan BBM satu harga; dan (7) mengintegrasikan pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di antara para pelaku (pemerintah pusat, daerah, serta badan usaha) maupun antar sektor (seperti industri dan teknologi), termasuk melalui dana transfer daerah. |



SK No 168146 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 277 | Perubahan Tabel 4.15 dalam halaman IV.81 | |

Tabel 4.15
Sasaran, Indikator, dan Target
PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

| No. | Sasaran/Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar | | | | | | |
| 1.1 | Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%) | 56,51 | 59,54 | 60,90 | 65,10 | 67,88 | 70[1)] |
| 1.2 | Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%) | 53 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 |
| 1.3 | Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif, %) | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,50 | 0,80 |
| 1.4 | Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif, %) | 64,52 | 65,34 | 66,81 | 67,67 | 68,50 | 69,50 |
| 2 | Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar | | | | | | |
| 2.1 | Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 km) | 2,30 | 2,16 | 2,22 | 2,09 | 2,08 | 1,90 |
| 2.2 | Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*) (%) | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| 2.3 | Kondisi jalur KA sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2 (%) | 81,50 | 82,83 | 90,36 | 91 | 91,16 | 94 |
| 2.4 | Persentase capaian *On Time Performance* (OTP) transportasi udara (%) | 85,73 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 3 | Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan | | | | | | |
| 3.1 | Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) | 1 | 6 (berlan-jut) | 6 (berlan-jut) | 6 (berlan-jut) | 6 (berlan-jut) | 6 |
| 3.2 | Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan (%) | 61,09 | 64,64 | 64,64 | 68,20 | 70,77 | 73 |



SK No 168147 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 278 | Perubahan Tabel 4.16 dalam halaman IV.84 | |

| No. | Sasaran/ Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.10 | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%) | 77,4 layak termasuk 7,49 aman | 79,53 layak, termasuk 7,64 aman | 80,29 layak, termasuk 7,25 aman | 82,07 layak, termasuk 11,5 aman | 86,03 layak, termasuk 13 aman | 90 layak, termasuk 15 aman |
| 1.11 | Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (%) | 7,61 | 6,19 | 5,69 | 2,98 | 1,49 | 0 |
| 1.12 | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan (%) | 59,08 penanganan dan 1,55 pengurangan (2016) | 54,85 penanganan dan 0,88 pengurangan (2019) | 54,85 penanganan dan 0,88 pengurangan (2019) | 75,28 penanganan dan 9,13 pengurangan | 77,64 penanganan dan 14,57 pengurangan | 80 penanganan dan 20 pengurangan |
| Meningkatnya layanan keselamatan dan keamanan transportasi | | | | | | | |
| 1.13 | Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit) | 28 | 27,50 | 27 | 26 | 25,50 | 25 |
| Meningkatnya layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan | | | | | | | |
| 1.14 | Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan (kab/kota) | 88 | 91 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| Meningkatnya optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi | | | | | | | |
| 1.15 | Volume tampungan air per kapita ($m^3$/kapita) | 57,21 | 56,52 | 58,11 | 58,34 | 61,98 | 66,34 |
| 1.16 | Persentase luas sawah beririgasi (%) | 41,70 | 41,85 | 42,31 | 43,48 | 43,57 | 44,04 |
| 1.17 | Luas daerah irigasi yang dimodernisasi (hektar) | 0 | 0 | 0 | 1.462 | 11.956 | 11.956 |
| PP 2. Infrastruktur Ekonomi | | | | | | | |
| Meningkatnya konektivitas wilayah | | | | | | | |
| 2.1 | Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten/kota (%) | 92/68/ 57 | 90/68/ 57 | 92/71/ 67 | 91/72/ 62 | 93/73/ 63 | 97/75/ 65 |



SK No 168148 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 279 | Perubahan Tabel 4.16 dalam halaman IV.85 | |

| No. | Sasaran/ Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.2 | Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/ atau beroperasi (km) | 1.461[a)] | 246 | 339,80 | 327,70 | 415 | 2.500[b)] |
| 2.3 | Panjang jalan baru yang terbangun (km) | 3.387[a)] | 255,50 | 811,62 | 503 | 490 | 3.000[b)] |
| 2.4 | Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) (km) | 6.164 | 6.325 | 6.466 | 6.565 | 6.724 | 7.451 |
| 2.5 | Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar (lokasi) | 1 | 1 (berlanjut) | 2 (berlanjut) | 3 (berlanjut) | 4 (berlanjut) | 7 |
| 2.6 | Jumlah rute subsidi tol laut (rute) | 14 | 21 | 32 | 35 | 35 | 25 |
| 2.7 | Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (lokasi) | 24 (22 selesai, 2 berlanjut) [a)] | 9 (berlanjut) | 13 (3 selesai, 10 berlanjut) | 8 (4 selesai, 4 berlanjut) | 4 (berlanjut) | 36[b)] |
| 2.8 | Jumlah bandara baru yang dibangun (kumulatif) (lokasi) | 15[a)] | 7 (berlanjut) | 10 (berlanjut) | 10 (berlanjut) | 12 (berlanjut) | 21[b)] |
| 2.9 | Jumlah rute jembatan udara (rute) | 35 | 28 | 39 | 42 | 41 | 43 |
| PP 3. Infrastruktur Perkotaan | | | | | | | |
| Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan | | | | | | | |
| 3.1 | Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang kereta api/*flyover*/*underpass* (kota) | 3 | 0 | 5 (berlanjut) | 5 (berlanjut) | 5 (berlanjut) | 6 |
| 3.2 | Jumlah sistem angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya yang dikembangkan (kota) | 1 | 1 (berlanjut) | 1 | 6 (berlanjut) | 6 (berlanjut) | 6 |
| 3.3 | Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota (kawasan) | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 |
| PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan | | | | | | | |
| Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien | | | | | | | |
| 4.1 | Jumlah produksi tenaga listrik (GWh) | 275.900,00 | 272.420,00 | 210.601,00[c)] | 382.696,10 | 406.325 | 431.281,20 |



SK No 168149 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|

280 Perubahan Tabel 4.16 dalam halaman IV.86

| No. | Sasaran/ Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.2 | Penurunan emisi $CO_2$ pembangkit (juta ton) | 3,88 | 8,78 | 10,37 | 5,36 | 5,91 | 6,07 |
| 4.3 | Jumlah pengguna listrik (ribu rumah tangga-kumulatif) | 75.705 | 78.663 | 81.530 | 81.217 | 83.219 | 85.216 |
| 4.4 | Jumlah sambungan rumah jaringan gas kota (kumulatif, sambungan rumah) | 537.936[a)] | 673.222 | 848.097 | 1.288.870 | 1.688.874 | 4.010.445 |
| 4.5 | Jumlah kapasitas kilang minyak-kumulatif (*Barrel per Calendar Day*/BPCD) | 1.151.000 | 1.151.000 | 1.151.000 | 1.176.000 | 1.176.000 | 1.276.000 |
| PP 5. Transformasi Digital | | | | | | | |
| Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi | | | | | | | |
| 5.1 | Persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK (%) | 9,42 | 10,58 | 6,83 | 9,80–10,00 | 8,80 | 8,80 |
| 5.2 | Persentase pengguna internet (%) | 64,80 | 73,70 | 73,70 | 79,20 | 80,70 | 82,30 |
| 5.3 | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (%) | 63,53 | 62,84 | 57,48 | 73 | 74 | 75,70 |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2022, 1) Susenas 2019; 2) RPJMN 2020–2024.

Keterangan: a) kumulatif 2015–2019; b) kumulatif 2020–2024; c) Realisasi TW III 2021.

281 Perubahan Infografis *Major Project* Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) dalam halaman IV.87

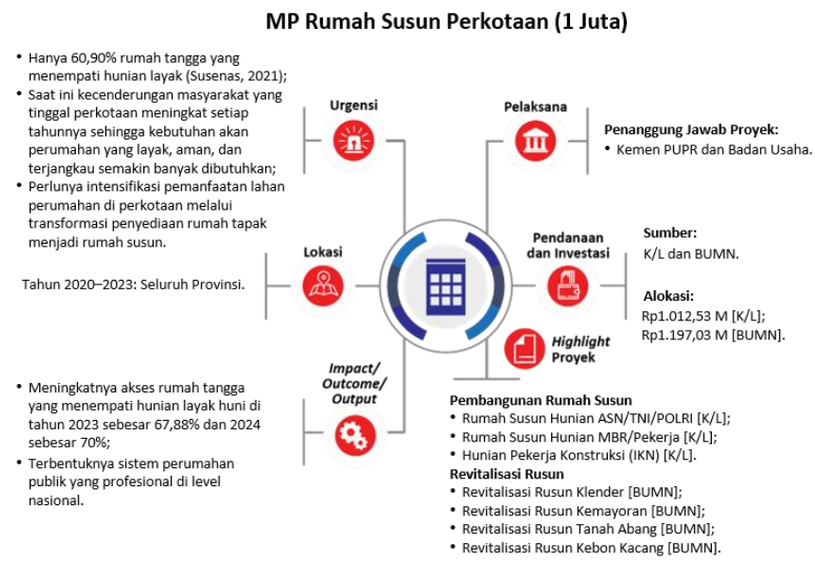




SK No 168150 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 282 | Perubahan Infografis *Major Project* Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) dalam halaman IV.88 | **MP Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)**<br>Akses air minum jaringan perpipaan merupakan sistem penyediaan air minum yang lebih menjamin layanan dan kualitas air minum untuk masyarakat. Hingga tahun 2021, baru 19,06% rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses air minum perpipaan. Kondisi ini mengalami penurunan sebesar 1,63% dari tahun 2020 (20,69%). Dengan demikian, diperlukan percepatan penyediaan air minum melalui *Major Project* Akses Air Minum Perpipaan (10 juta sambungan rumah).<br>**Urgensi**<br>**Pelaksana**<br>**Penanggung Jawab Proyek:**<br>• Kemen PUPR.<br>**Lintas K/L/D:**<br>• Kemendagri, Kemenkes, Kemen ESDM, Pemda, dan Badan Usaha.<br>**Lokasi**<br>Tersebar pada seluruh provinsi.<br>**Pendanaan dan Investasi**<br>**Sumber:**<br>K/L, DAK, KPBU, dan BUMN.<br>**Alokasi:**<br>Rp7.568,92 M [K/L, DAK, dan KPBU];<br>Rp6.267,32 M [BUMN].<br>***Highlight* Proyek**<br>***Impact/ Outcome/ Output***<br>• Meningkatkan jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum perpipaan dari 19,06% di tahun 2021 menjadi 28,01% di tahun 2023 dan 30,45% di tahun 2024;<br>• Meningkatkan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia melalui akses air minum aman yang memenuhi standar kesehatan dengan target sebesar 14,22% di tahun 2023 dan 15% di tahun 2024.<br>**Pengembangan SPAM Kab./Kota**<br>• Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota [K/L];<br>• Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota [K/L];<br>• Perluasan SPAM Kabupaten/Kota [K/L];<br>• Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat [K/L];<br>• Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu [DAK].<br>**Pengembangan Air Baku**<br>• Jaringan Transmisi Air Baku dari Bendungan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur yang dibangun (Tahap II) [K/L];<br>• Air Baku KEK Sorong yang dibangun [K/L].<br>**Pengembangan SPAM Regional**<br>• Pembangunan SPAM Regional [K/L];<br>• Peningkatan SPAM Regional [K/L];<br>• Perluasan SPAM Regional [K/L];<br>• SPAM Jatiluhur I [KPBU & BUMN][a];<br>• SPAM Karian Serpong [KPBU & BUMN][a].<br>Keterangan:<br>a) Proyek Berstatus PSN. |
| 283 | Perubahan Infografis *Major Project* Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga) dalam halaman IV.88 | **MP Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)**<br>• Perlunya penyediaan sanitasi yang terkelola dengan aman untuk mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kesehatan lingkungan;<br>• Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka 1,49% (tahun 2023) dan 0% (tahun 2024);<br>• Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita 17,5% (tahun 2023).<br>**Urgensi**<br>**Pelaksana**<br>**Penanggung Jawab Proyek:**<br>• Kemen PUPR.<br>**Lintas K/L/D:**<br>• Kemendagri; Kemenkes; Kemen LHK; dan Pemda.<br>**Lokasi**<br>Tersebar di seluruh kab/kota di Indonesia.<br>**Pendanaan dan Investasi**<br>**Sumber:**<br>K/L dan DAK.<br>**Alokasi:**<br>Rp4.103,19 M [K/L dan DAK].<br>***Highlight* Proyek**<br>***Impact/ Outcome/ Output***<br>Meningkatkan jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman mencapai 86,03% pada tahun 2023 dan 90% Rumah Tangga pada tahun 2024.<br>**SPALD Terpusat**<br>• SPALD-T Skala Permukiman [K/L];<br>**SPALD Setempat**<br>• SPALD-S Skala Kota [K/L];<br>• Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu [DAK];<br>**Kelembagaan**<br>• Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi [K/L]. |



SK No 168151 A

**PRESIDEN**
**REPUBLIK INDONESIA**

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 284 | Perubahan Infografis *Major Project* Pemulihan 4 DAS Kritis dalam halaman IV.89 | **MP Pemulihan 4 DAS Kritis**<br>**Urgensi**<br>• 24,3 juta hektar lahan kritis yang berdampak pada kualitas dan kuantitas sumber daya air;<br>• Kualitas air sungai DAS kritis tercemar berat-sedang;<br>• Monitoring kualitas air di DAS kritis masih rendah dan konvensional;<br>• Frekuensi banjir di DAS kritis meningkat.<br>**Lokasi**<br>• DAS Ciliwung-Cisadane: DKI Jakarta;<br>• DAS Citarum: Jawa Barat<br>• DAS Asahan Toba: Sumatera Utara.<br>***Impact/ Outcome/ Output***<br>• Pembangunan bangunan pengendali banjir 6 unit;<br>• Pembangunan pengendali banjir 2,95 km.<br>**Pelaksana**<br>**Penanggung Jawab Proyek:**<br>• Kemen PUPR.<br>**Lintas K/L/D:**<br>• Kemendagri.<br>**Pendanaan dan Investasi**<br>**Sumber:**<br>K/L.<br>**Alokasi:**<br>Rp1.239,92 M [K/L].<br>***Highlight* Proyek**<br>**Bangunan Pengendali Banjir**<br>• Pompa Ancol Sentiong yang dibangun [K/L];<br>• *Groundsill* Cipamingkis yang dibangun (Tahap II) [K/L].<br>**Pengendalian Banjir**<br>• Pengendalian banjir Sungai Ciliwung yang dibangun [K/L];<br>• Sudetan Ciliwung–KBT yang dibangun [K/L];<br>• Pengendali Banjir Sungai Binanga Siguluan, Aek Sigumbang, dan Aek Limbong yang dibangun [K/L];<br>• Pengendalian banjir Sungai Aek Silang yang dibangun [K/L].<br>**Pemeliharaan**<br>• Kegiatan Citarum Harum yang dilaksanakan [K/L]. |
| 285 | Perubahan Infografis *Major Project* 18 Waduk Multiguna dalam halaman IV.89 | **MP 18 Waduk Multiguna**<br>**Urgensi**<br>• 59% bendungan eksisting hanya memiliki fungsi tunggal;<br>• Volume tampungan berkurang 19% akibat sedimentasi;<br>• Rendahnya efisiensi pemanfaatan air irigasi;<br>• Adanya pusat kegiatan ekonomi (KI, KEK, KSPN, dll) baru yang membutuhkan air.<br>**Lokasi**<br>• Waduk Mbay: NTT<br>• Waduk Pelosika: Sulawesi Tenggara<br>• Waduk Riam Kiwa: Kalimantan Selatan<br>• Waduk Jenelata: Sulawesi Selatan<br>• Waduk Matenggeng: Jawa Barat<br>• DI Komering: Sumatera Selatan<br>• DI Rentang: Jawa Barat<br>• IPDMIP & SIMURP: tersebar<br>***Impact/ Outcome/ Output***<br>• Terlaksananya konstruksi bendungan di 4 lokasi;<br>• Terlaksananya tahapan modernisasi irigasi di 2 Daerah Irigasi (DI Kedung Putri dan DI Pamukkulu).<br>Keterangan:<br>a) Proyek Berstatus PSN.<br>**Pelaksana**<br>**Penanggung Jawab Proyek:**<br>• Kemen PUPR.<br>**Lintas K/L/D:**<br>• Kementan dan Kemendagri.<br>**Pendanaan dan Investasi**<br>**Sumber:**<br>K/L.<br>**Alokasi:**<br>Rp3.105,60 M [K/L].<br>***Highlight* Proyek**<br>**Konstruksi**<br>• Bendungan Mbay yang dibangun [K/L][a].<br>• Pelosika *Multipurpose* Dam Construction Project yang dilaksanakan [K/L];<br>• Riam Kiwa *Multipurpose Dam Construction Project* yang dilaksanakan [K/L];<br>• Jenelata *Dam Construction Project* yang dilaksanakan [K/L];<br>**Perencanaan/Persiapan**<br>• Matenggeng *Multipurpose Dam Development Sub Project* (ESP KOICA) [K/L];<br>**Infrastruktur Irigasi**<br>• IPDMIP yang dilaksanakan [K/L];<br>• SIMURP yang dilaksanakan [K/L];<br>• RIMP yang dilaksanakan [K/L];<br>• KIP yang dilaksanakan [K/L];<br>• Daerah Irigasi Komering yang dibangun [K/L];<br>• Daerah Irigasi Komering yang direhabilitasi [K/L]<br>**Pendukung**<br>• Pendukung IPDMIP [K/L];<br>• Pendukung SIMURP [K/L]; |

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 286 | Perubahan Infografis *Major Project* Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa dalam halaman IV.90 | 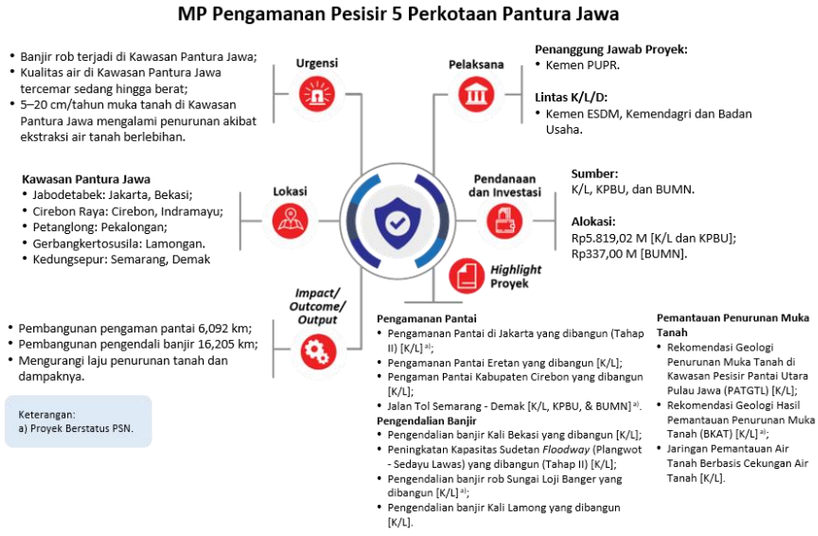 |
| 287 | Perubahan Infografis *Major Project* Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu dalam halaman IV.90 | 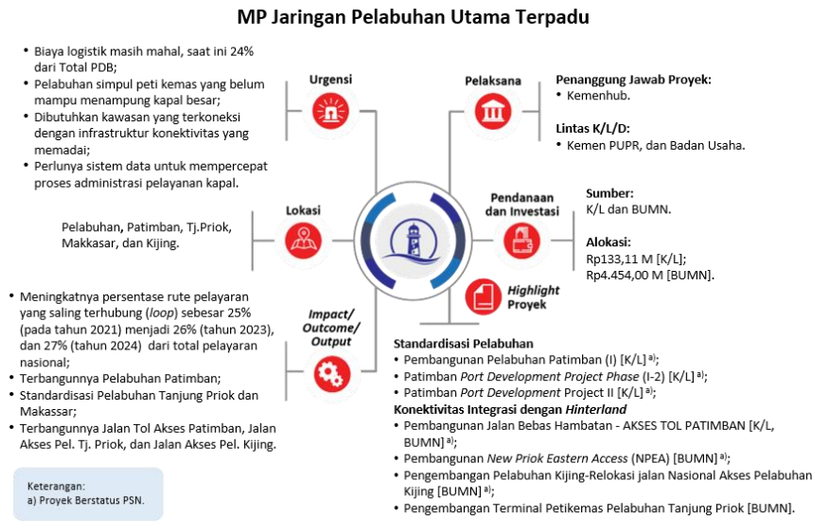 |

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 288 | Perubahan Infografis *Major Project* Kereta Api Makassar-Pare Pare dalam halaman IV.91 | |
| 289 | Perubahan Infografis *Major Project* KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta – Bandung) dalam halaman IV.91 | |

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 290 | Perubahan Infografis *Major Project* Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung dalam halaman IV.92 | **MP Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung**<br>**Urgensi**<br>• *Backbone* konektivitas utama kondisinya kurang efisien dengan waktu tempuh rata-rata >2,5 jam per 100 Km;<br>• Biaya logistik yang relatif mahal (24% dari PDB).<br>**Lokasi**<br>**Tahap Konstruksi**<br>• Ruas Binjai–Langsa, Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat, Indrapura–Kisaran, Pekanbaru–Padang, dan Kayu Agung–Palembang–Betung.<br>**Tahap Penyiapan**<br>• Ruas Betung–Tempino–Jambi dan Jambi–Rengat.<br>**Impact/ Outcome/ Output**<br>• Menurunkan waktu tempuh pada jalur lintas utama pulau pada tahun 2023 menjadi 2,08/100 km;<br>• Menurunkan waktu tempuh Aceh–Lampung dari 48 jam menjadi 30 jam pada tahun 2024; Target 2023: 37 jam.<br>Keterangan:<br>a) Proyek Berstatus PSN.<br>**Pelaksana**<br>**Penanggung Jawab Proyek:**<br>• Kemen PUPR.<br>**Lintas K/L/D:**<br>• Kemenkeu, Kemen LHK, Kemenhub, Kemenko Perekonomian, Badan Usaha, KPPIP, dan LMAN.<br>**Pendanaan dan Investasi**<br>**Sumber:**<br>K/L dan BUMN.<br>**Alokasi:**<br>Rp0,40 M [K/L];<br>Rp11.294,00 M [BUMN].<br>***Highlight* Proyek**<br>**Pembangunan Jalan**<br>• Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - DEVELOPMENT OF NEW TUNNEL PAYAKUMBUH - PANGKALAN [K/L] a);<br>• Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - BTS. KOTA JAMBI - TEMPINO [K/L] a) ;<br>• Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - TOL BETUNG – JAMBI [K/L] a);<br>• Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - Jalan Tol Trans Sumatera [BUMN] a). |
| 291 | Perubahan Infografis *Major Project* Jalan Trans Pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan dalam halaman IV.92 | **MP Jalan Trans Pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, Dan Terdepan**<br>**Urgensi**<br>• Infrastruktur konektivitas di wilayah tertinggal, terpencil, dan terdepan yang masih terbatas baik dari aspek kualitas dan kapasitas;<br>• Biaya transportasi di wilayah 3T yang relatif mahal.<br>**Lokasi**<br>Provinsi Maluku (Kei Besar, Buru, Seram); Provinsi Maluku Utara (Morotai); Provinsi Sumatera Barat (Mentawai); Provinsi Sumatera Utara (Nias); Provinsi Bengkulu (Enggano); dan Provinsi Papua (Biak).<br>**Impact/ Outcome/ Output**<br>• Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten/kota, tahun 2023 = 93/73/63 persen (pada tahun 2024 97/75/65);<br>• Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau, tahun 2023 = 2,08 jam/100 km.<br>**Pelaksana**<br>**Penanggung Jawab Proyek:**<br>• Kemen PUPR.<br>**Lintas K/L/D:**<br>• Kemen LHK, Kemendagri, dan Kemenko Marves.<br>**Pendanaan dan Investasi**<br>**Sumber:**<br>K/L.<br>**Alokasi:**<br>Rp1.527,40 M [K/L].<br>***Highlight* Proyek**<br>**Pembangunan Jalan**<br>• Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Jalan Trans Mentawai Ruas Sigapokna – Labuhan Bajau (Mentawai) [K/L];<br>• Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Jalan trans Pulau Enggano (Banjarsari - Malakoni - Kahyapu) [K/L];<br>• Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - PENINTING – PAYALAMAN [K/L];<br>• Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - BIAK - JUNCTION – KOREM [K/L];<br>• Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Jalan Elat - Sp. Ngurdu - Fako - Holat - Ohoiraut (P. Key Besar) [K/L].<br>**Pembangunan Jembatan**<br>• Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan - BANJAR SARI - MALAKONI - KAYU APUH (P. ENGGANO) [K/L].<br>**Preservasi Jalan**<br>• Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - BANGGOI – BULA [K/L]. |

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 292 | Perubahan Infografis *Major Project* Jalan Trans Papua Merauke - Sorong dalam halaman IV.93 | 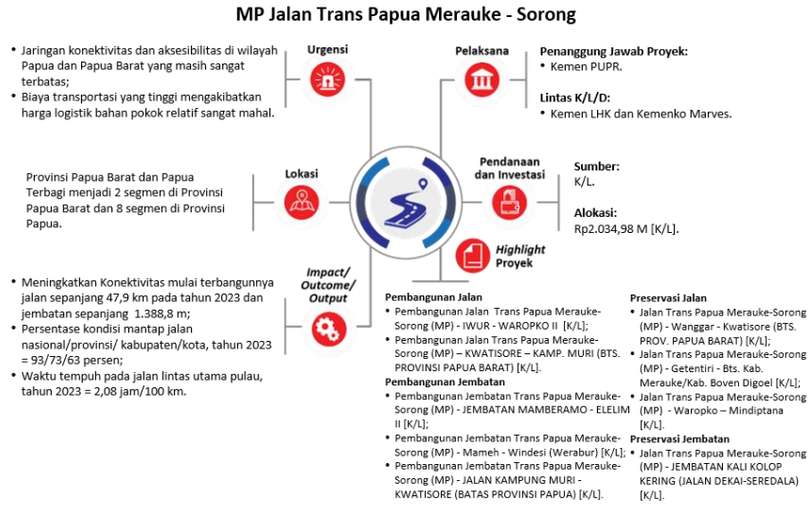 |
| 293 | Perubahan Infografis *Major Project* Jembatan Udara 37 Rute di Papua dalam halaman IV.93 | 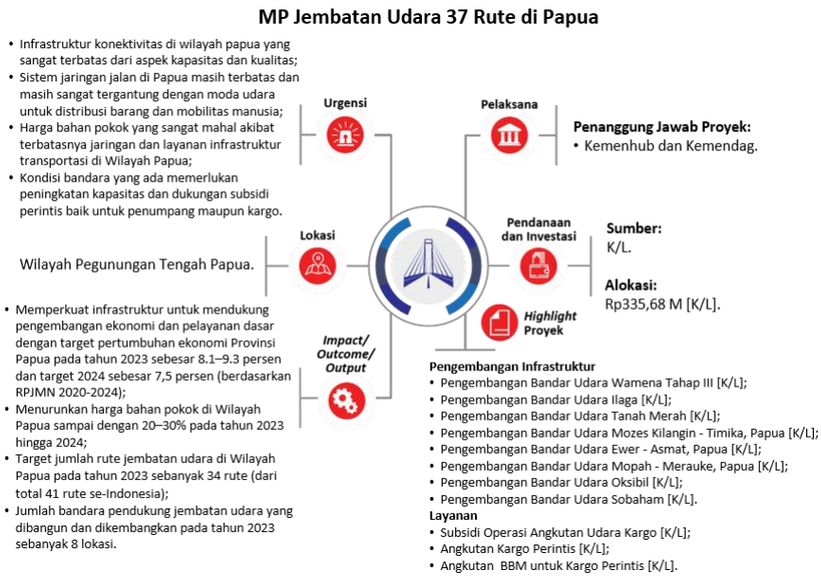 |



SK No 168156 A

**PRESIDEN**
**REPUBLIK INDONESIA**

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 294 | Perubahan Infografis *Major Project* Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar dalam halaman IV.94 | 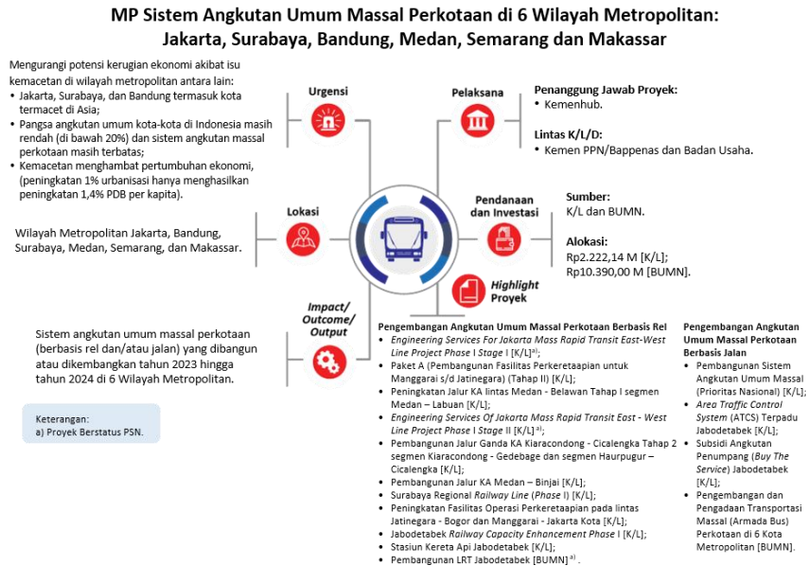 |
| 295 | Perubahan Infografis *Major Project* Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA dalam halaman IV.94 | 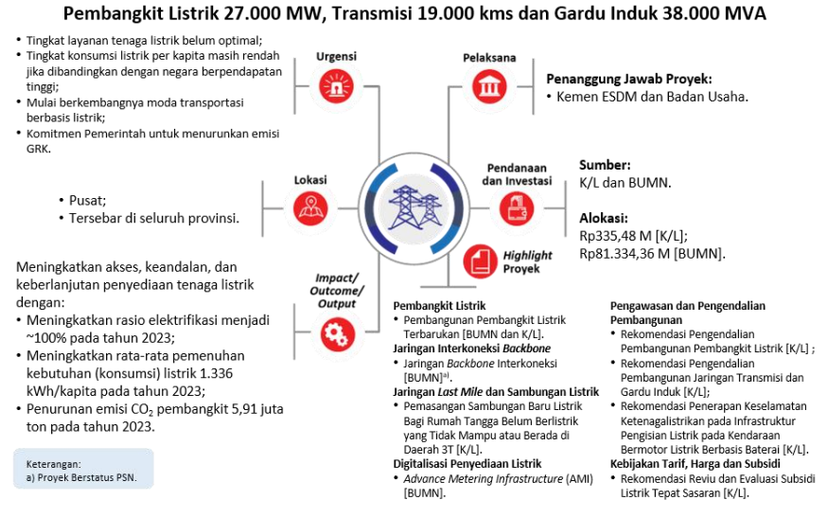 |



SK No 168157 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 296 | Perubahan Infografis *Major Project* Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah dalam halaman IV.95 | 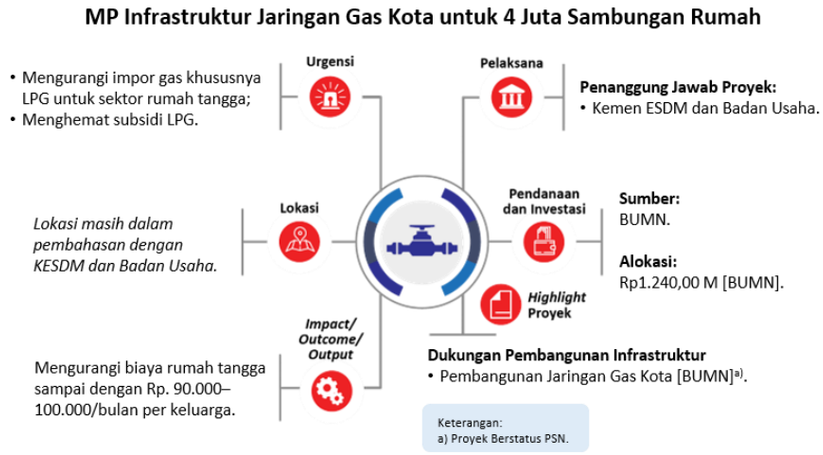 |
| 297 | Perubahan Infografis *Major Project* Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak dalam halaman IV.96 | 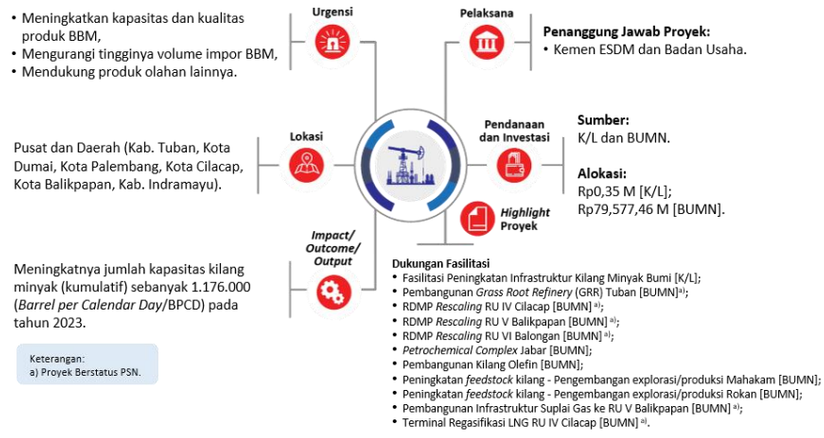 |



SK No 168158 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 298 | Perubahan Infografis *Major Project* Transformasi Digital dalam halaman IV.96 | 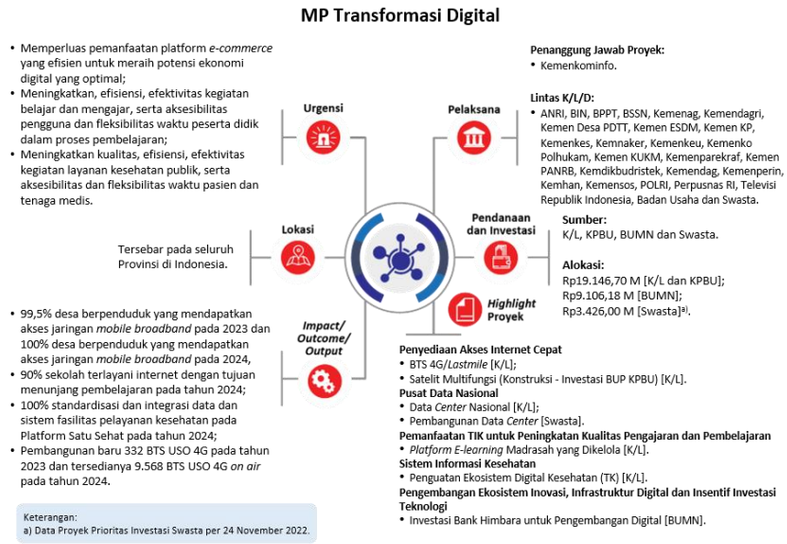 |
| 299 | Perubahan alinea pertama dalam halaman IV.97 | Kerangka regulasi yang diperlukan dan direncanakan dilaksanakan di tahun 2023 untuk mendukung PN 5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar antara lain:<br>(1) Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;<br>(2) Revisi Peraturan Pemerintah No. 34/2006 tentang Jalan;<br>(3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaan. |
| 300 | Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.97 | Strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup akan berfokus pada upaya penanganan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi (1) upaya peningkatan kualitas udara, air, air laut, dan tutupan lahan sebagai penyangga sistem kehidupan masyarakat; (2) penanganan limbah B3 dan sampah spesifik; serta (3) optimalisasi pengelolaan keanekaragaman hayati melalui pengurangan ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan peningkatan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan di tingkat ekosistem, spesies, dan genetik yang dicakup dalam Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia Pasca 2020 (Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan Post 2020/IBSAP Post 2020). |



SK No 168159 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 301 | Perubahan Tabel 4.17 dalam halaman IV.98 | |

Tabel 4.17
Sasaran, Indikator, dan Target
PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

| No. | Sasaran/Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | | | | | | |
| 1.1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (nilai) | 66,55 | 70,27 | 71,45 | 69,22 | 69,48 | 69,74 |
| 2 | Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim | | | | | | |
| 2.1 | Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (%) | N/A[a)] | 0,37 | 0,43[b)] | 0,91 | 1,10 | 1,25 |
| 3 | Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap *baseline* | | | | | | |
| 3.1 | Persentase penurunan emisi GRK (%) | | | | | | |
| | a. Kumulatif | 24,92 | 26,44 | 26,02[b)] | 26,87 | 27,02 | 27,27 |
| | b. Tahunan | 11,01 | 39,55 | 22,51[b)] | 26,70 | 26,80 | 27,30 |
| 3.2 | Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%) | 20,75 | 38,01 | 20,71[b)] | 28,49 | 29,70 | 31,64 |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) belum dilakukan penghitungan; b) angka sementara, November 2022



SK No 168160 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 302 | Perubahan Tabel 4.18 dalam halaman IV.100 | |

Tabel 4.18
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari
PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

| No. | Sasaran/Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | | | | | | | |
| Meningkatnya kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, serta kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut | | | | | | | |
| 1.1 | Indeks Kualitas Air (IKA) (nilai) | 52,65 | 53,53 | 52,82 | 55,30 | 55,40 | 55,50 |
| 1.2 | Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) (nilai) | N/A[a)] | 68,94 | 81,04 | 59,50 | 60,00 | 60,50 |
| 1.3 | Indeks Kualitas Udara (IKU) (nilai) | 86,57 | 87,21 | 87,36 | 84,30 | 84,40 | 84,50 |
| 1.4 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL) (nilai) | 62,00 | 59,54 | 60,72 | 63,50 | 64,50 | 65,50 |
| PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim | | | | | | | |
| Berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat | | | | | | | |
| 2.1 | Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (%) | N/A[a)] | 0,08[b)] | 0,09[b)] | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 2.2 | Penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (%) | N/A[a)] | 0,29[b)] | 0,34[b)] | 0,81 | 1,00 | 1,15 |
| 2.3 | Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit) | >5,00 | 5,00 | 4,5 | 4,00 | 3,50 | 3,00 |
| PP 3. Pembangunan Rendah Karbon | | | | | | | |
| Meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan (%) | | | | | | | |
| 3.1 | Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi (%) | | | | | | |
| | a. Kumulatif | 4,29 | 4,87 | 5,35[b)] | 9,70 | 9,99 | 10,15 |
| | b. Tahunan | 9,31 | 9,39 | 10,88[b)] | 13,2 | 12,8 | 11,8 |



SK No 168161 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 303 | Perubahan Tabel 4.18 dalam halaman IV.101 | |

| No. | Sasaran/Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3.2 | Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor lahan (%) | | | | | | |
| | a. Kumulatif | 47,00 | 50,02 | 33,25[c)] | 34,77 | 36,36 | 37,79 |
| | b. Tahunan | 13,39 | 78,80 | 50,71[c)] | 53,1 | 58,3 | 57,2 |
| 3.3 | Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor limbah (%) | | | | | | |
| | a. Kumulatif | 4,03 | 4,35 | 5,03[b)] | 6,53 | 6,78 | 6,99 |
| | b. Tahunan | 6,90 | 7,15 | 8,93[b)] | 9,3 | 9,4 | 9,4 |
| 3.4 | Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor IPPU (%) | | | | | | |
| | a. Kumulatif | 5,44 | 6,03 | 6,49[b)] | 5,24 | 4,97 | 4,77 |
| | b. Tahunan | 11,35 | 10,66 | 0,16[c)] | 2,59 | 2,45 | 2,87 |
| 3.5 | Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor pesisir dan kelautan (%) | | | | | | |
| | a. Kumulatif | N/A[a)] | 11,10[c)] | 10,80[c)] | 6,60 | 6,80 | 6,90 |
| | b. Tahunan | 6,30 | 11,10[c)] | 10,50[c)] | 6,80 | 7,04 | 7,30 |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) belum dilakukan penghitungan; b) angka sementara, November 2022; c) angka target 2021

304 Perubahan Infografis *Major Project* Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana dalam halaman IV.102

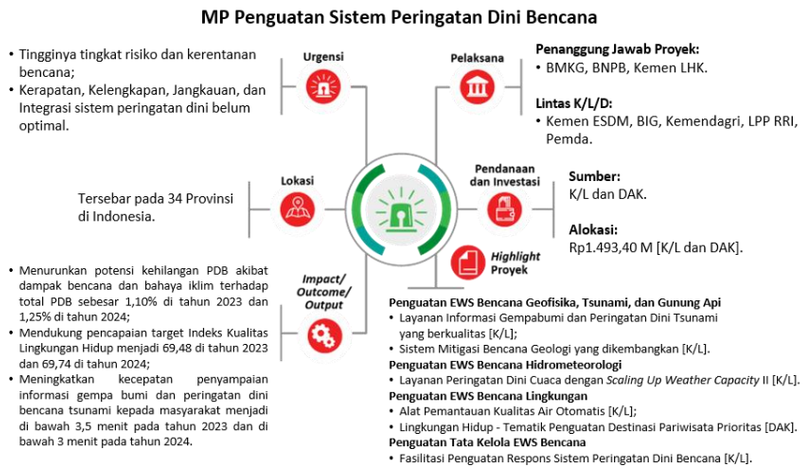




SK No 168162 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 305 | Perubahan Infografis *Major Project* Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dalam halaman IV.103 | 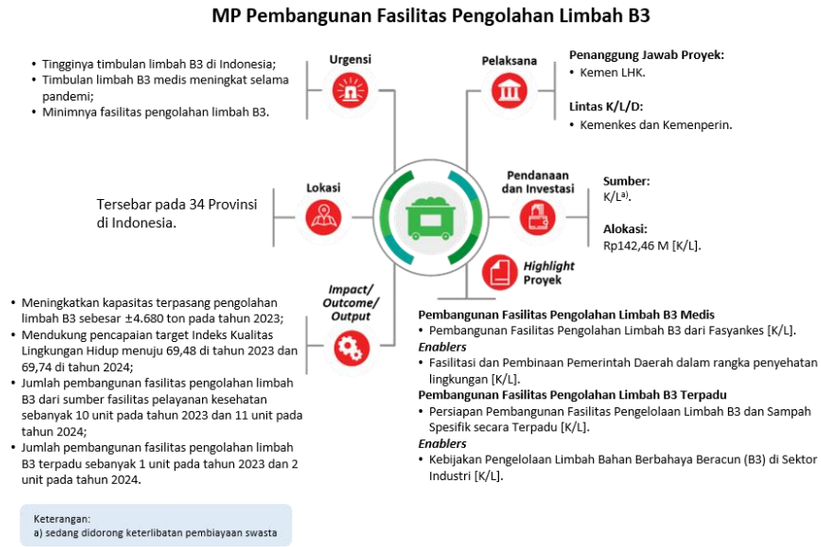 |
| 306 | Penambahan subbab 4.1.6.5 Kerangka Regulasi setelah infografis *Major Project* Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dalam halaman IV.103 | 4.1.6.5 Kerangka Regulasi<br><br>Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim pada tahun 2023 adalah<br><br>(1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia Pasca 2020 (Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan Post 2020/IBSAP Post 2020). |
| 307 | Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.104 | Untuk menjawab tantangan bidang politik dan komunikasi tersebut, arah kebijakan yang ditetapkan adalah mewujudkan demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan sipil, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal yang dapat diwujudkan melalui<br><br>(1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi dengan strategi (a) penguatan penyelenggaraan pemilu sebagai persiapan tahapan pemilu serentak tahun 2024; (b) penguatan peraturan perundangan bidang politik; (c) bantuan keuangan kepada partai politik; (d) penguatan demokrasi internal, transparansi, dan akuntabilitas partai politik; serta (e) penguatan demokrasi secara umum yang dapat direfleksikan dengan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) setiap tahunnya;<br>(2) peningkatan kesetaraan dan kebebasan dengan strategi (a) pendidikan politik dan pendidikan pemilih, khususnya kelompok pemilih pemula; (b) peningkatan kualitas penyelenggaraan kepemiluan; dan (c) peningkatan kualitas dan kapasitas OMS; dan<br>(3) peningkatan kualitas komunikasi publik dengan strategi (a) pengintegrasian tata kelola informasi dan komunikasi publik di kementerian/lembaga/daerah; (b) penyediaan konten dan akses informasi publik secara merata dan berkeadilan, terutama di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T); (c) peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika; |



SK No 168163 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | (d) peningkatan literasi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) masyarakat; (e) peningkatan peran lembaga pers dan jurnalis; serta (f) peningkatan kualitas lembaga penyiaran. |
| 308 | Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.105 | Guna pelaksanaan kebijakan luar negeri yang optimal, arah kebijakan dan strategi di tahun 2023 akan difokuskan pada (1) peningkatan peran kepemimpinan Indonesia di tingkat forum regional dan global; (2) pemutakhiran data WNI (termasuk pemutakhiran data pemilih di luar negeri) dan penguatan Portal Peduli WNI; (3) percepatan penyelesaian perundingan penetapan batas maritim; (4) peningkatan citra positif Indonesia; dan (5) dalam konteks kerja sama pembangunan internasional, pemerintah terus mendorong partisipasi swasta dalam KSST untuk mendukung pembangunan di sektor *green economy, blue economy,* industri halal, pertanian, dan kesehatan; serta (6) terus berkontribusi terhadap solidaritas, perdamaian, dan pembentukan tata kelola global, baik melalui forum/OI maupun pemberian hibah. |
| 309 | Penambahan alinea setelah alinea keempat dalam halaman IV.105 | Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, telah dilakukan berbagai upaya diantaranya pengembangan pelayanan publik digital, penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!), penguatan pelayanan publik terpadu melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), serta pembinaan inovasi pelayanan publik. Upaya tersebut berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, hal ini ditunjukkan dengan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional yang mengalami peningkatan dari 3,38 pada tahun 2018 menjadi 3,79 pada tahun 2021. Di samping itu, dalam hal kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik (atas dasar UU Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik) juga menunjukkan perbaikan. Tahun 2021, sebanyak 142 instansi pemerintah memperoleh tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik. |
| 310 | Perubahan alinea kelima dalam halaman IV.105 dan alinea pertama dalam halaman IV.106 | Pada bidang aparatur negara, beberapa isu strategis terkait transformasi birokrasi adalah pelaksanaan manajemen ASN yang meliputi sistem informasi manajemen ASN yang belum terintegrasi, belum diimplementasikannya Manajemen Talenta ASN di seluruh instansi pemerintah, perbaikan sistem rekrutmen ASN, penerapan pemberian penghargaan berbasis kinerja, dan pelanggaran netralitas/disiplin ASN. Pada aspek pelayanan publik, yaitu belum terintegrasinya layanan publik prioritas pada portal pelayanan publik nasional, pemanfaatan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) sebagai sumber pengetahuan inovasi pelayanan publik dan optimalisasi penyelesaian laporan pengaduan pelayanan publik. Pada aspek kelembagaan dan proses bisnis, tantangan yang dihadapi adalah percepatan pelaksanaan SPBE, penataan proses bisnis berdasarkan isu/tematik dan lintas sektor, serta percepatan implementasi SRIKANDI di seluruh K/L/D. Pada aspek pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), tantangan yang dihadapi adalah masih rendahnya kualitas pelaksanaan RB di daerah. Dalam mengatasi isu/tantangan tersebut, arah kebijakan yang dilakukan tahun 2023 di antaranya (1) transformasi manajemen SDM aparatur; (2) transformasi pelayanan publik; (3) penataan kelembagaan dan proses bisnis yang efektif, dan (4) penguatan pelaksanaan RB dan akuntabilitas kinerja pembangunan. |



SK No 168164 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|

311 Perubahan Tabel 4.19 dalam halaman IV.106

Tabel 4.19
Sasaran, Indikator, dan Target
PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam
dan Transformasi Pelayanan Publik

| No. | Sasaran/Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara secara Optimal | | | | | | |
| 1.1 | Indeks Demokrasi Indonesia[a)] (nilai) | 74,92 | 73,66 | 78,12 | 78,92 | 79,25 | 79,58 |
| 1.2 | Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah[2)] (%) | 69,43 | 70,4 | 77,23 | 75 | 78 | 79 |
| 2 | Optimalnya Kebijakan Luar Negeri | | | | | | |
| 2.1 | Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional[3)] (nilai) | 95,20 | 96,58 | 112,06 | 4,85[b)] | 4,88[b)] | 4,88[b)] |
| 3 | Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap | | | | | | |
| 3.1 | Indeks Pembangunan Hukum (nilai) | 0,62 | 0,54[c)] | 0,55[d)] | 0,56[e)] | 0,57[e)] | 0,58[e)] |

312 Perubahan Tabel 4.19 dalam halaman IV.107

| No. | Sasaran/Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | | | | | |
| 4.1 | Indeks Pelayanan Publik Nasional (nilai) [4)] | 3,63 | 3,84 | 3,79 | 3,80[f)] | 3,90[f)] | 4,00[f)] |
| 5 | Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | |
| 5.1 | Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya (%)[5)] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: 1) BPS; 2) Kemenkominfo; 3) Kemenlu; 4) KemenPAN-RB; 5) Kemenhan.

Keterangan: a) penyesuaian dengan hasil penghitungan IDI menggunakan metode baru per Juni 2022; b) Indeks Peran dan Pengaruh Indonesia tahun 2022-2024 mengalami penyempurnaan formulasi penghitungan dengan konversi indeks berdasarkan skala guna mencerminkan tingkatan peran dan pengaruh dalam indeks; c) penghitungan IPH pada tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data dan penghitungan, kerangka berpikir melalui pilar, variabel dan indikator yang baru dan berbeda dengan IPH pada tahun 2015-2019 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan nilai capaian IPH 2019; d) penghitungan nilai Indeks Pembangunan Hukum (IPH) 2021 dilakukan pada tahun 2022; e) penghitungan nilai IPH dilakukan pada T+1, sehingga penghitungan nilai IPH 2022 akan dilakukan pada tahun 2023, penghitungan nilai IPH 2023 akan dilakukan pada tahun 2024, dan penghitungan nilai IPH 2024 akan dilakukan pada tahun 2025; dan f) akan dikonfirmasi lebih lanjut dengan KemenPAN-RB.



SK No 168165 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 313 | Perubahan Tabel 4.20 dalam halaman IV.108 | |

Tabel 4.20
Sasaran, Indikator, dan Target PP dari
PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam
dan Transformasi Pelayanan Publik

| No. | Sasaran/Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi | | Target | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| PP 1. Konsolidasi Demokrasi | | | | | | | |
| Terwujudnya Stabilitas Politik yang Kondusif serta Komunikasi Publik yang Efektif, Integratif, dan Partisipatif | | | | | | | |
| 1.1 | IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi[a)] (nilai) | 78,73 | 75,66 | 75,67 | 79,31 | 81,51 | 83,71 |
| 1.2 | IDI Aspek Kebebasan[a)] (nilai) | 77,20 | 79,40 | 79,72 | 75,90 | 74,21 | 72,53 |
| 1.3 | IDI Aspek Kesetaraan[a)] (nilai) | 70,71 | 67,85 | 78,86 | 81,08 | 81,51 | 81,94 |
| 1.4 | Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah yang Terintegrasi Sesuai Asas-asas Keterbukaan Informasi Publik (dokumen) | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri | | | | | | | |
| Meningkatnya Efektivitas Diplomasi dan Pemanfaatan Kerja Sama Pembangunan Internasional | | | | | | | |
| 2.1 | Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral (forum) | 8 | 20 | 48 | 13 | 14 | 16 |
| 2.2 | Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional (nilai) | 3,78 | 3,82 | 3,98 | 3,90 | 3,95 | 4,00 |
| 2.3 | Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri (nilai) | 89,91[b)] | 88,35 | 92,61 | 90,00 | 91,00 | 92,00 |
| PP 3. Penegakan Hukum Nasional | | | | | | | |
| Meningkatnya Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Akses terhadap Keadilan | | | | | | | |
| 3.1 | Indeks Perilaku Anti Korupsi (nilai) | 3,70 | 3,84 | 3,88 | 4,06 | 4,09 | 4,14 |



SK No 168166 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|

314 Perubahan Tabel 4.20 dalam halaman IV.109

| No. | Sasaran/Indikator | *Baseline* 2019 | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Target 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola | | | | | | | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui perbaikan Tata Kelola dan Birokrasi | | | | | | | |
| 4.1 | Indeks Pelayanan Publik (nilai) | | | | | | |
| | 4.1.1 Kementerian/Lembaga | 3,83 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,10 | 4,20 |
| | 4.1.2 Provinsi | 3,36 | 3,70 | 3,88 | 3,80 | 3,90 | 4,00 |
| | 4.1.3 Kabupaten/Kota | 3,42 | 3,65 | 3,27 | 3,60 | 3,70 | 3,80 |
| PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional | | | | | | | |
| Terjaganya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan | | | | | | | |
| 5.1 | Indeks Kekuatan Militer (nilai) | 0,28 | 0,26 | 0,22 | 0,24 | 0,21 | 0,20 |
| 5.2 | Indeks Terorisme Global (nilai) | 5,07 | 4,63 | 5,5[c)] | 4,34 | 4,29 | 4,24 |
| 5.3 | Persentase Orang yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)[d)] | 53,32 | 62,80 | 62,80[e)] | >55 | >60 | >60 |
| 5.4 | Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (nilai) | 4,23[f)] | 4,23 | 3,91 | 3,20 | 3,30 | 3,40 |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) penyesuaian dengan hasil penghitungan IDI menggunakan metode baru per Juni 2022; b) data *baseline* 2019 menggunakan metode perhitungan lama; c) disesuaikan dengan *Global Terrorism Index* (GTI) 2021 yang dipublikasikan oleh Vision of Humanity pada bulan Maret 2022; d) indikator nasional yang sesuai dengan indikator global untuk SDGs; e) data tahun 2020; dan f) indikator baru tahun 2020.

315 Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.110

Selain itu, kerja sama pembangunan internasional akan terus diperkuat untuk mendorong transformasi ekonomi melalui (1) penguatan pemberian hibah yang efektif; (2) peningkatan partisipasi aktor nonpemerintah dalam kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST untuk mendorong sektor ekonomi yang produktif, mitigasi krisis iklim, dan penguatan arsitektur kesehatan global melalui pendekatan kemitraan multi pihak (KMP); (3) penguatan sinergi diplomasi publik untuk diplomasi komoditas berkelanjutan mendukung pemulihan pariwisata dan meningkatkan citra sebagai stabilisator di kawasan; serta (4) penguatan kepemimpinan Indonesia melalui (a) keanggotaan di berbagai forum/organisasi internasional antara lain, (i) Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia (MIKTA); (ii) United Nation Social Economic and Social Council (ECOSOC); (iii) pencalonan di *Executive Board* UNESCO (2023-2027); (b) peningkatan peran dalam mendorong pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM), serta perdamaian dan stabilitas keamanan global, seperti melalui Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (MPP PBB) dan penyampaian *compliance* terhadap pemenuhan HAM; dan (c) pengukuran pemanfaatan partisipasi Indonesia dalam forum/OI.

316 Perubahan alinea keempat dalam IV.110

Kegiatan-kegiatan penting pada bidang aparatur negara dan transformasi birokrasi, antara lain (1) penerapan platform tunggal digital ekosistem manajemen ASN, (2) integrasi portal pembelajaran dan pelatihan ASN, (3) koordinasi percepatan penerapan manajemen talenta ASN, (4) revitalisasi sistem rekrutmen ASN, (5) penerapan kebijakan manajemen penghargaan ASN berbasis kinerja, (6) penegakan disiplin dan pengawasan atas netralitas



SK No 168167 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | ASN, (7) integrasi layanan pada portal pelayanan publik (*e-services*), (8) Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional, (9) pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan, (10) koordinasi percepatan implementasi kebijakan SPBE, (11) koordinasi percepatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja pembangunan nasional (12) pemetaan proses bisnis dan penataan kelembagaan tematik, (13) koordinasi percepatan dan penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di instansi pusat dan daerah. |
| 317 | Perubahan Infografis *Major Project* Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT dalam halaman IV.111 | **MP Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT**<br> 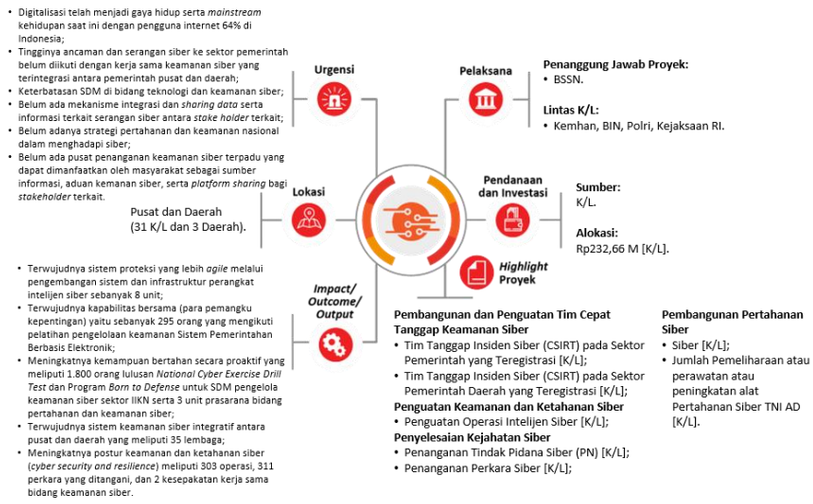 <br> |
| 318 | Perubahan Infografis *Major Project* Penguatan Keamanan Laut di Natuna dalam halaman IV.111 | **MP Penguatan Keamanan Laut di Natuna**<br> 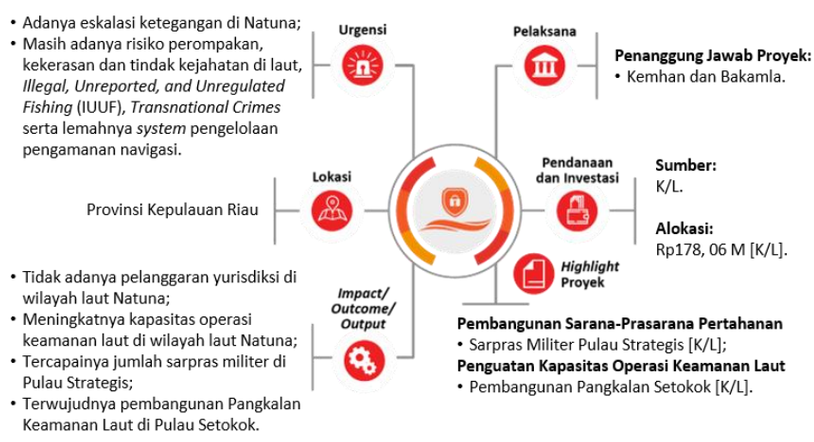 <br> |
| 319 | Perubahan alinea ketiga dalam halaman IV.112 | Kebutuhan regulasi pada PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik pada tahun 2023 sebagai upaya mendukung penataan regulasi nasional diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kerangka regulasi dalam RPJMN 2020-2024, yang meliputi<br>(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; |



SK No 168168 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | (2) Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak;<br>(3) Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha;<br>(4) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata;<br>(5) Revisi UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum;<br>(6) Revisi UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);<br>(7) Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;<br>(8) Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana; dan<br>(9) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 5/2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. |
| 320 | Perubahan alinea pertama dalam halaman IV.113 | Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 mengacu pada pencapaian target RPJMN 2020–2024 dengan ketersediaan anggaran belanja K/L yang diperkirakan lebih ketat dari tahun sebelumnya. Hal ini membuat pemilihan kegiatan/proyek harus lebih selektif dengan mempertimbangkan kesiapan dan penuntasannya. Meskipun pada tahun 2023 masih dibayangi dengan kondisi pandemi dan upaya *recovery*, penekanan pendanaan juga akan diarahkan pada kebijakan untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, peningkatan kualitas sumber daya manusia (kesehatan dan pendidikan), pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri, pembangunan rendah karbon, dan program-program pembangunan yang terkait langsung dengan peningkatan produktivitas termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara. |
| 321 | Perubahan Tabel 4.21 dalam halaman IV.113 | Tabel 4.21<br>Alokasi pada Prioritas Nasional Tahun 2023 |

| No. | Prioritas Nasional | Alokasi (Rp. Triliun) |
|---|---|---|
| 1. | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan | 54,7 |
| 2. | Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | 124,9 |
| 3. | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing | 255,5 |
| 4. | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 6,1 |
| 5. | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | 108,0 |
| 6. | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim | 8,9 |
| 7. | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | 57,6 |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Catatan: a) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional; b) Alokasi Prioritas Nasional mencakup rincian belanja K/L, Dana Transfer Khusus Fisik dan KPBU. Belum memperhitungkan Investasi Badan Usaha (BUMN/Swasta).



SK No 168169 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 322 | Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.113 dan alinea pertama dalam halaman IV.114 | Dalam mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dilakukan beberapa langkah strategis, yaitu percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transmisi energi dan respon terhadap perubahan iklim, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar. |
| 323 | Perubahan alinea kedua dalam halaman IV.114 | Dalam pelaksanaannya, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan. Untuk penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job* dilakukan melalui penyediaan lapangan usaha. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas SDM dilakukan melalui Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (Penerima Bantuan Iuran dalam Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat) dan perkuatan sistem pendidikan (Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar). |
| 324 | Penambahan alinea setelah alinea kedua dalam halaman IV.114 | Selanjutnya, untuk mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan melalui revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM. Untuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar dilakukan melalui penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital dan infrastruktur konektivitas. Dalam konteks pembangunan infrastruktur ini, dilakukan juga pengembangan fasilitas dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN), antara lain pembangunan gedung dan penataan kawasan IKN, pembangunan jaringan interkoneksi (listrik), pembangunan jaringan telekomunikasi serta pembangunan infrastruktur ICT. |
| 325 | Penambahan alinea setelah alinea ketiga dalam halaman IV.114 | Selain penekanan pada 14 *Major Project* tersebut, RKP 2023 juga mendukung persiapan Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. |
| 326 | Perubahan alinea keempat dalam halaman IV.114 | Kondisi ketersediaan anggaran yang terbatas mendorong pemerintah untuk lebih selektif dalam menentukan kegiatan ataupun proyek yang akan dilaksanakan. Selain mempertimbangkan kesiapan dan penuntasannya, integrasi kebijakan merupakan salah satu pilihan strategi yang akan dilaksanakan. Sebagai contoh *Major Project* yang bersifat lintas sektor atau kewilayahan seperti Destinasi Pariwisata Prioritas dan *Food Estate.* |
| 327 | Perubahan alinea kelima dalam halaman IV.114 | Selain integrasi kebijakan, dilakukan juga penguatan integrasi sumber pendanaan, baik dari APBN seperti melalui belanja K/L, belanja non-K/L (subsidi/*Public Service Obligation*), dan Transfer ke Daerah (DAK, Hibah Daerah), maupun dari non-APBN seperti swasta dan BUMN. Dengan kondisi APBN yang terbatas, keterlibatan BUMN dan swasta sangat penting untuk didorong agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih optimal. |
| 328 | Perubahan alinea pertama dalam halaman V.2 | Untuk mendukung pencapaian prioritas nasional, diperlukan kerangka kelembagaan sebagai berikut:<br>Prioritas Nasional 3 "Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing"<br>(1) Pembentukan Gugus Tugas Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)<br>Usulan KK pada Prioritas Nasional 3 ini sesuai dengan amanat RKP 2023, yakni Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, yang |



SK No 168170 A

didukung dengan UU No. 6/2014 tentang Desa, serta UU No. 13/2011 tentang Fakir Miskin. Reformasi sistem perlindungan sosial khususnya di masa pascapandemi COVID-19 difokuskan pada penyempurnaan penyelenggaraan program bantuan dan jaminan sosial yang lebih akurat, terintegrasi, dan adaptif. Salah satunya melalui peningkatan keterlibatan aktif serta kapasitas pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pemutakhiran, perluasan, dan transformasi data penduduk miskin dan rentan menjadi registrasi sosial-ekonomi melalui monografi desa/kelurahan digital secara berkala.

Terkait hal tersebut, pembentukan Gugus Tugas Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dilakukan untuk menguatkan dan mengintegrasikan kelembagaan yang sudah ada terutama dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), perencanaan dan penganggaran berbasis data, serta penyelenggaraan layanan sosial dan rujukan bagi kelompok miskin dan rentan. Pemutakhiran DTKS langsung oleh desa/kelurahan menggunakan sistem digitalisasi monografi desa/kelurahan berperan penting untuk membantu ketepatan sasaran program dan memotong rantai birokrasi pemutakhiran data yang berlapis, yang bermuara pada pengalokasian APBN untuk perlindungan sosial yang berdayaguna lebih tinggi untuk mengentaskan kemiskinan.

(2) Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKNV)

Usulan pembentukan Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKNV) dan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV) pada Prioritas Nasional 3 telah diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai salah satu prioritas penataan kelembagaan dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Dengan pembentukan TKNV dan TKDV, diharapkan dapat terpenuhi kebutuhan pasar kerja dan terjadi penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pembentukan TKNV dan TKDV ini telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 mengenai Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Pembentukan Tim Koordinasi ini bertujuan untuk a) mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait di tingkat pusat dan daerah; dan b) menyusun strategi nasional pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sebagai pedoman revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

Selanjutnya, melalui revitalisasi lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi diharapkan akan mengurangi tingkat pengangguran terbuka, khususnya SDM yang berlatar belakang pendidikan vokasi.

(3) Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV)

Dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia, salah satu upaya strategis diarahkan pada program

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | peningkatan keahlian tenaga kerja melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Hal ini diwujudkan dengan penguatan kelembagaan pelatihan vokasi di seluruh Indonesia untuk menjamin keterpaduan berbagai program pelatihan vokasi yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, daerah, lembaga swasta maupun instansi vertikal lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan upaya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan melalui Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV) untuk memenuhi kebutuhan kerja masa depan.<br><br>Secara umum pembentukan TKDV bertujuan mewadahi koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program vokasi nasional dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien baik di tingkat pusat maupun daerah, serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri. TKDV diharapkan menjadi semacam forum besar yang memayungi berbagai bentuk forum lain yang lebih spesifik dan tematik. Guna mempercepat terbentuknya TKDV, pemangku kepentingan di daerah diharapkan dapat memanfaatkan modalitas dan jejaring yang sudah dimiliki, antara lain Pusat Pembangunan Keahlian (*Skill Development Center*) yang dapat ditransformasi menjadi TKDV. |
| 329 | Penghapusan alinea pertama dalam halaman V.3 | (dihapus) |
| 330 | Penambahan alinea sebelum alinea pertama dalam halaman V.7 | Kerangka regulasi yang bersifat lintas prioritas nasional adalah sebagai berikut:<br>(1) Revisi Undang–Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;<br>(2) Rancangan Undang–Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045. |
| 331 | Perubahan alinea pertama dalam halaman V.7 sampai alinea pertama dalam halaman V.8 | Kerangka regulasi yang mendukung pencapaian prioritas nasional yang memuat analisis urgensi dan target pelaksanaan pada RKP Tahun 2023, disampaikan sebagai berikut<br><br>Prioritas Nasional 1 "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan"<br><br>A. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang telah masuk ke dalam Prolegnas dan Progsun sebagai berikut<br><br>(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian<br><br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi, serta KP Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi. Kerangka regulasi ini akan menghapus UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian dimana UU ini tidak dapat mengakomodir permasalahan koperasi yang terjadi saat ini. Dengan adanya RUU ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan investasi/simpanan di koperasi. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa MP Pengelolaan Terpadu UMKM.<br><br>(2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen |



SK No 168172 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi, serta KP Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan. Kerangka Regulasi ini bertujuan sebagai penyesuaian atas kerangka pengaturan perlindungan konsumen di Indonesia sebelumnya yang diatur pada UU No. 8 Tahun 1999. Mempertimbangkan sektor perdagangan yang berkembang cepat seiring kemajuan teknologi informasi. Salah satunya ditandai dengan pertumbuhan *e-commerce* yang sedemikian pesat, maka diperlukan substansi pengaturan yang komprehensif dan akomodatif bagi konsumen maupun penyedia barang dan jasa sebagai bagian dari pelaksanaan kepastian hukum.<br>(3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Digital Indonesia Tahun 2023 – 2045<br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Rill, dan Industrialisasi dan PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta KP Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital dan KP Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.0. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan pemangku kepentingan terkait yang mendukung pengembangan industri digital nasional. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Industri 4.0 di Subsektor Prioritas.<br>B. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang belum masuk ke dalam Prolegnas dan Progsun sebagai berikut<br>(1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Raja Ampat<br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Rill, dan Industrialisasi serta KP Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok. Kerangka regulasi ini merupakan arahan dari Peraturan Presiden No. 14/2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 64/2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan, dan mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Sektor Pariwisata pada Peraturan Presiden No.18/2020 tentang RPJMN 2020-2024. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa MP Destinasi Pariwisata Prioritas.<br>(2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Labuan Bajo<br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Rill, dan Industrialisasi serta KP Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok. Kerangka regulasi ini merupakan arahan dari Peraturan Presiden No. 14/2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 64/2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan, dan mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Sektor Pariwisata pada Peraturan Presiden No.18/2020 tentang |



SK No 168173 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | RPJMN 2020-2024. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa MP Destinasi Pariwisata Prioritas.<br><br>(3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bromo-Tengger-Semeru<br><br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Rill, dan Industrialisasi serta KP Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok. Kerangka regulasi ini merupakan arahan dari Peraturan Presiden No. 14/2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 64/2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan, dan mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Sektor Pariwisata pada Peraturan Presiden No.18/2020 tentang RPJMN 2020-2024. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa MP Destinasi Pariwisata Prioritas.<br><br>(4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Wakatobi<br><br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Rill, dan Industrialisasi serta KP Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok. Kerangka regulasi ini merupakan arahan dari Peraturan Presiden No. 14/2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 64/2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan, dan mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Sektor Pariwisata pada Peraturan Presiden No.18/2020 tentang RPJMN 2020-2024. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa MP Destinasi Pariwisata Prioritas.<br><br>(5) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Toba<br><br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Rill, dan Industrialisasi serta KP Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok. Kerangka regulasi ini merupakan arahan dari Peraturan Presiden No. 14/2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 64/2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan, dan mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Sektor Pariwisata pada Peraturan Presiden No.18/2020 tentang RPJMN 2020-2024. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa MP Destinasi Pariwisata Prioritas.<br><br>(6) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan<br><br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Rill, dan Industrialisasi serta KP Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, termasuk wisata alam, yang |



SK No 168174 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | didukung penguatan rantai pasok. Kerangka regulasi ini merupakan arahan dari Peraturan Presiden No. 14/2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 64/2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan, dan mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional Sektor Pariwisata pada Peraturan Presiden No.18/2020 tentang RPJMN 2020-2024. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa MP Destinasi Pariwisata Prioritas.<br><br>(7) Rancangan Peraturan Presiden tentang Transformasi Ekonomi Bali<br><br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung KP Pengembangan Kawasan Strategis; KP Pengembangan Kawasan Perkotaan; KP Perluasan Akses, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Dasar, Ekonomi, dan Konektivitas; serta KP Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kerangka regulasi ini bertujuan sebagai kerangka pengaturan yang mendorong pengembangan sumber- sumber ekonomi baru dan diversifikasi ekonomi bagi Bali, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, peningkatan aksesibilitas, serta transformasi digital. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa MP seperti MP Pengelolaan Terpadu UMKM, MP Industri 4.0 pada 7 (tujuh) Subsektor Industri Prioritas, MP Destinasi Pariwisata Nasional. Dalam kaitannya dengan PN lain, KR juga dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; serta PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. |
| 332 | Perubahan alinea kedua dalam halaman V.8 sampai alinea ketiga dalam halaman V.11 | Prioritas Nasional 2 "Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan"<br><br>A. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang telah masuk ke dalam Prolegnas dan Progsun sebagai berikut<br><br>(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara<br><br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini diperlukan untuk perubahan-perubahan pada Undang-Undang No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. Kerangka regulasi ini diperlukan dalam rangka pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).<br><br>(2) Revisi Peraturan Presiden tentang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya<br><br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pengembangan Wilayah Jawa-Bali serta KP Pengembangan Kawasan Strategis. Kerangka regulasi ini telah masuk dalam waktu revisi serta muatan perlu disesuaikan dengan muatan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 12/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Kerangka regulasi ini juga dilakukan untuk mengakomodasi dinamika pembangunan yang ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya |



SK No 168175 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | seperti Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024, Perpres No. 79/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal–Pemalang serta Rencana Induk Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur dan sekitarnya. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya.<br><br>(3) Revisi Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita)<br><br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pengembangan Wilayah Jawa-Bali serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini telah masuk dalam waktu revisi serta muatan perlu disesuaikan dengan muatan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dimana terdapat sinkronisasi regulasi pengaturan pemanfaatan ruang tingkat nasional yang mencakup matra darat dan matra laut. Revisi RTRWN juga dilakukan untuk mengakomodasi dinamika pembangunan yang ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti: Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan Perpres No. 109/2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pengembangan Wilayah Metropolitan Denpasar (Sarbagita).<br><br>(4) Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Subak-Bali *Landscape*<br><br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pengembangan Wilayah Jawa – Bali serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini merujuk pada Pasal 6 UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja terkait peningkatan ekosistem investasi yang dilakukan melalui penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha melalui pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang didasarkan pada RDTR. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk melestarikan Kawasan Subak-Bali *Landscape* sebagai warisan budaya dunia melalui perwujudan tata ruang Kawasan Subak-Bali *Landscape* yang berkualitas sebagai daerah irigasi tradisional, kawasan pertanian pangan tradisional, dan kawasan kegiatan adat yang ditetapkan sebagai warisan budaya dunia, serta mengembangkan ekonomi lokal masyarakat dengan mendorong komoditas pertanian dan pariwisata yang berdaya saing serta berbasis pada adat budaya dan kearifan lokal masyarakat sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.<br><br>(5) Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Ekosistem Leuser<br><br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pengembangan Wilayah Sumatera serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam PP No. 13/2017 tentang Perubahan Atas PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) dilakukan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengintegrasikan pembangunan dan pengelolaan |



SK No 168176 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | kawasan yang bernilai strategis nasional dalam mendukung penataan ruang wilayah nasional sesuai dengan amanat PP No. 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. |
| | | (6) Revisi Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang RTR Pulau Kalimantan<br><br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini merupakan rencana rinci tata ruang sebagai penjabaran Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Kalimantan yang bertujuan sebagai acuan bagi penyusunan rencana teknis sektor dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang serta dalam penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di wilayah Kalimantan dan wilayah pemerintahan IKN. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). |
| | | (7) Rancangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Selatan<br><br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini mengacu pada UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk, secara umum penyelenggaraan penataan ruang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga mampu mengembangkan ruang yang terbatas secara produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan tujuan tersebut, kepentingan sosial dan masyarakat tentunya menjadi aspek penting dalam penyusunan Peraturan Kepala Badan Otorita tentang RDTR WP IKN Selatan. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). |
| | | (8) Peraturan Kepala Otorita tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Simpang Samboja<br><br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini mengacu pada UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk, secara umum penyelenggaraan penataan ruang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga mampu mengembangkan ruang yang terbatas secara produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan tujuan tersebut, kepentingan sosial dan masyarakat tentunya menjadi aspek penting dalam penyusunan Peraturan Kepala Badan Otorita tentang RDTR WP IKN Simpang Samboja. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). |
| | | (9) Peraturan Kepala Otorita tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Utara<br><br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini mengacu pada UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk, secara umum penyelenggaraan penataan ruang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, |



SK No 168177 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | sosial, dan lingkungan sehingga mampu mengembangkan ruang yang terbatas secara produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan tujuan tersebut, kepentingan sosial dan masyarakat tentunya menjadi aspek penting dalam penyusunan Peraturan Kepala Badan Otorita tentang RDTR WP IKN Utara. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). |
| | | (10) Peraturan Kepala Otorita tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Kuala Samboja<br><br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini mengacu pada UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk, secara umum penyelenggaraan penataan ruang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga mampu mengembangkan ruang yang terbatas secara produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan tujuan tersebut, kepentingan sosial dan masyarakat tentunya menjadi aspek penting dalam penyusunan Peraturan Kepala Badan Otorita tentang RDTR WP IKN Kuala Samboja. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). |
| | | (11) Peraturan Kepala Otorita tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP IKN Muara Jawa<br><br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini mengacu pada UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk, secara umum penyelenggaraan penataan ruang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga mampu mengembangkan ruang yang terbatas secara produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan tujuan tersebut, kepentingan sosial dan masyarakat tentunya menjadi aspek penting dalam penyusunan Peraturan Kepala Badan Otorita tentang RDTR WP IKN Muara Jawa. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). |
| | | B. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang belum masuk ke dalam Prolegnas dan Progsun sebagai berikut |
| | | (1) Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan<br><br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini bertujuan sebagai kerangka pengaturan dalam mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan perkotaan yang semakin kompleks, serta untuk mewujudkan pembangunan dan pengelolaan perkotaan Indonesia di masa depan yang berkelanjutan secara lingkungan, sosial, dan ekonomi. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa MP seperti MP Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar; MP Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong; dan MP Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Dalam kaitannya dengan PN lain, KR juga dibutuhkan |



SK No 168178 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | untuk mendukung pencapaian PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, khususnya terkait pengaturan pembangunan fisik dan infrastruktur perkotaan. |
| | | (2) Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Perubahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia<br><br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Jawa-Bali serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan dan KP 5 Kelembagaan dan Keuangan Daerah. Kerangka regulasi ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara bahwa diperlukan penyesuaian substansi bersifat khusus (pengaturan sistem dan kewenangan khusus bagi Jakarta dalam beberapa urusan pemerintahan), serta dalam rangka penanaman modal menjadi salah satu kewenangan khusus yang akan diberikan kepada Jakarta tujuannya untuk kemudahan investasi, akan didiskusikan dengan K/L terkait. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). |
| | | (3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembagian Wilayah Ibu Kota Nusantara<br><br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini mengacu pada UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara yang membagi wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 ha, terdiri atas 51 wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan; dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha. Kerangka regulasi ini mengatur pembagian wilayah menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang yang akan diatur oleh peraturan setingkat Perpres, bukan peraturan dibawahnya. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara. |
| | | (4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemindahan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional<br><br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Pembangunan Wilayah Kalimantan serta KP Pengembangan Kawasan Perkotaan. Kerangka regulasi ini mengacu pada UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara yang mengatur mengenai skema pemindahan Aparatur Sipil Negara dan Unit Organisasi Kementerian/Lembaga ke Ibu Kota Nusantara. Skema pemindahan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional diperinci dalam peraturan turunan melalui Perpres tentang Pemindahan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ini. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara. |



SK No 168179 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 333 | Perubahan alinea keempat dalam halaman V.11 sampai alinea ketiga dalam halaman V.12 | Prioritas Nasional 3 "Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing"<br>A. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang telah masuk ke dalam Prolegnas dan Progsun sebagai berikut<br>(1) Rancangan Peraturan Menteri PPN tentang Pembentukan Gugus Tugas Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)<br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, serta KP Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran. Kerangka Regulasi ini bertujuan untuk mendorong pembentukan Sekretariat Nasional Registrasi Sosial Ekonomi guna mengatur penyelenggaraan tata kelola data Registrasi Sosial Ekonomi antar instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Kerangka Regulasi ini dibutuhkan juga untuk mendukung MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.<br>B. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang belum masuk ke dalam Prolegnas dan Progsun sebagai berikut<br>(1) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan<br>Kerangka regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, serta KP Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk menyesuaikan sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan perkembangan hukum dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam memberikan kemudahan berusaha. Kerangka regulasi ini dibutuhkan juga untuk mendukung MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. |
| 334 | Perubahan alinea keempat dalam halaman V.12 sampai alinea pertama dalam halaman V.13 | Prioritas Nasional 5 "Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar"<br>A. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang telah masuk ke dalam Prolegnas dan Progsun sebagai berikut<br>(1) Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan<br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Infrastruktur Pelayanan Dasar, serta KP Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, Kerangka regulasi ini turut mendukung ProP Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR, ProP Pembinaan dan Pendidikan SDM Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Pencarian dan Pertolongan.<br>B. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang belum masuk kedalam Prolegnas dan Progsun sebagai berikut<br>(1) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan<br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Infrastruktur Ekonomi, serta KP Konektivitas Jalan. Kerangka regulasi ini merupakan revisi dari PP No. 34/2006 tentang jalan. Selain itu, Kerangka regulasi ini juga turut mendukung pencapaian MP Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung, Jalan Trans pada 18 Pulau |



SK No 168180 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | Tertinggal, Terluar, dan Terdepan dan Jalan Trans Papua Merauke Sorong.<br>(2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaan<br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Infrastruktur Ekonomi, serta KP Konektivitas Jalan. Kerangka regulasi ini merupakan pendelegasian UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, Kerangka regulasi ini diharapkan menjadi dukungan Pemerintah dalam pembangunan angkutan umum massal perkotaan dengan tujuan mendorong peningkatan daya saing kawasan perkotaan dan pembangunan yang berkelanjutan, dan mempercepat penyelenggaraan angkutan umum massal di kawasan perkotaan yang telah mengembangkan atau memiliki kebijakan mobilitas kawasan perkotaan. |
| 335 | Penambahan alinea setelah alinea pertama dalam halaman V.13 | Prioritas Nasional 6 "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim"<br>Kebutuhan Kerangka Regulasi yang belum masuk kedalam Prolegnas dan Progsun sebagai berikut<br>(1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia Pasca 2020 (Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan Post 2020/IBSAP Post 2020)<br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup serta KP Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, termasuk aspek pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berlanjutan. Kerangka regulasi ini merupakan arahan dari UU No. 5/1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) serta mandat dari UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang telah menetapkan kelestarian keanekaragaman hayati sebagai salah satu pilar pembangunan. Dengan adanya kerangka regulasi ini, diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang operasional bagi pelaksanaan strategi dan rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati di berbagai sektor pembangunan. Selain itu, kerangka regulasi ini turut mendukung pencapaian beberapa PN dan MP dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan keanekaragaman hayati. |
| 336 | Perubahan alinea kedua dalam halaman V.13 sampai alinea pertama dalam halaman V.15 | Prioritas Nasional 7 "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik"<br>A. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang telah masuk kedalam Prolegnas dan Progsun sebagai berikut<br>(1) Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana<br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional serta KP Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata. Kerangka regulasi ini dilatarbelakangi karena adanya kebutuhan suatu mekanisme baru terkait penyitaan atau perampasan aset hasil tindak pidana yang dapat dilakukan tanpa harus dikaitkan dengan penghukuman terhadap tersangka atau terdakwa. Mekanisme tersebut dikenal dengan sistem perampasan aset melalui prosedur gugatan perdata terhadap bendanya *(in rem* |



SK No 168181 A

*forfeiture)*, sehingga pemulihan atau pengambilan aset hasil tindak pidana dapat dilaksanakan tanpa menunggu putusan pengadilan dalam perkara pidana *Non Conviction Based* (NCB) *asset forfeiture*. RUU ini diharapkan dapat mendorong pengelolaan aset yang profesional, transparan, akuntabel, dan terjaga nilai ekonomisnya.

B. Kebutuhan Kerangka Regulasi yang belum masuk kedalam Prolegnas dan Progsun sebagai berikut

(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional serta KP Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata. Kerangka regulasi ini merupakan bentuk respons pemerintah terhadap perkembangan dalam bidang perekonomian dan perdagangan, serta kebutuhan masyarakat terhadap perangkat hukum dalam pembiayaan usaha khususnya penyelesaian utang piutang yang tidak efisien dan berbiaya tinggi. Penyelesaian berbagai permasalahan dalam praktik penyelenggaraan kepailitan dan PKPU dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi pelaku usaha sehingga diharapkan dapat mendorong iklim investasi yang kompetitif.

(2) Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional serta KP Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata. Kerangka Regulasi ini dilatarbelakangi adanya kebutuhan perubahan pengaturan mengenai ruang lingkup objek jaminan benda bergerak, termasuk gadai dan jaminan resi gudang yang masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Penyusunan RUU ini juga dibutuhkan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan terkait dengan gadai dan jaminan atas kapal dan pesawat (hipotek) yang masih merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta pengaturan lain yang masih tersebar di masing-masing undang-undang. Unifikasi pengaturan mengenai jaminan kebendaan sejalan dengan kebutuhan sistem jaminan kebendaan yang terintegrasi dengan sistem informasi keuangan dan pembiayaan. Kerangka regulasi ini juga dimaksudkan untuk menyambut perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan merespons dunia usaha agar proses pembiayaan dapat dilaksanakan secara cepat, mudah, aman, dan memberikan kepastian hukum.

(3) Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional serta KP Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata. Kerangka regulasi ini dibutuhkan untuk memperbaharui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku lebih dari 10 tahun. Pembaruan substansi pengaturan badan usaha melalui penyusunan RUU ini diharapkan dapat mengakomodir pengaturan mengenai Persekutuan Perdata, Persekutuan Komanditer Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). RUU Badan Usaha mengupayakan adanya unifikasi ke dalam satu undang-undang. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk menciptakan dasar hukum yang mendukung kemudahan berinvestasi dan memperbaiki iklim berusaha di Indonesia.

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | (4) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata<br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional serta KP Penguatan Tata Kelola dan Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi. Peraturan perundang-undangan terkait hukum acara perdata yang berlaku saat ini, tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kerangka regulasi ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pengaturan hukum acara perdata terkait substansi yang menimbulkan multitafsir, materi muatan yang tidak relevan dengan perkembangan zaman dan tidak optimal dalam mendukung penyelesaian sengketa di bidang perdata. |
| | | (5) Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum<br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional serta KP Peningkatan Akses Terhadap Keadilan. Kerangka regulasi ini diharapkan agar adanya perluasan kategori penerima bantuan hukum, sehingga tidak hanya menitikberatkan pada orang atau kelompok orang miskin saja, tetapi termasuk kelompok rentan lain, misalnya anak yang berhadapan dengan hukum, perempuan yang berhadapan dengan hukum, atau lainnya. Fokus perluasan penerima bantuan hukum dalam revisi UU Bantuan Hukum bukan hanya kepada miskin secara ekonomi, namun termasuk tidak mampu dalam hal minim pengetahuan dan akses terhadap keadilan. |
| | | (6) Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)<br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional serta KP Peningkatan Akses Terhadap Keadilan. Dalam perkembangannya sepanjang tahun 1999 sampai dengan pertengahan tahun 2022, terjadi perkembangan hukum yang cukup signifikan. Poin utama perubahan dikarenakan- dalam dua dekade implementasi UU HAM setelah reformasi, diperlukan evaluasi kembali implementasi UU HAM, termasuk menyesuaikan dengan perkembangan dinamika nasional dan global, serta sinergi antar Lembaga-Lembaga pelaksana HAM. |
| | | (7) Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi<br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Penegakan Hukum Nasional serta KP Penguatan Tata Kelola dan Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi. Kerangka regulasi ini merupakan tindak lanjut dari amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU/IV/2006 yang membatalkan secara keseluruhan UU No. 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sejak tahun 2006 hingga saat ini, belum ada UU baru yang khusus mengatur mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai upaya proses pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi, pemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya. |
| | | (8) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik<br>Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung PP Konsolidasi Demokrasi serta KP Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi. Kerangka regulasi ini dimaksudkan untuk mempertajam materi muatan tentang penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan |



SK No 168183 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| | | keuangan kepada partai politik. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan demokrasi yang lebih berintegritas. |
| 337 | Penghapusan sub bab 5.2.2 Hasil Penajaman Kerangka Regulasi dalam halaman V.15 sampai halaman V.16 | (dihapus) |
| 338 | Perubahan alinea kelima dalam halaman V.17 | (4) Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan RKP<br>Mekanisme evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2023 terdiri dari dua tahap, yaitu:<br>(a) Evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2023 Tahap I, adalah evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023 yang dilaksanakan berdasarkan data capaian pelaksanaan pembangunan hingga triwulan III. Alur Evaluasi RKP Tahun 2023 Tahap I sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.7 terdiri dari (i) penyusunan kertas kerja evaluasi dan konfirmasi data *e-Monev;* (ii) identifikasi data capaian pembangunan melalui Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian (Evadal) per Bidang Kementerian Koordinator (Kemenko) serta Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) bersama penanggung jawab (PJ) PN, PP, KP, ProP, dan MP Kementerian PPN/Bappenas dengan seluruh K/L Pelaksana; (iii) pengumpulan data dan informasi pencapaian PN, PP, KP, ProP, MP, dan RO K/L; (iv) pengolahan dan analisis data; serta (v) perumusan alternatif usulan tema dan sasaran pembangunan tahun 2025. Hasil evaluasi ini sebagai masukan dalam persiapan penyusunan tema dan sasaran pembangunan dalam RKP Tahun 2025. |
| 339 | Perubahan alinea pertama dalam halaman V.18 | (b) Evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2023 Tahap II, adalah evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023 yang dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran data capaian pelaksanaan pembangunan hingga triwulan IV. Alur Evaluasi RKP Tahun 2023 Tahap II sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.8 terdiri dari (i) pemutakhiran data pada kertas kerja evaluasi pelaksanaan RKP oleh para PJ PN, PP, KP, ProP, MP di Kementerian PPN/Bappenas maupun K/L pelaksana; (ii) pertemuan untuk melakukan konfirmasi/finalisasi data dengan para PJ PN, PP, KP, ProP, MP di Kementerian PPN/Bappenas dan K/L pelaksana; (iii) pengolahan data dan penulisan laporan evaluasi RKP Tahun 2023; serta (iv) hasil pemutakhiran yang akan digunakan dalam penyusunan naskah RKP Tahun 2025, yaitu pada Subbab Evaluasi RKP. |
| 340 | Perubahan alinea kedua dalam halaman V.18 | (5) Metode Evaluasi Pelaksanaan RKP .<br>Metode yang digunakan untuk menganalisis kinerja pencapaian pembangunan pada evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2023 yaitu (a) evaluasi kinerja efektivitas dengan menggunakan metode analisis gap dan rata-rata tertimbang; serta (b) evaluasi kinerja optimalisasi dengan menggunakan metode indeks optimalisasi. Lebih rinci, metodologi evaluasi pelaksanaan RKP untuk mengukur kinerja pencapaian pembangunan dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut. |



SK No 168184 A

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 341 | Perubahan Tabel 5.2 dalam halaman V.20 | |

| Aspek | Uraian |
|---|---|
| (a) Kinerja optimalisasi PN | Penghitungan dilakukan dengan merata-ratakan angka capaian sasaran PN dan rata-rata kinerja optimalisasi seluruh PP pada PN |
| (b) Kinerja optimalisasi PP | Penghitungan dilakukan dengan merata-ratakan angka capaian sasaran PP dan rata-rata kinerja optimalisasi seluruh KP pada PP |
| (c) Kinerja optimalisasi KP | Penghitungan dilakukan dengan merata-ratakan angka capaian sasaran KP dan rata-rata kinerja optimalisasi seluruh ProP pada KP |
| (d) Kinerja optimalisasi ProP | Penghitungan dilakukan dengan menggunakan bobot tertentu pada kinerja dukungan *output* (RO) K/L, penyerapan anggaran, dan capaian sasaran ProP |
| (e) Kinerja optimalisasi MP | Penghitungan dilakukan dengan menggunakan bobot tertentu pada kinerja dukungan *output* (RO) K/L, penyerapan anggaran, dan capaian sasaran MP |
| (1) Kategori Kinerja | Kategori kinerja terdiri atas<br>1. baik, notifikasi hijau, capaian >90 persen.<br>2. cukup, notifikasi kuning, capaian 60–90 persen.<br>3. kurang, notifikasi merah, capaian <60 persen.<br>4. N/A, notifikasi putih, tidak memiliki nilai capaian. |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

| | | |
|---|---|---|
| 342 | Perubahan alinea kedua dalam halaman V.21 | (2) Ruang Lingkup Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan<br>Ruang lingkup pengendalian pelaksanaan RKP Tahun 2023 berupa rekomendasi tindakan korektif atas pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih). Dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan pada RKP Tahun 2023, rekomendasi tindakan korektif terhadap PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) hanya mencakup tindakan konstruktif yaitu *refocusing* atau penajaman/pemfokusan kembali langkah percepatan pencapaian target PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih). Berdasarkan ruang lingkup pengendalian pelaksanaan pembangunan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.9, pelaksanaan pengendalian RKP Tahun 2023 dilakukan pada semester kedua tahun 2023. |
| 343 | Perubahan alinea keempat dalam halaman V.21 | (4) Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan<br>Pengendalian dilakukan melalui penilaian (*assessment*) atas PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) berdasarkan tiga aspek utama yaitu perencanaan strategis, manajemen pelaksanaan, dan kinerja pembangunan. Proses pengendalian pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) dilakukan melalui empat tahap, yaitu: (a) penentuan fokus pengendalian; (b) *assessment* berupa pengisian instrumen pengendalian dan *crosscheck* lapangan konfirmasi atas pelaksanaan pembangunan; (c) perumusan tindakan konstruktif; serta (d) pengendalian pelaksanaan tindakan konstruktif. Adapun mekanisme pengendalian RKP secara rinci dapat dilihat pada Gambar 5.10. |
| 344 | Penghapusan alinea kelima dalam halaman V.21 | (dihapus) |



SK No 168185 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| No. | Perihal Perubahan | Pemutakhiran RKP Tahun 2023 |
|---|---|---|
| 345 | Perubahan alinea pertama dalam halaman V.22 | (5) Instrumen Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan<br><br>Instrumen pengendalian pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih) dalam RKP Tahun 2023 meliputi (a) deskripsi dan *logical framework* PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih); (b) *self assessment* atas perencanaan strategis, manajemen pelaksanaan, dan kinerja pembangunan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih); serta (c) *early warning* mitigasi terhadap pelaksanaan PN/PP/KP/ProP/MP (terpilih), utamanya pada ProP terpilih sebagaimana pada Tabel 5.3. |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman



SK No 117930 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 134 TAHUN 2022

TENTANG

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2023

# MATRIKS PEMBANGUNAN

SK No 017430 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

# MATRIKS PEMBANGUNAN RKP TAHUN 2023

## PRIORITAS NASIONAL 1 : MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01<br>PN: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan | 01 - Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan | 01 - Porsi EBT dalam bauran energi nasional | | 17,90 % | 54.659.691,3 | |
| | | 02 - Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | | 94,00 | | |
| | | 03 - Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan | | 11 WPP | | |
| | 02 - Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian | 01 - Rasio kewirausahaan nasional | | 3,21 % | | |
| | | 02 - Pertumbuhan PDB pertanian | | 3,2—3,6 % | | |
| | | 03 - Pertumbuhan PDB perikanan | | 5,00—6,00 % | | |
| | | 04 - Pertumbuhan PDB industri pengolahan | | 5,30—5,60 % | | |
| | | 05 - Kontribusi PDB industri pengolahan | | 20,60 % | | |
| | | 06 - Nilai devisa pariwisata | | 2,07—9,05 miliar US$ | | |
| | | 07 - Kontribusi PDB pariwisata | | 4,10 % | | |



SK No 093002 C

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 08 - Penyediaan lapangan kerja per tahun | | 2,7—3,1 juta orang | | |
| | | 09 - Pertumbuhan investasi (PMTB) | | 6,1—6,3 % | | |
| | | 10 - Pertumbuhan ekspor industri pengolahan | | 11,18 % | | |
| | | 11 - Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa | | 5,3—6,6 % | | |
| | | 12 - Rasio perpajakan terhadap PDB | | 9,60 % | | |
| 01.01<br>PP: Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) | 01 - Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) | 01 - Kapasitas terpasang pembangkit EBT (Kumulatif) | 2, 5 | 14,31 gigawatt | 3.980.528,2 | |
| | | 02 - Pemanfaatan *biofuel* untuk domestik | 2, 5 | 10,65 juta kilo liter | | |
| 01.01.01<br>KP: Akselerasi Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan | 01 - Meningkatnya akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan | 01 - Kapasitas terpasang tambahan pembangkit EBT | 2, 5 | 1.857,7 megawatt | 177.742,3 | |
| 01.01.01.01<br>PRO-P: Percepatan Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan | 01 - Terlaksananya percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan | 01 - Penambahan kapasitas terpasang tambahan PLT Air | 2, 5 | 409,3 megawatt | 177.742,3 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAK |
| | | 02 - Penambahan kapasitas terpasang tambahan PLT Panas Bumi | 2, 5 | 20 megawatt | | |
| | | 03 - Penambahan kapasitas terpasang tambahan PLT Bioenergi | 2, 5 | 87 megawatt | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 04 - Penambahan kapasitas terpasang tambahan PLTS | 2, 5 | 1.308 megawatt | | |
| | | 05 - Kapasitas terpasang tambahan PLT Bayu | 2, 5 | 33 megawatt | | |
| 01.01.02<br>KP: Peningkatan Pasokan Bahan Bakar Nabati | 01 - Meningkatnya pasokan bahan bakar nabati | 01 - Jumlah pemanfaatan *biofuel* untuk domestik | 5 | 10,65 juta kilo liter | 3.784.317,7 | |
| 01.01.02.01<br>PRO-P: Akselerasi Pengembangan BBN | 01 - Terlaksananya akselerasi pengembangan BBN | 01 - Persentase mandatori pencampuran BBN ke dalam bahan bakar fosil | 5 | 30 % | 3.784.317,7 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 01.01.03<br>KP: Peningkatan Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi | 01 - Meningkatnya pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi | 01 - Intensitas energi primer | 2 | 135,2 SBM/miliar rupiah | 13.559,9 | |
| | | 02 - Penurunan intensitas energi final | 2 | 0,8 SBM/miliar rupiah | | |
| 01.01.03.01<br>PRO-P: Perluasan Penerapan Efisiensi Energi | 01 - Terlaksananya perluasan penerapan efisiensi energi | 01 - Persentase penyelesaian penyusunan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) | 2 | 100 % | 13.559,9 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | 02 - Jumlah kendaraan dinas listrik berbasis baterai | 5 | 1.602 Unit | | |
| 01.01.04<br>KP: Peningkatan Pemenuhan Energi Domestik | 01 - Meningkatnya pemenuhan energi domestik | 01 - Alokasi batu bara untuk Kepentingan dalam Negeri (DMO) yang direncanakan | 2, 5 | 184 juta ton | 3.945,5 | |
| | | 02 - Persentase pemanfaatan gas bumi domestik | 2, 5 | 67 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.04.01<br>PRO-P: Pemenuhan Energi yang Kompetitif bagi Industri | 01 - Terlaksananya pemenuhan energi yang kompetitif | 01 - Jumlah laporan pemenuhan energi yang kompetitif bagi industri | 2 | 1 laporan | 3.945,5 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | 02 - Jumlah produksi gas bumi | 2, 5 | 1.199 ribu BOPD | | |
| 01.01.05<br>KP: Pengembangan Industri Pendukung EBT | 01 - Meningkatnya pengembangan industri pendukung EBT | 01 - TKDN sektor pembangkit EBT | 2 | 44,6 % | 962,7 | |
| 01.01.05.01<br>PRO-P: Pengembangan Industri EBT | 01 - Terlaksananya pengembangan industri EBT | 01 - TKDN Sektor EBT dalam rangka mendukung kemandirian energi nasional | 2 | 55,45 skala 100 | 962,7 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 01.02<br>PP: Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi | 01 - Meningkatnya kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi | 01 - Produktivitas air (*water productivity*) | 2 | 3,63 kg/m³ | 16.901.731,9 | |
| 01.02.01<br>KP: Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif) | 01 - Meningkatnya pemantapan kawasan berfungsi lindung (kumulatif) | 01 - Luas minimal kawasan berfungsi lindung (kumulatif) | 5 | 65 juta ha | 277.517,3 | |
| 01.02.01.01<br>PRO-P: Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi | 01 - Terlaksananya inventarisasi jasa lingkungan tinggi | 01 - Luas area dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi | 5 | 7 ekoregion | 31.018,0 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 01.02.01.02<br>PRO-P: Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif | 01 - Terlaksananya perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional secara partisipatif | 01 - Desa dalam dan sekitar kawasan konservasi | 5 | 3.500 desa | 246.499,4 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.02<br>KP: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan | 01 - Meningkatnya pengelolaan hutan berkelanjutan | 01 - Luas kawasan hutan produksi | 2 | 34,5 juta ha | 337.066,8 | |
| 01.02.02.01<br>PRO-P: Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan | 01 - Terlaksananya optimalisasi hasil hutan dan jasa lingkungan | 01 - Jumlah unit usaha pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan | 5 | 30 juta $m^3$ | 15.567,6 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 01.02.02.02<br>PRO-P: Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan | 01 - Terlaksananya penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) | 01 - Jumlah KPH yang difasilitasi penguatannya | 5 | 80 KPH | 321.499,2 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 01.02.03<br>KP: Penyediaan Air untuk Pertanian | 01 - Meningkatnya penyediaan air untuk pertanian | 01 - Luas lahan beririgasi untuk komoditas padi dan nonpadi | 2 | 6.900 ha | 1.833.548,4 | |
| 01.02.03.01<br>PRO-P: Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi | 01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi | 01 - Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun | 5 | 6.900 ha | 1.833.548,4 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| | | 02 - Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi | 5 | 98.700 ha | | |
| 01.02.04<br>KP: Penyediaan Air Baku untuk Kawasan Prioritas | 01 - Meningkatnya penyediaan air baku untuk kawasan prioritas | 01 - Jumlah debit air baku untuk kebutuhan domestik, industri, dan kawasan unggulan | 2 | 2,60 $m^3$/detik | 1.547.141,5 | |
| 01.02.04.01<br>PRO-P: Penyediaan dan Pengamanan Air Baku dan Air Tanah | 01 - Terlaksananya penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah | 01 - Tambahan penyediaan air baku | 5 | 2,60 $m^3$/detik | 1.547.141,5 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL<br>(Terintegrasi dengan PSN) |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.05<br>KP: Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau | 01 - Meningkatnya pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau | 01 - Peningkatan tutupan hutan | 2 | 450.000 ha | 875.908,6 | |
| 01.02.05.01<br>PRO-P: Rehabilitasi Hutan dan Lahan | 01 - Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan | 01 - Luas hutan dan lahan yang terehabilitasi secara nasional | 5 | 475.000 ha | 875.908,6 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 01.02.06<br>KP: Pengembangan Waduk Multiguna | 01 - Berkembangnya pemanfaatan waduk multiguna | 01 - Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (kumulatif) | 2 | 17,45 miliar $m^3$ | 12.030.549,4 | |
| 01.02.06.01<br>PRO-P: Pembangunan dan Rehabilitasi Bendungan | 01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi bendungan | 01 - Jumlah bendungan multiguna yang selesai | 5 | 13 unit | 12.030.549,4 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 01.02.06.02<br>PRO-P: Optimalisasi dan Pemanfaatan Tampungan | 01 - Terlaksananya optimalisasi dan pemanfaatan tampungan | 01 - Jumlah bendungan yang dimanfaatkan sesuai dengan fungsi rencananya | 5 | 16 unit | 0,0[a] | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| | | 02 - Jumlah tampungan alami yang direvitalisasi dan dikembangkan manfaatnya | 5 | 7 unit | | |
| 01.03<br>PP: Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan | 01 - Meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan | 01 - Nilai Tukar Petani (NTP) | 5 | 105,00—107,00 | 13.377.668,1 | |
| | | 02 - Angka Kecukupan Energi (AKE) | 5 | 2.100,00 kkal/kapita/hari | | |
| | | 03 - Angka Kecukupan Protein (AKP) | 5 | 57,00 gram/ kapita/hari | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 04 - *Prevalence of Undernourishment* (PoU) | 5 | 5,20 % | | |
| | | 05 - *Food Insecurity Experience Scale* (FIES) | 5 | 4,20 % | | |
| 01.03.01<br>KP: Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan | 01 - Meningkatnya kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan | 01 - Konsumsi daging | 5 | 14,4 kg/kapita/tahun | 599.267,9 | |
| | | 02 - Konsumsi protein asal ternak | 5 | 12,7 gram/kapita/hari | | |
| | | 03 - Konsumsi sayur dan buah | 5 | 301,3 gram/kapita/hari | | |
| | | 04 - Konsumsi ikan | 5 | 61,02 kg/kapita/tahun | | |
| | | 05 - Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan | 5 | 90—95 % | | |
| | | 06 - Luas lahan produksi beras biofortifikasi | 5 | 150.000 ha | | |
| | | 07 - Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi | 5 | 80 % penerima BPNT | | |
| | | 08 - Persentase pangsa pangan organik | 5 | 15 % | | |
| 01.03.01.01<br>PRO-P: Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan | 01 - Meningkatnya kualitas konsumsi pangan | 01 - Peningkatan konsumsi daging | 5 | 2,1 % | 9.798,1 | KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, BADAN PANGAN NASIONAL |
| | | 02 - Peningkatan konsumsi protein asal ternak | 5 | 0,9 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 03 - Peningkatan konsumsi sayur dan buah | 5 | 5,0 gram/kapita/hari | | |
| | | 04 - Konsumsi kacang-kacangan | 5 | 29,2 gram/kapita/hari | | |
| 01.03.01.02<br>PRO-P: Peningkatan Keamanan Pangan | 01 - Meningkatnya keamanan pangan | 01 - Rasio tindak lanjut terhadap temuan OPTK dan HPHK pada komoditas pertanian melalui media pembawa di tempat pemasukan atau pengeluaran yang ditetapkan | 5 | 94 % | 353.969,8 | KEMENTERIAN PERTANIAN, BADAN PANGAN NASIONAL |
| | | 02 - Persentase pangan hewani yang memenuhi syarat keamanan pangan | 5 | 88 % | | |
| 01.03.01.03<br>PRO-P: Pengembangan Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan | 01 - Terlaksananya pengembangan fortifikasi dan biofortifikasi pangan | 01 - Penelitian dan pengembangan biofortifikasi pangan | 5 | 1 VUB | 235.500,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| | | 02 - Produksi padi biofortifikasi | 5 | 840 ribu ton GKG | | |
| 01.03.02<br>KP: Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok | 01 - Meningkatnya ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok | 01 - Penggunaan benih bersertifikat | 5 | 75,0 % | 3.979.274,9 | |
| | | 02 - Ketersediaan beras | 5 | 45,4 juta ton | | |
| | | 03 - Ketersediaan protein hewani | 5 | 2,78 juta ton | | |
| | | 04 - Produksi jagung | 5 | 34,12 juta ton | | |
| | | 05 - Produksi daging | 5 | 4,6 juta ton | | |
| | | 06 - Produksi umbi-umbian | 5 | 25,2 juta ton | | |
| | | 07 - Produksi sayuran | 5 | 15,50 juta ton | | |
| | | 08 - Produksi buah-buahan | 5 | 29,29 juta ton | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.02.01 PRO-P: Peningkatan Produksi Padi | 01 - Meningkatnya produksi padi | 01 - Pertumbuhan produktivitas padi | 5 | 3,00 % | 749.010,8 | KEMENTERIAN PERTANIAN, BADAN PANGAN NASIONAL (Terintegrasi dengan PSN) |
| | | 02 - Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) | 5 | 5,00 % | | |
| 01.03.02.02 PRO-P: Peningkatan Produksi Jagung | 01 - Meningkatnya produksi jagung | 01 - Pertumbuhan produktivitas jagung | 5 | 1,20 % | 312.858,3 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 01.03.02.03 PRO-P: Peningkatan Produksi Kedelai | 01 - Meningkatnya produksi kedelai | 01 - Pertumbuhan produktivitas kedelai | 5 | 1,10 % | 5.188,6 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 01.03.02.04 PRO-P: Peningkatan Produksi Daging | 01 - Meningkatnya produksi daging | 01 - Peningkatan produksi daging | 5 | 2,0 juta ton | 2.440.532,8 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 01.03.02.05 PRO-P: Peningkatan Produksi Hortikultura | 01 - Meningkatnya produksi hortikultura | 01 - Pertumbuhan produktivitas sayuran | 5 | 5,34 % | 448.216,5 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| | | 02 - Peningkatan produktivitas buah-buahan | 5 | 2,20 % | | |
| 01.03.02.06 PRO-P: Peningkatan Produksi Umbi-Umbian | 01 - Meningkatnya produksi umbi-umbian | 01 - Pertumbuhan produktivitas ubi kayu | 5 | 1,50 % | 23.468,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| | | 02 - Pertumbuhan produktivitas ubi jalar | 5 | 3,65 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.03<br>KP: Peningkatan Produktivitas, Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Perikanan dan Kepastian Pasar | 01 - Meningkatnya produktivitas, kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian, dan kepastian pasar | 01 - Teknologi yang diterapkan oleh petani | 5 | 80—90 % | 7.091.922,1 | |
| | | 02 - Nilai tambah per tenaga kerja pertanian | 5 | 57,0 juta rupiah/tenaga kerja/tahun | | |
| 01.03.03.01<br>PRO-P: Asuransi Pertanian | 01 - Terlaksananya asuransi pertanian | 01 - Luas area yang difasilitasi asuransi usaha tani padi | 5 | 1.000.000 ha | 185.590,9 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| | | 02 - Jumlah ternak yang difasilitasi asuransi usaha peternak sapi/kerbau | 5 | 200.000 ekor | | |
| 01.03.03.03<br>PRO-P: Penyuluhan dan Pendampingan Sekolah Lapang | 01 - Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan sekolah lapang | 01 - Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya | 1 | 100 % | 15.927,1 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| | | 02 - Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya | 5 | 21 % | | |
| 01.03.03.04<br>PRO-P: Korporasi Petani | 01 - Berkembangnya korporasi petani | 01 - Jumlah korporasi petani yang dikembangkan | 5 | 150 unit | 6.890.404,1 | KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, DAK |
| 01.03.04<br>KP: Peningkatan Keberlanjutan Produktivitas Sumber Daya Pertanian, dan Digitalisasi Pertanian | 01 - Meningkatnya produktivitas, keberlanjutan sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian | 01 - Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) | 5 | 90 % | 986.249,9 | |
| | | 02 - Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas | 5 | 30 dan 8 varietas unggul baru dan galur | | |
| 01.03.04.01<br>PRO-P: Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian | 01 - Terkelolanya sumber daya air pertanian | 01 - Luasan rehabilitasi jaringan irigasi | 5 | 269.884 ha | 500.228,9 | KEMENTERIAN PERTANIAN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.04.02<br>PRO-P: Pengelolaan Sumber Daya Lahan Pertanian | 01 - Terkelolanya sumber daya lahan pertanian | 01 - Luas lahan sawah yang ditetapkan LP2B tiap tahunnya | 5 | 6.717.553,2 ha | 485.771,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 01.03.04.03<br>PRO-P: Peningkatan varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas | 01 - Meningkatnya varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas | 01 - Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas | 5 | 45 varietas unggul baru dan galur | 250,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 01.03.05<br>KP: Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional | 01 - Meningkatnya tata kelola sistem pangan nasional | 01 - *Global food security index* | 5 | 68,4 | 720.953,3 | |
| 01.03.05.02<br>PRO-P: Penanganan Rawan Pangan | 01 - Menurunnya daerah rawan pangan | 01 - Persentase daerah rentan rawan pangan | 5 | 12 % | 3.400,0 | BADAN PANGAN NASIONAL |
| 01.03.05.03<br>PRO-P: Penguatan Cadangan Pangan Nasional | 01 - Menguatnya cadangan pangan nasional | 01 - Cadangan beras | 5 | 6—10 juta ton | 717.553,3 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERTANIAN, DAK<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 01.04<br>PP: Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan | 01 - Meningkatnya pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan | 01 - Konservasi kawasan kelautan | 5 | 29,10 juta ha | 2.771.854,4 | |
| | | 02 - Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman | 5 | ≤76 % | | |
| | | 03 - Produksi perikanan | 5 | 30,58 juta ton | | |
| | | 04 - Produksi garam | 5 | 2,00 juta ton | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 05 - Nilai tukar nelayan | 5 | 107,00—108,00 | | |
| 01.04.01<br>KP: Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir serta Pengelolaan Ruang Laut | 01 - Meningkatnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut | 01 - Pengelola WPP | 5 | 11 unit | 74.865,0 | |
| | | 02 - Akurasi pendataan *stock* dan pemanfaatan WPP | 4 | 11 WPP | | |
| | | 03 - Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir | 4 | 30 RZ | | |
| 01.04.01.01<br>PRO-P: Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) | 01 - Terlaksananya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) | 01 - Jumlah model percontohan WPP yang melaksanakan penangkapan terukur | 4 | 9 WPP | 16.180,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 01.04.01.02<br>PRO-P: Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir | 01 - Terlaksananya penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir | 01 - Jumlah KSN dan KSNT yang memiliki rencana zonasi KSN dan rencana zonasi KSNT dan antarwilayah laut | 5 | 23 RZ | 37.310,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) |
| 01.04.01.03<br>PRO-P: Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut | 01 - Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang laut | 01 - Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah | 5 | 34 lokasi | 21.375,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 01.04.02<br>KP: Peningkatan Ekosistem Kelautan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan | 01 - Meningkatnya ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan | 01 - Jumlah kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan | 5 | 15.800.000 ha | 12.465,0 | |
| 01.04.02.01<br>PRO-P: Pengembangan Wisata Bahari dan Jasa Maritim | 01 - Terlaksananya pengembangan wisata bahari dan jasa maritim | 01 - Jumlah kawasan wisata bahari dan BMKT yang terkelola | 5 | 10 kawasan | 9.750,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Terintegrasi dengan PSN) |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.02.02<br>PRO-P: Pengembangan *Marine Bioproduct* dan Bioteknologi | 01 - Terlaksananya pengembangan *marine bioproduct* dan bioteknologi | 01 - Jumlah bioteknologi dan biofarmakologi yang dikembangkan | 5 | 2 paket | 2.715,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 01.04.03<br>KP: Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standardisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan | 01 - Meningkatnya produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan | 01 - Produksi ikan | 5 | 18,48 juta ton | 2.282.090,0 | |
| | | 02 - Produksi rumput laut | 5 | 12,10 juta ton | | |
| | | 03 - Produksi Garam | 5 | 2,00 juta ton | | |
| 01.04.03.01<br>PRO-P: Peningkatan Produksi Perikanan | 01 - Meningkatnya produksi perikanan | 01 - Produksi ikan tangkap | 5 | 9,00 juta ton | 2.144.865,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DAK, KEMENTERIAN PERDAGANGAN<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| | | 02 - Produksi ikan budidaya | 5 | 9,48 juta ton | | |
| 01.04.03.02<br>PRO-P: Peningkatan Produksi Rumput Laut | 01 - Meningkatnya produksi rumput laut | 01 - Jumlah produksi rumput laut | 5 | 12,10 juta ton | 0,0[a] | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 01.04.03.03<br>PRO-P: Peningkatan Produksi Garam | 01 - Meningkatnya produksi garam | 01 - Jumlah produksi garam | 5 | 2,00 juta ton | 62.700,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 01.04.03.04<br>PRO-P: Karantina Ikan dan Jaminan Mutu | 01 - Terlaksananya karantina ikan dan jaminan mutu | 01 - Rasio pengendalian ekspor, impor, dan antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi, dan dibatasi di *exit/entry point* | 5 | 100 % | 74.525,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.04<br>KP: Peningkatan Fasilitasi Usaha, Pembiayaan, dan Akses Perlindungan Usaha Kelautan dan Perikanan Skala Kecil serta Akses terhadap Pengelolaan Sumber Daya | 01 - Meningkatnya fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya | 01 - Jumlah pendanaan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil | 5 | 9,91 triliun rupiah | 167.365,4 | |
| | | 02 - Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) | 5 | 104 | | |
| 01.04.04.01<br>PRO-P: Peningkatan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan | 01 - Meningkatnya perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan | 01 - Jumlah nelayan dan pembudidaya ikan yang terlindungi | 5 | 155.000 orang | 6.500,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 01.04.04.02<br>PRO-P: Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan | 01 - Terlaksananya peningkatan akses pembiayaan usaha perikanan | 01 - Sertifikasi tanah nelayan dan lahan budidaya | 5 | 15.000 bidang | 138.643,6 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 01.04.04.03<br>PRO-P: Penataan Perizinan Kelautan dan Perikanan | 01 - Terlaksananya penataan perizinan kelautan dan perikanan | 01 - Integrasi sistem perizinan pusat-daerah | 4 | 34 provinsi | 22.221,8 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 01.04.05<br>KP: Peningkatan SDM dan Riset Kemaritiman dan Kelautan Serta *Database* Kelautan dan Perikanan | 01 - Meningkatnya SDM dan inovasi teknologi kemaritiman dan kelautan serta *database* kelautan | 01 - Jumlah model/teknologi kelautan dan perikanan yang layak adopsi | 5 | 5 produk | 235.069,0 | |
| 01.04.05.01<br>PRO-P: Peningkatan SDM Kelautan dan Perikanan | 01 - Terlaksananya peningkatan SDM kelautan dan perikanan | 01 - Jumlah masyarakat yang disuluh | 1 | 44.000 orang | 119.173,7 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.05.02<br>PRO-P: Penguatan Inovasi Teknologi dan Riset Kelautan dan Perikanan | 01 - Terlaksananya penguatan inovasi teknologi dan riset kelautan dan perikanan | 01 - Inovasi teknologi KP yang diadopsi | 5 | 5 Paket | 115.895,3 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 01.05<br>PP: Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi | 01 - Menguatnya kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM), dan koperasi | 01 - Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan | 5 | 21,44 % | 2.847.956,5 | |
| | | 02 - Pertumbuhan wirausaha | 1 | 2,74 % | | |
| | | 03 - Kontribusi koperasi terhadap PDB | 1, 5 | 5,40 % | | |
| 01.05.01<br>KP: Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar | 01 - Meningkatnya kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar | 01 - Proporsi IMK (Industri Mikro Kecil) yang menjalin kemitraan | 1, 5 | 10,00 % | 603.511,8 | |
| | | 02 - IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor sektor ekonomi lainnya | 5 | 160 IKM (kumulatif) | | |
| 01.05.01.01<br>PRO-P: Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk | 01 - Terlaksananya pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk | 01 - Jumlah UMKM yang dikembangkan kapasitas usahanya | 1, 5 | 10.000 UMKM | 452.641,8 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN), KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGAMA, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN) |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.01.02<br>PRO-P: Perluasan Kemitraan Usaha | 01 - Terlaksananya perluasan kemitraan usaha | 01 - Jumlah UMKM yang diperluas cakupan kemitraannya | 1, 5 | 350 UMKM | 34.187,4 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| 01.05.01.03<br>PRO-P: Penguatan Kapasitas Kelembagaan untuk Bermitra | 01 - Terlaksananya penguatan kapasitas kelembagaan untuk bermitra | 01 - Jumlah UMKM yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya | 1, 5 | 8.500 UMKM | 116.682,6 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 01.05.02<br>KP: Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Pembiayaan Bagi Wirausaha | 01 - Meningkatnya kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha | 01 - Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal | 1, 5 | 29,27 % | 126.014,8 | |
| | | 02 - Proporsi IKM dengan pinjaman/kredit | 5 | 4,10 % | | |
| | | 03 - Proporsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor produksi | 5 | 75,00 % | | |
| 01.05.02.01<br>PRO-P: Dukungan Pemberian Modal Awal Usaha | 01 - Terlaksananya dukungan pemberian modal awal usaha | 01 - Jumlah wirausaha pemula yang mendapat modal usaha | 5 | 3.000 orang | 107.662,5 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 01.05.02.02<br>PRO-P: Pendampingan UMKM untuk Mengakses Kredit | 01 - Terlaksananya pendampingan UMKM untuk mengakses kredit | 01 - Jumlah UMKM yang didampingi mengakses kredit/pembiayaan | 5 | 8.500 UMKM | 16.226,5 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.02.03<br>PRO-P: Pengembangan Skema Pembiayaan bagi Wirausaha dan UMKM | 01 - Terlaksananya pengembangan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM | 01 - Jumlah UMKM yang dikembangkan skema pembiayaannya | 5 | 150 UMKM | 2.125,8 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 01.05.03<br>KP: Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi | 01 - Meningkatnya kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi | 01 - Jumlah koperasi modern yang dikembangkan | 5 | 340 unit (kumulatif) | 68.494,5 | |
| 01.05.03.01<br>PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pengurus dan Manajer Koperasi | 01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi koperasi | 01 - Jumlah pengurus dan pengelola koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya | 1, 5 | 5.000 orang | 21.550,0 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 01.05.03.02<br>PRO-P: Pendampingan Kelompok untuk Membentuk Koperasi | 01 - Terlaksananya pendampingan kepada masyarakat untuk membentuk koperasi | 01 - Jumlah orang/masyarakat yang didampingi membentuk koperasi | 1, 5 | 1.600 kelompok masyarakat/koperasi | 8.500,0 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 01.05.03.03<br>PRO-P: Pengembangan Jangkauan dan Cakupan Usaha | 01 - Terlaksananya pengembangan jangkauan dan cakupan usaha kepada koperasi | 01 - Jumlah koperasi yang dikembangkan jangkauan dan cakupan usahanya | 5 | 430 koperasi | 28.014,7 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 01.05.03.04<br>PRO-P: Pengembangan Inovasi Koperasi | 01 - Terlaksananya pengembangan inovasi kepada koperasi | 01 - Jumlah koperasi yang dikembangkan untuk berinovasi | 5 | 210 koperasi | 10.429,8 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 01.05.04<br>KP: Peningkatan Penciptaan *Start-Up* dan Peluang Usaha | 01 - Meningkatnya penciptaan *start-up* dan peluang usaha | 01 - Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri | 5 | 19,6 % | 2.027.775,4 | |
| | | 02 - Penumbuhan *start-up* | 5 | 2.800 *start-up* (kumulatif) | | |
| | | 03 - Jumlah wirausaha baru industri kecil yang tumbuh | 5 | 12.000 WUB | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.04.01<br>PRO-P: Pelatihan Kewirausahaan | 01 - Terlaksananya pelatihan kepada wirausaha atau calon wirausaha | 01 - Jumlah wirausaha yang dilatih | 1, 5 | 65.000 orang | 1.027.479,5 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI), KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| 01.05.04.02<br>PRO-P: Inkubasi Usaha | 01 - Terlaksananya inkubasi kepada wirausaha | 01 - Jumlah wirausaha yang diinkubasi | 1, 5 | 4.900 wirausaha/*start-up*/UMKM | 35.700,0 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 01.05.04.03<br>PRO-P: Penguatan Kapasitas Layanan Usaha | 01 - Terlaksananya layanan pengembangan Usaha kepada UMKM | 01 - Jumlah UMKM yang mendapat layanan usaha | 5 | 1.000 UMKM | 505.638,1 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK |
| 01.05.04.04<br>PRO-P: Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah | 01 - Terlaksananya pengembangan sentra industri kecil dan menengah | 01 - Jumlah sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi | 5 | 38 sentra IKM (kumulatif) | 452.228,9 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, DAK (Terintegrasi dengan PSN) |
| | 01 - Meningkatnya jumlah wirausaha mapan | 01 - Jumlah wirausaha mapan yang terbentuk | 1, 5 | 150 orang | 6.728,9 | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.04.05<br>PRO-P: Pembinaan Wirausaha Mapan | 02 - Meningkatnya jumlah wirausaha mapan yang memperoleh dukungan akses pasar | 01 - Jumlah wirausaha mapan yang mendapatkan dukungan akses pasar | 1, 5 | 300 UMKM | | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 01.05.05<br>KP: Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial | 01 - Meningkatnya nilai tambah usaha sosial | 01 - Kontribusi usaha sosial | 5 | 2,3 % | 22.160,0 | |
| 01.05.05.01<br>PRO-P: Pembinaan Wirausaha Sosial | 01 - Terlaksananya pembinaan wirausaha sosial | 01 - Jumlah lembaga yang membina wirausaha sosial | 5 | 40 lembaga | 16.700,0 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 01.05.05.02<br>PRO-P: Pembinaan Usaha Berdampak Sosial dan Lingkungan | 01 - Meningkatnya jumlah usaha yang memiliki dampak sosial atau dampak lingkungan | 01 - Jumlah usaha yang dibina | 1, 5 | 11.000 orang/wirausaha | 5.460,0 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 01.06<br>PP: Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi | 01 - Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi | 01 - Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas | 5 | 5,50—5,90 % | 7.628.623,2 | |
| | | 02 - Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas | 5 | 18,80 % | | |
| | | 03 - Nilai tambah ekonomi kreatif | 5 | 1.279,0 triliun rupiah | | |
| | | 04 - Jumlah tenaga kerja industri pengolahan | 5 | 21,70 juta orang | | |
| | | 05 - Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja | 5 | 15,50 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 06 - Jumlah tenaga kerja pariwisata | 5 | 21,93 juta orang | | |
| | | 07 - Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif | 5 | 22,59 juta orang | | |
| | | 08 - Nilai realisasi PMA dan PMDN | 5 | 1.200—1.300 triliun rupiah | | |
| | | 09 - Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan | 5 | 396—420 triliun rupiah | | |
| | | 10 - Pertumbuhan PDB pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian | 5 | 3,60—3,80 % | | |
| 01.06.01<br>KP: Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir | 01 - Meningkatnya industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir | 01 - Pertumbuhan PDB perkebunan | 5 | 5,00 % | 1.331.957,2 | |
| | | 02 - Pertumbuhan PDB hortikultura | 5 | 5,9 % | | |
| | | 03 - Pertumbuhan PDB subsektor industri makanan dan minuman | 5 | 5,50—5,70 % | | |
| | | 04 - Pertumbuhan PDB industri alat angkutan | 5 | 8,0—8,4 % | | |
| 01.06.01.01<br>PRO-P: Pengembangan Industri Berbasis Perkebunan | 01 - Terlaksananya pengembangan industri berbasis perkebunan | 01 - Peningkatan produksi kakao | 5 | 2,6 % | 423.368,2 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| | | 02 - Peningkatan produksi kopi | 5 | 1,50 % | | |
| | | 03 - Peningkatan produksi kelapa sawit | 5 | 6,00 % | | |
| | | 04 - Peningkatan produksi kelapa | 5 | 0,9 % | | |
| | | 05 - Peningkatan produksi karet | 5 | 1,9 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 06 - Peningkatan produksi sagu | 5 | 4,9 % | | |
| | | 07 - Peningkatan produksi tebu | 5 | 1,5 % | | |
| | | 08 - Peningkatan produksi lada | 5 | 0,1 % | | |
| | | 09 - Peningkatan produksi pala | 5 | 0,1 % | | |
| | | 10 - Peningkatan produksi cengkeh | 5 | 0,1 % | | |
| 01.06.01.02<br>PRO-P: Pengembangan Industri Berbasis Pertanian Pangan | 01 - Terlaksananya pengembangan industri berbasis pertanian pangan | 01 - Peningkatan produksi sayuran | 5 | 3,0 % | 696.305,9 | KEMENTERIAN PERTANIAN<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| | | 02 - Peningkatan produksi buah-buahan | 5 | 5,2 % | | |
| | | 03 - Peningkatan produksi florikultura | 5 | 5,4 % | | |
| 01.06.01.03<br>PRO-P: Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan | 01 - Terlaksananya pengembangan industri berbasis kehutanan | 01 - Pertumbuhan PDB industri furnitur | 5 | 6,00—6,90 % | 35.900,4 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 01.06.01.04<br>PRO-P: Pengembangan Industri Kemaritiman | 01 - Terlaksananya pengembangan industri kemaritiman | 01 - Pertumbuhan PDB perikanan | 5 | 5,00—6,00 % | 157.632,8 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 01.06.01.05<br>PRO-P: Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, dan Logam | 01 - Terlaksananya pengembangan industri kimia, farmasi, dan logam | 01 - Pertumbuhan industri kimia, farmasi, dan obat tradisional | 5 | 4,80—5,00 % | 15.500,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 01.06.01.06<br>PRO-P: Pengembangan Industri Alat Transportasi | 01 - Terlaksananya pengembangan industri alat transportasi | 01 - Produksi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat atau Lebih | 5 | 14.000 unit | 3.250,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02 - Produksi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua atau Tiga | 5 | 1.000.000 unit | | |
| 01.06.02<br>KP: Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri Terutama di Luar Jawa | 01 - Meningkatnya industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa | 01 - Jumlah Kawasan Industri (KI) yang difasilitasi | 5 | 16 KI-KEK industri | 127.842,3 | |
| 01.06.02.01<br>PRO-P: Pengembangan Kawasan Industri dan Smelter secara Terintegrasi | 01 - Terlaksananya pengembangan kawasan industri dan smelter secara terintegrasi | 01 - Pertumbuhan PDB industri logam dasar | 5 | 12,40—14,60 % | 107.274,2 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 01.06.02.02<br>PRO-P: Pemanfaatan Mineral dan Batu Bara untuk Peningkatan Nilai Tambah | 01 - Terlaksananya pemanfaatan mineral dan batu bara untuk peningkatan nilai tambah | 01 - Indeks pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah dalam negeri | 5 | 78,86 % | 20.568,2 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | 02 - Rasio pemanfaatan batu bara untuk peningkatan nilai tambah batu bara | 5 | 50 % | | |
| 01.06.03<br>KP: Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok | 01 - Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok | 01 - Destinasi pariwisata prioritas yang dipercepat pengembangannya | 5 | 10 destinasi | 3.635.867,0 | |
| | | 02 - Revitalisasi destinasi Bali | 5 | 1 destinasi | | |
| | | 03 - Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasiskan kawasan hutan prioritas | 5 | 25 unit | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 04 - Destinasi wisata berbasis *geopark* | 5 | 16 destinasi | | |
| | | 05 - Destinasi wisata bahari | 5 | 6 destinasi | | |
| 01.06.03.01<br>PRO-P: Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas | 01 - Terlaksananya pengembangan 25 kawasan hutan untuk mendukung destinasi pariwisata prioritas | 01 - Jumlah destinasi wisata alam prioritas | 5 | 25 destinasi | 65.757,0 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 01.06.03.02<br>PRO-P: Peningkatan Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi, serta Daya Dukung Destinasi Pariwisata | 01 - Terlaksananya peningkatan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi serta daya dukung destinasi pariwisata | 01 - Jumlah destinasi pariwisata yang ditingkatkan aksesibilitasnya, amenitas, atraksi, serta daya dukungnya | 5 | 10 destinasi | 3.288.971,4 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DAK<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 01.06.03.03<br>PRO-P: Penguatan Rantai Pasok Industri dan Kapasitas Masyarakat, termasuk Melalui Desa Wisata | 01 - Terlaksananya penguatan rantai pasok industri dan kapasitas masyarakat, termasuk melalui desa wisata | 01 - Jumlah penguatan rantai pasok industri dan kapasitas masyarakat, termasuk melalui desa wisata | 5 | 13 destinasi/provinsi | 22.645,8 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.03.04<br>PRO-P: Pengelolaan dan Standar Layanan Destinasi Pariwisata | 01 - Terlaksananya pengelolaan dan standar layanan destinasi pariwisata | 01 - Jumlah pengelolaan dan standar layanan destinasi pariwisata | 5 | 3 destinasi | 189.906,4 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, DAK |
| 01.06.03.05<br>PRO-P: Pengembangan 16 Destinasi Pariwisata *Geopark* | 01 - Terlaksananya pengembangan 16 *geopark* untuk mendukung destinasi pariwisata prioritas | 01 - Jumlah koordinasi pengembangan *geopark* | 5 | 1 kegiatan | 68.586,4 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS, KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| 01.06.04<br>KP: Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital | 01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital | 01 - Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif | 5 | 5,4—5,9 % | 170.123,9 | |
| | | 02 - Pertumbuhan PDB informasi dan komunikasi | 5 | 7 % | | |
| 01.06.04.01<br>PRO-P: Penyediaan Insentif Inovasi dan Pengembangan Brand | 01 - Terlaksananya penyediaan insentif inovasi dan pengembangan *brand* | 01 - Jumlah skema insentif inovasi dan pengembangan *brand* | 4 | 2 skema | 59.446,4 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| 01.06.04.02<br>PRO-P: Penyediaan Insentif Penerapan dan Komersialisasi HKI | 01 - Terlaksananya penyediaan insentif penerapan dan komersialisasi HKI | 01 - Jumlah penyediaan insentif penerapan dan komersialisasi HKI | 5 | 1.500 kegiatan | 5.000,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.04.03<br>PRO-P: Fasilitasi Rantai Pasok dan *Scale-up* Karya dan Platform Kreatif Unggulan | 01 - Terlaksananya fasilitasi rantai pasok dan *scale-up* karya dan platform kreatif unggulan | 01 - Jumlah fasilitasi rantai pasok dan *scale-up* karya dan platform kreatif unggulan | 5 | 200 kerja sama | 6.000,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| 01.06.04.04<br>PRO-P: Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Kota Kreatif | 01 - Terlaksananya peningkatan kerja sama pengembangan kota kreatif | 01 - Jumlah kerja sama pengembangan kota kreatif | 5 | 5 kawasan | 40.250,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 01.06.04.05<br>PRO-P: Pengembangan *'Start-Up Parks'* dan *Center of Excellence* | 01 - Terlaksananya pengembangan *'Start-Up Parks'* dan *Center of Excellence* | 01 - Jumlah *'Start-Up Parks'* dan *Center of Excellence* yang dikembangkan | 5 | 1 kerja sama | 5.409,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| 01.06.04.06<br>PRO-P: Pengembangan Pendampingan dan Inkubasi di Ruang Kreatif | 01 - Terlaksananya pengembangan pendampingan dan inkubasi di ruang kreatif | 01 - Jumlah pengembangan pendampingan dan inkubasi di ruang kreatif | 5 | 184 kegiatan | 27.121,7 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| 01.06.04.07<br>PRO-P: Pengembangan Kawasan *Be Creative District* (BCD) | 01 - Terlaksananya pengembangan kawasan *Be Creative District* (BCD) | 01 - Jumlah kawasan *Be Creative District* (BCD) yang dikembangkan | 5 | 1 kegiatan | 26.896,8 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| 01.06.05<br>KP: Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan | 01 - Terlaksananya perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan | 01 - Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN | 5 | 50,3—50,5 % | 1.141.200,8 | |
| | | 02 - Kontribusi realisasi investasi luar Jawa | 5 | 48,7—49,6 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.05.01<br>PRO-P: Kepastian Hukum Berusaha dan Investasi | 01 - Terlaksananya kepastian hukum berusaha dan investasi | 01 - Jumlah usulan perubahan regulasi/peraturan yang menghambat investasi | 5 | 1 usulan rekomendasi | 69.237,9 | KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) |
| 01.06.05.02<br>PRO-P: Fasilitasi Kemudahan Usaha dan Investasi | 01 - Terlaksananya fasilitasi kemudahan usaha dan investasi | 01 - Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di wilayah I,II,III, IV, dan V | 5 | 115 perusahaan | 388.133,7 | KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) |
| 01.06.05.03<br>PRO-P: Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial | 01 - Meningkatnya jaminan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial pada perusahaan | 01 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial | 5 | 7.056.010 orang | 683.829,2 | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI), KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN |
| 01.06.06<br>KP: Pengembangan Industri Halal | 01 - Terlaksananya pengembangan industri halal | 01 - Jumlah sektor industri halal yang difasilitasi | 5 | 3 sektor industri | 1.221.632,0 | |
| 01.06.06.01<br>PRO-P: Penguatan Regulasi dan Fasilitasi Usaha bagi Industri Halal | 01 - Tersedianya Peraturan yang dapat mendukung peningkatan industri halal di Indonesia | 01 - Jumlah Peraturan/Kebijakan terkait pengembangan industri halal | 5 | 15 peraturan | 687,4 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| | 02 - Meningkatnya dukungan layanan keuangan syariah bagi pelaku Industri halal | 01 - Terbentuknya *National* Halal *Fund* yang dinyatakan dalam suatu peraturan/pedoman | 5 | 1 unit | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03 - Tersedianya regulasi yang mendukung penguatan integrasi hulu-hilir industri halal di Indonesia | 01 - Jumlah peraturan terkait penguatan rantai pasok industri halal | 5 | 1 rekomendasi kebijakan | | |
| 01.06.06.02<br>PRO-P: Penguatan Pelaku Industri Halal | 01 - Terdapatnya Sentra I/UKM Pangan halal di seluruh Indonesia | 01 - Jumlah Sentra U/IKM Pangan yang ditetapkan sebagai Sentra U/IKM halal | 5 | 8 sentra | 0,0[a] | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 02 - Meningkatnya kemampuan Unit Usaha dalam mengembangkan kegiatan usaha | 01 - Jenis fasilitasi yang dilakukan bagi pelaku usaha Industri halal | 5 | 6 jenis bentuk layanan | | |
| | 03 - Pola kemitraan antar pelaku usaha di berbagai jenis skala industri halal | 01 - Proporsi IMK dan UMK yang menjalin kemitraan | 5 | 15 % | | |
| 01.06.06.03<br>PRO-P: Pengembangan Infrastruktur Industri Halal | 01 - Tersedianya infrastruktur teknologi informasi | 01 - Terbentuknya layanan sertifikasi halal dan sistem *traceability* berbasis digitalisasi | 5 | 1 unit | 1.199.849,2 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 02 - Beroperasinya kawasan industri tematik halal | 01 - Jumlah kawasan industri tematik halal yang beroperasi | 5 | 4 lokasi | | |
| | 03 - Tersedianya infrastruktur pendukung industri produk halal | 01 - Jumlah laboratorium penguji halal di Indonesia | 5 | 30 unit laboratorium | | |
| 01.06.06.04<br>PRO-P: Kerjasama Internasional Industri Halal | 01 - Dikenalnya Indonesia di dunia internasional sebagai negara pusat produsen halal | 01 - Jumlah pameran dalam/luar negeri | 5 | 30 kegiatan | 21.095,3 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ |



SK No 093028 C

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02 - Disepakatinya transaksi perdagangan regular antara pelaku industri dan UMK produk halal | 01 - Jumlah negara yang memiliki perjanjian perdagangan industri halal Indonesia | 5 | 16 negara | | BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| 01.06.06.05<br>PRO-P: Pengembangan Pariwisata Halal | 01 - Terbentuknya unit khusus yang menangani pengembangan wisata ramah muslim | 01 - Jumlah Struktur/Lembaga Pengembangan Wisata ramah Muslim | 5 | 1 lembaga | 0,0[a] | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| | 02 - Tersedianya rencana strategis pengembangan wisata ramah muslim | 01 - Tersedianya rencana strategis pengembangan wisata ramah muslim | 5 | 1 dokumen | | |
| | 03 - Tersedianya peraturan pengembangan wisata ramah muslim yang terintegrasi | 01 - Jumlah peraturan pengembangan wisata ramah muslim yang terintegrasi | 5 | 1 peraturan | | |
| 01.06.06.06<br>PRO-P: Penguatan Halal *Value Chain* | 01 - Penguatan klasterisasi dan industrialisasi produk halal dalam proses hilirisasi | 01 - Terdapatnya kawasan industri halal yang menerapkan sistem rantai pasok terintegrasi | 5 | 1 proyek | 0,0[a] | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| 01.07<br>PP: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) | 01 - Meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) | 01 - Neraca perdagangan barang | 5 | 40,4—44,9 miliar US$ | 2.947.704,3 | |
| | | 02 - Pertumbuhan ekspor nonmigas | 5 | 1,2—3,7 % | | |
| | | 03 - Jumlah wisatawan mancanegara | 5 | 3,5—7,4 juta kunjungan | | |
| | | 04 - Jumlah kunjungan wisatawan nusantara | 5 | 1.200—1.400 juta perjalanan | | |
| | | 05 - Pertumbuhan ekspor produk industri berteknologi tinggi | 5 | 8,5—10,7 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.01<br>KP: Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa | 01 - Meningkatnya diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa | 01 - Nilai ekspor industri pengolahan | 5 | 170,9 miliar US$ | 2.245.113,6 | |
| | | 02 - Kontribusi ekspor industri pengolahan | 5 | 75 % | | |
| | | 03 - Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi (komputer, instrumen ilmiah, mesin listrik, dirgantara) | 5 | 12,5 % | | |
| | | 04 - Ekspor hasil pertanian (fob) | 5 | 4,7 miliar US$ | | |
| | | 05 - Pertumbuhan ekspor pertanian | 5 | 9,0—10,0 % | | |
| | | 06 - Nilai ekspor produk industri kehutanan | 5 | 10,00 miliar US$ | | |
| | | 07 - Rasio ekspor jasa terhadap PDB | 5 | 1,7 % | | |
| | | 08 - Nilai ekspor produk rempah-rempah | 5 | 1.785,84 juta US$ | | |
| | | 09 - Nilai Ekspor Hasil Perikanan | 5 | 7,66 miliar US$ | | |
| 01.07.01.01<br>PRO-P: Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor dan Jasa | 01 - Terlaksananya peningkatan diversifikasi produk ekspor dan jasa | 01 - Jumlah perusahaan yang difasilitasi bantuan permesinan | 5 | 60 perusahaan | 3.927,3 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 01.07.01.02<br>PRO-P: Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa | 01 - Terlaksananya peningkatan nilai tambah produk ekspor dan jasa | 01 - Jumlah produk ekspor yang diberikan fasilitasi pengembangan produk | 5 | 293 produk | 95.930,1 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.01.03<br>PRO-P: Perluasan Ekspor Gastronomi Indonesia *Spice Up The World* | 01 - Terlaksananya peningkatan nilai tambah produk ekspor dan jasa | 01 - Jumlah restoran Indonesia di Luar Negeri | 5 | 3.000 unit | 2.145.256,2 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 01.07.02<br>KP: Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor | 01 - Meningkatnya akses dan pendalaman pasar ekspor | 01 - Jumlah negara tujuan ekspor | 5 | 222 negara | 182.430,1 | |
| | | 02 - Pangsa pasar ekspor produk Indonesia di kawasan Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur | 5 | 2,30 % | | |
| | | 03 - Pangsa pasar ekspor produk Indonesia di pasar tradisional | 5 | 3,90 % | | |
| 01.07.02.01<br>PRO-P: Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia | 01 - Terlaksananya peningkatan pangsa pasar produk Indonesia | 01 - Jumlah kegiatan promosi, pencitraan dan misi dagang | 5 | 26 kegiatan | 132.063,1 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.02.02<br>PRO-P: Fasilitasi Ekspor | 01 - Terlaksananya fasilitasi ekspor | 01 - Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi ekspor (pelayanan ekspor-impor melalui INATRADE, pelayanan SKA, dan fasilitasi pembiayaan perdagangan) | 5 | 1.009.200 badan usaha | 15.672,0 | KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN |
| 01.07.02.03<br>PRO-P: Peningkatan Daya Saing Industri Guna Mendorong Peningkatan Ekspor | 01 - Terlaksananya peningkatan daya saing industri guna mendorong peningkatan ekspor | 01 - Nilai ekspor produk industri sektor ILMATE | 5 | 46,81 miliar US$ | 34.695,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN) |
| | | 02 - Nilai ekspor produk industri sektor agro | 5 | 62,61 miliar US$ | | |
| | | 03 - Nilai ekspor produk industri IKFT | 5 | 38,85 miliar US$ | | |
| | | 04 - Nilai ekspor produk industri aneka | 5 | 12,36 miliar US$ | | |
| 01.07.03<br>KP: Pengelolaan Impor | 01 - Meningkatnya pengelolaan impor | 01 - Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) | 5 | 52,0 % | 30.614,7 | |
| 01.07.03.01<br>PRO-P: Penguatan Kebijakan Perlindungan Akses Pasar Dalam Negeri | 01 - Terlaksananya penguatan kebijakan perlindungan akses pasar dalam negeri | 01 - Jumlah pengawasan *post* border | 5 | 3.162 produk | 30.614,7 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 01.07.04<br>KP: Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif | 01 - Meningkatnya kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif | 01 - Produk tersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku | 5 | 7.640 produk (kumulatif) | 57.911,9 | |
| | | 02 - Capaian TKDN Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai | 5 | 40 persen (kumulatif) | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.04.01<br>PRO-P: Pengembangan Sistem Katalog | 01 - Terlaksananya pengembangan sistem katalog | 01 - Jumlah Kontrak Katalog Lokal/Sektoral | 5 | 50 katalog | 57.911,9 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) |
| | | 02 - Jumlah Produk yang Masuk dalam *E-Katalog* | 5 | 2.000.000 produk | | |
| | | 03 - Sistem *E-Purchasing* Terintegrasi | 4, 5 | 1 sistem informasi | | |
| 01.07.05<br>KP: Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global | 01 - Meningkatnya partisipasi dalam jaringan produksi global | 01 - Jumlah kesepakatan industri dalam jaringan produksi global | 5 | 2 kesepakatan | 143.000,0 | |
| 01.07.05.01<br>PRO-P: Peningkatan Investasi (*Inbound* & *Outbound*) Industri GPN Berbasis Hilirisasi SDA, Teknologi Tinggi | 01 - Terlaksananya peningkatan investasi (*inbound* dan *outbond*) industri GPN berbasis hilirisasi SDA teknologi tinggi | 01 - Jumlah perusahaan yang difasilitasi kemitraan dalam global *value chain* | 5 | 25 badan usaha | 143.000,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| 01.07.06<br>KP: Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi *Branding*, dan Produk Kreatif | 01 - Meningkatnya citra dan diversifikasi pemasaran, destinasi pariwisata prioritas dan destinasi *branding*, dan produk kreatif | 01 - Jumlah *branding Wonderful* Indonesia | 5 | 10 destinasi *branding* | 143.680,3 | |
| | | 02 - Nilai ekspor ekonomi kreatif | 5 | 26,46 miliar US$ | | |
| 01.07.06.02<br>PRO-P: Pendalaman Pasar Tradisional dan Diversifikasi Pemasaran ke Pasar Baru | 01 - Terlaksananya pendalaman pasar tradisional dan diversifikasi pemasaran ke pasar baru | 01 - Jumlah pendalaman pasar tradisional dan diversifikasi pemasaran ke pasar baru | 5 | 48 regional pemasaran | 139.680,3 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.06.04<br>PRO-P: Perluasan Diklat Manajemen Usaha dan Pemasaran | 01 - Terlaksananya perluasan diklat manajemen usaha dan pemasaran | 01 - Jumlah diklat manajemen usaha dan pemasaran | 1, 5 | 7.000 orang | 4.000,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| 01.07.07<br>KP: Peningkatan Efektivitas *Prefrential Trade Agreement* (PTA)/*Free Trade Agreement* (FTA)/*Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi | 01 - Meningkatnya efektivitas *Preferential Trade Agreement* (PTA)/*Free Trade Agreement* (FTA)/*Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan diplomasi ekonomi | 01 - Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan | 5 | 89,90 % | 144.953,7 | |
| | | 02 - Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata | 5 | 79,34 % | | |
| | | 03 - Jumlah ratifikasi perjanjian kerja sama ekonomi internasional | 5 | 4 ratifikasi | | |
| | | 04 - Jumlah promosi *Tourism, Trade, and Investment* (TTI) terintegrasi | 5 | 4 promosi terintegrasi | | |
| | | 05 - PTA/FTA/CEPA yang disepakati | 5 | 35 (kumulatif) kesepakatan | | |
| 01.07.07.01<br>PRO-P: Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (Negosiator) dan Kelembagaan Perwakilan RI di Luar Negeri termasuk FTA Center | 01 - Terlaksananya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM (negosiator) dan kelembagaan perwakilan RI di luar negeri, termasuk FTA Center | 01 - Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas negosiator | 5 | 180 orang | 1.995,4 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 01.07.07.02<br>PRO-P: Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerja Sama Ekonomi Internasional | 01 - Terlaksananya peningkatan kesepakatan dan penyelesaian proses ratifikasi kerja sama ekonomi internasional | 01 - Jumlah kesepakatan dan perjanjian perdagangan yang diikuti | 5 | 107 dokumen kesepakatan/perundingan | 113.941,0 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |



SK No 093034 C

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.07.03<br>PRO-P: Promosi Terintegrasi | 01 - Terlaksananya promosi terintegrasi | 01 - Jumlah promosi terintegrasi | 5 | 4 pameran | 29.017,3 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| 01.08<br>PP: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi | 01 - Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi | 01 - Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB | 5 | 4,15—4,21 % | 4.203.624,8 | |
| | | 02 - *Skor logistic performance index* | 5 | 3,4 skor | | |
| | | 03 - Rasio M2/PDB | 5 | 48,2—48,9 % | | |
| | | 04 - Peringkat *travel and tourism development index* | 5 | 29—34 peringkat | | |
| | | 05 - Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax administration system*) | 5 | 96 % | | |
| | | 06 - Imbal hasil (*yield*) surat berharga negara | 5 | menurun | | |
| | | 07 - Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat | 5 | 31,94 % | | |
| | | 08 - Penyediaan Data Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas | 5 | 8 *database* | | |
| 01.08.01<br>KP: Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan | 01 - Meningkatnya pendalaman sektor keuangan | 01 - Rasio kredit/PDB | 5 | 33,3—34,0 % | 1.308,1 | |
| | | 02 - Jumlah mesin ATM per 100.000 penduduk dewasa | 5 | 57,1 unit | | |
| | | 03 - Jumlah kantor layanan bank per 100.000 penduduk dewasa | 5 | 15,3 unit | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 04 - Skema pembiayaan berbasis HKI | 5 | 1 skema | | |
| 01.08.01.01<br>PRO-P: Peningkatan Inklusi Keuangan, Inovasi Sektor Keuangan, dengan Menjaga Stabilitas dan Integritas Sistem Keuangan | 01 - Terlaksananya peningkatan inklusi keuangan, inovasi sektor keuangan, dengan menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan | 01 - Indeks inklusi keuangan | 5 | 88 % | 408,1 | KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| 01.08.01.02<br>PRO-P: Peningkatan Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan Pemerintah | 01 - Terlaksananya peningkatan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan pemerintah | 01 - *Turnover* rasio SBN | 5 | 5,11 % | 900,0 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| 01.08.02<br>KP: Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.0 | 01 - Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0 | 01 - Kontribusi ekonomi digital | 5 | 6,00 % | 120.740,3 | |
| | | 02 - Nilai transaksi *e-commerce* | 5 | 843,4 triliun rupiah | | |
| 01.08.02.01<br>PRO-P: Penguatan Industri *Fintech, e-Commerce, On-Demand Service,* dan *Internet Of Things* | 01 - Jumlah fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik yang mendapat pelatihan (fasilitator) | 01 - Jumlah fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik yang mendapat pelatihan (fasilitator) | 5 | 200 orang | 86.943,2 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN KEUANGAN |
| 01.08.02.02<br>PRO-P: Modernisasi Industri Hingga 4.0 Sesuai Karakteristik Industri | 01 - Terlaksananya modernisasi industri hingga 4.0 sesuai karakteristik industri | 01 - Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia *Industry* 4.0 *Readiness Index* (INDI 4.0) > 3.0 | 5 | 52 perusahaan | 33.797,1 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KEUANGAN |
| 01.08.03<br>KP: Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga | 01 - Meningkatnya sistem logistik dan stabilitas harga | 01 - *Skor logistic performance index* | 5 | 3,4 | 251.845,7 | |
| | | 02 - Tingkat inflasi | 5 | 2,0—4,0 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.03.01<br>PRO-P: Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Efisiensi Sistem Logistik | 01 - Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pendukung efisiensi sistem logistik | 01 - Jumlah sarana prasarana pendukung efisiensi distribusi yang dibangun | 5 | 87 unit | 233.845,7 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 01.08.03.02<br>PRO-P: Pengendalian Inflasi | 01 - Terjaganya inflasi pangan bergejolak | 01 - Tingkat inflasi pangan bergejolak | 5 | 5,9 % | 18.000,0 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 01.08.04<br>KP: Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata | 01 - Meningkatnya penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata | 01 - Efisiensi perusahaan industri yang menerapkan prinsip industri hijau | 5 | 6 % | 69.198,8 | |
| | | 02 - Jumlah lokasi penerapan *sustainable tourism development* | 5 | 11 lokasi | | |
| 01.08.04.01<br>PRO-P: Penerapan Standar Pariwisata Berkelanjutan | 01 - Jumlah destinasi dengan penerapan standar pariwisata berkelanjutan (destinasi) | 01 - Jumlah destinasi dengan penerapan standar pariwisata berkelanjutan (destinasi) | 5 | 11 | 59.986,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 01.08.04.02<br>PRO-P: Penerapan Industri Hijau | 01 - Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan | 01 - Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan | 5 | 61 perusahaan | 9.212,8 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| 01.08.05<br>KP: Reformasi Fiskal | 01 - Terlaksananya reformasi fiskal | 01 - Persentase realisasi penerimaan negara | 5 | 100 % | 562.895,8 | |



SK No 093037 C

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.05.01<br>PRO-P: Pembaruan Sistem Informasi Administrasi Perpajakan yang Andal dan Terintegrasi | 01 - Terlaksananya pembaruan sistem informasi administrasi perpajakan yang andal dan terintegrasi | 01 - Jumlah Proses Bisnis *Core Tax System* | 5 | 3 kegiatan (*Test, Data Migration*, dan *Initial Deploy*) Proses Bisnis | 545.956,8 | KEMENTERIAN KEUANGAN |
| 01.08.05.03<br>PRO-P: Perumusan Kebijakan Terkait Pembiayaan | 01 - Terlaksananya rekomendasi pengembangan pembiayaan | 01 - Persentase terlaksananya rekomendasi pengembangan pembiayaan | 5 | 100 % | 16.605,5 | KEMENTERIAN KEUANGAN |
| 01.08.05.05<br>PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan *Data Analytic* | 01 - Terlaksananya pembangunan dan pengembangan *data analytic* | 01 - Persentase pembangunan dan pengembangan *data analytic* | 5 | 100 % | 333,5 | KEMENTERIAN KEUANGAN |
| 01.08.06<br>KP: Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital | 01 - Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital | 01 - Ketersediaan data statistik pariwisata dan ekonomi kreatif | 5 | 4 *database* | 3.197.636,2 | |
| | | 02 - Ketersediaan data dan informasi statistik *e-commerce* | 5 | 1 *database* | | |
| | | 03 - Pelaksanaan sensus pertanian 2023 dan perbaikan data pangan | 5 | 3 *database* | | |
| | | 04 - Ketersediaan data statistik disagregasi PMTB | 5 | 1 *database* | | |
| 01.08.06.01<br>PRO-P: Pengembangan Statistik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 01 - Terlaksananya pengembangan statistik pariwisata dan ekonomi kreatif | 01 - Jumlah publikasi/laporan statistik pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan | 5 | 4 *database* | 170.815,5 | BADAN PUSAT STATISTIK, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| 01.08.06.02<br>PRO-P: Pengembangan Statistik e-*Commerce* | 01 - Terlaksanakannya pengembangan statistik *e-commerce* | 01 - Jumlah publikasi/laporan statistik *e-commerce* yang dikembangkan | 5 | 1 *database* | 10.970,4 | BADAN PUSAT STATISTIK |



SK No 093038 C

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.06.03<br>PRO-P: Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan Perbaikan Statistik Pangan | 01 - Terlaksananya sensus pertanian 2023 dan perbaikan statistik pangan | 01 - Jumlah publikasi/laporan sensus pertanian 2023 dan perbaikan statistik pangan | 5 | 3 *database* | 2.990.787,6 | BADAN PUSAT STATISTIK |
| 01.08.06.04<br>PRO-P: Penyediaan Data Disagregasi PMTB | 01 - Terlaksananya penyediaan data disagregasi PMTB | 01 - Jumlah publikasi/laporan disagregasi PMTB | 5 | 1 *database* | 25.062,7 | BADAN PUSAT STATISTIK |

CATATAN:
(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
(2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
(3) Alokasi DAK merupakan pagu alokasi per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2023;
(4) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L, DAK Fisik, dan KPBU pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan;
(5) Dukungan Terhadap Arahan Presiden: 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia; 2. Pembangunan Infrastruktur; 3. Penyederhanaan Regulasi; 4. Penyederhanaan Birokrasi; dan 5. Transformasi Ekonomi.

KETERANGAN:
(a) *multitagging.*



SK No 093039 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRIORITAS NASIONAL 2 : MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02<br>PN: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | 01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) | 01 - Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI | | 6,4—6,9 % per tahun | 124.918.845,1 | |
| | | 02 - IPM KTI | | 62,54—78,18 nilai minimum—nilai maksimum | | |
| | | 03 - Persentase penduduk miskin KTI | | 9,4—10,2 % | | |
| | 02 - Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) | 01 - Laju pertumbuhan PDRB KBI | | 5,0—5,2 % per tahun | | |
| | | 02 - IPM KBI | | 70,48—82,43 nilai minimum—nilai maksimum | | |
| | | 03 - Persentase penduduk miskin KBI | | 7,3—7,9 % | | |
| 02.01<br>PP: Pembangunan Wilayah Sumatera | 01 - Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sumatera | 01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sumatera | 5 | 4,5—4,8 % per tahun | 42.215.093,5 | |
| | | 02 - IPM Provinsi di Wilayah Sumatera | 1 | 70,48—77,01 nilai minimum—nilai maksimum | | |
| | | 03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Sumatera | 1 | 8,2—8,6 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.01<br>KP: Pengembangan Kawasan Strategis | 01 - Berkembangnya kawasan strategis | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah | 5 | >1 | 4.400.706,4 | |
| | | 02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan | 5 | 17 kawasan | | |
| | | 03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) | 5 | 2 jumlah destinasi | | |
| | | 04 - Destinasi pariwisata pengembangan dan revitalisasi | 5 | 2 jumlah destinasi | | |
| | | 05 - KEK berbasis pariwisata dan industri | 5 | 6 kawasan | | |
| | | 06 - KI prioritas dan KI pengembangan | 5 | 5 jumlah KI | | |
| | | 07 - Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) | 5 | 2 jumlah kawasan | | |
| 02.01.01.01<br>PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KEK Arun Lhokseumawe | 01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Arun Lhokseumawe | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Aceh | 5 | >1 | 50.237,6 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| 02.01.01.02<br>PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Sei Mangkei | 01 - Terlaksananya fasilitasi realisasi investasi dan pembangunan KI/KEK Sei Mangkei | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Utara | 5 | >1 | 2.554.499,4 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 02.01.01.03<br>PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba dan sekitarnya | 01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas destinasi pariwisata prioritas Danau Toba dan sekitarnya | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Utara | 5 | >1 | 1.060.279,1 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 02.01.01.04<br>PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi | 01 - Terlaksananya pembangunan destinasi pariwisata pengembangan Padang-Bukittinggi | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Barat | 5 | >1 | 0,0[a] | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| 02.01.01.05<br>PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang | 01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas destinasi pariwisata prioritas Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 5 | >1 | 2.000,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| 02.01.01.06<br>PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun | 01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau | 5 | >1 | 708.294,3 | BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM) |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.01.07<br>PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Galang Batang | 01 - Terlaksananya fasilitasi realisasi investasi dan pembangunan KI/KEK Galang Batang | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau | 5 | >1 | 2.619,2 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| 02.01.01.08<br>PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam Bintan | 01 - Terlaksananya pembangunan destinasi pariwisata pengembangan Batam Bintan | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau | 5 | >1 | 10.100,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 02.01.01.10<br>PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Bintan *Aerospace* | 01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KI Bintan *Aerospace* | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau | 5 | >1 | 0,0[a] | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| 02.01.01.11<br>PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Sadai | 01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KI Sadai | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 5 | >1 | 0,0[a] | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| 02.01.01.12<br>PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KPBPB Sabang | 01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KPBPB Sabang | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Aceh | 5 | >1 | 12.676,9 | BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG) |
| 02.01.01.13<br>PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Tenayan | 01 - Terlaksananya Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Tenayan | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Riau | 5 | >1 | 0,0[a] | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.01.14<br>PRO-P: Percepatan Operasionalisasi KEK Batam *Aero Technic* | 01 - Terlaksananya Percepatan Operasionalisasi KEK Batam *Aero Technic* | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau | 5 | >1 | 0,0[a] | KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| 02.01.01.15<br>PRO-P: Percepatan Operasionalisasi KEK Nongsa | 01 - Terlaksananya Percepatan Operasionalisasi KEK Nongsa | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau | 5 | >1 | 0,0[a] | KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| 02.01.02<br>KP: Pengembangan Sektor Unggulan | 01 - Berkembangnya sektor unggulan | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kakao | 5 | 3—5 % | 107.485,0 | |
| | | 02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kopi | 5 | 2—4 % | | |
| | | 03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa | 5 | 1—2 % | | |
| | | 04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - karet | 5 | 2—3 % | | |
| | | 05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap | 5 | 2—4 % | | |
| | | 06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya | 5 | 4—6 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 07 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - lada | 5 | 1—2 % | | |
| | | 08 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - pala | 5 | 2—4 % | | |
| | | 09 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa sawit | 5 | 4—6 % | | |
| | | 10 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - tebu | 5 | 2—4 % | | |
| | | 11 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - garam | 5 | 4—6 % | | |
| 02.01.02.04 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, Cengkeh di Provinsi Aceh | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh - pala | 5 | 3—5 % | 2.008,6 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.01.02.07 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Aceh | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per Provinsi Aceh - perikanan budidaya | 5 | 5—7 % | 12.745,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.01.02.10 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Sumatera Utara | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara - karet | 5 | 2—3 % | 2.165,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.02.11 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sumatera Utara | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara - kopi | 5 | 2—4 % | 17.115,5 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.01.02.15 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sumatera Utara | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara - perikanan budidaya | 5 | 23—25 % | 2.025,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.01.02.22 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sumatera Barat | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat - perikanan budidaya | 5 | 1—2 % | 2.322,5 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.01.02.24 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Riau | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau - karet | 5 | 2—3 % | 2.891,5 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.01.02.25 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Riau | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau - kelapa | 5 | 2—3 % | 3.866,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.01.02.27 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Riau | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau - perikanan budidaya | 5 | 5—7 % | 2.022,5 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.02.31 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Jambi | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi - karet | 5 | 2—3 % | 2.420,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.01.02.35 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Jambi | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi - perikanan budidaya | 5 | 1—3 % | 2.465,3 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.01.02.37 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Sumatera Selatan | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan - karet | 5 | 4—6 % | 8.752,5 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.01.02.38 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Sumatera Selatan | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan - tebu | 5 | 5—7 % | 3.017,7 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.01.02.42 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sumatera Selatan | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan - perikanan budidaya | 5 | 4—6 % | 2.022,5 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.01.02.50 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Lampung | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - karet | 5 | 5—7 % | 3.113,4 | KEMENTERIAN PERTANIAN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.02.53 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Lampung | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - tebu | 5 | 2—5 % | 3.016,5 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.01.02.54 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Lampung | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - perikanan tangkap | 5 | 1—2 % | 2.000,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.01.02.55 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Lampung | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - perikanan budidaya | 5 | 5—7 % | 14.073,6 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.01.02.56 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, Cengkeh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - lada | 5 | 2—3 % | 1.360,2 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.01.02.62 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Kepulauan Riau | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Riau - perikanan tangkap | 5 | 1—2 % | 1.185,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.01.02.63 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Riau | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau - kopi | 5 | 4—6 % | 3.030,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |



SK No 093048 C

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.02.65 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Aceh | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh - kelapa | 5 | 1—2 % | 355,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.01.02.66 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sumatera Utara | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara - kelapa | 5 | 2—3 % | 4.351,8 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.01.02.70 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, Cengkeh di Provinsi Sumatera Barat | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat - pala | 5 | 2—3 % | 250,5 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.01.02.71 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, Cengkeh di Provinsi Lampung | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung - pala | 5 | 3—5 % | 240,7 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.01.02.72 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Kepulauan Riau | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Riau - perikanan budidaya | 5 | 5—7 % | 5.968,3 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.01.02.73 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - perikanan budidaya | 5 | 1 % | 2.022,5 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.02.75<br>PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Jambi | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi - kelapa | 5 | 2—3 % | 678,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.01.02.77<br>PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sumatera Utara | 01 - Terlaksananya Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara - kakao | 5 | 1—2 % | 0,0[a] | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.01.03<br>KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan | 01 - Berkembangnya kawasan perkotaan | 01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Banda Aceh (angka perhitungan sementara) | 5 | 48,57 | 2.681.212,3 | |
| | | 02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Sabang (angka perhitungan sementara) | 5 | 44,88 | | |
| | | 03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Lhokseumawe (angka perhitungan sementara) | 5 | 40,82 | | |
| | | 04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Langsa (angka perhitungan sementara) | 5 | 40,87 | | |
| | | 05 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Medan (angka perhitungan sementara) | 5 | 58,45 | | |
| | | 06 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Sibolga (angka perhitungan sementara) | 5 | 61,58 | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 07 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pematangsiantar (angka perhitungan sementara) | 5 | 56,66 | | |
| | | 08 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Gunungsitoli (angka perhitungan sementara) | 5 | 38,76 | | |
| | | 09 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Padang (angka perhitungan sementara) | 5 | 48,54 | | |
| | | 10 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Solok (angka perhitungan sementara) | 5 | 43,31 | | |
| | | 11 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Bukittinggi (angka perhitungan sementara) | 5 | 49,54 | | |
| | | 12 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Dumai (angka perhitungan sementara) | 5 | 59,78 | | |
| | | 13 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pekanbaru (angka perhitungan sementara) | 5 | 63,08 | | |
| | | 14 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Jambi (angka perhitungan sementara) | 5 | 44,62 | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Palembang (angka perhitungan sementara) | 5 | 49,79 | | |
| | | 16 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Prabumulih (angka perhitungan sementara) | 5 | 50,33 | | |
| | | 17 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Lubuklinggau (angka perhitungan sementara) | 5 | 56,81 | | |
| | | 18 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Bengkulu (angka perhitungan sementara) | 5 | 46,76 | | |
| | | 19 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Bandar Lampung (angka perhitungan sementara) | 5 | 46,70 | | |
| | | 20 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pangkal Pinang (angka perhitungan sementara) | 5 | 47,60 | | |
| | | 21 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tanjungpinang (angka perhitungan sementara) | 5 | 48,82 | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Batam (angka perhitungan sementara) | 5 | 52,50 | | |
| | 02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW | 01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW | 5 | 20 kota | | |
| | 03 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa | 01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan | 5 | 1 WM | | |
| | 04 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa | 01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan | 5 | 2 WM | | |
| 02.01.03.01 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Aceh | 01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW | 01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW | 5 | 4 kota | 23.063,2 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 02.01.03.03 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Jambi | 01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW | 01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW | 5 | 1 kota | 101.032,9 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN) |
| 02.01.03.04 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW | 01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW | 5 | 1 kota | 50.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 02.01.03.05 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kepulauan Riau | 01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW | 01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW | 5 | 2 kota | 68.450,2 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.03.06<br>PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Lampung | 01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW | 01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW | 5 | 1 kota | 30.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 02.01.03.07<br>PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Riau | 01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW | 01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW | 5 | 2 kota | 175,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 02.01.03.08<br>PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sumatera Barat | 01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW | 01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW | 5 | 3 kota | 185.102,9 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 02.01.03.09<br>PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sumatera Selatan | 01 - 01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW | 01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW | 5 | 1 kota | 9.175,1 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 02.01.03.11<br>PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sumatera Utara | 01 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa | 01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan | 5 | 1 WM | 1.531.489,2 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 02.01.03.12<br>PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sumatera Selatan | 01 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa | 01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan | 5 | 1 WM | 682.723,9 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU) |
| | 02 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa | 01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan | 5 | 1 WM | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.04<br>KP: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi | 01 - Terbangunnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi | 01 - Rata-rata Indeks Desa Pulau Sumatera | 1, 5 | 61,30 | 34.852.329,5 | |
| | | 02 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional | 1, 5 | 61,45 | | |
| | | 03 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Sumatera | 5 | 61,41 | | |
| | | 04 - Persentase penduduk miskin perdesaan Wilayah Sumatera | 1 | 9,8—10,1 % | | |
| | 02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal | 01 - Jumlah daerah tertinggal | 5 | 7 kabupaten | | |
| | | 02 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya | 5 | 36 kecamatan | | |
| | | 03 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan | 5 | 0,52 | | |
| 02.01.04.07<br>PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Aceh | 01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Aceh | 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Aceh | 1, 5 | 60,45 | 5.449.710,7 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 02.01.04.08<br>PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Aceh Timur | 01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Aceh Timur | 01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Aceh Timur | 1, 5 | 67,69 | 34.679,4 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| 02.01.04.09<br>PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantara, Samar Kilang, dan Selaut | 01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantara, Samar Kilang, dan Selaut | 01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Aceh | 5 | 59,79 | 2.999,7 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| 02.01.04.10<br>PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Aceh | 01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Aceh | 01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Aceh | 5 | 3 kecamatan | 0,0[a] | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 02.01.04.11<br>PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sabang | 01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sabang | 01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Sabang | 5 | 0,50 | 200,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.01.04.12<br>PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sumatera Utara | 01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Sumatera Utara | 01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa Provinsi Sumatera Utara | 1, 5 | 55,72 | 26.890,5 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 02.01.04.13<br>PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Toba Samosir dan Samosir | 01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Toba Samosir dan Samosir | 01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Toba Samosir dan Samosir | 1, 5 | 67,72 | 75.963,3 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK |
| 02.01.04.14<br>PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sumatera Utara | 01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Sumatera Utara | 01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Sumatera Utara | 5 | 2 kecamatan | 0,0[a] | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 02.01.04.15<br>PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Utara | 01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Utara | 01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Utara | 1 | 18,1—18,6 % | 94.890,4 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, DAK |
| | | 02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Utara | 1 | 64,1—64,6 | | |
| 02.01.04.16<br>PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sumatera Barat | 01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Sumatera Barat | 01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa Provinsi Sumatera Barat | 1, 5 | 69,87 | 5.615,6 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 02.01.04.17<br>PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Agam | 01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Agam | 01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Agam | 1, 5 | 57,55 | 38.102,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK |
| 02.01.04.18<br>PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut | 01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut | 01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Sumatera Barat | 5 | 72,08 | 992,2 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| 02.01.04.19<br>PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Barat | 01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat | 01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat | 1 | 11,3—11,8 % | 956,5 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, DAK |
| | | 02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat | 1 | 62,3—62,8 | | |
| 02.01.04.20<br>PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Riau | 01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Riau | 01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa Provinsi Riau | 1, 5 | 64,65 | 6.538,1 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.04.21 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Riau | 01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Riau | 01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Riau | 5 | 7 kecamatan | 9.315,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK |
| 02.01.04.23 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Jambi | 01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Jambi | 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Jambi | 1, 5 | 64,00 | 4.178,9 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 02.01.04.24 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Muaro Jambi | 01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Muaro Jambi | 01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Muaro Jambi | 1, 5 | 59,20 | 63.695,3 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, DAK |
| 02.01.04.25 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu | 01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu | 01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Jambi | 5 | 25,65 | 31,9 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| 02.01.04.26 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sumatera Selatan | 01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Sumatera Selatan | 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Sumatera Selatan | 1, 5 | 63,85 | 5.425,7 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 02.01.04.27<br>PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Banyuasin | 01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Banyuasin | 01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Banyuasin | 1, 5 | 63,69 | 61.152,7 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK |
| 02.01.04.28<br>PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan, Telang, dan Kikim | 01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan, Telang, dan Kikim | 01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Sumatera Selatan | 5 | 62,34 | 2.838,5 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| 02.01.04.29<br>PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan | 01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan | 01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan | 1 | 17,8—18,3 % | 28.820.871,5 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PERTANIAN, DAK |
| | | 02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan | 1 | 66,9—67,4 | | |
| 02.01.04.30<br>PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Bengkulu | 01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Bengkulu | 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Bengkulu | 1, 5 | 59,85 | 1.870,7 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 02.01.04.31<br>PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bengkulu Tengah | 01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bengkulu Tengah | 01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Bengkulu Tengah | 1, 5 | 56,84 | 24.730,5 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, DAK |
| 02.01.04.32<br>PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lagita | 01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lagita | 01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Bengkulu | 5 | 74,09 | 2.328,7 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| 02.01.04.33<br>PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Lampung | 01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Lampung | 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Lampung | 1, 5 | 65,85 | 5.069,7 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 02.01.04.34<br>PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mesuji dan Tulang Bawang | 01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mesuji dan Tulang Bawang | 01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Mesuji dan Tulang Bawang | 1, 5 | 62,30 | 28.618,8 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK |
| 02.01.04.35<br>PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu dan Mesuji | 01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu dan Mesuji | 01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Lampung | 5 | 57,40 | 242,4 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.04.36<br>PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Lampung | 01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Lampung | 01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Lampung | 1 | 13,6—14,1 % | 2.300,4 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PERTANIAN |
| | | 02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Lampung | 1 | 66,1—66,6 | | |
| 02.01.04.37<br>PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1, 5 | 73,05 | 3.304,1 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 02.01.04.38<br>PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan | 01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan | 01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan | 1, 5 | 55,72 | 18.279,4 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK |
| 02.01.04.39<br>PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang | 01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang | 01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Bangka Belitung | 5 | 73,86 | 32,8 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.04.40<br>PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kepulauan Riau | 01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Kepulauan Riau | 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Kepulauan Riau | 1, 5 | 64,80 | 2.394,1 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 02.01.04.41<br>PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bintan dan Karimun | 01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bintan dan Karimun | 01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Bintan dan Karimun | 1, 5 | 59,65 | 37.850,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK |
| 02.01.04.42<br>PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kepulauan Riau | 01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kepulauan Riau | 01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Kepulauan Riau | 5 | 24 kecamatan | 11.476,6 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK |
| 02.01.04.43<br>PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Ranai | 01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Ranai | 01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Ranai | 5 | 0,50 | 8.783,3 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK |
| 02.01.05<br>KP: Kelembagaan dan Keuangan Daerah | 01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | 01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | 4 | 3,23 | 173.360,3 | |
| | 02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 50,30 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 4 | 135 daerah | | |
| | 04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 130 daerah | | |
| | 05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 16.123 dokumen | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik | 01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 22 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien | 4 | 130 daerah | | |
| | 08 - Meningkatnya Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah | 4 | 9 daerah | | |
| | 09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 91,58 % | | |
| | 10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik | 01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik | 4 | 34 daerah | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang | 01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik | 5 | 4.293.338 ha | | |
| | | 02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan | 5 | 2.804.853 ha | | |
| | | 03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 24 materi teknis dan Ranperkada RDTR | | |
| | | 04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 30 persetujuan substansi RDTR | | |
| | | 05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 12 materi teknis dan Ranperda RTRW | | |
| | | 06 - Jumlah Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 15 persetujuan substansi RTRW | | |
| | | 07 - Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak atas Tanah | 5 | 5 | | |
| | | 08 - Jumlah Materi Teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN) | 5 | 2 materi teknis dan Raperpres RTR | | |
| | | 09 - Jumlah Penanganan Perkara Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang | 5 | 23 perkara | | |
| | 12 - Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial | 01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 2 | 1.000 desa | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.05.04<br>PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Aceh | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 1.824 dokumen | 18.127,4 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | 02 - Meningkatnya kerja sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama | 4 | 1 daerah | | |
| | 03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 92,39 % | | |
| | 04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 30,00 % | | |
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 20 daerah | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 19 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 19 daerah | | |
| | 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 09 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara | 01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara | 4 | 1 rekomendasi | | |
| 02.01.05.05<br>PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Aceh | 01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah | 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah | 5 | 127.294 bidang | 5.906,6 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | 02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang | 01 - Jumlah bidang tanah | 5 | 81.815 ha | | |
| 02.01.05.06<br>PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Aceh | 01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 7 rekomendasi kebijakan | 1.413,5 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 5 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 2 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 4 rekomendasi kebijakan | | |
| 02.01.05.07<br>PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sumatera Utara | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 2.440 dokumen | 0,0[a] | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02 - Meningkatnya kerja sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama | 4 | 1 daerah | | |
| | 03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 91,45 % | | |
| | 04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 39 % | | |
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 28 daerah | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 26 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 26 daerah | | |
| | 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |
| 02.01.05.08<br>PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sumatera Utara | 01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah | 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah | 5 | 165.714,0 bidang | 18.043,7 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang | 01 - Jumlah bidang tanah | 5 | 113.904 bidang | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.05.09<br>PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Utara | 01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 8 rekomendasi kebijakan | 3.993,8 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 2 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 4 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 1 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 05 - Jumlah materi teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN) | 5 | 1 rekomendasi kebijakan | | |
| 02.01.05.10<br>PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sumatera Barat | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 2.016 dokumen | 216,9 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | 02 - Meningkatnya kerja sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama | 4 | 1 daerah | | |
| | 03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 87 % | | |
| | 04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 87 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 15 daerah | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 16 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 16 daerah | | |
| | 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |
| 02.01.05.11 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat | 01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah | 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah | 5 | 117.792 bidang | 7.689,6 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | 02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang | 01 - Jumlah bidang tanah | 5 | 116.348 bidang | | |
| 02.01.05.12 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Barat | 01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 7 rekomendasi kebijakan | 1.123,5 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 3 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 2 rekomendasi kebijakan | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 1 rekomendasi kebijakan | | |
| 02.01.05.13 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Riau | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 1.777 dokumen | 0,0[a] | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | 02 - Meningkatnya kerja sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama | 4 | 1 daerah | | |
| | 03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 91,97 % | | |
| | 04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 45 % | | |
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 9 daerah | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 11 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 11 daerah | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |
| 02.01.05.14 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Riau | 01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah | 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah | 5 | 140.010 bidang | 41.423,9 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | 02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang | 01 - Jumlah bidang tanah | 5 | 129.536 bidang | | |
| 02.01.05.15 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Riau | 01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 4 rekomendasi kebijakan | 1.737,8 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Kab/Kota | 5 | 2 rekomendasi kebijakan | | |
| 02.01.05.16 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kepulauan Riau | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 644 dokumen | 0,0[a] | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | 03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 91,47 % | | |
| | 04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 44 % | | |
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 7 daerah | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 7 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 7 daerah | | |
| | 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |
| 02.01.05.17<br>PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau | 01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah | 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah | 5 | 14.036 bidang | 3.400,1 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | 02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang | 01 - Jumlah bidang tanah | 5 | 34.524 ha | | |
| 02.01.05.18<br>PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Riau | 01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 1 rekomendasi kebijakan | 1.174,3 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| 02.01.05.19<br>PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Jambi | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 1.204 dokumen | 0,0[a] | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | 02 - Meningkatnya kerja sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama | 4 | 1 daerah | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 91,33 % | | |
| | 04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 72 % | | |
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 12 daerah | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 10 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 10 daerah | | |
| | 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |
| 02.01.05.20<br>PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Jambi | 01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah | 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah | 5 | 122.520 bidang | 36.054,7 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERTANIAN |
| | 02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang | 01 - Jumlah bidang tanah | 5 | 175.660 bidang | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.05.21<br>PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Jambi | 01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 2 rekomendasi kebijakan | 1.676,8 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 3 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 1 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 2 rekomendasi kebijakan | | |
| 02.01.05.22<br>PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sumatera Selatan | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 2.227 dokumen | 800,0 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | 02 - Meningkatnya kerja sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama | 4 | 1 daerah | | |
| | 03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 92,37 % | | |
| | 04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 52 % | | |
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 15 daerah | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 13 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 13 daerah | | |
| | 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |
| 02.01.05.23 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sumatera Selatan | 01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah | 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah | 5 | 250.072 bidang | 7.432,6 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | 02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang | 01 - Jumlah bidang tanah | 5 | 152.446 bidang | | |
| 02.01.05.24 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Selatan | 01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 4 rekomendasi kebijakan | 1.378,3 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 7 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 4 rekomendasi kebijakan | | |

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.05.25<br>PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Lampung | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 969 dokumen | 0,0[a] | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | 02 - Meningkatnya kerja sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama | 4 | 1 daerah | | |
| | 03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 91,29 % | | |
| | 04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 43 % | | |
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 12 daerah | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 12 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 12 daerah | | |
| | 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.05.26 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Lampung | 01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah | 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah | 5 | 70.555 bidang | 5.910,8 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | 02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang | 01 - Jumlah bidang tanah | 5 | 104.488 bidang | | |
| 02.01.05.27 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Lampung | 01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 2 rekomendasi kebijakan | 1.386,0 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 2 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 03 - Jumlah penanganan perkara hasil penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang | 5 | 10 perkara | | |
| 02.01.05.28 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Bengkulu | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 2.377 dokumen | 0,0[a] | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | 02 - Meningkatnya kerja sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama | 4 | 1 daerah | | |
| | 03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 89,36 % | | |
| | 04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 48 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 9 daerah | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 9 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 9 daerah | | |
| | 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |
| 02.01.05.29 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Bengkulu | 01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah | 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah | 5 | 26.338 bidang | 8.288,7 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERTANIAN |
| | 02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang | 01 - Jumlah bidang tanah | 5 | 30.757 ha | | |
| 02.01.05.30 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Bengkulu | 01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 2 rekomendasi kebijakan | 1.261,0 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 1 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 1 rekomendasi kebijakan | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 3 rekomendasi kebijakan | | |
| 02.01.05.31<br>PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 645 dokumen | 0,0[a] | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | 02 - Meningkatnya kerja sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama | 4 | 1 daerah | | |
| | 03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 93,36 % | | |
| | 04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 43 % | | |
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 8 daerah | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 7 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 7 daerah | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |
| 02.01.05.32 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah | 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah | 5 | 16.534 bidang | 2.174,8 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | 02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang | 01 - Jumlah bidang tanah | 5 | 53.268,5 ha | | |
| 02.01.05.33 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 3 rekomendasi kebijakan | 1.212,0 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 3 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 03 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 1 rekomendasi kebijakan | | |
| 02.01.05.35 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Sumatera Barat | 01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 2 | 350 desa | 1.533,8 | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) |
| 02.01.05.36 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Sumatera Selatan | 01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 2 | 250 desa | 0,0[a] | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.05.37<br>PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Lampung | 01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 2 | 300 desa | 0,0[a] | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) |
| 02.01.05.43<br>PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Riau | 01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 2 | 100 desa | 0,0[a] | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) |
| 02.02<br>PP: Pembangunan Wilayah Jawa-Bali | 01 - Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Jawa-Bali | 01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa-Bali | 5 | 5,2—5,4 % per tahun | 47.907.025,1 | |
| | | 02 - IPM Provinsi di Wilayah Jawa-Bali | 1 | 73,05—82,43 nilai minimum—nilai maksimum | | |
| | | 03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa-Bali | 1, 5 | 6,9—7,6 % | | |
| 02.02.01<br>KP: Pengembangan Kawasan Strategis | 01 - Berkembangnya kawasan strategis | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah | 5 | >1 | 499.163,4 | |
| | | 02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan | 5 | 12 kawasan | | |
| | | 03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) | 5 | 2 jumlah destinasi | | |
| | | 04 - Destinasi pariwisata pengembangan dan revitalisasi | 5 | 3 jumlah destinasi | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 05 - KEK berbasis pariwisata dan industri | 5 | 5 kawasan | | |
| | | 06 - KI prioritas dan KI Pengembangan | 5 | 2 jumlah KI | | |
| 02.02.01.01<br>PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran di Provinsi Jawa Barat | 01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat | 5 | >1 | 6.300,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 02.02.01.02<br>PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KEK Kendal | 01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Kendal | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah | 5 | >1 | 1.488,4 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| 02.02.01.03<br>PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah | 01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan sekitarnya | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah | 5 | >1 | 32.413,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA<br>(Terintegrasi dengan PSN) |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.01.04<br>PRO-P: Terlaksananya Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya di Provinsi DI Yogyakarta | 01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan sekitarnya | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi DI Yogyakarta | 5 | >1 | 315.497,9 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 02.02.01.05<br>PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru | 01 - Perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur | 5 | >1 | 45.413,5 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 02.02.01.06<br>PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi | 01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur | 5 | >1 | 1.200,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 02.02.01.07<br>PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KEK Tanjung Lesung | 01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Tanjung Lesung | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Banten | 5 | >1 | 94.950,5 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.01.08<br>PRO-P: Peningkatan keberlanjutan DPP Revitalisasi Bali | 01 - Terlaksananya peningkatan keberlanjutan DPP Revitalisasi Bali | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Bali | 5 | >1 | 1.200,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 02.02.01.09<br>PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran di Provinsi Banten | 01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Banten | 5 | >1 | 700,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 02.02.01.11<br>PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Subang | 01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KI Subang | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat | 5 | >1 | 0,0[a] | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 02.02.01.12<br>PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Batang | 01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KI Batang | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah | 5 | >1 | 0,0[a] | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 02.02.01.13<br>PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Pancapuri | 01 - Terlaksananya Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Pancapuri | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Banten | 5 | >1 | 0,0[a] | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| 02.02.01.14<br>PRO-P: Percepatan Operasionalisasi KEK Lido | 01 - Terlaksananya Percepatan Operasionalisasi KEK Lido | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat | 5 | >1 | 0,0[a] | KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.01.15<br>PRO-P: Percepatan Operasionalisasi KEK Gresik | 01 - Terlaksananya Percepatan Operasionalisasi KEK Gresik | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur | 5 | >1 | 0,0[a] | KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 02.02.01.16<br>PRO-P: Percepatan Operasionalisasi KEK Singhasari | 01 - Terlaksananya Percepatan Operasionalisasi KEK Singhasari | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur | 5 | >1 | 0,0[a] | KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| 02.02.02<br>KP: Pengembangan Sektor Unggulan | 01 - Berkembangnya sektor unggulan | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kakao | 5 | 3—4 % | 140.412,9 | |
| | | 02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kopi | 5 | 3—5 % | | |
| | | 03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa | 5 | 1—2 % | | |
| | | 04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - tebu | 5 | 2—4 % | | |
| | | 05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - cengkeh | 5 | 2—4 % | | |
| | | 06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap | 5 | 2—4 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 07 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya | 5 | 4—6 % | | |
| | | 08 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - garam | 5 | 8—10 % | | |
| | | 09 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - pala | 5 | 1—2 % | | |
| | | 10 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - lada | 5 | 1—2 % | | |
| 02.02.02.01 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Jawa Barat | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - lada | 5 | 1—2 % | 5.733,5 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| | | 02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - pala | 5 | 1—2 % | | |
| | | 03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - cengkeh | 5 | 3—5 % | | |
| 02.02.02.02 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jawa Barat | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - kopi | 5 | 5—6 % | 14.596,5 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.02.02.03 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Jawa Barat | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - kelapa | 5 | 2—3 % | 979,4 | KEMENTERIAN PERTANIAN |

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.02.04 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Jawa Barat | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - tebu | 5 | 4—6 % | 4.634,6 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.02.02.06 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Jawa Barat | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - garam | 5 | 10—12 % | 4.358,7 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.02.02.07 PRO-P: Peningkatan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Jawa Tengah | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah - tebu | 5 | 2—3 % | 5.712,4 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.02.02.08 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jawa Tengah | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah - kopi | 5 | 8—9 % | 15.489,8 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.02.02.09 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Jawa Tengah | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah - garam | 5 | 10—12 % | 13.948,5 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.02.02.10 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi DI Yogyakarta | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi DI Yogyakarta - tebu | 5 | 4—6 % | 351,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.02.02.11 PRO-P: Peningkatan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Jawa Timur | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur - tebu | 5 | 2—3 % | 11.581,5 | KEMENTERIAN PERTANIAN |



SK No 093088 C

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.02.12 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Jawa Timur | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur - kopi | 5 | 1—2 % | 2.610,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.02.02.14 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Jawa Timur | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur - garam | 5 | 10—12 % | 15.323,8 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.02.02.17 PRO-P: Pengembangan komoditas unggulan kopi di Provinsi Bali | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali - kopi | 5 | 3—4 % | 6.270,5 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.02.02.18 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Bali | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali - kelapa | 5 | 2—3 % | 1.694,4 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.02.02.19 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Bali | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali - kakao | 5 | 1—2 % | 0,0[a] | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.02.02.22 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap Provinsi Jawa Barat | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - perikanan tangkap | 5 | 1—2 % | 2.370,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.02.02.23 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Jawa Barat | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat - perikanan budidaya | 5 | 3—5 % | 9.188,2 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.02.25 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Jawa Tengah | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah - perikanan budidaya | 5 | 4—6 % | 1.612,1 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.02.02.26 PRO-P: Pengembangan komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Provinsi di DI Yogyakarta | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi DI Yogyakarta - perikanan budidaya | 5 | 5—7 % | 2.225,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.02.02.28 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Jawa Timur | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur - perikanan budidaya | 5 | 2—4 % | 7.803,6 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.02.02.29 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Banten | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Banten - perikanan budidaya | 5 | 4—6 % | 9.022,5 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.02.02.31 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Bali | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali - perikanan budidaya | 5 | 1—2 % | 4.906,8 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.02.03 KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan | 01 - Berkembangnya kawasan perkotaan | 01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Jakarta (angka perhitungan sementara) | 5 | 61,29 | 45.805.617,1 | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Bandung (angka perhitungan sementara) | 5 | 43,03 | | |
| | | 03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Sukabumi (angka perhitungan sementara) | 5 | 44,40 | | |
| | | 04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Cirebon (angka perhitungan sementara) | 5 | 45,47 | | |
| | | 05 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Semarang (angka perhitungan sementara) | 5 | 45,37 | | |
| | | 06 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Magelang (angka perhitungan sementara) | 5 | 50,25 | | |
| | | 07 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Surakarta (angka perhitungan sementara) | 5 | 51,22 | | |
| | | 08 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pekalongan (angka perhitungan sementara) | 5 | 46,73 | | |
| | | 09 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tegal (angka perhitungan sementara) | 5 | 48,40 | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Yogyakarta (angka perhitungan sementara) | 5 | 77,15 | | |
| | | 11 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Surabaya (angka perhitungan sementara) | 5 | 44,66 | | |
| | | 12 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Kediri (angka perhitungan sementara) | 5 | 52,51 | | |
| | | 13 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Malang (angka perhitungan sementara) | 5 | 47,00 | | |
| | | 14 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Probolinggo (angka perhitungan sementara) | 5 | 47,88 | | |
| | | 15 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pasuruan (angka perhitungan sementara) | 5 | 45,97 | | |
| | | 16 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Batu (angka perhitungan sementara) | 5 | 48,95 | | |
| | | 17 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Maja (angka perhitungan sementara) | 5 | 32,22 | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Cilegon (angka perhitungan sementara) | 5 | 64,26 | | |
| | | 19 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Serang (angka perhitungan sementara) | 5 | 56,47 | | |
| | | 20 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Denpasar (angka perhitungan sementara) | 5 | 68,85 | | |
| | 02 - Meningkatnya kualitas WM di Jawa | 01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya | 5 | 4 WM | | |
| | 03 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW | 01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW | 5 | 14 kota | | |
| | 04 - Terbangunnya kota baru | 01 - Jumlah kota baru yang dibangun | 5 | 1 kota | | |
| | 05 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa | 01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan | 5 | 1 WM | | |
| 02.02.03.05 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta di Provinsi DKI Jakarta | 01 - Meningkatnya kualitas WM Jakarta di Jawa | 01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya | 5 | 1 WM | 3.522.159,8 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU) (Terintegrasi dengan PSN) |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.03.06<br>PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta di Provinsi Jawa Barat | 01 - Meningkatnya kualitas WM Jakarta di Jawa | 01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya | 5 | 1 WM | 2.870.783,3 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU)<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 02.02.03.07<br>PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan di Provinsi Jawa Barat | 01 - Meningkatnya kualitas WM di Jawa | 01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya | 5 | 1 WM | 8.599.393,4 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU)<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 02.02.03.09<br>PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan di Provinsi Jawa Tengah | 01 - Meningkatnya kualitas WM di Jawa | 01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya | 5 | 1 WM | 3.446.712,6 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 02.02.03.10<br>PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Jawa Tengah | 01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW | 01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW | 5 | 4 kota | 1.168.921,1 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| 02.02.03.11<br>PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi DI Yogyakarta | 01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil | 01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW | 5 | 1 kota | 12.513.157,1 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 02.02.03.12<br>PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan di Provinsi Jawa Timur | 01 - Meningkatnya kualitas WM di Jawa | 01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya | 5 | 1 WM | 494.751,4 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT<br>(Terintegrasi dengan PSN) |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.03.13<br>PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Jawa Timur | 01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW | 01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW | 5 | 5 kota | 6.961.201,3 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (KPBU), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), KEMENTERIAN PERHUBUNGAN<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 02.02.03.15<br>PRO-P: Pembangunan Kota Baru di Provinsi Banten | 01 - Terbangunnya kota baru | 01 - Jumlah kota baru yang dibangun | 5 | 1 kota | 897.576,3 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU)<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 02.02.03.16<br>PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Banten | 01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW | 01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW | 5 | 2 kota | 7.864,6 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 02.02.03.17<br>PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta di Provinsi Banten | 01 - Meningkatnya kualitas WM Jakarta di Jawa | 01 - Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya | 5 | 1 WM | 115.437,6 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 02.02.03.18<br>PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Bali | 01 - Berkembangnya wilayah metropolitan di luar Jawa | 01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan | 5 | 1 WM | 5.207.658,6 | BADAN PUSAT STATISTIK, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF<br>(Terintegrasi dengan PSN) |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.04<br>KP: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi | 01 - Terbangunnya Desa Terpadu dan Kawasan Perdesaan | 01 - Rata-rata Indeks Desa Pulau Jawa-Bali | 1, 5 | 70,84 | 572.055,7 | |
| | | 02 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional | 1, 5 | 66,06 | | |
| | | 03 - Persentase penduduk miskin perdesaan Wilayah Jawa-Bali | 1, 5 | 10,9—11,3 % | | |
| 02.02.04.04<br>PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Jawa Barat | 01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Jawa Barat | 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Jawa Barat | 1, 5 | 73,10 | 84.616,4 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 02.02.04.05<br>PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Jawa Tengah | 01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Jawa Tengah | 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Jawa Tengah | 1, 5 | 72,15 | 14.562,9 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Terintegrasi dengan PSN) |
| 02.02.04.06 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi DI Yogyakarta | 01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi DI Yogyakarta | 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi DI Yogyakarta | 1, 5 | 79,30 | 1.676,1 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| 02.02.04.07 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Jawa Timur | 01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Jawa Timur | 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Jawa Timur | 1, 5 | 72,30 | 25.013,5 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| 02.02.04.08 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Banten | 01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Banten | 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Banten | 1, 5 | 66,00 | 2.017,3 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Terintegrasi dengan PSN) |
| 02.02.04.09 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Bali | 01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Bali | 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Bali | 1, 5 | 76,85 | 1.727,9 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Terintegrasi dengan PSN) |
| 02.02.04.10 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sukabumi | 01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sukabumi | 01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Sukabumi | 1, 5 | 56,48 | 71.265,2 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK |
| 02.02.04.11 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Magelang dan Kendal | 01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Magelang dan Kendal | 01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Magelang dan Kendal | 1, 5 | 65,85 | 95.329,4 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK |
| 02.02.04.12 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pamekasan dan Banyuwangi | 01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pamekasan dan Banyuwangi | 01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Pamekasan dan Banyuwangi | 1, 5 | 83,75 | 158.877,7 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK |
| 02.02.04.13 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pandeglang | 01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pandeglang | 01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Pandeglang | 1, 5 | 76,08 | 73.229,7 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK |
| 02.02.04.14 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Buleleng dan Klungkung | 01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Buleleng dan Klungkung | 01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Buleleng dan Klungkung | 1, 5 | 70,56 | 21.175,8 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK |
| 02.02.04.15 PRO-P: Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Kawasan Pesisir Selat Sunda | 01 - Pelayanan publik yang berhasil dipulihkan | 01 - Persentase pelayanan publik yang dipulihkan | 2 | 75,00 % | 22.563,7 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, |

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.02.05<br>KP: Kelembagaan dan Keuangan Daerah | 01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | 01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | 4 | 3,52 | 889.776,1 | |
| | 02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 72,9 % | | |
| | 03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 4 | 111 daerah | | |
| | 04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 101 daerah | | |
| | 05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 10.535 dokumen | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik | 01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 23 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien | 4 | 101 daerah | | |
| | 08 - Meningkatnya Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah | 4 | 5 daerah | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 92,96 % | | |
| | 10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik | 01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik | 4 | 34 daerah | | |
| | 11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang | 01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik | 5 | 1.836.596 ha | | |
| | | 02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan | 5 | 713.782 ha | | |
| | | 03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 31 materi teknis dan Ranperkada RDTR | | |
| | | 04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 30 persetujuan substansi RDTR | | |
| | | 05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 11 materi teknis dan Ranperda RTRW | | |
| | | 06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 14 persetujuan substansi RTRW | | |
| | | 07 - Jumlah materi teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN) | 5 | 1 materi teknis dan Raperpres RTR | | |
| | | 08 - Jumlah penanganan perkara hasil penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang | 5 | 10 perkara | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 - Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial | 01 - Jumlah layanan data *center* jaringan informasi geospasial nasional beroperasi | 2 | 1 layanan | | |
| | | 02 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 2 | 1.000 desa | | |
| 02.02.05.05 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi DKI Jakarta | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 334 dokumen | 51.566,4 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | 02 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 88,83 % | | |
| | 03 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 100 % | | |
| | 04 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 1 daerah | | |
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 1 daerah | | |
| | 06 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 1 daerah | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |
| 02.02.05.06<br>PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi DKI Jakarta | 01 - Terlaksananya percepatan peta dasar pertanahan | 01 - Luas cakupan peta dasar pertanahan | 5 | 2.524.043 ha | 46.272,3 | KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| 02.02.05.07<br>PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Jawa Barat | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 2.751 dokumen | 216,9 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | 02 - Meningkatnya kerja sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama | 4 | 1 daerah | | |
| | 03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 93,70 % | | |
| | 04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 59,00 % | | |
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 25 daerah | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 22 daerah | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 22 daerah | | |
| | 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |
| 02.02.05.08 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Jawa Barat | 01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah | 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah | 5 | 330.795 bidang | 216.044,6 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| | 02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang | 01 - Jumlah bidang tanah | 5 | 169.781 ha | | |
| 02.02.05.09 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Jawa Barat | 01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 7 rekomendasi kebijakan | 3.469,3 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 7 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 7 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 2 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 05 - Jumlah penanganan perkara hasil penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang | 5 | 20 perkara | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.05.10<br>PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Jawa Barat | 01 - Terlaksananya layanan data *center* | 01 - Jumlah layanan data *center* jaringan informasi geospasial nasional beroperasi | 2 | 1 layanan | 85.950,4 | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) |
| 02.02.05.11<br>PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Jawa Tengah | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 1.766 dokumen | 0,0[a] | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | 02 - Meningkatnya kera sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama | 4 | 1 daerah | | |
| | 03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 93,30 % | | |
| | 04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 69 % | | |
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 31 daerah | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 27 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 27 daerah | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |
| 02.02.05.12 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah | 01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah | 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah | 5 | 302.082 bidang | 216.135,6 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| | 02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang | 01 - Jumlah bidang tanah | 5 | 121.987 ha | | |
| 02.02.05.13 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Jawa Tengah | 01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 7 rekomendasi kebijakan | 3.457,4 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 11 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 3 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 3 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 05 - Jumlah materi teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN) | 5 | 1 rekomendasi kebijakan | | |
| 02.02.05.14 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Jawa Tengah | 01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 2 | 400 desa | 0,0[a] | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.05.15<br>PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 675 dokumen | 616,9 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | 02 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 96,74 % | | |
| | 03 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 80,00 % | | |
| | 04 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 6 daerah | | |
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 5 daerah | | |
| | 06 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 5 daerah | | |
| | 07 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara. | 01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara. | 4 | 1 rekomendasi | | |
| 02.02.05.16 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi D.I. Yogyakarta | 01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah | 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah | 5 | 2.500 bidang | 2.710,6 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | 02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang | 01 - Jumlah bidang tanah | 5 | 345 ha | | |
| 02.02.05.17 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi D.I. Yogyakarta | 01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 4 rekomendasi kebijakan | 1.251,4 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 1 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 03 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 2 rekomendasi kebijakan | | |
| 02.02.05.18 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Jawa Timur | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 3.169 dokumen | 0,0[a] | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | 02 - Meningkatnya kerja sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama | 4 | 1 daerah | | |
| | 03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 92,93 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 86 % | | |
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 32 daerah | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 30 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 30 daerah | | |
| | 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |
| 02.02.05.19<br>PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Jawa Timur | 01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah | 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah | 5 | 694.694 bidang | 233.015,7 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang | 01 - Jumlah bidang tanah | 5 | 248.957 ha | | |
| 02.02.05.20<br>PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Jawa Timur | 01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 14 rekomendasi kebijakan | 2.958,3 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 13 rekomendasi kebijakan | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 2 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 2 rekomendasi kebijakan | | |
| 02.02.05.21<br>PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Jawa Timur | 01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 2 | 300 desa | 0,0[a] | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) |
| 02.02.05.22<br>PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Banten | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 966 dokumen | 0,0[a] | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | 02 - Meningkatnya kerja sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama | 4 | 1 daerah | | |
| | 03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 90,84 % | | |
| | 04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 52 % | | |
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 8 daerah | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 8 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 8 daerah | | |
| | 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |
| 02.02.05.23 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Banten | 01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah | 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah | 5 | 125.134 bidang | 8.599,7 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERTANIAN |
| | 02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang | 01 - Jumlah bidang tanah | 5 | 49.081 ha | | |
| 02.02.05.24 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Banten | 01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 3 rekomendasi kebijakan | 1.945,0 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 2 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 1 rekomendasi kebijakan | | |
| 02.02.05.25 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Banten | 01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 2 | 200 desa | 0,0[a] | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) |

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.05.26<br>PRO-P: Peningkatan kapasitas pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Bali | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 874 dokumen | 0,0[a] | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | 02 - Meningkatnya kerja sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama | 4 | 1 daerah | | |
| | 03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 94,41 % | | |
| | 04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 60 % | | |
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 8 daerah | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 8 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 8 daerah | | |
| | 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.05.27<br>PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Bali | 01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah | 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah | 5 | 11.489 bidang | 4.454,1 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang | 01 - Jumlah bidang tanah | 5 | 16.427 ha | | |
| 02.02.05.28<br>PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Bali | 01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 9 rekomendasi kebijakan | 1.376,7 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 5 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 03 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 1 rekomendasi kebijakan | | |
| 02.02.05.31<br>PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi DKI Jakarta | 01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 1 rekomendasi kebijakan | 9.735,0 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 1 rekomendasi kebijakan | | |
| 02.03<br>PP: Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara | 01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Nusa Tenggara | 01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Nusa Tenggara | 5 | 5,8—6,2 % per tahun | 2.245.143,2 | |
| | | 02 - IPM Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara | 1 | 66,63—69,59 nilai minimum—nilai maksimum | | |
| | | 03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Nusa Tenggara | 1 | 13,8—14,8 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01<br>KP: Pengembangan Kawasan Strategis | 01 - Berkembangnya kawasan strategis | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah | 5 | >1 | 195.904,0 | |
| | | 02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan | 5 | 3 kawasan | | |
| | | 03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) | 5 | 2 jumlah destinasi | | |
| | | 04 - KEK berbasis pariwisata dan industri | 5 | 1 kawasan | | |
| 02.03.01.01<br>PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Mandalika/KEK Mandalika | 01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Mandalika/ KEK Mandalika | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5 | >1 | 195.904,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 02.03.01.02<br>PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo | 01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Nusa Tenggara Timur | 5 | >1 | 0,0[a] | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.02<br>KP: Pengembangan Sektor Unggulan | 01 - Berkembangnya sektor unggulan | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kopi | 5 | 1—2 % | 34.409,8 | |
| | | 02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa | 5 | 1—2 % | | |
| | | 03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - tebu | 5 | 1—2 % | | |
| | | 04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap | 5 | 1—2 % | | |
| | | 05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya | 5 | 1—2 % | | |
| | | 06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - garam | 5 | 10—12 % | | |
| | | 07 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kakao | 5 | 7—9 % | | |
| | | 08 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - cengkeh | 5 | 4—6 % | | |
| 02.03.02.01<br>PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Nusa Tenggara Barat | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - kelapa | 5 | 1—2 % | 876,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.02.02 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Nusa Tenggara Barat | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - kopi | 5 | 2—3 % | 2.980,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.03.02.03 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Nusa Tenggara Barat | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - tebu | 5 | 1—3 % | 1.508,6 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.03.02.08 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Nusa Tenggara Barat | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - garam | 5 | 10—12 % | 3.481,5 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.03.02.09 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Nusa Tenggara Timur | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT - kopi | 5 | 1—2 % | 1.169,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.03.02.10 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Nusa Tenggara Timur | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT - kelapa | 5 | 1—3 % | 3.037,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| 02.03.02.14 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT - perikanan budidaya | 5 | 1—2 % | 1.822,5 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.02.16 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - perikanan budidaya | 5 | 1—3 % | 19.535,1 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.03.02.17 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Nusa Tenggara Barat | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB - kakao | 5 | 9—11 % | 0,0[a] | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.03.02.19 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Nusa Tenggara Timur | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT - kakao | 5 | 7—9 % | 0,0[a] | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.03.03 KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan | 01 - Berkembangnya kawasan perkotaan | 01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Mataram (Angka perhitungan sementara) | 5 | 46,66 | 53.763,4 | |
| | | 02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Kupang (Angka perhitungan sementara) | 5 | 46,23 | | |
| | 02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW | 01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW | 5 | 2 kota | | |
| 02.03.03.02 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Timur | 01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW | 01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW | 5 | 1 kota | 53.763,4 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 02.03.04 KP: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi | 01 - Terbangunnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi | 01 - Rata-rata Indeks Desa Wilayah Nusa Tenggara | 1, 5 | 58,58 | 1.943.218,4 | |
| | | 02 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional | 1, 5 | 58,67 | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 03 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Pulau Nusa Tenggara | 5 | 51,28 | | |
| | | 04 - Persentase penduduk miskin perdesaan Wilayah Nusa Tenggara | 1 | 19,5—19,8 % | | |
| | 02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal | 01 - Jumlah daerah tertinggal | 5 | 14 kabupaten | | |
| | | 02 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya | 5 | 24 kecamatan | | |
| | | 03 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan | 5 | 0,50 | | |
| 02.03.04.02 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Nusa Tenggara Timur | 01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Nusa Tenggara Timur | 01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur | 5 | 24 kecamatan | 53.210,3 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK |
| 02.03.04.11 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat | 01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat | 01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat | 1 | 24,5—25,0 % | 3.735,1 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PERTANIAN |
| | | 02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat | 1 | 68,7—69,2 | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.04.12<br>PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur | 01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur | 01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur | 1 | 24,7—25,2 % | 1.772.099,4 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERTANIAN, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP), BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI), KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, DAK (Terintegrasi dengan PSN) |
| | | 02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur | 1 | 64,4—64,9 | | |
| 02.03.04.14<br>PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua | 01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua | 01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Atambua | 5 | 0,46 | 0,0[a] | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 02.03.04.15<br>PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kefamenanu | 01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kefamenanu | 01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Kefamenanu | 5 | 0,54 | 267,4 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.03.04.16<br>PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur | 01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur | 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur | 1, 5 | 55,70 | 4.102,2 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP) |
| 02.03.04.17<br>PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Barat | 01 - Terlaksananya pembangunan desa terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat | 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat | 1, 5 | 72,25 | 5.350,7 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 02.03.04.18<br>PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompu | 01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompu | 01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompu | 1, 5 | 64,85 | 62.556,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK |
| 02.03.04.19<br>PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Manggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur | 01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Manggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur | 01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Manggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur | 1, 5 | 52,45 | 40.223,5 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.04.20<br>PRO-P: Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Pulau Lombok dan Sekitarnya | 01 - Pelayanan publik yang berhasil dipulihkan | 01 - Persentase pelayanan publik yang dipulihkan | 2 | 75 % | 606,2 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL |
| 02.03.04.21<br>PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tambora dan Labangka | 01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tambora dan Labangka | 01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat | 5 | 59,00 | 80,0 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 02.03.04.22<br>PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur, Ponu, dan Melolo | 01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur, Ponu, dan Melolo | 01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur | 5 | 46,14 | 987,3 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 02.03.05<br>KP: Kelembagaan dan Keuangan Daerah | 01 - Meningkatnya nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | 01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | 4 | 3,21 | 17.847,7 | |
| | 02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 36,50 % | | |
| | 03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 4 | 28 daerah | | |
| | 04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 27 daerah | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 1.497 dokumen | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik | 01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 11 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien | 4 | 27 daerah | | |
| | 08 - Meningkatnya Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah | 4 | 2 daerah | | |
| | 09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 89,9 % | | |
| | 10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik | 01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik | 4 | 34 daerah | | |
| | 11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang | 01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik | 5 | 1.047.767 ha | | |
| | | 02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan | 5 | 79.327 ha | | |
| | | 03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 8 materi teknis dan Ranperkada | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 6 persetujuan substansi RDTR | | |
| | | 05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 4 materi teknis dan Ranperda | | |
| | | 06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 3 persetujuan substansi RTRW | | |
| | | 07 - Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak atas Tanah | 5 | 5 | | |
| | | 08 - Jumlah Penanganan Perkara Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang | 5 | 5 perkara | | |
| | 12 - Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial | 01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 2 | 600 desa | | |
| 02.03.05.11<br>PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 774 dokumen | 0,0[a] | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | 02 - Meningkatnya kerja sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama | 4 | 1 daerah | | |
| | 03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 87,41 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 34 % | | |
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 18 daerah | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 18 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 18 daerah | | |
| | 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |
| 02.03.05.12<br>PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 723 dokumen | 0,0[a] | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | 02 - Meningkatnya kerja sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama | 4 | 1 daerah | | |
| | 03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 92,48 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 39 % | | |
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 10 daerah | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 9 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 9 daerah | | |
| | 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |
| 02.03.05.13 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur | 01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah | 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah | 5 | 40.099 bidang | 7.679,2 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | 02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang | 01 - Jumlah bidang tanah | 5 | 92.247 ha | | |
| 02.03.05.14 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat | 01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah | 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah | 5 | 71.535 bidang | 5.864,5 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | 02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang | 01 - Jumlah bidang tanah | 5 | 62.621 ha | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.05.15<br>PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Timur | 01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 4 materi teknis dan Ranperkada | 1.590,0 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 3 persetujuan substansi RDTR | | |
| | | 03 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 1 persetujuan substansi RTRW | | |
| 02.03.05.16<br>PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Barat | 01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 8 materi teknis dan Ranperkada | 2.714,0 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 3 persetujuan substansi RDTR kab/kota | | |
| | | 03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 2 materi teknis dan Ranperda | | |
| | | 04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 1 persetujuan substansi RTRW prov/kab/kota | | |
| 02.03.05.18<br>PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Nusa Tenggara Barat | 01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 2 | 250 desa | 0,0[a] | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) |
| 02.03.05.19<br>PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Nusa Tenggara Timur | 01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 2 | 350 desa | 0,0[a] | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04<br>PP: Pembangunan Wilayah Kalimantan | 01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kalimantan | 01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan | 5 | 5,2—5,5 % per tahun | 22.322.133,3 | |
| | | 02 - IPM Provinsi di Wilayah Kalimantan | 1 | 68,91—78,18 nilai minimum—nilai maksimum | | |
| | | 03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Kalimantan | 1 | 4,3—5,1 % | | |
| 02.04.01<br>KP: Pengembangan Kawasan Strategis | 01 - Berkembangnya Kawasan Strategis | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah | 5 | >1 | 6.409,0 | |
| | | 02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan | 5 | 6 kawasan | | |
| | | 03 - Destinasi Pariwisata Pengembangan dan revitalisasi | 5 | 2 jumlah destinasi | | |
| | | 04 - KEK berbasis pariwisata dan industri | 5 | 1 kawasan | | |
| | | 05 - KI Prioritas dan KI Pengembangan | 5 | 3 jumlah KI | | |
| 02.04.01.01<br>PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Ketapang | 01 - Terfasilitasinya realisasi investasi dan pembangunan KI Ketapang | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Barat | 5 | >1 | 0,0[a] | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN<br>(Terintegrasi dengan PSN) |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.01.02<br>PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-Singkawang | 01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-Singkawang | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Barat | 5 | >1 | 4.557,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 02.04.01.03<br>PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Surya Borneo | 01 - Terfasilitasinya realisasi investasi dan pembangunan KI Surya Borneo | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Tengah | 5 | >1 | 0,0[a] | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| 02.04.01.04<br>PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau | 01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi | 5 | >1 | 1.852,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 02.04.01.05<br>PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan | 01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Aceh | 5 | >1 | 0,0[a] | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| 02.04.01.06<br>PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Tanah Kuning | 01 - Terlaksananya Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Tanah Kuning | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Utara | 5 | >1 | 0,0[a] | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN<br>(Terintegrasi dengan PSN) |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.02<br>KP: Pengembangan Sektor Unggulan | 01 - Berkembangnya sektor unggulan | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kopi | 5 | 1—2 % | 27.118,6 | |
| | | 02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - karet | 5 | 2—3 % | | |
| | | 03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap | 5 | 1—2 % | | |
| | | 04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya | 5 | 4—6 % | | |
| | | 05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - lada | 5 | 1—2 % | | |
| | | 06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa sawit | 5 | 4—6 % | | |
| | | 07 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa | 5 | 2—4 % | | |
| | | 08 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kakao | 5 | 1—3 % | | |
| 02.04.02.01<br>PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Kalimantan Barat | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat - karet | 5 | 2—3 % | 3.000,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.02.02 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Kalimantan Barat | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat - lada | 5 | 2—3 % | 1.016,5 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.04.02.15 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Kalimantan Selatan | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan - karet | 5 | 4—6 % | 2.234,5 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.04.02.25 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Kalimantan Utara | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara - lada | 5 | 2—5 % | 1.980,8 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.04.02.28 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Kalimantan Tengah | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah - perikanan budidaya | 5 | 5—7 % | 2.022,5 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.04.02.30 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Provinsi Kalimantan Selatan | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan - perikanan budidaya | 5 | 5—7 % | 3.497,1 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.04.02.32 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Provinsi Kalimantan Timur | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur - perikanan budidaya | 5 | 5—7 % | 2.022,5 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.02.34 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Provinsi Kalimantan Utara | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara - perikanan budidaya | 5 | 5—7 % | 1.822,5 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.04.02.35 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Kalimantan Barat | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat - kopi | 5 | 1—2 % | 1.575,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.04.02.36 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Kalimantan Barat | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat - kakao | 5 | 1—2 % | 0,0[a] | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.04.02.37 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Kalimantan Barat | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat - kelapa | 5 | 1—2 % | 1.633,5 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.04.02.38 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Kalimantan Tengah | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah - kelapa | 5 | 1—2 % | 1.333,2 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.04.02.40 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Karet di Provinsi Kalimantan Timur | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur - karet | 5 | 4—6 % | 1.400,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.02.41<br>PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Kalimantan Timur | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur - kelapa | 5 | 3—5 % | 774,4 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.04.02.42<br>PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Kalimantan Barat | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat - perikanan budidaya | 5 | 4—6 % | 1.822,5 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.04.02.43<br>PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Kalimantan Utara | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara - kelapa | 5 | 5—7 % | 983,6 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.04.03<br>KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan | 01 - Berkembangnya kawasan perkotaan | 01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pontianak (angka perhitungan sementara) | 5 | 47,44 | 21.644.323,4 | |
| | | 02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Singkawang (angka perhitungan sementara) | 5 | 41,86 | | |
| | | 03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Palangkaraya (angka perhitungan sementara) | 5 | 48,97 | | |
| | | 04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Banjarmasin (angka perhitungan sementara) | 5 | 40,44 | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 05 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Ibu Kota Nusantara (angka perhitungan sementara) | 5 | 40,86 | | |
| | | 06 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Balikpapan (angka perhitungan sementara) | 5 | 53,20 | | |
| | | 07 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Samarinda (angka perhitungan sementara) | 5 | 49,68 | | |
| | | 08 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Tanjung Selor (angka perhitungan sementara) | 5 | 39,34 | | |
| | | 09 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tarakan (angka perhitungan sementara) | 5 | 49,92 | | |
| | 02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW | 01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW | 5 | 6 kota | | |
| | 03 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa | 01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan | 5 | 1 WM | | |
| | 04 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa | 01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan | 5 | 1 WM | | |
| | 05 - Terbangunnya Ibu Kota Nusantara | 01 - Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara | 5 | 6.671 ha | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06 - Terbangunnya kota baru | 01 - Jumlah kota baru yang dibangun | 5 | 1 kota | | |
| 02.04.03.03<br>PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Kalimantan Selatan | 01 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa | 01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan | 5 | 1 WM | 28.913,9 | BADAN PUSAT STATISTIK, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| | 02 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa | 01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan | 5 | 1 WM | | |
| 02.04.03.04<br>PRO-P: Pembangunan Ibu Kota Nusantara | 01 - Terbangunnya Ibu Kota Nusantara | 01 - Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara | 5 | 6.671 ha | 20.989.454,7 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KEUANGAN, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| 02.04.03.05<br>PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kalimantan Barat | 01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW | 01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW | 5 | 2 kota | 161.547,5 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| 02.04.03.06<br>PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kalimantan Tengah | 01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW | 01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW | 5 | 1 kota | 96.928,6 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.03.07 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kalimantan Timur | 01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW | 01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW | 5 | 2 kota | 312.197,1 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| 02.04.03.08 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Kalimantan Utara | 01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW | 01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW | 5 | 1 kota | 55.281,6 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| 02.04.04 KP: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi | 01 - Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi | 01 - Rata-rata Indeks Desa Wilayah Kalimantan | 1, 5 | 57,92 | 590.259,5 | |
| | | 02 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional | 1, 5 | 54,91 | | |
| | | 03 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Kalimantan | 5 | 56,70 | | |
| | | 04 - Persentase penduduk miskin Wilayah Kalimantan | 1 | 6,6—6,9 % | | |
| | 02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas Perbatasan, dan Daerah Tertinggal | 01 - Rata-rata Nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan | 5 | 0,47 | | |
| | | 02 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya | 5 | 35 kecamatan | | |
| 02.04.04.06 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Barat | 01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Kalimantan Barat | 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Barat | 1, 5 | 56,45 | 15.933,1 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 02.04.04.07<br>PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, dan Sambas | 01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, dan Sambas | 01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, dan Sambas | 1, 5 | 60,02 | 60.688,5 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK |
| 02.04.04.08<br>PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya, Gerbang Mas Perkasa, dan Subah | 01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya, Gerbang Mas Perkasa, dan Subah | 01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Barat | 5 | 62,82 | 1.153,5 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 02.04.04.09<br>PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Barat | 01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kalimantan Barat | 01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Kalimantan Barat | 5 | 12 kecamatan | 20.668,3 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DAK |
| 02.04.04.10<br>PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Aruk | 01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Aruk | 01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Paloh Aruk | 5 | 0,50 | 31.193,5 | BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP), KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 02.04.04.11<br>PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jagoi Babang | 01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jagoi Babang | 01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jagoi Babang | 5 | 0,37 | 8.378,9 | KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DAK |
| 02.04.04.12<br>PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Tengah | 01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Tengah | 01 - Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Tengah | 1, 5 | 59,85 | 2.509,5 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) |
| 02.04.04.13<br>PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kotawaringin Barat | 01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kotawaringin Barat | 01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Kotawaringin Barat | 1, 5 | 60,82 | 58.342,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK |
| 02.04.04.14<br>PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya, serta Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup yang mendukung Pengembangan Food Estate sesuai Direktif Presiden dalam rangka Penguatan Ketahanan Pangan Nasional | 01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya, serta Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup yang Mendukung Pengembangan Food Estate sesuai Direktif Presiden dalam Rangka Penguatan Ketahanan Pangan Nasional | 01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Tengah | 5 | 28,40 | 11.291,8 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| | | 02 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Mendukung Food Estate Provinsi Kalimantan Tengah | 5 | 54,39 | | |
| 02.04.04.15<br>PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Selatan | 01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan | 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Selatan | 1, 5 | 65,30 | 1.947,3 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 02.04.04.16<br>PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barito Kuala dan Banjar | 01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barito Kuala dan Banjar | 01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Barito Kuala dan Banjar | 1, 5 | 73,60 | 58.947,5 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK |
| 02.04.04.17<br>PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru | 01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru | 01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Kalimantan Selatan | 5 | 71,54 | 5.269,6 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 02.04.04.18<br>PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Timur | 01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Kalimantan Timur | 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Timur | 1, 5 | 63,78 | 3.691,9 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |



SK No 093138 C

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.04.19<br>PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Berau dan Kutai Timur | 01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Berau dan Kutai Timur | 01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Berau dan Kutai Timur | 1, 5 | 60,05 | 14.498,9 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK |
| 02.04.04.20<br>PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kerang dan Maloy Kaliorang | 01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kerang dan Maloy Kaliorang | 01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Timur | 5 | 57,25 | 3.179,6 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 02.04.04.21<br>PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Kalimantan Utara | 01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Kalimantan Utara | 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Kalimantan Utara | 1, 5 | 53,40 | 1.750,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 02.04.04.22<br>PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bulungan dan Nunukan | 01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bulungan dan Nunukan | 01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Bulungan dan Nunukan | 1, 5 | 53,87 | 35.286,8 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK |
| 02.04.04.23<br>PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Salim Batu dan Seimenggaris | 01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Salim Batu dan Seimenggaris | 01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Utara | 5 | 53,71 | 1.928,2 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |



SK No 093139 C

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.04.24<br>PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Utara | 01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kalimantan Utara | 01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Kalimantan Utara | 5 | 20 kecamatan | 750,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 02.04.04.25<br>PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan | 01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan | 01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Nunukan | 5 | 0,42 | 75.035,8 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, DAK |
| 02.04.04.26<br>PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Midang | 01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Midang | 01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Long Midang | 5 | 0,42 | 0,0[a] | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DAK |
| 02.04.04.27<br>PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tou Lumbis | 01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tou Lumbis | 01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tou Lumbis | 5 | 0,42 | 0,0[a] | DAK |
| 02.04.04.28<br>PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Nawang | 01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Nawang | 01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Long Nawang | 5 | 0,66 | 170.370,5 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DAK |
| 02.04.04.29<br>PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Timur | 01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kalimantan Timur | 01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Kalimantan Timur | 5 | 3 kecamatan | 7.444,1 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK |
| 02.04.05<br>KP: Kelembagaan dan Keuangan Daerah | 01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | 01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | 4 | 3,28 | 54.022,8 | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 36,80 % | | |
| | 03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 4 | 54 daerah | | |
| | 04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 49 daerah | | |
| | 05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 3.964 dokumen | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik | 01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 6 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien | 4 | 49 daerah | | |
| | 08 - Meningkatnya kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah | 4 | 5 daerah | | |
| | 09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 90,9 % | | |
| | 10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik | 01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik | 4 | 34 daerah | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang | 01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik | 5 | 1.699.873 ha | | |
| | | 02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan | 5 | 3.030.071 ha | | |
| | | 03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 7 materi teknis dan Ranperkada RDTR | | |
| | | 04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 12 persetujuan substansi RDTR | | |
| | | 05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 6 materi teknis dan Ranperda RTRW | | |
| | | 06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 8 persetujuan substansi RTRW | | |
| | | 07 - Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak atas Tanah | 5 | 5 | | |
| | | 08 - Jumlah materi teknis RDTR Rencana IKN | 5 | 5 materi teknis dan Raperpres | | |
| | | 09 - Jumlah dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Perundangan RDTR Calon IKN | 5 | 5 Raperpu RDTR IKN | | |
| | 12 - Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan informasi geospasial | 01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 2 | 1.000 desa | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.05.04<br>PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Barat | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 1.304 dokumen | 0,0[a] | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | 02 - Meningkatnya kerja sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama | 4 | 1 daerah | | |
| | 03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 89,04 % | | |
| | 04 - Meningkatnya persentase daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai Nilai Indeks Inovasi Tinggi | 4 | 30 % | | |
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 14 daerah | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 12 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 12 daerah | | |
| | 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.05.05 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Barat | 01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah | 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah | 5 | 51.861,0 bidang | 4.036,0 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | 02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang | 01 - Jumlah Bidang Tanah | 5 | 83.758 bidang | | |
| 02.04.05.06 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Barat | 01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 12 rekomendasi kebijakan | 3.243,1 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 3 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 1 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 1 rekomendasi kebijakan | | |
| 02.04.05.07 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 1.131 dokumen | 2.554,2 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | 02 - Meningkatnya kerja sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama | 4 | 1 daerah | | |
| | 03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 90,26 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04 - Meningkatnya persentase daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai Nilai Indeks Inovasi Tinggi | 4 | 37 % | | |
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 13 daerah | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 12 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 12 daerah | | |
| | 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |
| 02.04.05.08 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah | 01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah | 01 - Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah | 5 | 13.292 bidang | 4.544,5 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | 02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang | 01 - Jumlah bidang tanah | 5 | 56.225 ha | | |
| 02.04.05.09 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Tengah | 01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 3 rekomendasi kebijakan | 1.818,5 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 3 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 1 rekomendasi kebijakan | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.05.10<br>PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 1.115 dokumen | 0,0[a] | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | 02 - Meningkatnya kerja sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama | 4 | 1 daerah | | |
| | 03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 91,04 % | | |
| | 04 - Meningkatnya persentase daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 30 % | | |
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 12 daerah | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 11 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 11 daerah | | |
| | 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.05.11 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Selatan | 01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah | 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah | 5 | 47.196 bidang | 4.576,9 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | 02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang | 01 - Jumlah bidang tanah | 5 | 30.792 ha | | |
| 02.04.05.12 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Selatan | 01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 4 rekomendasi kebijakan | 1.214,8 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 2 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 5 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 3 rekomendasi kebijakan | | |
| 02.04.05.13 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Timur | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 89 dokumen | 0,0[a] | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | 02 - Meningkatnya kerja sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama | 4 | 1 daerah | | |
| | 03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 93,45 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04 - Meningkatnya persentase daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai Nilai Indeks Inovasi Tinggi | 4 | 57 % | | |
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 9 daerah | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 9 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 9 daerah | | |
| | 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |
| 02.04.05.14<br>PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Kalimantan Timur | 01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah | 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah | 5 | 162.054 bidang | 29.462,5 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | 02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang | 01 - Jumlah bidang tanah | 5 | 185.246 ha | | |
| 02.04.05.15<br>PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Timur | 01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 11 rekomendasi kebijakan | 1.957,5 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/.Kota | 5 | 2 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 03 - Jumlah materi teknis RDTR Rencana IKN | 5 | 1 rekomendasi kebijakan | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 04 - Jumlah dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Perundangan RDTR Calon IKN | 5 | 4 rekomendasi kebijakan | | |
| 02.04.05.16<br>PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Kalimantan Utara | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 325 dokumen | 0,0[a] | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | 02 - Meningkatnya kerja sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama | 4 | 1 daerah | | |
| | 03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 90,71 % | | |
| | 04 - Meningkatnya persentase daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai Nilai Indeks Inovasi Tinggi | 4 | 30 % | | |
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 6 daerah | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 5 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 5 daerah | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |
| 02.04.05.18<br>PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Utara | 01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 1 rekomendasi kebijakan | 614,8 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 2 rekomendasi kebijakan | | |
| 02.04.05.19<br>PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Barat | 01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 2 | 400 desa | 0,0[a] | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) |
| 02.04.05.21<br>PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Selatan | 01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 2 | 300 desa | 0,0[a] | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) |
| 02.04.05.22<br>PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Timur | 01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 2 | 300 desa | 0,0[a] | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) |
| 02.05<br>PP: Pembangunan Wilayah Sulawesi | 01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sulawesi | 01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sulawesi | 5 | 7,4—8,0 % per tahun | 4.161.616,9 | |
| | | 02 - IPM Provinsi di Wilayah Sulawesi | 1 | 67,73—74,45 nilai minimum—nilai maksimum | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Sulawesi | 1 | 8,3—8,8 % | | |
| 02.05.01<br>KP: Pengembangan Kawasan Strategis | 01 - Berkembangnya kawasan strategis | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah | 5 | >1 | 601.606,2 | |
| | | 02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan | 5 | 8 kawasan | | |
| | | 03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) | 5 | 2 jumlah destinasi | | |
| | | 04 - Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Revitalisasi | 5 | 1 jumlah destinasi | | |
| | | 05 - KEK berbasis pariwisata dan industri | 5 | 3 kawasan | | |
| | | 06 - KI Prioritas dan KI Pengembangan | 5 | 2 jumlah KI | | |
| 02.05.01.01<br>PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KEK Bitung | 01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Bitung | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Utara | 5 | >1 | 0,0[a] | KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| 02.05.01.02<br>PRO-P: Percepatan Operasionalisasi KEK Likupang/Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang | 01 - Terlaksananya percepatan operasionalisasi KEK Likupang/Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Utara | 5 | >1 | 428.669,6 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| 02.05.01.03<br>PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Palu | 01 - Terlaksananya fasilitasi realisasi investasi dan pembangunan KI/KEK Palu | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Tengah | 5 | >1 | 99.200,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| 02.05.01.04<br>PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar-Selayar | 01 - Terlaksananya pembangunan destinasi pariwisata pengembangan Toraja-Makassar-Selayar | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Selatan | 5 | >1 | 0,0[a] | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| 02.05.01.05<br>PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi | 01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Tenggara | 5 | >1 | 73.736,6 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 02.05.01.06<br>PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Takalar | 01 - Terlaksananya Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Takalar | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Selatan | 5 | >1 | 0,0[a] | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN<br>(Terintegrasi dengan PSN) |

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.02<br>KP: Pengembangan Sektor Unggulan | 01 - Berkembangnya sektor unggulan | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kakao | 5 | 1—3 % | 117.608,1 | |
| | | 02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kopi | 5 | 2—4 % | | |
| | | 03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa | 5 | 1—2 % | | |
| | | 04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - lada | 5 | 1—2 % | | |
| | | 05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - pala | 5 | 1—2 % | | |
| | | 06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - cengkeh | 5 | 4—6 % | | |
| | | 07 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap | 5 | 2—4 % | | |
| | | 08 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya | 5 | 1—2 % | | |
| | | 09 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - garam | 5 | 10—12 % | | |
| | | 10 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa sawit | 5 | 4—6 % | | |
| | | 11 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - tebu | 5 | 4—6 % | | |



SK No 093153 C

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.02.01<br>PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Utara | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara - kelapa | 5 | 4—4 % | 3.526,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.05.02.02<br>PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Sulawesi Utara | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara - pala | 5 | 3—4 % | 2.557,1 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| | | 02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara - cengkeh | 5 | 5—7 % | | |
| 02.05.02.04<br>PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sulawesi Utara | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara - kakao | 5 | 4—6 % | 0,0[a] | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.05.02.05<br>PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sulawesi Tengah | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah - kakao | 5 | 3—4 % | 0,0[a] | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.05.02.06<br>PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Sulawesi Tengah | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah - cengkeh | 5 | 1—3 % | 150,8 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.05.02.08<br>PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Tengah | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah - kelapa | 5 | 2—3 % | 1.542,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.02.09<br>PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sulawesi Selatan | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - kakao | 5 | 3—4 % | 0,0[a] | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.05.02.10<br>PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sulawesi Selatan | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - kopi | 5 | 1—2 % | 15.321,3 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.05.02.11<br>PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Sulawesi Selatan | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - lada | 5 | 2—3 % | 5.691,3 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| | | 02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - pala | 5 | 1—2 % | | |
| 02.05.02.12<br>PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Selatan | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - kelapa | 5 | 1—2 % | 7.799,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.05.02.14<br>PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sulawesi Tenggara | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - kakao | 5 | 2—3 % | 0,0[a] | KEMENTERIAN PERTANIAN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.02.15 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Sulawesi Tenggara | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - lada | 5 | 2—3 % | 1.204,1 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| | | 02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - pala | 5 | 1—2 % | | |
| | | 03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - cengkeh | 5 | 5—7 % | | |
| 02.05.02.17 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Tenggara | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - kelapa | 5 | 1—2 % | 2.760,8 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.05.02.19 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Gorontalo | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo - kelapa | 5 | 1—3 % | 876,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.05.02.21 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala dan Cengkeh di Provinsi Gorontalo | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh | 02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo - cengkeh | 5 | 4—6 % | 204,6 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.05.02.22 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Sulawesi Barat | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat - kopi | 5 | 9—10 % | 3.075,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.02.23 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Sulawesi Barat | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat - kakao | 5 | 2—3 % | 0,0(a) | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.05.02.27 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Utara | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara - perikanan budidaya | 5 | 1—2 % | 3.419,6 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.05.02.29 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Tengah | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah - perikanan budidaya | 5 | 1—2 % | 7.000,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.05.02.31 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Garam di Provinsi Sulawesi Selatan | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - garam | 5 | 10—12 % | 14.587,4 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.05.02.32 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Selatan | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - perikanan budidaya | 5 | 4—6 % | 14.758,3 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.05.02.34 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Tenggara | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara - perikanan budidaya | 5 | 1—2 % | 15.822,5 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.02.36<br>PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Gorontalo | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo - perikanan budidaya | 5 | 4—6 % | 2.022,5 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.05.02.38<br>PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Sulawesi Barat | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat - perikanan budidaya | 5 | 4—6 % | 11.022,5 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.05.02.39<br>PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Sulawesi Barat | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat - kelapa | 5 | 1—2 % | 1.622,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.05.02.41<br>PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Tebu di Provinsi Sulawesi Selatan | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan - tebu | 5 | 5—6 % | 2.645,3 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.05.03<br>KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan | 01 - Berkembangnya kawasan perkotaan | 01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Manado (angka perhitungan sementara) | 5 | 49,55 | 2.808.840,2 | |
| | | 02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Palu (angka perhitungan sementara) | 5 | 48,31 | | |
| | | 03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Makassar (angka perhitungan sementara) | 5 | 49,55 | | |



SK No 093158 C

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Parepare (angka perhitungan sementara) | 5 | 52,40 | | |
| | | 05 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Palopo (angka perhitungan sementara) | 5 | 45,88 | | |
| | | 06 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Kendari (angka perhitungan sementara) | 5 | 46,92 | | |
| | | 07 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Gorontalo (angka perhitungan sementara) | 5 | 43,99 | | |
| | | 08 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Mamuju (angka perhitungan sementara) | 5 | 36,20 | | |
| | 02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW | 01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW | 5 | 6 kota | | |
| | 03 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa | 01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan | 5 | 1 WM | | |
| | 04 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa | 01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan | 5 | 2 WM | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.03.03 PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sulawesi Utara | 01 - Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa | 01 - Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan | 5 | 1 WM | 10.762,5 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 02 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa | 01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan | 5 | 1 WM | | |
| 02.05.03.04 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Tengah | 01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW | 01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW | 5 | 1 kota | 100.294,7 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| 02.05.03.05 PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan di Provinsi Sulawesi Selatan | 01 - Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa | 01 - Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan | 5 | 1 WM | 1.518.914,0 | BADAN PUSAT STATISTIK, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| 02.05.03.06 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Selatan | 01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW | 01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW | 5 | 2 kota | 9.081,8 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 02.05.03.07 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Tenggara | 01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW | 01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW | 5 | 1 kota | 639.047,4 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| 02.05.03.08 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Gorontalo | 01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW | 01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW | 5 | 1 kota | 472.857,6 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN) |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.03.09<br>PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Barat | 01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW | 01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW | 5 | 1 kota | 57.882,2 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 02.05.04<br>KP: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi | 01 - Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi | 01 - Rata-rata Indeks Desa Wilayah Sulawesi | 1, 5 | 62,75 | 486.703,9 | |
| | | 02 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional | 1, 5 | 55,89 | | |
| | | 03 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Sulawesi | 5 | 59,60 | | |
| | | 04 - Persentase penduduk miskin perdesaan Wilayah Sulawesi | 1 | 12,6—12,9 % | | |
| | 02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas Perbatasan, dan Daerah Tertinggal | 01 - Jumlah daerah tertinggal | 5 | 3 kabupaten | | |
| | | 02 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan | 5 | 0,48 | | |
| | | 03 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya | 5 | 16 kecamatan | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.04.02<br>PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sulawesi Utara | 01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Sulawesi Utara | 01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Sulawesi Utara | 5 | 12 kecamatan | 1.125,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 02.05.04.08<br>PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Utara | 01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sulawesi Utara | 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Sulawesi Utara | 1, 5 | 64,55 | 15.768,4 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 02.05.04.09<br>PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Minahasa Utara | 01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Minahasa Utara | 01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Minahasa Utara | 1, 5 | 64,21 | 19.593,5 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| 02.05.04.10<br>PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahuna | 01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahuna | 01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tahuna | 5 | 0,50 | 722,2 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK |
| 02.05.04.11<br>PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Melonguane | 01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Melonguane | 01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Melonguane | 5 | 0,46 | 8.409,1 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.04.12<br>PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Tengah | 01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sulawesi Tengah | 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Sulawesi Tengah | 1, 5 | 63,45 | 3.867,3 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| 02.05.04.13<br>PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morowali, Buol, dan Poso | 01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morowali, Buol, dan Poso | 01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Morowali, Buol, dan Poso | 1, 5 | 53,85 | 16.661,6 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 02.05.04.14<br>PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Palolo, Bungku, Air Terang, Tampolore, Padauloyo, dan Bahari Tomini Raya | 01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Palolo, Bungku, Air Terang, Tampolore, Padauloyo, dan Bahari Tomini Raya | 01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Tengah | 5 | 57,00 | 6.746,4 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 02.05.04.15<br>PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah | 01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah | 01 - Persentase penduduk miskin di Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah | 1 | 14,9—15,4 % | 90.099,5 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, DAK |
| | | 02 - Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah | 1 | 69,0—69,5 | | |
| 02.05.04.16<br>PRO-P: Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Kota Palu dan Sekitarnya | 01 - Pelayanan publik yang berhasil dipulihkan | 01 - Persentase pelayanan publik yang dipulihkan | 2 | 75 % | 164.145,9 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL, |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN) |
| 02.05.04.17 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Selatan | 01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sulawesi Selatan | 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Sulawesi Selatan | 1 | 65,60 | 11.713,1 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| 02.05.04.18 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone | 01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone | 01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone | 1, 5 | 60,33 | 40.014,8 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| 02.05.04.19 PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Gilireng, Masamba, dan Mahalona | 01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Gilireng, Masamba, dan Mahalona | 01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Selatan | 5 | 55,93 | 12.072,8 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 02.05.04.20 PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Tenggara | 01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sulawesi Tenggara | 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Sulawesi Tenggara | 1, 5 | 60,25 | 6.335,7 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| 02.05.04.21<br>PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna | 01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna | 01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna | 1, 5 | 52,13 | 20.684,8 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| 02.05.04.22<br>PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tinanggea, Mutiara, dan Asinua/Routa | 01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tinanggea, Mutiara, dan Asinua/Routa | 01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Tenggara | 5 | 56,46 | 20.781,8 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 02.05.04.23<br>PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Gorontalo | 01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Gorontalo | 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Gorontalo | 1, 5 | 67,85 | 1.604,8 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| 02.05.04.24<br>PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara | 01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara | 01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara | 1, 5 | 65,82 | 15.000,7 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK |



SK No 093165 C

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.04.25<br>PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Sumalata, Paguyaman Pantai, Pawonsari, dan Pulubala | 01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Sumalata, Paguyaman Pantai, Pawonsari, dan Pulubala | 01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Gorontalo | 5 | 63,54 | 4.441,5 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 02.05.04.26<br>PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Sulawesi Barat | 01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sulawesi Barat | 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Sulawesi Barat | 1, 5 | 60,50 | 900,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.05.04.27<br>PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mamuju dan Mamuju Tengah | 01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mamuju dan Mamuju Tengah | 01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Mamuju dan Mamuju Tengah | 1, 5 | 48,63 | 4.233,3 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| 02.05.04.28<br>PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tobadak dan Sarudu Baras | 01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tobadak dan Sarudu Baras | 01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Barat | 5 | 69,78 | 7.720,8 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 02.05.04.29<br>PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sulawesi Tengah | 01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Sulawesi Tengah | 01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Sulawesi Tengah | 5 | 3 kecamatan | 8.750,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK |
| 02.05.04.30<br>PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Gorontalo | 01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Gorontalo | 01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Gorontalo | 5 | 1 kecamatan | 5.311,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK |

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.05<br>KP: Kelembagaan dan Keuangan Daerah | 01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | 01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | 4 | 3,24 | 146.858,5 | |
| | 02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 37,50 % | | |
| | 03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 4 | 74 daerah | | |
| | 04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 66 daerah | | |
| | 05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 5.887 dokumen | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik | 01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 10 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien | 4 | 66 daerah | | |
| | 08 - Meningkatnya Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah | 4 | 6 daerah | | |
| | 09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 91,30 % | | |



SK No 093167 C

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik | 01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik | 4 | 34 daerah | | |
| | 11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang | 01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik | 5 | 1.559.602 ha | | |
| | | 02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan | 5 | 1.000.725 ha | | |
| | | 03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 13 materi teknis dan Ranperkada RDTR | | |
| | | 04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 12 persetujuan substansi RDTR | | |
| | | 05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 7 materi teknis dan Ranperda RTRW | | |
| | | 06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 7 persetujuan substansi RTRW | | |
| | | 07 - Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak atas Tanah | 5 | 5 | | |
| | | 08 - Jumlah materi teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN) | 5 | 1 materi teknis dan Raperpres RTR | | |
| | | 09 - Jumlah penanganan perkara hasil penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang | 5 | 15 perkara | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 - Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial | 01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 2 | 400 desa | | |
| 02.05.05.05 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Utara | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 1.105 dokumen | 0,0[a] | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | 02 - Meningkatnya kerja sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama | 4 | 1 daerah | | |
| | 03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 92,63 % | | |
| | 04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 36 % | | |
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 15 daerah | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 12 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 12 daerah | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |
| 02.05.05.06 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Utara | 01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah | 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah | 5 | 54.994 bidang | 7.537,0 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang | 01 - Jumlah bidang tanah | 5 | 63.655 ha | | |
| 02.05.05.07 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Utara | 01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 3 rekomendasi kebijakan | 1.862,3 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 4 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 3 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 2 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 05 - Jumlah materi teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN) | 5 | 1 rekomendasi kebijakan | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.05.09<br>PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 1.696 dokumen | 90.000,0 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | 02 - Meningkatnya kerja sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama | 4 | 1 daerah | | |
| | 03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 90,17 % | | |
| | 04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 37 % | | |
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 10 daerah | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 11 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 11 daerah | | |
| | 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.05.10 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Tengah | 01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah | 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah | 5 | 51.432 bidang | 9.440,0 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang | 01 - Jumlah bidang tanah | 5 | 42.837 ha | | |
| 02.05.05.11 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Tengah | 01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 3 rekomendasi kebijakan | 553,0 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 1 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 1 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 1 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 05 - Jumlah penanganan perkara hasil penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang | 5 | 10 perkara | | |
| 02.05.05.12 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 1.324 dokumen | 216,9 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | 02 - Meningkatnya kerja sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama | 4 | 1 daerah | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 91,03 % | | |
| | 04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 62 % | | |
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 19 daerah | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 18 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 18 daerah | | |
| | 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |
| 02.05.05.13 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Selatan | 01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah | 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah | 5 | 136.575 bidang | 17.083,8 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | 02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang | 01 - Jumlah bidang tanah | 5 | 133.915 ha | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.05.14<br>PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Selatan | 01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 14 rekomendasi kebijakan | 3.211,5 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 2 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 03 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 2 rekomendasi kebijakan | | |
| 02.05.05.16<br>PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 748 dokumen | 0,0[a] | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | 02 - Meningkatnya kerja sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama | 4 | 1 daerah | | |
| | 03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 90,98 % | | |
| | 04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 30 % | | |
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 16 daerah | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 13 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 13 daerah | | |
| | 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |
| 02.05.05.17<br>PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Tenggara | 01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah | 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah | 5 | 62.967 bidang | 7.383,5 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang | 01 - Jumlah bidang tanah | 5 | 59.048 ha | | |
| 02.05.05.18<br>PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Tenggara | 01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 5 rekomendasi kebijakan | 1.762,0 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 1 rekomendasi kebijakan | | |
| 02.05.05.20<br>PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Gorontalo | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 474 dokumen | 0,0[a] | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02 - Meningkatnya kerja sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama | 4 | 1 daerah | | |
| | 03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 92,59 % | | |
| | 04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 30 % | | |
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 7 daerah | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 6 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 6 daerah | | |
| | 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |
| 02.05.05.21 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Gorontalo | 01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah | 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah | 5 | 8.097 bidang | 4.013,2 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | 02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang | 01 - Jumlah bidang tanah | 5 | 15.698 ha | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.05.22<br>PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Gorontalo | 01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 2 rekomendasi kebijakan | 403,0 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 12 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 03 - Jumlah persetujuan substansi Prov/Kab/Kota | 5 | 1 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 1 rekomendasi kebijakan | | |
| 02.05.05.23<br>PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Sulawesi Barat | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 540 dokumen | 0,0[a] | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | 02 - Meningkatnya kerja sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama | 4 | 1 daerah | | |
| | 03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 90,48 % | | |
| | 04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 30 % | | |
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 7 daerah | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 6 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 6 daerah | | |
| | 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |
| 02.05.05.24 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Barat | 01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah | 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah | 5 | 8.311 bidang | 2.058,9 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | 02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang | 01 - Jumlah bidang tanah | 5 | 23.873 ha | | |
| 02.05.05.25 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Sulawesi Barat | 01 - Tersedianya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 2 rekomendasi kebijakan | 575,0 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 2 rekomendasi kebijakan | | |
| | | 03 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 1 rekomendasi kebijakan | | |
| 02.05.05.27 PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Sulawesi Tengah | 01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 2 | 150 desa | 758,3 | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.05.28<br>PRO-P: Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Provinsi Sulawesi Selatan | 01 - Tercapainya jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 01 - Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan | 2 | 250 desa | 0,0[a] | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) |
| 02.06<br>PP: Pembangunan Wilayah Maluku | 01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Maluku | 01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Maluku | 5 | 10,9—11,8 % per tahun | 784.382,6 | |
| | | 02 - IPM Provinsi di Wilayah Maluku | 1 | 70,71—71,18 nilai minimum—nilai maksimum | | |
| | | 03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Maluku | 1 | 10,6—11,4 % | | |
| 02.06.01<br>KP: Pengembangan Kawasan Strategis | 01 - Berkembangnya kawasan strategis | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah | 5 | >1 | 8.000,0 | |
| | | 02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan | 5 | 3 kawasan | | |
| | | 03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) | 5 | 1 jumlah destinasi | | |
| | | 04 - KEK berbasis pariwisata dan industri | 5 | 1 kawasan | | |
| | | 05 - KI Prioritas dan KI pengembangan | 5 | 1 jumlah KI | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.01.01<br>PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai/KEK Morotai | 01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai/KEK Morotai | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Maluku Utara | 5 | >1 | 8.000,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| 02.06.01.02<br>PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Teluk Weda | 01 - Terlaksananya fasilitasi realisasi investasi dan pembangunan KI Teluk Weda | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Maluku Utara | 5 | >1 | 0,0[a] | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 02.06.02<br>KP: Pengembangan Sektor Unggulan | 01 - Berkembangnya sektor unggulan | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa | 5 | 4—6 % | 49.700,8 | |
| | | 02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - pala | 5 | 1—2 % | | |
| | | 03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - cengkeh | 5 | 2—4 % | | |
| | | 04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap | 5 | 2—4 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya | 5 | 4—6 % | | |
| 02.06.02.01 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Maluku | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku - pala | 5 | 5—6 % | 7.510,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| | | 02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku - cengkeh | 5 | 4—6 % | | |
| 02.06.02.02 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Maluku | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku - kelapa | 5 | 5—6 % | 3.064,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.06.02.03 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa di Provinsi Maluku Utara | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara - kelapa | 5 | 5—7 % | 3.046,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.06.02.04 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Maluku Utara | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara - pala | 5 | 10—12 % | 20.172,3 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| | | 02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara - cengkeh | 5 | 1—2 % | | |
| 02.06.02.05 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Maluku | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku - perikanan tangkap | 5 | 1—2 % | 1.185,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.02.06 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Maluku | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan budidaya perikanan | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku - perikanan budidaya | 5 | 4—6 % | 8.966,1 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.06.02.07 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap di Provinsi Maluku Utara | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara - perikanan tangkap | 5 | 1—2 % | 1.185,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.06.02.08 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Maluku Utara | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan budidaya perikanan | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara - perikanan budidaya | 5 | 5—7 % | 4.572,5 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.06.03 KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan | 01 - Berkembangnya kawasan perkotaan | 01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Ambon (angka perhitungan sementara) | 5 | 64,59 | 227.160,2 | |
| | | 02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tual (angka perhitungan sementara) | 5 | 46,62 | | |
| | | 03 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Ternate (angka perhitungan sementara) | 5 | 47,02 | | |
| | | 04 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Sofifi (angka perhitungan sementara) | 5 | 40,23 | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW | 01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW | 5 | 3 kota | | |
| | 03 - Terbangunnya kota baru | 01 - Jumlah kota baru yang dibangun | 5 | 1 kota | | |
| 02.06.03.01 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Maluku | 01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW | 01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW | 5 | 2 kota | 86.835,1 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 02.06.03.02 PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Maluku Utara | 01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW | 01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW | 5 | 1 kota | 75.325,1 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| 02.06.03.03 PRO-P: Pembangunan Kota Baru di Provinsi Maluku Utara | 01 - Terbangunnya kota baru | 01 - Jumlah kota baru yang dibangun | 5 | 1 kota | 65.000,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| 02.06.04 KP: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi | 01 - Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi | 01 - Rata-rata Indeks Desa Wilayah Maluku | 1, 5 | 54,45 | 486.194,9 | |
| | | 02 - Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional | 1, 5 | 59,57 | | |
| | | 03 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Maluku | 5 | 36,62 | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 04 - Persentase penduduk miskin perdesaan Wilayah Maluku | 1 | 17,2—17,4 % | | |
| | 02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas Perbatasan, dan Daerah Tertinggal | 01 - Jumlah daerah tertinggal | 5 | 8 kabupaten | | |
| | | 02 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan | 5 | 0,52 | | |
| | | 03 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya | 5 | 29 kecamatan | | |
| 02.06.04.02 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Maluku | 01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Maluku | 01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Maluku | 5 | 23 kecamatan | 22.688,2 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK |
| 02.06.04.11 PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku | 01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Maluku | 01 - Persentase penduduk miskin di Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku | 1 | 21,7—22,2 % | 274.333,5 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, DAK |
| | | 02 - Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku | 1 | 65,6—66,1 | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.04.12<br>PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku Utara | 01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Maluku Utara | 01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Maluku Utara | 1 | 6,7—7,2 % | 49.923,5 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERTANIAN, DAK |
| | | 02 - Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal di Provinsi Maluku Utara | 1 | 63,8—64,3 | | |
| 02.06.04.14<br>PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki | 01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki | 01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Saumlaki | 5 | 0,50 | 308,4 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK |
| 02.06.04.15<br>PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Daruba | 01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Daruba | 01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Daruba | 5 | 0,53 | 1.000,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 02.06.04.16<br>PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Maluku | 01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Maluku | 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Maluku | 1, 5 | 55,75 | 1.513,9 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.04.17<br>PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Maluku Utara | 01 - Terlaksananya pembangunan Desa Terpadu Provinsi Maluku Utara | 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Maluku Utara | 1 | 55,85 | 1.970,7 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 02.06.04.18<br>PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Maluku Tengah | 01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Maluku Tengah | 01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Maluku Tengah | 1, 5 | 55,77 | 55.661,7 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK |
| 02.06.04.19<br>PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morotai | 01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morotai | 01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Morotai | 1, 5 | 61,25 | 60.914,1 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, DAK |
| 02.06.04.20<br>PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobisonta | 01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobisonta | 01 - Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Maluku Utara | 5 | 44,71 | 35,8 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 02.06.04.21<br>PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Pulau Mangoli dan Pulau Morotai | 01 - Terlaksananya revitalisasi Kawasan Transmigrasi Pulau Mangoli dan Pulau Morotai | 01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Maluku Utara | 5 | 32,58 | 1.067,1 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.04.22<br>PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Maluku Utara | 01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Maluku Utara | 01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Maluku Utara | 5 | 6 kecamatan | 16.778,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK |
| 02.06.05<br>KP: Kelembagaan dan Keuangan Daerah | 01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | 01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | 4 | 3,02 | 13.326,7 | |
| | 02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 30 % | | |
| | 03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 4 | 20 daerah | | |
| | 04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 19 daerah | | |
| | 05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 1.596 dokumen | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik | 01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 2 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien | 4 | 19 daerah | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08 - Meningkatnya Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah | 4 | 2 daerah | | |
| | 09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 90,69 % | | |
| | 10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik | 01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik | 4 | 34 daerah | | |
| | 11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang | 01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik | 5 | 225.040 ha | | |
| | | 02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan | 5 | 235.743 ha | | |
| | | 03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 4 materi teknis dan Ranperkada RDTR | | |
| | | 04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 3 persetujuan substansi RDTR | | |
| | | 05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 4 materi teknis dan Ranperda RTRW | | |
| | | 06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 4 persetujuan substansi RTRW | | |
| | | 07 - Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak atas Tanah | 5 | 5 | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 08 - Jumlah Penanganan Perkara Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang | 5 | 5 perkara | | |
| 02.06.05.11 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Maluku | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 440 dokumen | 1.018,1 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | 02 - Meningkatnya kerja sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama | 4 | 1 daerah | | |
| | 03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 91,01 % | | |
| | 04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 30 % | | |
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 10 daerah | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 10 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 10 daerah | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |
| 02.06.05.12<br>PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Maluku Utara | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 1.155 dokumen | 0,0[a] | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | 02 - Meningkatnya kerja sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama | 4 | 1 daerah | | |
| | 03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 90,36 % | | |
| | 04 - Meningkatnya persentase daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 30 % | | |
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 10 daerah | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 9 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 9 daerah | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |
| 02.06.05.13 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Maluku | 01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah | 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah | 5 | 29.058 bidang | 3.100,7 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | 02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang | 01 - Jumlah bidang tanah | 5 | 9.476 ha | | |
| 02.06.05.14 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Maluku Utara | 01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah | 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah | 5 | 17.856 bidang | 3.775,9 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | 02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang | 01 - Jumlah bidang tanah | 5 | 51.638 ha | | |
| 02.06.05.15 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Maluku | 01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 7 materi teknis dan Ranperkada | 4.047,6 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 3 persetujuan substansi RDTR | | |
| | | 03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 1 materi teknis dan Ranperda | | |
| | | 04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 2 persetujuan substansi RTRW | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.05.16<br>PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Maluku Utara | 01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 8 materi teknis dan Ranperkada RDTR | 1.384,5 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 2 persetujuan substansi RDTR | | |
| | | 03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 2 materi teknis dan Ranperda | | |
| | | 04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 1 persetujuan substansi RTRW | | |
| 02.07<br>PP: Pembangunan Wilayah Papua | 01 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua | 01 - Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Papua | 5 | 7,2—7,8 % per tahun | 5.283.450,5 | |
| | | 02 - IPM Provinsi di Wilayah Papua | 1 | 62,54—66,55 nilai minimum—nilai maksimum | | |
| | | 03 - Persentase penduduk miskin Wilayah Papua | 1 | 22,0—23,6 % | | |
| 02.07.01<br>KP: Pengembangan Kawasan Strategis | 01 - Berkembangnya Kawasan Strategis | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap wilayah | 5 | >1 | 176.218,1 | |
| | | 02 - Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan | 5 | 4 kawasan | | |
| | | 03 - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) | 5 | 1 jumlah destinasi | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 04 - Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Revitalisasi | 5 | 1 jumlah destinasi | | |
| | | 05 - KEK berbasis pariwisata dan industri | 5 | 1 kawasan | | |
| | | 06 - KI Prioritas dan KI Pengembangan | 5 | 1 jumlah KI | | |
| 02.07.01.01<br>PRO-P: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cenderawasih | 01 - Terlaksananya pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cenderawasih | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Papua | 5 | >1 | 8.379,5 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| 02.07.01.02<br>PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat | 01 - Terlaksananya perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Papua Barat | 5 | >1 | 7.993,3 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 02.07.01.03<br>PRO-P: Percepatan Peningkatan Investasi KEK Sorong | 01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KEK Sorong | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Papua Barat | 5 | >1 | 159.045,3 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.01.04<br>PRO-P: Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Teluk Bintuni | 01 - Terlaksananya percepatan peningkatan investasi KI Teluk Bintuni | 01 - Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Papua Barat | 5 | >1 | 800,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 02.07.02<br>KP: Pengembangan Sektor Unggulan | 01 - Berkembangnya sektor unggulan | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kakao | 5 | 1—2 % | 157.829,9 | |
| | | 02 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kopi | 5 | 2—4 % | | |
| | | 03 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - kelapa | 5 | 1—2 % | | |
| | | 04 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan tangkap | 5 | 2—4 % | | |
| | | 05 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - pala | 5 | 1—2 % | | |
| | | 06 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun - perikanan budidaya | 5 | 4—6 % | | |
| 02.07.02.01<br>PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Papua | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua - kakao | 5 | 1—2 % | 0,0[a] | KEMENTERIAN PERTANIAN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.02.02<br>PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi di Provinsi Papua | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua - kopi | 5 | 5—7 % | 2.499,1 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.07.02.06<br>PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Lada, Pala, dan Cengkeh di Provinsi Papua Barat | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua Barat - pala | 5 | 2—3 % | 398,7 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.07.02.07<br>PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao di Provinsi Papua Barat | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua Barat - kakao | 5 | 1—2 % | 54.212,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 02.07.02.12<br>PRO-P: Transformasi Ekonomi Berbasis Wilayah Adat dari Hulu ke Hilir | 01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua | 01 - Tingkat Pengangguran Terbuka di wilayah Papua | 5 | 3,4—3,8 % | 100.720,1 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| | | 02 - Tingkat Kemiskinan di wilayah Papua | 5 | 22,0—23,6 % | | |
| | 02 - Meningkatnya kontribusi sektor unggulan di wilayah Papua | 01 - Rata-rata Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di wilayah Papua | 5 | 10,2—10,7 % | | |
| | | 02 - Rata-rata Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan di wilayah Papua | 5 | 7,5—8,0 % | | |
| | | 03 - Rata-rata Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di wilayah Papua | 5 | 0,4—0,9 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.02.13<br>PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Papua Barat | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua Barat - perikanan budidaya | 5 | 4—6 % | 0,0[a] | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.07.02.14<br>PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya di Provinsi Papua | 01 - Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya | 01 - Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua - perikanan budidaya | 5 | 5—7 % | 0,0[a] | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 02.07.03<br>KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan | 01 - Berkembangnya kawasan perkotaan | 01 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Jayapura (angka perhitungan sementara) | 5 | 46,56 | 123.805,8 | |
| | | 02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Sorong (angka perhitungan sementara) | 5 | 40,14 | | |
| | 02 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW | 01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW | 5 | 1 kota | | |
| | 03 - Terbangunnya kota baru | 01 - Jumlah kota baru yang dibangun | 5 | 1 kota | | |
| 02.07.03.01<br>PRO-P: Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil di Provinsi Papua | 01 - Berkembangnya kota besar, kota sedang, kota kecil sebagai PKN/PKW | 01 - Jumlah kota besar, sedang, kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW | 5 | 1 kota | 24.412,2 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 02.07.03.02<br>PRO-P: Pembangunan kota baru di Provinsi Papua Barat | 01 - Terbangunnya kota baru | 01 - Jumlah kota baru yang dibangun | 5 | 1 kota | 99.393,6 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.04<br>KP: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi | 01 - Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi | 01 - Rata-rata Indeks Desa Wilayah Papua | 1, 5 | 35,30 | 4.787.501,0 | |
| | | 02 - Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional | 1, 5 | 43,81 | | |
| | | 03 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Papua | 5 | 37,98 | | |
| | | 04 - Persentase penduduk miskin perdesaan Wilayah Papua | 1 | 34,6—34,8 % | | |
| | 02 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas Perbatasan, dan Daerah Tertinggal | 01 - Jumlah Daerah Tertinggal | 5 | 30 kabupaten | | |
| | | 02 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan | 5 | 0,54 | | |
| | | 03 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya | 5 | 27 kecamatan | | |
| 02.07.04.01<br>PRO-P: SDM Unggul, Inovatif, Berkarakter dan Kontekstual Papua | 01 - Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan di wilayah Papua | 01 - Rata-rata Umur Harapan Hidup (UHH) di wilayah Papua | 1 | 66,1—66,6 tahun | 499.100,8 | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, |
| | | 02 - Rerata Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di wilayah Papua | 1 | 7,2—7,7 tahun | | |
| | | 03 - Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS) di wilayah Papua | 1 | 12,2—12,7 tahun | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| 02.07.04.02<br>PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Papua | 01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Papua | 01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Papua | 5 | 24 kecamatan | 53.986,2 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, DAK |
| 02.07.04.04<br>PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Papua | 01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Papua | 01 - Peningkatan rata-rata Indeks Desa Provinsi Papua- | 1, 5 | 33,45 | 2.392.808,9 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 02.07.04.07<br>PRO-P: Infrastruktur Dasar dan Ekonomi | 01 - Meningkatnya konektivitas di wilayah Papua | 01 - Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan di wilayah Papua | 2 | 70 km | 1.660.194,1 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, |
| | | 02 - Jumlah pelabuhan laut yang dibangun dan dikembangkan di wilayah Papua | 2 | 2 lokasi | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 03 - Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun dan dikembangkan di wilayah Papua | 2 | 2 lokasi | | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, DAK |
| | | 04 - Jumlah bandara yang dibangun dan dikembangkan di wilayah Papua | 2 | 7 lokasi | | |
| | 02 - Meningkatnya akses infrastruktur dasar di wilayah Papua | 01 - Rata-rata Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di wilayah Papua | 2 | 73,0—73,5 % | | |
| | | 02 - Rata-rata Persentase Rumah Tangga terhadap Sanitasi Layak di wilayah Papua | 2 | 52,2—52,7 % | | |
| | | 03 - Rata-rata Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau di wilayah Papua | 2 | 39,3—39,8 % | | |
| | | 04 - Rata-rata Rasio Elektrifikasi di wilayah Papua | 2 | 99,7—99,9 % | | |
| | | 05 - Persentase Desa yang Menerima Sinyal Internet Telepon Seluler 4G di wilayah Papua | 2 | 40,0—40,5 % | | |
| 02.07.04.08 PRO-P: Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana | 01 - Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup di wilayah Papua | 01 - Rata-rata Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di wilayah Papua | 5 | 82,8—83,3 | 66.813,2 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 02.07.04.26<br>PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Jayapura dan Merauke | 01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Jayapura dan Merauke | 01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Jayapura dan Merauke | 1, 5 | 44,57 | 60.748,4 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK |
| 02.07.04.27<br>PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Senggi, Salor, dan Muting | 01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Senggi, Salor, dan Muting | 01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Papua | 5 | 40,62 | 4.136,2 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 02.07.04.29<br>PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura | 01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura | 01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jayapura | 5 | 0,43 | 0,0[a] | KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 02.07.04.30<br>PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Merauke | 01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Merauke | 01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Merauke | 5 | 0,64 | 0,0[a] | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 02.07.04.31<br>PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tanah Merah | 01 - Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tanah Merah | 01 - Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tanah Merah | 5 | 0,56 | 12.142,7 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, DAK |
| 02.07.04.33<br>PRO-P: Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Raja Ampat dan Manokwari | 01 - Terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Raja Ampat dan Manokwari | 01 - Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kab. Raja Ampat dan Manokwari | 1, 5 | 40,13 | 31.611,3 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK |
| 02.07.04.34<br>PRO-P: Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Werianggi Werabur dan Bomberay - Tomage | 01 - Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Werianggi Werabur dan Bomberay - Tomage | 01 - Rata-rata nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Papua Barat | 5 | 34,03 | 4.108,5 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.04.36<br>PRO-P: Pembangunan Desa Terpadu di Provinsi Papua Barat | 01 - Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Papua Barat | 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi Papua Barat | 1, 5 | 40,85 | 1.197,3 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 02.07.04.37<br>PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Papua Barat | 01 - Meningkatnya kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Papua Barat | 01 - Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Provinsi Papua Barat | 5 | 3 kecamatan | 0,0(R) | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK |
| 02.07.04.38<br>PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Papua Barat | 01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Papua Barat | 01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Papua Barat | 1 | 26,5—27,0 % | 0,0(R) | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PERTANIAN, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, DAK (Terintegrasi dengan PSN) |
| | | 02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Papua Barat | 1 | 62,2—62,7 | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.04.39<br>PRO-P: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Papua | 01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi Papua | 01 - Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal di Provinsi Papua | 1 | 30,6—31,1 % | 653,4 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN AGAMA, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, DAK |
| | | 02 - Rata-rata IPM di daerah tertinggal di Provinsi Papua Barat | 1 | 55,3—55,8 | | |
| 02.07.05<br>KP: Kelembagaan dan Keuangan Daerah | 01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | 01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | 4 | 2,58 | 38.095,7 | |
| | 02 - Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | 4 | 30 % | | |
| | 03 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 4 | 33 daerah | | |
| | 04 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 34 daerah | | |
| | 05 - Meningkatnya reformasi pelayanan perizinan | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 1.227 dokumen | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06 - Meningkatnya daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik | 01 - Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 2 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien | 4 | 34 daerah | | |
| | 08 - Meningkatnya kesepakatan dan perjanjian kerja sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah | 4 | 2 daerah | | |
| | 09 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 88,89 % | | |
| | 10 - Meningkatnya daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik | 01 - Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik | 4 | 34 daerah | | |
| | 11 - Meningkatnya pengelolaan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang | 01 - Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik | 5 | 465.098,60 ha | | |
| | | 02 - Luas cakupan peta dasar pertanahan | 5 | 678.397 ha | | |
| | | 03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 4 materi teknis dan Ranperkada | | |
| | | 04 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 3 persetujuan substansi RDTR | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 05 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 3 materi teknis dan Ranperda | | |
| | | 06 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 3 persetujuan substansi RTRW | | |
| | | 07 - Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak atas Tanah | 5 | 5 | | |
| | | 08 - Jumlah Materi Teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN) | 5 | 1 materi teknis dan Raperpres RTR | | |
| | | 09 - Jumlah Penanganan Perkara Hasil Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang | 5 | 5 perkara | | |
| 02.07.05.04 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Papua Barat | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 725 dokumen | 3.877,4 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | 02 - Meningkatnya kerja sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama | 4 | 1 daerah | | |
| | 03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 89,15 % | | |
| | 04 - Meningkatnya persentase daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai Nilai Indeks Inovasi Tinggi | 4 | 30 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 11 daerah | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 11 daerah | | |
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 11 daerah | | |
| | 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |
| | 09 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara | 01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara | 4 | 2 rekomendasi | | |
| 02.07.05.05<br>PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Papua Barat | 01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah | 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah | 5 | 6.512 bidang | 2.496,9 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | 02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang | 01 - Jumlah bidang tanah | 5 | 25.485 ha | | |
| 02.07.05.06<br>PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Papua Barat | 01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 4 materi teknis dan Ranperkada | 4.089,6 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 22 persetujuan Substansi RDTR | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 2 materi teknis dan Ranperda | | |
| | | 04 - Jumlah persetujuan substansi RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 2 persetujuan Substansi RTRW | | |
| 02.07.05.07<br>PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah di Provinsi Papua | 01 - Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis asistem informasi digital (*e-gov*) | 01 - Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 4 | 502 dokumen | 0,0[a] | KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN |
| | 02 - Meningkatnya kerja sama daerah | 01 - Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama | 4 | 1 daerah | | |
| | 03 - Meningkatnya persentase capaian SPM di daerah | 01 - Persentase capaian SPM di daerah | 4 | 88,63 % | | |
| | 04 - Meningkatnya persentase daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi | 01 - Persentase daerah yang mempunyai Nilai Indeks Inovasi Tinggi | 4 | 30 % | | |
| | 05 - Meningkatnya daerah dengan penerimaan daerah meningkat | 01 - Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat | 4 | 22 daerah | | |
| | 06 - Meningkatnya daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas | 01 - Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas | 4 | 23 daerah | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07 - Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 01 - Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien | 4 | 23 daerah | | |
| | 08 - Peningkatan penataan hubungan pusat daerah | 01 - Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 4 | 22 rekomendasi | | |
| | 09 - Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara | 01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara | 4 | 2 rekomendasi | | |
| 02.07.05.08 PRO-P: Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Papua | 01 - Terlaksananya percepatan sertifikasi tanah | 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas Tanah | 5 | 25.614 bidang | 4.414,6 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | 02 - Terlaksananya percepatan peta bidang tanah dan ruang | 01 - Jumlah bidang tanah | 5 | 16.773 ha | | |
| 02.07.05.09 PRO-P: Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Papua | 01 - Tersusunnya rencana tata ruang yang berkualitas | 01 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RDTR Kab/Kota | 5 | 11 materi teknis dan Ranperkada | 2.125,0 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| | | 02 - Jumlah persetujuan substansi RDTR Kab/Kota | 5 | 4 persetujuan substansi RDTR | | |
| | | 03 - Jumlah materi teknis dan rancangan peraturan daerah RTRW Prov/Kab/Kota | 5 | 1 materi teknis dan Ranperda | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.05.10<br>PRO-P: Tata Kelola Pemerintahan dan Keamanan dengan Tetap Menghormati HAM | 01 - Meningkatnya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah Papua | 01 - Rata-rata nilai Aspek Kebebasan pada Indeks Demokrasi Indonesia di wilayah Papua | 4 | 80,8—81,3 | 21.092,1 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI |

CATATAN:
(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
(2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
(3) Alokasi DAK merupakan pagu alokasi per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2023;
(4) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L, DAK Fisik, dan KPBU pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan;
(5) Dukungan Terhadap Arahan Presiden: 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia; 2. Pembangunan Infrastruktur; 3. Penyederhanaan Regulasi; 4. Penyederhanaan Birokrasi; dan 5. Transformasi Ekonomi.

KETERANGAN:
(a) *multitagging.*

**PRESIDEN**
**REPUBLIK INDONESIA**

PRIORITAS NASIONAL 3 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03<br>PN: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing | 01 - Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan | 01 - Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR) | | 2,19 per wanita usia subur usia 15—49 tahun | 255.529.681,7 | |
| | | 02 - Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) | | 99,00 % | | |
| | 02 - Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk | 01 - Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial | | 91,00 % | | |
| | | 02 - Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah | | 78,00 % | | |
| | 03 - Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan | 01 - Angka Kematian Ibu (AKI) | | 194 per 100.000 kelahiran hidup | | |
| | | 02 - Angka Kematian Bayi (AKB) | | 17,6 per 1.000 kelahiran hidup | | |
| | | 03 - Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita | | 17,50 % | | |
| | | 04 - Insidensi tuberkulosis | | 211 per 100.000 penduduk | | |
| | | 05 - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria | | 385 kabupaten/kota | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 06 - Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta | | 482 kabupaten/kota | | |
| | | 07 - Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun | | 21,80 % | | |
| | | 08 - Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun | | 8,80 % | | |
| | | 09 - Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca | | 394 | | |
| | | 10 - Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika | | 385 | | |
| | | 11 - Nilai rata-rata hasil PISA: Sains | | 399 | | |
| | | 12 - Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas | | 9,24 tahun | | |
| | | 13 - Harapan lama sekolah | | 13,22 tahun | | |
| | 04 - Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda | 01 - Indeks Perlindungan Anak (IPA) | | 71,66 | | |
| | | 02 - Indeks Pembangunan Gender (IPG) | | 91,17—91,44 | | |
| | | 03 - Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) | | 56,65 | | |
| | 05 - Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan | 01 - Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif | | 38,00 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06 - Meningkatnya produktivitas dan daya saing | 01 - Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas | | 48,00 % | | |
| | | 02 - Jumlah PT yang masuk ke dalam *world class university* Top 200 | | 0 PT | | |
| | | 03 - Jumlah PT yang masuk ke dalam *world class university* Top 300 | | 1 PT | | |
| | | 04 - Jumlah PT yang masuk ke dalam *world class university* Top 500 | | 2 PT | | |
| | | 05 - Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi | | 43,00 % | | |
| | | 06 - Peringkat *Global Innovation Index* | | 75—80 peringkat | | |
| 03.01<br>PP: Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan | 01 - Meningkatnya cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan | 01 - Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan | 1 | 89,00 % | 6.146.882,4 | |
| | | 02 - Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan *monitoring* evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan | 1 | 80,00 % | | |
| | | 03 - Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan | 1 | 90,00 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 04 - Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0–17 tahun | 1 | 98,00 % | | |
| | | 05 - Persentase kementerian/lembaga yang mengadopsi kualifikasi standar nasional pendamping pembangunan | 1 | 50 % | | |
| 03.01.01<br>KP: Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan | 01 - Meningkatnya percepatan cakupan administrasi kependudukan | 01 - Jumlah pedoman/kebijakan/SOP Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang disusun | 1 | 50 pedoman/kebijakan/SOP | 6.438,6 | |
| 03.01.01.01<br>PRO-P: Perluasan Jangkauan Layanan Administrasi Kependudukan | 01 - Terlaksananya perluasan jangkauan layanan administrasi kependudukan | 01 - Jumlah inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | 1 | 2.056 inovasi | 4.438,6 | MAHKAMAH AGUNG, KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | | 02 - Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan | 1 | 100 % | | |
| | | 03 - Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan | 1 | 100 % | | |
| | | 04 - Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan | 1 | 100 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.01.02<br>PRO-P: Percepatan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Kelompok Khusus | 01 - Terlaksananya percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus | 01 - Jumlah daerah di wilayah 3T yang mendapatkan peningkatan layanan pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil yang mudah dan inovatif | 1 | 50 daerah | 2.000,0 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | | 02 - Persentase penduduk rentan yang terselesaikan pengurusan dokumennya | 1 | 80 % | | |
| 03.01.02<br>KP: Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan | 01 - Menguatnya integrasi sistem administrasi kependudukan | 01 - Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikembangkan dan diintegrasikan | 1 | 1 sistem | 26.583,6 | |
| 03.01.02.01<br>PRO-P: Penguatan Integrasi Data Administrasi Kependudukan | 01 - Menguatnya integrasi data administrasi kependudukan | 01 - Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerja sama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik | 1 | 350 lembaga pengguna | 4.913,6 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | | 02 - Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik | 1 | 1.250 lembaga pengguna | | |
| 03.01.02.02<br>PRO-P: Pengembangan Data dan Informasi Kependudukan (Statistik Hayati) yang Akurat, Lengkap dan Tepat Waktu | 01 - Terlaksananya pengembangan data dan informasi kependudukan (statistik hayati) yang akurat, lengkap, dan tepat waktu | 01 - Jumlah *database* kependudukan yang *update* | 1 | 1 *database* | 21.670,0 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| 03.01.03<br>KP: Pendampingan dan Layanan Terpadu | 01 - Meningkatnya kualitas pendampingan dan layanan terpadu | 01 - Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan | 1 | 89 % | 5.965.874,0 | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02 - Persentase provinsi/kabupaten/ kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran, dan *monitoring* evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan | 1 | 80 % | | |
| | | 03 - Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan | 1 | 90 % | | |
| | | 04 - Persentase pengembangan standar nasional pendamping pembangunan (%) | 1 | 95 % | | |
| | | 05 - Persentase penyetaraan jenjang kualifikasi pendamping pembangunan yang dikembangkan (%) | 1 | 50 % | | |
| | | 06 - Persentase kementerian/lembaga yang mengadopsi kualifikasi standar nasional pendamping pembangunan | 1 | 50 % | | |
| 03.01.03.01 PRO-P: Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu | 01 - Terlaksananya dan rujukan bagi penduduk miskin dan rentan | 01 - Jumlah kabupaten/ kota yang mengembangkan SLRT (kabupaten/kota) | 1 | 514 kabupaten/kota | 4.000.202,2 | KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | 02 - Jumlah desa/kelurahan yang mengembangkan Pusat Kesejahteraan Sosial | 1 | 1.028 desa/kelurahan | | |

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.03.02<br>PRO-P: Penguatan Pendampingan Masyarakat | 01 - Terlaksananya penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pendamping pembangunan | 01 - Jumlah SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitas dan kemampuannya | 1 | 18.000 orang | 1.965.671,8 | KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PERTANIAN, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | | 02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang tereakreditasi | 1 | 6.000 lembaga | | |
| | 02 - Terlaksananya pendampingan melalui pendamping desa | 01 - Jumlah pendamping desa yang diberdayakan | 1 | 36.000 orang | | |
| 03.01.04<br>KP: Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk | 01 - Meningkatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk | 01 - Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan | 1 | 53 | 147.986,2 | |
| 03.01.04.01<br>PRO-P: Sinergitas Kebijakan Pengendalian Penduduk dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang | 01 - Meningkatnya sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang | 01 - Persentase pemerintah daerah yang mempergunakan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan daerah | 1 | 75 (prov) & 38 (kab/kota) % | 1.000,0 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| 03.01.04.02<br>PRO-P: Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Kelembagaan Kependudukan | 01 - Menguatnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan kependudukan | 01 - Persentase pemerintah daerah yang memiliki kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan | 4 | 75 % | 1.307,0 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| 03.01.04.03<br>PRO-P: Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan | 01 - Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kependudukan | 01 - Indeks Kualitas Data dan Informasi Program Bangga Kencana | 4 | 66,51 | 145.679,2 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02<br>PP: Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial | 01 - Menguatnya pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan | 01 - Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | 1 | 91,00 % | 135.398.904,2 | |
| | | 02 - Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas | 1 | 12,00 % | | |
| | | 03 - Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia | 1 | 10,00 % | | |
| | | 04 - Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip inklusif | 1 | 15,00 % | | |
| | | 05 - Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekerja Formal | 1 | 67,40 % | | |
| | | 06 - Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekerja Informal | 1 | 16,93 % | | |
| 03.02.01<br>KP: Sistem Jaminan Sosial Nasional | 01 - Terwujudnya sistem jaminan sosial nasional | 01 - Jumlah kajian penguatan dan harmonisasi peraturan perundangan terkait jaminan sosial | 1 | 3 dokumen | 46.477.800,0 | |
| 03.02.01.01<br>PRO-P: Pengembangan Program Jaminan Sosial | 01 - Terlaksananya perluasan pemahaman publik akan JKN dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | 01 - Jumlah strategi sosialisasi, advokasi, dan edukasi publik terpadu sistem jaminan sosial nasional | 1 | 1 dokumen | 46.471.800,0 | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | | 02 - Jumlah penyelenggaraan forum komunikasi dan kemitraan SJSN | 1 | 1 dokumen | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.01.02<br>PRO-P: Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional | 01 - Terlaksananya penguatan penyelenggara sistem jaminan sosial nasional berbasis data | 01 - Jumlah *monitoring* dan evaluasi terpadu jaminan sosial bidang kesehatan dan bidang ketenagakerjaan berbasis digital | 1 | 1 dokumen/sistem | 6.000,0 | KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN |
| | | 02 - Persentase peserta BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek yang terintegrasi berbasis NIK | 1 | 100 % | | |
| 03.02.02<br>KP: Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran | 01 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan | 01 - Akurasi penyaluran bantuan sosial | 1 | 57 % | 87.901.690,7 | |
| | | 02 - Rumah tangga miskin dan rentan dengan akses layanan keuangan | 1 | 70 % | | |
| | | 03 - Penyaluran bantuan keluarga untuk kesehatan dan pendidikan | 1 | 8.000.000 keluarga | | |
| | | 04 - Penyaluran bantuan pangan melalui Kartu Sembako Murah | 1 | 15.600.000 keluarga | | |
| | | 05 - Penyaluran bantuan LPG 3 kg | 1 | 15.600.000 keluarga | | |
| | | 06 - Penyaluran bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA | 1 | 15.600.000 keluarga | | |
| 03.02.02.01<br>PRO-P: Penyelenggaraan Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran | 01 - Terselenggaranya bantuan dan subsidi tepat sasaran | 01 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran | 1 | 8.000.000 keluarga | 87.901.690,7 | KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA, |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan pangan melalui program kartu sembako murah | 1 | 15.600.000 keluarga | | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN PUSAT STATISTIK (Terintegrasi dengan PSN) |
| | | 03 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan subsidi listrik | 1 | 15.600.000 keluarga | | |
| | 02 - Tersedianya pasokan hilir migas sesuai kebutuhan | 01 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan energi LPG 3 kg | 1 | 15.600.000 keluarga | | |
| | | 02 - Jumlah volume elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi masyarakat, usaha mikro, nelayan, dan petani sasaran | 2 | 8.000 ribu ton | | |
| 03.02.03 KP: Perlindungan Sosial Adaptif | 01 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang adaptif | 01 - Penduduk yang memperoleh bantuan sosial bencana dan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana | 1 | 500.000 jiwa | 181.263,8 | |
| 03.02.03.01 PRO-P: Pelaksanaan Perlindungan Sosial yang Adaptif | 01 - Terlaksananya perlindungan sosial bagi penduduk korban bencana | 01 - Jumlah penduduk korban bencana yang memperoleh bantuan perlindungan sosial bencana alam | 1 | 100.000 jiwa | 181.263,8 | KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | | 02 - Jumlah penduduk korban bencana yang memperoleh bantuan perlindungan sosial bencana sosial | 1 | 15.000 jiwa | | |
| | | 03 - Jumlah penduduk korban bencana yang memperoleh layanan psikososial | 1 | 2.000 jiwa | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.04<br>KP: Kesejahteraan Sosial | 01 - Meningkatnya kualitas kesejahteraan sosial penduduk rentan | 01 - Persentase lanjut usia yang memperoleh bantuan kesejahteraan sosial | 1 | 24 % | 838.149,6 | |
| | | 02 - Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan kesejahteraan sosial | 1 | 18 % | | |
| | | 03 - Jumlah kelompok rentan lain yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial | 1 | 45.000 jiwa | | |
| 03.02.04.01<br>PRO-P: Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif | 01 - Terlaksananya penguatan kapasitas dan kelembagaan bagi penyandang disabilitas | 01 - Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial | 1 | 50.000 jiwa | 294.725,2 | KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| | | 02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial penyandang disabilitas yang memperoleh penguatan kapasitas | 1 | 150 lembaga | | |
| | | 03 - Jumlah SDM penyelenggara layanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas yang memperoleh peningkatan kapasitas | 1 | 300 jiwa | | |
| 03.02.04.02<br>PRO-P: Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Kelanjutusiaan (Lansia Aktif dan Produktif) | 01 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan kelanjutusiaan | 01 - Jumlah lanjut usia yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial | 1 | 28.000 jiwa | 164.656,2 | KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN KESEHATAN |
| | | 02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia yang memperoleh penguatan kapasitas | 1 | 150 lembaga | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 03 - Jumlah SDM penyelenggara layanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia yang memperoleh peningkatan kapasitas | 1 | 300 jiwa | | |
| 03.02.04.03<br>PRO-P: Pelaksanaan Perawatan Jangka Panjang Berbasis Komunitas yang Terintegrasi (*Long-Term Care*) | 01 - Terlaksananya perawatan jangka panjang berbasis komunitas yang terintegrasi (*Long Term Care*) | 01 - Jumlah lansia yang memperoleh layanan berbasis komunitas (jiwa) | 1 | 600 jiwa | 24.300,0 | KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| | | 02 - Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan sosial lanjut usia terintegrasi | 1 | 10 kab/kota | | |
| 03.02.04.04<br>PRO-P: Penguatan Pelayanan Sosial Kelompok Rentan Lainnya | 01 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan bagi korban penyalahgunaan napza | 01 - Jumlah korban penyalahgunaan napza yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial | 1 | 10.000 jiwa | 354.468,2 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| | | 02 - Jumlah institusi penerima wajib lapor yang memperoleh penguatan kapasitas | 1 | 150 lembaga | | |
| | | 03 - Jumlah SDM penyelenggara layanan kesejahteraan sosial bagi korban penyalahgunaan napza yang memperoleh peningkatan kapasitas | 1 | 300 jiwa | | |
| | 02 - Terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak | 01 - Jumlah anak telantar yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial | 1 | 24.000 jiwa | | |
| | | 02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial anak yang memperoleh penguatan kapasitas | 1 | 200 lembaga | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 03 - Jumlah SDM penyelenggara layanan kesejahteraan sosial anak yang memperoleh peningkatan kapasitas | 1 | 300 lembaga | | |
| | 03 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan bagi tuna sosial dan korban tindak kekerasan perdagangan orang | 01 - Jumlah tuna sosial dan korban tindak kekerasan perdagangan orang yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial | 1 | 8.000 jiwa | | |
| | | 02 - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial tuna sosial dan korban tindak kekerasan perdagangan orang yang memperoleh penguatan kapasitas | 1 | 135 lembaga | | |
| | | 03 - Jumlah SDM penyelenggara layanan kesejahteraan sosial tuna sosial dan korban tindak kekerasan perdagangan orang yang memperoleh peningkatan kapasitas | 1 | 200 jiwa | | |
| | 04 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan bagi orang dengan HIV | 01 - Jumlah orang dengan HIV yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial | 1 | 2.000 jiwa | | |
| | 05 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan bagi Komunitas Adat Terpencil | 01 - Jumlah warga Komunitas Adat Terpencil yang memperoleh pemberdayaan sosial | 1 | 2.800 KK | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03<br>PP: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan | 01 - Meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah | 01 - Persentase persalinan di fasyankes | 1 | 93,0 % | 31.653.286,8 | |
| | | 02 - Angka prevalensi kontrasepsi modern/*modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) | 1 | 62,92 % | | |
| | | 03 - Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) | 1 | 7,70 % | | |
| | | 04 - Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Rate* (ASFR 15-19) | 1 | 20 kelahiran hidup per 1.000 perempuan | | |
| | | 05 - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan | 1 | 75 % | | |
| | | 06 - Prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada balita | 1 | 7,30 % | | |
| | | 07 - Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC *Treatment Coverage*) | 1 | 90 % | | |
| | | 08 - Jumlah kabupaten/kota dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria | 1 | 110 kabupaten/kota | | |
| | | 09 - Insidensi HIV | 1 | 0,19 per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV | | |
| | | 10 - Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu | 1 | 90 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11 - Jumlah kabupaten/kota sehat | 1 | 380 kabupaten/kota | | |
| | | 12 - Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) | 1 | 474 kabupaten/kota | | |
| | | 13 - Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi | 1 | 90 % | | |
| | | 14 - Persentase rumah sakit terakreditasi | 1 | 95 % | | |
| | | 15 - Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar | 1 | 71 % | | |
| | | 16 - Persentase RSUD kab/kota memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya | 1 | 85 % | | |
| | | 17 - Persentase obat memenuhi syarat | 1 | 96 % | | |
| | | 18 - Persentase makanan memenuhi syarat | 1 | 86 % | | |
| 03.03.01<br>KP: Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi | 01 - Meningkatnya kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi | 01 - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan | 1 | 75 % | 4.370.642,2 | |
| | | 02 - Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 1 | 27,57 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.01.01<br>PRO-P: Penurunan Kematian Ibu dan Bayi | 01 - Terwujudnya penurunan kematian ibu dan bayi | 01 - Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan | 1 | 93,0 % | 3.365.006,2 | KEMENTERIAN KESEHATAN, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAK |
| | | 02 - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan | 1 | 471 kab/kota | | |
| 03.03.01.02<br>PRO-P: Peningkatan KB dan Kesehatan Reproduksi | 01 - Meningkatnya KB dan Kesehatan Reproduksi | 01 - Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (*Drop Out*/DO) | 1 | 21,59 % | 1.005.636,0 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KESEHATAN, DAK |
| 03.03.02<br>KP: Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat | 01 - Terlaksananya percepatan perbaikan gizi masyarakat | 01 - Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif | 1 | 55 % | 2.978.622,9 | |
| | | 02 - Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) | 1 | 11,5 % | | |
| 03.03.02.01<br>PRO-P: Penurunan *Stunting* | 01 - Terwujudnya penurunan *stunting* | 01 - Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi | 1 | 100 % | 2.978.622,9 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN), BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP), KEMENTERIAN SOSIAL, |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 03.03.03<br>KP: Peningkatan Pengendalian Penyakit | 01 - Meningkatnya pengendalian penyakit | 01 - Persentase orang dengan HIV-AIDS yang menjalani terapi ARV (ODHA on ART) | 1 | 55 % | 5.932.396,1 | |
| | | 02 - Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC *Success Rate*) | 1 | 90 % | | |
| | | 03 - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria | 1 | 385 kab/kota | | |
| | | 04 - Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko | 1 | 100 % | | |
| | | 05 - Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta | 1 | 482 kab/kota | | |
| | | 06 - Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi | 1 | 150 kab/kota | | |
| | | 07 - Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi | 1 | 24 desa | | |
| | | 08 - Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) | 1 | 360 kab/kota | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 09 - Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) | 1 | 474 kab/kota | | |
| 03.03.03.01<br>PRO-P: Pengendalian Penyakit Menular | 01 - Terkendalinya penyakit menular | 01 - Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV | 1 | 90 % | 4.018.608,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, DAK |
| | | 02 - Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC *Treatment Coverage*) | 1 | 90 % | | |
| | | 03 - Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API <1/1.000 penduduk | 1 | 495 kab/kota | | |
| | | 04 - Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko | 1 | 100 % | | |
| | | 05 - Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat | 1 | 90 % | | |
| | | 06 - Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria <1% | 1 | 220 kab/kota | | |
| | | 07 - Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi | 1 | 24 desa | | |
| 03.03.03.02<br>PRO-P: Pengendalian Penyakit Tidak Menular | 01 - Terkendalinya penyakit tidak menular | 01 - Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% puskesmas | 1 | 411 kab/kota | 1.913.788,1 | KEMENTERIAN KESEHATAN, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, DAK |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02 - Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) | 1 | 474 kab/kota | | |
| 03.03.04<br>KP: Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) | 01 - Terlaksananya penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) | 01 - Jumlah kabupaten/kota sehat | 1 | 380 kab/kota | 462.084,8 | |
| 03.03.04.01<br>PRO-P: Pengembangan Lingkungan Sehat | 01 - Terlaksananya pengembangan lingkungan sehat | 01 - Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) | 1 | 70 % | 214.317,8 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| | | 02 - Jumlah kabupaten/kota sehat | 1 | 380 kab/kota | | |
| 03.03.04.02<br>PRO-P: Penguatan Promosi Germas | 01 - Terlaksananya penguatan promosi Germas | 01 - Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas | 1 | 45 % | 247.767,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| | | 02 - Persentase kabupaten/kota dengan minimal 80% posyandu aktif | 1 | 60 % | | |
| 03.03.05<br>KP: Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan | 01 - Menguatnya sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan | 01 - Persentase puskesmas tanpa dokter | 1 | 0 % | 17.909.540,8 | |
| | | 02 - Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar | 1 | 71 % | | |
| | | 03 - Persentase RSUD kab/kota memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya | 1 | 85 % | | |
| | | 04 - Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi | 1 | 90 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 05 - Persentase rumah sakit terakreditasi | 1 | 95 % | | |
| | | 06 - Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial | 1 | 94 % | | |
| | | 07 - Jumlah kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola pembangunan kesehatan | 1 | 55 kab/kota | | |
| | | 08 - Persentase obat memenuhi syarat | 1 | 96 % | | |
| | | 09 - Persentase makanan memenuhi syarat | 1 | 86 % | | |
| 03.03.05.01<br>PRO-P: Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan | 01 - Terlaksananya penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | 01 - Persentase RS milik pemerintah daerah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar | 1 | 95 % | 15.536.778,6 | KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DAK, KEMENTERIAN PERTAHANAN |
| | | 02 - Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar | 1 | 95 % | | |
| | | 03 - Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memenuhi persyaratan survei akreditasi | 1 | 6.110 FKTP | | |
| | | 04 - Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi | 1 | 1.169 FKRTL | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.05.02<br>PRO-P: Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan | 01 - Terlaksananya pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan | 01 - Persentase puskesmas tanpa dokter | 1 | 0 % | 653.727,8 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| | | 02 - Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar | 1 | 71 % | | |
| | | 03 - Persentase RSUD kab/kota memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya | 1 | 85 % | | |
| 03.03.05.03<br>PRO-P: Pemenuhan dan Peningkatan Daya Saing Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan | 01 - Terlaksananya pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan | 01 - Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial | 1 | 94 % | 377.086,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| | | 02 - Persentase alat kesehatan memenuhi syarat | 1 | 94 % | | |
| 03.03.05.04<br>PRO-P: Penguatan Tata Kelola, Pembiayaan, Penelitian, dan Pengembangan Kesehatan | 01 - Terlaksananya penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian, dan pengembangan kesehatan | 01 - Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola program kesehatan | 1 | 55 lokasi | 868.869,8 | KEMENTERIAN KESEHATAN, BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN) |
| | | 02 - Jumlah bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan yang disusun | 1 | 2 dokumen | | |
| | | 03 - Persentase rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan yang dimanfaatkan untuk perbaikan pelaksanaan prioritas nasional | 1 | 100 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.05.05<br>PRO-P: Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan | 01 - Terlaksananya peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan | 01 - Persentase obat memenuhi syarat | 1 | 96 % | 473.078,6 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| | | 02 - Persentase makanan memenuhi syarat | 1 | 86 % | | |
| 03.04<br>PP: Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas | 01 - Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas | 01 - Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya: SMA/SMK/MA Sederajat | 1 | 0,82 | 69.546.435,2 | |
| | | 02 - Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya: Pendidikan Tinggi | 1 | 0,31 | | |
| | | 03 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%): Membaca | 1 | 33,00 % | | |
| | | 04 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%): Matematika | 1 | 30,00 % | | |
| | | 05 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%): Sains | 1 | 42,60 % | | |
| | | 06 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi: Literasi | 1 | 58,31 % | | |
| | | 07 - Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi: Numerasi | 1 | 39,41 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 08 - Tingkat penyelesaian pendidikan SD/MI/sederajat | 1 | 98,41 % | | |
| | | 09 - Tingkat penyelesaian pendidikan SMP/MTs/sederajat | 1 | 91,08 % | | |
| | | 10 - Tingkat penyelesaian pendidikan SMA/SMK/MA/sederajat | 1 | 69,68 % | | |
| | | 11 - Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini | 1 | 63,55 % | | |
| | | 12 - Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT) | 1 | 31,89 % | | |
| 03.04.01<br>KP: Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran | 01 - Meningkatnya kualitas pengajaran dan pembelajaran | 01 - Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum yang berlaku | 1 | 100 % | 5.297.197,1 | |
| | | 02 - Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran | 1 | 100 % | | |
| 03.04.01.01<br>PRO-P: Penerapan Kurikulum dan Pola Pembelajaran Inovatif | 01 - Terlaksananya penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif | 01 - Jumlah perangkat kurikulum dan pembelajaran yang bermutu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran | 1 | 2.247 perangkat kurikulum dan pembelajaran | 962.161,9 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA, DAK |
| | | 02 - Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan perangkat pembelajaran untuk perbaikan kualitas pembelajaran | 1 | 62 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.01.02<br>PRO-P: Peningkatan Kompetensi Pendidik | 01 - Meningkatnya kompetensi pendidik | 01 - Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi | 1 | 15.048 orang | 2.265.407,9 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA |
| 03.04.01.03<br>PRO-P: Penguatan Kualitas Penilaian Pendidikan | 01 - Menguatnya kualitas penilaian pendidikan | 01 - Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan Asesmen Nasional | 1 | 90 % | 696.485,9 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA |
| 03.04.01.04<br>PRO-P: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 01 - Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di satuan pendidikan | 01 - Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK | 1 | 23 % | 786.123,1 | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA |
| 03.04.01.05<br>PRO-P: Integrasi *Softskill* dalam Pembelajaran | 01 - Terwujudnya integrasi *softskill* dalam pembelajaran | 01 - Kab/kota yang menerapkan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan | 1 | 514 kab/kota | 587.018,3 | KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| 03.04.02<br>KP: Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun | 01 - Terwujudnya pemerataan akses dan Wajib Belajar 12 Tahun | 01 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat | 1 | 105,98 % | 46.955.718,5 | |
| | | 02 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat | 1 | 93,01 % | | |
| | | 03 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat | 1 | 85,8 % | | |
| | | 04 - Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/RA/BA | 1 | 36,55 % | | |
| 03.04.02.01<br>PRO-P: Sarana dan Prasarana Pendidikan | 01 - Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan | 01 - Jumlah lembaga/satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana prasarananya | 1 | 17.429 lembaga | 21.806.260,5 | KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DAK, |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| 03.04.02.02<br>PRO-P: Bantuan Pendidikan bagi Anak Kurang Mampu, Daerah Afirmasi, dan Berbakat | 01 - Terlaksananya bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat | 01 - Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran | 1 | 100 % | 24.285.174,1 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA |
| 03.04.02.03<br>PRO-P: Penanganan Anak Tidak Sekolah | 01 - Terlaksananya penanganan anak tidak sekolah | 01 - Jumlah kabupaten/kota dengan APK SD/MI/SDI-B sekurang-kurangnya 100% | 1 | 478 kab/kota | 19.920,0 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA |
| | | 02 - Jumlah kabupaten/kota dengan APK SMP/MTs/SMPLB sekurang-kurangnya 100% | 1 | 87 kab/kota | | |
| | | 03 - Jumlah kabupaten/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95% | 1 | 149 kab/kota | | |
| 03.04.02.04<br>PRO-P: Penguatan Pelayanan 1 Tahun Prasekolah | 01 - Terlaksananya penguatan pelayanan 1 tahun prasekolah | 01 - Jumlah kab/kota dengan persentase siswa kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50% | 1 | 363 kab/kota | 844.363,9 | KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| 03.04.03<br>KP: Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 01 - Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan | 01 - Persentase daerah yang memiliki Indeks pemerataan guru dan ketersediaan tenaga kependidikan baik | 1 | 34,31% | 15.751.471,6 | |
| | | 02 - Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional | 1 | 48,83 % | | |
| 03.04.03.01<br>PRO-P: Revitalisasi LPTK | 01 - Terlaksananya revitalisasi LPTK | 01 - Jumlah LPTK yang direvitalisasi | 1 | 4 lembaga | 40.000,0 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.03.02<br>PRO-P: Pendidikan Profesi Guru dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik | 01 - Terlaksananya pendidikan profesi guru dan peningkatan kualifikasi pendidik | 01 - Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik | 1 | 91,74 % | 1.419.583,2 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA |
| | | 02 - Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1 | 1 | 89,21 % | | |
| 03.04.03.03<br>PRO-P: Pemenuhan dan Distribusi Tenaga Pendidik Berbasis Kebutuhan | 01 - Terlaksananya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan | 01 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki indeks pemerataan guru Dikdas baik | 1 | 45 kab/kota | 786.773,9 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA |
| | | 02 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki indeks pemerataan guru PAUD dan Dikmas baik | 1 | 45 kab/kota | | |
| | | 03 - Jumlah provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru Dikmen dan Diksus baik | 1 | 14 provinsi | | |
| 03.04.03.04<br>PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan Pendidik Berbasis Kinerja | 01 - Terlaksananya peningkatan kesejahteraan pendidik berbasis kinerja | 01 - Jumlah guru dan tenaga kependidikan non-PNS yang mendapatkan tunjangan atau insentif tepat waktu | 1 | 758.119 orang | 13.505.114,5 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA |
| 03.04.04<br>KP: Penjaminan Mutu Pendidikan | 01 - Terwujudnya mutu pendidikan | 01 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SD/MI) | 1 | 83,37 % | 1.510.365,1 | |
| | | 02 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SMP/MTS) | 1 | 78,95 % | | |
| | | 03 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (SMA/MA) | 1 | 76,29 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 04 - Perguruan Tinggi terakreditasi A (PT) | 1 | 130 PT | | |
| | | 05 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (PAUD) | 1 | 68,03 % | | |
| | | 06 - Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (PNF) | 1 | 59.20 % | | |
| 03.04.04.01<br>PRO-P: Penguatan Kapasitas dan Akselerasi Akreditasi | 01 - Terlaksananya penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi | 01 - Jumlah satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP | 1 | 103.533 satuan pendidikan | 381.996,7 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA |
| 03.04.04.02<br>PRO-P: Perluasan Budaya Mutu Pendidikan | 01 - Terwujudnya perluasan budaya mutu pendidikan | 01 - Jumlah SNP yang dikembangkan untuk penyusunan kebijakan peningkatan mutu pendidikan | 1 | 10 rekomendasi kebijakan | 1.128.368,5 | KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| 03.04.05<br>KP: Peningkatan Tata Kelola Pendidikan | 01 - Meningkatnya tata kelola pendidikan | 01 - Persentase kab/kota memenuhi SPM pendidikan | 1 | 100 % | 31.682,9 | |
| 03.04.05.01<br>PRO-P: Penguatan Tata Kelola Pemenuhan SPM Pendidikan | 01 - Terlaksananya penguatan tata kelola pemenuhan SPM pendidikan | 01 - Jumlah provinsi memenuhi SPM pendidikan | 1 | 34 provinsi | 26.528,0 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN AGAMA |
| 03.04.05.02<br>PRO-P: Penguatan Strategi Pembiayaan dan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Pendidikan | 01 - Menguatnya Strategi Pembiayaan dan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Pendidikan | 01 - Jumlah kab/kota yang difasilitasi dana transfer daerah bidang pendidikan | 1 | 514 kab/kota | 0,0[a] | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.05.03<br>PRO-P: Peningkatan Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan | 01 - Meningkatnya sinkronisasi data pokok pendidikan | 01 - Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok pendidikan dan kebudayaan | 1 | 95,33 % | 4.057,9 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGAMA |
| 03.04.05.04<br>PRO-P: Sinkronisasi Pelaksanaan PAUD-HI | 01 - Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan PAUD-HI | 01 - Jumlah kab/kota yang menyediakan layanan PAUD-HI | 1 | 100 kab/kota | 1.097,1 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| 03.05<br>PP: Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda | 01 - Menguatnya perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, berwirausaha dan pencegahan perilaku berisiko | 01 - Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun | 1 | 9,08 % | 770.502,1 | |
| | | 02 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya | 1 | menurun | | |
| | | 03 - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 1 | 75,60—77,18 | | |
| | | 04 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan | 1 | 54,38 % | | |
| | | 05 - Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir | 1 | menurun | | |
| | | 06 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir | 1 | meningkat | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 07 - Persentase pemuda berumur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir | 1 | meningkat | | |
| | | 08 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan *white collar* | 1 | 0,50 % | | |
| | | 09 - Proporsi pemuda usia 16-30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16-30 tahun | 1 | 7,05 % | | |
| 03.05.01<br>KP: Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak | 01 - Terpenuhinya hak dan perlindungan anak | 01 - Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) | 1 | 79,39 | 54.931,4 | |
| | | 02 - Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) | 1 | 69,44 | | |
| 03.05.01.01<br>PRO-P: Penjaminan Pemenuhan Hak Anak secara Universal | 01 - Terjaminnya pemenuhan hak anak secara universal | 01 - Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak | 1 | 3,51 % | 17.507,9 | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | | 02 - Jumlah provinsi/kab/kota yang memperoleh peringkat KLA | 1 | 315 provinsi/kab/kota | | |

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.01.02<br>PRO-P: Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Lainnya | 01 - Terlaksananya perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya | 01 - Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja | 1 | 4,51 % | 37.423,4 | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, MAHKAMAH AGUNG, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| | | 02 - Persentase anak korban kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus (MPK) yang mendapat layanan komprehensif | 1 | 75 % | | |
| 03.05.02<br>KP: Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan | 01 - Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan | 01 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan | 1 | 54,38 % | 441.350,8 | |
| 03.05.02.01<br>PRO-P: Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 01 - Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan | 01 - Indeks PUG Nasional | 1 | 74,20 | 389.420,6 | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA |
| | | 02 - Persentase anggaran responsif gender | 1 | 8,76 % | | |
| 03.05.02.02<br>PRO-P: Perlindungan Perempuan dari Kekerasan | 01 - Meningkatnya perlindungan perempuan dari kekerasan | 01 - Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif | 1 | 90 % | 51.930,2 | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, MAHKAMAH AGUNG, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI) |



SK No 093238 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.03<br>KP: Kualitas Pemuda | 01 - Terwujudnya pemuda yang berkarakter dan berdaya saing | 01 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir | 1 | meningkat | 274.220,0 | |
| | | 02 - Persentase usia pemuda 16-30 tahun yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan | 1 | 23,58 % | | |
| 03.05.03.01<br>PRO-P: Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan | 01 - Terwujudnya penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan | 01 - Persentase provinsi yang melakukan penyusunan RAD kepemudaan | 1 | 75 % | 2.500,0 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | 02 - Persentase tim koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan di tingkat pusat dan provinsi yang terbentuk | 1 | 75 % | | |
| 03.05.03.02<br>PRO-P: Pencegahan Perilaku Berisiko | 01 - Terlindunginya pemuda dari perilaku berisiko | 01 - Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang pernah merokok dalam sebulan terakhir dalam kelompok usia 16-30 tahun | 1 | 24,92 % | 20.750,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN, BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN), BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 03.05.03.03<br>PRO-P: Partisipasi Aktif Sosial dan Politik Pemuda | 01 - Meningkatnya partisipasi sosial dan politik pemuda | 01 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir | 1 | meningkat | 250.970,0 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |



SK No 093239 C

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06<br>PP: Pengentasan Kemiskinan | 01 - Memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan | 01 - Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha | 1 | 45 % | 495.763,6 | |
| | | 02 - Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses kepemilikan tanah | 1 | 261.136 rumah tangga | | |
| 03.06.01<br>KP: Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga | 01 - Terakselerasinya penguatan ekonomi keluarga miskin | 01 - Keluarga miskin dan rentan yang memperoleh modal usaha ultra mikro | 1 | 0,15 % | 20.877,4 | |
| 03.06.01.01<br>PRO-P: Fasilitasi Modal Usaha | 01 - Terfasilitasinya modal usaha bagi keluarga miskin dan rentan | 01 - Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh modal usaha ultra mikro | 1 | 3.500.000 keluarga | 20.877,4 | KEMENTERIAN KEUANGAN |
| 03.06.02<br>KP: Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial | 01 - Terlaksananya pengembangan keperantaraan usaha dan pemberdayaan sosial | 01 - Jumlah lembaga yang mengembangkan keperantaraan usaha (lembaga) | 1 | 4.200 lembaga | 84.972,9 | |
| | | 02 - Jumlah pendamping kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya (orang) | 1 | 2.500 orang | | |
| 03.06.02.01<br>PRO-P: Fasilitasi Keperantaraan Usaha Produktif | 01 - Meningkatnya lembaga yang memperoleh fasilitasi keperantaraan usaha | 01 - Jumlah BUMDes yang dikembangkan | 1 | 500 badan usaha | 76.611,4 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KEUANGAN |
| 03.06.02.02<br>PRO-P: Penguatan Pemberdayaan Berdampak Sosial | 01 - Menguatnya pemberdayaan berdampak sosial | 01 - Jumlah kelompok yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial dari dunia usaha (kelompok) | 1 | 200 badan usaha | 4.422,9 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.02.03<br>PRO-P: Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi Kelompok Masyarakat Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 01 - Terlaksananya penyuluhan dan/atau pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan | 01 - Jumlah KTH mandiri (unit) | 1 | 30 kelompok | 3.938,6 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | | 02 - Jumlah lembaga pelatihan pemagangan usaha kehutanan swadaya masyarakat/LP2UKS (pembentukan wanawiyata widyakarya) (unit) | 1 | 20 kelompok masyarakat | | |
| | | 03 - Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang andal (perhutanan sosial, RHL, KPH, gambut, dan kemitraan konservasi) (orang) | 1 | 1.000 orang | | |
| 03.06.03<br>KP: Reforma Agraria | 01 - Terlaksananya reforma agraria | 01 - Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah | 5 | 0,0047 | 285.070,6 | |
| | | 02 - Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat penerima reforma agraria | 5 | 20 % | | |
| 03.06.03.01<br>PRO-P: Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan) | 01 - Terlaksananya penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan) | 01 - Luas sumber TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan) (ha) | 5 | 735.100 ha | 18.821,1 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 03.06.03.02<br>PRO-P: Peningkatan Kualitas Data Pertanahan dan Legalisasi atas Tora | 01 - Terlaksananya legalisasi atas TORA dan meningkatnya kualitas data pertanahan | 01 - Jumlah bidang tanah yang diredistribusi dan dilegalisasi (bidang) | 5 | 261.136 bidang | 109.919,1 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.03.03<br>PRO-P: Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan, dan Produksi atas TORA | 01 - Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas TORA | 01 - Jumlah masyarakat yang menerima bantuan pemberdayaan dalam kerangka reforma agraria (KK) | 5 | 114.900 kepala keluarga | 156.330,4 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| 03.06.04<br>KP: Perhutanan Sosial | 01 - Terwujudnya kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat | 01 - Luas distribusi akses kelola dan manfaat kawasan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat (ha) | 1 | 1.750.000 ha | 104.842,7 | |
| 03.06.04.01<br>PRO-P: Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat | 01 - Terkelolanya kawasan hutan oleh masyarakat | 01 - Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (ha) | 1 | 1.750.000 ha | 104.842,7 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 03.07<br>PP: Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing | 01 - Meningkatnya produktivitas dan daya saing | 01 - Jumlah lulusan pelatihan vokasi | 1 | 2,60 juta orang | 11.517.907,4 | |
| | | 02 - Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan | 1 | 36,29 % | | |
| | | 03 - Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan | 1 | 60,71 % | | |
| | | 04 - Jumlah prototipe dari perguruan tinggi | 5 | 231 prototipe | | |
| | | 05 - Jumlah produk inovasi dari tenant Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina | 5 | 550 produk | | |
| | | 06 - Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha | 5 | 180 inovasi | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 07 - Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik | 5 | 2.750 paten | | |
| | | 08 - Jumlah paten *granted* (domestik) | 5 | 950 paten | | |
| | | 09 - Persentase sumber daya manusia iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 | 1 | 17,00 % | | |
| | | 10 - Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan | 1 | 132 PUI | | |
| | | 11 - Jumlah infrastruktur iptek strategis yang dikembangkan | 2 | 13 infrastruktur | | |
| | | 12 - Jumlah *Science Techno Park* yang ada yang dikembangkan berbasis perguruan tinggi | 5 | 5 unit | | |
| | | 13 - Jumlah *Science Techno Park* yang ada yang dikembangkan berbasis nonperguruan tinggi | 2 | 3 unit | | |
| | | 14 - Jumlah produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan | 5 | 10 produk | | |
| | | 15 - Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: Penerapan teknologi untuk berkelanjutan pemanfaatan sumber daya alam | 5 | 20 teknologi | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16 - Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana | 5 | 35 teknologi | | |
| | | 17 - Peringkat pada Asian Games | 1 | 12 peringkat | | |
| | | 18 - Peringkat pada Asian Para Games | 1 | 8 peringkat | | |
| 03.07.01<br>KP: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri | 01 - Terlaksananya pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri | 01 - Lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi | 1 | 1.890.345 orang | 7.008.947,2 | |
| | | 02 - PT Vokasi berakreditasi A | 1 | 14 PT Vokasi | | |
| | | 03 - Jumlah lulusan pendidikan menengah vokasi | 1 | 2.082.084 orang | | |
| | | 04 - Jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi | 1 | 329.498 orang | | |
| | | 05 - Jumlah lulusan pelatihan vokasi | 1 | 2,6 juta orang | | |
| | | 06 - Jumlah pemagangan dalam negeri | 1 | 55.000 orang | | |
| | | 07 - Jumlah pemagangan luar negeri | 1 | 3.000 orang | | |
| 03.07.01.01<br>PRO-P: Peningkatan Peran dan Kerja Sama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi | 01 - Meningkatnya peran dan kerja sama industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi | 01 - Jumlah kesepakatan kerja sama antara industri/swasta dengan satuan pendidikan vokasi | 1 | 200 kesepakatan | 2.144.062,1 | KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 03.07.01.02<br>PRO-P: Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi | 01 - Terlaksananya reformasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi | 01 - Jumlah SMK yang mendapatkan pembinaan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran | 1 | 1.101 SMK | 3.441.404,7 | KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, DAK |
| 03.07.01.03<br>PRO-P: Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi | 01 - Meningkatnya kualitas pendidik vokasi | 01 - Jumlah SDM SMK, PT Vokasi, dan kursus/pelatihan yang mendapatkan pelatihan bidang pendidikan | 1 | 8.700 orang | 346.295,0 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 03.07.01.04<br>PRO-P: Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi | 01 - Menguatnya tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi | 01 - Jumlah lembaga pelatihan kerja dan produktivitas yang ditingkatkan kualitas mutu dan lembaga | 1 | 676 lembaga | 911.454,1 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.01.05<br>PRO-P: Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi | 01 - Menguatnya sistem sertifikasi kompetensi | 01 - Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi | 1 | 1.890.345 orang | 165.731,4 | KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 03.07.02<br>KP: Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas | 01 - Menguatnya pendidikan tinggi berkualitas | 01 - Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional | 1 | 27.846 artikel | 1.214.405,5 | |
| | | 02 - Jumlah sitasi di jurnal internasional | 1 | 55.526 sitasi | | |
| 03.07.02.03<br>PRO-P: Peningkatan Kualitas Lulusan PT | 01 - Meningkatnya kualitas lulusan PT | 01 - Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun | 1 | 266.200 orang | 1.214.405,5 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN KEUANGAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| 03.07.03<br>KP: Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi | 01 - Meningkatnya kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi | 01 - Jumlah paten *granted* (domestik) | 5 | 950 paten | 1.331.294,4 | |
| 03.07.03.01<br>PRO-P: Pemanfaatan Iptek dan Penciptaan Inovasi di Bidang-Bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk Pembangunan yang Berkelanjutan | 01 - Terlaksananya pemanfaatan iptek dan penciptaan inovasi di bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan | 01 - Jumlah hasil inovasi *Flagship* PRN | 1 | 10 produk | 232.132,5 | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL, BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) |



SK No 093246 C

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.03.02<br>PRO-P: Pengembangan *Research Power-House* | 01 - Terlaksananya pengembangan *Research Power-House* | 01 - Jumlah SDM iptek yang ditingkatkan kualifikasinya | 1 | 350 orang | 240.425,0 | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL |
| 03.07.03.03<br>PRO-P: Penciptaan Ekosistem Inovasi | 01 - Terlaksananya penciptaan ekosistem inovasi | 01 - Jumlah STP yang ditingkatkan kualitasnya | 1 | 6 lembaga | 858.736,9 | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL |
| 03.07.04<br>KP: Prestasi Olahraga | 01 - Meningkatnya prestasi olahraga Indonesia di tingkat internasional | 01 - Jumlah perolehan medali pada SEA Games | 1 | 69 medali emas, 92 medali perak, 80 medali perunggu | 1.963.260,3 | |
| | | 02 - Jumlah perolehan medali pada ASEAN Para Games | 1 | 126 medali emas 75 medali perak 50 medali perunggu | | |
| | | 03 - Jumlah perolehan medali pada Asian Games | 1 | 8 medali emas | | |
| | | 04 - Jumlah perolehan medali pada Asian Para Games | 1 | 20 medali emas | | |
| | | 05 - Peringkat pada SEA Games | 1 | 4 peringkat | | |
| | | 06 - Peringkat pada ASEAN Para Games | 1 | 1 peringkat | | |
| 03.07.04.01<br>PRO-P: Penguatan dan Penataan Regulasi Keolahragaan | 01 - Terlaksananya penguatan dan penataan regulasi keolahragaan | 01 - Kebijakan turunan UU Keolahragaan, Desain Besar Olahraga Nasional dan terkait Manajemen Talenta Nasional yang Disusun dan Dimanfaatkan | 1 | 6 kebijakan | 16.877,5 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 03.07.04.02<br>PRO-P: Pengembangan Budaya Olahraga | 01 - Terlaksananya pengembangan budaya olahraga di masyarakat | 01 - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir | 1 | 38,46 % | 55.084,7 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.04.03 PRO-P: Penataan Sistem Pembinaan Olahraga Berbasis Cabang Olahraga Olimpiade/Paralimpiade dan Potensi Daerah | 01 - Terlaksananya penataan sistem pembinaan olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade, Paralimpiade, dan potensi daerah | 01 - Persentase olahragawan andalan nasional pada cabang olahraga Olimpik yang merupakan alumni PPLP dan Sekolah Khusus/Keberbakatan Olahraga (SKO) | 1 | 15 % | 1.472.961,9 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | 02 - Persentase olahragawan andalan nasional pada cabang olahraga Olimpik yang merupakan alumni PPLM | 1 | 5 % | | |
| | | 03 - Persentase olahragawan andalan nasional pada cabang olahragawan Paralimpik yang merupakan alumni Sekolah Khusus Olahraga Disabilitas Indonesia (SKODI) | 1 | 20 % | | |
| | | 04 - Persentase sekolah khusus/keberbakatan olahraga yang telah terstandardisasi dan fokus membina cabang olahraga prioritas sesuai Desain Besar Olahraga Nasional | 1 | 36,84 % | | |
| | | 05 - Persentase PPLPD di tingkat kabupaten/kota yang telah terstandardisasi dan fokus membina cabang olahraga prioritas sesuai Desain Besar Olahraga Nasional | 1 | 4,28 % | | |
| | | 06 - Persentase olahragawan muda cabang olahraga Olimpik pada olahragawan andalan nasional | 1 | 30 % | | |



SK No 093248 C

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 07 - Persentase olahragawan muda cabang olahraga Paralimpik pada olahragawan andalan nasional | 1 | 15 % | | |
| | | 08 - Jumlah pusat pelatihan nasional yang telah beroperasional di daerah sesuai Desain Besar Olahraga | 1 | 10 provinsi | | |
| | | 09 - Jumlah atlet elit nasional | 1 | 250 orang | | |
| | | 10 - Jumlah atlet elit junior nasional | 1 | 500 orang | | |
| | | 11 - Jumlah atlet talenta muda | 1 | 2.850 orang | | |
| 03.07.04.04<br>PRO-P: Penataan Kelembagaan Olahraga | 01 - Terlaksananya penataan kelembagaan olahraga | 01 - Organisasi keolahragaan berbasis Olimpik yang memenuhi standar minimal keolahragaan | 1 | 21 lembaga | 14.165,1 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 03.07.04.05<br>PRO-P: Peningkatan Ketersediaan Tenaga Keolahragaan Berstandar Internasional | 01 - Terlaksananya peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional | 01 - Jumlah tenaga keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang bersertifikat internasional | 1 | 220 orang | 10.598,7 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | 02 - Jumlah tenaga keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang bersertifikat nasional | 1 | 750 orang | | |
| | | 03 - Jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat internasional | 1 | 30 orang | | |
| | | 04 - Jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat nasional | 1 | 200 orang | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.04.06<br>PRO-P: Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Internasional | 01 - Peningkatan sarana dan prasarana olahraga berstandar internasional | 01 - Jumlah prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi, dan/atau direnovasi | 1 | 4 unit | 390.301,8 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | 02 - Jumlah fasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpik | 1 | 4 lembaga | | |
| 03.07.04.07<br>PRO-P: Pengembangan Peran Dunia Usaha dalam Pendampingan dan Pembiayaan Keolahragaan | 01 - Terlaksananya pengembangan peran dunia usaha dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan | 01 - Jumlah pengelola industri olahraga yang terfasilitasi dalam pelatihan SDM industri dan promosi olahraga | 1 | 500 orang | 3.270,6 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA |

CATATAN:
(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
(2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
(3) Alokasi DAK merupakan pagu alokasi per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2023;
(4) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L, DAK Fisik, dan KPBU pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan;
(5) Dukungan Terhadap Arahan Presiden: 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia; 2. Pembangunan Infrastruktur; 3. Penyederhanaan Regulasi; 4. Penyederhanaan Birokrasi; dan 5. Transformasi Ekonomi.

KETERANGAN:
(a) *multitagging.*



SK No 093250 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRIORITAS NASIONAL 4 : REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04<br>PN: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 01 - Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya | 01 - Indeks Capaian Revolusi Mental | | 73,13 | 6.091.100,6 | |
| | | 02 - Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila | | 79,08 | | |
| | 02 - Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan | 01 - Indeks Pembangunan Kebudayaan | | 61,20 | | |
| | 03 - Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial | 01 - Indeks Pembangunan Masyarakat | | 0,65 | | |
| | 04 - Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat | 01 - Indeks Kerukunan Umat Beragama | | 75,00 | | |
| | 05 - Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa | 01 - Indeks Pembangunan Keluarga | | 59,00 | | |
| | | 02 - Median Usia Kawin Pertama Perempuan | | 22,10 tahun | | |
| | 06 - Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif | 01 - Nilai Budaya Literasi | | 68,37 | | |



SK No 093251 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01<br>PP: Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter | 01 - Terwujudnya Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu | 01 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani | 1 | 79,30 | 556.399,7 | |
| | | 02 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih | 1 | 72,95 | | |
| | | 03 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib | 1 | 77,88 | | |
| | | 04 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri | 1 | 63,16 | | |
| | | 05 - Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu | 1 | 72,36 | | |
| | 02 - Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila | 06 - Nilai Dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa | 1 | 85,08 | | |
| | | 07 - Nilai Dimensi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab | 1 | 78,94 | | |
| | | 08 - Nilai Dimensi Persatuan Indonesia | 1 | 90,02 | | |
| | | 09 - Nilai Dimensi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan | 1 | 77,18 | | |
| | | 10 - Nilai Dimensi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia | 1 | 64,19 | | |
| | 03 - Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter | 11 - Indeks Kerentanan Keluarga | 1 | 10,50 | | |
| | | 12 - Indeks Karakter Remaja | 1 | 69,42 | | |



SK No 093252 C

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.01<br>KP: Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti | 01 - Menguatnya nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti | 01 - Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter | 1 | 45 % | 149.199,0 | |
| 04.01.01.01<br>PRO-P: Pengembangan Budaya Belajar dan Lingkungan Sekolah yang Menyenangkan dan Bebas dari Kekerasan (*Bullying Free School Environment*) | 01 - Berkembangnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan | 01 - Persentase provinsi/kabupaten/kota yang mengimplementasikan materi untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada satuan Pendidikan | 1 | 65 % | 58.381,3 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) |
| 04.01.01.02<br>PRO-P: Penguatan Pendidikan Agama, Nilai Toleransi Beragama, dan Budi Pekerti dalam Sistem Pendidikan | 01 - Menguatnya pendidikan agama, nilai toleransi beragama, dan budi pekerti dalam sistem pendidikan | 01 - Persentase guru pendidikan agama di sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dan ditingkatkan kualitasnya | 1 | 64 % | 14.222,2 | KEMENTERIAN AGAMA |
| 04.01.01.03<br>PRO-P: Peningkatan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda, serta Pengembangan Pendidikan Kepramukaan | 01 - Meningkatnya kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan berkembangnya pendidikan kepramukaan | 01 - Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan | 1 | 3.600 orang | 76.595,6 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| 04.01.02<br>KP: Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Responsif | 01 - Menguatnya budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif | 01 - Skor rata-rata nilai SKM secara nasional | 4 | 84,00 | 5.200,0 | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.02.01<br>PRO-P: Peningkatan Budaya Kerja Pelayanan Publik yang Ramah, Cepat, Efektif, Efisien, dan Terpercaya | 01 - Terlaksananya peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya | 01 - Jumlah instansi dengan nilai SKM "Baik" | 4 | 150 instansi | 1.000,0 | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI |
| 04.01.02.02<br>PRO-P: Penerapan Disiplin, *Reward* dan *Punishment* dalam Birokrasi | 01 - Terlaksananya penerapan disiplin, *reward* dan *punishment* dalam birokrasi | 01 - Jumlah laporan tindaklanjut permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun PNS | 4 | 25 laporan | 4.200,0 | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI |
| 04.01.03<br>KP: Revolusi Mental dalam Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas dan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter | 01 - Menguatnya sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter | 01 - Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja | 1 | 77,22 | 166.935,7 | |
| | | 02 - Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga | 1 | 35 | | |
| 04.01.03.01<br>PRO-P: Penyiapan Kehidupan Berkeluarga dan Kecakapan Hidup | 01 - Terlaksananya kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup | 01 - Persentase keluarga ikut pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR) | 1 | 35,46 % | 146.856,6 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN), KEMENTERIAN AGAMA |
| 04.01.03.02<br>PRO-P: Peningkatan Ketahanan Keluarga Berdasarkan Siklus Hidup dengan Memperhatikan Kesinambungan Antargenerasi, Sebagai Upaya Penguatan Fungsi dan Nilai Keluarga | 01 - Terlaksananya peningkatan ketahanan keluarga berdasarkan siklus hidup dengan memperhatikan kesinambungan antargenerasi, sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga | 01 - Persentase keluarga balita dan anak yang ikut BKB | 1 | 60,00 % | 14.500,0 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.03.03<br>PRO-P: Pewujudan Lingkungan yang Kondusif melalui Penguatan Masyarakat, Kelembagaan, Regulasi, Penyediaan Sarana dan Prasarana, serta Partisipasi Dunia Usaha | 01 - Terwujudnya lingkungan yang kondusif melalui penguatan masyarakat, kelembagaan, regulasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi dunia usaha | 01 - Persentase Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam KG, PHP, dan PA | 1 | 70 % | 5.579,1 | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 04.01.04<br>KP: Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental | 01 - Terwujudnya penguatan pusat-pusat perubahan dan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental | 01 - Jumlah pusat perubahan dan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental yang memperoleh penguatan | 1 | 100 lembaga | 31.863,0 | |
| 04.01.04.01<br>PRO-P: Pemantapan Pelaksanaan Lima Program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk Mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu | 01 - Terwujudnya penguatan Gugus Tugas GNRM dalam rangka pemantapan pelaksanaan lima program GNRM untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu | 01 - Jumlah Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental yang memperoleh penguatan | 1 | 73 lembaga | 18.957,5 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN |
| 04.01.04.02<br>PRO-P: Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental di Daerah | 01 - Terlaksananya penguatan pusat-pusat perubahan di tingkat daerah | 01 - Jumlah pusat perubahan di tingkat daerah yang memperoleh penguatan | 1 | 27 lembaga | 12.905,5 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN |
| 04.01.05<br>KP: Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila | 01 - Meningkatnya kualitas koperasi dan kewirausahaan | 01 - Jumlah koperasi modern yang dikembangkan | 5 | 340 unit (kumulatif) | 50.000,0 | |
| | | 02 - Jumlah wirausaha baru industri kecil yang tumbuh | 5 | 16.000 WUB | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.05.01<br>PRO-P: Membangun Budaya Ekonomi Nasional dengan Platform Koperasi dalam Kegiatan Usaha Produktif | 01 - Terlaksananya pembinaan kepada koperasi | 01 - Jumlah koperasi yang menerima pembinaan | 5 | 300 koperasi | 9.000,0 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 04.01.05.02<br>PRO-P: Peningkatan Etos Kerja dan Kewirausahaan Berlandaskan Semangat Gotong Royong | 01 - Terlaksananya pemasyarakatan kewirausahaan | 01 - Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi kewirausahaan | 5 | 1.200 orang | 18.500,0 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 04.01.05.03<br>PRO-P: Penumbuhan Budaya Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri | 01 - Terlaksananya edukasi cinta produk dalam negeri | 01 - Jumlah konsumen yang diedukasi cinta produk dalam negeri | 5 | 10.000 orang | 22.500,0 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| 04.01.06<br>KP: Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme | 01 - Terwujudnya jiwa nasionalisme dan patriotisme pada setiap warga negara | 01 - Persentase capaian proyek prioritas pada kegiatan prioritas pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme | 1 | 100 % | 153.201,9 | |
| 04.01.06.01<br>PRO-P: Pembinaan Ideologi Pancasila, Penguatan Pendidikan Kewargaan, Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara | 01 - Menguatnya pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan dan bela negara | 01 - Persentase capaian proyek pada proyek prioritas pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan dan bela negara | 1 | 100 % | 73.840,2 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN AGAMA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.06.02<br>PRO-P: Peningkatkan Peran dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) | 01 - Terwujudnya peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) | 01 - Persentase capaian proyek pada proyek prioritas peningkatan peran dan fungsi BPIP | 1 | 100 % | 72.007,8 | BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA |
| 04.01.06.03<br>PRO-P: Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang Bertentangan dengan Ideologi Pancasila. | 01 - Terwujudnya harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila | 01 - Jumlah rekomendasi rancangan produk hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila | 1 | 3 dokumen | 3.926,6 | BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA |
| 04.01.06.04<br>PRO-P: Membersihkan Unsur-Unsur yang Mengancam Ideologi Negara | 01 - Terwujudnya pembersihan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara | 01 - Jumlah rekomendasi hasil evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggara negara dan ASN, ormas, organisasi asing, serta media yang terindikasi menentang ideologi negara | 1 | 3 dokumen | 3.427,3 | BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA |
| 04.02<br>PP: Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia | 01 - Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan | 01 - Nilai Dimensi Warisan Budaya | 1 | 54,85 | 1.045.990,5 | |
| | | 02 - Nilai Dimensi Ekspresi Budaya | 1 | 38,60 | | |
| | | 03 - Nilai Dimensi Ekonomi Budaya | 1 | 46,76 | | |
| 04.02.01<br>KP: Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal | 01 - Terwujudnya revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal | 01 - Persentase cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang ditetapkan | 1 | 30 % | 253.690,9 | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.01.01<br>PRO-P: Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Nilai Budaya, Tradisi, Sejarah dan Kearifan Lokal | 01 - Terwujudnya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal | 01 - Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian | 1 | 34 % | 89.843,2 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| 04.02.01.02<br>PRO-P: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Museum dan Arsip | 01 - Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum dan arsip | 01 - Jumlah museum milik pemerintah daerah yang ditingkatkan kualitas program publiknya | 1 | 115 unit | 123.254,5 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| 04.02.01.03<br>PRO-P: Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Manuskrip dan Arsip Sebagai Sumber Nilai Budaya, Sejarah, dan Memori Kolektif Bangsa | 01 - Terwujudnya pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa | 01 - Persentase peningkatan pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno | 1 | 21,18 % | 40.593,2 | PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA |
| 04.02.02<br>KP: Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat | 01 - Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat | 01 - Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni | 1 | 0,50 % | 614.105,4 | |
| | | 02 - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian | 1 | 36 % | | |
| 04.02.02.01<br>PRO-P: Pengembangan Produk Seni, Budaya, dan Film | 01 - Terwujudnya pengembangan produk seni, budaya, dan film | 01 - Jumlah produksi film, musik dan media baru | 1 | 40 produksi | 283.504,2 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| 04.02.02.02<br>PRO-P: Penyelenggaraan Festival Budaya dan Membangun Opera Berkelas Internasional | 01 - Terwujudnya penyelenggaraan festival budaya dan membangun opera berkelas internasional | 01 - Jumlah *event* prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan | 1 | 3 event | 158.353,7 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |



SK No 093258 C

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.02.03<br>PRO-P: Pengelolaan Cagar Budaya untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat | 01 - Terwujudnya pengelolaan cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat | 01 - Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda | 1 | 65 % | 170.247,6 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| 04.02.02.04<br>PRO-P: Pengembangan Budaya Bahari dan Sumber Daya Maritim | 01 - Terwujudnya pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim | 01 - Jumlah komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya | 1 | 3 komunitas | 2.000,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 04.02.03<br>KP: Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif | 01 - Terwujudnya pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif | 01 - Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat | 1 | 22,82 % | 36.032,8 | |
| 04.02.03.01<br>PRO-P: Pengembangan Wilayah Adat sebagai Pusat Pelestarian Budaya dan Lingkungan Hidup | 01 - Terwujudnya pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan hidup | 01 - Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan | 1 | 10 wilayah adat | 21.332,8 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| 04.02.03.02<br>PRO-P: Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Komunitas Budaya | 01 - Terwujudnya pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya | 01 - Jumlah lembaga kepercayaan dan lembaga adat yang difasilitasi untuk penguatan lembaga | 1 | 40 lembaga | 13.700,0 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| 04.02.03.03<br>PRO-P: Pelindungan Kekayaan Budaya Komunal dan Hak Cipta | 01 - Terwujudnya pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta | 01 - Jumlah data dan informasi KI Komunal yang memiliki nilai ekonomi | 1 | 120 data | 1.000,0 | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.04<br>KP: Pengembangan Diplomasi Budaya untuk Memperkuat Pengaruh Indonesia dalam Perkembangan Peradaban Dunia | 01 - Terlaksananya pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia | 01 - Jumlah festival skala internasional (*Mega Events*) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15 persen di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan | 1 | 12 festival | 17.987,0 | |
| 04.02.04.01<br>PRO-P: Pengembangan Diplomasi Budaya melalui Pengembangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional, Muhibah Seni Budaya, dan Kuliner Nusantara | 01 - Pengembangan diplomasi budaya melalui pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, muhibah seni budaya, dan kuliner nusantara | 01 - Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia | 1 | 50 negara | 17.987,0 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| 04.02.04.02<br>PRO-P: Penguatan Pusat Studi dan Rumah Budaya Indonesia di Luar Negeri | 01 - Meningkatnya partisipasi Indonesia dalam forum internasional bidang kebudayaan | 01 - Jumlah partisipasi pada misi dan karavan budaya tingkat dunia | 1 | 2 event | 0,0[a] | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| 04.02.05<br>KP: Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan | 01 - Terwujudnya pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan | 01 - Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya | 1 | 80 % | 124.174,4 | |
| 04.02.05.01<br>PRO-P: Pengelolaan Dana Perwalian Kebudayaan | 01 - Terlaksananya pengelolaan dana perwalian kebudayaan | 01 - Jumlah layanan pemanfaatan hasil pengembangan Dana Abadi Kebudayaan | 1 | 1 layanan | 0,0[a] | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| 04.02.05.02<br>PRO-P: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kebudayaan | 01 - Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia kebudayaan | 01 - Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi | 1 | 980 orang | 46.337,8 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.05.03<br>PRO-P: Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan | 01 - Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan | 01 - Jumlah fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat | 1 | 150 kelompok masyarakat | 70.164,3 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| 04.02.05.04<br>PRO-P: Pengembangan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu | 01 - Terlaksananya pengembangan sistem pendataan kebudayaan terpadu | 01 - Jumlah layanan data dan statistik kebudayaan | 1 | 1 layanan | 0,0[a] | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| 04.02.05.05<br>PRO-P: Pengembangan Kerja Sama dan Kemitraan dalam Pemajuan Kebudayaan | 01 - Terlaksananya pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan | 01 - Jumlah layanan umum, kerja sama dan kehumasan bidang kebudayaan | 1 | 1 layanan | 7.672,3 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| 04.03<br>PP: Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial | 01 - Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, inklusif, dan moderat di kalangan umat beragama | 01 - Indeks Kepuasan Layanan Haji | 1 | 85,99 | 3.813.018,3 | |
| | | 02 - Indeks Kepuasan Layanan KUA | 1 | 83,00 | | |
| | | 03 - Nilai Dimensi Toleransi | 1 | 72,59 | | |
| | | 04 - Nilai Dimensi Kesetaraan | 1 | 76,53 | | |
| | | 05 - Nilai Dimensi Kerja Sama | 1 | 76,16 | | |
| 04.03.01<br>KP: Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk Memantapkan Persaudaraan dan Kebersamaan di Kalangan Umat Beragama | 01 - Menguatnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama | 01 - Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama (persen) | 1 | 90,80 % | 1.252.087,0 | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.01.01<br>PRO-P: Pengembangan Penyiaran Agama untuk Perdamaian dan Kemaslahatan Umat | 01 - Terwujudnya pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat | 01 - Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama | 1 | 1:5 | 841.640,9 | KEMENTERIAN AGAMA, TELEVISI REPUBLIK INDONESIA |
| 04.03.01.02<br>PRO-P: Penguatan Sistem Pendidikan yang Berperspektif Moderat Mencakup Pengembangan Kurikulum, Materi dan Proses Pengajaran, Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Rekrutmen Guru | 01 - Menguatnya penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru | 01 - Persentase guru pendidikan agama yang dibina dalam moderasi beragama (persen) | 1 | 71,60 % | 238.389,1 | KEMENTERIAN AGAMA |
| 04.03.01.03<br>PRO-P: Penguatan Peran Pesantren dalam Mengembangkan Moderasi Beragama melalui Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama untuk Kemaslahatan | 01 - Menguatnya penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan | 01 - Persentase pesantren yang berwawasan moderat (persen) | 1 | 97,00 % | 13.000,0 | KEMENTERIAN AGAMA |
| 04.03.01.04<br>PRO-P: Pengelolaan Rumah Ibadah sebagai Pusat Syiar Agama yang Toleran | 01 - Terwujudnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran | 01 - Persentase rumah ibadah yang ramah (persen) | 1 | 70 % | 146.457,6 | KEMENTERIAN AGAMA |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.01.05<br>PRO-P: Pemanfaatan Ruang Publik untuk Pertukaran Ide dan Gagasan di Kalangan Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda Lintas Budaya, Lintas Agama, dan Lintas Suku Bangsa | 01 - Terlaksananya pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku | 01 - Jumlah aktor-aktor kerukunan umat beragama (orang) | 1 | 5.886 orang | 12.599,4 | KEMENTERIAN AGAMA |
| 04.03.02<br>KP: Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama | 01 - Terwujudnya penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama | 01 - Persentase konflik antar umat beragama yang diselesaikan (persen) | 1 | 74 % | 353.571,1 | |
| 04.03.02.01<br>PRO-P: Pelindungan Umat Beragama untuk Menjamin Hak-Hak Sipil dan Beragama | 01 - Terwujudnya pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama | 01 - Persentase kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan | 1 | 5 % | 66.768,5 | KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN |
| 04.03.02.02<br>PRO-P: Penguatan Peran Lembaga Agama, Organisasi Sosial Keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai Perekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 01 - Terwujudnya penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa | 01 - Persentase lembaga agama dan lembaga keagamaan yang difasilitasi (persen) | 1 | 15 % | 225.108,9 | KEMENTERIAN AGAMA |
| 04.03.02.03<br>PRO-P: Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk Membangun Solidaritas Sosial, Toleransi, dan Gotong Royong | 01 - Terwujudnya penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong | 01 - Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP (persen) | 1 | 100 % | 61.693,7 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN AGAMA |



SK No 093263 C

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.03<br>KP: Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya | 01 - Terwujudnya penyelarasan relasi agama dan budaya | 01 - Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan (persen) | 1 | 96,25 % | 167.183,7 | |
| 04.03.03.01<br>PRO-P: Penghargaan atas Ekspresi Budaya Berbasis Nilai-Nilai Agama | 01 - Terwujudnya penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama | 01 - Budaya keagamaan yang dibina dan dikembangkan (kegiatan) | 1 | 100 kegiatan | 8.720,6 | KEMENTERIAN AGAMA |
| 04.03.03.02<br>PRO-P: Pengembangan Literasi Khazanah Budaya Bernafas Agama | 01 - Terwujudnya pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama | 01 - Persentase literasi khazanah budaya bernafas agama yang dihasilkan dan mudah diakses (persen) | 1 | 30 % | 102.186,1 | KEMENTERIAN AGAMA |
| 04.03.03.03<br>PRO-P: Pelestarian Situs Keagamaan dan Pemanfaatan Perayaan Keagamaan dan Budaya untuk Memperkuat Toleransi | 01 - Terwujudnya pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi | 01 - Jumlah *event* keagamaan dan budaya yang menumbuh kembangkan sikap toleran yang difasilitasi | 1 | 131 event | 56.277,1 | KEMENTERIAN AGAMA |
| 04.03.04<br>KP: Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama | 01 - Terwujudnya peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan | 01 - Persentase layanan keagamaan yang memenuhi standar pelayanan (persen) | 1 | 70,33 % | 1.923.078,2 | |
| 04.03.04.01<br>PRO-P: Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Keagamaan | 01 - Terwujudnya fasilitasi pelayanan keagamaan | 01 - Jumlah kitab suci dan sarana peribadatan yang difasilitasi (unit) | 1 | 265.000 unit | 750.050,5 | KEMENTERIAN AGAMA |
| 04.03.04.02<br>PRO-P: Peningkatan Pelayanan Bimbingan Perkawinan dan Keluarga | 01 - Terwujudnya pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga | 01 - Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/*sukinah/hittaya sukhaya* (keluarga) | 1 | 1.715.500 keluarga | 25.507,3 | KEMENTERIAN AGAMA |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.04.03<br>PRO-P: Penguatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal | 01 - Terwujudnya penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal | 01 - Persentase produk yang tersertifikasi halal (persen) | 1 | 66 % | 275.289,8 | KEMENTERIAN AGAMA |
| 04.03.04.04<br>PRO-P: Peningkatan Kualitas Penyelenggaran Haji dan Umrah | 01 - Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaran haji dan umrah | 01 - Persentase jemaah haji yang mendapatkan pelayanan haji sesuai standar (persen) | 1 | 86,50 % | 872.230,5 | KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN KESEHATAN |
| | | 02 - Petugas haji profesional (persen) | 1 | 87,55 % | | |
| 04.03.05<br>KP: Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan | 01 - Terwujudnya pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan | 01 - Persentase penggunaan dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan (persen) | 1 | 54 % | 117.098,4 | |
| 04.03.05.01<br>PRO-P: Pemberdayaan Dana Sosial Keagamaan | 01 - Terwujudnya pemberdayaan dana sosial keagamaan | 01 - Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (persen) | 1 | 29,73 % | 32.964,2 | KEMENTERIAN AGAMA |
| 04.03.05.02<br>PRO-P: Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Umat | 01 - Terwujudnya pengembangan kelembagaan ekonomi umat | 01 - Persentase lembaga ekonomi umat berbasis zakat dan wakaf yang mendapat pembinaan (persen) | 1 | 55 % | 57.022,4 | KEMENTERIAN AGAMA |
| 04.03.05.03<br>PRO-P: Pengelolaan Dana Haji secara Profesional, Transparan, dan Akuntabel | 01 - Terwujudnya pengelolaan dana haji secara profesional, transparan, dan akuntabel | 01 - Persentase realisasi pelaksanaan dana operasional haji (persen) | 1 | 98,60 % | 27.111,8 | KEMENTERIAN AGAMA |
| 04.04<br>PP: Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter | 01 - Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif | 01 - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | 1 | 15,00 | 675.692,1 | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.01<br>KP: Peningkatan Budaya Literasi | 01 - Terwujudnya peningkatan budaya literasi | 01 - Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk | 1 | 1:13 | 367.437,7 | |
| | | 02 - Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk | 1 | 1:17.000 | | |
| | | 03 - Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar | 1 | 22,39 % | | |
| 04.04.01.01<br>PRO-P: Pengembangan Budaya Kegemaran Membaca | 01 - Terwujudnya pengembangan budaya kegemaran membaca | 01 - Jumlah peserta yang mengikuti pembudayaan kegemaran membaca dan literasi | 1 | 60.000 orang | 73.728,2 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA |
| 04.04.01.02<br>PRO-P: Pengembangan Sistem Perbukuan dan Penguatan Konten Literasi | 01 - Terwujudnya pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi | 01 - Jumlah SDM perbukuan yang tersertifikasi | 1 | 112 orang | 155.273,0 | PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| 04.04.01.03<br>PRO-P: Peningkatan Akses dan Kualitas Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | 01 - Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial | 01 - Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial | 1 | 1.837 perpustakaan | 138.436,5 | PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN SOSIAL |
| 04.04.02<br>KP: Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Aksara Daerah, serta Sastra | 01 - Terwujudnya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra | 01 - Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya | 1 | 70 % | 125.448,5 | |
| | | 02 - Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya | 1 | 19,67 | | |
| 04.04.02.01<br>PRO-P: Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Internasional | 01 - Terwujudnya peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional | 01 - Jumlah pemelajar BIPA | 1 | 166.045 orang | 30.567,6 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |



SK No 093266 C

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.02.02<br>PRO-P: Pengembangan Pendidikan Sastra di Satuan Pendidikan dan Komunitas | 01 - Terwujudnya pengembangan pendidikan sastra di satuan pendidikan dan komunitas | 01 - Jumlah kosakata bahasa Indonesia | 1 | 182.506 kosakata | 51.409,6 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| | | 02 - Jumlah orang mahir teruji kemahiran berbahasa Indonesia | 1 | 6.552 orang | | |
| 04.04.02.03<br>PRO-P: Revitalisasi Bahasa dan Aksara Daerah sebagai Khazanah Budaya Bangsa | 01 - Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah | 01 - Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah | 1 | 15.405 orang | 43.471,3 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| 04.04.03<br>KP: Pengembangan Budaya Iptek, Inovasi, Kreativitas, dan Daya Cipta | 01 - Terwujudnya pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta | 01 - Jumlah Peserta Program Mobilitas Talenta Riset dan Inovasi | 1 | 10.500 orang | 145.588,3 | |
| 04.04.03.01<br>PRO-P: Peningkatan Budaya Riset dan Eksperimentasi Ilmiah Sejak Usia Dini | 01 - Meningkatnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) | 01 - Jumlah Talenta Muda Riset dan Inovasi yang Dibina | 1 | 9.070 orang | 116.884,8 | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL |
| 04.04.03.02<br>PRO-P: Pengembangan Budaya Produksi dan Kreativitas Berbasis Inovasi | 01 - Terfasilitasinya hasil riset dan inovasi | 01 - Jumlah mitra terfasilitasi | 1 | 3.000 mitra | 28.703,5 | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL |
| 04.04.04<br>KP: Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi dan Inovasi | 01 - Terwujudnya penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi | 01 - Persentase peningkatan perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan | 1 | 4,5 % | 37.217,6 | |
| 04.04.04.01<br>PRO-P: Pengembangan Mitra Perpustakaan (*Library Supporter*) | 01 - Terwujudnya pengembangan mitra perpustakaan (*library supporter*) | 01 - Jumlah perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan | 1 | 781 perpustakaan | 12.217,6 | PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA |



SK No 093267 C

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.04.02<br>PRO-P: Pengembangan Inovasi Sosial yang Didukung dari Pendanaan Filantropi | 01 - Terwujudnya pengembangan inovasi sosial yang didukung dari pendanaan filantropi | 01 - Jumlah Pojok Baca Digital di daerah | 1 | 211 lokasi | 25.000,0 | PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA |

CATATAN:
(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
(2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
(3) Alokasi DAK merupakan pagu alokasi per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2023;
(4) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L, DAK Fisik, dan KPBU pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan;
(5) Dukungan Terhadap Arahan Presiden: 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia; 2. Pembangunan Infrastruktur; 3. Penyederhanaan Regulasi; 4. Penyederhanaan Birokrasi; dan 5. Transformasi Ekonomi.

KETERANGAN:
(a) *multitagging.*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRIORITAS NASIONAL 5 : MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05<br>PN: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | 01 - Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar | 01 - Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau | | 67,88 % | 108.023.551,5 | |
| | | 02 - Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 | | 63 % | | |
| | | 03 - Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif) | | 0,5 % | | |
| | | 04 - Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif) | | 68,50 % | | |
| | 02 - Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar | 01 - Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau | | 2,08 jam/100 km | | |
| | | 02 - Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*) | | 26 % | | |
| | | 03 - Kondisi jalur KA sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2 | | 91,16 % | | |
| | | 04 - Persentase capaian *On Time Performance* (OTP) transportasi udara | | 89 % | | |



SK No 093269 C

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03 - Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan | 01 - Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan | | 6 (berlanjut) kota | | |
| | | 02 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan | | 70,77 % | | |
| | 04 - Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan | 01 - Rasio elektrifikasi | | ~ 100 | | |
| | | 02 - Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik | | 1.336 kWh/kapita | | |
| | | 03 - Penurunan emisi GRK sektor energi | | 116 juta ton | | |
| | 05 - Meningkatnya layanan infrastruktur TIK | 01 - Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) | | 99 % | | |
| 05.01<br>PP: Infrastruktur Pelayanan Dasar | 01 - Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau | 01 - Rasio *outstanding* KPR terhadap PDB | 2 | 3,60 | 47.992.501,6 | |
| | | 02 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita | 2 | 94,63 % | | |
| | | 03 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) | 2 | 86,00 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 04 - Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan | 2 | 64,20 % | | |
| | 02 - Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman | 01 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%) | 2 | 97,55 % | | |
| | | 02 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%) | 2 | 14,22 % | | |
| | | 03 - Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) | 2 | 28,01 % | | |
| | | 04 - Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (%) | 2 | 69,54 % | | |
| | | 05 - Persentase PDAM dengan kinerja sehat | 2 | 91,80 % | | |
| | | 06 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman | 2 | 86,03 akses layak termasuk 13 akses aman % | | |
| | | 07 - Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka | 2 | 1,49 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 08 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan | 2 | 77,64 penanganan; 14,57 pengurangan % | | |
| | 03 - Meningkatnya layanan keselamatan dan keamanan transportasi | 01 - Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan | 2 | 25,50 menit | | |
| | 04 - Meningkatnya layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan | 01 - Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan | 2 | 96 kab/kota | | |
| | 05 - Meningkatnya optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi | 01 - Volume tampungan air per kapita | 2 | 61,98 $m^3$/kapita | | |
| | | 02 - Persentase luas sawah beririgasi | 2 | 43,57 % | | |
| | | 03 - Luas daerah irigasi yang dimodernisasi | 2 | 11.956 ha | | |
| 05.01.01<br>KP: Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau | 01 - Tersedianya akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau | 01 - Jumlah hunian baru layak huni yang terbangun melalui peran pemerintah | 2 | 4.988 unit | 5.859.512,8 | |
| | | 02 - Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan termasuk SMF dan TAPERA | 2 | 20.000 rumah tangga | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 03 - Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) | 2 | 220.000 rumah tangga | | |
| | | 04 - Jumlah peningkatan kualitas hunian melalui peran pemerintah | 2 | 124.750 unit | | |
| | | 05 - Jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu | 2 | 275 ha | | |
| | | 06 - Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan iklim kondusif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan | 2 | 48 kab/kota | | |
| | | 07 - Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan | 2 | 48 kab/kota | | |
| 05.01.01.01 PRO-P: Peningkatan Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru | 01 - Terlaksananya peningkatan fasilitasi penyediaan hunian baru | 01 - Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui fasilitasi pemerintah | 2 | 4.988 unit | 2.056.465,7 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DAK |
| 05.01.01.02 PRO-P: Peningkatan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan | 01 - Terlaksananya peningkatan fasilitasi pembiayaan perumahan | 01 - Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) | 2 | 220.000 rumah tangga | 12.500,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |



SK No 093273 C

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02 - Jumlah rumah tangga yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan | 2 | 20.000 rumah tangga | | |
| 05.01.01.03<br>PRO-P: Pengembangan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah | 01 - Terlaksananya pengembangan fasilitasi peningkatan kualitas rumah | 01 - Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas | 2 | 124.750 rumah tangga | 3.184.824,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DAK (Terintegrasi dengan PSN) |
| 05.01.01.04<br>PRO-P: Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman | 01 - Terlaksananya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman | 01 - Jumlah rumah yang dilayani bantuan PSU pada perumahan termasuk PSU kawasan skala besar | 2 | 27.825 unit | 369.790,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 05.01.01.05<br>PRO-P: Fasilitasi Peningkatan Standar Keandalan Bangunan dan Keamanan Bermukim (IMB dan SLF) | 01 - Terlaksananya fasilitasi peningkatan standar keandalan bangunan dan keamanan bermukim (IMB dan SLF) | 01 - Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | 2 | 48 kab/kota | 51.431,6 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| 05.01.01.06<br>PRO-P: Fasilitasi Penanganan Permukiman Kumuh | 01 - Terlaksananya fasilitasi penanganan permukiman kumuh | 01 - Jumlah luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu | 2 | 275 ha | 184.501,5 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DAK (Terintegrasi dengan PSN) |
| 05.01.02<br>KP: Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman | 01 - Tersedianya akses air minum dan sanitasi layak dan aman | 01 - Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan | 2 | 19.185.621 sambungan rumah | 11.223.177,0 | |
| | | 02 - Jumlah rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan | 2 | 47.631.849 rumah tangga | | |
| | | 03 - Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman | 2 | 9.740.076 rumah tangga | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 04 - Persentase PDAM dengan kinerja sehat | 2 | 91,8 % | | |
| | | 05 - Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala kota/regional (SR) | 2 | 62.352 sambungan rumah | | |
| | | 06 - Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman (SR) | 2 | 284.145 sambungan rumah | | |
| | | 07 - Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT (RT) | 2 | 1.730.314 rumah tangga | | |
| | | 08 - Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar *sanitary landfill* (RT) | 2 | 4.470.423 rumah tangga | | |
| | | 09 - Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT) | 2 | 376.144 rumah tangga | | |
| | | 10 - Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST (RT) | 2 | 473.562 rumah tangga | | |
| | | 11 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan air limbah, termasuk layanan lumpur tinja (Kab/Kota) | 2 | 88 kab/kota | | |
| | | 12 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan sampah domestik (Kab/Kota) | 2 | 84 kab/kota | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13 - Persentase angka BABS di tempat terbuka (%) | 2 | 1,49 % | | |
| 05.01.02.01<br>PRO-P: Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman | 01 - Terlaksananya pengembangan sistem penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak dan aman | 01 - Jumlah pengembangan kapasitas SPAM regional | 2 | 2.030 liter/detik | 10.971.325,9 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU), DAK<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| | | 02 - Jumlah pembangunan dan peningkatan kapasitas SPAM | 2 | 10.104 liter/detik | | |
| | | 03 - Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan perluasan SPAM | 2 | 721.779 sambungan rumah | | |
| | | 04 - Persentase *Non-Revenue Water* (NRW) PDAM | 2 | 27 % | | |
| | | 05 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pembangunan baru dan perluasan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala kota/regional (kab/kota) | 2 | 28 kab/kota | | |
| | | 06 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pembangunan baru dan perluasan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman (kab/kota) | 2 | 168 kab/kota | | |
| | | 07 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pembangunan baru dan rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (kab/kota) | 2 | 113 kab/kota | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 08 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki pembangunan TPA baru (kab/kota) | 2 | 74 kab/kota | | |
| | | 09 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TPS3R (kab/kota) | 2 | 116 kab/kota | | |
| | | 10 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki TPST (kab/kota) | 2 | 37 kab/kota | | |
| 05.01.02.02<br>PRO-P: Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman | 01 - Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak dan aman | 01 - Persentase PDAM yang memiliki *business plan* menuju akses 100% aman yang berlaku hingga tahun 2024 | 2 | 65 % | 250.921,1 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | | 02 - Persentase PDAM dengan tarif *Full Cost Recovery* | 2 | 88 % | | |
| | | 03 - Persentase pengelola/operator air minum berkinerja sehat (PDAM,UPTD, KPSPAMS dll) | 2 | 80 % | | |
| | | 04 - Jumlah provinsi yang terfasilitasi pendampingan implementasi dokumen strategi sanitasi kabupaten/kota | 2 | 33 provinsi | | |
| | | 05 - Jumlah provinsi yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sampah dan air limbah domestik | 2 | 33 provinsi | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 06 - Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) | 2 | 85 % | | |
| 05.01.02.03<br>PRO-P: Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman | 01 - Terlaksananya pengaturan penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak dan aman | 01 - Jumlah provinsi yang terfasilitasi penyiapan pengaturan bidang sanitasi | 2 | 34 provinsi | 680,0 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | | 02 - Jumlah NSPK terkait sanitasi yang tersusun | 2 | 4 NSPK | | |
| | | 03 - Jumlah NSPK terkait air minum yang tersusun | 2 | 3 NSPK | | |
| | | 04 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Jakstrada air minum | 2 | 102 kab/kota | | |
| | | 05 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki RISPAM | 2 | 102 kab/kota | | |
| 05.01.02.04<br>PRO-P: Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi | 01 - Terlaksananya pengawasan kualitas air minum dan sanitasi | 01 - Jumlah kabupaten/kota dengan penyelenggara SPAM yang memiliki dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) | 2 | 102 kab/kota | 250,0 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | | 02 - Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pengawasan kualitas air minum | 2 | 514 kab/kota | | |
| | | 03 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki *effluent* IPAL, IPLT, dan *leachate* TPA yang memenuhi syarat | 2 | 60 kab/kota | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.03<br>KP: Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan | 01 - Terkelolanya air tanah dan air baku berkelanjutan | 01 - Jumlah debit air baku untuk kebutuhan domestik, industri, dan kawasan unggulan | 2 | 43,06 $m^3$/detik | 1.531.304,6 | |
| 05.01.03.01<br>PRO-P: Penyediaan dan Pengamanan Air Baku dan Air Tanah | 01 - Terlaksananya penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah | 01 - Tambahan debit air baku | 2 | 2,6 $m^3$/detik | 1.530.604,6 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 05.01.03.02<br>PRO-P: Penataan Regulasi serta Perkuatan Kelembagaan SDA | 01 - Terlaksananya penataan regulasi serta perkuatan kelembagaan SDA | 01 - Jumlah dokumen kebijakan PSDA terpadu pada wilayah sungai kewenangan pusat yang disusun dan/atau diperbaharui | 2 | 36 rekomendasi kebijakan | 700,0 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | | 02 - Provinsi yang mengalami penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air | 2 | 24 Daerah | | |
| 05.01.04<br>KP: Keselamatan dan Keamanan Transportasi | 01 - Terlaksananya pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi & SAR | 01 - Rasio kejadian kecelakaan pelayaran laut per 10.000 pelayaran | 1 | 0,97 | 3.101.871,5 | |
| | | 02 - Rasio kejadian kecelakaan penerbangan per 1 juta penerbangan | 2 | 2,15 | | |
| | | 03 - Rasio kejadian kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan KA | 2 | 0,23 | | |
| | | 04 - Rasio kejadian kecelakaan transportasi SDP per 10.000 Pelayaran | 2 | 0,08 | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.04.01<br>PRO-P: Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi dan SAR | 01 - Terciptanya keselamatan dan keamanan transportasi | 01 - Jumlah peralatan SAR yang disediakan | 2 | 341 unit | 2.850.257,9 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, BADAN SAR NASIONAL<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| | | 02 - Jumlah fasilitas keselamatan jalan yang dibangun | 2 | 33 Provinsi | | |
| | | 03 - Jumlah UPPKB yang dibangun dan ditingkatkan | 2 | 8 unit | | |
| | | 04 - Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Keselamatan Pelayaran | 2 | 8 unit | | |
| | | 05 - Jumlah kapal negara KPLP yang dibangun | 2 | 10 unit | | |
| | | 06 - Jumlah Sarana, prasarana dan sistem navigasi pendukung keselamatan penerbangan | 2 | 3 Lokasi | | |
| 05.01.04.02<br>PRO-P: Pembinaan dan Pendidikan SDM Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Pencarian, dan Pertolongan | 01 - Terlaksananya pembinaan dan pendidikan SDM keselamatan dan keamanan transportasi, pencarian, dan pertolongan | 01 - Jumlah SDM pencarian dan pertolongan yang berkompeten | 1 | 3.000 orang | 251.613,6 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, BADAN SAR NASIONAL |
| | | 02 - Jumlah Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan *Safety* and *Security* SDM Transportasi | 1 | 93.412 orang | | |
| | 02 - Terlaksananya Promosi Keselamatan Jalan Nasional | 01 - Promosi Keselamatan Jalan Nasional | 1 | 34 promosi | | |
| | 03 - Terlaksananya penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | 01 - Jumlah daerah yang menyusun Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | 1 | 8 Daerah (Prov/Kab/Kota) | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.05<br>KP: Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur | 01 - Terwujudnya ketahanan kebencanaan infrastruktur | 01 - Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir di WS Kewenangan Pusat | 2 | 61,85 % | 9.512.606,4 | |
| 05.01.05.01<br>PRO-P: Pengembangan Kebijakan Wilayah untuk Ketahanan Bencana dan Penguatan Infrastruktur Vital Tahan Bencana | 01 - Terlaksananya pengembangan kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguatan infrastruktur vital tahan bencana | 01 - Jumlah wilayah sungai yang menetapkan peta risiko dan rencana induk peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana hidrometeorologi dan hidrogeologi | 2 | 8 wilayah sungai | 1.000,0 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | | 02 - Provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan | 2 | 34 Daerah | | |
| 05.01.05.02<br>PRO-P: Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Ketahanan Bencana | 01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ketahanan bencana | 01 - Jumlah wilayah sungai dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pencegahan banjir | 2 | 9 wilayah sungai | 9.054.582,9 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU)<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| | | 02 - Jumlah provinsi dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengendali bencana lumpur dan sedimen | 2 | 3 provinsi | | |
| | | 03 - Jumlah kawasan pesisir dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur ketahanan bencana wilayah pesisir | 2 | 17 kawasan pesisir | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.05.03<br>PRO-P: Penyediaan Sistem Terpadu Peringatan Dini dan Tanggap Darurat Bencana | 01 - Terlaksananya penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana | 01 - Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah dan kegiatan pemantauan penurunan tanah | 2 | 5 kab/kota | 10.207,7 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | 02 - Jumlah cekungan air tanah dengan pemantauan penggunaan air tanah | 2 | 15 CAT | | |
| | | 03 - Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan peringatan dini bencana banjir | 2 | 2 wilayah sungai | | |
| | | 04 - Jumlah kegiatan tanggap darurat akibat bencana | 2 | 55 kegiatan | | |
| 05.01.05.04<br>PRO-P: Restorasi dan Konservasi Infrastruktur Alami | 01 - Terlaksananya restorasi dan konservasi infrastruktur alami | 01 - Jumlah danau/situ yang direstorasi dan dikonservasi | 2 | 7 unit | 446.815,9 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 05.01.06<br>KP: Waduk *Multipurpose* dan Modernisasi Irigasi | 01 - Terbangunnya waduk *multipurpose* dan modernisasi irigasi | 01 - Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air | 2 | 17,45 miliar $m^3$ | 16.764.029,2 | |
| | | 02 - Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan penurunan indeks risiko | 2 | 66 unit | | |
| | | 03 - Jumlah daerah irigasi yang melakukan modernisasi | 2 | 2 daerah irigasi | | |
| | | 04 - Luas lahan beririgasi untuk komoditas padi dan nonpadi | 2 | 6.900 ha | | |



SK No 093282 C

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.06.01<br>PRO-P: Perencanaan Pengembangan Bendungan Multiguna dan Pemanfaatan Tampungan Alami | 01 - Terlaksananya perencanaan pengembangan bendungan multiguna dan pemanfaatan tampungan alami | 01 - Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bendungan baru multiguna dan pemanfaatan tampungan alami | 2 | 4 dokumen | 23.343,3 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 05.01.06.02<br>PRO-P: Pembangunan dan Rehabilitasi Bendungan | 01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi bendungan | 01 - Jumlah bendungan multiguna yang selesai dibangun | 2 | 13 unit | 12.553.482,7 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 05.01.06.03<br>PRO-P: Optimalisasi dan Pemanfaatan Tampungan | 01 - Terlaksananya optimalisasi dan pemanfaatan tampungan | 01 - Jumlah bendungan yang dimanfaatkan sesuai fungsi rencananya | 2 | 16 unit | 1.073.294,3 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| | | 02 - Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA | 2 | 43,05 MW | | |
| 05.01.06.05<br>PRO-P: Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi | 01 - Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi | 01 - Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun | 2 | 6.900 ha | 759.298,5 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| | | 02 - Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi | 2 | 98.700 ha | | |
| 05.01.06.06<br>PRO-P: Peningkatan Pengelolaan Alokasi Air dan Kapasitas Kelembagaan Irigasi | 01 - Terlaksananya peningkatan pengelolaan alokasi air dan kapasitas kelembagaan irigasi | 01 - Jumlah daerah irigasi yang melakukan modernisasi | 2 | 2 dokumen | 2.354.610,4 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 05.02<br>PP: Infrastruktur Ekonomi | 01 - Meningkatnya konektivitas wilayah | 01 - Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota | 2 | 93/73/63 % | 37.120.555,4 | |
| | | 02 - Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi | 2 | 415 km | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 03 - Panjang jalan baru yang terbangun | 2 | 490 km | | |
| | | 04 - Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) | 2 | 6.724 km | | |
| | | 05 - Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar | 2 | 4 (berlanjut) lokasi | | |
| | | 06 - Jumlah rute subsidi tol laut | 2 | 35 rute | | |
| | | 07 - Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun | 2 | 4 (4 berlanjut) lokasi | | |
| | | 08 - Jumlah bandara baru yang dibangun (kumulatif) | 2 | 12 (berlanjut) lokasi | | |
| | | 09 - Jumlah rute jembatan udara | 2 | 41 rute | | |
| 05.02.01<br>KP: Konektivitas Jalan | 01 - Terwujudnya konektivitas jalan | 01 - Jumlah lokasi jalan tol baru yang terbangun dan/atau disiapkan | 2 | 7 lokasi | 25.360.537,3 | |
| | | 02 - Panjang Jalan Prioritas Nasional yang dibangun | 2 | 482,93 km | | |
| | | 03 - Panjang Jembatan Prioritas Nasional yang dibangun | 2 | 7418,99 m | | |
| 05.02.01.01<br>PRO-P: Pembangunan Jalan Strategis | 01 - Terlaksananya pembangunan jalan strategis | 01 - Panjang jalan lintas utama pulau dibangun | 2 | 338,75 km | 4.900.927,8 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| | | 02 - Panjang jembatan lintas utama pulau dibangun | 2 | 3.276,45 m | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.01.02<br>PRO-P: Pembangunan Jalan Tol | 01 - Terlaksananya pembangunan jalan tol | 01 - Panjang jalan tol yang ditangani dengan APBN | 2 | 6,5 km | 1.008.869,1 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 05.02.01.03<br>PRO-P: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Prioritas (KI, KEK, *Food Estate* dan KSPN) | 01 - Terlaksananya pembangunan jalan mendukung kawasan prioritas (KI, KEK, *Food Estate* dan KSPN) | 01 - Panjang jalan dan jembatan mendukung kawasan prioritas (KI, KEK, KSPN dan IKN) yang ditangani | 2 | 84,8 km | 8.365.947,5 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 05.02.01.04<br>PRO-P: Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (Pelabuhan, Bandara, dan Terminal) | 01 - Terlaksananya pembangunan jalan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara, dan terminal) yang dibangun | 01 - Panjang jalan dan jembatan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal) yang dibangun | 2 | 48,14 km | 346.920,3 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 05.02.01.05<br>PRO-P: Preservasi Jalan Nasional (termasuk Peningkatan/Pelebaran) | 01 - Terlaksananya preservasi jalan nasional (termasuk peningkatan/pelebaran) | 01 - Panjang jalan nasional yang di preservasi (termasuk peningkatan/pelebaran) | 2 | 19.644,26 km | 10.737.872,5 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 05.02.02<br>KP: Konektivitas Kereta Api | 01 - Terwujudnya konektivitas kereta api | 01 - Panjang jalur kereta api yang dibangun (termasuk jalur ganda dan reaktivasi) | 2 | 50 (berlanjut) km | 4.093.061,0 | |
| | | 02 - Panjang jalur kereta api yang ditingkatkan | 2 | 344 (berlanjut) km | | |
| 05.02.02.01<br>PRO-P: Pembangunan Jalur Kereta Api Antarkota | 01 - Terlaksananya pembangunan jalur kereta api antarkota | 01 - Jumlah kegiatan pembangunan prasarana kereta api | 2 | 8 lokasi | 2.034.794,1 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN<br>(Terintegrasi dengan PSN) |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.02.02<br>PRO-P: Peningkatan, Pemeliharaan, Perawatan, dan Pengoperasian Jaringan Prasarana Kereta Api | 01 - Terlaksananya peningkatan, pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian jaringan prasarana kereta api | 01 - Jumlah kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian jaringan prasarana kereta api | 2 | 12 lokasi | 1.813.958,4 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| | | 02 - Pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian jaringan prasarana Kereta Api (IMO) | 2 | 1 paket | | |
| 05.02.02.03<br>PRO-P: Pembangunan KA Akses Pelabuhan dan Bandara | 01 - Terlaksananya penanganan kereta api akses Pelabuhan/Bandara | 01 - Jumlah penanganan kereta api akses simpul transportasi | 2 | 2 lokasi | 68.370,4 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| 05.02.02.04<br>PRO-P: Penyediaan PSO dan Subsidi | 01 - Terlaksananya penyediaan PSO dan Subsidi | 01 - Jumlah layanan subsidi perkeretaapian yang tersedia | 2 | 7 layanan | 175.938,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| | | 02 - Tersedianya dana PSO perkeretaapian | 2 | 1 paket (APBN non-Kemenhub) | | |
| 05.02.03<br>KP: Konektivitas Laut | 01 - Terwujudnya konektivitas laut | 01 - Jumlah lokasi pengembangan/pembangunan pelabuhan pendukung konektivitas laut | 2 | 26 lokasi | 2.968.267,0 | |
| | | 02 - Jumlah layanan subsidi Tol Laut, perintis angkutan laut, dan angkutan ternak yang tetap dan teratur | 2 | 158 rute | | |
| 05.02.03.01<br>PRO-P: Pengembangan Pelabuhan Utama (*Hub*) | 01 - Terlaksananya pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut utama | 01 - Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan | 2 | 1 lokasi | 133.057,7 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN) |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.03.02<br>PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut | 01 - Terlaksananya pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut | 01 - Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan | 2 | 20 lokasi | 1.150.267,3 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| 05.02.03.03<br>PRO-P: Pelabuhan Mendukung Kawasan Strategis Prioritas Nasional | 01 - Pelabuhan mendukung kawasan strategis prioritas nasional | 01 - Jumlah Pelabuhan Pendukung Kawasan Strategis Prioritas Nasional | 2 | 5 lokasi | 258.191,4 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| 05.02.03.04<br>PRO-P: Penyelenggaraan Layanan Subsidi Tol Laut dan Perintis Angkutan Laut | 01 - Terlaksananya Penyelenggaraan layanan subsidi Tol Laut dan perintis angkutan laut | 01 - Jumlah layanan angkutan tol laut tetap dan teratur | 2 | 35 rute | 1.426.750,6 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| | | 02 - Jumlah layanan angkutan laut perintis | 2 | 117 rute | | |
| | | 03 - Jumlah layanan angkutan ternak | 2 | 6 rute | | |
| 05.02.04<br>KP: Konektivitas Udara | 01 - Terwujudnya konektivitas udara | 01 - Jumlah layanan angkutan udara dan Angkutan BBM untuk Kargo Perintis | 2 | 41 rute | 3.155.573,7 | |
| | | 02 - Jumlah bandara yang dibangun dan dikembangkan | 2 | 45 lokasi | | |
| | | 03 - Jumlah layanan angkutan udara perintis | 2 | 220 layanan | | |
| 05.02.04.01<br>PRO-P: Jembatan Udara | 01 - Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan | 01 - Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan | 2 | 7 lokasi | 347.540,8 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| | | 02 - Jumlah layanan kargo perintis mendukung jembatan udara | 2 | 41 rute | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.04.02<br>PRO-P: Pembangunan Bandara Baru | 01 - Terlaksananya pembangunan bandara baru | 01 - Jumlah bandara yang dibangun | 2 | 7 lokasi | 1.117.332,9 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| 05.02.04.03<br>PRO-P: Pengembangan Bandara *Hub* Primer | 01 - Terlaksananya pengembangan bandara *hub* primer | 01 - Jumlah bandara *hub* primer yang direhabilitasi/dikembangkan | 2 | 31 lokasi | 1.283.525,8 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| 05.02.04.04<br>PRO-P: Pembangunan Bandara Perairan (*Waterbased Airport*) untuk Mendukung Destinasi Pariwisata | 01 - Terlaksananya penyusunan kajian penyiapan pembangunan perairan (*waterbased airport*) untuk mendukung destinasi pariwisata | 01 - Jumlah kajian penyiapan bandara perairan | 2 | 1 lokasi | 4.950,6 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| 05.02.04.05<br>PRO-P: Layanan Subsidi Angkutan Udara | 01 - Terlaksananya layanan angkutan udara perintis | 01 - Jumlah layanan angkutan udara perintis | 2 | 220 layanan | 402.223,4 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| | | 02 - Angkutan BBM angkutan udara perintis | 2 | 7.183 layanan | | |
| 05.02.05<br>KP: Konektivitas Darat | 01 - Terwujudnya konektivitas darat | 01 - Jumlah pelabuhan penyeberangan, danau dan sungai yang dibangun dan dikembangkan | 2 | 23 lokasi | 1.543.116,5 | |
| | | 02 - Jumlah terminal penumpang dan barang antarnegara serta terminal tipe A yang dibangun | 2 | 14 lokasi | | |
| | | 03 - Jumlah layanan perintis angkutan jalan | 2 | 328 layanan | | |
| | | 04 - Jumlah layanan perintis angkutan penyeberangan | 2 | 274 layanan | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.05.01<br>PRO-P: Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru | 01 - Terlaksananya pembangunan pelabuhan penyeberangan baru | 01 - Jumlah pelabuhan penyeberangan, danau dan sungai pada jalur logistik yang dibangun | 2 | 12 (berlanjut) lokasi | 271.659,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| 05.02.05.02<br>PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Angkutan Sungai Danau | 01 - Terlaksananya Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Angkutan Sungai Danau | 01 - Pelabuhan angkutan sungai danau yang dibangun/dikembangkan | 2 | 11 (berlanjut) lokasi | 248.271,3 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| 05.02.05.03<br>PRO-P: Pembangunan Terminal Penumpang dan Barang Antarnegara | 01 - Terlaksananya pembangunan terminal penumpang dan barang antarnegara | 01 - Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan | 2 | 1 (berlanjut) lokasi | 25.000,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| 05.02.05.05<br>PRO-P: Penyediaan Layanan Perintis Angkutan Darat untuk Penumpang dan Barang | 01 - Terlaksananya penyediaan layanan perintis angkutan darat untuk penumpang dan barang | 01 - Jumlah trayek perintis angkutan penyeberangan yang dilayani | 2 | 274 layanan | 813.440,4 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| | | 02 - Jumlah trayek perintis angkutan jalan yang dilayani | 2 | 328 layanan | | |
| | | 03 - Jumlah trayek angkutan multimoda yang dilayani | 2 | 10 layanan | | |
| | | 04 - Jumlah trayek angkutan barang yang dilayani | 2 | 6 layanan | | |
| 05.02.05.06<br>PRO-P: Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A | 01 - Terlaksananya peningkatan/revitalisasi terminal penumpang Tipe A | 01 - Jumlah terminal penumpang Tipe A yang ditingkatkan/direvitalisasi | 2 | 13 lokasi | 184.745,7 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03<br>PP: Infrastruktur Perkotaan | 01 - Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan | 01 - Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang kereta api/*flyover*/*underpass* (kota) | 2 | 7 (berlanjut) lokasi | 2.617.004,2 | |
| | | 02 - Jumlah sistem angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya yang dikembangkan (kota) | 2 | 6 (berlanjut) kota | | |
| | | 03 - Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota | 2 | 6 kawasan | | |
| 05.03.01<br>KP: Transportasi Perkotaan | 01 - Terwujudnya layanan angkutan umum massal perkotaan | 01 - Jumlah angkutan massal berbasis rel yang dibangun/dikembangkan (kota) | 2 | 4 Kota | 2.556.342,4 | |
| | | 02 - Jumlah angkutan umum perkotaan berbasis jalan yang dibangun/dikembangkan (kota) | 2 | 10 Kota | | |
| 05.03.01.01<br>PRO-P: Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Semarang) | 01 - Terwujudnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan | 01 - Jumlah kota yang dibangun/dikembangkan angkutan massal berbasis rel | 2 | 4 kota | 1.995.842,6 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| | | 02 - Jumlah kota yang dibangun/dikembangkan angkutan massal berbasis jalan | 2 | 2 kota | | |
| | | 03 - Jumlah pengadaan dan pemasangan ATCS dan ITS | 2 | 63 paket | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.01.03<br>PRO-P: Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Perkotaan Besar Lainnya | 01 - Terwujudnya layanan angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya | 01 - Jumlah sistem angkutan umum massal yang dikembangkan di perkotaan lainnya | 2 | 2 kota | 11.735,6 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| 05.03.01.04<br>PRO-P: Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang antara Jalan dan KA di Perkotaan | 01 - Terlaksananya pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan | 01 - Jumlah perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan yang dibangun | 2 | 3 lokasi | 0,0[a] | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 05.03.01.05<br>PRO-P: Pembangunan Jalan Perkotaan | 01 - Terlaksananya pembangunan jalan perkotaan | 01 - Panjang jalan perkotaan yang ditangani (termasuk jalan lingkar) | 2 | 5,18 km | 0,0[a] | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | | 02 - Jumlah lokasi *flyover/underpass* di perkotaan yang dibangun | 2 | 1 lokasi | | |
| 05.03.01.06<br>PRO-P: Penyediaan Subsidi Angkutan Umum Massal Perkotaan | 01 - Terselenggaranya penyediaan subsidi angkutan umum massal perkotaan | 01 - Subsidi angkutan umum massal perkotaan | 2 | 12 Layanan | 548.764,1 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| 05.03.02<br>KP: Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan | 01 - Terbangunnya infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan | 01 - Persentase rumah tangga terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar terhadap total rumah tangga | 2 | 25,4 % (kumulatif) | 34.573,8 | |
| 05.03.02.01<br>PRO-P: Pengembangan TIK Perkotaan | 01 - Terlaksananya pengembangan TIK perkotaan | 01 - Jumlah rumah tangga terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar | 2 | 16.000.000 rumah tangga (kumulatif) | 34.573,8 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02 - Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan dalam penyusunan masterplan *smart city* | 5 | 150 kab/kota (kumulatif) | | |
| 05.03.03<br>KP: Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan | 01 - Terlaksananya penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan | 01 - Jumlah kawasan perkotaan prioritas dengan penyediaan dan penyelenggaraan akses air minum dan air limbah yang aman dan andal | 2 | 7 kab/kota | 0,0[a] | |
| 05.03.03.01<br>PRO-P: Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Andal dan Terintegrasi | 01 - Terlaksananya penyediaan dan penyelenggaraan air minum dan sanitasi yang handal dan terintegrasi | 01 - Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) | 2 | 7 BUMD air minum | 0,0[a] | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | | 02 - Jumlah PDAM yang menerapkan *Smart Grid Water Management* | 2 | 3 BUMD air minum | | |
| 05.03.04<br>KP: Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan | 01 - Terlaksananya Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan | 01 - Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan | 2 | 1 kawasan | 26.088,0 | |
| 05.03.04.01<br>PRO-P: Fasilitasi Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan | 01 - Terlaksananya Fasilitasi Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan | 01 - Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota | 2 | 1 kawasan | 26.088,0 | DAK, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 05.04<br>PP: Energi dan Ketenagalistrikan | 01 - Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien | 01 - Jumlah produksi tenaga listrik | 2 | 406.325 GWh | 1.410.536,1 | |
| | | 02 - Penurunan emisi CO2 pembangkit | 2 | 5,91 juta ton | | |
| | | 03 - Jumlah pengguna listrik | 2 | 83.219 ribu rumah tangga-kumulatif | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 04 - Jumlah sambungan rumah jaringan gas kota | 2 | 1.688.874 kumulatif, sambungan rumah | | |
| | | 05 - Jumlah kapasitas kilang minyak-kumulatif | 2 | 1.176.000 *Barrel* per *Calendar Day*/BPCD | | |
| 05.04.01<br>KP: Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan | 01 - Terlaksananya keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan | 01 - Susut jaringan | 2 | 8,78 % | 73.765,6 | |
| | | 02 - Porsi kapasitas terpasang pembangkit EBT terhadap total pembangkit | 2 | 17 % | | |
| 05.04.01.01<br>PRO-P: Perbaikan Efisiensi dan Emisi Energi dan Ketenagalistrikan | 01 - Terlaksananya perbaikan efisiensi dan emisi energi dan ketenagalistrikan | 01 - Kapasitas terpasang EBT tambahan | 2 | 2.099 MW | 73.765,6 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | 02 - Jumlah penambahan sistem transmisi | 2 | 3.519,50/3.900 kms/MVA | | |
| | | 03 - Jumlah penambahan sistem distribusi | 2 | 43.065/3.206 kms/MVA | | |
| 05.04.02<br>KP: Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan | 01 - Meningkatnya akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan | 01 - Penambahan pelanggan baru | 2 | 2.002 ribu pelanggan | 1.323.206,2 | |
| | | 02 - Jumlah penyediaan gas | 2 | 204.680 Setara Barel Minyak (SBM) | | |
| 05.04.02.02<br>PRO-P: Perluasan Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan | 01 - Terlaksananya perluasan akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan | 01 - Jumlah penambahan sistem distribusi | 2 | 43.065/3.206 kms/MVA | 1.323.206,2 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| | | 02 - Jumlah penambahan penyalur BBM satu harga | 2 | 89 penyalur | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 03 - Tahapan pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon - Semarang | 2 | 1 ruas | | |
| 05.04.03<br>KP: Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik | 01 - Tersedianya pasokan energi dan tenaga listrik yang cukup | 01 - Jumlah cadangan operasional BBM | 2 | 23 hari | 13.564,3 | |
| | | 02 - *System Average Interruption Duration Index* (SAIDI) | 2 | 3 jam/pelanggan/tahun | | |
| | 02 - Terlaksananya pembangunan pipa gas bumi | 01 - Panjang ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi yang difasilitasi (kumulatif) | 2 | 19.800 km | | |
| 05.04.03.01<br>PRO-P: Peningkatan Keandalan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan | 01 - Terlaksananya peningkatan keandalan infrastruktur energi | 01 - Jumlah rekomendasi keprospekan migas | 2 | 4 rekomendasi kebijakan | 13.217,6 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | 02 - Terlaksananya peningkatan keandalan infrastruktur ketenagalistrikan | 01 - Jumlah penambahan kapasitas pembangkit | 2 | 6.209 MW | | |
| | | 02 - Jumlah penambahan sistem transmisi | 2 | 3.519,50/3.900 kms/MVA | | |
| 05.04.03.02<br>PRO-P: Pembangunan Kilang Minyak Bumi | 01 - Terlaksananya pembangunan kilang minyak bumi | 01 - Jumlah peningkatan infrastruktur kilang minyak bumi (kumulatif) | 2 | 1.176 ribu BOPD | 346,7 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 05.05<br>PP: Transformasi Digital | 01 - Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi | 01 - Persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK (%) | 1, 2, 5 | 8,80 % | 18.882.954,3 | |
| | | 02 - Persentase pengguna internet | 2 | 80,70 % | | |
| | | 03 - Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam | 2 | 74 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.01<br>KP: Penuntasan Infrastruktur TIK | 01 - Terlaksananya penuntasan infrastruktur TIK | 01 - Persentase desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan *mobile broadband* | 2 | 99,5 % (kumulatif) | 15.395.158,1 | |
| | | 02 - Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik | 2 | 60 % (kumulatif) | | |
| | | 03 - Persentase rasio harga layanan *fixed broadband* terhadap pendapatan per kapita (pada kecepatan up to 30 Mbps) | 5 | 8 % | | |
| | | 04 - Persentase rasio harga layanan *mobile broadband* terhadap pendapatan per kapita (dilihat dari rata-rata kuota 1 GB) | 5 | 0,3 % | | |
| | | 05 - Persentase populasi yang terlayani penyiaran radio publik | 2 | 94 % | | |
| | | 06 - Persentase jangkauan populasi penyiaran TV digital | 2, 5 | 75 % | | |
| 05.05.01.01<br>PRO-P: Pengembangan Infrastruktur Pitalebar | 01 - Terlaksananya pengembangan infrastruktur pitalebar | 01 - Jumlah desa di wilayah 3T yang mendapatkan akses seluler 4G | 2 | 6.764 desa (kumulatif) | 12.464.736,7 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (KPBU), KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 05.05.01.02<br>PRO-P: Pengembangan Infrastruktur Penyiaran | 01 - Terlaksananya pengembangan infrastruktur penyiaran | 01 - Jumlah infrastruktur digital *broadcasting system* | 2 | 45 unit | 1.633.304,8 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.01.03<br>PRO-P: Pengembangan Infrastruktur TIK Pemerintahan | 01 - Terlaksananya pengembangan infrastruktur TIK pemerintahan | 01 - Persentase K/L yang menggunakan/terhubung Jaringan Intra Pemerintah (JIP/*Governemnt Network*) | 2 | 50 % | 1.297.116,6 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN KESEHATAN |
| 05.05.02<br>KP: Pemanfaatan Infrastruktur TIK | 01 - Terwujudnya pemanfaatan infrastruktur TIK | 01 - Persentase kontribusi sektor TIK terhadap PDB | 5 | 4,5–5,7 % | 1.790.585,0 | |
| | | 02 - Persentase K/L/D yang memanfaatkan *cloud* pemerintah (kumulatif) | 5 | 35 % | | |
| 05.05.02.01<br>PRO-P: Pemanfaatan TIK Layanan Pemerintah | 01 - Terlaksananya pemanfaatan TIK layanan pemerintah | 01 - Jumlah aplikasi generik yang dikembangkan secara multi platform | 5 | 35 Aplikasi (kumulatif) | 258.972,5 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI, ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, KEMENTERIAN KESEHATAN, BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT), KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| 05.05.02.02<br>PRO-P: Pemanfaatan TIK Layanan Masyarakat dan Dunia Usaha | 01 - Terlaksananya pemanfaatan TIK layanan masyarakat dan dunia usaha | 01 - Jumlah *start-up* aktif yang terbentuk | 5 | 35 *start-up* | 1.531.612,5 | KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (Terintegrasi dengan PSN) |
| 05.05.03 KP: Fasilitas Pendukung Transformasi Digital | 01 - Tersedianya fasilitas pendukung transformasi digital | 01 - Jumlah peserta pelatihan digital skill untuk menuju ekonomi digital | 1 | 15.700 peserta | 1.697.211,2 | |
| 05.05.03.01 PRO-P: Pengelolaan Informasi secara Aman dan Terintegrasi | 01 - Terlaksananya pengelolaan informasi secara aman dan terintegrasi | 01 - Jumlah konten negatif yang diblokir | 1, 5 | 210.000 konten negatif | 266.804,4 | BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BADAN INTELIJEN NEGARA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
| 05.05.03.02 PRO-P: Pengembangan Literasi dan Keahlian TIK | 01 - Terlaksananya pengembangan literasi dan keahlian TIK | 01 - Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital | 1 | 5.000.000 orang | 826.239,2 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.03.03<br>PRO-P: Pengembangan dan Fasilitasi Industri TIK | 01 - Terlaksananya pengembangan dan fasilitasi industri TIK | 01 - Persentase pengembangan laboratorium BBPPT sebagai pusat TIK | 1 | 80 % | 604.167,7 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

CATATAN:
(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
(2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
(3) Alokasi DAK merupakan pagu alokasi per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2023;
(4) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L, DAK Fisik, dan KPBU pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan;
(5) Dukungan Terhadap Arahan Presiden: 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia; 2. Pembangunan Infrastruktur; 3. Penyederhanaan Regulasi; 4. Penyederhanaan Birokrasi; dan 5. Transformasi Ekonomi.

KETERANGAN:
(a) *multitagging.*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRIORITAS NASIONAL 6 : MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06<br>PN: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim | 01 - Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 01 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | | 69,48 | 8.886.639,1 | |
| | 02 - Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim | 01 - Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB | | 1,10 % | | |
| | 03 - Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap *baseline* | 01 - Persentase penurunan emisi GRK - kumulatif | | 27,02 % | | |
| | | 02 - Persentase penurunan emisi GRK - tahunan | | 26,80 % | | |
| | | 03 - Persentase penurunan intensitas emisi GRK | | 29,70 % | | |
| 06.01<br>PP: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | 01 - Meningkatnya kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, serta kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut | 01 - Indeks Kualitas Air (IKA) | 5 | 55,4 | 1.934.249,7 | |
| | | 02 - Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) | 5 | 60 | | |
| | | 03 - Indeks Kualitas Udara (IKU) | 5 | 84,4 | | |
| | | 04 - Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL) | 5 | 64,5 | | |
| 06.01.01<br>KP: Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 01 - Menurunnya potensi kejadian pencemaran dan kerusakan SDA dan LH | 01 - Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan | 5 | 1.141 lokasi | 1.091.241,3 | |
| | | 02 - Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang terpantau memenuhi baku mutu lingkungan hidup | 5 | 3.375 perusahaan | | |



SK No 093299 C

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 03 - Luas area dengan nilai konservasi tinggi yang dipertahankan secara nasional | 5 | 70 juta ha | | |
| | | 04 - Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan dari *baseline* | 5 | 2,00 % | | |
| | | 05 - Luas kawasan konservasi | 5 | 27 juta ha | | |
| | | 06 - Luas kawasan konservasi perairan | 5 | 29,10 juta ha | | |
| | | 07 - Akurasi informasi meteorologi | 5 | 92 % | | |
| | | 08 - Akurasi informasi klimatologi | 5 | 83 % | | |
| 06.01.01.01<br>PRO-P: Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut | 01 - Tersedianya data kualitas air, air laut, dan udara | 01 - Jumlah penambahan alat pemantauan kualitas air sungai dan danau secara otomatis | 5 | 250 unit | 451.515,6 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, DAK |
| | | 02 - Jumlah penambahan alat pemantauan kualitas udara ambien secara otomatis | 5 | 30 unit | | |
| | | 03 - Jumlah lokasi pemantauan kualitas air laut secara manual | 5 | 34 provinsi | | |
| 06.01.01.02<br>PRO-P: Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan | 01 - Pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan | 01 - Jumlah badan usaha yang terpantau memenuhi baku mutu emisi | 5 | 3.375 badan usaha | 13.700,0 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | | 02 - Jumlah badan usaha yang terpantau memenuhi baku mutu air limbah | 5 | 3.375 badan usaha | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 03 - Jumlah pelabuhan yang terpantau melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut | 5 | 35 pelabuhan | | |
| | | 04 - Jumlah badan usaha tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya | 5 | 100 badan usaha | | |
| | | 05 - Jumlah badan usaha yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut | 5 | 450 badan usaha | | |
| 06.01.01.03 PRO-P: Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim | 01 - Tersedianya informasi cuaca dan iklim | 01 - Akurasi informasi Meteorologi Publik | 5 | 89 % | 89.489,1 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA |
| | | 02 - Akurasi informasi Meteorologi Penerbangan | 5 | 100 % | | |
| | | 03 - Akurasi informasi Meteorologi Maritim | 5 | 87 % | | |
| | | 04 - Akurasi Informasi Iklim | 5 | 83 % | | |
| 06.01.01.04 PRO-P: Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan | 01 - Menurunnya angka kejadian kebakaran lahan dan hutan | 01 - Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan | 5 | 1.330 desa | 400.603,1 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | | 02 - Jumlah kawasan hidrologi gambut yang memiliki infrastruktur tata air adaptif kekeringan/neraca air yang semakin membaik dalam suatu KHG | 5 | 200 KHG | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.01.05<br>PRO-P: Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup | 01 - Meningkatnya kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta, dan masyarakat terhadap lingkungan hidup | 01 - Jumlah lembaga/komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup | 1 | 300 unit | 5.645,0 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | | 02 - Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah | 5 | 20 produk | | |
| 06.01.01.06<br>PRO-P: Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem | 01 - Terlaksananya pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem | 01 - Luas hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi | 5 | 65 juta ha | 87.379,5 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | | 02 - Luas kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang operasional | 5 | 15,80 juta ha | | |
| | | 03 - Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan | 5 | 18 jenis | | |
| | | 04 - Jumlah unit perlindungan kehati di luar kawasan konservasi yang dibentuk dalam rangka pencegahan kehilangan kehati dan kerusakan ekosistem | 5 | 17 unit | | |
| | | 05 - Jumlah kebun raya daerah yang dikembangkan | 5 | 2 unit | | |
| 06.01.01.07<br>PRO-P: Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem | 01 - Tersedianya data dan informasi keanekaragaman hayati dan ekosistem | 01 - Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi | 5 | 10 juta ha | 42.909,0 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02 - Jumlah Layanan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati | 5 | 1 layanan | | |
| | | 03 - Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan konservasi | 5 | 7,55 juta ha | | |
| 06.01.02<br>KP: Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 01 - Meningkatnya respons cepat dalam mengurangi intensitas kerusakan SDA dan LH | 01 - Jumlah sampah yang terkelola secara nasional | 5 | 69,20 juta ton | 438.461,2 | |
| | | 02 - Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut dari *baseline* | 5 | 50 % | | |
| | | 03 - Jumlah limbah B3 yang terkelola | 5 | 117,22 juta ton | | |
| | | 04 - Persentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari *baseline* 4.546.946,30 kg BOD/hari | 5 | 0,046 % | | |
| 06.01.02.01<br>PRO-P: Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | 01 - Tertanganinya pencemaran dan kerusakan lingkungan | 01 - Jumlah lokasi pengendalian pencemaran pesisir dan laut dari tumpahan minyak dan sumber pencemar lainnya | 5 | 34 lokasi | 95.442,3 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | | 02 - Jumlah fasilitas pengolahan air limbah terbangun | 5 | 77 unit | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.02.02<br>PRO-P: Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik | 01 - Terkelolanya timbulan sampah rumah tangga dan sampah plastik melalui pengurangan dan penanganan timbulan sampah | 01 - Jumlah pengurangan timbulan sampah secara nasional | 5 | 18,90 juta ton | 196.606,5 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | | 02 - Jumlah penanganan timbulan sampah secara nasional | 5 | 50,30 juta ton | | |
| 06.01.02.03<br>PRO-P: Pengurangan dan Penghapusan Merkuri | 01 - Meningkatnya kualitas lingkungan melalui pengurangan dan penghapusan penggunaan merkuri | 01 - Persentase penghapusan merkuri dari *baseline* tahun 2019 sebanyak 50 ton di 180 kab/kota di 30 provinsi | 5 | 20 % | 3.950,0 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | | 02 - Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di PESK yang berizin | 5 | 7 unit | | |
| 06.01.02.04<br>PRO-P: Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu | 01 - Meningkatnya jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dan limbah medis | 01 - Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 secara terpadu yang terbangun | 5 | 1 unit | 142.462,4 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN KESEHATAN |
| | | 02 - Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan | 5 | 10 unit | | |
| 06.01.03<br>KP: Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 01 - Meningkatnya upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup | 01 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut | 5 | 330.000 ha | 209.192,5 | |
| | | 02 - Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan secara nasional | 5 | 285.000 ton | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 03 - Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan | 5 | 40 lokasi | | |
| | | 04 - Jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya | 5 | 25 jenis | | |
| 06.01.03.01 PRO-P: Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut | 01 - Terlaksananya restorasi dan pemulihan lahan gambut | 01 - Luas ekosistem gambut yang terkoordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan | 5 | 300.000 ha | 5.500,0 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | | 02 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di areal penggunaan lainnya | 5 | 30.000 ha | | |
| 06.01.03.02 PRO-P: Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 | 01 - Terlaksananya pemulihan lahan bekas tambang dan lahan terkontaminasi limbah B3 | 01 - Luas lahan bekas tambang yang dipulihkan dan direklamasi secara nasional | 5 | 7.211 ha | 34.298,5 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | | 02 - Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 akibat kegiatan institusi yang terpulihkan | 5 | 250.000 ton | | |
| | | 03 - Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 akibat kegiatan non-institusi yang dipulihkan | 5 | 35.000 ton | | |
| 06.01.03.03 PRO-P: Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut | 01 - Terlaksananya pemulihan kerusakan lingkungan pesisir dan laut | 01 - Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan | 5 | 40 lokasi | 3.200,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.03.04<br>PRO-P: Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah | 01 - Terlaksananya pemulihan habitat spesies terancam punah | 01 - Luas konflik tenurial di kawasan konservasi yang ditangani | 5 | 620.000 ha | 45.175,0 | LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI), KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | | 02 - Luas pemulihan ekosistem di kawasan konservasi | 5 | 45.000 ha | | |
| 06.01.03.05<br>PRO-P: Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah | 01 - Terlaksananya peningkatan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar terancam punah | 01 - Jumlah luas Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL | 5 | 14.100.000 ha | 121.019,0 | LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI), BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 06.01.04<br>KP: Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 01 - Terlaksananya penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup | 01 - Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan | 5 | 68 % | 195.354,7 | |
| | | 02 - Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani | 5 | 610 kasus | | |
| | | 03 - Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman | 5 | 2.150.000 ha | | |
| | | 04 - Jumlah daerah yang memiliki perencanaan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup | 5 | 7 daerah | | |
| 06.01.04.01<br>PRO-P: Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah | 01 - Terlaksananya penguatan regulasi dan kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah | 01 - Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tervalidasi kelayakannya dan terjamin kualitasnya berbasis dokumen daya dukung daya tampung | 5 | 30 kajian | 18.779,8 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |



SK No 093306 C

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.04.02<br>PRO-P: Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 01 - Terlaksananya penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | 01 - Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LHK | 5 | 2.000 badan usaha | 103.060,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | | 02 - Jumlah sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup | 5 | 1 sistem | | |
| | | 03 - Jumlah operasi pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan ilegal | 5 | 85 operasi | | |
| | | 04 - Jumlah Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan | 5 | 170 layanan | | |
| 06.01.04.03<br>PRO-P: Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 01 - Terlaksananya penguatan mekanisme pidana, perdata, dan mediasi dalam proses penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup | 01 - Jumlah kasus pidana LHK yang terselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap | 5 | 500 perkara | 73.514,9 | MAHKAMAH AGUNG, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | | 02 - Jumlah sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan | 5 | 110 perkara | | |
| 06.02<br>PP: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim | 01 - Berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat | 01 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana | 5 | 0,10 % | 6.359.144,4 | |
| | | 02 - Penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim | 5 | 1,00 % | | |
| | | 03 - Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat | 5 | 3,50 menit | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.01<br>KP: Penanggulangan Bencana | 01 - Meningkatnya sistem dan respons peringatan dini yang didukung oleh upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan dalam penanggulangan bencana | 01 - Rasio investasi PRB terhadap APBN | 5 | 1,06 | 2.895.085,8 | |
| | | 02 - Persentase kelengkapan sistem peringatan dini bencana hidrometeorologis dan tektonis | 2 | 96 % | | |
| | | 03 - Indeks Risiko Bencana Indonesia | 5 | 132,5 | | |
| 06.02.01.01<br>PRO-P: Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana | 01 - Terlaksananya penguatan data, informasi, dan literasi bencana | 01 - Jumlah layanan data dan informasi bencana yang akurat | 4 | 5 layanan | 258.376,0 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) |
| | | 02 - Jumlah forum konsolidasi data, informasi, dan pengetahuan | 4 | 15 kegiatan | | |
| | | 03 - Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana | 1 | 100 kegiatan | | |
| 06.02.01.02<br>PRO-P: Penguatan Sistem, Regulasi, dan Tata Kelola Bencana | 01 - Meningkatnya kualitas sistem, regulasi, dan tata kelola bencana yang saling bersinergi | 01 - Jumlah penyusunan kajian untuk regulasi dan tata kelola bencana | 4 | 14 kajian | 6.563,9 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | | 02 - Jumlah sistem kebencanaan yang dikembangkan | 2 | 3 sistem | | |
| 06.02.01.03<br>PRO-P: Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan | 01 - Meningkatnya kualitas sarana prasarana kebencanaan | 01 - Jumlah kab/kota yang memiliki standar minimal peralatan dan logistik kebencanaan | 3 | 275 kab/kota | 1.400.886,6 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| | | 02 - Persentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai | 2 | 80 % | | |



SK No 093308 C

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.01.04<br>PRO-P: Integrasi Kerja Sama Kebijakan dan Penataan Ruang Berbasis Risiko Bencana | 01 - Terlaksananya integrasi kerja sama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana | 01 - Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana | 1 | 50 kajian | 1.500,0 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) |
| | | 02 - Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan rawan bencana dan pascabencana | 5 | 55 dokumen | | |
| 06.02.01.05<br>PRO-P: Penguatan Penanganan Darurat Bencana | 01 - Terlaksananya penguatan penanganan darurat bencana | 01 - Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana per 100.000 jiwa | 1 | 0,20 jiwa | 479.444,5 | KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | | 02 - Persentase waktu respons penanganan darurat kurang dari 24 jam | 1 | 100 % | | |
| 06.02.01.06<br>PRO-P: Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Daerah Terdampak Bencana | 01 - Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana | 01 - Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan | 2 | 90 % | 7.800,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | | 02 - Kenaikan ketahanan di daerah pascabencana | 1 | 5 % | | |
| 06.02.01.07<br>PRO-P: Penguatan Sistem Mitigasi Multiancaman Bencana Terpadu | 01 - Menguatnya sistem mitigasi multiancaman bencana terpadu | 01 - Jumlah Sistem Mitigasi Multiancaman Bencana (MHEWS) terpadu | 2 | 1 sistem | 740.514,8 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | | 02 - Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana | 1 | 200 kelompok | | |
| | | 03 - Jumlah daerah pelaksana kegiatan mitigasi multiancaman bencana | 1 | 514 kab/kota | | |
| | | 04 - Kenaikan Indeks Kesiapsiagaan Bencana | 1 | 0,0053 | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.02<br>KP: Peningkatan Ketahanan Iklim | 01 - Menurunnya potensi dampak kerugian yang ditimbulkan oleh perubahan iklim pada sektor-sektor prioritas | 01 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kelautan dan pesisir | 5 | 0,650 % | 3.464.058,6 | |
| | | 02 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor air | 5 | 0,060 % | | |
| | | 03 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor pertanian | 5 | 0,207 % | | |
| | | 04 - Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kesehatan | 5 | 0,078 % | | |
| 06.02.02.01<br>PRO-P: Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan | 01 - Meningkatnya ketahanan sektor kelautan dan pesisir terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim | 01 - Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim | 5 | 12 kawasan | 691.637,8 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | | 02 - Jumlah pelabuhan yang memperoleh layanan informasi cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang dengan akurasi lebih dari 80 persen | 5 | 20 pelabuhan | | |
| | | 03 - Panjang tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan | 2 | 23 km | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.02.02<br>PRO-P: Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim | 01 - Meningkatnya ketahanan sektor air terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim | 01 - Tambahan debit air baku di kawasan rawan air | 2 | 5,18 m³/detik | 1.751.474,6 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| | | 02 - Jumlah wilayah sungai yang menetapkan peta risiko dan rencana induk peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana hidrometeorologi dan hidrogeologi | 2 | 10 wilayah sungai | | |
| | | 03 - Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air | 5 | 25.000 ha | | |
| 06.02.02.03<br>PRO-P: Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim | 01 - Meningkatnya ketahanan sektor pertanian terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim | 01 - Jumlah unit bangunan konservasi air dan lingkungan hidup untuk penambahan areal pertanian | 2 | 200 unit | 1.011.641,4 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA, KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| | | 02 - Jumlah penyuluh pertanian dan petani yang meningkat pemahaman iklim melalui sekolah lapang iklim | 5 | 2.400 orang | | |
| 06.02.02.04<br>PRO-P: Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Dampak Perubahan Iklim | 01 - Meningkatnya ketahanan sektor kesehatan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim | 01 - Jumlah kab/kota yang difasilitasi dan dibina dalam Pelaksanaan Lingkungan Sehat | 1 | 514 daerah (prov/kab/kota) | 9.304,8 | KEMENTERIAN KESEHATAN |

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03<br>PP: Pembangunan Rendah Karbon | 01 - Meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan | 01 - Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi - kumulatif | 5 | 9,99 % | 593.245,0 | |
| | | 02 - Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi - tahunan | 5 | 12,8 % | | |
| | | 03 - Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor lahan - kumulatif | 5 | 36,36 % | | |
| | | 04 - Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor lahan - tahunan | 5 | 58,3 % | | |
| | | 05 - Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor limbah - kumulatif | 5 | 6,78 % | | |
| | | 06 - Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor limbah - tahunan | 5 | 9,4 % | | |
| | | 07 - Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor IPPU - kumulatif | 5 | 4,97 % | | |
| | | 08 - Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor IPPU - tahunan | 5 | 2,45 % | | |
| | | 09 - Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor pesisir dan kelautan - kumulatif | 5 | 6,80 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10 - Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor pesisir dan kelautan - tahunan | 5 | 7,04 % | | |
| 06.03.01<br>KP: Pembangunan Energi Berkelanjutan | 01 - Meningkatnya keberlanjutan pengelolaan energi | 01 - Porsi Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi nasional | 5 | 17,90 % | 94.470,9 | |
| | | 02 - Intensitas energi primer | 5 | 135,2 SBM/miliar rupiah | | |
| | | 03 - Penurunan intensitas energi final | 5 | 0,8 SBM/miliar rupiah | | |
| 06.03.01.01<br>PRO-P: Pengelolaan Energi Baru Terbarukan | 01 - Meningkatnya pembangunan pembangkit dan penggunaan Energi Baru Terbarukan | 01 - Kapasitas tambahan terpasang pembangkit EBT | 2 | 2.099 megawatt | 73.303,7 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| | | 02 - Pemanfaatan *biofuel* untuk domestik | 5 | 14,60 juta kilo liter | | |
| 06.03.01.02<br>PRO-P: Efisiensi dan Konservasi Energi | 01 - Meningkatnya efisiensi dan konservasi energi | 01 - Persentase penyelesaian penyusunan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) | 5 | 100 % | 21.167,2 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| 06.03.02<br>KP: Pemulihan Lahan Berkelanjutan | 01 - Meningkatnya keberlanjutan pemulihan lahan | 01 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut | 5 | 330.000 ha | 267.328,1 | |
| | | 02 - Luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional | 5 | 450.000 ha | | |
| | | 03 - Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) | 5 | 90 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.02.01<br>PRO-P: Restorasi dan Pengelolaan Lahan Gambut | 01 - Meningkatnya upaya restorasi dan pemulihan lahan gambut | 01 - Luas ekosistem gambut yang terkoordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan | 5 | 300.000 ha | 0,0[a] | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | | 02 - Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di areal penggunaan lainnya | 5 | 30.000 ha | | |
| 06.03.02.02<br>PRO-P: Rehabilitasi Hutan Lahan dan Reforestasi | 01 - Meningkatnya upaya rehabilitasi hutan lahan dan reforestasi | 01 - Luas rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif | 5 | 25.000 ha | 23.950,0 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| | | 02 - Luas Penanaman pada Hutan Produksi | 5 | 425.000 ha | | |
| 06.03.02.03<br>PRO-P: Pengurangan Laju Deforestasi | 01 - Berkurangnya laju deforestasi | 01 - Penurunan laju deforestasi | 5 | 200.000 ha/tahun | 8.942,8 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 06.03.02.04<br>PRO-P: Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian | 01 - Terlaksananya optimasi lahan pertanian | 01 - Jumlah optimasi lahan pertanian | 5 | 100.000 ha | 234.435,3 | KEMENTERIAN PERTANIAN<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 06.03.03<br>KP: Pengelolaan Limbah | 01 - Meningkatnya pengelolaan limbah | 01 - Jumlah sampah yang terkelola secara nasional | 5 | 69,20 juta ton | 220.456,6 | |
| 06.03.03.01<br>PRO-P: Pengelolaan Sampah Rumah Tangga | 01 - Meningkatnya pengelolaan sampah rumah tangga | 01 - Jumlah pengurangan timbulan sampah secara nasional | 5 | 18,90 juta ton | 220.456,6 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| | | 02 - Jumlah penanganan timbulan sampah secara nasional | 5 | 50,30 juta ton | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.04<br>KP: Pengembangan Industri Hijau | 01 - Meningkatnya keberlanjutan industri | 01 - Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan | 5 | 50 perusahaan | 8.450,0 | |
| 06.03.04.01<br>PRO-P: Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi | 01 - Meningkatnya penerapan proses dan teknologi industri yang lebih berkelanjutan | 01 - Jumlah Rancangan Standar Industri Hijau | 5 | 5 NSPK | 8.450,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| 06.03.05<br>KP: Rendah Karbon Pesisir dan Laut | 01 - Meningkatnya pemulihan ekosistem pesisir dan kelautan | 01 - Jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove | 5 | 6.872 ha | 2.539,3 | |
| 06.03.05.01<br>PRO-P: Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan | 01 - Meningkatnya upaya inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan | 01 - Jumlah lokasi pemulihan kerusakan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil | 5 | 40 lokasi | 2.539,3 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |

CATATAN:
(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
(2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
(3) Alokasi DAK merupakan pagu alokasi per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2023;
(4) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L, DAK Fisik, dan KPBU pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan;
(5) Dukungan Terhadap Arahan Presiden: 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia; 2. Pembangunan Infrastruktur; 3. Penyederhanaan Regulasi; 4. Penyederhanaan Birokrasi; dan 5. Transformasi Ekonomi.

KETERANGAN:
(a) *multitagging.*

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRIORITAS NASIONAL 7 : MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07<br>PN: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | 01 - Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal | 01 - Indeks Demokrasi Indonesia | | 79,25 | 57.624.572,5 | |
| | | 02 - Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah | | 78 % | | |
| | 02 - Optimalnya kebijakan luar negeri | 01 - Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional | | 4,88 | | |
| | 03 - Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap | 01 - Indeks Pembangunan Hukum | | 0,57 | | |
| | 04 - Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 01 - Indeks Pelayanan Publik Nasional | | 3,90 | | |
| | 05 - Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia | 01 - Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya | | 100 % | | |
| 07.01<br>PP: Konsolidasi Demokrasi | 01 - Terwujudnya stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif | 01 - IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi | 4 | 81,51 | 20.660.449,4 | |
| | | 02 - IDI Aspek Kebebasan | 4 | 74,21 | | |
| | | 03 - IDI Aspek Kesetaraan | 4 | 81,51 | | |



SK No 093316 C

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 04 - Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik (dokumen) | 3 | 5 dokumen | | |
| 07.01.01<br>KP: Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi | 01 - Terwujudnya stabilitas politik yang kondusif melalui penguatan kapasitas lembaga demokrasi | 01 - Kaderisasi oleh partai politik peserta pemilu | 4 | 76,1 | 19.638.391,8 | |
| 07.01.01.01<br>PRO-P: Penguatan Penyelenggara Pemilu | 01 - Terwujudnya penguatan penyelenggara pemilu | 01 - Jumlah satker yang difasilitasi dalam penguatan penyelenggara pemilu | 4 | 549 satker | 19.499.935,3 | KOMISI PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, MAHKAMAH KONSTITUSI RI, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI |
| 07.01.01.02<br>PRO-P: Penguatan Peraturan Perundangan Bidang Politik | 01 - Menguatnya peraturan perundangan bidang politik | 01 - Jumlah rekomendasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang politik | 3 | 2 rekomendasi kebijakan | 1.000,0 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| 07.01.01.03<br>PRO-P: Peningkatan Bantuan Keuangan Partai Politik | 01 - Meningkatnya bantuan keuangan partai politik | 01 - Jumlah bantuan keuangan yang tersalurkan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR | 1 | 126.376.418 suara sah | 126.376,4 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| 07.01.01.04<br>PRO-P: Penguatan Demokrasi Internal, Transparansi, dan Akuntabilitas Partai Politik | 01 - Menguatnya demokrasi internal, transparansi, dan akuntabilitas partai politik | 01 - Jumlah pengurus parpol yang mendapatkan pendidikan politik dan penguatan ideologi pancasila | 1 | 400 orang | 5.780,1 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.01.05<br>PRO-P: Penguatan Demokrasi di Daerah | 01 - Terlaksananya penguatan demokrasi di daerah | 01 - Jumlah provinsi yang mendapatkan penguatan demokrasi | 1 | 15 (prov/kab/kota) | 5.300,0 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN |
| 07.01.02<br>KP: Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan | 01 - Terwujudnya stabilitas politik yang kondusif melalui penguatan kesetaraan dan kebebasan | 01 - Terbebas dari ancaman dan/penggunaan kekerasan yang menghambat kebebasan berkeyakinan | 4 | 95,35 | 630.270,7 | |
| | | 02 - Keterwakilan perempuan di legislatif, eksekutif, dan yudikatif | 4 | 61,30 | | |
| 07.01.02.01<br>PRO-P: Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih | 01 - Terselenggaranya pendidikan politik dan pendidikan pemilih yang tepat sasaran dan berkelanjutan | 01 - Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat | 4 | 94,80 | 5.850,0 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 07.01.02.02<br>PRO-P: Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kepemiluan | 01 - Terselenggaranya penguatan pengawasan netralitas ASN | 01 - Netralitas penyelenggara pemilu | 4 | 81,55 | 622.920,7 | KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PERTAHANAN, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
| 07.01.02.03<br>PRO-P: Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan | 01 - Meningkatnya kapasitas organisasi kemasyarakatan | 01 - Jumlah pengurus ormas yang mendapat penguatan Ideologi kebangsaan dan wawasan kebangsaan | 1 | 1200 orang | 1.500,0 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| 07.01.03<br>KP: Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik | 01 - Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif | 01 - Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah | 1 | 79 % | 391.786,9 | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02 - Persentase konten informasi publik yang berkualitas | 1 | 90 % | | |
| | | 03 - Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional | 1 | 50.000 orang | | |
| 07.01.03.01<br>PRO-P: Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah | 01 - Terlaksananya penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah | 01 - Tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik | 3 | 5 dokumen | 24.608,6 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| 07.01.03.02<br>PRO-P: Penyediaan Konten dan Akses Informasi Publik secara Merata dan Berkeadilan terutama di Wilayah 3T | 01 - Tersedianya konten dan akses informasi publik secara merata dan berkeadilan terutama di wilayah 3T | 01 - Persentase tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T terhadap informasi publik | 1 | 77 % | 141.502,5 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 07.01.03.03<br>PRO-P: Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika | 01 - Terlaksananya peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika | 01 - Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional | 1 | 50.000 orang | 181.598,3 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 07.01.03.04<br>PRO-P: Peningkatan Literasi TIK Masyarakat | 01 - Terlaksananya peningkatan literasi TIK masyarakat | 01 - Jumlah masyarakat yang mendapat pengenalan TIK | 1 | 1.000 orang | 693,1 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 07.01.03.06<br>PRO-P: Penguatan Peran Lembaga Pers dan Jurnalis | 01 - Terlaksananya penguatan peran lembaga pers dan jurnalis | 01 - Indeks Kemerdekaan Pers | 1 | 77,00 | 19.489,6 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.03.07<br>PRO-P: Peningkatan Kualitas Lembaga Penyiaran | 01 - Terlaksananya peningkatan kualitas lembaga penyiaran | 01 - Jumlah lembaga penyiaran yang berkualitas | 1 | 59 lembaga penyiaran | 23.894,8 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 07.02<br>PP: Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri | 01 - Meningkatnya efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional | 01 - Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral | 5 | 14 forum | 378.179,9 | |
| | | 02 - Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional | 1 | 3,95 | | |
| | | 03 - Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri | 1 | 91,00 | | |
| 07.02.01<br>KP: Penguatan Integritas NKRI dan Pelindungan WNI di Luar Negeri | 01 - Menguatnya integritas NKRI dan pelindungan WNI di luar negeri | 01 - Persentase kasus WNI di luar negeri yang diselesaikan | 1 | 81 % | 266.990,4 | |
| | | 02 - Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim | 2 | 47,99 | | |
| 07.02.01.01<br>PRO-P: Peningkatan dan Intensifikasi Efektivitas Penyelesaian Perbatasan dan Percepatan Pemetaan Batas Negara | 01 - Terlaksananya penyelesaian perbatasan dan percepatan pemetaan batas negara | 01 - Persentase kemajuan hukum dan perjanjian internasional di bidang perundingan penegasan batas darat, peningkatan kerja sama perbatasan dan peningkatan kerja sama kelautan yang diselesaikan | 2 | 100 % | 23.766,8 | KEMENTERIAN LUAR NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG), KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| 07.02.01.02<br>PRO-P: Penguatan Pelindungan WNI dan BHI di Tingkat Bilateral, Regional, Multilateral | 01 - Terlaksananya penguatan pelindungan WNI dan BHI di tingkat bilateral, regional, multilateral | 01 - Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri | 1 | 97,50 | 243.223,6 | KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI) |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02 - Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri | 1 | 97,49 | | |
| | | 03 - Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri | 1 | 98,00 | | |
| 07.02.02<br>KP: Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional | 01 - Terlaksananya penguatan kerja sama pembangunan internasional | 01 - Jumlah program/kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular | 5 | 133 program/kegiatan | 52.184,3 | |
| 07.02.02.01<br>PRO-P: Peningkatan Penggunaan Sumber-Sumber dan Mekanisme Pendanaan Baru Kerja Sama Pembangunan Internasional | 01 - Terlaksananya peningkatan penggunaan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru kerja sama pembangunan internasional | 01 - Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST | 5 | 171,00 Rp miliar | 48.884,3 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, SEKRETARIAT NEGARA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| 07.02.02.02<br>PRO-P: Penciptaan Lingkungan yang Mendukung (*Enabling Environment*) Peningkatan Keterlibatan Swasta dalam Kerja Sama Pembangunan Internasional | 01 - Terciptanya lingkungan yang mendukung (*enabling environment*) peningkatan keterlibatan swasta dalam kerja sama pembangunan internasional | 01 - Tingkat partisipasi aktor nonpemerintah dalam kegiatan kerja sama pembangunan internasional | 5 | 2,82—2,96 % | 3.300,0 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS |
| 07.02.03<br>KP: Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional | 01 - Meningkatnya citra positif di dunia internasional | 01 - Persentase pemberitaan positif media massa internasional terhadap kebijakan hubungan luar negeri RI | 5 | 86 % | 1.591,4 | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.03.01<br>PRO-P: Penyusunan Kebijakan Diplomasi Publik dan Turunannya | 01 - Tersusunnya kebijakan diplomasi publik dan turunannya | 01 - Persentase dukungan konstituen internasional terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia | 5 | 99 % | 1.591,4 | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA |
| 07.02.04<br>KP: Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global | 01 - Meningkatnya peran Indonesia di tingkat regional dan global | 01 - Presentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri multilateral | 5 | 98 % | 57.413,8 | |
| | | 02 - Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri ASEAN | 5 | 98 % | | |
| | | 03 - Persentase Kesepakatan Kerjasama Bilateral di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang ditindak lanjuti oleh Stakeholder dalam Negeri | 5 | 91,11 % | | |
| | | 04 - Persentase Kesepakatan Kerjasama Bilateral di Kawasan Amerika dan Eropa yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Dalam Negeri | 5 | 95 % | | |
| 07.02.04.01<br>PRO-P: Peningkatan Inisiatif/Posisi Indonesia yang di terima | 01 - Meningkatnya inisiatif/posisi Indonesia yang di terima | 01 - Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan dalam forum kerja sama multilateral | 5 | 290 rekomendasi/prakarsa | 54.730,0 | KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN |
| | | 02 - Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan dalam pertemuan ASEAN | 5 | 247 rekomendasi/prakarsa | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.04.02<br>PRO-P: Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB | 01 - Terlaksananya optimalisasi kontribusi Indonesia dalam jajaran 10 besar negara kontributor MPP PBB | 01 - Peringkat jumlah pasukan perdamaian (PKO) yang dikirim Pemerintah Indonesia | 5 | 10 peringkat | 2.683,8 | KEMENTERIAN LUAR NEGERI |
| 07.03<br>PP: Penegakan Hukum Nasional | 01 - Meningkatnya penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan | 01 - Indeks Perilaku Anti Korupsi (nilai) | 4 | 4,09 | 499.027,0 | |
| 07.03.01<br>KP: Penataan Regulasi | 01 - Terlaksananya penataan regulasi | 01 - Persentase *judicial review* yang dikabulkan MK dan MA | 3 | 9,15% dan 7,05% | 5.765,9 | |
| 07.03.01.01<br>PRO-P: Penguatan Tata Kelola dan Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi | 01 - Terbentuknya lembaga pengelola regulasi | 01 - Persentase peraturan perundang-undangan yang diharmonisasi | 3 | 0,20 % | 1.000,0 | KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA |
| 07.03.01.02<br>PRO-P: Pembaruan Substansi Hukum | 01 - Terlaksananya pembaruan substansi hukum | 01 - Jumlah pengundangan rancangan undang-undang jangka menengah | 3 | 1 UU | 4.765,9 | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 07.03.02<br>KP: Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata | 01 - Terlaksananya perbaikan sistem hukum pidana dan perdata | 01 - Persentase penyelesaian perkara gugatan sederhana sesuai dengan peraturan yang berlaku | 5 | 95% | 159.781,7 | |
| | | 02 - Pemanfaatan *e-filing* di lingkungan Pengadilan Negeri | 5 | 94% | | |
| | | 03 - Pemanfaatan *e-filing* di lingkungan Pengadilan Agama | 5 | 30% | | |
| | | 04 - Pemanfaatan *e-litigasi* di lingkungan Pengadilan Negeri | 5 | 13% | | |



SK No 093323 C

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 05 - Pemanfaatan *e-litigasi* di lingkungan Pengadilan Agama | 5 | 7% | | |
| | | 06 - Pemanfaatan SIP untuk penanganan perkara kepailitan dan PKPU | 5 | 10% | | |
| | | 07 - Peningkatan pendaftaran jaminan Fidusia | 5 | Naik 1% dari *baseline* T-1 | | |
| | | 08 - Persentase pelaku residivis | 5 | 7.06 % | | |
| 07.03.02.01<br>PRO-P: Penyempurnaan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Kemudahan Berusaha | 01 - Terlaksananya penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha | 01 - Persentase eksekusi putusan perdata | 5 | 15 % | 9.067,4 | MAHKAMAH AGUNG, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA |
| 07.03.02.02<br>PRO-P: Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif | 01 - Terlaksananya penerapan pendekatan keadilan restoratif | 01 - Persentase pengenaan alternatif pemidanaan | 1 | 15 % | 90.429,0 | MAHKAMAH AGUNG, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN), KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, KEMENTERIAN KESEHATAN |
| 07.03.02.03<br>PRO-P: Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan | 01 - Terwujudnya dukungan TI di bidang hukum dan peradilan | 01 - Jumlah wilayah kerja instansi penegak hukum yang mengimplementasikan SPPT TI | 5 | 212 wilayah kerja | 37.220,8 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN), MAHKAMAH AGUNG, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK), |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 07.03.02.04<br>PRO-P: Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim | 01 - Terlaksananya peningkatan integritas dan pengawasan hakim | 01 - Indeks Integritas Hakim | 1 | 7,68 | 23.064,6 | KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA |
| 07.03.03<br>KP: Penguatan Sistem Anti Korupsi | 01 - Terwujudnya penguatan sistem anti korupsi | 01 - Survei penilaian integritas | 5 | 74,00 | 148.755,8 | |
| 07.03.03.01<br>PRO-P: Penguatan Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi | 01 - Terlaksananya penguatan implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi | 01 - Persentase capaian aksi Stranas PK | 5 | 37,5 % | 43.454,1 | KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK), KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA |
| 07.03.03.02<br>PRO-P: Optimalisasi Mekanisme Pemulihan dan Pengelolaan Aset | 01 - Terlaksananya optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset | 01 - Jumlah aparat penegak hukum yang mengikuti diklat pemulihan aset | 1 | 160 orang | 105.301,7 | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK), KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN KEUANGAN, PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) |
| 07.03.04<br>KP: Peningkatan Akses terhadap Keadilan | 01 - Terlaksananya peningkatan akses terhadap keadilan | 01 - Indeks Akses Terhadap Keadilan (persen) | 5 | 71—80 % | 184.723,5 | |
| 07.03.04.01<br>PRO-P: Penguatan Layanan Keadilan | 01 - Terlaksananya penguatan layanan keadilan | 01 - Aspek bantuan hukum pada Indeks Akses terhadap Keadilan (persen) | 5 | 71—80 % | 167.960,1 | MAHKAMAH AGUNG, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.04.02<br>PRO-P: Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat | 01 - Terlaksananya pemberdayaan hukum bagi masyarakat | 01 - Aspek kemampuan masyarakat pada Indeks Akses terhadap Keadilan | 5 | 71—80 % | 16.763,4 | KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA |
| 07.04<br>PP: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola | 01 - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui perbaikan Tata Kelola dan Birokrasi | 01 - Indeks Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga | 4 | 4,10 | 1.466.446,6 | |
| | | 02 - Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi | 4 | 3,90 | | |
| | | 03 - Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota | 4 | 3,70 | | |
| 07.04.01<br>KP: Transformasi Manajemen SDM Aparatur | 01 - Meningkatnya skor *employee engagement* dan *employee branding* | 01 - Skor *Employee Engagement* | 1 | 10,5 | 33.226,5 | |
| | | 02 - Skor *Employee Branding* | 1 | 10,5 | | |
| 07.04.01.01<br>PRO-P: Penguatan Budaya Kerja dan *Employer Branding* | 01 - Terwujudnya pelaksanaan *core values* ASN BerAKHLAK | 01 - Hasil Pengukuran Indeks BerAKHLAK | 1 | 30 % | 3.000,0 | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI |
| 07.04.01.02<br>PRO-P: Percepatan Peningkatan Kapasitas SDMA | 01 - Terwujudnya peningkatan kapasitas ASN melalui penggunaan fitur *learning* pada *platform* tunggal | 01 - Persentase pegawai ASN yang aktif menggunakan fitur *learning* pada *platform* tunggal | 1 | 20 % pegawai ASN | 3.950,0 | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI |
| 07.04.01.03<br>PRO-P: Peningkatan Kinerja dan Sistem Penghargaan | 01 - Terlaksananya piloting kebijakan manajemen kesejahteraan di Instansi Pemerintah | 01 - Jumlah IP yang dilakukan piloting terkait kebijakan manajemen kesejahteraan | 4 | 7 K/L | 5.200,0 | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.01.04<br>PRO-P: Pengembangan Talenta dan Karir | 01 - Terwujudnya manajemen talenta di Instansi Pemerintah | 01 - Persentase IP yang telah menerapkan kebijakan manajemen talenta ASN | 1 | 100 % K/L | 11.956,4 | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA |
| 07.04.01.05<br>PRO-P: Percepatan Transformasi Digital Manajemen ASN | 01 - Terwujudnya platform tunggal digital ekosistem manajemen ASN | 01 - Persentase IP yang menggunakan platform tunggal digital ekosistem manajemen ASN | 1 | 100 % K/L | 6.520,1 | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI |
| 07.04.01.06<br>PRO-P: Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur | 01 - Terlaksananya piloting kebijakan perancangan jabatan, perencanaan dan pengadaan ASN yang fleksibel | 01 - Jumlah IP yang dilakukan piloting kebijakan perancangan jabatan, perencanaan dan pengadaan ASN yang fleksibel | 1 | 7 K/L | 2.600,0 | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI |
| 07.04.02<br>KP: Transformasi Pelayanan Publik | 01 - Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas | 01 - Skor Rata-rata Penilaian Kepatuhan K/L terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Pusat | 4 | 82,5 | 40.623,3 | |
| | | 02 - Skor Rata-rata Penilaian Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan | 4 | 72,5 | | |
| | | 03 - Skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas Kinerja Pelayanan Publik | 4 | 84,00 | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.02.01<br>PRO-P: Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (*E-Services*) yang Terintegrasi | 01 - Terlaksananya pelayanan publik berbasis elektronik (*e-services*) yang terintegrasi | 01 - Skor Indeks pada Domain Layanan pada SPBE | 4 | 3,14 | 8.020,5 | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, KEMENTERIAN KESEHATAN |
| 07.04.02.02<br>PRO-P: Penguatan Pengawasan Masyarakat atas Kinerja Pelayanan Publik | 01 - Terlaksananya penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik | 01 - Jumlah laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI pusat yang diselesaikan | 4 | 737 orang | 30.602,8 | OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI |
| | | 02 - Jumlah laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI perwakilan yang diselesaikan | 4 | 8.935 orang | | |
| 07.04.02.03<br>PRO-P: Penguatan Ekosistem Inovasi | 01 - Terlaksananya penguatan ekosistem inovasi | 01 - Persentase inovasi yang memenuhi standar inovasi pelayanan publik | 4 | 82 % | 2.000,0 | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA |
| 07.04.03<br>KP: Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis | 01 - Terlaksananya penataan kelembagaan dan proses bisnis yang efektif dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional | 01 - Skor Peringkat Komposit Efektivitas Kelembagaan | 4 | 56 | 1.275.239,5 | |
| 07.04.03.01<br>PRO-P: Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis yang Efektif | 01 - Terlaksananya penataan kelembagaan | 01 - Jumlah instansi yang ditata kelembagaannya | 4 | 21 K/L | 2.500,0 | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI |
| 07.04.03.02<br>PRO-P: Penerapan SPBE Terintegrasi | 01 - Meningkatnya nilai Indeks SPBE Nasional | 01 - Nilai Indeks SPBE Nasional | 4 | 2,40 | 1.272.739,5 | ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS, |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| 07.04.04<br>KP: Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan | 01 - Terwujudnya birokrasi pemerintah yang efektif dan efisien | 01 - Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Nasional (K/L) | 4 | 78 | 117.357,3 | |
| | | 02 - Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Nasional (Provinsi) | 4 | 70 | | |
| | | 03 - Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Nasional (Kabupaten/Kota) | 4 | 58,11 | | |
| 07.04.04.01<br>PRO-P: Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi | 01 - Meningkatnya kualitas kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional | 01 - Persentase rekomendasi RB nasional yang ditindaklanjuti | 4 | 70 % | 6.351,4 | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN |
| 07.04.04.02<br>PRO-P: Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan | 01 - Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja pembangunan | 01 - Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern K/L | 4 | 24 laporan | 111.005,9 | BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) |
| | | 02 – Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern pemerintah daerah | 4 | 72 laporan | | |
| | | 03 - Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern badan usaha | 4 | 78 laporan | | |
| | | 04 - Jumlah laporan rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan | 4 | 730 laporan | | |

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05<br>PP: Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional | 01 - Terjaganya stabilitas pertahanan dan keamanan | 01 - Indeks Kekuatan Militer | 2 | 0,21 | 34.620.469,6 | |
| | | 02 - Indeks Terorisme Global | 5 | 4,29 | | |
| | | 03 - Persentase orang yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya | 3 | >60 % | | |
| | | 04 - Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | 3 | 3,30 | | |
| 07.05.01<br>KP: Penguatan Keamanan Dalam Negeri | 01 - Menguatnya keamanan dalam negeri | 01 - Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) | 4 | 37,90 | 668.470,1 | |
| | | 02 - Indeks Risiko Terorisme (Target) | 4 | 54,16 | | |
| | | 03 - Angka pelanggaran lintas batas negara | 4 | <200 pelanggaran | | |
| | | 04 - Angka kejadian konflik | 4 | 40 kejadian | | |
| | | 05 - Angka korban pengungsi internal | 4 | ≤14.500 orang | | |
| 07.05.01.01<br>PRO-P: Peningkatan Deradikalisasi dan Penanganan Terorisme | 01 - Meningkatnya deradikalisasi dan penanganan terorisme | 01 - *Clearance rate* terorisme | 5 | 79 % | 172.157,5 | BADAN INTELIJEN NEGARA, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT), KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA |
| | | 02 - Jumlah deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, serta orang atau kelompok orang terpapar paham radikal terorisme | 5 | 125 orang | | |



SK No 093330 C

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 03 - Jumlah kegiatan pencegahan tindak pidana terorisme | 5 | 128 kegiatan | | |
| | | 04 - Jumlah instansi yang berpartisipasi aktif dalam sinergisitas penanggulangan terorisme | 5 | 48 institusi | | |
| 07.05.01.02<br>PRO-P: Pengamanan Objek Vital dan Target Rentan | 01 - Terlaksananya pengamanan objek vital dan target rentan | 01 - Jumlah objek vital dan target rentan yang mendapat pengamanan | 5 | 2.129 objek vital dan target rentan | 23.000,0 | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
| 07.05.01.03<br>PRO-P: Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar | 01 - Terlaksananya penguatan pertahanan dan keamanan di perbatasan dan pulau terluar | 01 - Jumlah pos pamtas, posal, pospol subsektor, dan PLBN yang di bangun | 2 | 56 m² | 453.586,1 | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN PERTAHANAN<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| | | 02 - Panjang jalan inspeksi patroli perbatasan | 2 | 200 km | | |
| | | 03 - Jumlah penduduk perbatasan yang diberdayakan dalam sistem hankamor | 1 | 180 orang | | |
| | | 04 - Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang ditingkatkan sarana prasarana pertahanan dan keamanannya | 2 | 49 PPKT | | |
| 07.05.01.04<br>PRO-P: Penanganan Konflik secara Humanis | 01 - Tertanganinya konflik secara humanis | 01 - Tertanggulanginya potensi konflik sosial di tingkat kabupaten | 5 | 21 kasus | 18.565,0 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL |
| | | 02 - Jumlah anggota satuan yang mendapatkan pelatihan penanganan konflik secara humanis | 1 | 900 orang | | |



SK No 093331 C

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.01.05<br>PRO-P: Keselamatan dan Reintegrasi di Wilayah Rawan dan Bencana | 01 - Terwujudnya keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan dan bencana | 01 - Jumlah korban bencana yang diselamatkan | 4 | 120.000 orang | 1.161,4 | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
| 07.05.02<br>KP: Penguatan Kemampuan Pertahanan Dibarengi *Confidence Building Measures* (CBM) | 01 - Tewujudnya kemampuan pertahanan yang kuat dibarengi *Confidence Building Measures* (CBM) | 01 - Pemenuhan MEF | 4 | 93 % | 28.085.941,0 | |
| | | 02 - Persentase kontribusi industri pertahanan | 5 | ≥50 % | | |
| 07.05.02.01<br>PRO-P: Pengadaan Alutsista | 01 - Terlaksananya pengadaan alutsista | 01 - Jenis alutsista yang diadakan | 4 | 15 jenis | 15.705.132,0 | KEMENTERIAN PERTAHANAN |
| 07.05.02.02<br>PRO-P: Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista | 01 - Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan alutsista | 01 - Jenis alutsista yang diharwat | 4 | 17 jenis | 6.446.758,5 | KEMENTERIAN PERTAHANAN |
| 07.05.02.03<br>PRO-P: Pembangunan Sarana-Prasarana Pertahanan | 01 - Terlaksananya pembangunan sarana-prasarana pertahanan | 01 - Jumlah sarpras pertahanan yang dibangun | 2 | 4 jenis | 252.206,0 | KEMENTERIAN PERTAHANAN |
| 07.05.02.04<br>PRO-P: Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit | 01 - Terwujudnya profesionalisme dan kesejahteraan prajurit yang meningkat | 01 - Jumlah sarpras profesionalisme dan kesejahteraan prajurit yang dibangun | 2 | 5 jenis | 2.429.151,0 | KEMENTERIAN PERTAHANAN |
| 07.05.02.05<br>PRO-P: Pembangunan Pertahanan Siber | 01 - Terlaksananya pembangunan pertahanan siber | 01 - Jumlah sistem siber pertahanan yang dibangun | 4 | 2 sistem | 62.335,0 | KEMENTERIAN PERTAHANAN |
| 07.05.02.06<br>PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan | 01 - Jenis alpalhankam industri pertahanan yang diadakan | 01 - Jenis alpalhankam industri pertahanan yang diadakan | 5 | 1 jenis | 3.190.358,4 | KEMENTERIAN PERTAHANAN |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.03<br>KP: Penguatan Keamanan Laut | 01 - Terwujudnya penguatan keamanan laut | 01 - Angka pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di laut | 4 | 224 jumlah | 1.538.197,3 | |
| 07.05.03.02<br>PRO-P: Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut | 01 - Terlaksananya operasi keamanan laut yang kuat | 01 - Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | 4 | 100 % | 1.537.193,5 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN PERTAHANAN, BADAN KEAMANAN LAUT |
| 07.05.03.03<br>PRO-P: Peningkatan Penyelesaian Kasus Keamanan Laut | 01 - Terwujudnya penyelesaian kasus keamanan laut yang meningkat | 01 - *Clearance rate* tindak pidana laut | 4 | 80 % | 1.003,9 | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
| 07.05.04<br>KP: Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | 01 - Terwujudnya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat | 01 - Angka prevalensi penyalahguna narkotika | 1 | 1,69 % | 4.157.537,4 | |
| | | 02 - *Crime rate* | 4 | 111 /100.000 penduduk | | |
| | | 03 - Pelayanan publik Polri yang prima | 4 | 9 % | | |
| 07.05.04.01<br>PRO-P: Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika | 001 - Meningkatnya Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika | 01 - *Clearance rate* tindak pidana narkotika | 1 | 88 % | 63.134,0 | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN), KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| | | 02 - Jumlah kawasan yang pulih dari tanaman terlarang | 5 | 3 kawasan | | |
| 07.05.04.02<br>PRO-P: Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika | 01 - Meningkatnya pencegahan penyalahgunaan dan rehabilitasi penyalahguna narkotika | 01 - Indeks Ketahanan Diri Remaja | 1 | 53,00 | 91.033,5 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN), KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | 02 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika aspek fisik | 1 | 7,5 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 03 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika aspek psikologis | 1 | 7,5 % | | |
| | | 04 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika aspek hubungan sosial | 1 | 6,5 % | | |
| | | 05 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika aspek sumber daya lingkungan | 1 | 5,5 % | | |
| | | 06 - Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi | 4 | 3,16 | | |
| 07.05.04.03 PRO-P: Penanganan Kasus TPPO, serta Kejahatan terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya | 01 - Tertanganinya kasus TPPO, serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya | 01 - *Clearance rate* tindak pidana TPPO serta kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan | 4 | 84 % | 9.772,3 | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
| 07.05.04.04 PRO-P: Peningkatan Layanan Kepolisian yang Presisi sebagai Kelanjutan Promoter | 01 - Terlaksananya peningkatan layanan kepolisian yang Presisi sebagai kelanjutan promoter | 01 - Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian | 4 | 8,4 | 86.824,5 | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
| | | 02 - *Clearance rate* | 4 | 66 % | | |
| | | 03 - *Clearance rate* tindak pidana kejahatan perbankan dan TPPU | 4 | 59 % | | |

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.04.05<br>PRO-P: Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Dukungan Layanan Kepolisian | 01 - Terlaksananya pengadaan almatsus dan alpalkam dukungan layanan kepolisian | 01 - Jumlah almatsus dan alpalkam kepolisian | 2 | 6 paket | 3.308.260,8 | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
| | | 02 - Persentase almatsus dan alpalkam kontribusi industri pertahanan | 5 | 35 % | | |
| 07.05.04.06<br>PRO-P: Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Anggota Polri | 01 - Meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polri | 01 - Jumlah personel yang tersertifikasi diklat profesional | 1 | 4.500 personel | 598.512,3 | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
| | | 02 - Jumlah unit pemenuhan rumah negara | 2 | 603 unit | | |
| | | 03 - Jumlah rumah sakit yang dibangun/meningkat akreditasinya | 2 | 1 unit | | |
| | | 04 - Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat | 4 | 79 % | | |
| 07.05.05<br>KP: Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber | 01 - Terwujudnya ketahanan dan keamanan siber yang kuat | 01 - Skor Global *Cyber Security Index* | 1, 2 | 88,54 | 170.323,8 | |
| 07.05.05.01<br>PRO-P: Pembangunan dan Penguatan Tim Cepat Tanggap Keamanan Siber | 01 - Terlaksananya pembangunan tim cepat tanggap keamanan siber yang kuat | 01 - Skor Pilar *Technical* pada Global *Cybersecurity Index* (GCI) | 2 | 17,1 | 10.901,0 | BADAN INTELIJEN NEGARA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA |
| 07.05.05.02<br>PRO-P: Penguatan Infrastruktur, SDM, dan Regulasi Keamanan Siber | 01 - Terlaksananya pembangunan infrastruktur, SDM, dan regulasi keamanan siber yang kuat | 01 - Skor Pilar *Organizational* pada *Global Cybersecurity Index* (GCI) | 4 | 13,3 | 123.952,8 | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, BADAN INTELIJEN NEGARA |
| | | 02 - Skor Pilar *Technical* pada *Global Cybersecurity Index* (GCI) | 2 | 17,1 | | |
| | | 03 - Skor Pilar *Capacity Development* pada *Global Cybersecurity Index* (GCI) | 1 | 18,90 | | |

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| PN/PP/KP/ProP | Sasaran | Indikator | Dukungan Terhadap Arahan Presiden | Target | Rp. Juta | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.05.03<br>PRO-P: Penyelesaian Kejahatan Siber | 01 - Terlaksananya penyelesaian kejahatan bidang siber | 01 - *Clearance rate* tindak pidana siber | 5 | 64 % | 19.378,9 | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA |
| 07.05.05.04<br>PRO-P: Pencegahan Kejahatan Siber dan Peningkatan Kerja Sama Internasional Bidang Siber | 01 - Terwujudnya pencegahan kejahatan siber melalui peningkatan kerja sama internasional bidang siber | 01 - Skor Pilar *Cooperation* pada *Global Cybersecurity Index* (GCI) | 1, 5 | 13,9 | 16.091,1 | BADAN INTELIJEN NEGARA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA |

CATATAN:
(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
(2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus, dan KPBU, belum mencakup dukungan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
(3) Alokasi DAK merupakan pagu alokasi per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2023;
(4) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L, DAK Fisik, dan KPBU pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan;
(5) Dukungan Terhadap Arahan Presiden: 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia; 2. Pembangunan Infrastruktur; 3. Penyederhanaan Regulasi; 4. Penyederhanaan Birokrasi; dan 5. Transformasi Ekonomi.

KETERANGAN:
(a) *multitagging*.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 017434 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 134 TAHUN 2022

TENTANG

PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2023

MATRIKS PROYEK PRIORITAS STRATEGIS/*MAJOR PROJECT*

SK No 157558 A

**PRESIDEN**
**REPUBLIK INDONESIA**

PEMUTAKHIRAN MATRIKS PROYEK PRIORITAS STRATEGIS/*MAJOR PROJECT*
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023

| Prioritas Nasional/*Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| PN 1: MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN | | |
| 1) MP: Industri 4.0 pada 7 Subsektor Industri Prioritas | | |
| Dukungan Belanja K/L | 356.415,8 | |
| *Sub: Perbaikan Alur Aliran Material* | | |
| *Aspek: Fasilitasi Standardisasi* | | |
| Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) yang diterbitkan | 2.000,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| *Aspek: Pemetaan dan ketersediaan data bahan baku/penolong* | | |
| Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan | 2.000,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Perbaikan Rantai Pasok di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar | 4.500,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| *Aspek: Peningkatan produksi dan pasokan dalam negeri* | | |
| Sentra IKM dan UPT Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan Yang Mendapat Fasilitasi | 3.926,6 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| *Aspek: Peningkatan Standar dan Kualitas Produk* | | |
| Rancangan SNI, ST dan/atau PTC | 5.764,4 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| *Sub: Peningkatan Investasi dan Promosi Ekspor* | | |
| *Aspek: Kerjasama Perdagangan Internasional* | | |
| Sosialisasi Pemanfaatan Hasil Perundingan Perdagangan Internasional | 2.497,5 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| Kerja Sama Akses Perdagangan dan Investasi Forum APEC | 1.227,3 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| Kerja Sama Fasilitasi Perdagangan dan Investasi Forum APEC | 1.560,0 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| Kerja Sama Perdagangan ASEAN-Canada | 1.261,0 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| Kerja Sama Perdagangan dalam RCEP | 1.022,1 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| Kerja Sama Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN Lainnya | 1.448,3 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| *Aspek: Pendampingan investasi prioritas* | | |
| Investor yang terfasilitasi dalam rangka pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian | 1.500,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| *Aspek: Pengembangan dan Promosi Produk Ekspor* | | |
| Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional | 10.750,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| *Aspek: Peningkatan partisipasi industri nasional pada GPN dan GVC* | | |
| Partisipasi Aktif pada Konferensi Tingkat Menteri, Pertemuan Informal Tingkat Menteri, Sidang Isu Spesifik dan Sidang Reguler terkait Organisasi Perdagangan Dunia | 2.042,8 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |



SK No 168222 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| *Aspek: Penyusunan Fasilitas dan Insentif Ekspor* | | |
| Fasilitasi FTA *Center* Jakarta | 4.102,8 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| Fasilitasi FTA *Center* Bandung | 3.069,3 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| Fasilitasi FTA *Center* Semarang | 1.940,0 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| *Sub: Peningkatan Investasi dan Promosi Ekspor* | | |
| *Aspek: Penyusunan Profil Investasi* | | |
| *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) di bidang Industri Manufaktur | 1.200,0 | KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| *Sub: Pemberdayaan UMKM* | | |
| *Aspek: Inkubasi teknologi dan usaha* | | |
| UMKM yang Difasilitasi dalam Inkubator Bisnis | 3.500,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| *Aspek: Skema insentif untuk transfer teknologi* | | |
| Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Mendapat Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual | 2.000,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| Pelaku Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Mendapat Fasilitasi Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual | 3.000,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| *Aspek: Pembinaan UMKM dan pelaku usaha* | | |
| SDM Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Sertifikasi | 3.000,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| Wirausaha Industri Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi serta Fasilitasi Mesin/Peralatan | 168.166,3 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan | 6.223,4 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan | 4.250,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Rangka Penerapan *Making* Indonesia 4.0 | 5.878,2 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| *Aspek: Dorongan P3DN Produk UKM* | | |
| Sertifikasi Produk | 40.000,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| *Sub: Pembentukan Ekosistem Inovasi dan Adopsi Teknologi* | | |
| *Aspek: Pendampingan industri* | | |
| Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan | 2.000,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| Memfasilitasi Implementasi Industri 4.0 Sektor Tekstil dan *Apparel* | 1.580,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| *Aspek: Pemetaan teknologi industri 4.0 dan mengidentifikasi kekosongan teknologi* | | |
| Layanan Perencanaan dan Penganggaran | 1.000,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| *Sub: Harmonisasi Peraturan dan Kebijakan* | | |
| *Aspek: Penyusunan Kebijakan Sektoral dan teknis* | | |
| Kebijakan Penurunan Hambatan Akses Pasar | 19.594,3 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| Kebijakan Sektor Jasa | 1.297,3 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |



SK No 168223 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Industrial *Intelligence* dan Peluang Kerja Sama Industri di Luar Negeri | 7.000,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| Penelitian Pengawasan Persaingan Usaha | 1.263,9 | KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) |
| Dukungan BUMN | 5.086.960,0 | |
| Optimalisasi dan Efisiensi Pabrik NPK | | BUMN |
| Optimalisasi dan Efisiensi Pabrik Pusri-IIIB | | BUMN |
| Pembangunan Fasilitas Produksi Kimia Dasar *Intermediate* dan Bahan Baku Obat (BBO) | | BUMN |
| Pembangunan Pabrik Methanol Papua Barat | | BUMN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Pabrik Soda Ash PKG | | BUMN |
| Pabrik Soda Ash PKT | | BUMN |
| Pembangunan Pabrik Nitrobenzene dan PAP di Cilacap | | BUMN |
| Pembangunan Pabrik Minyak Goreng Kapasitas 2.500-ton CPO/hari di KEK Sei Mangkei | | BUMN |
| Pengembangan Fasilitas Pilot *Scale* Untuk Pengembangan *Platform* Vaksin mRNA dan Viral Vector | | BUMN |
| Pendirian Pabrik untuk Peningkatan Fasilitas *Natural Extract* Alat Kesehatan Domestik | | BUMN |
| Dukungan Swasta | 12.889.300,0[a] | |
| Pembangunan Pabrik Petrokimia | | Swasta |
| Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit | | Swasta |
| Pembangunan Pabrik Semikonduktor | | Swasta |
| Pembangunan Pabrik Kendaraan Listrik | | Swasta |
| Pembangunan Pabrik Baterai Kendaraan Listrik | | Swasta |
| Pembangunan Industri Gula Terintegrasi | | Swasta |
| Penerapan Program *Environment, Social and Governance* (ESG) Industri Kosmetik | | Swasta |
| Pengembangan Industri Pengolahan Daging | | Swasta |
| 2) MP: Destinasi Pariwisata Prioritas | | |
| Dukungan Belanja K/L dan DAK | 3.520.144,3 | |
| *Sub: Pembangunan dalam Wilayah dan Kawasan* | | |
| *Aspek: Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif* | | |
| Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja | 142.398,1 | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN |
| PBK UPTP | 319.275,1 | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN |
| PBK Provinsi Jawa Tengah | 36.388,8 | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN |
| PBK Provinsi Sumatera Utara | 6.240,0 | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN |
| PBK Provinsi Sulawesi Utara | 2.155,4 | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN |
| PBK Provinsi Nusa Tenggara Barat | 9.680,0 | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN |
| PBK Provinsi Nusa Tenggara Timur | 3.600,0 | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN |
| Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, *SAVE*, dan Bahari) | 11.300,0 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Terintegrasi dengan PSN) |

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| SDM dan Industri Pariwisata yang memperoleh fasilitas Pengembangan Kompetensi dari Badan Otorita Danau Toba | 1.000,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| SDM dan Industri Pariwisata yang memperoleh fasilitas Pengembangan Kompetensi dari Badan Otorita Borobudur | 2.250,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| SDM dan Industri Pariwisata yang memperoleh Fasilitas Pengembangan Kompetensi dari Badan Otorita Labuan Bajo Flores | 1.500,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| Standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Anak dalam PHAPL yang Ramah Anak | 336,0 | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PKAK | 800,0 | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| *Aspek: Penguatan Kelembagaan, Regulasi, Investasi dan Pemasaran* | | |
| *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) pada Destinasi Pariwisata Prioritas - Pusat | 1.050,0 | KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| Promosi Terpadu | 11.000,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| Promosi Terpadu (Pameran, Misi Penjualan, Perjalanan Wisata Pengenalan dan Kerjasama dengan Maskapai dan Wholesaler) | 18.980,2 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| Publikasi | 134.000,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| Potensial investor yang difasilitasi Badan Otorita Danau Toba | 2.200,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| Potensial investor yang difasilitasi Badan Otorita Borobudur | 5.000,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| Rencana Induk Destinasi Pariwisata Prioritas (ITMP) | 6.000,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| Potensial investor yang difasilitasi Badan Otorita Labuan Bajo Flores | 500,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| *Aspek: Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif* | | |
| Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1215 - Kab. Humbang Hasundutan) | 7.749,8 | DAK |
| Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3374 - Kota Semarang) | 8.148,8 | DAK |
| Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3576 - Kota Mojokerto) | 8.148,8 | DAK |
| Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5202 - Kab. Lombok Tengah) | 7.648,8 | DAK |
| Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5312 - Kab. Ngada) | 8.113,3 | DAK |
| Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (8272 - Kota Tidore Kepulauan) | 7.141,4 | DAK |



SK No 168225 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1205 - Kab. Tapanuli Utara) | 995,4 | DAK | |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1209 - Kab. Simalungun) | 6.249,5 | DAK | |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1210 - Kab. Dairi) | 4.925,5 | DAK | |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1211 - Kab. Karo) | 2.986,2 | DAK | |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1215 - Kab. Humbang Hasundutan) | 777,7 | DAK | |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1216 - Kab. Pakpak Bharat) | 3.888,6 | DAK | |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1217 - Kab. Samosir) | 20.739,1 | DAK | |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1903 - Kab. Bangka Barat) | 9.953,9 | DAK | |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1905 - Kab. Bangka Selatan) | 2.020,6 | DAK | |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1906 - Kab. Belitung Timur) | 500,0 | DAK | |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3306 - Kab. Purworejo) | 7.465,4 | DAK | |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3307 - Kab. Wonosobo) | 4.777,9 | DAK | |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3308 - Kab. Magelang) | 572,1 | DAK | |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3309 - Kab. Boyolali) | 1.990,8 | DAK | |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3310 - Kab. Klaten) | 1.095,2 | DAK | |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3312 - Kab. Wonogiri) | 831,0 | DAK | |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3314 - Kab. Sragen) | 16.009,9 | DAK | |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3322 - Kab. Semarang) | 9.456,2 | DAK | |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3374 - Kota Semarang) | 6.619,3 | DAK | |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3401 - Kab. Kulon Progo) | 905,8 | DAK | |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3508 - Kab. Lumajang) | 2.364,1 | DAK | |



SK No 168226 A

| Prioritas Nasional/*Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3514 - Kab. Pasuruan) | 500,0 | DAK |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3575 - Kota Pasuruan) | 12.691,2 | DAK |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3576 - Kota Mojokerto) | 18.790,4 | DAK |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5202 - Kab. Lombok Tengah) | 12.243,3 | DAK |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5208 - Kab. Lombok Utara) | 10.639,1 | DAK |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5271 - Kota Mataram) | 4.414,9 | DAK |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5312 - Kab. Ngada) | 2.082,0 | DAK |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5315 - Kab. Manggarai Barat) | 11.944,7 | DAK |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7105 - Kab. Minahasa Selatan) | 6.400,4 | DAK |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7171 - Kota Manado) | 14.184,3 | DAK |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7407 - Kab. Wakatobi) | 5.184,8 | DAK |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7471 - Kota Kendari) | 8.510,6 | DAK |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7472 - Kota Bau Bau) | 3.981,6 | DAK |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (8207 - Kab. Pulau Morotai) | 10.369,6 | DAK |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (8272 - Kota Tidore Kepulauan) | 8.407,6 | DAK |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9107 - Kab. Sorong) | 9.175,0 | DAK |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9108 - Kab. Raja Ampat) | 4.977,0 | DAK |
| Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9171 - Kota Sorong) | 1.393,5 | DAK |
| Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Tata kelola Koperasi Modern | 5.586,0 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Usaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT) | 4.180,1 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Bahan rumusan skema insentif bagi industri kreatif Kuliner, Kriya , Desain Interior, Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk dan Fesyen | 840,8 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |



SK No 168227 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Produk kreatif subsektor Kuliner, Kriya, Desain Interior, Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk dan Fesyen yang mendapat pendampingan dan inkubasi | 18.130,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| Produk kreatif subsektor Seni Musik, Film, Animasi, Video, Fotografi, Periklanan, Penerbitan, Seni Pertunjukan, Seni Rupa yang mendapat pendampingan dan inkubasi | 5.531,7 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| Produk Wisata dan Kegiatan (*Events*) di Kawasan Badan Otorita Danau Toba yang di promosi dan di publikasikan | 2.600,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| Produk Wisata dan Kegiatan (*Events*) di Kawasan Badan Otorita Borobudur yang di promosi dan di publikasikan | 3.500,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| Produk Wisata dan Kegiatan (*Events*) di Kawasan Badan Otorita Labuan Bajo Flores yang di Publikasikan | 4.389,4 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| *Aspek: Pengembangan Infrastruktur Wilayah* | | |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1206 - Kab. Toba) | 1.856,7 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1210 - Kab. Dairi) | 1.779,0 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1217 - Kab. Samosir) | 1.407,7 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1902 - Kab. Belitung) | 2.758,0 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1903 - Kab. Bangka Barat) | 1.864,9 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1905 - Kab. Bangka Selatan) | 4.068,6 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3304 - Kab. Banjarnegara) | 3.052,3 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3306 - Kab. Purworejo) | 1.108,4 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3307 - Kab. Wonosobo) | 1.634,7 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3309 - Kab. Boyolali) | 4.068,6 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3310 - Kab. Klaten) | 1.108,4 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3314 - Kab. Sragen) | 1.634,7 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3322 - Kab. Semarang) | 1.927,9 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3374 - Kota Semarang) | 1.927,9 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3401 - Kab. Kulon Progo) | 2.029,4 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3508 - Kab. Lumajang) | 2.128,1 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3514 - Kab. Pasuruan) | 4.658,9 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3575 - Kota Pasuruan) | 1.137,6 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5208 - Kab. Lombok Utara) | 2.082,8 | DAK |



SK No 168228 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5271 - Kota Mataram) | 1.108,4 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5312 - Kab. Ngada) | 2.687,2 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5315 - Kab. Manggarai Barat) | 1.766,3 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7105 - Kab. Minahasa Selatan) | 4.594,9 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7171 - Kota Manado) | 1.053,0 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7172 - Kota Bitung) | 2.197,1 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7407 - Kab. Wakatobi) | 1.914,0 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7471 - Kota Kendari) | 1.634,7 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7472 - Kota Bau Bau) | 1.766,3 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9107 - Kab. Sorong) | 2.368,2 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9108 - Kab. Raja Ampat) | 3.420,7 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9109 - Kab. Tambrauw) | 1.355,1 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (8272 - Kota Tidore Kepulauan) | 1.789,3 | DAK |
| Pusat Informasi Geologi | 7.251,5 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| Warisan Geologi dan Geopark Nasional yang Ditetapkan | 3.000,0 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| Akses Internet | 422.320,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Kabupaten/Kota Kreatif yang Dikembangkan | 21.000,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| Sarana Ruang Kreatif yang Difasilitasi | 17.500,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| Ruang Kreatif untuk Pendukungan Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas | 1.000,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN) |
| Amenitas dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Danau Toba | 2.660,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| Amenitas dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Borobudur | 6.351,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| *Be Creative District* (BCD) yang Dikembangkan | 750,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| Amenitas, dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Labuan Bajo Flores | 1.000,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |



SK No 168229 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya dan Istana | 103.776,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Penataan Bangunan Kawasan Destinasi Wisata | 100.674,4 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Penataan Bangunan Kawasan Cagar Budaya dan Permukiman Tradisional | 62.818,4 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Penataan Kawasan Destinasi Wisata Danau Toba | 81.287,8 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Penataan Kawasan Destinasi Wisata Borobudur | 200,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Penataan Kawasan Destinasi Wisata Wakatobi | 67.891,7 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Penataan Kawasan Destinasi Wisata Bromo - Tengger - Semeru | 44.413,5 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Polsek (PN) | 15.814,3 | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
| *Sub: Pembangunan Desa Wisata dan Fasilitasi BUMDes* | | |
| *Aspek: Pengembangan Desa dan BUMDes Berbasis Pariwisata* | | |
| Sarana Prasarana Desa Wisata yang Dibangun untuk Mendukung Destinasi Pariwisata | 68.914,2 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN) |
| Masyarakat Pelaku Wisata yang Ditingkatkan Kapasitasnya untuk Mendukung Desa Wisata | 1.500,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN) |
| Desa Wisata di Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi I yang dikembangkan | 11.000,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN) |
| Desa Wisata di Wilayah Destinasi II yang Dikembangkan | 1.100,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| *Sub: Perintisan Destinasi Pariwisata* | | |
| *Aspek: Pengembangan Atraksi(Alam,Budaya, Buatan)* | | |
| Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan | 14.300,0 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Destinasi Wisata Alam *Science, Academic, Voluntary, Education* yang Dikembangkan | 33.150,0 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Destinasi Wisata Alam Bahari yang Dikembangkan | 4.307,0 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Kejuaraan Multi *event* olahraga prestasi di tingkat regional dan internasional yang terfasilitasi | 89.000,1 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| Warisan Budaya yang Dilindungi | 28.362,1 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3320 - Kab. Jepara) | 3.859,1 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3322 - Kab. Semarang) | 2.438,4 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3374 - Kota Semarang) | 3.698,4 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3401 - Kab. Kulon Progo) | 1.775,6 | DAK |



SK No 168230 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3501 - Kab. Pacitan) | 7.379,2 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3508 - Kab. Lumajang) | 1.806,2 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3513 - Kab. Probolinggo) | 2.379,7 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3514 - Kab. Pasuruan) | 13.562,6 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3575 - Kota Pasuruan) | 5.939,4 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3576 - Kota Mojokerto) | 18.589,4 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5202 - Kab. Lombok Tengah) | 5.036,8 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5208 - Kab. Lombok Utara) | 15.574,9 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5271 - Kota Mataram) | 10.739,8 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5312 - Kab. Ngada) | 2.218,8 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5315 - Kab. Manggarai Barat) | 7.590,0 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7105 - Kab. Minahasa Selatan) | 8.259,0 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7171 - Kota Manado) | 2.545,8 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7172 - Kota Bitung) | 7.284,4 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7407 - Kab. Wakatobi) | 13.900,8 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7471 - Kota Kendari) | 2.246,2 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7472 - Kota Bau Bau) | 7.235,6 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (8207 - Kab. Pulau Morotai) | 6.312,5 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (8272 - Kota Tidore Kepulauan) | 2.591,9 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9107 - Kab. Sorong) | 2.402,2 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9108 - Kab. Raja Ampat) | 4.461,9 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9109 - Kab. Tambrauw) | 3.449,4 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9171 - Kota Sorong) | 4.787,6 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1205 - Kab. Tapanuli Utara) | 16.998,5 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1206 - Kab. Toba) | 16.145,1 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1209 - Kab. Simalungun) | 8.089,8 | DAK |



SK No 168231 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1210 - Kab. Dairi) | 2.360,3 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1211 - Kab. Karo) | 7.531,8 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1215 - Kab. Humbang Hasundutan) | 2.115,5 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1216 - Kab. Pakpak Bharat) | 3.350,4 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1217 - Kab. Samosir) | 15.140,8 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1902 - Kab. Belitung) | 1.126,3 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1903 - Kab. Bangka Barat) | 2.306,0 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1905 - Kab. Bangka Selatan) | 15.315,4 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1906 - Kab. Belitung Timur) | 4.781,0 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3304 - Kab. Banjarnegara) | 5.458,7 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3306 - Kab. Purworejo) | 5.066,1 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3307 - Kab. Wonosobo) | 9.738,4 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3308 - Kab. Magelang) | 11.182,9 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3310 - Kab. Klaten) | 6.027,0 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3312 - Kab. Wonogiri) | 5.110,4 | DAK |
| Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3314 - Kab. Sragen) | 1.097,2 | DAK |
| Sarana prasarana Wisata Bahari | 7.300,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Pembangunan Pusat Jajanan Kuliner dan Cinderamata (PJKC) (P3DN) | 6.000,0 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| *Sub: Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata* | | |
| *Aspek: Pengembangan Amenitas Pariwisata* | | |
| Amenitas Wisata yang dibangun/dikembangkan | 4.557,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas Pariwisata di Destinasi Pariwisata Prioritas Regional II yang Dikembangkan | 1.500,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN) |
| Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas Pariwisata di Destinasi Pariwisata Prioritas di Wilayah Destinasi I yang Dikembangkan | 2.300,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| *Sub: Pembangunan Bandara dan Pelabuhan* | | |
| *Aspek: Pembangunan Sarpras Konektivitas Udara* | | |
| Pengembangan Bandar Udara Matahora - PN | 4.063,6 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pengembangan Bandar Udara DEO-Sorong, Papua Barat | 60.000,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pengembangan Bandar Udara Morotai - PN | 2.000,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pengembangan Bandar Udara Sibisa - PN | 9.433,2 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |



SK No 168232 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| *Aspek: Pembangunan Sarpras Konektivitas Laut* | | |
| Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati Kab. Raja Ampat Tahap II - SBSN | 5.493,3 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta Kab. Raja Ampat Tahap II - SBSN | 2.500,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Dalam Tahap V | 14.948,7 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pembangunan Pelabuhan Onan Rungu Tahap III - Provinsi Sumatera Utara | 17.165,5 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pembangunan Pelabuhan Sipinggan Tahap IV - Provinsi Sumatera Utara | 22.807,8 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pemenuhan Kapal Pemburu Cepat (PN) | 23.000,0 | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
| *Sub: Pembangunan Jalan di DPP* | | |
| *Aspek: Pembangunan Sarpras Konektivitas Jalan, Darat, dan KA* | | |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1205 - Kab. Tapanuli Utara) | 11.055,8 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1206 - Kab. Toba) | 10.946,0 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1210 - Kab. Dairi) | 1.819,3 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1211 - Kab. Karo) | 6.745,0 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1215 - Kab. Humbang Hasundutan) | 10.783,9 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1216 - Kab. Pakpak Bharat) | 13.452,8 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1217 - Kab. Samosir) | 11.323,7 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1902 - Kab. Belitung) | 10.576,8 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1903 - Kab. Bangka Barat) | 10.408,5 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1905 - Kab. Bangka Selatan) | 10.521,9 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1906 - Kab. Belitung Timur) | 10.032,7 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3307 - Kab. Wonosobo) | 10.520,7 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3310 - Kab. Klaten) | 9.259,7 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3312 - Kab. Wonogiri) | 8.455,2 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3314 - Kab. Sragen) | 12.995,0 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3401 - Kab. Kulon Progo) | 12.075,7 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3501 - Kab. Pacitan) | 10.559,6 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3575 - Kota Pasuruan) | 7.181,7 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3576 - Kota Mojokerto) | 11.042,4 | DAK |



SK No 168233 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5202 - Kab. Lombok Tengah) | 8.302,1 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5208 - Kab. Lombok Utara) | 8.568,5 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5312 - Kab. Ngada) | 12.978,4 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5315 - Kab. Manggarai Barat) | 11.585,1 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7105 - Kab. Minahasa Selatan) | 8.179,6 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7172 - Kota Bitung) | 8.792,8 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7407 - Kab. Wakatobi) | 12.592,0 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7472 - Kota Bau Bau) | 14.643,4 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (8207 - Kab. Pulau Morotai) | 10.409,5 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (8272 - Kota Tidore Kepulauan) | 8.990,0 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9107 - Kab. Sorong) | 15.587,5 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9108 - Kab. Raja Ampat) | 12.311,7 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9109 - Kab. Tambrauw) | 15.771,9 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9171 - Kota Sorong) | 13.490,7 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (12 - Provinsi Sumatera Utara) | 10.932,3 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (19 - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) | 10.017,3 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (33 - Provinsi Jawa Tengah) | 9.950,0 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (34 - Provinsi DI Yogyakarta) | 14.655,5 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (35 - Provinsi Jawa Timur) | 9.744,0 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (52 - Provinsi Nusa Tenggara Barat) | 10.042,1 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (53 - Provinsi Nusa Tenggara Timur) | 12.987,0 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (71 - Provinsi Sulawesi Utara) | 7.752,5 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (74 - Provinsi Sulawesi Tenggara) | 10.006,0 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (82 - Provinsi Maluku Utara) | 12.204,5 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (91 - Provinsi Papua Barat) | 13.987,7 | DAK |
| Peningkatan Jalur KA Lintas Kisaran - Rantauprapat Tahap I Segmen Kisaran - Mambangmuda | 170.103,6 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Reaktivasi Jalur Kereta Api Antara Stasiun Semarang Tawang - Pelabuhan Tanjung Mas | 23.311,5 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |



SK No 168234 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Dukungan BUMN | 24.736.816,3 | |
| Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulonprogo | | BUMN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta –Bawen | | BUMN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Mandalika Urban & Tourism Project | | BUMN |
| Penambahan Lingkup Jalan Tol Ngawi - Kertosono – Kediri | | BUMN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Roadmap HIG sesuai dengan 7 pilar strategi untuk mewujudkan visi pembentukan holding hotel BUMN | | BUMN |
| Kerja sama BOT Hotel Bintang 3 dengan PT Hotel Karya Indonesia | | BUMN |
| Revitalisasi Kawasan Grand Inna Bali Beach seluas 41.3 Ha menuju KEK Pariwisata Kesehatan | | BUMN |
| Pembangunan RS bertaraf Internasional bekerjasama dengan Mayo clinic | | BUMN |
| Pembangunan Hotel Bintang 4 untuk Infrastruktur Dasar dan Fasilitas Penunjang Kawasan Pariwisata Tana Mori di Labuan Bajo | | BUMN (Terintegrasi dengan PSN) |
| KEK Kesehatan GIBB Sanur | | BUMN (Terintegrasi dengan PSN) |
| *TMII The Ultimate Showcase* of Indonesia | | BUMN |
| Zone 2 DPSP Borobudur – Development | | BUMN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Pengembangan Bali *Maritime Tourism* Hub (BMTH) | | BUMN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Dukungan Swasta | 209.300,0 a) | |
| Pengembangan Kawasan Pariwisata Tana Mori | | Swasta |
| Pembangunan Hotel dan Resort | | Swasta |
| 3) MP: Kawasan Industri Prioritas dan Smelter | | |
| Dukungan Belanja K/L | 173.399,3 | |
| *Sub: Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Penyediaan SDM* | | |
| *Aspek: Penyediaan SDM* | | |
| Mahasiswa dan Lulusan Program DII, DIII dan DIV Reguler | 76.017,6 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| Mahasiswa dan Lulusan Program DI Kerjasama Industri | 3.486,3 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| *Sub: Peningkatan Investasi dan Promosi Ekspor* | | |
| *Aspek: Peningkatan Investasi* | | |
| Hasil Monitoring Pembangunan Fasilitas Pengolahan Pemurnian Mineral dalam Negeri | 2.619,2 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi Wilayah IV - Pusat | 1.873,5 | KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| Eksekusi Realisasi Investasi Proyek-Proyek Mangkrak Di Wilayah Timur - Pusat | 1.000,0 | KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi Wilayah II - Pusat | 1.879,5 | KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) - Pusat | 34.000,0 | KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi Wilayah III | 1.374,3 | KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |



SK No 168235 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Analisis Negara Target dan Negara Pesaing | 4.100,0 | KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| Layanan Pendampingan Keberlanjutan Investasi | 3.631,4 | KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| Website Penanaman Modal | 1.500,0 | KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi | 2.300,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan | 1.250,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Industri logam yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas | 1.000,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| *Aspek: Promosi Ekspor* | | |
| Rekomendasi Kebijakan terkait Tindak Lanjut Pelaksanaan Perundingan | 1.989,8 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| *Sub: Pembangunan Infrastruktur KI dan Smelter* | | |
| *Aspek: Infrastruktur Dalam Kawasan* | | |
| Rehabilitasi Kawasan Industri Palu dan Pirnas | 14.200,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| *Sub: Harmonisasi Regulasi dan Lainnya* | | |
| *Aspek: Harmonisasi Regulasi* | | |
| Draft Kebijakan Rencana Produksi dan Pemanfaatan Batubara Untuk Kebutuhan Dalam Negeri Mineral Logam dan Batubara | 1.250,0 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| Tingkat Implementasi P3DN dan Peningkatan TKDN pada Subsektor Pertambangan Mineral | 3.451,1 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| Rekomendasi Kebijakan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan | 1.150,0 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| Industri Smelter Logam Bukan Besi yang termonitor dan terevaluasi perkembangannya | 1.500,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| Dukungan BUMN | 31.639.690,0 | |
| Pekerjaan Infrastruktur Kawasan Industri Batang | | BUMN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Kawasan Industri Subang/Rebana *Technopolis* Subang | | BUMN |
| Pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) | | BUMN |
| Pembangunan Smelter Pengolahan Tembaga dan Anode Slime | | BUMN |
| Pengembangan Industri EV *Battery* Terintegrasi | | BUMN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Revitalisasi Tanki LNG Arun | | BUMN |
| Pembangunan Kawasan Industri Takalar | | BUMN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Dukungan Swasta | 1.025.802.080,0 [a)] | |
| Pengembangan dan Pengelolaan KI Tanah Kuning | | Swasta (Terintegrasi dengan PSN) |
| Pembangunan KI Weda Bay | | Swasta |
| Pembangunan KI Ketapang | | Swasta (Terintegrasi dengan PSN) |
| Pembangunan Industri Petrokimia Terintegrasi | | Swasta |
| Pembangunan Infrastruktur KI Sadai | | Swasta |
| Pembangunan Smelter Alumina | | Swasta |



SK No 168236 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Pembangunan Smelter Nikel | | Swasta |
| Pembangunan Pabrik Petrokimia | | Swasta |
| Pembangunan Pabrik *Rotary Kiln Electric Furnace* (RKEF) & *High-Pressure Acid Leach* (HPAL) | | Swasta (Terintegrasi dengan PSN) |
| Pembangunan Pabrik Penambangan Nikel | | Swasta |
| Pembangunan Pabrik Perakitan *Server* | | Swasta |
| 4) MP: Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan | | |
| Dukungan Belanja K/L dan DAK | 7.518.116,3 | |
| *Aspek: Penguatan Kelembagaan Petani dan Nelayan* | | |
| Kelembagaan Usaha Pembudidaya Ikan yang dikembangkan (MP Korporasi) | 3.000,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya (MP Korporasi) | 1.250,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor - Provinsi Jawa Barat | 380,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan | 129.896,4 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor - Provinsi Aceh | 125,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor - Provinsi Sumatera Barat | 295,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor - Provinsi Sumatera Selatan | 225,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor - Provinsi Bengkulu | 205,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor - Provinsi Lampung | 420,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor - Provinsi Jawa Tengah | 430,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor - Provinsi Jawa Timur | 500,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor - Provinsi Nusa Tenggara Barat | 535,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor - Provinsi Kalimantan Timur | 385,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor - Provinsi Sulawesi Tengah | 200,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor - Provinsi Sulawesi Selatan | 435,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| *Aspek: Penerapan Good Agricultural Practices dan Precision Farming/ Agro Maritim 4.0* | | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (11 - Provinsi Aceh) | 20.285,4 | DAK |



SK No 168237 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1104 - Kab. Aceh Tenggara) | 2.218,8 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1111 - Kab. Aceh Utara) | 6.621,8 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1218 - Kab. Serdang Bedagai) | 10.399,6 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1220 - Kab. Padang Lawas Utara) | 5.096,3 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1224 - Kab. Nias Utara) | 7.404,9 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (13 - Provinsi Sumatera Barat) | 20.650,1 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1302 - Kab. Pesisir Selatan) | 5.994,0 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1306 - Kab. Padang Pariaman) | 7.678,6 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1309 - Kab. Pasaman) | 7.994,1 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (14 - Provinsi Riau) | 10.293,2 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1403 - Kab. Indragiri Hilir) | 1.133,7 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1409 - Kab. Rokan Hilir) | 2.905,4 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (15 - Provinsi Jambi) | 13.299,2 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1504 - Kab. Batanghari) | 1.604,0 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1506 - Kab. Tanjung Jabung Timur) | 16.438,1 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1609 - Kab. Ogan Komering Ulu Timur) | 5.352,9 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (17 - Provinsi Bengkulu) | 9.193,0 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1704 - Kab. Kaur) | 4.344,2 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (18 - Provinsi Lampung) | 18.612,6 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1803 - Kab. Lampung Selatan) | 4.944,9 | DAK | |



SK No 168238 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1805 - Kab. Lampung Tengah) | 4.461,3 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1808 - Kab. Tulang Bawang) | 11.691,9 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (19 - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) | 22.947,2 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1905 - Kab. Bangka Selatan) | 6.847,5 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (32 - Provinsi Jawa Barat) | 96.028,8 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3202 - Kab. Sukabumi) | 22.032,7 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3205 - Kab. Garut) | 6.987,4 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3206 - Kab. Tasikmalaya) | 1.917,4 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3207 - Kab. Ciamis) | 1.914,0 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3209 - Kab. Cirebon) | 16.292,8 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3212 - Kab. Indramayu) | 3.499,6 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3213 - Kab. Subang) | 8.838,7 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3214 - Kab. Purwakarta) | 5.062,4 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3215 - Kab. Karawang) | 3.092,4 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (33 - Provinsi Jawa Tengah) | 14.058,4 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3301 - Kab. Cilacap) | 11.045,3 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3307 - Kab. Wonosobo) | 7.361,7 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3311 - Kab. Sukoharjo) | 1.933,0 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3313 - Kab. Karanganyar) | 5.321,0 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3315 - Kab. Grobogan) | 5.864,2 | DAK | |



SK No 168239 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3317 - Kab. Rembang) | 12.721,5 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3320 - Kab. Jepara) | 10.296,8 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3322 - Kab. Semarang) | 10.798,4 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3323 - Kab. Temanggung) | 14.544,0 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3324 - Kab. Kendal) | 4.622,9 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3326 - Kab. Pekalongan) | 4.828,7 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (34 - Provinsi DI Yogyakarta) | 8.825,0 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3404 - Kab. Sleman) | 2.271,7 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (35 - Provinsi Jawa Timur) | 82.238,0 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3510 - Kab. Banyuwangi) | 9.668,8 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3518 - Kab. Nganjuk) | 1.000,0 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3520 - Kab. Magetan) | 1.765,6 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3521 - Kab. Ngawi) | 14.832,3 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3523 - Kab. Tuban) | 1.502,7 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3524 - Kab. Lamongan) | 1.966,9 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3526 - Kab. Bangkalan) | 2.867,7 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3529 - Kab. Sumenep) | 5.449,8 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (36 - Provinsi Banten) | 2.499,7 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3601 - Kab. Pandeglang) | 10.391,1 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3604 - Kab. Serang) | 5.281,7 | DAK |



SK No 168240 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (51 - Provinsi Bali) | 21.254,2 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5108 - Kab. Buleleng) | 2.818,1 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (52 - Provinsi Nusa Tenggara Barat) | 37.001,9 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5203 - Kab. Lombok Timur) | 21.331,8 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5204 - Kab. Sumbawa) | 15.925,7 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5206 - Kab. Bima) | 8.532,8 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5314 - Kab. Rote Ndao) | 6.016,2 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (61 - Provinsi Kalimantan Barat) | 20.280,8 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6103 - Kab. Landak) | 3.176,6 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6112 - Kab. Kubu Raya) | 5.925,4 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (63 - Provinsi Kalimantan Selatan) | 47.726,6 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6306 - Kab. Hulu Sungai Selatan) | 9.338,4 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (64 - Provinsi Kalimantan Timur) | 1.974,8 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6403 - Kab. Kutai Kartanegara) | 2.840,7 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (71 - Provinsi Sulawesi Utara) | 13.287,4 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7101 - Kab. Bolaang Mongondow) | 1.809,7 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7106 - Kab. Minahasa Utara) | 1.670,2 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7107 - Kab. Bolaang Mongondow Utara) | 2.414,3 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (72 - Provinsi Sulawesi Tengah) | 33.473,3 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7203 - Kab. Morowali) | 9.828,0 | DAK | |



SK No 168241 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7204 - Kab. Poso) | 8.874,7 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7205 - Kab. Donggala) | 9.224,2 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7208 - Kab. Parigi Moutong) | 2.325,7 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7209 - Kab. Tojo Una Una) | 2.350,5 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7210 - Kab. Sigi) | 12.975,1 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (73 - Provinsi Sulawesi Selatan) | 35.391,5 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7302 - Kab. Bulukumba) | 29.344,3 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7305 - Kab. Takalar) | 2.110,2 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7306 - Kab. Gowa) | 8.989,2 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7307 - Kab. Sinjai) | 15.114,3 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7308 - Kab. Maros) | 1.699,8 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7309 - Kab. Pangkajene dan Kepulauan) | 2.825,3 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7311 - Kab. Bone) | 13.750,3 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7312 - Kab. Soppeng) | 18.097,0 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7313 - Kab. Wajo) | 6.841,3 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7316 - Kab. Enrekang) | 7.355,7 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7317 - Kab. Luwu) | 13.985,9 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (74 - Provinsi Sulawesi Tenggara) | 8.288,9 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7403 - Kab. Konawe) | 11.768,7 | DAK |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7406 - Kab. Bombana) | 3.622,3 | DAK |



SK No 168242 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7414 - Kab. Buton Tengah) | 7.150,5 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (75 - Provinsi Gorontalo) | 23.753,3 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7503 - Kab. Pohuwato) | 21.381,3 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (76 - Provinsi Sulawesi Barat) | 3.274,1 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7602 - Kab. Polewali Mandar) | 3.542,9 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7603 - Kab. Mamasa) | 6.933,8 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (81 - Provinsi Maluku) | 41.381,9 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8102 - Kab. Maluku Tenggara) | 4.996,3 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8103 - Kab. Maluku Tengah) | 7.499,1 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (82 - Provinsi Maluku Utara) | 32.818,0 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8272 - Kota Tidore Kepulauan) | 19.600,0 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (91 - Provinsi Papua Barat) | 30.899,5 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (9107 - Kab. Sorong) | 5.721,3 | DAK | |
| Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (9108 - Kab. Raja Ampat) | 4.284,5 | DAK | |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (11 - Provinsi Aceh) | 16.837,5 | DAK | |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1111 - Kab. Aceh Utara) | 21.736,2 | DAK | |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (12 - Provinsi Sumatera Utara) | 22.762,3 | DAK | |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1218 - Kab. Serdang Bedagai) | 27.383,4 | DAK | |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1224 - Kab. Nias Utara) | 29.664,5 | DAK | |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (13 - Provinsi Sumatera Barat) | 17.454,2 | DAK | |



SK No 168243 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1302 - Kab. Pesisir Selatan) | 26.014,9 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1306 - Kab. Padang Pariaman) | 35.013,6 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1309 - Kab. Pasaman) | 27.631,8 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (14 - Provinsi Riau) | 23.127,8 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1403 - Kab. Indragiri Hilir) | 23.116,7 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (15 - Provinsi Jambi) | 20.343,9 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1504 - Kab. Batanghari) | 21.929,9 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1506 - Kab. Tanjung Jabung Timur) | 18.933,8 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (16 - Provinsi Sumatera Selatan) | 21.345,7 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1609 - Kab. Ogan Komering Ulu Timur) | 15.692,5 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1610 - Kab. Ogan Ilir) | 23.911,6 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (17 - Provinsi Bengkulu) | 20.260,6 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1704 - Kab. Kaur) | 25.742,1 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (18 - Provinsi Lampung) | 37.122,2 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1803 - Kab. Lampung Selatan) | 18.420,2 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1804 - Kab. Lampung Timur) | 21.712,0 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1808 - Kab. Tulang Bawang) | 33.093,6 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (19 - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) | 19.232,7 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1902 - Kab. Belitung) | 19.159,9 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1905 - Kab. Bangka Selatan) | 24.983,1 | DAK |



SK No 168244 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (21 - Provinsi Kepulauan Riau) | 25.512,9 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (2105 - Kab. Kepulauan Anambas) | 23.196,8 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (33 - Provinsi Jawa Tengah) | 17.954,2 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3307 - Kab. Wonosobo) | 23.365,0 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3312 - Kab. Wonogiri) | 30.725,0 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3317 - Kab. Rembang) | 35.367,4 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3320 - Kab. Jepara) | 10.700,0 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3323 - Kab. Temanggung) | 17.306,3 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3324 - Kab. Kendal) | 15.203,7 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3327 - Kab. Pemalang) | 25.200,0 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (35 - Provinsi Jawa Timur) | 16.761,0 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3515 - Kab. Sidoarjo) | 16.200,0 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3520 - Kab. Magetan) | 2.400,0 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3521 - Kab. Ngawi) | 18.027,9 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3529 - Kab. Sumenep) | 25.914,6 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3601 - Kab. Pandeglang) | 21.568,0 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (52 - Provinsi Nusa Tenggara Barat) | 21.448,6 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5204 - Kab. Sumbawa) | 18.980,2 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5205 - Kab. Dompu) | 18.150,1 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5206 - Kab. Bima) | 18.761,9 | DAK |



SK No 168245 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (53 - Provinsi Nusa Tenggara Timur) | 7.564,3 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5314 - Kab. Rote Ndao) | 16.087,2 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (61 - Provinsi Kalimantan Barat) | 26.841,5 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6112 - Kab. Kubu Raya) | 24.776,8 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (63 - Provinsi Kalimantan Selatan) | 25.299,1 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6306 - Kab. Hulu Sungai Selatan) | 2.136,8 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (65 - Provinsi Kalimantan Utara) | 27.017,8 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6504 - Kab. Nunukan) | 19.480,3 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (71 - Provinsi Sulawesi Utara) | 19.632,9 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7101 - Kab. Bolaang Mongondow) | 26.553,6 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7106 - Kab. Minahasa Utara) | 23.384,6 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7107 - Kab. Bolaang Mongondow Utara) | 16.399,9 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (72 - Provinsi Sulawesi Tengah) | 14.378,0 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7205 - Kab. Donggala) | 24.492,5 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7208 - Kab. Parigi Moutong) | 34.229,3 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7210 - Kab. Sigi) | 20.119,4 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (73 - Provinsi Sulawesi Selatan) | 17.012,8 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7302 - Kab. Bulukumba) | 21.618,7 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7303 - Kab. Bantaeng) | 15.500,0 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7305 - Kab. Takalar) | 23.775,3 | DAK |



SK No 168246 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7306 - Kab. Gowa) | 47.464,1 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7307 - Kab. Sinjai) | 50.107,8 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7308 - Kab. Maros) | 48.881,4 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7309 - Kab. Pangkajene dan Kepulauan) | 18.455,2 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7312 - Kab. Soppeng) | 26.575,7 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7313 - Kab. Wajo) | 25.718,8 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7316 - Kab. Enrekang) | 17.869,0 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7317 - Kab. Luwu) | 23.648,9 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (74 - Provinsi Sulawesi Tenggara) | 18.832,0 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7403 - Kab. Konawe) | 21.528,4 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7414 - Kab. Buton Tengah) | 23.825,1 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (75 - Provinsi Gorontalo) | 25.777,1 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7501 - Kab. Boalemo) | 19.724,6 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7503 - Kab. Pohuwato) | 18.725,2 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (76 - Provinsi Sulawesi Barat) | 20.370,6 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7602 - Kab. Polewali Mandar) | 17.560,7 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7603 - Kab. Mamasa) | 20.465,9 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (81 - Provinsi Maluku) | 24.637,5 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8102 - Kab. Maluku Tenggara) | 25.701,5 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8103 - Kab. Maluku Tengah) | 17.160,2 | DAK |



SK No 168247 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8105 - Kab. Kepulauan Aru) | 19.312,9 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (82 - Provinsi Maluku Utara) | 15.428,3 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8204 - Kab. Halmahera Selatan) | 22.409,2 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8207 - Kab. Pulau Morotai) | 21.274,1 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8271 - Kota Ternate) | 19.506,9 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8272 - Kota Tidore Kepulauan) | 22.697,4 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (91 - Provinsi Papua Barat) | 23.287,9 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (9107 - Kab. Sorong) | 26.457,3 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (9108 - Kab. Raja Ampat) | 23.674,3 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (94 - Provinsi Papua) | 26.368,1 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (9408 - Kab. Kepulauan Yapen) | 27.065,6 | DAK |
| Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (9427 - Kab. Supiori) | 20.861,1 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1309 - Kab. Pasaman) | 6.501,8 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1609 - Kab. Ogan Komering Ulu Timur) | 4.360,9 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3212 - Kab. Indramayu) | 5.701,0 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3301 - Kab. Cilacap) | 3.344,6 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5203 - Kab. Lombok Timur) | 10.281,1 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8103 - Kab. Maluku Tengah) | 12.773,8 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8271 - Kota Ternate) | 12.748,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (11 - Provinsi Aceh) | 16.213,4 | DAK |



SK No 168248 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1104 - Kab. Aceh Tenggara) | 6.300,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1110 - Kab. Bireuen) | 6.400,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1111 - Kab. Aceh Utara) | 3.281,2 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1118 - Kab. Pidie Jaya) | 8.800,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1175 - Kota Subulussalam) | 7.900,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (12 - Provinsi Sumatera Utara) | 24.492,2 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1218 - Kab. Serdang Bedagai) | 22.502,7 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1220 - Kab. Padang Lawas Utara) | 3.143,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1222 - Kab. Labuhanbatu Selatan) | 1.170,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1224 - Kab. Nias Utara) | 7.881,6 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (13 - Provinsi Sumatera Barat) | 14.720,4 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1302 - Kab. Pesisir Selatan) | 22.258,6 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1306 - Kab. Padang Pariaman) | 13.286,5 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1307 - Kab. Agam) | 3.190,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1308 - Kab. Lima Puluh Kota) | 1.900,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1309 - Kab. Pasaman) | 7.791,2 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1312 - Kab. Pasaman Barat) | 3.600,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1375 - Kota Bukit Tinggi) | 1.100,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1376 - Kota Payakumbuh) | 5.200,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1377 - Kota Pariaman) | 1.120,0 | DAK |



SK No 168249 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (14 - Provinsi Riau) | 15.862,5 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1403 - Kab. Indragiri Hilir) | 13.298,1 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1404 - Kab. Pelalawan) | 2.400,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1409 - Kab. Rokan Hilir) | 2.943,7 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (15 - Provinsi Jambi) | 23.564,6 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1504 - Kab. Batanghari) | 9.852,8 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1506 - Kab. Tanjung Jabung Timur) | 4.331,2 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (16 - Provinsi Sumatera Selatan) | 18.975,8 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1609 - Kab. Ogan Komering Ulu Timur) | 20.234,4 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1610 - Kab. Ogan Ilir) | 4.401,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (17 - Provinsi Bengkulu) | 5.779,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1701 - Kab. Bengkulu Selatan) | 6.200,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1704 - Kab. Kaur) | 26.320,7 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (18 - Provinsi Lampung) | 13.852,5 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1803 - Kab. Lampung Selatan) | 6.799,1 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1804 - Kab. Lampung Timur) | 8.221,6 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1805 - Kab. Lampung Tengah) | 3.234,3 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1806 - Kab. Lampung Utara) | 7.180,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1808 - Kab. Tulang Bawang) | 2.763,1 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (19 - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) | 4.783,2 | DAK |



SK No 168250 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1902 - Kab. Belitung) | 5.096,7 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1905 - Kab. Bangka Selatan) | 36.405,1 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (21 - Provinsi Kepulauan Riau) | 4.837,3 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (2105 - Kab. Kepulauan Anambas) | 2.165,6 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (32 - Provinsi Jawa Barat) | 35.760,4 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3202 - Kab. Sukabumi) | 18.505,7 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3203 - Kab. Cianjur) | 6.600,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3204 - Kab. Bandung) | 33.117,2 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3205 - Kab. Garut) | 21.186,9 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3206 - Kab. Tasikmalaya) | 15.926,3 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3207 - Kab. Ciamis) | 11.700,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3209 - Kab. Cirebon) | 8.068,2 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3211 - Kab. Sumedang) | 6.270,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3212 - Kab. Indramayu) | 24.505,5 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3213 - Kab. Subang) | 23.858,7 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3214 - Kab. Purwakarta) | 8.362,3 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3215 - Kab. Karawang) | 15.983,9 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3216 - Kab. Bekasi) | 10.400,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3217 - Kab. Bandung Barat) | 10.085,1 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3273 - Kota Bandung) | 1.060,0 | DAK |



SK No 168251 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (33 - Provinsi Jawa Tengah) | 30.771,7 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3301 - Kab. Cilacap) | 27.137,3 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3302 - Kab. Banyumas) | 10.400,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3307 - Kab. Wonosobo) | 16.173,6 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3311 - Kab. Sukoharjo) | 1.617,1 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3312 - Kab. Wonogiri) | 8.840,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3313 - Kab. Karanganyar) | 7.800,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3315 - Kab. Grobogan) | 18.776,8 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3317 - Kab. Rembang) | 6.932,4 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3319 - Kab. Kudus) | 5.400,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3320 - Kab. Jepara) | 4.401,4 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3321 - Kab. Demak) | 1.200,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3322 - Kab. Semarang) | 10.603,1 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3323 - Kab. Temanggung) | 13.094,5 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3324 - Kab. Kendal) | 5.831,1 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3326 - Kab. Pekalongan) | 5.747,2 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3327 - Kab. Pemalang) | 11.671,5 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3374 - Kota Semarang) | 8.924,5 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (34 - Provinsi DI Yogyakarta) | 20.048,9 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3402 - Kab. Bantul) | 11.090,0 | DAK |



SK No 168252 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3403 - Kab. Gunungkidul) | 4.200,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3404 - Kab. Sleman) | 11.325,1 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (35 - Provinsi Jawa Timur) | 29.428,9 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3505 - Kab. Blitar) | 9.150,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3506 - Kab. Kediri) | 5.600,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3507 - Kab. Malang) | 5.100,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3508 - Kab. Lumajang) | 5.970,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3510 - Kab. Banyuwangi) | 6.524,8 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3515 - Kab. Sidoarjo) | 6.555,3 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3517 - Kab. Jombang) | 1.800,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3520 - Kab. Magetan) | 2.465,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3521 - Kab. Ngawi) | 22.686,8 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3523 - Kab. Tuban) | 12.609,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3524 - Kab. Lamongan) | 23.337,5 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3526 - Kab. Bangkalan) | 1.332,2 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3529 - Kab. Sumenep) | 50.888,5 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3575 - Kota Pasuruan) | 1.600,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3601 - Kab. Pandeglang) | 13.874,6 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3604 - Kab. Serang) | 7.968,5 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (51 - Provinsi Bali) | 4.302,7 | DAK |



SK No 168253 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5108 - Kab. Buleleng) | 12.248,1 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5171 - Kota Denpasar) | 400,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (52 - Provinsi Nusa Tenggara Barat) | 23.209,6 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5201 - Kab. Lombok Barat) | 2.170,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5202 - Kab. Lombok Tengah) | 4.251,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5203 - Kab. Lombok Timur) | 19.075,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5204 - Kab. Sumbawa) | 21.334,9 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5205 - Kab. Dompu) | 20.693,5 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5206 - Kab. Bima) | 22.908,9 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5271 - Kota Mataram) | 1.395,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (53 - Provinsi Nusa Tenggara Timur) | 17.015,8 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5309 - Kab. Flores Timur) | 15.600,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5313 - Kab. Manggarai) | 1.400,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5314 - Kab. Rote Ndao) | 18.330,1 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (61 - Provinsi Kalimantan Barat) | 3.241,9 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6101 - Kab. Sambas) | 3.600,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6103 - Kab. Landak) | 15.800,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6106 - Kab. Ketapang) | 3.000,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6112 - Kab. Kubu Raya) | 2.910,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6202 - Kab. Kotawaringin Timur) | 2.900,0 | DAK |



SK No 168254 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6207 - Kab. Lamandau) | 1.020,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (63 - Provinsi Kalimantan Selatan) | 20.417,2 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6306 - Kab. Hulu Sungai Selatan) | 3.197,7 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (64 - Provinsi Kalimantan Timur) | 8.037,6 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6403 - Kab. Kutai Kartanegara) | 8.001,3 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (6504 - Kab. Nunukan) | 4.534,4 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (71 - Provinsi Sulawesi Utara) | 23.064,8 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7101 - Kab. Bolaang Mongondow) | 8.978,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7106 - Kab. Minahasa Utara) | 15.169,5 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7107 - Kab. Bolaang Mongondow Utara) | 11.894,1 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (72 - Provinsi Sulawesi Tengah) | 14.547,4 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7203 - Kab. Morowali) | 11.034,1 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7204 - Kab. Poso) | 5.000,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7205 - Kab. Donggala) | 8.151,1 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7206 - Kab. Toli Toli) | 3.230,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7208 - Kab. Parigi Moutong) | 30.655,4 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7209 - Kab. Tojo Una Una) | 9.300,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7210 - Kab. Sigi) | 44.658,7 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (73 - Provinsi Sulawesi Selatan) | 6.118,2 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7302 - Kab. Bulukumba) | 23.599,6 | DAK |



SK No 168255 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7305 - Kab. Takalar) | 11.872,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7306 - Kab. Gowa) | 10.840,1 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7307 - Kab. Sinjai) | 17.129,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7308 - Kab. Maros) | 7.619,2 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7309 - Kab. Pangkajene dan Kepulauan) | 13.102,9 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7311 - Kab. Bone) | 15.655,8 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7312 - Kab. Soppeng) | 16.385,2 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7313 - Kab. Wajo) | 29.471,2 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7316 - Kab. Enrekang) | 21.835,5 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7317 - Kab. Luwu) | 6.093,6 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (74 - Provinsi Sulawesi Tenggara) | 19.175,8 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7403 - Kab. Konawe) | 19.450,1 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7406 - Kab. Bombana) | 5.190,6 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7414 - Kab. Buton Tengah) | 5.803,6 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (75 - Provinsi Gorontalo) | 9.077,5 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7501 - Kab. Boalemo) | 4.198,5 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7503 - Kab. Pohuwato) | 19.584,3 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (76 - Provinsi Sulawesi Barat) | 12.343,9 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7602 - Kab. Polewali Mandar) | 20.117,4 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7603 - Kab. Mamasa) | 22.002,0 | DAK |



SK No 168256 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (81 - Provinsi Maluku) | 7.805,7 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8102 - Kab. Maluku Tenggara) | 4.187,9 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8103 - Kab. Maluku Tengah) | 9.577,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8105 - Kab. Kepulauan Aru) | 6.478,4 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8108 - Kab. Maluku Barat Daya) | 800,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (82 - Provinsi Maluku Utara) | 15.493,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8204 - Kab. Halmahera Selatan) | 22.657,2 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8207 - Kab. Pulau Morotai) | 20.992,7 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8271 - Kota Ternate) | 1.238,5 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8272 - Kota Tidore Kepulauan) | 13.376,9 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (91 - Provinsi Papua Barat) | 17.812,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (9107 - Kab. Sorong) | 513,1 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (94 - Provinsi Papua) | 7.995,9 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (9408 - Kab. Kepulauan Yapen) | 2.689,1 | DAK |
| Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (9427 - Kab. Supiori) | 5.314,6 | DAK |
| Sarana produksi dan usaha di Kampung Perikanan Budidaya yang dikembangkan (MP Korporasi) | 10.000,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Bantuan sarana pengembangan usaha nelayan (MP Korporasi) | 5.925,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Model Pertanian Modern | 3.000,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Kawasan Kopi | 91.978,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan | 6.059,9 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun | 6.032,5 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Kawasan Lada | 8.820,5 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Jaringan Irigasi Tersier | 240.975,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |



SK No 168257 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) | 240.500,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Asuransi Pertanian | 158.735,9 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Kawasan Kakao | 54.212,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Kawasan Pala | 26.202,6 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Optimasi Lahan | 210.486,6 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Hortikultura | 20.520,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Asuransi Usaha Ternak | 26.855,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Kawasan Cengkeh | 25.440,2 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Perkebunan | 4.858,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Kawasan Karet | 29.005,7 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Kawasan Tebu | 33.827,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Peternakan | 4.858,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Kawasan Kelapa | 56.435,3 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Kawasan Vanili | 6.275,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Perbengkelan Alsintan | 11.130,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Kawasan Sagu | 5.150,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Kawasan Jambu Mete | 12.760,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Kawasan Ubi Kayu | 10.841,5 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Kawasan Ubi Jalar | 5.326,5 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Kawasan Aneka Umbi Lainnya | 6.675,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Kawasan Padi | 287.519,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Kawasan Jagung | 91.292,5 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Kawasan Kakao - Kab. Kolaka Utara | 1.335,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| *Aspek: Fasilitasi Pengolahan* | | |
| Sarana Pasca Panen (MP Korporasi) | 1.609,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Mobil refrigerasi (MP korporasi) | 1.742,7 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan - Kab. Bandung | 34.996,8 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Dukungan BUMN | 213.140,0 | |
| Pengembangan Ekosistem Pertanian Berbasis Digital (*Agriculture Ecosystem* 4.0) | | BUMN |
| *Prototype Integrated Commodity Chain* Telur | | BUMN |
| Pembangunan Pabrik Tepung Sagu/Tapioca di Kunawe Selatan, Sulawesi Tenggara | | BUMN |
| 5) MP: Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi | | |
| Dukungan Belanja K/L dan DAK | 3.976.582,6 | |
| *Sub: Konservasi Energi* | | |
| *Aspek: Standar/ regulasi* | | |
| Reduksi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor ESDM | 500,1 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat Energi | 436,2 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |



SK No 168258 A

| Prioritas Nasional/*Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Penurunan Intensitas Energi Final | 3.466,4 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| Kendaraan Listrik Hasil Konversi | 9.157,2 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| *Sub: Pembangunan Panas Bumi* | | |
| *Aspek: Peningkatan Kualitas Data Panas Bumi* | | |
| Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi | 4.501,1 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| *Sub: Pembangunan Aneka Energi Terbarukan* | | |
| *Aspek: Pengembangan Riset dan Inovasi* | | |
| Peta Potensi EBT dalam Rangka Percepatan Investasi PLT Bayu, Hidro, Biomassa dan Surya | 3.532,3 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| Diklat Masyarakat Bidang KEBTKE | 2.712,9 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| Diklat Industri Bidang KEBTKE | 2.852,0 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Ketenagalistrikan dan EBTKE | 3.982,8 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| *Aspek: Pembangunan PLT Surya* | | |
| Infrastruktur Energi Terbarukan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi (53 - Provinsi Nusa Tenggara Timur) | 88.000,0 | DAK |
| PLTS Terpadu | 51.961,1 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| PLTS Atap K/L | 300,0 | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Kementerian/Lembaga | 1.000,0 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| *Aspek: Pembangunan PLT Panas Bumi* | | |
| Penawaran Wilayah Panas Bumi | 500,0 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| Penetapan Wilayah Panas Bumi | 1.000,0 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| *Aspek: Pembangunan PLT Bayu* | | |
| Monitoring TKDN PLT Bayu | 47,6 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| *Aspek: Pembangunan PLT Air* | | |
| PLTMH | 17.400,0 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| *Sub: Pembangunan Panas Bumi* | | |
| *Aspek: Pembangunan PLT Panas Bumi* | | |
| Monitoring TKDN Bidang Panas Bumi | 400,0 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| *Sub: Pembangunan Bioenergi* | | |
| *Aspek: Pembangunan PLT Bioenergi* | | |
| Monitoring TKDN Bidang Bioenergi | 321,1 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| *Aspek: Pembangunan Greenfuel* | | |
| Volume Biofuel untuk Domestik | 1.942,4 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |



SK No 168259 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel (PN) | 3.768.375,3 | KEMENTERIAN KEUANGAN |
| Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat | 14.000,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Dukungan BUMN | 939.100,0 | |
| Green Diesel Bio Refinery Revamping RU IV Cilacap | | BUMN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Pengembangan Pabrik Katalis Merah Putih PT Katalis Sinergi Indonesia | | BUMN |
| Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan: Pembangunan PLT Air | | BUMN |
| Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan: Pembangunan PLT Surya | | BUMN |
| Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan: Pembangunan PLT Bayu | | BUMN |
| Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan: Pembangunan PLTBm | | BUMN |
| Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan: Pembangunan PLT Panas Bumi | | BUMN |
| Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan: Pembangunan PLT Minihidro | | BUMN |
| Pembangunan Pabrik Biodiesel Kapasitas 1.500-ton RBDPO/hari di KEK Sei Mangkei | | BUMN |
| Pembangunan Pabrik BioCNG Kapasitas 210 mmBTU/hari di PKS Mayang PTPN IV | | BUMN |
| Penanaman Biomassa untuk mendukung Rencana Proyek Strategis: *New Factory* dan Komersialisasi Produk Biomassa | | BUMN |
| Pembangunan Pabrik Serbuk Kayu (*Cofiring*) Jabar | | BUMN |
| Pembangunan Pabrik Serbuk Kayu (*Cofiring*) Jateng | | BUMN |
| Dukungan Swasta | 5.360.230,0 [a] | |
| Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi | | Swasta |
| Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya | | Swasta |
| Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air | | Swasta |
| Pembangunan Fasilitas Penglahan Limbah menjadi Bahan Bakar | | Swasta |
| 6) MP: Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng | | |
| Dukungan Belanja K/L dan DAK | 396.546,4 | |
| *Aspek: Penguatan perizinan dan pemasaran* | | |
| SHAT Non Sistematis Kategori 4 - Provinsi Lampung | 629,2 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| PBT Non Sistematis Kategori 4 - Provinsi Lampung | 806,9 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| PBT Non Sistematis Kategori 5 - Provinsi Jawa Barat | 2.383,4 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| SHAT Non Sistematis Kategori 5 - Provinsi Jawa Barat | 2.038,6 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| PBT Non Sistematis Kategori 5 - Provinsi Jawa Tengah | 1.083,7 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |



SK No 168260 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| SHAT Non Sistematis Kategori 5 - Provinsi Jawa Tengah | 927,0 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| PBT Non Sistematis Kategori 5 - Provinsi Jawa Timur | 2.701,1 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| SHAT Non Sistematis Kategori 5 - Provinsi Jawa Timur | 2.310,4 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| PBT Non Sistematis Kategori 5 - Provinsi Banten | 216,9 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| SHAT Non Sistematis Kategori 5 - Provinsi Banten | 185,5 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional | 10.750,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| *Aspek: Pengembangan benih dan induk berkualitas tinggi* | | |
| Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat - Kab. Karawang | 200,6 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat - Kab. Jepara | 989,9 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat - Kab. Jepara | 374,5 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat - Kab. Situbondo | 544,8 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat - Kab. Situbondo | 194,8 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat - Kab. Takalar | 924,8 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat - Kab. Takalar | 476,8 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| *Aspek: Pembangunan infrastruktur kolam dan saluran irigasi tambak* | | |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1803 - Kab. Lampung Selatan) | 4.211,2 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1804 - Kab. Lampung Timur) | 2.238,6 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3209 - Kab. Cirebon) | 5.719,6 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3213 - Kab. Subang) | 7.455,5 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3274 - Kota Cirebon) | 1.273,2 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3317 - Kab. Rembang) | 1.704,5 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3320 - Kab. Jepara) | 5.681,7 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3324 - Kab. Kendal) | 2.898,7 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3326 - Kab. Pekalongan) | 3.635,3 | DAK |



SK No 168261 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3327 - Kab. Pemalang) | 6.002,0 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3375 - Kota Pekalongan) | 750,0 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3523 - Kab. Tuban) | 5.922,6 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3524 - Kab. Lamongan) | 6.631,3 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (3604 - Kab. Serang) | 6.234,7 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5202 - Kab. Lombok Tengah) | 1.880,0 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5203 - Kab. Lombok Timur) | 10.281,1 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5204 - Kab. Sumbawa) | 8.719,1 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5205 - Kab. Dompu) | 7.610,7 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (5206 - Kab. Bima) | 14.124,5 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7302 - Kab. Bulukumba) | 8.969,1 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7305 - Kab. Takalar) | 9.430,6 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7307 - Kab. Sinjai) | 6.256,9 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7308 - Kab. Maros) | 10.209,1 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7309 - Kab. Pangkajene dan Kepulauan) | 9.044,9 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7311 - Kab. Bone) | 12.039,5 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7313 - Kab. Wajo) | 9.286,6 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7317 - Kab. Luwu) | 11.068,0 | DAK |
| Kluster kawasan di Lokasi *Major Project* Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng | 41.000,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Infrastruktur budidaya udang berkelanjutan yang ditingkatkan | 60.448,9 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |



SK No 168262 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Sarana Pasca Panen mendukung revitalisasi tambak | 1.609,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Mobil refrigerasi (berpendingin) mendukung revitalisasi tambak | 2.613,6 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) - Provinsi Lampung | 1.200,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang disalurkan ke masyarakat - Provinsi Lampung | 6.200,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang disalurkan ke masyarakat - Provinsi Jawa Barat | 6.200,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) - Provinsi Jawa Barat | 1.200,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Prasarana produksi perikanan budidaya di UPT - Kab. Karawang | 2.500,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) - Provinsi Jawa Tengah | 1.200,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang disalurkan ke masyarakat - Provinsi Jawa Tengah | 6.200,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) - Provinsi Jawa Timur | 1.200,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang disalurkan ke masyarakat - Provinsi Jawa Timur | 6.200,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) - Provinsi Banten | 1.200,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang disalurkan ke masyarakat - Provinsi Banten | 6.200,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang disalurkan ke masyarakat - Provinsi Nusa Tenggara Barat | 6.150,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) - Provinsi Nusa Tenggara Barat | 1.200,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) - Provinsi Sulawesi Selatan | 1.200,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang disalurkan ke masyarakat - Provinsi Sulawesi Selatan | 6.200,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Daerah irigasi Glapan yang direhabilitasi | 28.814,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN) |
| 7) MP: Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional | | |
| Dukungan Belanja K/L dan DAK | 81.002,2 | |
| *Aspek: Penguatan data stok perikanan* | | |
| Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional | 2.700,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| *Aspek: Penguatan armada kapal, sistem logistik dan industri pengolahan* | | |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (1409 - Kab. Rokan Hilir) | 5.700,6 | DAK |
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (7106 - Kab. Minahasa Utara) | 9.967,9 | DAK |



SK No 168263 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (8103 - Kab. Maluku Tengah) | 12.773,8 | DAK |
| Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan - Pusat | 18.750,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan | 22.990,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| *Aspek: Pembangunan pelabuhan perikanan dan pasar ikan* | | |
| Rekomendasi Kebijakan Pendampingan *Major Project* Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Pasar Ikan Bertaraf Internasional | 1.000,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan | 5.500,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| *Aspek: Pembangunan infrastuktur pendukung (jalan, air, listrik)* | | |
| Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah - Provinsi Maluku | 131,4 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk | 1.488,4 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| 8) MP: *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan) | | |
| Dukungan Belanja K/L dan DAK | 1.551.531,5 | |
| *Sub: Kalimantan Tengah; Sumatera Utara; Sumatera Selatan; Nusa Tenggara Timur; Papua* | | |
| *Aspek: On Farm* | | |
| Area pengendalian OPT Hortikultura - Pusat | 6.800,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Kawasan Padi - Pusat | 260.902,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Kawasan Jagung - Pusat | 91.292,5 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan | 168.345,5 | KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Benih sumber padi yang dihasilkan - Provinsi Sumatera Selatan | 224,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Benih sumber padi yang dihasilkan - Provinsi Kalimantan Tengah | 168,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Areal Penanganan DPI | 3.973,8 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Benih sumber padi yang dihasilkan - Provinsi Nusa Tenggara Timur | 432,5 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Benih sumber padi yang dihasilkan - Provinsi Papua | 168,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Lahan Pertanian Pangan Produktif (*Food Estate*) | 73.013,4 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Optimasi Lahan - Kab. Humbang Hasundutan | 580,5 | KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Benih sumber jagung yang dihasilkan - Provinsi Nusa Tenggara Timur | 318,8 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Kawasan Kelapa - Kab. Belu | 977,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Kawasan Kelapa - Kab. Sumba Tengah | 1.338,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Optimasi Lahan - Kab. Pulang Pisau | 291,1 | KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Kawasan Kelapa - Kab. Merauke | 585,5 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Optimasi Lahan - Kab. Merauke | 1.741,1 | KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN) |



SK No 168264 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| *Aspek: Off Farm* | | |
| Sarana Pascapanen Tanaman Pangan - Pusat | 394.873,2 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan - Kab. Pulang Pisau | 30,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan - Kab. Pulang Pisau | 205,4 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| *Aspek: Geospasial* | | |
| Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate* (12 - Provinsi Sumatera Utara) | 21.929,0 | DAK |
| Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate* (1215 - Kab. Humbang Hasundutan) | 3.678,6 | DAK |
| Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate* (16 - Provinsi Sumatera Selatan) | 18.880,0 | DAK |
| Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate* (1607 - Kab. Banyuasin) | 3.264,5 | DAK |
| Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate* (53 - Provinsi Nusa Tenggara Timur) | 4.784,8 | DAK |
| Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate* (5306 - Kab. Belu) | 4.516,7 | DAK |
| Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate* (5316 - Kab. Sumba Tengah) | 5.628,8 | DAK |
| Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate* (62 - Provinsi Kalimantan Tengah) | 18.597,2 | DAK |
| Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate* (6203 - Kab. Kapuas) | 6.372,3 | DAK |
| Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate* (6210 - Kab. Pulang Pisau) | 10.036,0 | DAK |
| Irigasi - Tematik Pengembangan *Food Estate* (9401 - Kab. Merauke) | 5.498,3 | DAK |
| Pertanian - Tematik Pengembangan *Food Estate* (1215 - Kab. Humbang Hasundutan) | 8.419,2 | DAK |
| Pertanian - Tematik Pengembangan *Food Estate* (1607 - Kab. Banyuasin) | 3.833,1 | DAK |
| Pertanian - Tematik Pengembangan *Food Estate* (5306 - Kab. Belu) | 5.241,7 | DAK |
| Pertanian - Tematik Pengembangan *Food Estate* (5316 - Kab. Sumba Tengah) | 2.542,0 | DAK |
| Pertanian - Tematik Pengembangan *Food Estate* (62 - Provinsi Kalimantan Tengah) | 12.227,2 | DAK |
| Pertanian - Tematik Pengembangan *Food Estate* (6203 - Kab. Kapuas) | 17.496,8 | DAK |
| Pertanian - Tematik Pengembangan *Food Estate* (6210 - Kab. Pulang Pisau) | 15.686,4 | DAK |
| Pertanian - Tematik Pengembangan *Food Estate* (9401 - Kab. Merauke) | 18.198,0 | DAK |
| Kehutanan - Tematik Pengembangan *Food Estate* (12 - Provinsi Sumatera Utara) | 3.829,8 | DAK |
| Kehutanan - Tematik Pengembangan *Food Estate* (53 - Provinsi Nusa Tenggara Timur) | 17.708,3 | DAK |
| Kehutanan - Tematik Pengembangan *Food Estate* (62 - Provinsi Kalimantan Tengah) | 2.500,2 | DAK |
| Kehutanan - Tematik Pengembangan *Food Estate* (94 - Provinsi Papua) | 1.136,5 | DAK |



SK No 168265 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Jalan - Tematik Pengembangan *Food Estate* (12 - Provinsi Sumatera Utara) | 27.529,0 | DAK |
| Jalan - Tematik Pengembangan *Food Estate* (1215 - Kab. Humbang Hasundutan) | 16.018,2 | DAK |
| Jalan - Tematik Pengembangan *Food Estate* (16 - Provinsi Sumatera Selatan) | 25.096,8 | DAK |
| Jalan - Tematik Pengembangan *Food Estate* (1607 - Kab. Banyuasin) | 27.166,9 | DAK |
| Jalan - Tematik Pengembangan *Food Estate* (53 - Provinsi Nusa Tenggara Timur) | 24.261,1 | DAK |
| Jalan - Tematik Pengembangan *Food Estate* (5306 - Kab. Belu) | 27.886,7 | DAK |
| Jalan - Tematik Pengembangan *Food Estate* (5316 - Kab. Sumba Tengah) | 24.726,5 | DAK |
| Jalan - Tematik Pengembangan *Food Estate* (62 - Provinsi Kalimantan Tengah) | 28.646,8 | DAK |
| Jalan - Tematik Pengembangan *Food Estate* (6203 - Kab. Kapuas) | 29.470,2 | DAK |
| Jalan - Tematik Pengembangan *Food Estate* (6210 - Kab. Pulang Pisau) | 32.206,8 | DAK |
| Jalan - Tematik Pengembangan *Food Estate* (94 - Provinsi Papua) | 13.189,6 | DAK |
| Jalan - Tematik Pengembangan *Food Estate* (9401 - Kab. Merauke) | 29.168,9 | DAK |
| Peta Tematik Pertanahan dan Ruang - Pusat | 15.000,0 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| PBT Non Sistematis Kategori 3 - Provinsi Sumatera Utara | 1.669,3 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| SHAT Non Sistematis Kategori 3 - Provinsi Sumatera Utara | 1.231,3 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| SHAT Non Sistematis Kategori 1 - Provinsi Nusa Tenggara Timur | 280,6 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| PBT Non Sistematis Kategori 1 - Provinsi Nusa Tenggara Timur | 405,5 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| SHAT Non Sistematis Kategori 3 - Provinsi Kalimantan Tengah | 442,9 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| PBT Non Sistematis Kategori 3 - Provinsi Kalimantan Tengah | 600,5 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| Jembatan yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan - Kab. Kapuas | 2.209,7 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Lahan yang dibuka untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan - Kab. Kapuas | 1.083,3 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan - Kab. Kapuas | 2.613,5 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Bantuan Catu Pangan untuk Transmigran dalam Mendukung Ketahanan Pangan (*Food Estate*) - Kab. Kapuas | 638,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN) |
| Bantuan Sarana Produksi Pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP Pada Kawasan Transmigrasi Yang Mendukung *Food Estate* - Kab. Kapuas | 348,5 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN) |
| Jembatan yang dibangun di Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan - Kab. Kapuas | 1.338,1 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |



SK No 168266 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| 9) MP: Pengelolaan Terpadu UMKM | | |
| Dukungan Belanja K/L | 1.397.337,9 | |
| *Sub: Aceh; Jawa Tengah; Nusa Tenggara Timur; Kalimantan Timur; Sulawesi Utara; Sumatera Utara; DI Yogyakarta; Bali; Kalimantan Selatan; Sulawesi Selatan* | | |
| *Aspek: Regulasi dan Pendataan UMKM* | | |
| Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM | 7.162,9 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Pendataan Lengkap KUMKM | 370.034,0 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Pengembangan Sektor Industri Aneka | 3.300,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| *Aspek: Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan* | | |
| Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran (Akses RA Tahun ke 3) - Provinsi Nusa Tenggara Timur | 1.081,6 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran (Akses RA Tahun ke 3) - Provinsi Sulawesi Selatan | 1.360,8 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| Kemitraan Usaha Nasional | 10.000,0 | KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM | 27.000,0 | KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| Adopsi teknologi digital UMKM | 21.700,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Dukungan Fasilitasi *Factory Sharing* - Provinsi Aceh | 833,3 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Dukungan Fasilitasi *Factory Sharing* - Provinsi Sumatera Utara | 833,3 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Usaha Mikro yang mendapat Pembinaan - Provinsi Jawa Tengah | 2.261,4 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Dukungan Fasilitasi *Factory Sharing* - Provinsi Jawa Tengah | 833,3 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Dukungan Fasilitasi *Factory Sharing* - Provinsi DI Yogyakarta | 833,3 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Dukungan Fasilitasi *Factory Sharing* - Kab. Jembrana | 833,3 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Usaha Mikro yang mendapat Pembinaan - Provinsi Nusa Tenggara Timur | 2.261,4 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Dukungan Fasilitasi *Factory Sharing* - Provinsi Nusa Tenggara Timur | 833,3 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Dukungan Fasilitasi *Factory Sharing* - Provinsi Kalimantan Selatan | 833,3 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Dukungan Fasilitasi *Factory Sharing* - Kab. Kutai Kartanegara | 833,3 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Usaha Mikro yang mendapat Pembinaan - Provinsi Sulawesi Utara | 2.261,4 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Dukungan Fasilitasi *Factory Sharing* - Kab. Minahasa Selatan | 833,3 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Dukungan Fasilitasi *Factory Sharing* - Provinsi Sulawesi Selatan | 833,3 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| UKM/Sentra yang difasilitasi Peningkatan Digitalisasi - Kab. Pangkajene dan Kepulauan | 75,0 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |



SK No 168267 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Jalan Strategis (ProPN) - ANABANUA - TARUMPAKKAE | 39.781,6 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| *Export Coaching* Program | 6.728,9 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| Fasilitasi Kapasitas Pemasaran Produk | 5.000,0 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| Fasilitasi Pembinaan UMKM Pusat Jajan Kuliner dan Cinderamata (PJKC) | 4.400,0 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Fasilitasi Promosi dan Pameran | 1.300,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapatkan Fasilitasi Promosi dan Pameran | 4.100,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| Advokasi Kemitraan ke Badan Usaha | 322,1 | KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) |
| *Aspek: Penyediaan Akses Pembiayaan* | | |
| Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 4.600,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Aceh | 1.950,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Sumatera Utara | 3.300,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Jawa Tengah | 7.350,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi DI Yogyakarta | 1.125,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Nusa Tenggara Timur | 1.500,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Sulawesi Utara | 1.125,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Sulawesi Selatan | 2.250,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirausaha | 3.617,4 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| *Aspek: Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama* | | |
| Lahan Garam yang difasilitasi - Kab. Pangkajene dan Kepulauan | 3.111,4 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Sarana niaga Garam Rakyat yang dibangun - Kab. Pangkajene dan Kepulauan | 11.476,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| UKM/Sentra Yang difasilitasi Pengembangan *Factory Sharing* - Kab. Batu Bara | 13.446,4 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| UKM/Sentra Yang difasilitasi Pengembangan *Factory Sharing* - Kab. Sleman | 13.446,4 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| UKM/Sentra Yang difasilitasi Pengembangan *Factory Sharing* - Kab. Jembrana | 13.446,4 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| UKM/Sentra Yang difasilitasi Pengembangan *Factory Sharing* - Kab. Tanah Laut | 13.446,4 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| UKM/Sentra Yang difasilitasi Pengembangan *Factory Sharing* - Kab. Pangkajene dan Kepulauan | 13.446,4 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Fasilitasi Pengembangan Produk Kemasan | 6.000,0 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| Fasilitasi pendaftaran HKI | 1.000,0 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| Sentra IKM dan UPT Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan Yang Mendapat Fasilitasi | 3.926,6 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (Terintegrasi dengan PSN) |



SK No 168268 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Sentra IKM dan UPT Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang mendapat Fasilitasi | 2.500,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan | 6.223,4 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan | 4.250,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan | 7.000,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan | 2.500,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| Layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) | 2.000,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| Layanan Desain dan Kemasan | 2.000,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan - Kab. Jembrana | 310,4 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan - Kab. Jembrana | 1.419,9 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan - Kab. Minahasa Selatan | 184,4 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| *Aspek: Pendampingan SDM UMKM* | | |
| Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan | 10.863,6 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan | 3.756,8 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Bimbingan Teknis Penerapan SNI kepada UMKM | 700,0 | BADAN Standardisasi NASIONAL (BSN) |
| Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria (Akses RA Tahun ke 2) - Provinsi Jawa Tengah | 1.455,3 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 750,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat TKM Lanjutan | 45.000,0 | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN |
| Tenaga Kerja Mandiri Pemula | 220.000,0 | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN |
| Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan - Provinsi Aceh | 319,5 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan - Provinsi Sumatera Utara | 319,5 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan - Provinsi Jawa Tengah | 319,5 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan - Provinsi DI Yogyakarta | 319,5 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Jumlah *Start-Up* yang dikembangkan - Provinsi DI Yogyakarta | 1.700,0 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan - Provinsi Bali | 319,5 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Jumlah *Start-Up* yang dikembangkan - Provinsi Bali | 1.400,0 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan - Provinsi Nusa Tenggara Timur | 319,5 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |



SK No 168269 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan - Provinsi Kalimantan Selatan | 319,5 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan - Provinsi Kalimantan Timur | 319,5 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| UKM/ *Start-Up* yang dilatih Peningkatan Kapasitas Bisnis - Provinsi Sulawesi Utara | 1.250,0 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan - Provinsi Sulawesi Utara | 319,5 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan - Provinsi Sulawesi Selatan | 319,5 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Perempuan Rentan yang dilatih tentang kewirausahaan - Provinsi Bali | 456,8 | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| Perempuan Rentan yang dilatih tentang kewirausahaan - Provinsi Nusa Tenggara Timur | 456,8 | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| Mahasiswa Mengembangkan Inovasi Wirausaha | 40.000,0 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan | 14.090,0 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha | 49.487,2 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pelaku Usaha | 4.000,0 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Fasilitasi e-*smart* IKM | 1.000,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapatkan Fasilitasi *e-smart* IKM | 1.000,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| Wirausaha Industri yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi Melalui Dana Dekonsentrasi - Provinsi Kalimantan Selatan | 1.354,6 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| *Aspek: Kurasi dan Standardisasi Produk* | | |
| Layanan Pembinaan kepada UMK Produk Unggulan Daerah | 2.197,0 | BADAN Standardisasi NASIONAL (BSN) |
| Pendampingan Pemenuhan dan Sertifikasi SNI kepada UMK | 2.500,0 | BADAN Standardisasi NASIONAL (BSN) |
| Sertifikat Halal Non UMK | 5.000,0 | KEMENTERIAN AGAMA |
| Sertifikat Halal UMK | 223.000,0 | KEMENTERIAN AGAMA |
| Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi Aceh | 777,7 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi Sumatera Utara | 777,7 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi Jawa Tengah | 777,7 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi DI Yogyakarta | 777,7 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi Bali | 777,7 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi Nusa Tenggara Timur | 777,7 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |



SK No 168270 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi Kalimantan Selatan | 777,7 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi Kalimantan Timur | 777,7 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi Sulawesi Utara | 777,7 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi Sulawesi Selatan | 777,7 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Fasilitasi Sertifikasi Produk Primer | 1.000,0 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| Fasilitasi Sertifikasi Produk Manufaktur | 1.750,0 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| PN 2: MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN | | |
| 10) MP: Pembangunan Wilayah Batam-Bintan | | |
| Dukungan Belanja K/L | 730.544,3 | |
| *Aspek: Kawasan Pariwisata* | | |
| Fasilitasi Pengembangan BUMDesa Bersama | 10.100,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Jejaring Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi I yang dikembangkan | 3.200,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| SDM Pengelola Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi I yang ditingkatkan kapasitasnya | 3.900,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| *Aspek: Kawasan Industri* | | |
| Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi | 2.300,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan | 1.250,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| Industri Smelter Logam Bukan Besi yang termonitor dan terevaluasi perkembangannya | 1.500,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| *Aspek: Infrastruktur Strategis* | | |
| *Water Treatment Plant* (WTP) Kapasitas 350 liter/detik - Kota Batam | 46.294,3 | BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM) |
| Kolam Dermaga Baru Terminal Curah Cair Kabil - Kota Batam | 88.000,0 | BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM) |
| *Aspek: Infrastruktur Pendukung* | | |
| Jalan Koridor Utama Pelabuhan - Bandara (Ruas Simp. Laluan Madani - Bundaran Punggur) - Kota Batam | 286.000,0 | BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM) |
| Jalan Koridor Utama Pelabuhan - Bandara (Ruas Bundaran Punggur - Simp. Bandara) - Kota Batam | 70.380,0 | BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM) |
| Bundaran Punggur - Kota Batam | 74.470,0 | BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM) |
| Bundaran Bandara - Kota Batam | 69.150,0 | BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM) |
| Jalan Yos Sudarso Tahap 3 (Ruas Simpang Bengkong - Underpass Pelita) - Kota Batam | 74.000,0 | BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM) |



SK No 168271 A

| Prioritas Nasional/*Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Dukungan BUMN | 2.647.000,0 | |
| Pengembangan Bandara Hang Nadim | | BUMN |
| 11) MP: Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar | | |
| Dukungan Belanja K/L dan KPBU | 7.442.110,4 | |
| *Aspek: Sosial* | | |
| SDM Pengelola Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi I yang ditingkatkan kapasitasnya - Pusat | 3.900,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| Bendungan Sidan yang dibangun - Provinsi Bali | 802.173,4 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN) |
| Rumah Khusus - Kab. Banjar | 6.019,4 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Bendungan Pamukkulu yang dibangun - Provinsi Sulawesi Selatan | 1.228.567,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN) |
| *Aspek: Lingkungan* | | |
| Pengendalian banjir Sungai Lambidaro-Sekanak yang dibangun - Provinsi Sumatera Selatan | 50.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| *Aspek: Ekonomi* | | |
| Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area - Pusat | 6.896,0 | BADAN PUSAT STATISTIK |
| Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area - Provinsi Sulawesi Selatan | 134,8 | BADAN PUSAT STATISTIK |
| Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area - Kab. Gowa | 1.012,0 | BADAN PUSAT STATISTIK |
| Materi Teknis RTR Nasional (Pulau/Kep dan KSN) di Pulau Sulawesi | 863,8 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) - BTS. Kota Singaraja - Mengwitani | 29.325,5 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi (*Unsolicited*) (Konstruksi - Investasi BUP KPBU) | 4.104.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN) |
| Preservasi Jalan Lintas Timur Provinsi Sumatera Selatan (Konstruksi - Investasi BUP KPBU) | 491.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT(KPBU) |
| Penyelenggaraan Layanan Perintis LRT Sumatera Selatan - Kota Palembang | 76.533,5 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pembelian Layanan (*Buy The Services*) Angkutan Massal Berbasis Jalan Di Kota Palembang (Prioritas Nasional) - Provinsi Sumatera Selatan | 63.912,9 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pembelian Layanan (*Buy The Services*) Angkutan Massal Berbasis Jalan Di Kawasan Perkotaan Denpasar (Prioritas Nasional) - Provinsi Bali | 91.469,8 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pembangunan Dermaga Kenavigasian Benoa - Kota Denpasar | 35.421,3 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Pembangunan Sisi Darat Dermaga Kenavigasian Benoa - Kota Denpasar | 13.022,6 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Sanur - Kota Denpasar | 129.991,4 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS (*Buy The Service*) di Kota Banjarmasin (Prioritas Nasional) - Provinsi Kalimantan Selatan | 15.752,4 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |



SK No 168272 A

| Prioritas Nasional/*Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS (*Buy The Service*) di Kota Makassar (Prioritas Nasional) - Provinsi Sulawesi Selatan | 18.636,8 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Kewajiban Pembayaran atas Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) (Dukungan/Pendamping KPBU) - Kota Makassar | 267.490,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| 12) MP: Pembangunan Ibu Kota Nusantara | | |
| Dukungan Belanja K/L | 20.989.454,7 | |
| *Sub: Pengembangan Kawasan dan SDM* | | |
| *Aspek: SDM* | | |
| Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Penataan Arsip Persiapan Pemindahan IKN | 15.630,0 | ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA |
| Pemetaan / Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN | 5.500,0 | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA |
| PBK Provinsi Kalimantan Timur | 5.202,1 | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN |
| PBK UPTP - Kota Samarinda | 11.561,3 | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN |
| *Sub: Penyiapan Regulasi dan Kebijakan* | | |
| *Aspek: Regulasi dan Kebijakan* | | |
| Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Kepala Otorita IKN | 1.173,4 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di IKN | 1.200,0 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| Rekomendasi Penataan Ulang Penggunaan BMN oleh K/L (Asset Rearrangement) di Jakarta (PN) | 196,5 | KEMENTERIAN KEUANGAN |
| Rekomendasi Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara Pada Ibu Kota Negara Lama (PN) | 2.363,6 | KEMENTERIAN KEUANGAN |
| Rekomendasi kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan telekomunikasi di IKN | 1.672,6 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Rekomendasi Kebijakan Pengawalan/Pengendalian Desain Sistem Keamanan IbuKota Negara Baru | 4.000,0 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN |
| Rekomendasi Kebijakan Pengawalan/Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Ibukota Negara Baru | 7.000,0 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN |
| Rekomendasi Kebijakan Pengawalan/Pengendalian Desain Sistem Pertahanan Ibukota Negara Baru | 3.000,0 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN |
| Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (IKN) | 3.440,0 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| *Sub: Perencanaan dan Penyiapan Lahan* | | |
| *Aspek: Perencanaan Kawasan dan Infrastruktur* | | |
| Penyusunan OBC Rencana Penyelenggaraan KA Antarkota Trans Kalimantan Segmen Simpang Petung - Balikpapan - Samarinda | 4.500,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Studi Desain Kapal Berbahan Bakar Ramah Lingkungan | 1.000,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Sistem Transportasi Ibukota Nusantara - Provinsi Kalimantan Timur | 4.802,9 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |



SK No 168273 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional IKN di Wilayah Amerika dan Eropa | 3.000,0 | KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika | 1.000,0 | KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik | 1.000,0 | KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Ibu Kota Negara (IKN) Bidang Infrastruktur | 16.400,0 | KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Ibu Kota Negara (IKN) Bidang Sumber Daya Alam | 16.400,0 | KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Ibu Kota Negara (IKN) Bidang Manufaktur | 20.800,0 | KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Ibu Kota Negara (IKN) Bidang Jasa Kawasan | 16.400,0 | KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL |
| Koordinasi penyiapan Analisis dan konsep fasilitas pelayanan Kesehatan di IKN | 1.000,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Materi Teknis dan Ranperda (PK/Revisi) RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis di Pulau Kalimantan | 1.190,0 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Dukungan IKN) (Prioritas Nasional) - Pusat | 9.774,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Studi Penyesuaian KA Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggan Balikpapan - KIPP dengan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Nasional IKN | 4.804,9 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Penyusunan OBC rencana penyelenggaraan KA Bandara Sepinggan - KPIP dan Pengembangan KA perkotaan Balikpapan - IKN Phase 2 | 2.500,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| *Aspek: Penyiapan lahan* | | |
| SHAT PTSL ASN Kategori 3 - Provinsi Kalimantan Timur | 31.600,5 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| Area IKN yang dilakukan pemulihan ekosistem | 4.559,0 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS sekitarnya | 23.950,0 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk IKN | 1.000,0 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi | 1.358,0 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| *Sub: Pengembangan Kawasan dan SDM* | | |
| *Aspek: Pengamanan* | | |
| Pengamanan Ibu Kota Negara (IKN) (PN) | 9.605,7 | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
| *Aspek: Infrastruktur* | | |
| Dukungan Infrastruktur IKN - Dermaga Logistik Ibu Kota Negara (IKN) | 152.103,6 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Dukungan Infrastruktur IKN - Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek | 328.620,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |



SK No 168274 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Pengendalian Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN - Provinsi Kalimantan Timur | 20.120,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Penanggulangan Pencemaran Terminal Marine Polution - Kota Balikpapan | 54.033,6 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pengembangan Bandar Udara APT Pranoto Samarinda (Tambahan IKN SBPA) - Kota Samarinda | 64.674,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pusat Konservasi Plasma Nutfah di IKN | 1.800,0 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| Koridor Satwa dan Pengembangan WRU di IKN | 10.000,0 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| Pengendalian Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN - Pusat | 90.950,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Bendungan Sepaku Semoi yang dibangun | 202.790,9 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN) |
| Hunian Pekerja Konstruksi (IKN) | 200.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Rumah Tapak Jabatan Menteri (IKN) | 337.110,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Dukungan Infrastruktur IKN - Jln. Soekarno-Hatta (Balikpapan) | 4.880.216,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan (IKN) - Provinsi DKI Jakarta | 10.820,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Bangunan pendukung pengendali banjir IKN yang dibangun/ditingkatkan | 279.420,8 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Bangunan pengendali banjir IKN yang dibangun/ditingkatkan | 296.330,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Dukungan teknis bidang bendungan dan danau yang disusun (IKN) | 8.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Prasarana air baku IKN yang dibangun | 185.500,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Persiapan OP Prasarana Air Baku IKN | 2.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sungai Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang dibangun (IKN) | 95.805,3 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM - Provinsi Kalimantan Timur | 1.235,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Dukungan Infrastruktur IKN - Jalan *Bypass* Pasar Sepaku: Paket Jalan *Shortcut* Pasar Sepaku (IKN) | 3.126.680,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Dukungan Infrastruktur IKN - Provinsi Kalimantan Timur | 127.298,5 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Sistem Pengelolaan Sanitasi IKN - Provinsi Kalimantan Timur | 816.482,8 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan SPAM IKN - Provinsi Kalimantan Timur | 622.553,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan IKN - Kab. Penajam Paser Utara | 1.261.247,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN - Kab. Penajam Paser Utara | 7.559.681,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |



SK No 168275 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Pengendalian Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN - Kab. Penajam Paser Utara | 15.400,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Dukungan BUMN | 2.517.282,0 | |
| Jaringan Interkoneksi | | BUMN |
| Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi | | BUMN |
| Pembangunan Infrastruktur ICT di Kawasan Ibu Kota Negara | | BUMN |
| Pembangunan Jaringan Telekomunikasi di Ibu Kota Negara | | BUMN |
| Pendirian BRI KCP Sepaku | | BUMN |
| Program BRI Peduli | | BUMN |
| Pembangunan Kantor Wilayah | | BUMN |
| Tol Balikpapan - Samarinda | | BUMN |
| Dukungan Pertamina Group dalam Penyediaan Infrastruktur Gas Bumi di IKN | | BUMN |
| 13) MP: Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong | | |
| Dukungan Belanja K/L dan KPBU | 1.125.869,9 | |
| *Aspek: Sosial* | | |
| Sarana Ruang Kreatif yang Difasilitasi - Pusat | 17.500,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| SDM Pengelola Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi I yang ditingkatkan kapasitasnya - Pusat | 3.900,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| KSCS - Pipa Cabang WTP Rangkas Bitung yang dibangun - Provinsi Banten | 69.326,3 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| SPAM Karian - Serpong (Sisi Hulu) (*Unsolicited*) (Konstruksi - Investasi BUP KPBU) | 810.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT(KPBU) (Terintegrasi dengan PSN) |
| *Aspek: Ekonomi* | | |
| *Be Creative District* (BCD) yang Dikembangkan - Pusat | 750,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) - Jalan Lingkar Sorong | 40.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Replacement Fasilitas Pelabuhan Laut Sofifi - Kota Tidore Kepulauan | 65.000,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Angkutan Udara Perintis - Kota Sorong | 8.279,6 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pengembangan Bandar Udara DEO - Sorong, Papua Barat - PN - Kota Sorong | 60.000,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN) - Kota Sorong | 51.114,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |



SK No 168276 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| 14) MP: Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay | | |
| Dukungan Belanja K/L dan DAK | 3.739.816,3 | |
| *Sub: Pendidikan* | | |
| *Aspek: Tenaga Pendidik* | | |
| Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Yang Ditingkatkan Mutunya - Kab. Sorong | 138,8 | KEMENTERIAN AGAMA |
| Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran - Provinsi Papua Barat | 6.958,2 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran - Provinsi Papua | 12.474,0 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| *Aspek: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi* | | |
| Tenaga Kerja Bidang Kesehatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya - Kab. Sorong | 374,7 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten - Kota Sorong | 7.967,3 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Pelatihan Peningkatan Produktivitas - Kota Sorong | 338,6 | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN |
| PBK di BLK Komunitas - Kota Sorong | 2.592,0 | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN |
| PBK UPTP - Kota Sorong | 14.462,0 | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN |
| Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja - Kota Sorong | 2.156,8 | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN |
| Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Sarjana Terapan (D-IV) - Kab. Manokwari | 12.189,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| *Aspek: Beasiswa Peserta Didik* | | |
| Siswa Penerima Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) - Pusat | 107.501,9 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| Mahasiswa Yang mendapatkan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) - Pusat | 153.000,0 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| *Sub: Kesehatan* | | |
| *Aspek: Tenaga Medis* | | |
| Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat (SDM) - Provinsi Papua | 4.793,8 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat (SDM) - Provinsi Papua | 650,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| *Aspek: Beasiswa* | | |
| Bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PDGS) Papua dan Papua Barat (SDM) - Pusat | 7.049,5 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| *Sub: Pengembangan Kawasan* | | |
| *Aspek: Produksi Komoditas* | | |
| Sarana Pasca Panen yang Disediakan di Daerah Khusus dalam rangka Mendukung Green Economy Growth - Kab. Sorong | 389,1 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Kawasan Sagu - Kab. Sorong Selatan | 833,8 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Kawasan Sagu - Kab. Sorong | 833,8 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Kawasan Kelapa - Kab. Tambrauw | 642,5 | KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Kawasan Kakao - Kab. Manokwari Selatan | 615,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Kawasan Kopi - Kab. Lanny Jaya | 2.499,1 | KEMENTERIAN PERTANIAN |



SK No 168277 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| *Aspek: Pariwisata* | | |
| Sarana Prasarana Desa Wisata yang Dibangun untuk Mendukung Destinasi Pariwisata - Kab. Pegunungan Arfak | 400,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Sarana Prasarana Desa Wisata yang Dibangun untuk Mendukung Destinasi Pariwisata - Kab. Sorong Selatan | 400,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| *Aspek: Kampung Terpadu* | | |
| Kelompok Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) - Provinsi Papua Barat | 13.297,1 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Sarana Pengelolaan Kawasan Pesisir yang Diberikan Kepada Masyarakat di Daerah Tertinggal - Kab. Manokwari Selatan | 1.050,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Kelompok Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) - Provinsi Papua | 19.466,8 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| *Aspek: Infrastruktur Kawasan* | | |
| Jalan Non-Status yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi - Kab. Teluk Wondama | 154,5 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Sarana Perumahan yang dibangun di Kawasan Transmigrasi - Kab. Teluk Wondama | 1.781,9 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Sarana dan Prasarana Rumah Produksi Hasil Prukades yang disediakan di Daerah Tertinggal - Kab. Teluk Bintuni | 1.000,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Air Baku KEK Sorong yang dibangun - Provinsi Papua Barat | 99.045,3 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| *Aspek: Industri* | | |
| Fasilitasi Investor Dalam Rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni - Pusat | 800,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| Wirausaha Industri yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi Melalui Dana Dekonsentrasi - Provinsi Papua | 1.415,5 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| Wirausaha Industri yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi Melalui Dana Dekonsentrasi - Provinsi Papua Barat | 1.482,3 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| IKM yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi, dan Pengembangan Produk Melalui Dana Dekonsentrasi - Provinsi Papua Barat | 183,6 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| IKM yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi, dan Pengembangan Produk Melalui Dana Dekonsentrasi - Provinsi Papua | 304,5 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| *Sub: Infrastruktur Dasar* | | |
| *Aspek: Infrastruktur Permukiman* | | |
| Penyediaan Air Baku di Kabupaten Lanny Jaya yang dibangun - Kab. Lanny Jaya | 35.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| *Sub: Infrastruktur Pendukung* | | |
| *Aspek: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi* | | |
| PBK Kerjasama Dengan Dunia Industri - Kota Sorong | 480,0 | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN |



SK No 168278 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| *Aspek: Infrastruktur Pelabuhan* | | |
| Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta Kab. Raja Ampat Tahap II - SBSN - Provinsi Papua Barat | 2.500,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati Kab. Raja Ampat Tahap II - SBSN - Provinsi Papua Barat | 5.493,3 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| *Aspek: Infrastruktur Jalan* | | |
| Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi (9103 - Kab. Teluk Wondama) | 12.999,2 | DAK |
| Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi (9106 - Kab. Sorong Selatan) | 6.630,8 | DAK |
| Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi (9107 - Kab. Sorong) | 9.307,4 | DAK |
| Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi (9109 - Kab. Tambrauw) | 11.400,0 | DAK |
| Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi (9110 - Kab. Maybrat) | 10.316,8 | DAK |
| Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi (9111 - Kab. Manokwari Selatan) | 12.502,9 | DAK |
| Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi (9112 - Kab. Pegunungan Arfak) | 10.946,7 | DAK |
| Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi (9411 - Kab. Puncak Jaya) | 10.983,1 | DAK |
| Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi (9433 - Kab. Puncak) | 10.261,7 | DAK |
| Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi (9105 - Kab. Manokwari) | 7.100,0 | DAK |
| Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi (9108 - Kab. Raja Ampat) | 9.992,7 | DAK |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - ELELIM - PASVALEY - BTS. KOTA WAMENA | 17.797,7 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Jembatan Ruas Elelim - Mamberamo | 13.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Mameh - WINDESI (WERABUR) | 60.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - KUMURKEH - AYAMASI - SNOPY | 2.232,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Jalan Ambuni - Karuan | 67.500,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Jalan Mameh - Karuan | 25.750,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Jalan Sp. Goro - Kp. Muri (BTS. Provinsi Papua) | 57.984,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |



SK No 168279 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Jembatan Gunung Pasir | 27.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Kab. Puncak Jaya | 28.150,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| *Aspek: Infrastruktur Bandar Udara* | | |
| Pengembangan Bandar Udara Ilaga - PN - Kab. Puncak | 10.000,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pengembangan Bandar Udara Wamena Tahap III - PN - Kab. Jayawijaya | 10.000,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pengembangan Bandar Udara Babo - PN - Kab. Teluk Bintuni | 7.163,6 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pengembangan Bandar Udara Rendani - PN - Kab. Manokwari | 208.170,8 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pengembangan Bandar Udara Anggi - PN - Kab. Pegunungan Arfak | 5.000,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pengembangan Bandar Udara DEO - Sorong, Papua Barat - PN - Kota Sorong | 60.000,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pengembangan Bandar udara Sobaham - PN - Kab. Yahukimo | 5.000,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pengembangan Bandar Udara Oksibil - PN - Kab. Pegunungan Bintang | 5.000,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| *Aspek: Energi dan TIK* | | |
| Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T - Provinsi Papua Barat | 2.751,5 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| APDAL - Kab. Maybrat | 2.401,1 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T - Provinsi Papua | 8.254,6 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| APDAL - Kab. Puncak Jaya | 2.277,2 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| APDAL - Kab. Pegunungan Bintang | 5.259,3 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| APDAL - Kab. Puncak | 40.610,3 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| BTS 4G / *Lastmile* Papua dan Papua Barat - Pusat | 568.573,2 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| OM BTS 4G / *Lastmile* Papua dan Papua Barat - Pusat | 1.702.600,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Pengadaan Sarana Pendukung Teknologi dan Media Baru Siaran Radio Prioritas Nasional (PN) - Kab. Nduga | 600,0 | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA |
| *Aspek: Angkutan Udara Perintis* | | |
| Angkutan Udara Perintis - Kab. Manokwari | 18.312,6 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Angkutan Udara Perintis - Kota Sorong | 8.279,6 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Angkutan Udara Perintis - Kab. Jayawijaya | 17.136,3 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Angkutan BBM Angkutan Udara Perintis - Kab. Jayawijaya | 5.203,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Angkutan Kargo Perintis (MP) - Kab. Yahukimo | 7.456,6 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Angkutan Udara Perintis - Kab. Yahukimo | 23.257,2 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |



SK No 168280 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Angkutan BBM Angkutan Udara Perintis - Kab. Yahukimo | 2.916,1 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Angkutan Kargo Perintis (MP) - Kab. Pegunungan Bintang | 27.220,6 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Angkutan BBM untuk Kargo Perintis (MP) - Kab. Pegunungan Bintang | 3.843,9 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Angkutan Udara Perintis - Kab. Yalimo | 32.337,2 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| 15) MP: Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda | | |
| Dukungan Belanja K/L | 334.886,7 | |
| *Aspek: Non Fisik* | | |
| Layanan Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam Pascabencana - Kab. Pandeglang | 430,8 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) |
| Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pemulihan ekonomi pasca bencana - Pusat | 2.000,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Bantuan Permodalan bagi Usaha Mikro yang Terdampak Bencana - Provinsi Banten | 306,7 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Bantuan Permodalan bagi Usaha Mikro yang Terdampak Bencana - Provinsi Nusa Tenggara Barat | 306,7 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Bantuan Permodalan bagi Usaha Mikro yang Terdampak Bencana - Provinsi Sulawesi Tengah | 306,7 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan pemulihan sosial dan layanan dukungan psikososial - Pusat | 21.526,7 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| *Aspek: Fisik* | | |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Pasca Bencana - Kota Palu | 60.570,9 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah - Provinsi Sulawesi Tengah | 63.539,6 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| *Emergency Assistance Loan For Rehabilitation and Reconstruction* Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Donggala dan Pelabuhan Wani - Provinsi Sulawesi Tengah | 100.000,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Rekonstruksi dan Rehabilitasi Bandara Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie Palu - Kota Palu | 85.000,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Dukungan BUMN | | |
| Pembangunan Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap | 205.000,0 | BUMN |
| 16) MP: PKSN Kawasan Perbatasan Negara | | |
| Dukungan Belanja K/L dan DAK | 112.569,8 | |
| *Aspek: Simpul Utama Transportasi* | | |
| Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi (6504 - Kab. Nunukan) | 8.165,3 | DAK |
| Jalan Desa Strategis yang Ditingkatkan di Kawasan Perbatasan - Kab. Sambas | 4.154,5 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Jalan untuk mendukung Prukades dan kegiatan ekonomi yang dibangun - Kab. Sambas | 1.000,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar - Kab. Nunukan | 1.000,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |



SK No 168281 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar - Kab. Merauke | 1.000,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Pembangunan Terminal Barang Internasional Aruk Kalbar Tahap V ( Termasuk Supervisi ) | 25.000,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pengembangan Bandar Udara Nunukan - PN - Kab. Nunukan | 8.722,1 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pengembangan Pelabuhan Sungai Nyamuk - Kab. Nunukan | 57.148,5 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| *Aspek: Pusat Pertumbuhan Ekonomi* | | |
| Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi MP PKSN Perbatasan Negara | 1.000,0 | BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP) |
| Embung yang Dibangun di Kawasan Perbatasan - Kab. Belu | 3.344,4 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Kawasan Kelapa - Kab. Sambas | 330,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| 17) MP: Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria) | | |
| Dukungan Belanja K/L | 116.455,6 | |
| *Aspek: Redistribusi tanah* | | |
| SHAT Redistribusi Tanah - Provinsi Sumatera Utara | 210,0 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| SHAT Redistribusi Tanah - Provinsi Jawa Barat | 163,1 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| SHAT Redistribusi Tanah - Provinsi Sulawesi Tengah | 140,0 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| *Aspek: Penyusunan Peta Bidang Tanah* | | |
| PBT Redistribusi Tanah Kategori 3 - Provinsi Sumatera Utara | 2.277,0 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| PBT Redistribusi Tanah Kategori 5 - Provinsi Jawa Barat | 996,1 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| PBT Redistribusi Tanah Kategori 5 - Provinsi Jawa Timur | 513,0 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| PBT Redistribusi Tanah Kategori 2 - Provinsi Sulawesi Tengah | 1.827,0 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| *Aspek: Penyelesaian sengketa dan konflik tanah* | | |
| Surat Keputusan Penyelesaian Konflik Pertanahan - Provinsi Sumatera Utara | 164,5 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| *Aspek: Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Usaha* | | |
| Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih | 27.989,2 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Usaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT) - Provinsi Sumatera Utara | 250,9 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Usaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT) - Provinsi Jambi | 138,7 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Usaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT) - Provinsi Jawa Barat | 389,6 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Usaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT) - Provinsi Jawa Tengah | 389,6 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Usaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT) - Provinsi Jawa Timur | 250,9 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |



SK No 168282 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Usaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT) - Provinsi Bali | 250,9 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Usaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT) - Provinsi Sulawesi Utara | 250,9 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Usaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT) - Provinsi Sulawesi Tenggara | 250,9 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| *Aspek: Pemasaran dan interkoneksi dengan dunia usaha* | | |
| Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Sumatera Utara | 3.300,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Jambi | 2.250,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Bengkulu | 1.125,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Jawa Barat | 8.025,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Jawa Tengah | 7.350,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Jawa Timur | 7.350,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Banten | 1.125,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Sulawesi Utara | 1.125,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Sulawesi Tengah | 1.500,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Fasilitasi Pengembangan BUMDesa - Provinsi Sulawesi Tenggara | 1.500,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Pembentukan/Pengembagan Koperasi Berbasis Komoditas di Kalangan Kelompok Strategis - Provinsi Sulawesi Tengah | 590,9 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| *Aspek: Pemanfaatan dan Penggunaan Aset* | | |
| Akses Reforma Agraria Kategori III - Provinsi Sumatera Utara | 1.831,5 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria (Akses RA Tahun ke 2) - Provinsi Bengkulu | 291,6 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| Akses Reforma Agraria Kategori V - Provinsi Jawa Barat | 4.029,3 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| Akses Reforma Agraria Kategori V - Provinsi Jawa Timur | 2.032,8 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| Akses Reforma Agraria Kategori II - Provinsi Sulawesi Tengah | 2.351,1 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| *Aspek: Koordinasi kelembagaan melalui GTRA* | | |
| Data GTRA Provinsi - Provinsi Jawa Tengah | 1.108,6 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| Data GTRA Provinsi - Provinsi Sulawesi Tenggara | 1.085,1 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| Data GTRA Provinsi - Provinsi Jawa Barat | 1.187,9 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| Data GTRA Provinsi - Provinsi Jawa Timur | 1.315,7 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |



SK No 168283 A

| Prioritas Nasional/*Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Data GTRA Provinsi - Provinsi Sumatera Utara | 1.111,7 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| Data GTRA Provinsi - Provinsi Jambi | 968,6 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| Data GTRA Provinsi - Provinsi Sulawesi Utara | 1.112,8 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| Data GTRA Provinsi - Provinsi Sulawesi Tengah | 1.033,6 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| Data GTRA Provinsi - Provinsi Bali | 1.044,9 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| Data GTRA Provinsi - Provinsi Bengkulu | 1.053,6 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| Data GTRA Provinsi - Provinsi Banten | 977,5 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN |
| *Aspek: Dukungan modal/keuangan mikro, infrastruktur, dan teknologi tepat guna* | | |
| Sarana perbenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat - Provinsi Jawa Timur | 2.495,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Optimalisasi Reproduksi - Provinsi Jambi | 2.707,8 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Kawasan Kopi - Kab. Semarang | 8.830,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan - Kab. Minahasa Selatan | 184,4 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| PN 3: MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING | | |
| 18) MP: Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting* | | |
| Dukungan Belanja K/L dan DAK | 81.404.313,4 | |
| *Aspek: Penguatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Maternal* | | |
| Faskes yang mendapatkan Intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan *Stunting* dan mendukung penurunan AKI | 9.753,8 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dalam Peningkatan pelayanan KB pasca persalinan | 1.160,0 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu (Pro PN Provinsi DKI Jakarta) | 1.000,0 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu | 43.500,0 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon (DKI Jakarta) | 14.439,1 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon) | 507.079,5 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pendampingan ibu hamil dan Ibu pascapersalinan | 9.855,2 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3529 - Kab. Sumenep) | 17.091,8 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3571 - Kota Kediri) | 10.397,8 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3573 - Kota Malang) | 6.388,0 | DAK |



SK No 168284 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3574 - Kota Probolinggo) | 8.128,5 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3575 - Kota Pasuruan) | 12.445,4 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3576 - Kota Mojokerto) | 985,2 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3577 - Kota Madiun) | 1.723,5 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3603 - Kab. Tangerang) | 24.102,3 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3604 - Kab. Serang) | 15.447,1 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5103 - Kab. Badung) | 842,7 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5171 - Kota Denpasar) | 7.747,3 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5205 - Kab. Dompu) | 9.109,2 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5206 - Kab. Bima) | 13.199,2 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5271 - Kota Mataram) | 9.561,7 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5301 - Kab. Sumba Barat) | 14.881,1 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5306 - Kab. Belu) | 5.168,1 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5307 - Kab. Alor) | 7.983,4 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5309 - Kab. Flores Timur) | 10.207,7 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5310 - Kab. Sikka) | 11.973,0 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5311 - Kab. Ende) | 15.295,5 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5312 - Kab. Ngada) | 6.056,7 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5313 - Kab. Manggarai) | 14.764,9 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5314 - Kab. Rote Ndao) | 9.155,6 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5316 - Kab. Sumba Tengah) | 2.693,0 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5317 - Kab. Sumba Barat Daya) | 11.042,7 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5319 - Kab. Manggarai Timur) | 10.779,3 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5320 - Kab. Sabu Raijua) | 2.031,8 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5321 - Kab. Malaka) | 6.822,2 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (5371 - Kota Kupang) | 3.991,8 | DAK |



SK No 168285 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6103 - Kab. Landak) | 10.760,6 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6104 - Kab. Mempawah) | 4.501,8 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6111 - Kab. Kayong Utara) | 5.469,5 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6112 - Kab. Kubu Raya) | 8.248,0 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6171 - Kota Pontianak) | 11.919,2 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6172 - Kota Singkawang) | 2.262,2 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6203 - Kab. Kapuas) | 9.360,2 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6204 - Kab. Barito Selatan) | 2.391,5 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6205 - Kab. Barito Utara) | 1.369,7 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6208 - Kab. Seruyan) | 2.256,5 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6209 - Kab. Katingan) | 2.918,8 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6210 - Kab. Pulang Pisau) | 2.030,1 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6211 - Kab. Gunung Mas) | 3.502,6 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6212 - Kab. Barito Timur) | 3.155,8 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6271 - Kota Palangkaraya) | 1.375,8 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6303 - Kab. Banjar) | 4.469,6 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6304 - Kab. Barito Kuala) | 4.136,7 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6306 - Kab. Hulu Sungai Selatan) | 6.519,8 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6309 - Kab. Tabalong) | 6.904,0 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6310 - Kab. Tanah Bumbu) | 6.753,9 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6371 - Kota Banjarmasin) | 9.991,0 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6372 - Kota Banjarbaru) | 7.020,0 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6404 - Kab. Kutai Timur) | 6.884,5 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6409 - Kab. Penajam Paser Utara) | 604,8 | DAK |



SK No 168286 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6411 - Kab. Mahakam Ulu) | 5.794,4 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6472 - Kota Samarinda) | 10.606,0 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6474 - Kota Bontang) | 883,7 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (6503 - Kab. Tana Tidung) | 5.980,6 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7101 - Kab. Bolaang Mongondow) | 7.117,4 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7102 - Kab. Minahasa) | 12.787,0 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7103 - Kab. Kepulauan Sangihe) | 11.268,2 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7106 - Kab. Minahasa Utara) | 7.992,6 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7107 - Kab. Bolaang Mongondow Utara) | 7.273,6 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7108 - Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro) | 416,9 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7109 - Kab. Minahasa Tenggara) | 1.004,0 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7110 - Kab. Bolaang Mongondow Selatan) | 405,4 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7111 - Kab. Bolaang Mongondow Timur) | 6.796,7 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7171 - Kota Manado) | 3.365,7 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7172 - Kota Bitung) | 1.548,1 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7173 - Kota Tomohon) | 1.026,6 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7174 - Kota Kotamobagu) | 5.441,8 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7202 - Kab. Banggai) | 6.693,2 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7208 - Kab. Parigi Moutong) | 7.045,5 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7271 - Kota Palu) | 7.045,5 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7303 - Kab. Bantaeng) | 1.686,7 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7305 - Kab. Takalar) | 3.342,2 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7308 - Kab. Maros) | 6.688,3 | DAK | |



SK No 168287 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7310 - Kab. Barru) | 273,8 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7311 - Kab. Bone) | 4.710,4 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7312 - Kab. Soppeng) | 3.434,1 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7313 - Kab. Wajo) | 3.935,4 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7315 - Kab. Pinrang) | 2.908,8 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7318 - Kab. Tana Toraja) | 2.062,3 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7326 - Kab. Toraja Utara) | 3.120,1 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7371 - Kota Makassar) | 12.447,9 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7372 - Kota Pare Pare) | 6.440,6 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7373 - Kota Palopo) | 2.848,6 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7402 - Kab. Muna) | 16.112,4 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7403 - Kab. Konawe) | 11.192,6 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7407 - Kab. Wakatobi) | 6.161,1 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7408 - Kab. Kolaka Utara) | 5.220,8 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7412 - Kab. Konawe Kepulauan) | 3.732,2 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7414 - Kab. Buton Tengah) | 2.766,4 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7471 - Kota Kendari) | 11.311,4 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7472 - Kota Bau Bau) | 17.355,9 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7571 - Kota Gorontalo) | 7.900,0 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7602 - Kab. Polewali Mandar) | 11.179,1 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7603 - Kab. Mamasa) | 4.800,1 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (7606 - Kab. Mamuju Tengah) | 577,9 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (8106 - Kab. Seram Bagian Barat) | 4.798,2 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (8171 - Kota Ambon) | 5.429,1 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (8202 - Kab. Halmahera Tengah) | 714,3 | DAK | |



SK No 168288 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (8208 - Kab. Pulau Taliabu) | 1.201,9 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (8271 - Kota Ternate) | 2.103,6 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (8272 - Kota Tidore Kepulauan) | 3.308,9 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9102 - Kab. Kaimana) | 1.806,4 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9103 - Kab. Teluk Wondama) | 491,9 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9108 - Kab. Raja Ampat) | 5.718,9 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9109 - Kab. Tambrauw) | 325,1 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9110 - Kab. Maybrat) | 3.368,2 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9111 - Kab. Manokwari Selatan) | 655,8 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9112 - Kab. Pegunungan Arfak) | 1.475,6 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9171 - Kota Sorong) | 7.521,1 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9401 - Kab. Merauke) | 7.246,8 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9402 - Kab. Jayawijaya) | 5.491,1 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9403 - Kab. Jayapura) | 1.761,4 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9409 - Kab. Biak Numfor) | 12.661,2 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9410 - Kab. Paniai) | 8.346,8 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9414 - Kab. Mappi) | 6.884,7 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9417 - Kab. Pegunungan Bintang) | 11.571,2 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9419 - Kab. Sarmi) | 5.998,0 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9426 - Kab. Waropen) | 448,3 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9427 - Kab. Supiori) | 5.723,0 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9428 - Kab. Mamberamo Raya) | 830,4 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9431 - Kab. Mamberamo Tengah) | 634,1 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9432 - Kab. Yalimo) | 1.428,0 | DAK | |



SK No 168289 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9433 - Kab. Puncak) | 1.690,1 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9434 - Kab. Dogiyai) | 1.913,3 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9435 - Kab. Intan Jaya) | 1.932,5 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9436 - Kab. Deiyai) | 1.788,6 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (9471 - Kota Jayapura) | 3.490,9 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1102 - Kab. Aceh Singkil) | 7.044,3 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1105 - Kab. Aceh Timur) | 8.052,0 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1106 - Kab. Aceh Tengah) | 9.445,0 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1107 - Kab. Aceh Barat) | 11.852,7 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1112 - Kab. Aceh Barat Daya) | 11.977,4 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1113 - Kab. Gayo Lues) | 10.120,0 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1114 - Kab. Aceh Tamiang) | 12.631,6 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1116 - Kab. Aceh Jaya) | 3.829,1 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1117 - Kab. Bener Meriah) | 5.924,0 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1118 - Kab. Pidie Jaya) | 2.667,8 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1171 - Kota Banda Aceh) | 2.174,3 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1172 - Kota Sabang) | 1.535,8 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1173 - Kota Langsa) | 7.208,4 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1174 - Kota Lhokseumawe) | 2.256,5 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1175 - Kota Subulussalam) | 2.256,1 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1201 - Kab. Nias) | 12.299,8 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1203 - Kab. Tapanuli Selatan) | 15.967,5 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1204 - Kab. Tapanuli Tengah) | 4.902,9 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1205 - Kab. Tapanuli Utara) | 11.186,3 | DAK | |



SK No 168290 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1206 - Kab. Toba) | 13.554,4 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1207 - Kab. Labuhanbatu) | 4.658,3 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1208 - Kab. Asahan) | 11.212,8 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1209 - Kab. Simalungun) | 8.317,8 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1210 - Kab. Dairi) | 13.927,7 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1211 - Kab. Karo) | 6.479,1 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1217 - Kab. Samosir) | 7.427,3 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1218 - Kab. Serdang Bedagai) | 8.001,0 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1219 - Kab. Batu Bara) | 11.118,5 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1220 - Kab. Padang Lawas Utara) | 6.879,5 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1221 - Kab. Padang Lawas) | 4.549,4 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1222 - Kab. Labuhanbatu Selatan) | 9.152,8 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1223 - Kab. Labuhanbatu Utara) | 7.790,9 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1224 - Kab. Nias Utara) | 819,8 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1225 - Kab. Nias Barat) | 6.370,7 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1271 - Kota Sibolga) | 8.081,5 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1272 - Kota Tanjung Balai) | 1.989,4 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1274 - Kota Tebing Tinggi) | 8.521,3 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1275 - Kota Medan) | 18.904,6 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1276 - Kota Binjai) | 9.739,5 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1301 - Kab. Kepulauan Mentawai) | 1.663,4 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1305 - Kab. Tanah Datar) | 9.342,3 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1306 - Kab. Padang Pariaman) | 4.078,9 | DAK | |



SK No 168291 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1309 - Kab. Pasaman) | 2.424,3 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1310 - Kab. Solok Selatan) | 7.236,3 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1311 - Kab. Dharmasraya) | 1.430,9 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1371 - Kota Padang) | 5.589,0 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1374 - Kota Padang Panjang) | 715,4 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1375 - Kota Bukit Tinggi) | 592,7 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1376 - Kota Payakumbuh) | 7.311,4 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1377 - Kota Pariaman) | 2.062,9 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1401 - Kab. Kuantan Singingi) | 7.039,8 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1402 - Kab. Indragiri Hulu) | 3.580,2 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1403 - Kab. Indragiri Hilir) | 13.563,6 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1405 - Kab. Siak) | 5.200,4 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1406 - Kab. Kampar) | 6.693,2 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1407 - Kab. Rokan Hulu) | 11.682,0 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1471 - Kota Pekanbaru) | 6.525,9 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1504 - Kab. Batanghari) | 9.360,4 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1505 - Kab. Muaro Jambi) | 5.460,0 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1507 - Kab. Tanjung Jabung Barat) | 3.312,5 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1509 - Kab. Bungo) | 10.280,7 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1571 - Kota Jambi) | 11.093,7 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1572 - Kota Sungai Penuh) | 10.562,0 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1602 - Kab. Ogan Komering Ilir) | 10.265,6 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1603 - Kab. Muara Enim) | 3.301,5 | DAK | |



SK No 168292 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1605 - Kab. Musi Rawas) | 10.527,7 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1609 - Kab. Ogan Komering Ulu Timur) | 12.300,3 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1610 - Kab. Ogan Ilir) | 16.101,4 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1611 - Kab. Empat Lawang) | 2.087,9 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1612 - Kab. Penukal Abab Lematang Ilir) | 1.348,2 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1671 - Kota Palembang) | 5.851,8 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1672 - Kota Prabumulih) | 14.382,6 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1673 - Kota Pagar Alam) | 11.920,5 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1674 - Kota Lubuk Linggau) | 11.427,1 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1701 - Kab. Bengkulu Selatan) | 6.203,2 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1702 - Kab. Rejang Lebong) | 1.395,1 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1704 - Kab. Kaur) | 4.949,9 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1706 - Kab. Mukomuko) | 4.825,8 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1709 - Kab. Bengkulu Tengah) | 3.946,8 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1771 - Kota Bengkulu) | 6.196,5 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1803 - Kab. Lampung Selatan) | 10.433,3 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1805 - Kab. Lampung Tengah) | 7.353,3 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1806 - Kab. Lampung Utara) | 5.145,3 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1807 - Kab. Way Kanan) | 905,8 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1808 - Kab. Tulang Bawang) | 10.205,9 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1809 - Kab. Pesawaran) | 2.518,2 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1813 - Kab. Pesisir Barat) | 2.637,0 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1872 - Kota Metro) | 9.034,3 | DAK | |



SK No 168293 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1901 - Kab. Bangka) | 8.504,4 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1905 - Kab. Bangka Selatan) | 6.985,8 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (1971 - Kota Pangkal Pinang) | 8.328,5 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (2105 - Kab. Kepulauan Anambas) | 1.553,5 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (2171 - Kota Batam) | 1.144,1 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (31 - Provinsi DKI Jakarta) | 2.993,9 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3201 - Kab. Bogor) | 4.461,4 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3202 - Kab. Sukabumi) | 34.086,1 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3204 - Kab. Bandung) | 42.585,0 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3207 - Kab. Ciamis) | 13.145,0 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3209 - Kab. Cirebon) | 22.652,7 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3213 - Kab. Subang) | 20.559,4 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3215 - Kab. Karawang) | 6.264,5 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3217 - Kab. Bandung Barat) | 24.118,5 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3274 - Kota Cirebon) | 14.476,5 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3275 - Kota Bekasi) | 19.915,2 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3276 - Kota Depok) | 11.506,5 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3278 - Kota Tasikmalaya) | 8.001,1 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3279 - Kota Banjar) | 5.908,3 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3304 - Kab. Banjarnegara) | 19.004,9 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3311 - Kab. Sukoharjo) | 20.078,4 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3315 - Kab. Grobogan) | 11.907,9 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3320 - Kab. Jepara) | 13.701,1 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3329 - Kab. Brebes) | 18.915,0 | DAK |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3371 - Kota Magelang) | 10.455,5 | DAK |



SK No 168294 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3373 - Kota Salatiga) | 8.270,7 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3375 - Kota Pekalongan) | 7.837,2 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3376 - Kota Tegal) | 12.159,9 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3401 - Kab. Kulon Progo) | 10.789,7 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3471 - Kota Yogyakarta) | 7.458,2 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3503 - Kab. Trenggalek) | 14.226,6 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3505 - Kab. Blitar) | 20.444,8 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3509 - Kab. Jember) | 3.704,4 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3510 - Kab. Banyuwangi) | 30.519,9 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3515 - Kab. Sidoarjo) | 27.017,7 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3516 - Kab. Mojokerto) | 17.067,1 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3519 - Kab. Madiun) | 12.015,3 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3525 - Kab. Gresik) | 9.720,3 | DAK | |
| Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting* (3526 - Kab. Bangkalan) | 10.010,4 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1101 - Kab. Simeulue) | 1.112,2 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1103 - Kab. Aceh Selatan) | 1.531,9 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1104 - Kab. Aceh Tenggara) | 1.531,9 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1105 - Kab. Aceh Timur) | 1.531,9 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1108 - Kab. Aceh Besar) | 1.455,3 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1109 - Kab. Pidie) | 1.531,9 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1110 - Kab. Bireuen) | 2.166,8 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1112 - Kab. Aceh Barat Daya) | 1.625,5 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1113 - Kab. Gayo Lues) | 1.531,9 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1114 - Kab. Aceh Tamiang) | 1.531,9 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1115 - Kab. Nagan Raya) | 1.048,1 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1116 - Kab. Aceh Jaya) | 1.625,5 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1117 - Kab. Bener Meriah) | 1.625,5 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1118 - Kab. Pidie Jaya) | 1.414,6 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1172 - Kota Sabang) | 1.144,2 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1173 - Kota Langsa) | 1.531,9 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1175 - Kota Subulussalam) | 1.531,9 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1201 - Kab. Nias) | 1.882,1 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1202 - Kab. Mandailing Natal) | 2.015,6 | DAK | |



SK No 168295 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|
| Keluarga Berencana (1203 - Kab. Tapanuli Selatan) | 1.909,8 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1204 - Kab. Tapanuli Tengah) | 2.015,6 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1206 - Kab. Toba) | 1.625,5 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1207 - Kab. Labuhanbatu) | 1.209,4 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1208 - Kab. Asahan) | 1.030,3 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1209 - Kab. Simalungun) | 1.685,1 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1210 - Kab. Dairi) | 1.431,1 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1212 - Kab. Deli Serdang) | 1.091,5 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1213 - Kab. Langkat) | 1.620,0 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1214 - Kab. Nias Selatan) | 2.138,8 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1216 - Kab. Pakpak Bharat) | 2.138,8 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1218 - Kab. Serdang Bedagai) | 1.241,6 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1219 - Kab. Batu Bara) | 1.641,4 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1220 - Kab. Padang Lawas Utara) | 2.064,0 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1221 - Kab. Padang Lawas) | 1.279,8 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1224 - Kab. Nias Utara) | 1.882,1 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1225 - Kab. Nias Barat) | 2.138,8 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1271 - Kota Sibolga) | 1.882,1 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1275 - Kota Medan) | 1.388,3 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1276 - Kota Binjai) | 1.526,8 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1278 - Kota Gunungsitoli) | 1.283,3 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1305 - Kab. Tanah Datar) | 1.007,8 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1306 - Kab. Padang Pariaman) | 1.069,0 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1375 - Kota Bukit Tinggi) | 1.431,1 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1671 - Kota Palembang) | 1.364,7 | DAK | |
| Keluarga Berencana (1771 - Kota Bengkulu) | 1.618,4 | DAK | |
| Keluarga Berencana (3201 - Kab. Bogor) | 1.685,1 | DAK | |
| Keluarga Berencana (3202 - Kab. Sukabumi) | 1.436,1 | DAK | |
| Keluarga Berencana (3203 - Kab. Cianjur) | 1.428,4 | DAK | |
| Keluarga Berencana (3204 - Kab. Bandung) | 1.914,8 | DAK | |
| Keluarga Berencana (3205 - Kab. Garut) | 1.867,0 | DAK | |
| Keluarga Berencana (3206 - Kab. Tasikmalaya) | 1.685,1 | DAK | |
| Keluarga Berencana (3207 - Kab. Ciamis) | 1.914,8 | DAK | |
| Keluarga Berencana (3208 - Kab. Kuningan) | 1.914,8 | DAK | |
| Keluarga Berencana (3209 - Kab. Cirebon) | 1.914,8 | DAK | |
| Keluarga Berencana (3210 - Kab. Majalengka) | 1.622,8 | DAK | |
| Keluarga Berencana (3211 - Kab. Sumedang) | 1.877,5 | DAK | |
| Keluarga Berencana (3212 - Kab. Indramayu) | 2.867,5 | DAK | |
| Keluarga Berencana (3213 - Kab. Subang) | 1.905,3 | DAK | |
| Keluarga Berencana (3216 - Kab. Bekasi) | 1.148,9 | DAK | |



SK No 168297 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Keluarga Berencana (3217 - Kab. Bandung Barat) | 1.148,9 | DAK |
| Keluarga Berencana (3273 - Kota Bandung) | 1.914,8 | DAK |
| Keluarga Berencana (3275 - Kota Bekasi) | 1.685,1 | DAK |
| Keluarga Berencana (3276 - Kota Depok) | 1.914,8 | DAK |
| Keluarga Berencana (3278 - Kota Tasikmalaya) | 1.914,8 | DAK |
| Keluarga Berencana (3279 - Kota Banjar) | 2.138,8 | DAK |
| Keluarga Berencana (3301 - Kab. Cilacap) | 1.627,6 | DAK |
| Keluarga Berencana (3303 - Kab. Purbalingga) | 2.015,6 | DAK |
| Keluarga Berencana (3304 - Kab. Banjarnegara) | 1.058,2 | DAK |
| Keluarga Berencana (3305 - Kab. Kebumen) | 1.914,8 | DAK |
| Keluarga Berencana (3306 - Kab. Purworejo) | 3.023,4 | DAK |
| Keluarga Berencana (3307 - Kab. Wonosobo) | 1.058,2 | DAK |
| Keluarga Berencana (3308 - Kab. Magelang) | 1.851,6 | DAK |
| Keluarga Berencana (3309 - Kab. Boyolali) | 1.240,2 | DAK |
| Keluarga Berencana (3310 - Kab. Klaten) | 1.215,9 | DAK |
| Keluarga Berencana (3311 - Kab. Sukoharjo) | 1.582,3 | DAK |
| Keluarga Berencana (3312 - Kab. Wonogiri) | 1.874,5 | DAK |
| Keluarga Berencana (3313 - Kab. Karanganyar) | 1.935,0 | DAK |
| Keluarga Berencana (3315 - Kab. Grobogan) | 1.309,8 | DAK |
| Keluarga Berencana (3316 - Kab. Blora) | 1.360,5 | DAK |
| Keluarga Berencana (3317 - Kab. Rembang) | 2.015,6 | DAK |
| Keluarga Berencana (3322 - Kab. Semarang) | 1.914,8 | DAK |
| Keluarga Berencana (3323 - Kab. Temanggung) | 1.511,7 | DAK |
| Keluarga Berencana (3324 - Kab. Kendal) | 2.015,6 | DAK |
| Keluarga Berencana (3325 - Kab. Batang) | 2.015,6 | DAK |
| Keluarga Berencana (3326 - Kab. Pekalongan) | 1.914,8 | DAK |
| Keluarga Berencana (3327 - Kab. Pemalang) | 1.464,9 | DAK |
| Keluarga Berencana (3328 - Kab. Tegal) | 1.914,8 | DAK |
| Keluarga Berencana (3329 - Kab. Brebes) | 1.579,7 | DAK |
| Keluarga Berencana (3371 - Kota Magelang) | 1.068,3 | DAK |
| Keluarga Berencana (3372 - Kota Surakarta) | 1.953,6 | DAK |
| Keluarga Berencana (3373 - Kota Salatiga) | 1.662,9 | DAK |
| Keluarga Berencana (3375 - Kota Pekalongan) | 1.901,7 | DAK |
| Keluarga Berencana (3501 - Kab. Pacitan) | 1.310,2 | DAK |
| Keluarga Berencana (3502 - Kab. Ponorogo) | 1.386,7 | DAK |
| Keluarga Berencana (3505 - Kab. Blitar) | 1.647,7 | DAK |
| Keluarga Berencana (3507 - Kab. Malang) | 1.672,7 | DAK |
| Keluarga Berencana (3509 - Kab. Jember) | 1.914,8 | DAK |
| Keluarga Berencana (3512 - Kab. Situbondo) | 2.015,6 | DAK |
| Keluarga Berencana (3514 - Kab. Pasuruan) | 1.503,1 | DAK |
| Keluarga Berencana (3515 - Kab. Sidoarjo) | 1.252,1 | DAK |
| Keluarga Berencana (3516 - Kab. Mojokerto) | 1.436,1 | DAK |



SK No 168298 A

| Prioritas Nasional/*Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|
| Keluarga Berencana (3517 - Kab. Jombang) | 1.570,2 | DAK | |
| Keluarga Berencana (3518 - Kab. Nganjuk) | 2.015,6 | DAK | |
| Keluarga Berencana (3519 - Kab. Madiun) | 1.360,5 | DAK | |
| Keluarga Berencana (3520 - Kab. Magetan) | 1.995,5 | DAK | |
| Keluarga Berencana (3524 - Kab. Lamongan) | 1.914,8 | DAK | |
| Keluarga Berencana (3525 - Kab. Gresik) | 1.327,7 | DAK | |
| Keluarga Berencana (3526 - Kab. Bangkalan) | 1.914,8 | DAK | |
| Keluarga Berencana (3527 - Kab. Sampang) | 3.023,4 | DAK | |
| Keluarga Berencana (3528 - Kab. Pamekasan) | 1.390,8 | DAK | |
| Keluarga Berencana (3529 - Kab. Sumenep) | 1.380,7 | DAK | |
| Keluarga Berencana (3571 - Kota Kediri) | 2.318,0 | DAK | |
| Keluarga Berencana (3576 - Kota Mojokerto) | 1.426,1 | DAK | |
| Keluarga Berencana (3577 - Kota Madiun) | 1.159,0 | DAK | |
| Keluarga Berencana (3601 - Kab. Pandeglang) | 2.015,6 | DAK | |
| Keluarga Berencana (3602 - Kab. Lebak) | 1.914,8 | DAK | |
| Keluarga Berencana (3673 - Kota Serang) | 1.148,9 | DAK | |
| Keluarga Berencana (3674 - Kota Tangerang Selatan) | 1.531,9 | DAK | |
| Keluarga Berencana (5201 - Kab. Lombok Barat) | 1.955,2 | DAK | |
| Keluarga Berencana (5202 - Kab. Lombok Tengah) | 2.015,6 | DAK | |
| Keluarga Berencana (5203 - Kab. Lombok Timur) | 1.914,8 | DAK | |
| Keluarga Berencana (5204 - Kab. Sumbawa) | 2.015,6 | DAK | |
| Keluarga Berencana (5205 - Kab. Dompu) | 1.924,9 | DAK | |
| Keluarga Berencana (5206 - Kab. Bima) | 1.894,7 | DAK | |
| Keluarga Berencana (5207 - Kab. Sumbawa Barat) | 3.023,4 | DAK | |
| Keluarga Berencana (5208 - Kab. Lombok Utara) | 1.534,2 | DAK | |
| Keluarga Berencana (5271 - Kota Mataram) | 1.239,6 | DAK | |
| Keluarga Berencana (5272 - Kota Bima) | 2.138,8 | DAK | |
| Keluarga Berencana (5302 - Kab. Sumba Timur) | 2.015,6 | DAK | |
| Keluarga Berencana (5303 - Kab. Kupang) | 2.138,8 | DAK | |
| Keluarga Berencana (5304 - Kab. Timor Tengah Selatan) | 2.015,6 | DAK | |
| Keluarga Berencana (5305 - Kab. Timor Tengah Utara) | 2.138,8 | DAK | |
| Keluarga Berencana (5306 - Kab. Belu) | 1.689,6 | DAK | |
| Keluarga Berencana (5308 - Kab. Lembata) | 2.138,8 | DAK | |
| Keluarga Berencana (5309 - Kab. Flores Timur) | 1.433,0 | DAK | |
| Keluarga Berencana (5310 - Kab. Sikka) | 1.264,3 | DAK | |
| Keluarga Berencana (5311 - Kab. Ende) | 1.208,7 | DAK | |
| Keluarga Berencana (5312 - Kab. Ngada) | 2.138,8 | DAK | |
| Keluarga Berencana (5313 - Kab. Manggarai) | 2.058,6 | DAK | |
| Keluarga Berencana (5314 - Kab. Rote Ndao) | 2.078,3 | DAK | |
| Keluarga Berencana (5315 - Kab. Manggarai Barat) | 2.015,6 | DAK | |



SK No 168299 A

| Prioritas Nasional/*Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Keluarga Berencana (5316 - Kab. Sumba Tengah) | 1.208,4 | DAK |
| Keluarga Berencana (5317 - Kab. Sumba Barat Daya) | 2.015,6 | DAK |
| Keluarga Berencana (5319 - Kab. Manggarai Timur) | 2.138,8 | DAK |
| Keluarga Berencana (5321 - Kab. Malaka) | 2.138,8 | DAK |
| Keluarga Berencana (5371 - Kota Kupang) | 1.285,0 | DAK |
| Keluarga Berencana (6101 - Kab. Sambas) | 2.015,6 | DAK |
| Keluarga Berencana (6102 - Kab. Bengkayang) | 1.200,3 | DAK |
| Keluarga Berencana (6103 - Kab. Landak) | 1.640,9 | DAK |
| Keluarga Berencana (6104 - Kab. Mempawah) | 1.221,6 | DAK |
| Keluarga Berencana (6107 - Kab. Sintang) | 1.005,3 | DAK |
| Keluarga Berencana (6108 - Kab. Kapuas Hulu) | 1.160,5 | DAK |
| Keluarga Berencana (6110 - Kab. Melawi) | 2.015,6 | DAK |
| Keluarga Berencana (6111 - Kab. Kayong Utara) | 2.138,8 | DAK |
| Keluarga Berencana (6171 - Kota Pontianak) | 2.489,3 | DAK |
| Keluarga Berencana (6172 - Kota Singkawang) | 1.585,1 | DAK |
| Keluarga Berencana (6301 - Kab. Tanah Laut) | 1.511,7 | DAK |
| Keluarga Berencana (6303 - Kab. Banjar) | 2.015,6 | DAK |
| Keluarga Berencana (6304 - Kab. Barito Kuala) | 1.537,3 | DAK |
| Keluarga Berencana (6305 - Kab. Tapin) | 2.015,6 | DAK |
| Keluarga Berencana (6306 - Kab. Hulu Sungai Selatan) | 1.748,6 | DAK |
| Keluarga Berencana (6309 - Kab. Tabalong) | 2.015,6 | DAK |
| Keluarga Berencana (6310 - Kab. Tanah Bumbu) | 1.723,4 | DAK |
| Keluarga Berencana (6372 - Kota Banjarbaru) | 2.015,6 | DAK |
| Keluarga Berencana (6472 - Kota Samarinda) | 1.805,4 | DAK |
| Keluarga Berencana (7104 - Kab. Kepulauan Talaud) | 1.038,0 | DAK |
| Keluarga Berencana (7208 - Kab. Parigi Moutong) | 2.138,8 | DAK |
| Keluarga Berencana (7311 - Kab. Bone) | 1.756,9 | DAK |
| Keluarga Berencana (7316 - Kab. Enrekang) | 1.785,9 | DAK |
| Keluarga Berencana (7402 - Kab. Muna) | 2.015,6 | DAK |
| Keluarga Berencana (7403 - Kab. Konawe) | 2.015,6 | DAK |
| Keluarga Berencana (7404 - Kab. Kolaka) | 2.015,6 | DAK |
| Keluarga Berencana (7405 - Kab. Konawe Selatan) | 2.015,6 | DAK |
| Keluarga Berencana (7406 - Kab. Bombana) | 1.642,7 | DAK |
| Keluarga Berencana (7407 - Kab. Wakatobi) | 3.021,4 | DAK |
| Keluarga Berencana (7408 - Kab. Kolaka Utara) | 2.138,8 | DAK |
| Keluarga Berencana (7409 - Kab. Buton Utara) | 1.898,2 | DAK |
| Keluarga Berencana (7410 - Kab. Konawe Utara) | 2.066,0 | DAK |
| Keluarga Berencana (7412 - Kab. Konawe Kepulauan) | 1.074,7 | DAK |
| Keluarga Berencana (7413 - Kab. Muna Barat) | 2.206,2 | DAK |
| Keluarga Berencana (7414 - Kab. Buton Tengah) | 1.379,5 | DAK |



SK No 168300 A

| Prioritas Nasional/*Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Keluarga Berencana (7415 - Kab. Buton Selatan) | 2.054,3 | DAK |
| Keluarga Berencana (7471 - Kota Kendari) | 1.914,8 | DAK |
| Keluarga Berencana (7504 - Kab. Bone Bolango) | 1.951,6 | DAK |
| Keluarga Berencana (7601 - Kab. Majene) | 2.138,8 | DAK |
| Keluarga Berencana (7602 - Kab. Polewali Mandar) | 1.864,4 | DAK |
| Keluarga Berencana (7603 - Kab. Mamasa) | 2.138,8 | DAK |
| Keluarga Berencana (7604 - Kab. Mamuju) | 2.015,6 | DAK |
| Keluarga Berencana (7605 - Kab. Pasangkayu) | 2.138,8 | DAK |
| Keluarga Berencana (7606 - Kab. Mamuju Tengah) | 1.390,2 | DAK |
| Keluarga Berencana (8204 - Kab. Halmahera Selatan) | 2.015,6 | DAK |
| Keluarga Berencana (8206 - Kab. Halmahera Timur) | 1.007,8 | DAK |
| Keluarga Berencana (8271 - Kota Ternate) | 1.552,0 | DAK |
| Keluarga Berencana (9105 - Kab. Manokwari) | 1.773,7 | DAK |
| Keluarga Berencana (9107 - Kab. Sorong) | 1.069,4 | DAK |
| Keluarga Berencana (9402 - Kab. Jayawijaya) | 1.007,8 | DAK |
| Keluarga Berencana (9404 - Kab. Nabire) | 1.007,8 | DAK |
| Keluarga Berencana (9408 - Kab. Kepulauan Yapen) | 1.026,6 | DAK |
| Keluarga Berencana (9409 - Kab. Biak Numfor) | 1.007,8 | DAK |
| Keluarga Berencana (9410 - Kab. Paniai) | 2.138,8 | DAK |
| Keluarga Berencana (9415 - Kab. Asmat) | 1.007,8 | DAK |
| Keluarga Berencana (9416 - Kab. Yahukimo) | 2.015,6 | DAK |
| Keluarga Berencana (9418 - Kab. Tolikara) | 1.007,8 | DAK |
| Keluarga Berencana (9419 - Kab. Sarmi) | 1.007,8 | DAK |
| Keluarga Berencana (9420 - Kab. Keerom) | 1.737,7 | DAK |
| Keluarga Berencana (9427 - Kab. Supiori) | 1.069,4 | DAK |
| Keluarga Berencana (9432 - Kab. Yalimo) | 1.007,8 | DAK |
| Keluarga Berencana (9436 - Kab. Deiyai) | 2.138,8 | DAK |
| Daerah yang mengintegrasikan dan mempunyai rencana aksi daerah program kesehatan Ibu dan KB berbasis Hak | 576,0 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| Kegiatan Koordinasi/Advokasi Terkait Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir | 4.146,4 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Buku/Media KIE Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Ibu dan Bayi Baru Lahir | 20.063,2 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Tenaga Kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (LP) | 11.279,5 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Laporan Pemantauan dan Evaluasi Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Baru Lahir | 1.780,6 | KEMENTERIAN KESEHATAN |



SK No 168301 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Provinsi/Kab/Kota yang mendapatkan fasilitasi/pembinaan Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir | 26.876,8 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Alat Non Medik (IsDB) - LR | 44.991,4 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Tenaga Kesehatan yang Ditingkatkan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Reproduksi Catin Dan KB (LP) | 1.884,9 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Kab/Kota yang Melaksanakan Implementasi *Skrining* Layak Hamil Bagi PUS di Kab/Kota Lokus AKI AKB (LP) | 130,9 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB) - LR | 892.871,8 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB) - LR | 205.904,2 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pembinaan RS PONEK serta Pelayanan ibu dan Anak | 500,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Tenaga Kesehatan Terlatih Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Ktp/A Dan TPPO dan Aborsi Atas Indikasi (LP) | 1.639,4 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Rumah Sakit yang Diberikan Pembinaan Dalam Implementasi Operasi *Sectio Caesaria* Darurat dalam Waktu Kurang Atau Sama Dengan 30 Menit | 500,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Tenaga Kesehatan/ non kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Surveilans gizi dan KIA | 1.461,9 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Provinsi/Kab/Kota yang mendapatkan fasilitasi/pembinaan Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir | 6.040,6 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Tenaga Kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir | 12.729,9 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Tenaga Kesehatan/ non kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Surveilans gizi dan KIA (LP) | 3.364,1 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Workshop Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Catin dan KB (LP) | 12.951,7 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Penduduk yang mendapatkan Jampersal | 67.500,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak | 600,0 | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| *Aspek: Pemenuhan Intervensi Spesifik Stunting* | | |
| Paket Penyediaan Vaksin Imunisasi Rutin Dasar dan Lanjutan (LP) | 1.252.021,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Ibu Hamil KEK yang mendapat makanan tambahan dari *Buffer Stock* | 60.184,9 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Monitoring dan Supervisi Imunisasi | 8.386,6 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Sosialisasi Pelaksanaan Imunisasi | 6.112,8 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Koordinasi Pelaksanaan Imunisasi | 7.259,9 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Media Komunikasi, Informasi, Edukasi Imunisasi | 19.842,1 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Peningkatan Kapasitas Bidang Imunisasi | 8.286,6 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Kampanye Pencegahan *Stunting* Melalui Berbagai Media (LP) | 18.353,7 | KEMENTERIAN KESEHATAN |



SK No 168302 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Terkait Perbaikan Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita | 1.157,6 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Balita Kurus yang mendapat makanan tambahan dari Buffer Stock | 26.175,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Terlaksananya Uji Laboratorium MT Bumil KEK dan Balita Gizi Kurang | 1.360,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Buku/Media KIE Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita | 7.157,2 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Tenaga Kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita | 6.509,1 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Laporan Pemantauan dan Evaluasi Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita | 4.926,2 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Provinsi/Kab/kota yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita | 1.454,5 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Alat dan Bahan Kesehatan Pendukung Imunisasi | 20.512,8 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Anak balita yang mendapat Suplementasi Gizi Mikro | 13.838,4 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Buku/Media KIE Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Pembinaan Anak Usia Sekolah dan Remaja | 1.370,6 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Laporan Pemantauan dan Evaluasi Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Pembinaan Anak Usia Sekolah dan Remaja | 2.742,1 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Bayi baru lahir yang mendapat *skrining* hipotiroid kongenital (SHK) | 11.161,6 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Provinsi/Kab/kota yang dilakukan fasilitasi Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Pemberian TTD Bagi Remaja | 5.522,4 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Bimtek, monev, Pembinaan Pelaksanaan Imunisasi | 6.573,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Kegiatan Surveilans Gizi dan KIA | 2.257,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Tenaga Kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita | 34.859,6 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Tenaga Kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Pemberian TTD Bagi Remaja (LP) | 6.320,1 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian penyakit Filariasis dan Kecacingan (LP) | 18.063,3 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Layanan survei faktor risiko penyakit diare (HS) | 1.174,4 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| *Aspek: Pemenuhan Intervensi Sensitif Stunting pada Sasaran Prioritas* | | |
| Remaja usia 15-19 tahun yang mendapatkan edukasi gizi dan anemia dalam mendukung percepatan penurunan *Stunting* | 10.000,0 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan *Stunting* | 6.683,4 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |



SK No 168303 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Kampanye Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat nasional | 58.682,8 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| Layanan Pusat Pengendali data *Stunting* | 2.000,0 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| Kebijakan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota | 1.000,0 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| Sistem Informasi dan Sarana TI *Stunting* | 15.000,0 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus *Stunting* provinsi | 4.800,0 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi dan kab/kota | 76.680,0 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK | 41.596,9 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| Kampanye Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Provinsi dan kab/kota | 135.000,0 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan *Stunting* | 220.013,3 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| Laporan Monitoring dan evaluasi TPKTPPS SATGAS percepatan penurunan *Stunting* provinsi kab/kota | 6.600,0 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| Kegiatan penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting* Pusat | 11.000,0 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| Layanan Humas Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Pusat | 1.000,0 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| Kegiatan penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi | 24.945,4 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| Layanan Humas Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Provinsi | 4.200,0 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| Layanan Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* tk provinsi | 2.288,2 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| Provinsi yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan SDM Lini lapangan | 1.100,0 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| Penyelenggaraan koordinasi intensifikasi satgas Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi dan kab/kota pada 12 Provinsi prioritas | 12.200,0 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| Penguatan kualitas dan sistem data keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan *Stunting* | 25.000,0 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| Pelatihan bagi pelaksana PPKS dalam percepatan penurunan *Stunting* | 21.581,9 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| Pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan *Stunting* | 22.000,0 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| Verifikasi dan validasi data keluarga sasaran konvergesi di 12 provinsi | 16.800,0 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi pengembangan DASHAT di Kampung KB pada 12 provinsi prioritas | 6.000,0 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| Fasilitasi dan koordinasi pendampingan perguruan tinggi/mahasiswa kepada pemda pemprov kab/kota | 10.200,0 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| Pelaksanaan pelatihan penanggulangan *Stunting* dan gerakan masyarakat sehat di kawasan perbatasan | 700,0 | BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP) |
| Laporan Koordinasi pengawasan pangan fortifikasi | 2.321,0 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |



SK No 168304 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT | 183.881,5 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Desa Pangan Aman | 34.330,1 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT | 1.791,3 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Rekomendasi Kebijakan Penanganan *Stunting* Berdasarkan Hasil Asesmen Komposisi Tubuh dengan Menggunakan Teknik Perunut Isotop Stabil | 1.400,0 | BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) |
| Bantuan Pengembangan Peningkatan Mutu UKS/M | 6.500,0 | KEMENTERIAN AGAMA |
| Daerah yang meningkat kapasitas aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan *Stunting* | 800,0 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| Desa yang Mendapatkan Penanganan Konvergensi *Stunting* | 11.384,4 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Kampanye Gerakan Memasyarakatan Makan Ikan (Gemarikan) | 33.300,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri oleh daerah | 3.400,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Pelatihan Keterampilan dan Kompetensi Lainnya pada Proyek Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB) | 4.039,5 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Proyek Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB) | 31.859,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS pada Proyek Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB) | 4.324,1 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Kampanye Posyandu Aktif (LP) | 17.081,5 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Workshop Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Korban KtPA/TPPO dan Penyandang Disabilitas | 2.189,6 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pelatihan *Stunting* (SDM) | 5.573,4 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Diseminasi Informasi mengenai *Stunting* | 15.700,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat | 491.110,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHA atas Kesehatan (*Stunting*) | 840,0 | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| Kajian dan Pengembangan Model Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Parenting di Kawasan Asia Tenggara | 1.097,1 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| SMK yang Melaksanakan Program UKS | 3.705,8 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| Satuan PAUD Menyelenggarakan Pendekatan Holistik Integratif | 31.666,4 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| Satuan PAUD yang melaksanakan program UKS | 9.080,3 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| SD yang Melaksanakan Program UKS | 14.529,7 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| SMP yang Melaksanakan Program UKS | 4.691,6 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| SMA yang melaksanakan program UKS | 3.705,8 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang Melaksanakan Program UKS | 7.285,0 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |



SK No 168305 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako | 45.120.000,0 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat | 28.735.328,0 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| 19) MP: Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas) | | |
| Dukungan Belanja K/L | 456.691,6 | |
| *Aspek: Penyediaan Sarana* | | |
| Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (SBSN) - Kota Bandung | 42.246,0 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (SBSN) - Kota Depok | 31.152,3 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (PHLN) - Kab. Sleman | 55.433,5 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| *Aspek: Pengembangan Prasarana* | | |
| Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (PHLN) - Pusat | 100,0 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN) - Kota Bandung | 292.393,0 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN) - Kota Depok | 31.860,7 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (PHLN) - Kab. Sleman | 3.506,1 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| 20) MP: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 | | |
| Dukungan Belanja K/L | 635.688,1 | |
| *Sub: Revitalisasi SMK yang mendukung Industri 4.0* | | |
| *Aspek: Revitalisasi SMK yang Mendukung Industri 4.0* | | |
| SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0 | 72.212,5 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| *Sub: Sistem Informasi Pasar Kerja* | | |
| *Aspek: Revitalisasi Sistem Informasi Pasar Kerja* | | |
| Layanan Job Matching | 9.900,0 | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN |
| Layanan Analisis Pasar Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri | 1.583,7 | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN |
| Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SIAP Kerja | 15.270,0 | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN |
| Layanan Analisis Kebutuhan Pelatihan Kerja Dalam Negeri/Luar Negeri | 2.007,1 | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN |
| *Sub: Transformasi Balai Latihan Kerja (BLK)* | | |
| *Aspek: Reformasi Kelembagaan* | | |
| Transformasi BLK Baru | 83.747,8 | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN |
| *Aspek: Peningkatan Kualitas Pelatihan* | | |
| Lembaga Pelatihan Kerja dan Produktivitas yang Ditingkatkan Kualitas Mutu dan Lembaga | 28.711,3 | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN |
| Sarana dan Prasarana Bidang Pelatihan dan Produktivitas | 316.192,2 | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN |



SK No 168306 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| *Sub: Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi* | | |
| *Aspek: Peningkatan Kompetensi dan Keahlian Mahassiwa Pendidikan Tinggi Vokasi* | | |
| Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi Yang Mengikuti Uji Kompetensi Profesi | 4.743,5 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| *Aspek: Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik* | | |
| SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi | 17.820,2 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| *Aspek: Penguatan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Vokasi* | | |
| Pendidikan Tinggi Vokasi yang menerapkan Penguatan Mutu Berstandar Industri | 83.500,0 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| 21) MP: Reformasi Sistem Perlindungan Sosial | | |
| Dukungan Belanja K/L | 141.402.613,0 | |
| *Sub: Pengembangan Registrasi Sosial Ekonomi* | | |
| *Aspek: Sinkronisasi dan Integrasi Data untuk Penargetan Perlindungan Sosial* | | |
| Rancang Bangun Sistem PB | 1.210,0 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) |
| Sistem Informasi Bidang Kebencanaan | 1.500,0 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) |
| Pemenuhan Kebutuhan Logistik PB | 5.000,0 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) |
| Daerah yang Menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam SIPD Bidang Perencanaan Anggaran | 1.450,0 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| *Data Center* Nasional | 1.189.085,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Standar Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim | 3.500,0 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| Warga masyarakat dilokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana | 20.879,2 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Tagana yang ditingkatkan kompetensinya dan ditugaskan dalam penanganan bencana | 10.255,3 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Tagana yang mendapatkan kelengkapan siaga bencana | 92.606,6 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Sistem Asesmen dan Layanan Sosial Anak yang Terintegrasi | 5.500,0 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| *Aspek: Peningkatan Cakupan Data dari Desa/Kelurahan* | | |
| Publikasi/Laporan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi | 872.266,5 | BADAN PUSAT STATISTIK |
| Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional | 11.558,7 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| Pendampingan Desa | 1.542.999,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM | 7.162,9 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial | 11.928,1 | KEMENTERIAN SOSIAL |



SK No 168307 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| *Aspek: Pengelolaan Data* | | |
| Provinsi yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Produktif dan Lansia (LP) | 4.693,5 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan layanan pengaduan penanggulangan kemiskinan terintegrasi dengan Command Center | 17.487,4 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Desa/ Kelurahan yang menyelenggarakan layanan pengaduan penanggulangan kemiskinan terintegrasi dengan Command Center | 1.268,8 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Kabupaten /Kota yang mengembangkan SLRT | 17.487,4 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Desa/ Kelurahan yang menyelenggarakan Puskesos | 1.268,8 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| PSKS Perorangan yang Meningkat Peran Aktifnya dalam Pelayanan Sosial | 103.964,6 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| *Sub: Penguatan Bantuan Sosial* | | |
| *Aspek: Perluasan Pilihan KPM dan Pengembangan Skema Penyaluran* | | |
| Rekomendasi Pengembangan Desa Digital melalui *Smart Village* | 43.210,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Implementasi Digitalisasi Penyaluran Bantuan Sosial (PN) | 304,1 | KEMENTERIAN KEUANGAN |
| Literasi Digital | 550.000,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Data Terpadu Kesejahteraan Sosial | 11.547,4 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Pengasuhan Alternatif (adopsi *single parent* dan *Inter country*) | 1.710,0 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| *Aspek: Penguatan Sistem Pendukung* | | |
| Pedoman terkait Peningkatan kualitas hidup lansia melalui pendampingan keluarga | 200,0 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) |
| Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang ditingkatkan kapasitasnya | 52.580,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Fasilitasi Pengembangan BUMDesa Bersama | 10.100,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Fasilitasi Pengembangan BUMDesa | 64.507,5 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa DTT | 1.277,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Kelompok Masyarakat yang Difasilitasi dan Dibina Kebugaran Jasmani (LP) | 1.683,9 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kapasitas Kesehatan Lansia Dan Implementasi Standar Pelayanan Geriatri Yang Berkualitas (LP) | 1.017,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Solusi Ekosistem | 137.684,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Akses Internet | 422.320,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Akses Internet Papua dan Papua Barat | 137.878,4 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal | 2.538,6 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| Insentif Kinerja Penyuluh Pertanian | 212.363,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur | 39.461,6 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Jaringan Komunikasi Data | 51.029,1 | KEMENTERIAN SOSIAL |



SK No 168308 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas (Penyandang Disabilitas) | 3.480,0 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas (Anak) | 2.625,2 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas (Lanjut Usia) | 2.630,0 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas | 3.200,0 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana | 1.159,3 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas Netra | 3.642,0 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas (KP NAPZA) | 3.200,0 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Sumber Daya Manusia yang dikelola | 1.420.467,0 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Pendamping Rehabilitasi Sosial yang Mendapatkan Honorarium | 88.188,0 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| *Aspek: Integrasi dan Transformasi Program Bantuan Sosial* | | |
| Santri PPS Ula/ Paket A/ Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP | 10.569,2 | KEMENTERIAN AGAMA |
| Siswa Madrasah MI Penerima PIP | 423.123,2 | KEMENTERIAN AGAMA |
| Siswa SMTK/SMAK Penerima PIP | 11.147,0 | KEMENTERIAN AGAMA |
| Santri PPS Wustha/ Paket B/ Hanya Mengaji/ Muadalah Terima PIP | 69.399,8 | KEMENTERIAN AGAMA |
| Siswa Madrasah MTs Penerima PIP | 558.814,5 | KEMENTERIAN AGAMA |
| Siswa SMPTK Penerima PIP | 3.736,5 | KEMENTERIAN AGAMA |
| Siswa Madrasah MA Penerima PIP | 320.372,0 | KEMENTERIAN AGAMA |
| Siswa SDTK Penerima PIP | 1.087,7 | KEMENTERIAN AGAMA |
| Santri PPS Ulya/ Paket C/ Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP | 45.571,0 | KEMENTERIAN AGAMA |
| Siswa SMAK Penerima PIP | 2.078,0 | KEMENTERIAN AGAMA |
| Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran | 3.090,1 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya | 3.184.824,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN) |
| Siswa SD/Paket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar | 2.830.650,0 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| Siswa SMP/Paket B Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar | 2.726.502,0 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| Siswa SMA/Paket C Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar | 1.183.707,0 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| Siswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar | 1.538.461,0 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| Warga Masyarakat Rawan Bencana Sosial yang Mendapat Bantuan | 19.642,0 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat | 128.885,1 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas | 8.000,0 | KEMENTERIAN SOSIAL |



SK No 168309 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial | 171.582,9 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (Penyandang Disabilitas) | 6.960,0 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia | 1.645,0 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Lanjut Usia yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial | 142.566,0 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (Lanjut Usia) | 5.400,0 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Warga KAT Yang Mendapat Pemberdayaan Tahun I | 72.270,5 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA | 1.900,0 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Korban Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial | 39.138,3 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (KP NAPZA) | 6.320,0 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus | 1.929,4 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial | 109.580,5 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (Anak) | 6.350,0 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako | 122.063,2 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako | 45.120.000,0 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Penyandang DIsabilitas yang Terintegrasi | 5.500,0 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Alat Bantu Aksesibilitas Penyandang Disabilitas | 55.600,0 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Lanjut Usia yang Terintegrasi | 5.500,0 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan pemulihan sosial dan layanan dukungan psikososial | 21.526,7 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Korban Penyalahgunaan Napza dan Orang Dengan HIV Yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial | 24.000,0 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Anak Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial | 1.621,6 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat | 28.735.328,0 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| *Sub: Penguatan Integrasi Kepesertaan dan Informasi Jaminan Sosial* | | |
| *Aspek: Integrasi Data Jaminan Sosial* | | |
| Pelayanan koneksitas warehouse berbasis NIK Nasional | 4.913,6 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan | 2.000,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS (PK) | 46.464.000,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| *Aspek: Integrasi dan Perluasan Kepesertaan* | | |
| Instansi Pengguna Pegawai Non PNS dan Wadah/Kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah yang Mendapatkan Pemahaman Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 1.800,0 | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN |



SK No 168310 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Kajian dan Telahaan Penyelenggaraan SJSN | 6.000,0 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN |
| 22) MP: Reformasi Sistem Kesehatan Nasional | | |
| Dukungan Belanja K/L dan DAK | 23.277.528,8 | |
| *Aspek: Peningkatan Kapasitas RS dan Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan* | | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (91 - Provinsi Papua Barat) | 34.051,8 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (94 - Provinsi Papua) | 119.903,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (11 - Provinsi Aceh) | 36.301,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (12 - Provinsi Sumatera Utara) | 77.228,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1201 - Kab. Nias) | 13.341,9 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (13 - Provinsi Sumatera Barat) | 142.793,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1302 - Kab. Pesisir Selatan) | 8.052,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1309 - Kab. Pasaman) | 27.161,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1311 - Kab. Dharmasraya) | 19.576,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1372 - Kota Solok) | 3.231,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (14 - Provinsi Riau) | 102.093,4 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1408 - Kab. Bengkalis) | 62.253,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1473 - Kota Dumai) | 17.346,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (15 - Provinsi Jambi) | 106.685,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (16 - Provinsi Sumatera Selatan) | 3.379,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (17 - Provinsi Bengkulu) | 112.699,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1701 - Kab. Bengkulu Selatan) | 11.525,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1704 - Kab. Kaur) | 2.711,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1706 - Kab. Mukomuko) | 61.488,4 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1709 - Kab. Bengkulu Tengah) | 4.271,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1810 - Kab. Pringsewu) | 3.674,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (19 - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) | 23.931,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1902 - Kab. Belitung) | 24.065,4 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (21 - Provinsi Kepulauan Riau) | 107.990,9 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (32 - Provinsi Jawa Barat) | 15.093,0 | DAK |



SK No 168311 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Penguatan Sistem Kesehatan (3309 - Kab. Boyolali) | 41.742,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3323 - Kab. Temanggung) | 5.442,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3402 - Kab. Bantul) | 15.535,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (35 - Provinsi Jawa Timur) | 7.593,9 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3510 - Kab. Banyuwangi) | 16.924,3 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3515 - Kab. Sidoarjo) | 13.335,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3527 - Kab. Sampang) | 22.504,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (36 - Provinsi Banten) | 25.092,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (51 - Provinsi Bali) | 31.653,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5102 - Kab. Tabanan) | 18.925,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5106 - Kab. Bangli) | 8.886,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (52 - Provinsi Nusa Tenggara Barat) | 32.808,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (53 - Provinsi Nusa Tenggara Timur) | 22.289,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (61 - Provinsi Kalimantan Barat) | 70.424,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (62 - Provinsi Kalimantan Tengah) | 91.961,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6207 - Kab. Lamandau) | 17.284,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (63 - Provinsi Kalimantan Selatan) | 51.550,4 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (65 - Provinsi Kalimantan Utara) | 7.551,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (71 - Provinsi Sulawesi Utara) | 87.844,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (72 - Provinsi Sulawesi Tengah) | 75.096,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (73 - Provinsi Sulawesi Selatan) | 19.123,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (74 - Provinsi Sulawesi Tenggara) | 50.978,8 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (76 - Provinsi Sulawesi Barat) | 90.282,4 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (82 - Provinsi Maluku Utara) | 50.511,2 | DAK |
| Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam/Hari | 250,0 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| Pengembangan fasilitas rujukan Kawasan Indonesia Timur | 400.000,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Peningkatan Mutu melalui Akreditasi dan Pengukuran Indikator Mutu Pelayanan Kesehatan di FKRTL (LR) | 4.294,9 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Rekomendasi Kebijakan Pengembangan RS di Bidang Klinis (IsDB) - LR | 6.596,4 | KEMENTERIAN KESEHATAN |



SK No 168312 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Peningkatan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Proyek IsDB - LR | 3.147,2 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Faslitasi Pengelolaan Proyek Penguatan RS Rujukan Nasional dan UPT Vertikal (IsDB) (LR) | 97.280,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Rujukan Nasional, Provinsi, Regional dan RS Kelas A dan B | 3.028,9 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Rekomendasi Kebijakan Pengembangan RS dalam meningkatkan sistem rujukan (IsDB) - LR | 2.410,7 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Proyek Penguatan Pusat Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB) - LR | 26.769,2 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pembinaan, Pendampingan dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bergerak (LP) | 2.316,3 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pedoman dalam rangka pemenuhan SP fasyankes lainnya | 1.500,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB) - LR | 205.904,2 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pelatihan Keterampilan dan Kompetensi Lainnya pada Proyek Penguatan Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB) - LR | 15.561,1 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pembangunan dan Pengembangan RS UPT Vertikal Surabaya | 815.851,8 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pembangunan dan Pengembangan RS UPT Vertikal Makassar | 909.753,5 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pelatihan Gangguan Indera dan Fungsional (LP) | 1.645,6 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Dukungan peningkatan Mutu, Akreditasi, Keselamatan pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dekonsentrasi) (LR) | 41.236,1 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| OM Akses Internet | 1.850.097,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| OM Akses Internet Papua dan Papua Barat | 119.045,6 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Angkutan Udara Perintis | 381.352,9 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Peningkatan Kapasitas RS Kemhan-TNI | 920.885,9 | KEMENTERIAN PERTAHANAN |
| Pemenuhan Rumah Sakit Polri (PN) | 100.000,0 | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
| *Aspek: Penguatan Keamanan dan Ketahanan Kesehatan* | | |
| Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice | 74.925,2 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman | 25.717,7 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 19.563,2 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 7.998,8 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice | 100.000,0 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko | 5.066,6 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Kab/kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai standar | 3.438,0 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar | 1.025,8 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |



SK No 168313 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang Diselesaikan | 8.736,4 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Surat Keterangan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang Diselesaikan Tepat Waktu | 1.063,1 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan post market pangan olahan sesuai standar | 4.074,9 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar | 2.983,9 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Jejaring Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan yang Berpartisipasi Aktif | 1.867,5 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan *Grand Design* | 5.657,0 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | 8.089,3 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan | 15.738,6 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai standar | 18.470,0 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi | 24.991,4 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT | 183.881,5 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Laboratorium BB/BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi standar Good Laboratory Practices (GLP) | 2.666,6 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 48.382,5 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT | 34.319,0 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Pengembangan dan Penerapan Teknologi BSL-3 (*BIOSAFETY* LEVEL 3) | 239,1 | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN) |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1403 - Kab. Indragiri Hilir) | 6.469,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3302 - Kab. Banyumas) | 4.949,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3305 - Kab. Kebumen) | 5.796,3 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3310 - Kab. Klaten) | 5.595,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3319 - Kab. Kudus) | 3.120,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3325 - Kab. Batang) | 6.837,8 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3328 - Kab. Tegal) | 35.603,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3502 - Kab. Ponorogo) | 5.655,8 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3508 - Kab. Lumajang) | 5.696,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3524 - Kab. Lamongan) | 5.509,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3572 - Kota Blitar) | 2.376,8 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6208 - Kab. Seruyan) | 7.850,7 | DAK |



SK No 168314 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Potensial KLB/Wabah (HS) | 7.809,1 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| NSPK Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Potensial KLB/Wabah (HS) | 1.015,3 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Koordinasi Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Potensial KLB/Wabah (HS) | 4.330,6 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Monitoring dan Supervisi Surveilans dan Respon KLB/Wabah (HS) | 5.021,6 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah (HS) | 17.083,7 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Sosialisasi dan Diseminasi (HS) | 1.814,8 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (HS) | 56.596,7 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Koordinasi pelaksanaan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (HS) | 1.830,6 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Kalibrasi alat laboratorium (HS) | 3.262,5 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pemeriksaan sampel penyakit dan lingkungan (HS) | 5.774,2 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pengadaan alat dan bahan laboratorium (HS) | 32.487,8 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pemeliharaan alat kesehatan (HS) | 4.954,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Tenaga Kesehatan yang dilatih terkait Manajemen Laboratorium Kesehatan Masyarakat (LP) | 1.498,3 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Tenaga Kesehatan yang dilatih terkait Manajemen Laboratorium Kesehatan Masyarakat (LP) | 9.599,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pengadaan Alat dan Bahan Kesehatan Kekarantinaan Kesehatan (HS) | 97.993,3 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pendidikan dan Pelatihan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk (HS) | 7.657,4 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pelatihan Surveilans dan Respon KLB/ Wabah | 5.911,2 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Fasilitasi, Monitoring Surveilans dan Respon KLB/Wabah | 5.349,5 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Layanan deteksi dini dan respon kejadian penyakit menular (HS) | 32.724,1 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pemantauan dan Monev Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (LP) | 1.725,3 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pengadaan Alat dan Bahan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging (HS) | 1.769,1 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Surveilans dan Deteksi Dini Penyakit Infeksi Emerging (HS) | 672,5 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Monitoring dan Supervisi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging (HS) | 1.489,2 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Kab/kota yang dibina dalam pemenuhan kualitas kesehatan lingkungan | 8.473,5 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Rekomendasi Kebijakan Pembaharuan Sistem Kesehatan Nasional (LP) | 1.124,8 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Surveilans dan Deteksi Dini Penyakit Potensial KLB/Wabah (HS) | 2.001,8 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pengadaan Alat dan Bahan Kesehatan Pengendalian Vektor (HS) | 17.743,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Media Komunikasi, Informasi, Edukasi Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (HS) | 1.449,3 | KEMENTERIAN KESEHATAN |



SK No 168315 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Pengadaan Sarana, Prasarana, Alat dan Bahan Kesehatan Surveilans Berbasis Laboratorium (HS) | 1.882,8 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Respon Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (HS) | 1.071,9 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Monitoring dan Supervisi Surveilans Berbasis Laboratorium (HS) | 2.293,3 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Rencana Kontinjensi dan Simulasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) (HS) | 4.164,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Surveilans dan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (HS) | 4.607,7 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan | 71.620,2 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| Pelayanan Kesehatan Hewan | 1.321.111,0 | KEMENTERIAN PERTANIAN |
| *Aspek: Penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)* | | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (8207 - Kab. Pulau Morotai) | 41.047,4 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (8208 - Kab. Pulau Taliabu) | 899,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (8271 - Kota Ternate) | 2.250,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (8272 - Kota Tidore Kepulauan) | 4.723,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9101 - Kab. Fak Fak) | 53.310,3 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9102 - Kab. Kaimana) | 3.284,9 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9103 - Kab. Teluk Wondama) | 95.214,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9104 - Kab. Teluk Bintuni) | 77.249,4 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9105 - Kab. Manokwari) | 15.845,4 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9106 - Kab. Sorong Selatan) | 67.975,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9107 - Kab. Sorong) | 94.697,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9108 - Kab. Raja Ampat) | 19.713,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9109 - Kab. Tambrauw) | 67.745,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9110 - Kab. Maybrat) | 95.274,4 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9111 - Kab. Manokwari Selatan) | 622,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9112 - Kab. Pegunungan Arfak) | 16.752,8 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9171 - Kota Sorong) | 2.107,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9401 - Kab. Merauke) | 45.837,3 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9402 - Kab. Jayawijaya) | 123.615,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9403 - Kab. Jayapura) | 19.865,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9404 - Kab. Nabire) | 30.849,3 | DAK |



SK No 168316 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|
| Penguatan Sistem Kesehatan (9408 - Kab. Kepulauan Yapen) | 10.540,3 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9409 - Kab. Biak Numfor) | 48.568,6 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9410 - Kab. Paniai) | 3.565,7 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9411 - Kab. Puncak Jaya) | 155.163,0 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9412 - Kab. Mimika) | 34.788,3 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9413 - Kab. Boven Digoel) | 7.713,0 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9414 - Kab. Mappi) | 10.523,6 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9415 - Kab. Asmat) | 49.670,1 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9416 - Kab. Yahukimo) | 168.469,7 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9417 - Kab. Pegunungan Bintang) | 8.894,6 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9418 - Kab. Tolikara) | 126.245,6 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9419 - Kab. Sarmi) | 5.851,1 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9420 - Kab. Keerom) | 1.560,5 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9426 - Kab. Waropen) | 27.112,5 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9427 - Kab. Supiori) | 5.261,6 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9428 - Kab. Mamberamo Raya) | 4.491,3 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9429 - Kab. Nduga) | 83.801,3 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9430 - Kab. Lanny Jaya) | 130.449,2 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9431 - Kab. Mamberamo Tengah) | 3.307,6 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9432 - Kab. Yalimo) | 3.364,2 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9433 - Kab. Puncak) | 109.421,5 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9434 - Kab. Dogiyai) | 3.111,1 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9435 - Kab. Intan Jaya) | 5.944,8 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9436 - Kab. Deiyai) | 14.796,2 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (9471 - Kota Jayapura) | 1.178,6 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3218 - Kab. Pangandaran) | 3.782,0 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1101 - Kab. Simeulue) | 9.542,9 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1102 - Kab. Aceh Singkil) | 3.766,5 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1103 - Kab. Aceh Selatan) | 134.916,6 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1104 - Kab. Aceh Tenggara) | 4.384,0 | DAK | |



SK No 168317 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|
| Penguatan Sistem Kesehatan (1105 - Kab. Aceh Timur) | 3.721,7 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1106 - Kab. Aceh Tengah) | 6.885,1 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1107 - Kab. Aceh Barat) | 1.727,5 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1108 - Kab. Aceh Besar) | 2.778,5 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1109 - Kab. Pidie) | 55.098,1 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1110 - Kab. Bireuen) | 13.774,6 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1111 - Kab. Aceh Utara) | 36.391,9 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1112 - Kab. Aceh Barat Daya) | 3.545,5 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1113 - Kab. Gayo Lues) | 17.546,4 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1114 - Kab. Aceh Tamiang) | 1.648,8 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1115 - Kab. Nagan Raya) | 8.226,6 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1116 - Kab. Aceh Jaya) | 4.362,1 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1117 - Kab. Bener Meriah) | 3.648,0 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1118 - Kab. Pidie Jaya) | 1.453,8 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1171 - Kota Banda Aceh) | 555,7 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1172 - Kota Sabang) | 2.481,0 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1173 - Kota Langsa) | 3.972,5 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1174 - Kota Lhokseumawe) | 1.538,0 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1175 - Kota Subulussalam) | 1.126,2 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1203 - Kab. Tapanuli Selatan) | 4.249,7 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1204 - Kab. Tapanuli Tengah) | 18.007,5 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1205 - Kab. Tapanuli Utara) | 5.229,1 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1207 - Kab. Labuhanbatu) | 44.310,0 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1208 - Kab. Asahan) | 5.419,0 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1209 - Kab. Simalungun) | 1.095,9 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1210 - Kab. Dairi) | 2.759,2 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1212 - Kab. Deli Serdang) | 395,2 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1213 - Kab. Langkat) | 20.137,1 | DAK | |



SK No 168318 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Penguatan Sistem Kesehatan (1214 - Kab. Nias Selatan) | 38.910,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1217 - Kab. Samosir) | 2.119,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1218 - Kab. Serdang Bedagai) | 31.577,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1220 - Kab. Padang Lawas Utara) | 3.308,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1221 - Kab. Padang Lawas) | 6.390,3 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1222 - Kab. Labuhanbatu Selatan) | 8.193,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1224 - Kab. Nias Utara) | 78.772,8 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1271 - Kota Sibolga) | 527,9 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1272 - Kota Tanjung Balai) | 548,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1273 - Kota Pematang Siantar) | 4.135,3 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1275 - Kota Medan) | 2.527,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1276 - Kota Binjai) | 3.469,9 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1301 - Kab. Kepulauan Mentawai) | 9.881,9 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1303 - Kab. Solok) | 21.565,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1304 - Kab. Sijunjung) | 30.151,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1305 - Kab. Tanah Datar) | 31.094,9 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1306 - Kab. Padang Pariaman) | 12.017,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1307 - Kab. Agam) | 4.846,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1310 - Kab. Solok Selatan) | 260,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1371 - Kota Padang) | 3.893,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1373 - Kota Sawahlunto) | 11.600,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1374 - Kota Padang Panjang) | 485,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1375 - Kota Bukit Tinggi) | 4.003,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1376 - Kota Payakumbuh) | 2.069,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1404 - Kab. Pelalawan) | 21.081,8 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1405 - Kab. Siak) | 6.602,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1407 - Kab. Rokan Hulu) | 9.117,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1409 - Kab. Rokan Hilir) | 2.978,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1471 - Kota Pekanbaru) | 1.474,6 | DAK |



SK No 168319 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Penguatan Sistem Kesehatan (1501 - Kab. Kerinci) | 69.454,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1502 - Kab. Merangin) | 5.684,8 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1503 - Kab. Sarolangun) | 1.956,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1504 - Kab. Batanghari) | 13.188,8 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1505 - Kab. Muaro Jambi) | 4.054,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1506 - Kab. Tanjung Jabung Timur) | 68.893,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1507 - Kab. Tanjung Jabung Barat) | 13.764,9 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1508 - Kab. Tebo) | 3.872,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1509 - Kab. Bungo) | 26.071,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1571 - Kota Jambi) | 24.603,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1572 - Kota Sungai Penuh) | 3.694,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1601 - Kab. Ogan Komering Ulu) | 5.622,9 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1602 - Kab. Ogan Komering Ilir) | 444,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1603 - Kab. Muara Enim) | 8.428,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1604 - Kab. Lahat) | 2.543,3 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1605 - Kab. Musi Rawas) | 818,3 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1606 - Kab. Musi Banyuasin) | 20.115,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1607 - Kab. Banyuasin) | 13.086,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1608 - Kab. Ogan Komering Ulu Selatan) | 5.374,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1609 - Kab. Ogan Komering Ulu Timur) | 4.218,9 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1610 - Kab. Ogan Ilir) | 318,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1611 - Kab. Empat Lawang) | 35.428,3 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1612 - Kab. Penukal Abab Lematang Ilir) | 10.239,8 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1613 - Kab. Musi Rawas Utara) | 20.852,8 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1671 - Kota Palembang) | 5.739,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1672 - Kota Prabumulih) | 13.910,8 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1673 - Kota Pagar Alam) | 25.565,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1674 - Kota Lubuk Linggau) | 803,9 | DAK |



SK No 168320 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Penguatan Sistem Kesehatan (1702 - Kab. Rejang Lebong) | 364,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1705 - Kab. Seluma) | 6.492,3 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1707 - Kab. Lebong) | 3.211,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1771 - Kota Bengkulu) | 20.379,9 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1802 - Kab. Tanggamus) | 16.530,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1803 - Kab. Lampung Selatan) | 4.819,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1806 - Kab. Lampung Utara) | 16.497,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1807 - Kab. Way Kanan) | 7.985,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1808 - Kab. Tulang Bawang) | 4.842,4 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1811 - Kab. Mesuji) | 2.971,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1812 - Kab. Tulang Bawang Barat) | 3.019,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1871 - Kota Bandar Lampung) | 32.972,4 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1872 - Kota Metro) | 1.515,8 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1901 - Kab. Bangka) | 3.228,8 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1903 - Kab. Bangka Barat) | 16.535,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1905 - Kab. Bangka Selatan) | 31.281,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1906 - Kab. Belitung Timur) | 604,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (1971 - Kota Pangkal Pinang) | 74.281,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (2101 - Kab. Karimun) | 18.177,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (2102 - Kab. Bintan) | 433,8 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (2103 - Kab. Natuna) | 34.883,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (2104 - Kab. Lingga) | 3.507,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (2105 - Kab. Kepulauan Anambas) | 42.924,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (2171 - Kota Batam) | 2.702,4 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (2172 - Kota Tanjung Pinang) | 610,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3201 - Kab. Bogor) | 8.030,9 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3202 - Kab. Sukabumi) | 5.187,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3203 - Kab. Cianjur) | 6.367,9 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3204 - Kab. Bandung) | 7.492,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3205 - Kab. Garut) | 12.844,4 | DAK |



SK No 168321 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Penguatan Sistem Kesehatan (3206 - Kab. Tasikmalaya) | 4.885,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3208 - Kab. Kuningan) | 435,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3209 - Kab. Cirebon) | 4.197,9 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3210 - Kab. Majalengka) | 18.397,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3211 - Kab. Sumedang) | 5.470,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3212 - Kab. Indramayu) | 3.364,8 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3213 - Kab. Subang) | 4.962,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3214 - Kab. Purwakarta) | 3.301,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3215 - Kab. Karawang) | 1.470,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3216 - Kab. Bekasi) | 32.177,3 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3217 - Kab. Bandung Barat) | 3.718,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3271 - Kota Bogor) | 37.445,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3272 - Kota Sukabumi) | 8.395,8 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3273 - Kota Bandung) | 2.466,4 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3274 - Kota Cirebon) | 817,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3276 - Kota Depok) | 9.427,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3278 - Kota Tasikmalaya) | 5.766,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (33 - Provinsi Jawa Tengah) | 38.961,3 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3303 - Kab. Purbalingga) | 2.004,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3306 - Kab. Purworejo) | 2.246,8 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3307 - Kab. Wonosobo) | 19.070,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3311 - Kab. Sukoharjo) | 3.596,8 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3312 - Kab. Wonogiri) | 8.883,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3314 - Kab. Sragen) | 1.229,4 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3315 - Kab. Grobogan) | 33.108,8 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3316 - Kab. Blora) | 14.552,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3318 - Kab. Pati) | 39.124,8 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3324 - Kab. Kendal) | 36.199,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3326 - Kab. Pekalongan) | 49.971,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3327 - Kab. Pemalang) | 20.950,4 | DAK |



SK No 168322 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Penguatan Sistem Kesehatan (3329 - Kab. Brebes) | 6.853,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3371 - Kota Magelang) | 20.189,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3373 - Kota Salatiga) | 833,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3374 - Kota Semarang) | 17.557,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3375 - Kota Pekalongan) | 23.638,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3376 - Kota Tegal) | 653,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3401 - Kab. Kulon Progo) | 31.780,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3403 - Kab. Gunungkidul) | 35.774,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3404 - Kab. Sleman) | 1.338,9 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3471 - Kota Yogyakarta) | 655,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3503 - Kab. Trenggalek) | 15.097,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3504 - Kab. Tulungagung) | 22.864,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3507 - Kab. Malang) | 17.920,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3511 - Kab. Bondowoso) | 27.018,9 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3512 - Kab. Situbondo) | 2.502,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3518 - Kab. Nganjuk) | 4.755,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3519 - Kab. Madiun) | 1.888,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3523 - Kab. Tuban) | 17.695,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3525 - Kab. Gresik) | 54.232,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3526 - Kab. Bangkalan) | 1.984,4 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3529 - Kab. Sumenep) | 2.008,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3571 - Kota Kediri) | 1.283,4 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3573 - Kota Malang) | 333,8 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3575 - Kota Pasuruan) | 628,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3576 - Kota Mojokerto) | 7.200,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3601 - Kab. Pandeglang) | 4.214,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3603 - Kab. Tangerang) | 4.265,8 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3604 - Kab. Serang) | 2.100,4 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3671 - Kota Tangerang) | 725,2 | DAK |



SK No 168323 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Penguatan Sistem Kesehatan (3672 - Kota Cilegon) | 17.140,9 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3673 - Kota Serang) | 10.531,9 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (3674 - Kota Tangerang Selatan) | 3.966,8 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5108 - Kab. Buleleng) | 20.484,8 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5171 - Kota Denpasar) | 1.998,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5201 - Kab. Lombok Barat) | 11.545,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5202 - Kab. Lombok Tengah) | 45.144,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5203 - Kab. Lombok Timur) | 46.333,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5204 - Kab. Sumbawa) | 18.450,9 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5205 - Kab. Dompu) | 25.266,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5206 - Kab. Bima) | 44.856,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5207 - Kab. Sumbawa Barat) | 9.566,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5208 - Kab. Lombok Utara) | 2.469,8 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5271 - Kota Mataram) | 34.825,9 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5272 - Kota Bima) | 5.641,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5301 - Kab. Sumba Barat) | 794,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5302 - Kab. Sumba Timur) | 10.104,8 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5303 - Kab. Kupang) | 6.437,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5304 - Kab. Timor Tengah Selatan) | 122.707,3 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5305 - Kab. Timor Tengah Utara) | 8.714,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5306 - Kab. Belu) | 3.273,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5307 - Kab. Alor) | 10.097,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5308 - Kab. Lembata) | 4.869,9 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5309 - Kab. Flores Timur) | 15.079,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5310 - Kab. Sikka) | 38.788,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5311 - Kab. Ende) | 4.861,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5312 - Kab. Ngada) | 8.901,8 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5313 - Kab. Manggarai) | 14.995,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5314 - Kab. Rote Ndao) | 26.489,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5315 - Kab. Manggarai Barat) | 192.019,0 | DAK |



SK No 168324 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Penguatan Sistem Kesehatan (5316 - Kab. Sumba Tengah) | 4.831,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5317 - Kab. Sumba Barat Daya) | 6.713,4 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5318 - Kab. Nagekeo) | 646,3 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5319 - Kab. Manggarai Timur) | 69.719,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5320 - Kab. Sabu Raijua) | 11.915,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5321 - Kab. Malaka) | 85.635,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (5371 - Kota Kupang) | 1.842,8 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6101 - Kab. Sambas) | 8.202,9 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6102 - Kab. Bengkayang) | 94.665,4 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6103 - Kab. Landak) | 3.299,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6104 - Kab. Mempawah) | 2.773,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6105 - Kab. Sanggau) | 19.212,3 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6106 - Kab. Ketapang) | 16.979,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6107 - Kab. Sintang) | 8.826,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6108 - Kab. Kapuas Hulu) | 3.915,4 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6109 - Kab. Sekadau) | 2.762,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6110 - Kab. Melawi) | 21.040,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6111 - Kab. Kayong Utara) | 3.371,8 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6112 - Kab. Kubu Raya) | 1.766,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6171 - Kota Pontianak) | 882,3 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6172 - Kota Singkawang) | 1.398,4 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6201 - Kab. Kotawaringin Barat) | 21.153,3 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6202 - Kab. Kotawaringin Timur) | 5.597,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6203 - Kab. Kapuas) | 75.881,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6204 - Kab. Barito Selatan) | 19.105,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6205 - Kab. Barito Utara) | 1.664,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6206 - Kab. Sukamara) | 802,9 | DAK |



SK No 168325 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|
| Penguatan Sistem Kesehatan (6209 - Kab. Katingan) | 72.483,8 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6210 - Kab. Pulang Pisau) | 468,0 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6211 - Kab. Gunung Mas) | 952,2 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6212 - Kab. Barito Timur) | 4.007,3 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6213 - Kab. Murung Raya) | 463,3 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6271 - Kota Palangkaraya) | 7.714,3 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6301 - Kab. Tanah Laut) | 14.514,5 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6302 - Kab. Kotabaru) | 8.989,4 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6303 - Kab. Banjar) | 54.375,0 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6304 - Kab. Barito Kuala) | 19.382,2 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6305 - Kab. Tapin) | 5.351,7 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6306 - Kab. Hulu Sungai Selatan) | 17.401,7 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6307 - Kab. Hulu Sungai Tengah) | 5.883,7 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6308 - Kab. Hulu Sungai Utara) | 4.194,1 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6309 - Kab. Tabalong) | 9.632,7 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6310 - Kab. Tanah Bumbu) | 14.624,3 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6311 - Kab. Balangan) | 6.309,3 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6371 - Kota Banjarmasin) | 3.901,6 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6372 - Kota Banjarbaru) | 2.280,5 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6401 - Kab. Paser) | 28.876,8 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6403 - Kab. Kutai Kartanegara) | 40.513,4 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6404 - Kab. Kutai Timur) | 9.038,7 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6405 - Kab. Berau) | 9.366,3 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6409 - Kab. Penajam Paser Utara) | 33.646,8 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6411 - Kab. Mahakam Ulu) | 2.487,7 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6471 - Kota Balikpapan) | 3.650,2 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6472 - Kota Samarinda) | 1.982,2 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6474 - Kota Bontang) | 512,2 | DAK | |



SK No 168326 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Penguatan Sistem Kesehatan (6501 - Kab. Malinau) | 12.588,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6502 - Kab. Bulungan) | 20.243,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6504 - Kab. Nunukan) | 41.569,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (6571 - Kota Tarakan) | 518,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7101 - Kab. Bolaang Mongondow) | 16.638,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7103 - Kab. Kepulauan Sangihe) | 19.138,4 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7104 - Kab. Kepulauan Talaud) | 21.330,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7105 - Kab. Minahasa Selatan) | 1.307,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7106 - Kab. Minahasa Utara) | 51.057,4 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7109 - Kab. Minahasa Tenggara) | 2.038,4 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7111 - Kab. Bolaang Mongondow Timur) | 10.674,3 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7171 - Kota Manado) | 8.238,4 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7172 - Kota Bitung) | 1.207,8 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7173 - Kota Tomohon) | 14.816,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7201 - Kab. Banggai Kepulauan) | 5.002,9 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7202 - Kab. Banggai) | 12.694,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7203 - Kab. Morowali) | 1.627,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7204 - Kab. Poso) | 3.073,9 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7205 - Kab. Donggala) | 12.636,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7206 - Kab. Toli Toli) | 34.641,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7208 - Kab. Parigi Moutong) | 36.696,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7209 - Kab. Tojo Una Una) | 6.366,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7210 - Kab. Sigi) | 1.502,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7211 - Kab. Banggai Laut) | 2.903,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7271 - Kota Palu) | 15.830,3 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7301 - Kab. Kepulauan Selayar) | 68.474,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7302 - Kab. Bulukumba) | 16.847,4 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7303 - Kab. Bantaeng) | 1.667,5 | DAK |



SK No 168327 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|
| Penguatan Sistem Kesehatan (7304 - Kab. Jeneponto) | 222,7 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7305 - Kab. Takalar) | 8.980,9 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7306 - Kab. Gowa) | 34.603,8 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7307 - Kab. Sinjai) | 12.716,4 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7308 - Kab. Maros) | 11.141,1 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7309 - Kab. Pangkajene dan Kepulauan) | 13.822,9 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7310 - Kab. Barru) | 11.425,6 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7311 - Kab. Bone) | 31.653,2 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7312 - Kab. Soppeng) | 2.661,8 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7313 - Kab. Wajo) | 287,8 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7314 - Kab. Sidenreng Rappang) | 4.609,9 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7315 - Kab. Pinrang) | 5.723,5 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7316 - Kab. Enrekang) | 43.625,3 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7317 - Kab. Luwu) | 1.116,3 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7318 - Kab. Tana Toraja) | 26.617,7 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7322 - Kab. Luwu Utara) | 18.893,4 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7325 - Kab. Luwu Timur) | 2.501,9 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7326 - Kab. Toraja Utara) | 2.919,3 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7371 - Kota Makassar) | 3.559,0 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7372 - Kota Pare Pare) | 9.984,1 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7373 - Kota Palopo) | 9.260,5 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7401 - Kab. Buton) | 6.058,1 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7402 - Kab. Muna) | 32.553,4 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7403 - Kab. Konawe) | 21.064,1 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7404 - Kab. Kolaka) | 25.646,0 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7405 - Kab. Konawe Selatan) | 60.899,9 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7406 - Kab. Bombana) | 9.163,6 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7407 - Kab. Wakatobi) | 16.444,4 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7408 - Kab. Kolaka Utara) | 12.060,4 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7409 - Kab. Buton Utara) | 22.139,9 | DAK | |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7410 - Kab. Konawe Utara) | 6.807,8 | DAK | |



SK No 168328 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Penguatan Sistem Kesehatan (7411 - Kab. Kolaka Timur) | 2.129,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7412 - Kab. Konawe Kepulauan) | 15.333,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7413 - Kab. Muna Barat) | 15.464,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7414 - Kab. Buton Tengah) | 5.123,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7415 - Kab. Buton Selatan) | 14.739,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7471 - Kota Kendari) | 34.495,4 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7472 - Kota Bau Bau) | 27.052,4 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7501 - Kab. Boalemo) | 2.080,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7502 - Kab. Gorontalo) | 47.589,3 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7503 - Kab. Pohuwato) | 829,9 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7504 - Kab. Bone Bolango) | 3.893,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7571 - Kota Gorontalo) | 25.291,9 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7601 - Kab. Majene) | 27.064,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7602 - Kab. Polewali Mandar) | 38.274,0 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7603 - Kab. Mamasa) | 23.089,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7604 - Kab. Mamuju) | 55.822,5 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7605 - Kab. Pasangkayu) | 22.713,9 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (7606 - Kab. Mamuju Tengah) | 25.111,2 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (81 - Provinsi Maluku) | 24.021,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (8101 - Kab. Kepulauan Tanimbar) | 6.187,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (8102 - Kab. Maluku Tenggara) | 74.632,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (8103 - Kab. Maluku Tengah) | 11.964,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (8104 - Kab. Buru) | 14.079,3 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (8105 - Kab. Kepulauan Aru) | 7.799,3 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (8106 - Kab. Seram Bagian Barat) | 4.101,4 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (8107 - Kab. Seram Bagian Timur) | 13.958,7 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (8108 - Kab. Maluku Barat Daya) | 17.367,6 | DAK |



SK No 168329 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Penguatan Sistem Kesehatan (8109 - Kab. Buru Selatan) | 2.385,9 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (8171 - Kota Ambon) | 11.658,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (8172 - Kota Tual) | 6.844,1 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (8201 - Kab. Halmahera Barat) | 2.903,3 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (8202 - Kab. Halmahera Tengah) | 3.300,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (8203 - Kab. Kepulauan Sula) | 73.530,3 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (8204 - Kab. Halmahera Selatan) | 90.983,6 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (8205 - Kab. Halmahera Utara) | 38.713,9 | DAK |
| Penguatan Sistem Kesehatan (8206 - Kab. Halmahera Timur) | 52.852,4 | DAK |
| Rekomendasi Kebijakan Penguatan Posyandu Prima (LP) | 1.800,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Kesepakatan pemenuhan peningkatan standar SPA Puskesmas | 1.138,2 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pukesmas prioritas pariwisata dan kecamatan tanpa puskesmas yang diberikan pembinaan dan pengawalan dalam rangka pembangunan infrastruktur prototipe modern Puskesmas | 1.495,3 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Koordinasi Manajemen Puskesmas dalam Penguatan Integrasi Layanan Primer (LP) | 2.390,1 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pemantauan dan Monev Pelaksanaan Kegiatan Integrasi Layanan Primer (LP) | 2.012,5 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pemantauan dan Monev Pelaksanaan Kegiatan Integrasi Layanan Primer (LP) | 1.759,5 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Tenaga Kesehatan yang diorientasi terkait Integrasi Layanan Primer (LP) | 12.214,7 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Tenaga Kesehatan yang diorientasi terkait Integrasi Layanan Primer (LP) | 1.756,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Fasilitasi dan pembinaan Dinkes Kab/Kota terkait BLUD Puskesmas | 13.911,5 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Akreditasi Puskesmas dan FKTP swasta | 2.968,9 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| *Aspek: Pengendalian Penyakit dan Perluasan Imunisasi* | | |
| Label dan Iklan Produk Tembakau yang Diawasi yang Memenuhi Ketentuan | 1.517,2 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular | 34.499,8 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pembuatan model teknologi tepat guna pencegahan dan pengendalian penyakit (HS) | 1.419,5 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pelatihan Konseling Upaya Berhenti Merokok (LP) | 2.470,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Instalasi Farmasi Kab/Kota yang Menerapkan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar (LP) | 22.685,1 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pembinaan Pemerintah Daerah dalam rangka germas diberbagai tatanan (LP) | 9.862,3 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pemeliharaan Sistim Informasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Potensial KLB/Wabah (HS) | 1.028,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |



SK No 168330 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | 34.261,3 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Fasilitasi, monitoring pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular | 2.666,6 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Alat dan Bahan Kesehatan Tindak Lanjut Lesi Prakanker Leher Rahim (LP) | 10.550,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik (LP) | 3.546,8 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Monev Supervisi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik (LP) | 1.578,5 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Sosialisasi Faktor Fisiko PTM (LP) | 10.715,2 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Alat dan Bahan Kesehatan Pendukung Imunisasi | 20.512,8 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Rekomendasi kebijakan pengendalian faktor risiko PTM (LP) | 11.900,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (LP) | 3.298,9 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pelatihan Imunisasi | 7.465,7 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Layanan Konseling Upaya Berhenti Merokok (LP) | 6.085,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Kanker dan Kelainan Darah (LP) | 2.015,1 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Media Komunikasi, Informasi, Edukasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kanker dan Kelainan Darah (LP) | 1.418,3 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Monev Supervisi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kanker dan Kelainan Darah (LP) | 1.337,2 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pelaksanaan Operasional Vaksinasi Covid-19 | 1.590,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Deteksi Dini PTM Prioritas (LP) | 3.079,3 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Fasilitasi, *Monitoring* Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular | 16.288,5 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Monev Supervisi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (LP) | 2.117,3 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Koordinasi Pelaksanaan Integrasi Program PTM Prioritas (LP) | 2.555,1 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pelatihan Deteksi Dini PPOK (LP) | 2.639,2 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Rumah Sakit Layanan Prioritas/Unggulan yang Dilakukan Pembinaan (PN) | 22.299,1 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria (LP) | 28.590,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pelatihan SDM Malaria | 4.638,2 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Monitoring Evaluasi dan Supervisi Pencegahan dan Pengendalian Malaria (LP) | 1.448,7 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Intensifikasi Penemuan Kasus Baru dalam Rangka Eliminasi Malaria (LP) | 2.456,6 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas (HS) | 25.907,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan (HS) | 16.354,1 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut (HS) | 34.441,3 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Koordinasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit DBD dan Arbovirosis Lainnya (LP) | 1.027,3 | KEMENTERIAN KESEHATAN |



SK No 168331 A

| Prioritas Nasional/*Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Investigasi Peningkatan Kasus dan Kejadan Luar Biasa penyakit DBD dan arbovirosis lain (LP) | 7.854,2 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian penyakit DBD dan Arbovirosis lainnya (LP) | 46.638,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Peningkatan Kapasitas Petugas dan Pengelola Program DBD dan Arbovirosis lainnya (LP) | 9.843,9 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Monitoring Evaluasi dan Supervisi *Surveilans* DBD dan penyakit Arbovirosis lainnya (LP) | 2.149,1 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Koordinasi pencapaian eliminasi eradikasi penyakit tropis terabaikan (LP) | 1.764,2 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| *Surveilans* dan deteksi dini penyakit Tropis Terabaikan (LP) | 7.351,3 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pemenuhan RDT dan RPR untuk Evaluasi Endemisitas dan Surveilans Aktif Frambusia (LP) | 1.228,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Assessment Eliminasi Kusta dan Eradikasi Frambusia | 5.775,5 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Koordinasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Penyakit Zoonosis dan Penyakit Akibat Gigitan Hewan Berbisa dan Tanaman Beracun (LP) | 1.025,3 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Surveilans Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Akibat Gigitan Hewan Berbisa dan Tanaman Beracun (LP) | 2.472,8 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Workshop Pencegahan dan Pengendalian penyakit Zoonosis (LP) | 1.825,3 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Monev dan Supervisi pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Akibat Gigitan Hewan Berbisa dan Tanaman Beracun (LP) | 2.192,8 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pemenuhan Alat, Reagen untuk *Skrining*, Diagnostik dan Pemantauan Pengobatatan HIV AIDS dan PIMS (LP) | 215.136,4 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pendampingan/Fasilitatif Program HIV dan IMS (LP) | 1.635,4 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Penanganan Kasus ODHIV (LP) | 3.391,8 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Surveilans Faktor risiko Terkait HIV dan IMS (LP) | 5.070,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Alat dan Bahan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit IMS (LP) | 37.250,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Workshop Kader dalam Penemuan Kasus HIV dan Pendampingan Pengobatan (PL) | 4.413,7 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Workshop Pedoman IMS kepada Tenaga Kesehatan (LP) | 1.348,3 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Media KIE P2 TBC (LP) | 4.271,3 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Sarana dan Prasarana P2 TBC (LP) | 18.087,5 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Workshop Skrining dan Deteksi Dini Pada Kelompok Berisiko untuk Pengendalian TBC dalam Pelaksanaan SPM TBC (LP) | 3.200,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Koordinasi Program Pencegahan dan Pengendalian TBC (LP) | 1.763,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Distribusi Logistik dalam Pengendalian TBC (LP) | 1.200,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Surveilans Aktif P2 TBC (LP) | 2.083,9 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pemenuhan alat dan bahan untuk Skrining, Diagnostik P2 Hepatitis (LP) | 148.576,3 | KEMENTERIAN KESEHATAN |



SK No 168332 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Peningkatan Kapasitas SDM P2 Hepatitis (LP) | 1.366,5 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Renkon Pandemi Influenza (LP) | 1.463,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Alat dan bahan kesehatan untuk Deteksi Dini dan Pencegahan Pneumonia (LP) | 13.470,8 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pelatihan Surveilans Epidiemology (SDM) | 12.352,5 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pelatihan 9 Penyakit Prioritas (SDM) | 31.324,7 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pelatihan Surveilans Epidiemology (SDM) | 50.731,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pelatihan 9 Penyakit Prioritas (SDM) | 24.750,4 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Fasilitasi Pembinaan Negara OQ Dalam Rangka Produksi Vaksin (RF) | 1.500,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan program Penyakit Tropis Terabaikan (LP) | 65.989,4 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB (LP) | 288.893,1 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan program Pengendalian Malaria (LP) | 23.282,7 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS (LP) | 370.924,8 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Paket Penyediaan Vaksin Lainnya dan Logistik Penunjang Vaksinasi (LP) | 202.350,1 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Paket Penyediaan Buffer Obat dan Perbekalan Kesehatan (LP) | 50.872,7 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Paket Penyediaan Vaksin Imunisasi Rutin Dasar dan Lanjutan (LP) | 1.252.021,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Lainnya (LP) | 97.153,7 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Paket Penyediaan Obat dan Perbekkes Haji (LP) | 87.484,5 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Paket Penyediaan Obat Hepatitis (LP) | 15.011,1 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan penyeberangan (HS) | 3.764,1 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara (HS) | 4.309,2 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus (HS) | 6.972,7 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di Bandar Udara Soekarno Hatta Terminal Internasional (HS)) | 3.820,6 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD (HS) | 3.026,3 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Layanan survei faktor risiko penyakit pes (HS) | 8.977,3 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Layanan survei faktor risiko penyakit DBD (HS) | 2.793,7 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Layanan survei faktor risiko penyakit malaria (HS) | 2.054,4 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS (HS) | 1.146,4 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Layanan survei faktor risiko penyakit TB (HS) | 2.365,4 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan (HS) | 2.462,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Perusahaan yang menerapkan SMK3 | 3.463,0 | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN |
| Pemugaran Permukiman Kumuh | 184.501,5 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |



SK No 168333 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| *Aspek: Pendidikan dan Penempatan Tenaga Kesehatan* | | |
| Pelatihan kesehatan (HS) | 24.446,2 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pelatihan kesehatan (HS) | 4.291,7 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim (SDM) | 50.288,5 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Registrasi Tenaga Kesehatan (SDM) | 16.770,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Akselerasi Produksi Dokter dan Dokter Spesialis (SDM) | 1.354,2 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan (SDM) | 2.241,9 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) (SDM) | 186.872,5 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Tenaga Kesehatan Lulusan Poltekkes Kemenkes Yang Didayagunakan di Fasyankes Pemerintah (SDM) | 1.294,7 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes Yang Meningkat Status Akreditasinya (SDM) | 2.234,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PDGS) Papua dan Papua Barat (SDM) | 7.049,5 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat (SDM) | 4.793,8 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu (SDM) | 40.427,1 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Bantuan Pendidikan SDM Kesehatan (SDM) | 77.125,4 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pendayagunaan Dokter Spesialis (SDM) | 11.033,7 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Dokter pada DTPK dan Daerah Bermasalah Kesehatan (SDM) | 86.799,1 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS pada Proyek Penguatan Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB) | 7.281,8 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Program Bantuan Pendidikan Partial Funding PPDS/PPDGS (SDM) | 13.093,9 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pendayagunaan Dokter Pasca Internsip (SDM) | 14.202,1 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pendayagunaan Tenaga Kesehatan WNI Lulusan Luar Negeri (SDM) | 23.237,8 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Bantuan Fellowship bagi Tenaga Kesehatan (SDM) | 9.900,9 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pelatihan Sistem Kesehatan Nasional (SDM) | 22.841,2 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| *Aspek: Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan* | | |
| Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar | 9.612,0 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar | 12.501,3 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan suplemen kesehatan serta notifikasi kosmetika yang Diselesaikan sesuai standar | 11.904,1 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| Pengawasan Produk Alat Kesehatan dan PKRT (RF) | 8.142,9 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Dinas Kesehatan sebagai Pembina Mutu FKTP dan Wilayah (LP) | 1.324,3 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Vaksin Covid-19 (RF) | 9.000,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |



SK No 168334 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Lembaga yang dibina dalam pengembangan BBO produksi dalam negeri (RF) | 20.395,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Penggunaan OHT dan Fitofarmaka pada fasilitas pelayanan kesehatan (RF) | 2.732,5 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Implementasi perencanaan kebutuhan obat di rumah sakit (RF) | 1.239,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Promosi Pemanfaatan Alat Kesehatan Dalam Negeri (RF) | 14.635,3 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Industri alkes yang didampingi dalam pelaksanaan riset dan uji klinik (RF) | 1.246,9 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Tersedianya Industri Alkes Dalam Negeri Yang Memproduksi 10 Alkes Tertinggi *by Value* dan/ atau *by Volume* | 2.273,9 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Industri alkes yang didampingi dalam pelaksanaan riset dan uji klinik | 1.114,8 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pembinaan Industri Farmasi dalam pemenuhan ketersediaan 40 obat esensial dalam JKN | 2.062,6 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Industri bahan baku obat yang memproduksi 10 Molekul obat sesuai kebutuhan dalam negeri | 3.330,9 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Industri farmasi yang dibina dalam percepatan pengembangan dan produksi vaksin dalam negeri serta penguasaan teknologi vaksin platform baru (RF) | 3.048,6 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Industri yang dibina dalam rangka hilirisasi sediaan farmasi (RF) | 1.500,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pembinaan Industri vaksin dalam rangka peningkatan penggunaan produk biologi dalam negeri (RF) | 1.500,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Lembaga yang dibina dalam pengembangan obat fitofarmaka (RF) | 3.161,9 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Lembaga Pengembangan vaksin Program Imunisasi rutin (14 antigen) dan Vaksin Lainnya produksi dalam Negeri yang dibina (RF) | 7.212,4 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Lembaga yang dilakukan pembinaan pengembangan inovasi alkes dalam negeri (RF) | 4.536,1 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi | 2.700,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| Komersialisasi Bahan Aktif Obat Produksi Dalam Negeri | 1.300,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| Roadmap Penetapan Ambang Batas Nilai TKDN Produk Farmasi | 1.400,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| *Aspek: Inovasi Pembiayaan Kesehatan* | | |
| Rekomendasi Kebijakan Sinergisme Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Mendukung Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan (PK) | 650,7 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Rekomendasi Kebijakan Utilization Review dalam Pengendalian Kuratif dalam JKN (PK) | 700,7 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Rekomendasi Kebijakan Annual Review dan Evaluasi Tarif INA CBG dan Kapitasi pada Program JKN (PK) | 137,2 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| *Aspek: Digitalisasi dan Pemberdayaan Masyarakat* | | |
| Pengadaan Prasarana Data Center (TK) | 215.009,3 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan di Dinkes Prov/Kab/Kota - PK | 22.314,1 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Peningkatan kualitas data rutin kesehatan (TK) | 3.123,6 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (TK) | 5.611,6 | KEMENTERIAN KESEHATAN |



SK No 168335 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Rekomendasi kebijakan dari Evaluasi Dampak Pembangunan Kesehatan di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota (LP) | 341.097,1 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pengadaan Perangkat Data Center (TK) | 46.709,7 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Integrasi dan Pengembangan Sistem Data Kesehatan (TK) | 5.420,5 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pemberdayaan masyarakat germas di berbagai tatanan (LP) | 14.582,3 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pembinaan Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi Posyandu (LP) | 15.446,1 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Kebijakan Tata Kelola Produk Teknologi Kesehatan (TK) | 2.511,2 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pengadaan Sistem Keamanan Jaringan dan Data Center (TK) | 15.231,5 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pengadaan Perangkat Jaringan Komunikasi (TK) | 4.692,6 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Integrasi dan Pengembangan Sistem Aplikasi Kesehatan (TK) | 16.780,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Revitalasi Posyandu (LP) | 1.317,4 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pengadaan *Software* Lisensi Pengolah Data dan Komunikasi (TK) | 10.682,1 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Penguatan Ekosistem Digital Kesehatan (TK) | 15.412,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Workshop Pengelola Program dalam Penggunaan Aplikasi SIHA 2.0 (LP) | 2.184,3 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Dukungan BUMN | 2.161.250,0 | |
| Pengembangan Fasilitas RnD dan Produksi Untuk Vaksin non-EPI | | BUMN |
| Peningkatan kualitas pelayanan RS *Holding* BUMN | | BUMN |
| Proyek Pengembangan Vaksin Covid-19 | | BUMN |
| *Integrated Digital Health Care Super Apps* | | BUMN |
| PN 5: MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR | | |
| 23) MP: Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) | | |
| Dukungan Belanja K/L | 1.012.528,0 | |
| *Aspek: Pembangunan Rumah Susun* | | |
| Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI | 632.610,9 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja | 179.917,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Hunian Pekerja Konstruksi (IKN) | 200.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Dukungan BUMN | 1.197.030,0 | |
| Revitalisasi Rusun Klender | | BUMN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Revitalisasi Rusun Kemayoran | | BUMN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Revitalisasi Rusun Tanah Abang | | BUMN (Terintegrasi dengan PSN) |



SK No 168336 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Revitalisasi Rusun Kebon Kacang | | BUMN (Terintegrasi dengan PSN) |
| 24) MP: Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) | | |
| Dukungan Belanja K/L, KPBU, dan DAK | 7.568.923,0 | |
| *Aspek: Pengembangan SPAM Regional* | | |
| Pembangunan SPAM Regional | 579.573,2 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN) |
| Peningkatan SPAM Regional | 100.768,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Perluasan SPAM Regional | 797.523,3 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN) |
| SPAM Jatiluhur I (Unsolicited) (Hulu) (Konstruksi - Investasi BUP KPBU) | 560.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT(KPBU) (Terintegrasi dengan PSN) |
| SPAM Karian - Serpong (Sisi Hulu) (*Unsolicited*) (Konstruksi - Investasi BUP KPBU) | 810.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT(KPBU) (Terintegrasi dengan PSN) |
| *Aspek: Pengembangan SPAM Kab/Kota* | | |
| Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (1173 - Kota Langsa) | 943,6 | DAK |
| Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (2104 - Kab. Lingga) | 6.359,4 | DAK |
| Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3322 - Kab. Semarang) | 472,6 | DAK |
| Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3327 - Kab. Pemalang) | 615,0 | DAK |
| Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3372 - Kota Surakarta) | 1.757,9 | DAK |
| Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3517 - Kab. Jombang) | 11.395,3 | DAK |
| Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (6472 - Kota Samarinda) | 550,0 | DAK |
| Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (7371 - Kota Makassar) | 545,0 | DAK |
| Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (7372 - Kota Pare Pare) | 4.067,2 | DAK |
| Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (7404 - Kab. Kolaka) | 2.364,5 | DAK |
| Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (8271 - Kota Ternate) | 415,0 | DAK |
| Air Minum (1101 - Kab. Simeulue) | 4.003,4 | DAK |
| Air Minum (1102 - Kab. Aceh Singkil) | 3.676,8 | DAK |
| Air Minum (1103 - Kab. Aceh Selatan) | 9.646,6 | DAK |
| Air Minum (1104 - Kab. Aceh Tenggara) | 6.717,7 | DAK |
| Air Minum (1105 - Kab. Aceh Timur) | 10.257,3 | DAK |
| Air Minum (1106 - Kab. Aceh Tengah) | 5.688,4 | DAK |
| Air Minum (1107 - Kab. Aceh Barat) | 6.278,3 | DAK |
| Air Minum (1108 - Kab. Aceh Besar) | 9.441,0 | DAK |
| Air Minum (1109 - Kab. Pidie) | 9.161,9 | DAK |



SK No 168337 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Air Minum (1110 - Kab. Bireuen) | 6.177,3 | DAK |
| Air Minum (1111 - Kab. Aceh Utara) | 10.127,7 | DAK |
| Air Minum (1112 - Kab. Aceh Barat Daya) | 6.001,8 | DAK |
| Air Minum (1113 - Kab. Gayo Lues) | 6.191,5 | DAK |
| Air Minum (1114 - Kab. Aceh Tamiang) | 5.563,5 | DAK |
| Air Minum (1115 - Kab. Nagan Raya) | 5.461,3 | DAK |
| Air Minum (1116 - Kab. Aceh Jaya) | 6.515,9 | DAK |
| Air Minum (1117 - Kab. Bener Meriah) | 8.737,0 | DAK |
| Air Minum (1118 - Kab. Pidie Jaya) | 8.029,6 | DAK |
| Air Minum (3604 - Kab. Serang) | 14.192,1 | DAK |
| Air Minum (3672 - Kota Cilegon) | 3.884,2 | DAK |
| Air Minum (3673 - Kota Serang) | 15.000,0 | DAK |
| Air Minum (5201 - Kab. Lombok Barat) | 11.882,8 | DAK |
| Air Minum (5202 - Kab. Lombok Tengah) | 9.411,6 | DAK |
| Air Minum (5203 - Kab. Lombok Timur) | 9.065,5 | DAK |
| Air Minum (5204 - Kab. Sumbawa) | 9.417,5 | DAK |
| Air Minum (5205 - Kab. Dompu) | 5.658,1 | DAK |
| Air Minum (5206 - Kab. Bima) | 9.274,7 | DAK |
| Air Minum (5207 - Kab. Sumbawa Barat) | 7.489,6 | DAK |
| Air Minum (5208 - Kab. Lombok Utara) | 5.731,4 | DAK |
| Air Minum (5272 - Kota Bima) | 6.488,4 | DAK |
| Air Minum (5301 - Kab. Sumba Barat) | 8.582,8 | DAK |
| Air Minum (5302 - Kab. Sumba Timur) | 10.899,5 | DAK |
| Air Minum (5303 - Kab. Kupang) | 11.891,6 | DAK |
| Air Minum (5304 - Kab. Timor Tengah Selatan) | 11.339,6 | DAK |
| Air Minum (5306 - Kab. Belu) | 9.299,1 | DAK |
| Air Minum (5307 - Kab. Alor) | 12.171,7 | DAK |
| Air Minum (5308 - Kab. Lembata) | 2.676,5 | DAK |
| Air Minum (5309 - Kab. Flores Timur) | 8.435,7 | DAK |
| Air Minum (5310 - Kab. Sikka) | 5.987,6 | DAK |
| Air Minum (5311 - Kab. Ende) | 5.566,4 | DAK |
| Air Minum (5312 - Kab. Ngada) | 6.023,9 | DAK |
| Air Minum (5313 - Kab. Manggarai) | 6.222,3 | DAK |
| Air Minum (5314 - Kab. Rote Ndao) | 2.797,7 | DAK |
| Air Minum (5315 - Kab. Manggarai Barat) | 6.422,5 | DAK |
| Air Minum (5316 - Kab. Sumba Tengah) | 8.188,1 | DAK |
| Air Minum (5317 - Kab. Sumba Barat Daya) | 11.806,5 | DAK |
| Air Minum (5318 - Kab. Nagekeo) | 8.521,6 | DAK |
| Air Minum (5319 - Kab. Manggarai Timur) | 10.939,2 | DAK |
| Air Minum (5320 - Kab. Sabu Raijua) | 3.701,0 | DAK |
| Air Minum (5321 - Kab. Malaka) | 8.781,0 | DAK |
| Air Minum (6101 - Kab. Sambas) | 8.181,6 | DAK |



SK No 168338 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Air Minum (6102 - Kab. Bengkayang) | 13.951,1 | DAK |
| Air Minum (6103 - Kab. Landak) | 14.143,8 | DAK |
| Air Minum (6104 - Kab. Mempawah) | 9.983,7 | DAK |
| Air Minum (6105 - Kab. Sanggau) | 13.312,6 | DAK |
| Air Minum (6106 - Kab. Ketapang) | 6.171,6 | DAK |
| Air Minum (6107 - Kab. Sintang) | 12.668,3 | DAK |
| Air Minum (6108 - Kab. Kapuas Hulu) | 8.045,8 | DAK |
| Air Minum (6109 - Kab. Sekadau) | 13.041,0 | DAK |
| Air Minum (6110 - Kab. Melawi) | 10.698,0 | DAK |
| Air Minum (6111 - Kab. Kayong Utara) | 9.054,0 | DAK |
| Air Minum (6112 - Kab. Kubu Raya) | 10.370,1 | DAK |
| Air Minum (6171 - Kota Pontianak) | 3.216,3 | DAK |
| Air Minum (6172 - Kota Singkawang) | 4.718,6 | DAK |
| Air Minum (63 - Provinsi Kalimantan Selatan) | 39.743,1 | DAK |
| Air Minum (6301 - Kab. Tanah Laut) | 15.000,0 | DAK |
| Air Minum (6302 - Kab. Kotabaru) | 4.556,4 | DAK |
| Air Minum (6303 - Kab. Banjar) | 14.171,8 | DAK |
| Air Minum (6304 - Kab. Barito Kuala) | 14.914,2 | DAK |
| Air Minum (6305 - Kab. Tapin) | 11.262,9 | DAK |
| Air Minum (6306 - Kab. Hulu Sungai Selatan) | 12.948,5 | DAK |
| Air Minum (6308 - Kab. Hulu Sungai Utara) | 7.215,6 | DAK |
| Air Minum (6309 - Kab. Tabalong) | 13.080,4 | DAK |
| Air Minum (6310 - Kab. Tanah Bumbu) | 14.097,5 | DAK |
| Air Minum (6311 - Kab. Balangan) | 7.383,1 | DAK |
| Air Minum (6372 - Kota Banjarbaru) | 5.009,6 | DAK |
| Air Minum (7401 - Kab. Buton) | 9.098,8 | DAK |
| Air Minum (7402 - Kab. Muna) | 9.319,9 | DAK |
| Air Minum (7404 - Kab. Kolaka) | 7.070,5 | DAK |
| Air Minum (7405 - Kab. Konawe Selatan) | 10.671,5 | DAK |
| Air Minum (7406 - Kab. Bombana) | 9.123,8 | DAK |
| Air Minum (7407 - Kab. Wakatobi) | 4.301,8 | DAK |
| Air Minum (7409 - Kab. Buton Utara) | 9.376,6 | DAK |
| Air Minum (7410 - Kab. Konawe Utara) | 9.078,8 | DAK |
| Air Minum (7411 - Kab. Kolaka Timur) | 9.535,6 | DAK |
| Air Minum (7412 - Kab. Konawe Kepulauan) | 8.452,7 | DAK |
| Air Minum (7413 - Kab. Muna Barat) | 2.471,2 | DAK |
| Air Minum (7414 - Kab. Buton Tengah) | 9.666,7 | DAK |
| Air Minum (7415 - Kab. Buton Selatan) | 1.206,7 | DAK |
| Air Minum (7471 - Kota Kendari) | 3.750,0 | DAK |
| Air Minum (7472 - Kota Bau Bau) | 3.280,0 | DAK |
| Air Minum (7601 - Kab. Majene) | 6.202,1 | DAK |
| Air Minum (7602 - Kab. Polewali Mandar) | 10.326,6 | DAK |



SK No 168339 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Air Minum (7603 - Kab. Mamasa) | 14.570,8 | DAK |
| Air Minum (7604 - Kab. Mamuju) | 9.668,9 | DAK |
| Air Minum (7605 - Kab. Pasangkayu) | 7.376,7 | DAK |
| Air Minum (7606 - Kab. Mamuju Tengah) | 7.964,3 | DAK |
| Air Minum (1171 - Kota Banda Aceh) | 5.189,6 | DAK |
| Air Minum (1172 - Kota Sabang) | 1.622,1 | DAK |
| Air Minum (1173 - Kota Langsa) | 5.284,3 | DAK |
| Air Minum (1175 - Kota Subulussalam) | 8.365,9 | DAK |
| Air Minum (12 - Provinsi Sumatera Utara) | 54.187,5 | DAK |
| Air Minum (1201 - Kab. Nias) | 15.149,7 | DAK |
| Air Minum (1202 - Kab. Mandailing Natal) | 13.779,5 | DAK |
| Air Minum (1203 - Kab. Tapanuli Selatan) | 11.043,6 | DAK |
| Air Minum (1204 - Kab. Tapanuli Tengah) | 12.748,0 | DAK |
| Air Minum (1205 - Kab. Tapanuli Utara) | 1.450,1 | DAK |
| Air Minum (1206 - Kab. Toba) | 3.417,0 | DAK |
| Air Minum (1207 - Kab. Labuhanbatu) | 1.493,9 | DAK |
| Air Minum (1208 - Kab. Asahan) | 4.500,0 | DAK |
| Air Minum (1209 - Kab. Simalungun) | 4.940,6 | DAK |
| Air Minum (1210 - Kab. Dairi) | 6.472,4 | DAK |
| Air Minum (1211 - Kab. Karo) | 7.755,4 | DAK |
| Air Minum (1212 - Kab. Deli Serdang) | 6.379,5 | DAK |
| Air Minum (1213 - Kab. Langkat) | 2.223,4 | DAK |
| Air Minum (1214 - Kab. Nias Selatan) | 14.935,1 | DAK |
| Air Minum (1215 - Kab. Humbang Hasundutan) | 9.649,9 | DAK |
| Air Minum (1216 - Kab. Pakpak Bharat) | 4.960,5 | DAK |
| Air Minum (1217 - Kab. Samosir) | 7.597,0 | DAK |
| Air Minum (1218 - Kab. Serdang Bedagai) | 6.659,7 | DAK |
| Air Minum (1219 - Kab. Batu Bara) | 5.716,4 | DAK |
| Air Minum (1220 - Kab. Padang Lawas Utara) | 10.605,1 | DAK |
| Air Minum (1221 - Kab. Padang Lawas) | 9.094,1 | DAK |
| Air Minum (1222 - Kab. Labuhanbatu Selatan) | 6.404,9 | DAK |
| Air Minum (1223 - Kab. Labuhanbatu Utara) | 6.062,3 | DAK |
| Air Minum (1224 - Kab. Nias Utara) | 13.936,9 | DAK |
| Air Minum (1225 - Kab. Nias Barat) | 10.884,6 | DAK |
| Air Minum (1272 - Kota Tanjung Balai) | 4.325,6 | DAK |
| Air Minum (1274 - Kota Tebing Tinggi) | 6.194,7 | DAK |
| Air Minum (1275 - Kota Medan) | 3.330,4 | DAK |
| Air Minum (1278 - Kota Gunungsitoli) | 9.354,8 | DAK |
| Air Minum (3201 - Kab. Bogor) | 5.205,7 | DAK |
| Air Minum (3202 - Kab. Sukabumi) | 2.730,8 | DAK |
| Air Minum (3203 - Kab. Cianjur) | 7.754,6 | DAK |
| Air Minum (3204 - Kab. Bandung) | 12.497,5 | DAK |



SK No 168340 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Air Minum (3205 - Kab. Garut) | 10.527,5 | DAK |
| Air Minum (3206 - Kab. Tasikmalaya) | 11.732,2 | DAK |
| Air Minum (3207 - Kab. Ciamis) | 13.021,3 | DAK |
| Air Minum (3208 - Kab. Kuningan) | 7.320,1 | DAK |
| Air Minum (3209 - Kab. Cirebon) | 11.392,8 | DAK |
| Air Minum (3210 - Kab. Majalengka) | 10.330,3 | DAK |
| Air Minum (3211 - Kab. Sumedang) | 9.461,4 | DAK |
| Air Minum (3212 - Kab. Indramayu) | 4.111,0 | DAK |
| Air Minum (3213 - Kab. Subang) | 6.761,1 | DAK |
| Air Minum (3214 - Kab. Purwakarta) | 9.414,1 | DAK |
| Air Minum (3215 - Kab. Karawang) | 6.362,8 | DAK |
| Air Minum (3216 - Kab. Bekasi) | 5.977,1 | DAK |
| Air Minum (3218 - Kab. Pangandaran) | 7.685,6 | DAK |
| Air Minum (3272 - Kota Sukabumi) | 1.600,0 | DAK |
| Air Minum (3275 - Kota Bekasi) | 4.967,2 | DAK |
| Air Minum (3278 - Kota Tasikmalaya) | 6.225,6 | DAK |
| Air Minum (3279 - Kota Banjar) | 6.137,0 | DAK |
| Air Minum (33 - Provinsi Jawa Tengah) | 56.336,0 | DAK |
| Air Minum (3301 - Kab. Cilacap) | 4.429,1 | DAK |
| Air Minum (3302 - Kab. Banyumas) | 12.545,8 | DAK |
| Air Minum (3303 - Kab. Purbalingga) | 14.713,0 | DAK |
| Air Minum (3304 - Kab. Banjarnegara) | 8.669,5 | DAK |
| Air Minum (3305 - Kab. Kebumen) | 8.257,0 | DAK |
| Air Minum (3306 - Kab. Purworejo) | 11.000,6 | DAK |
| Air Minum (3307 - Kab. Wonosobo) | 11.096,9 | DAK |
| Air Minum (3308 - Kab. Magelang) | 11.217,2 | DAK |
| Air Minum (3309 - Kab. Boyolali) | 4.541,5 | DAK |
| Air Minum (3311 - Kab. Sukoharjo) | 3.351,5 | DAK |
| Air Minum (3312 - Kab. Wonogiri) | 8.963,4 | DAK |
| Air Minum (3313 - Kab. Karanganyar) | 8.109,5 | DAK |
| Air Minum (3314 - Kab. Sragen) | 9.362,4 | DAK |
| Air Minum (3315 - Kab. Grobogan) | 5.953,1 | DAK |
| Air Minum (3316 - Kab. Blora) | 9.002,3 | DAK |
| Air Minum (3317 - Kab. Rembang) | 8.346,3 | DAK |
| Air Minum (3318 - Kab. Pati) | 4.273,9 | DAK |
| Air Minum (3319 - Kab. Kudus) | 5.562,6 | DAK |
| Air Minum (3320 - Kab. Jepara) | 9.419,5 | DAK |
| Air Minum (3321 - Kab. Demak) | 7.994,9 | DAK |
| Air Minum (3322 - Kab. Semarang) | 5.367,0 | DAK |
| Air Minum (3323 - Kab. Temanggung) | 9.809,8 | DAK |
| Air Minum (3324 - Kab. Kendal) | 6.037,5 | DAK |
| Air Minum (3325 - Kab. Batang) | 6.432,5 | DAK |



SK No 168342 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Air Minum (3326 - Kab. Pekalongan) | 7.566,1 | DAK |
| Air Minum (3327 - Kab. Pemalang) | 8.222,0 | DAK |
| Air Minum (3328 - Kab. Tegal) | 2.045,8 | DAK |
| Air Minum (3329 - Kab. Brebes) | 14.192,1 | DAK |
| Air Minum (3373 - Kota Salatiga) | 8.139,7 | DAK |
| Air Minum (3374 - Kota Semarang) | 8.515,3 | DAK |
| Air Minum (3501 - Kab. Pacitan) | 14.801,8 | DAK |
| Air Minum (3502 - Kab. Ponorogo) | 5.227,4 | DAK |
| Air Minum (3503 - Kab. Trenggalek) | 6.528,0 | DAK |
| Air Minum (3504 - Kab. Tulungagung) | 3.846,9 | DAK |
| Air Minum (3505 - Kab. Blitar) | 13.608,1 | DAK |
| Air Minum (3506 - Kab. Kediri) | 3.264,2 | DAK |
| Air Minum (3507 - Kab. Malang) | 2.365,4 | DAK |
| Air Minum (3508 - Kab. Lumajang) | 11.212,2 | DAK |
| Air Minum (3509 - Kab. Jember) | 2.152,5 | DAK |
| Air Minum (3510 - Kab. Banyuwangi) | 2.128,8 | DAK |
| Air Minum (3511 - Kab. Bondowoso) | 10.963,3 | DAK |
| Air Minum (3512 - Kab. Situbondo) | 7.743,5 | DAK |
| Air Minum (3513 - Kab. Probolinggo) | 1.842,5 | DAK |
| Air Minum (3514 - Kab. Pasuruan) | 24.200,0 | DAK |
| Air Minum (3515 - Kab. Sidoarjo) | 35.000,0 | DAK |
| Air Minum (3516 - Kab. Mojokerto) | 9.116,1 | DAK |
| Air Minum (3517 - Kab. Jombang) | 6.906,8 | DAK |
| Air Minum (3518 - Kab. Nganjuk) | 6.913,2 | DAK |
| Air Minum (3519 - Kab. Madiun) | 10.720,3 | DAK |
| Air Minum (3520 - Kab. Magetan) | 3.585,4 | DAK |
| Air Minum (3521 - Kab. Ngawi) | 7.198,7 | DAK |
| Air Minum (3522 - Kab. Bojonegoro) | 4.496,1 | DAK |
| Air Minum (3523 - Kab. Tuban) | 10.879,6 | DAK |
| Air Minum (3524 - Kab. Lamongan) | 8.191,7 | DAK |
| Air Minum (3525 - Kab. Gresik) | 40.327,8 | DAK |
| Air Minum (3526 - Kab. Bangkalan) | 7.078,3 | DAK |
| Air Minum (3527 - Kab. Sampang) | 6.476,6 | DAK |
| Air Minum (3528 - Kab. Pamekasan) | 4.603,0 | DAK |
| Air Minum (3529 - Kab. Sumenep) | 5.589,2 | DAK |
| Air Minum (3574 - Kota Probolinggo) | 1.227,7 | DAK |
| Air Minum (3575 - Kota Pasuruan) | 1.169,8 | DAK |
| Air Minum (3601 - Kab. Pandeglang) | 7.910,7 | DAK |
| Air Minum (3602 - Kab. Lebak) | 13.314,6 | DAK |
| Air Minum (3603 - Kab. Tangerang) | 1.655,7 | DAK |
| Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota | 408.112,6 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN) |



SK No 168343 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM | 83.573,1 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota | 231.660,6 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Perluasan SPAM Kabupaten/Kota | 358.437,3 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat | 491.110,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| *Aspek: Pengembangan Air Baku* | | |
| Prasarana Air Baku Penepat yang dibangun | 20.709,7 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Embung Gumelem yang dibangun | 20.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Embung di Kabupaten Cilacap yang di bangun | 22.145,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Embung Jaro di Kabupaten Tabalong yang dibangun | 32.975,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Air Baku di Kabupaten Banyumas yang dibangun | 72.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Air Baku Bendungan Gongseng yang dibangun | 68.470,7 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Air Baku Bendungan Lolak yang dibangun | 50.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Air Baku Bendungan Paselloreng yang dibangun | 73.500,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Air Baku Bendungan Tukul yang dibangun | 57.127,6 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Air Baku KEK Sorong yang dibangun | 99.045,3 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Air Baku Bendungan Kuningan yang dibangun | 97.679,1 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Air Baku Bendungan Bendo yang dibangun | 52.805,1 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Air Baku Bendungan Pidekso yang dibangun | 28.315,3 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jaringan Transmisi Air Baku dari Bendungan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur yang dibangun (Tahap II) | 80.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Penyediaan Air Baku Sidikalang - Siempat Nempu Hulu yang dibangun | 29.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Penyediaan Air Baku di Wonosari Bengkalis yang dibangun | 35.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Kampung Merancang Kab. Berau yang dibangun | 34.999,4 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| KSCS - Pipa Cabang WTP Rangkas Bitung yang dibangun | 69.326,3 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Siphon Cikarang yang dibangun | 30.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Penyediaan Air Baku Berbah Taman Kalasan Pendukung KSPN Borobudur yang dibangun | 12.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Air Baku Raja Ampat yang dibangun | 50.429,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |



SK No 168344 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Jaringan dan Reservoir Mendukung Embung Konservasi Nakamura Pulau Morotai yang dibangun | 25.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Air Baku Sistem Payaman Tahap 2 di Kab. Magelang yang dibangun | 16.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jaringan Pipa Transmisi Penyediaan Air Baku Tuk Uleng Kab. Brebes yang direhabilitasi | 34.837,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Penyediaan Air Baku Nusa Penida Di Kabupaten Klungkung Tahap II yang dibangun | 50.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Penyediaan Air Baku di Kabupaten Lanny Jaya yang dibangun | 35.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Dukungan BUMN | 6.267.320,0 | |
| SPAM Regional Jatiluhur I | | BUMN (Terintegrasi dengan PSN) |
| SPAM Regional Juanda | | BUMN (Terintegrasi dengan PSN) |
| SPAM Regional Karian Serpong | | BUMN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Pekanbaru Water Supply | | BUMN |
| 25) MP: Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90 persen Rumah Tangga) | | |
| Dukungan Belanja K/L dan DAK | 4.103.193,0 | |
| *Aspek: SPALD-T* | | |
| Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota | 1.551.674,3 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN) |
| Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | 39.200,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| *Aspek: SPALD-S* | | |
| Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (1171 - Kota Banda Aceh) | 1.795,5 | DAK |
| Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (1173 - Kota Langsa) | 2.992,5 | DAK |
| Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (2104 - Kab. Lingga) | 1.493,3 | DAK |
| Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3322 - Kab. Semarang) | 678,3 | DAK |
| Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3327 - Kab. Pemalang) | 818,0 | DAK |
| Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3372 - Kota Surakarta) | 2.023,0 | DAK |
| Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3517 - Kab. Jombang) | 6.474,9 | DAK |
| Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (3525 - Kab. Gresik) | 1.520,0 | DAK |
| Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (6472 - Kota Samarinda) | 1.197,0 | DAK |
| Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (7371 - Kota Makassar) | 2.005,1 | DAK |
| Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (7372 - Kota Pare Pare) | 1.150,0 | DAK |
| Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (7404 - Kab. Kolaka) | 2.756,0 | DAK |



SK No 168345 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|
| Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (8102 - Kab. Maluku Tenggara) | 1.369,0 | DAK | |
| Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (8271 - Kota Ternate) | 1.040,0 | DAK | |
| Sanitasi (1101 - Kab. Simeulue) | 5.615,6 | DAK | |
| Sanitasi (1102 - Kab. Aceh Singkil) | 4.066,4 | DAK | |
| Sanitasi (1103 - Kab. Aceh Selatan) | 2.401,1 | DAK | |
| Sanitasi (1104 - Kab. Aceh Tenggara) | 6.653,2 | DAK | |
| Sanitasi (1105 - Kab. Aceh Timur) | 9.463,9 | DAK | |
| Sanitasi (1106 - Kab. Aceh Tengah) | 6.841,0 | DAK | |
| Sanitasi (1107 - Kab. Aceh Barat) | 6.035,7 | DAK | |
| Sanitasi (1108 - Kab. Aceh Besar) | 6.330,3 | DAK | |
| Sanitasi (1109 - Kab. Pidie) | 10.695,8 | DAK | |
| Sanitasi (1110 - Kab. Bireuen) | 4.902,3 | DAK | |
| Sanitasi (1111 - Kab. Aceh Utara) | 12.895,9 | DAK | |
| Sanitasi (1112 - Kab. Aceh Barat Daya) | 6.695,2 | DAK | |
| Sanitasi (1113 - Kab. Gayo Lues) | 3.651,7 | DAK | |
| Sanitasi (1114 - Kab. Aceh Tamiang) | 7.246,8 | DAK | |
| Sanitasi (1115 - Kab. Nagan Raya) | 7.153,4 | DAK | |
| Sanitasi (1116 - Kab. Aceh Jaya) | 6.668,9 | DAK | |
| Sanitasi (1117 - Kab. Bener Meriah) | 4.417,8 | DAK | |
| Sanitasi (1118 - Kab. Pidie Jaya) | 3.901,8 | DAK | |
| Sanitasi (1171 - Kota Banda Aceh) | 6.082,9 | DAK | |
| Sanitasi (1172 - Kota Sabang) | 1.252,5 | DAK | |
| Sanitasi (1173 - Kota Langsa) | 8.805,4 | DAK | |
| Sanitasi (1174 - Kota Lhokseumawe) | 8.686,1 | DAK | |
| Sanitasi (1175 - Kota Subulussalam) | 5.639,1 | DAK | |
| Sanitasi (1201 - Kab. Nias) | 8.173,3 | DAK | |
| Sanitasi (1202 - Kab. Mandailing Natal) | 11.549,5 | DAK | |
| Sanitasi (1203 - Kab. Tapanuli Selatan) | 7.143,4 | DAK | |
| Sanitasi (1204 - Kab. Tapanuli Tengah) | 6.021,3 | DAK | |
| Sanitasi (1205 - Kab. Tapanuli Utara) | 7.003,3 | DAK | |
| Sanitasi (1206 - Kab. Toba) | 4.030,6 | DAK | |
| Sanitasi (1207 - Kab. Labuhanbatu) | 2.451,2 | DAK | |
| Sanitasi (1209 - Kab. Simalungun) | 3.326,6 | DAK | |
| Sanitasi (1210 - Kab. Dairi) | 5.727,3 | DAK | |
| Sanitasi (1211 - Kab. Karo) | 6.202,9 | DAK | |
| Sanitasi (1212 - Kab. Deli Serdang) | 4.989,9 | DAK | |
| Sanitasi (1213 - Kab. Langkat) | 3.781,8 | DAK | |
| Sanitasi (1214 - Kab. Nias Selatan) | 12.921,8 | DAK | |
| Sanitasi (1215 - Kab. Humbang Hasundutan) | 7.280,4 | DAK | |
| Sanitasi (1216 - Kab. Pakpak Bharat) | 4.933,9 | DAK | |
| Sanitasi (1217 - Kab. Samosir) | 3.036,3 | DAK | |



SK No 168346 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Sanitasi (1218 - Kab. Serdang Bedagai) | 6.414,1 | DAK |
| Sanitasi (1219 - Kab. Batu Bara) | 6.142,9 | DAK |
| Sanitasi (1220 - Kab. Padang Lawas Utara) | 6.047,2 | DAK |
| Sanitasi (1221 - Kab. Padang Lawas) | 2.451,2 | DAK |
| Sanitasi (1222 - Kab. Labuhanbatu Selatan) | 4.762,3 | DAK |
| Sanitasi (1224 - Kab. Nias Utara) | 8.457,0 | DAK |
| Sanitasi (1225 - Kab. Nias Barat) | 6.212,3 | DAK |
| Sanitasi (1271 - Kota Sibolga) | 2.049,5 | DAK |
| Sanitasi (1272 - Kota Tanjung Balai) | 4.749,6 | DAK |
| Sanitasi (1273 - Kota Pematang Siantar) | 3.993,8 | DAK |
| Sanitasi (1274 - Kota Tebing Tinggi) | 3.431,6 | DAK |
| Sanitasi (1275 - Kota Medan) | 2.687,9 | DAK |
| Sanitasi (1276 - Kota Binjai) | 3.501,7 | DAK |
| Sanitasi (1277 - Kota Padangsidimpuan) | 8.775,1 | DAK |
| Sanitasi (1278 - Kota Gunungsitoli) | 6.831,6 | DAK |
| Sanitasi (3201 - Kab. Bogor) | 14.066,7 | DAK |
| Sanitasi (3202 - Kab. Sukabumi) | 6.120,9 | DAK |
| Sanitasi (3203 - Kab. Cianjur) | 11.758,8 | DAK |
| Sanitasi (3204 - Kab. Bandung) | 8.544,7 | DAK |
| Sanitasi (3205 - Kab. Garut) | 5.417,6 | DAK |
| Sanitasi (3206 - Kab. Tasikmalaya) | 13.781,5 | DAK |
| Sanitasi (3207 - Kab. Ciamis) | 7.746,2 | DAK |
| Sanitasi (3208 - Kab. Kuningan) | 9.747,2 | DAK |
| Sanitasi (3209 - Kab. Cirebon) | 12.945,1 | DAK |
| Sanitasi (3210 - Kab. Majalengka) | 2.281,1 | DAK |
| Sanitasi (3211 - Kab. Sumedang) | 8.162,3 | DAK |
| Sanitasi (3212 - Kab. Indramayu) | 5.588,6 | DAK |
| Sanitasi (3214 - Kab. Purwakarta) | 10.687,4 | DAK |
| Sanitasi (3215 - Kab. Karawang) | 6.938,3 | DAK |
| Sanitasi (3216 - Kab. Bekasi) | 7.886,8 | DAK |
| Sanitasi (3218 - Kab. Pangandaran) | 7.424,9 | DAK |
| Sanitasi (3271 - Kota Bogor) | 10.455,0 | DAK |
| Sanitasi (3272 - Kota Sukabumi) | 2.701,3 | DAK |
| Sanitasi (3273 - Kota Bandung) | 1.710,8 | DAK |
| Sanitasi (3275 - Kota Bekasi) | 5.655,2 | DAK |
| Sanitasi (3276 - Kota Depok) | 2.129,0 | DAK |
| Sanitasi (3277 - Kota Cimahi) | 4.192,0 | DAK |
| Sanitasi (3278 - Kota Tasikmalaya) | 11.818,5 | DAK |
| Sanitasi (3301 - Kab. Cilacap) | 13.074,7 | DAK |
| Sanitasi (3302 - Kab. Banyumas) | 14.147,5 | DAK |
| Sanitasi (3303 - Kab. Purbalingga) | 11.882,4 | DAK |
| Sanitasi (3304 - Kab. Banjarnegara) | 6.581,9 | DAK |



SK No 168347 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Sanitasi (3305 - Kab. Kebumen) | 9.816,0 | DAK |
| Sanitasi (3306 - Kab. Purworejo) | 4.324,5 | DAK |
| Sanitasi (3307 - Kab. Wonosobo) | 14.115,5 | DAK |
| Sanitasi (3308 - Kab. Magelang) | 10.289,6 | DAK |
| Sanitasi (3309 - Kab. Boyolali) | 2.238,3 | DAK |
| Sanitasi (3310 - Kab. Klaten) | 4.202,0 | DAK |
| Sanitasi (3312 - Kab. Wonogiri) | 7.276,8 | DAK |
| Sanitasi (3313 - Kab. Karanganyar) | 3.201,5 | DAK |
| Sanitasi (3314 - Kab. Sragen) | 4.792,3 | DAK |
| Sanitasi (3315 - Kab. Grobogan) | 8.316,4 | DAK |
| Sanitasi (3316 - Kab. Blora) | 3.564,2 | DAK |
| Sanitasi (3317 - Kab. Rembang) | 1.818,9 | DAK |
| Sanitasi (3318 - Kab. Pati) | 2.299,1 | DAK |
| Sanitasi (3320 - Kab. Jepara) | 7.684,4 | DAK |
| Sanitasi (3321 - Kab. Demak) | 7.708,2 | DAK |
| Sanitasi (3322 - Kab. Semarang) | 3.516,7 | DAK |
| Sanitasi (3323 - Kab. Temanggung) | 10.787,0 | DAK |
| Sanitasi (3324 - Kab. Kendal) | 4.152,0 | DAK |
| Sanitasi (3325 - Kab. Batang) | 5.548,6 | DAK |
| Sanitasi (3326 - Kab. Pekalongan) | 8.345,0 | DAK |
| Sanitasi (3327 - Kab. Pemalang) | 5.940,3 | DAK |
| Sanitasi (3328 - Kab. Tegal) | 12.433,8 | DAK |
| Sanitasi (3329 - Kab. Brebes) | 8.996,0 | DAK |
| Sanitasi (3371 - Kota Magelang) | 2.975,4 | DAK |
| Sanitasi (3372 - Kota Surakarta) | 2.301,7 | DAK |
| Sanitasi (3373 - Kota Salatiga) | 2.201,0 | DAK |
| Sanitasi (3374 - Kota Semarang) | 6.320,5 | DAK |
| Sanitasi (3376 - Kota Tegal) | 2.751,3 | DAK |
| Sanitasi (3501 - Kab. Pacitan) | 10.632,9 | DAK |
| Sanitasi (3502 - Kab. Ponorogo) | 9.308,3 | DAK |
| Sanitasi (3503 - Kab. Trenggalek) | 9.143,7 | DAK |
| Sanitasi (3504 - Kab. Tulungagung) | 6.629,4 | DAK |
| Sanitasi (3505 - Kab. Blitar) | 11.282,6 | DAK |
| Sanitasi (3506 - Kab. Kediri) | 6.748,2 | DAK |
| Sanitasi (3507 - Kab. Malang) | 7.413,5 | DAK |
| Sanitasi (3508 - Kab. Lumajang) | 11.237,3 | DAK |
| Sanitasi (3509 - Kab. Jember) | 3.877,8 | DAK |
| Sanitasi (3511 - Kab. Bondowoso) | 11.355,4 | DAK |
| Sanitasi (3512 - Kab. Situbondo) | 5.742,7 | DAK |
| Sanitasi (3513 - Kab. Probolinggo) | 2.761,3 | DAK |
| Sanitasi (3514 - Kab. Pasuruan) | 3.326,6 | DAK |
| Sanitasi (3515 - Kab. Sidoarjo) | 1.097,8 | DAK |



SK No 168348 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|---|
| Sanitasi (3516 - Kab. Mojokerto) | 5.869,3 | DAK | |
| Sanitasi (3517 - Kab. Jombang) | 6.711,8 | DAK | |
| Sanitasi (3518 - Kab. Nganjuk) | 9.307,8 | DAK | |
| Sanitasi (3519 - Kab. Madiun) | 8.411,8 | DAK | |
| Sanitasi (3520 - Kab. Magetan) | 13.406,4 | DAK | |
| Sanitasi (3521 - Kab. Ngawi) | 10.315,6 | DAK | |
| Sanitasi (3522 - Kab. Bojonegoro) | 4.324,5 | DAK | |
| Sanitasi (3523 - Kab. Tuban) | 10.062,9 | DAK | |
| Sanitasi (3524 - Kab. Lamongan) | 4.300,8 | DAK | |
| Sanitasi (3525 - Kab. Gresik) | 3.326,6 | DAK | |
| Sanitasi (3526 - Kab. Bangkalan) | 14.251,1 | DAK | |
| Sanitasi (3527 - Kab. Sampang) | 7.503,6 | DAK | |
| Sanitasi (3528 - Kab. Pamekasan) | 10.627,1 | DAK | |
| Sanitasi (3529 - Kab. Sumenep) | 9.780,0 | DAK | |
| Sanitasi (3571 - Kota Kediri) | 2.000,9 | DAK | |
| Sanitasi (3572 - Kota Blitar) | 1.300,6 | DAK | |
| Sanitasi (3573 - Kota Malang) | 6.177,9 | DAK | |
| Sanitasi (3575 - Kota Pasuruan) | 4.556,0 | DAK | |
| Sanitasi (3576 - Kota Mojokerto) | 1.189,1 | DAK | |
| Sanitasi (3578 - Kota Surabaya) | 1.601,0 | DAK | |
| Sanitasi (3601 - Kab. Pandeglang) | 7.003,3 | DAK | |
| Sanitasi (3602 - Kab. Lebak) | 6.653,2 | DAK | |
| Sanitasi (3603 - Kab. Tangerang) | 1.520,7 | DAK | |
| Sanitasi (3604 - Kab. Serang) | 6.757,7 | DAK | |
| Sanitasi (3673 - Kota Serang) | 4.937,3 | DAK | |
| Sanitasi (5201 - Kab. Lombok Barat) | 6.373,0 | DAK | |
| Sanitasi (5202 - Kab. Lombok Tengah) | 10.136,0 | DAK | |
| Sanitasi (5203 - Kab. Lombok Timur) | 10.790,9 | DAK | |
| Sanitasi (5204 - Kab. Sumbawa) | 14.980,6 | DAK | |
| Sanitasi (5205 - Kab. Dompu) | 7.250,5 | DAK | |
| Sanitasi (5206 - Kab. Bima) | 8.654,1 | DAK | |
| Sanitasi (5207 - Kab. Sumbawa Barat) | 5.077,4 | DAK | |
| Sanitasi (5208 - Kab. Lombok Utara) | 8.114,3 | DAK | |
| Sanitasi (5271 - Kota Mataram) | 6.962,8 | DAK | |
| Sanitasi (5272 - Kota Bima) | 7.260,3 | DAK | |
| Sanitasi (5301 - Kab. Sumba Barat) | 6.828,6 | DAK | |
| Sanitasi (5302 - Kab. Sumba Timur) | 4.051,9 | DAK | |
| Sanitasi (5303 - Kab. Kupang) | 7.254,2 | DAK | |
| Sanitasi (5304 - Kab. Timor Tengah Selatan) | 10.124,3 | DAK | |
| Sanitasi (5305 - Kab. Timor Tengah Utara) | 7.406,7 | DAK | |
| Sanitasi (5306 - Kab. Belu) | 8.378,9 | DAK | |
| Sanitasi (5307 - Kab. Alor) | 6.448,3 | DAK | |



SK No 168349 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Sanitasi (5308 - Kab. Lembata) | 5.781,7 | DAK |
| Sanitasi (5309 - Kab. Flores Timur) | 7.535,5 | DAK |
| Sanitasi (5310 - Kab. Sikka) | 5.701,7 | DAK |
| Sanitasi (5311 - Kab. Ende) | 7.908,3 | DAK |
| Sanitasi (5312 - Kab. Ngada) | 5.378,5 | DAK |
| Sanitasi (5313 - Kab. Manggarai) | 7.907,0 | DAK |
| Sanitasi (5314 - Kab. Rote Ndao) | 3.453,7 | DAK |
| Sanitasi (5315 - Kab. Manggarai Barat) | 6.692,6 | DAK |
| Sanitasi (5316 - Kab. Sumba Tengah) | 6.429,0 | DAK |
| Sanitasi (5317 - Kab. Sumba Barat Daya) | 10.952,2 | DAK |
| Sanitasi (5318 - Kab. Nagekeo) | 3.036,3 | DAK |
| Sanitasi (5319 - Kab. Manggarai Timur) | 8.462,9 | DAK |
| Sanitasi (5320 - Kab. Sabu Raijua) | 3.188,1 | DAK |
| Sanitasi (5321 - Kab. Malaka) | 6.810,9 | DAK |
| Sanitasi (5371 - Kota Kupang) | 4.001,9 | DAK |
| Sanitasi (6101 - Kab. Sambas) | 7.147,7 | DAK |
| Sanitasi (6102 - Kab. Bengkayang) | 7.097,2 | DAK |
| Sanitasi (6103 - Kab. Landak) | 9.558,0 | DAK |
| Sanitasi (6104 - Kab. Mempawah) | 3.361,6 | DAK |
| Sanitasi (6105 - Kab. Sanggau) | 8.244,2 | DAK |
| Sanitasi (6106 - Kab. Ketapang) | 7.784,3 | DAK |
| Sanitasi (6107 - Kab. Sintang) | 8.333,9 | DAK |
| Sanitasi (6108 - Kab. Kapuas Hulu) | 4.926,7 | DAK |
| Sanitasi (6109 - Kab. Sekadau) | 6.454,4 | DAK |
| Sanitasi (6110 - Kab. Melawi) | 7.755,2 | DAK |
| Sanitasi (6111 - Kab. Kayong Utara) | 13.580,0 | DAK |
| Sanitasi (6112 - Kab. Kubu Raya) | 15.099,4 | DAK |
| Sanitasi (6171 - Kota Pontianak) | 2.393,2 | DAK |
| Sanitasi (6172 - Kota Singkawang) | 2.101,0 | DAK |
| Sanitasi (6301 - Kab. Tanah Laut) | 4.051,9 | DAK |
| Sanitasi (6302 - Kab. Kotabaru) | 5.002,4 | DAK |
| Sanitasi (6303 - Kab. Banjar) | 8.322,3 | DAK |
| Sanitasi (6304 - Kab. Barito Kuala) | 9.234,4 | DAK |
| Sanitasi (6305 - Kab. Tapin) | 5.851,1 | DAK |
| Sanitasi (6306 - Kab. Hulu Sungai Selatan) | 7.143,7 | DAK |
| Sanitasi (6307 - Kab. Hulu Sungai Tengah) | 2.891,4 | DAK |
| Sanitasi (6308 - Kab. Hulu Sungai Utara) | 5.158,5 | DAK |
| Sanitasi (6309 - Kab. Tabalong) | 5.095,9 | DAK |
| Sanitasi (6310 - Kab. Tanah Bumbu) | 2.984,4 | DAK |
| Sanitasi (6311 - Kab. Balangan) | 6.625,9 | DAK |
| Sanitasi (6371 - Kota Banjarmasin) | 2.780,4 | DAK |
| Sanitasi (6372 - Kota Banjarbaru) | 6.955,5 | DAK |



SK No 168350 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Sanitasi (7401 - Kab. Buton) | 5.693,0 | DAK |
| Sanitasi (7402 - Kab. Muna) | 5.966,1 | DAK |
| Sanitasi (7403 - Kab. Konawe) | 6.134,9 | DAK |
| Sanitasi (7404 - Kab. Kolaka) | 7.049,1 | DAK |
| Sanitasi (7405 - Kab. Konawe Selatan) | 12.215,7 | DAK |
| Sanitasi (7406 - Kab. Bombana) | 8.924,7 | DAK |
| Sanitasi (7407 - Kab. Wakatobi) | 5.889,6 | DAK |
| Sanitasi (7408 - Kab. Kolaka Utara) | 7.126,6 | DAK |
| Sanitasi (7409 - Kab. Buton Utara) | 5.890,5 | DAK |
| Sanitasi (7410 - Kab. Konawe Utara) | 1.368,6 | DAK |
| Sanitasi (7411 - Kab. Kolaka Timur) | 5.421,9 | DAK |
| Sanitasi (7412 - Kab. Konawe Kepulauan) | 1.626,6 | DAK |
| Sanitasi (7413 - Kab. Muna Barat) | 4.933,9 | DAK |
| Sanitasi (7414 - Kab. Buton Tengah) | 5.850,8 | DAK |
| Sanitasi (7415 - Kab. Buton Selatan) | 7.152,7 | DAK |
| Sanitasi (7471 - Kota Kendari) | 5.987,8 | DAK |
| Sanitasi (7472 - Kota Bau Bau) | 6.494,0 | DAK |
| Sanitasi (7601 - Kab. Majene) | 7.722,9 | DAK |
| Sanitasi (7602 - Kab. Polewali Mandar) | 6.193,1 | DAK |
| Sanitasi (7603 - Kab. Mamasa) | 8.274,1 | DAK |
| Sanitasi (7604 - Kab. Mamuju) | 7.479,0 | DAK |
| Sanitasi (7605 - Kab. Pasangkayu) | 10.198,0 | DAK |
| Sanitasi (7606 - Kab. Mamuju Tengah) | 13.791,4 | DAK |
| Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota | 18.156,4 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu | 759.722,3 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| *Aspek: Kelembagaan* | | |
| Provinsi yang mengalami penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi (Kab/Kota) | 1.500,0 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi | 163.440,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 26) MP: Pemulihan 4 DAS Kritis | | |
| Dukungan Belanja K/L | 1.239.922,0 | |
| *Aspek: Pengendalian Banjir* | | |
| Pengendalian banjir Sungai Ciliwung yang dibangun | 20.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Sudetan Ciliwung-KBT yang dibangun | 467.157,3 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pengendali Banjir Sungai Binanga Siguluan, Aek Sigumbang, dan Aek Limbong yang dibangun | 55.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pengendalian banjir Sungai Aek Silang yang dibangun | 20.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |



SK No 168351 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| *Aspek: Pemeliharaan* | | |
| Kegiatan Citarum Harum yang dilaksanakan | 168.336,2 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| *Aspek: Bangunan Pengendali Banjir* | | |
| Pompa Ancol Sentiong yang dibangun | 141.928,8 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| *Groundsill* Cipamingkis yang dibangun (Tahap II) | 367.500,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 27) MP: 18 Waduk Multiguna | | |
| Dukungan Belanja K/L | 3.105.598,0 | |
| *Aspek: Perencanaan/ Persiapan* | | |
| Matenggeng Multipurpose Dam Development Sub Project (ESP KOICA) | 23.343,3 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| *Aspek: Pendukung* | | |
| Pendukung IPDMIP | 255,5 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pendukung SIMURP | 650,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| *Aspek: Konstruksi* | | |
| Bendungan Mbay yang dibangun | 125.450,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN) |
| Daerah irigasi Komering yang dibangun | 15.750,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Daerah Irigasi Komering yang direhabilitasi | 63.561,4 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jenelata *Dam Construction Project* yang dilaksanakan | 348.606,2 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Riam Kiwa *Multipurpose Dam Construction Project* yang dilaksanakan | 173.127,1 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pelosika *Multipurpose Dam Construction Project* yang dilaksanakan | 1.200,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| *Aspek: Infrastruktur Irigasi* | | |
| Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) yang dilaksanakan | 174.537,2 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) yang dilaksanakan | 970.436,9 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Rentang Irrigation Modernization Project (RIMP) yang dilaksanakan | 1.027.963,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Komering Irrigation Project (KIP) yang dilaksanakan | 180.717,5 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 28) MP: Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa | | |
| Dukungan Belanja K/L | 5.819.025,0 | |
| *Aspek: Pengendalian Banjir* | | |
| Pengendalian banjir Kali Bekasi yang dibangun | 123.089,3 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pengendalian banjir Kali Lamong yang dibangun | 25.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |



SK No 168352 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Pengendalian banjir rob Sungai Loji Banger yang dibangun | 122.778,6 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN) |
| Peningkatan Kapasitas Sudetan Floodway (Plangwot - Sedayu Lawas) yang dibangun (Tahap II) | 87.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| *Aspek: Pengaman Pantai* | | |
| Pengamanan Pantai Eretan yang dibangun | 30.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pengamanan Pantai di Jakarta yang dibangun (Tahap II) | 607.259,2 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN) |
| Pengaman Pantai Kabupaten Cirebon yang dibangun | 40.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - TOL SEMARANG - DEMAK 1A | 508.392,9 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - TOL SEMARANG - DEMAK 1B | 673.809,2 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - TOL SEMARANG - DEMAK 1C | 307.016,7 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Tol Semarang - Demak (Konstruksi - Investasi BUP KPBU) | 3.284.471,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT(KPBU) |
| *Aspek: Pemantauan Penurunan Muka Tanah* | | |
| Jaringan Pemantauan Air Tanah Berbasis Cekungan Air Tanah | 3.600,0 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| Rekomendasi Geologi Penurunan Muka Tanah di Kawasan Pesisir Pantai Utara Pulau Jawa (PATGTL) | 5.976,6 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| Rekomendasi Geologi Hasil Pemantauan Penurunan Muka Tanah (BKAT) | 631,1 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| Dukungan BUMN | 337.000,0 | |
| Jalan Tol Semarang - Demak | | BUMN (Terintegrasi dengan PSN) |
| 29) MP: Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu | | |
| Dukungan Belanja K/L | 133.107,7 | |
| *Sub: Pelabuhan Patimban* | | |
| *Aspek: Standardisasi Pelabuhan* | | |
| Pembangunan Pelabuhan Patimban (I) | 32.957,7 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Patimban *Port Development Project Phase* (I-2) | 100.000,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Patimban *Port Development Project* II | 100,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| *Aspek: Konektivitas Integrasi dengan Hinterland* | | |
| Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - AKSES TOL PATIMBAN | 50,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Dukungan BUMN | 4.454.000,0 | |
| Pembangunan Jalan Akses Timur Pelabuhan Kalibaru/New Priok Eastern Access (NPEA) | | BUMN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing | | BUMN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Pembangunan Makassar *New Port* Tahap IB dan Tahap IC | | BUMN (Terintegrasi dengan PSN) |



SK No 168353 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Pengembangan Terminal Petikemas Pelabuhan Tanjung Priok | | BUMN |
| Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban | | BUMN (Terintegrasi dengan PSN) |
| 30) MP: Kereta Api Makassar-Pare Pare | | |
| Dukungan Belanja K/L | 520.108,9 | |
| *Aspek: Operasional dan Pemeliharaan* | | |
| Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Makassar - Parepare | 25.927,5 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Kewajiban Pembayaran atas Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) (Dukungan/Pendamping KPBU) | 267.490,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| *Aspek: Konstruksi* | | |
| Pembangunan Prasarana Perkeretaapian untuk Mendukung Pengoperasian Kereta Api Makassar - Pare Pare antara Mandai - Palanro | 226.691,4 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| 31) MP: KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta – Bandung) | | |
| Dukungan BUMN | 884.000,0 | |
| Pembangunan *High Speed Railway* Jakarta – Bandung | | BUMN (Terintegrasi dengan PSN) |
| 32) MP: Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung | | |
| Dukungan Belanja K/L | 400,0 | |
| *Aspek: Pembangunan Jalan* | | |
| Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - DEVELOPMENT OF NEW TUNNEL PAYAKUMBUH - PANGKALAN | 100,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - BTS. KOTA JAMBI - TEMPINO | 100,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - TOL BETUNG - JAMBI | 200,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Dukungan BUMN | 11.294.000,0 | |
| Jalan Tol Trans Sumatera | | BUMN (Terintegrasi dengan PSN) |
| 33) MP: Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan | | |
| Dukungan Belanja K/L | 1.527.400,0 | |
| *Aspek: Preservasi Jalan* | | |
| Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Provinsi Aceh | 4.016,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Provinsi Aceh | 14.878,3 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (Padat Karya) - Provinsi Aceh | 2.989,1 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Kab. Kepulauan Mentawai | 28.019,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - MODANMOHE - NAMROLE | 4.115,8 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Provinsi Nusa Tenggara Timur | 33.915,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |



SK No 168354 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (Padat Karya) - Provinsi Nusa Tenggara Timur | 5.985,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Provinsi Sulawesi Utara | 83.995,8 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Provinsi Sulawesi Utara | 171.325,6 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (Padat Karya) - Provinsi Sulawesi Utara | 4.210,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Provinsi Sulawesi Tenggara | 38.684,5 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (Padat Karya) - Provinsi Sulawesi Tenggara | 1.306,7 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (Padat Karya) - Provinsi Sulawesi Tenggara | 6.842,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Provinsi Maluku | 14.765,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Provinsi Maluku | 348.581,4 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (Padat Karya) - Provinsi Maluku | 7.240,3 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - SALEMAN - BESI (KM. 50) | 4.743,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - SP. WAIPIA - SALEMAN | 2.939,9 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - BANGGOI - BULA | 6.330,5 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - LAIMU - WERINAMA | 1.763,9 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| *Aspek: Pembangunan Jembatan* | | |
| Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan - BANJAR SARI - MALAKONI - KAYU APUH (P. ENGGANO) | 40.919,4 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan - Provinsi Kepulauan Riau | 39.297,5 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan - Provinsi Maluku | 176.519,9 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan - Provinsi Maluku Utara | 10.022,4 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| *Aspek: Pembangunan Jalan* | | |
| Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Jalan Trans Mentawai Ruas Sigapokna –Labuhan Bajau (Mentawai) | 42.682,3 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - SIOBAN - KATIET | 72.297,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Jalan trans Pulau Enggano (Banjarsari - Malakoni - Kahyapu) | 19.817,7 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |



SK No 168355 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Jalan Teluk Buton - Klarik | 100.561,6 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - SP. SEKUNYAM - DESA CEMAGA | 46.324,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - PENINTING - PAYALAMAN | 27.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - BIAK - JUNCTION - KOREM | 40.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Jalan Elat - Sp. Ngurdu - Fako - Holat - Ohoiraut (P. Key Besar) | 36.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Provinsi Maluku | 88.932,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 34) MP: Jalan Trans Papua Merauke - Sorong | | |
| Dukungan Belanja K/L | 2.034.975,0 | |
| *Aspek: Preservasi Jembatan* | | |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN RUAS YETTI - SENGGI - MAMBERAMO | 185.921,6 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - ELELIM - PASVALEY - BTS. KOTA WAMENA | 17.797,7 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - SEREDALA - DEKAI | 2.093,9 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - USILIMO - KARUBAGA | 7.101,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - TIMIKA - SP. PELRA - POMAKO | 15.932,7 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN KALI KOLOP KERING (JALAN DEKAI-SEREDALA) | 28.500,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Provinsi Papua Barat | 32.012,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - KUMURKEH - AYAMASI - SNOPY | 2.232,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Provinsi Papua | 21.231,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - MAYON - SIMPANG KAPIRAYA | 8.072,6 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Kab. Merauke | 1.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Kab. Boven Digoel | 9.356,1 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Kab. Yalimo | 3.184,5 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| *Aspek: Preservasi Jalan* | | |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - WANGGAR - KWATISORE (BTS. PROV. PAPUA BARAT) | 1.606,1 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Provinsi Papua Barat | 199.715,5 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |



SK No 168356 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Provinsi Papua | 108.383,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - MINDIPTANA - TANAH MERAH | 12.203,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Kab. Merauke | 12.528,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - TANAH MERAH - GENTENTIRI | 25.185,8 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - GENTENTIRI - BTS. KAB. MERAUKE / BOVEN DIGOEL | 41.712,8 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - ELELIM - PASVALEY - BTS. KOTA WAMENA | 43.991,5 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - WAROPKO - MINDIPTANA | 26.400,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - USILIMO - KARUBAGA | 42.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - KARUBAGA - ILU - MULIA | 31.500,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Kab. Puncak Jaya | 28.150,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Kab. Boven Digoel | 91.204,6 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Getentiri - Bts. Kab. Merauke/Kab. Boven Digoel | 57.352,6 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Kab. Tolikara | 19.970,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Kab. Keerom | 3.800,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Kab. Nduga | 52.914,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Kab. Yalimo | 135.646,9 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| *Aspek: Pembangunan Jembatan* | | |
| Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Getentiri - Bts. Kab. Merauke/Kab. Boven Digoel | 21.537,3 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN KAMPUNG MURI - KWATISORE (BATAS PROVINSI PAPUA) | 140.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN RUAS ELELIM - MAMBERAMO | 13.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN IWUR - WAROPKO | 63.758,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - MAMEH - WINDESI (WERABUR) | 60.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN MAMBERAMO - ELELIM II | 38.974,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Kab. Nabire | 8.584,5 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |



SK No 168357 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| *Aspek: Pembangunan Jalan* | | |
| Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN AMBUNI - KARUAN | 67.500,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN KAMP. MURI - KWATISORE (BTS. PROVINSI PAPUA) I | 60.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN KAMP. MURI - KWATISORE (BTS. PROVINSI PAPUA) II | 38.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN MAMEH - KARUAN | 25.750,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN SP. GORO - KP. MURI (BTS. PROVINSI PAPUA) | 57.984,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN GUNUNG PASIR | 27.000,0 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - IWUR - WAROPKO II | 44.637,2 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - KWATISORE - KAMP. MURI (BTS. PROVINSI PAPUA BARAT ) | 97.006,3 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 35) MP: Jembatan Udara 37 Rute di Papua | | |
| Dukungan Belanja K/L | 335.678,0 | |
| *Aspek: Pengembangan Infrastruktur* | | |
| Pengembangan Bandar Udara Wamena Tahap III - PN | 10.000,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pengembangan Bandar Udara Ilaga - PN | 10.000,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pengembangan Bandar Udara Tanah Merah - PN | 1.808,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pengembangan Bandar Udara Mozes Kilangin-Timika, Papua | 75.900,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pengembangan Bandar Udara Oksibil - PN | 5.000,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pengembangan Bandar Udara Ewer-Asmat, Papua | 80.000,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pengembangan Bandar udara Sobaham - PN | 5.000,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pengembangan Bandar Udara Mopah-Merauke, Papua | 66.918,8 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| *Aspek: Layanan* | | |
| Subsidi Operasi Angkutan Udara Kargo (MP) | 12.115,2 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Angkutan Kargo Perintis (MP) | 63.566,2 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Angkutan BBM untuk Kargo Perintis (MP) | 5.369,9 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| 36) MP: Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar | | |
| Dukungan Belanja K/L | 2.222.140,0 | |
| *Aspek: Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel* | | |
| Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage I | 36.996,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Paket A (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai s/d Jatinegara) (Tahap II) | 226.654,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |



SK No 168358 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Peningkatan Jalur KA lintas Medan - Belawan Tahap I segmen Medan - Labuan | 112.079,7 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| *Engineering Services Of* Jakarta *Mass Rapid Transit East - West Line Project Phase I Stage II* | 100,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Stasiun Kereta Api Jabodetabek | 452,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pembangunan Jalur Ganda KA Kiaracondong - Cicalengka Tahap 2 segmen Kiaracondong - Gedebage dan segmen Haurpugur - Cicalengka | 297.539,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Stasiun Kereta Api Jabodetabek (PEN) | 14.551,7 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pembangunan Jalur KA Medan - Binjai | 517.923,2 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Surabaya Regional *Railway Line* (Phase I) | 100,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Peningkatan Fasilitas Operasi Perkeretaapian pada lintas Jatinegara - Bogor dan Manggarai - Jakarta Kota | 210.000,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Jabodetabek *Railway Capacity Enhancement Phase* I | 13.476,4 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Pada Jalur Ganda KA antara Padalarang - Bandung Lintas Bogor - Yogyakarta | 238.100,5 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Pekerjaan Peningkatan Sistem Elektrifikasi Perkeretaapian Jabodetabek | 186.530,2 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Reaktivasi Angkutan *Commuter Line* Kemayoran-Tanjung Priuk | 67.680,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pembelian Layanan (*Buy The Services*) Angkutan Massal Berbasis Jalan Di Kota Medan (Prioritas Nasional) | 70.365,2 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| *Aspek: Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan* | | |
| Subsidi Angkutan Penumpang (*Buy The Service*) Jabodetabek | 48.764,1 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| *Area Traffic Control System* (ATCS) Terpadu Jabodetabek | 11.660,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| *Area Traffic Control System* (ATCS) Terpadu Jabodetabek (PEN) | 12.000,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal (Prioritas Nasional) | 50.000,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS (Buy The Service) di Kota Bandung (Prioritas Nasional) | 35.182,9 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS (*Buy The Service*) di Kota Surabaya (Prioritas Nasional) | 53.348,0 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan BTS (*Buy The Service*) di Kota Makassar (Prioritas Nasional) | 18.636,8 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| Dukungan BUMN | 10.390.000,0 | |
| Pengembangan dan Pengadaan Transportasi Massal (Armada Bus) Perkotaan di 6 Kota Metropolitan | | BUMN |
| Pembangunan LRT Jabodebek | | BUMN (Terintegrasi dengan PSN) |



SK No 168359 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| 37) MP: Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA | | |
| Dukungan Belanja K/L | 335.480,0 | |
| *Aspek: Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan* | | |
| Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik | 1.587,8 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk | 1.488,4 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi | 1.017,1 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| Rekomendasi Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan pada Infrastruktur Pengisian Listrik pada Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai | 172,1 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| *Aspek: Pembangkit Listrik* | | |
| PLTMH | 17.400,0 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| PLTS Terpadu | 51.961,1 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| *Aspek: Kebijakan tarif, harga dan subsidi* | | |
| Rekomendasi Reviu dan Evaluasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran | 549,3 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| *Aspek: Jaringan last mile dan sambungan listrik* | | |
| Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T | 201.646,0 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| APDAL | 58.092,2 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| Dukungan BUMN | 81.334.360,0 | |
| Advance Metering Infrastructure (AMI) | | BUMN |
| Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik | | BUMN |
| Maintenance Capex, Rutin UIP, dan IDC | | BUMN |
| Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi: Penuntasan dan Perbaikan Akses Tenaga Listrik | | BUMN |
| Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk: Backbone Interkoneksi Kalimantan | | BUMN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk: Backbone Interkoneksi Nusa Tenggara | | BUMN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk: Backbone Interkoneksi Sulawesi | | BUMN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk: Backbone Interkoneksi Sumatera | | BUMN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk: Pemasaran | | BUMN |
| Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk: Sistem JMB | | BUMN |
| Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk: Sistem Maluku dan Papua | | BUMN |



SK No 168360 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Pembangunan Pembangkit Listrik: Non-EBT | | BUMN |
| Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan | | BUMN |
| 38) MP: Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah | | |
| Dukungan BUMN | 1.240.000,0 | |
| Pembangunan Jaringan Gas Kota:<br>1. DKI Jakarta<br>2. Tangerang<br>3. Bekasi<br>4. Karawang<br>5. Cirebon<br>6. Cilegon<br>7. Bogor<br>8. Semarang<br>9. Bojonegoro<br>10. Surabaya<br>11. Sidoarjo<br>12. Pasuruan<br>13. Medan<br>14. Dumai<br>15. Batam<br>16. Palembang<br>17. Lampung | | BUMN<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 39) MP: Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km) | (akan dibiayai dengan investasi badan usaha) | BADAN USAHA |
| 40) MP: Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak | | |
| Dukungan Belanja K/L | 346,7 | |
| *Aspek: Dukungan Fasilitasi* | | |
| Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi | 346,7 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| Dukungan BUMN | 79.577.460,0 | |
| Pembangunan *Grass Root Refinery* (GRR) Tuban | | BUMN<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| Pembangunan Kilang Olefin | | BUMN |
| Peningkatan feedstock kilang - Pengembangan explorasi/produksi Mahakam | | BUMN |
| Peningkatan feedstock kilang - Pengembangan explorasi/produksi Rokan | | BUMN |
| RDMP Rescaling RU V Balikpapan | | BUMN<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| RDMP Rescaling RU VI Balongan | | BUMN<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| RDMP Cilacap | | BUMN<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| Pembangunan Infrastruktur Suplai Gas ke RU V Balikpapan | | BUMN |
| Terminal Regasifikasi LNG RU IV Cilacap | | BUMN |
| *Petrochemical Complex* Jabar | | BUMN<br>(Terintegrasi dengan PSN) |
| 41) MP: Transformasi Digital | | |
| Dukungan Belanja K/L | 19.146.696,0 | |
| *Sub: SDM Digital Indonesia* | | |
| *Aspek: Vokasi untuk Industri 4.0* | | |
| Transformasi BLK Baru | 83.747,8 | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN |



SK No 168361 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika | 2.320,3 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BBPSDMP Makassar | 5.449,6 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BBPSDMP Medan | 5.341,3 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Jakarta | 2.308,9 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Bandung | 2.244,8 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Yogyakarta | 2.276,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Surabaya | 2.321,5 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Banjarmasin | 2.315,4 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Di Wilayah BPSDMP Manado | 2.345,3 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika BPPTIK | 5.272,8 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Tenaga Kerja Industri 4.0 | 6.000,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| *Aspek: Peningkatan kompetensi SDM pada bidang TIK* | | |
| Digital Talent Scholarship | 57.399,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi dan Informatika | 58.100,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Digital Talent Scholarship di Pusdiklat | 4.221,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BBPSDMP Medan | 4.375,9 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BBPSDMP Makassar | 4.375,9 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Jakarta | 2.554,4 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Bandung | 2.554,4 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Yogyakarta | 2.554,4 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Surabaya | 2.554,4 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Banjarmasin | 2.554,4 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BPSDMP Manado | 2.554,4 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Digital Talent Scholarship di BPPTIK | 4.896,9 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Tenaga Fasilitator Edukasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Yang Mendapat Pelatihan | 1.200,0 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| *Aspek: Kebijakan dan Standardisasi Kompetensi pada Bidang TIK* | | |
| Sertikasi berbasis SKKNI Bidang Kominfo | 707,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| SDM Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Sertifikasi | 3.000,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |



SK No 168362 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| *Sub: Perdagangan, Perdesaan, Koperasi dan UMKM* | | |
| *Aspek: Start Up Digital* | | |
| Start Up Millenial | 1.000,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Business Matchmaking Start Up Digital | 19.200,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Digital Technopreneur | 57.870,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Start Up Digital yang dikembangkan | 1.960,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| *Aspek: E-Commerce* | | |
| Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Pertanian | 5.700,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Pariwisata | 4.000,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Logistik | 3.800,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Layanan Publik Bidang Pos | 2.203,2 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Rekomendasi Kebijakan untuk Revisi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2021 | 5.096,3 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Pendukungan Kegiatan Pemasaran Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif | 18.000,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| Kebijakan terkait Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia dalam Sektor Non Pertanian dan Perdagangan Digital | 650,0 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
| *Aspek: Digitalisasi UMKM* | | |
| Adopsi Teknologi Digital UMKM | 21.700,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| UKM/Sentra yang difasilitasi Peningkatan Digitalisasi | 750,0 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| Pelaku Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Mendapat Fasilitasi Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual | 3.000,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Mendapat Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual | 2.000,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| Sentra IKM dan UPT Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan Yang Mendapat Fasilitasi | 3.926,6 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| Sentra IKM dan UPT Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang mendapat Fasilitasi | 2.500,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| Sentra IKM dan UPT Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapat Fasilitasi | 2.228,9 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (Terintegrasi dengan PSN) |
| *Aspek: Desa Digital* | | |
| Rekomendasi Pengembangan Desa Digital melalui *Smart Village* | 43.210,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |
| Desa Digital yang dikembangkan melalui *Platform* Akademi Desa 4.0 | 19.950,0 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI |



SK No 168363 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| *Sub: Digitalisasi Bantuan Sosial* | | |
| *Aspek: Digitalisasi dan integrasi Pelaksanaan bantuan sosial secara bertahap* | | |
| Data Terpadu Kesejahteraan Sosial | 11.547,4 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial | 11.928,1 | KEMENTERIAN SOSIAL |
| *Sub: Kesehatan* | | |
| *Aspek: Sistem Informasi Kesehatan* | | |
| Implementasi Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) (LR) | 3.450,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Integrasi dan Pengembangan Sistem Data Kesehatan (TK) | 5.420,5 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Integrasi dan Pengembangan Sistem Aplikasi Kesehatan (TK) | 16.780,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Penguatan Ekosistem Digital Kesehatan (TK) | 15.412,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Transformasi Digital (TK) | 94.577,4 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Kesehatan | 4.500,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| *Sub: Layanan Pemerintahan* | | |
| *Aspek: Pusat Data Nasional* | | |
| Pengadaan Perangkat Data *Center* (TK) | 46.709,7 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pengadaan Prasarana Jaringan Komunikasi Data (TK) | 36.096,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pemeliharaan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TK) | 7.400,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TK) | 16.152,9 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Data *Center* Nasional | 1.189.085,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| *Sub: Akses dan Infrastruktur* | | |
| *Aspek: Penyediaan Akses Internet Cepat* | | |
| Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat | 615,9 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| Layanan Publik Bidang Telekomunikasi | 6.248,3 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Akses Internet Tetap Pita lebar | 17.909,1 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| BTS 4G / *Lastmile* | 389.379,7 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| OM Palapa *Ring* | 1.953.889,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Kerjasama Badan Usaha | 121.000,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Palapa *Ring* Integrasi | 52.141,9 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Terintegrasi dengan PSN) |
| Rekomendasi kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan telekomunikasi di IKN | 1.672,6 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| BTS 4G / *Lastmile* Papua dan Papua Barat | 568.573,2 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |



SK No 168364 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| OM Akses Internet | 1.850.096,8 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| OM BTS 4G / *Lastmile* | 1.163.037,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Pilot Project Penyediaan Fiber Optik di Kabupaten/Kota DPSP | 2.373,8 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| OM BTS 4G / *Lastmile* Papua dan Papua Barat | 1.702.600,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| OM Akses Internet Papua dan Papua Barat | 119.045,6 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| OM Penyediaan Kapasitas Satelit | 2.502.762,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| SATRIA 2 | 2.000,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Akses Internet | 422.320,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Akses Internet Papua dan Papua Barat | 137.878,4 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Satelit Multifungsi (Konstruksi - Investasi BUP KPBU) | 1.605.250,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA(KPBU) |
| Rekomendasi Kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika | 2.726,0 | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN |
| *Aspek: Pengembangan Penyiaran Digital* | | |
| Rekomendasi Kebijakan Terkait Penyiaran Digital | 14.136,6 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Pengembangan Pusat Monitoring Telekomunikasi, Pos dan Penyiaran | 24.942,4 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| OM Pusat Monitoring Telekomunikasi, Pos dan Penyiaran | 90.688,4 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| *Digital Broadcasting System*(DBS) | 1.098.110,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Layanan Publik Bidang Penyiaran | 15.729,6 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Dukungan Ekosistem Siaran Layanan TV Digital | 28.030,9 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Sistem Infrastruktur Penyiaran Digital | 307.940,0 | TELEVISI REPUBLIK INDONESIA |
| *Aspek: Frekuensi dan Perangkat TIK* | | |
| Penerimaan serta penanganan piutang dan akuntabilitas PNBP BHP Frekrad dan SOR | 2.039,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) | 76.729,5 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Pengembangan Infrastruktur SIMS | 31.175,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Optimalisasi Penyediaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Broadband | 21.810,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Rekomendasi kebijakan yang mendukung optimalisasi spektrum frekuensi radio untuk digitalisasi penyiaran | 4.393,9 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Koordinasi Nasional Identifikasi, Implementasi dan Pengendalian IMEI | 2.128,6 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Pengembangan Laboratorium BBPPT dan Sarana Pendukung | 600.000,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |



SK No 168365 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| *Sub: Literasi Digital Masyarakat* | | |
| *Aspek: Peningkatan Literasi Masyarakat* | | |
| Literasi Digital | 550.000,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| *Sub: Keamanan Siber* | | |
| *Aspek: penguatan Infrastruktur, SDM, dan Regulasi Keamanan Siber* | | |
| Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen Siber | 2.500,0 | BADAN INTELIJEN NEGARA |
| *Integrasi Cyber Intelligent Analytics* (CIA) | 50.000,0 | BADAN INTELIJEN NEGARA |
| Penguatan Operasi Intelijen Siber | 12.500,0 | BADAN INTELIJEN NEGARA |
| Peningkatan Kerjasama Intelijen Siber Antar Lembaga Intelijen Dunia | 2.000,0 | BADAN INTELIJEN NEGARA |
| Kerja Sama Regional, Bilateral, dan Multilateral Bidang Keamanan Siber (RKP 2023) | 1.591,1 | BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA |
| Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber K/L/D (RKP 2023) | 2.236,6 | BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA |
| Peningkatan Kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada K/L/D (RKP 2023) | 1.067,8 | BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA |
| Pengendalian Tata Kelola PSE dan Transaksi PSE | 16.523,4 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Pengembangan dan Penerapan Data *Protection Officer* | 4.503,6 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Penanganan dan Penanggulangan Konten Negatif | 70.480,4 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi | 6.100,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk (PSrE Induk) | 16.141,6 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Peningkatan Kapasitas SDM Siber melalui Sertifikasi CEH dan CHFI (PN) | 148,5 | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
| *Aspek: Penyelesaian Kejahatan Siber* | | |
| Penanganan Tindak Pidana Siber (PN) | 14.831,7 | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
| *Aspek: Pembangunan Pertahanan Siber* | | |
| Siber | 54.835,0 | KEMENTERIAN PERTAHANAN |
| *Aspek: Pembangunan dan Penguatan Tim Cepat Tanggap Keamanan Siber* | | |
| Pembentukan tim Respon Ancaman Intelijen Siber | 3.500,0 | BADAN INTELIJEN NEGARA |
| Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor Pemerintah Daerah yang teregistrasi (RKP 2023) | 2.506,3 | BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA |
| Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor Pemerintah yang teregistrasi (RKP 2023) | 4.894,7 | BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA |
| *Sub: industri 4.0* | | |
| *Aspek: Pengembangan ekosistem inovasi, infrastruktur digital dan insentif investasi teknologi* | | |
| Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Maritim | 5.000,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Lembaga/Komunitas/Asosiasi yang mendapat fasilitasi dalam rangka pengembangan ekosistem ekonomi digital | 1.500,0 | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
| Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan | 2.000,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |



SK No 168367 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Industri Sektor Elektronika yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan | 2.400,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi | 2.700,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Semen Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam | 2.800,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| Industri Sektor Otomotif yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan | 2.500,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar | 2.000,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| Memfasilitasi Implementasi Industri 4.0 Sektor Tekstil dan *Apparel* | 1.580,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| Industri Sektor Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan | 3.000,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| Pendampingan Implementasi 4.0 Sektor Industri Kimia Hulu | 1.000,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Rangka Penerapan *Making* Indonesia 4.0 | 5.878,2 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| *Sub: Layanan Pemerintahan* | | |
| *Aspek: Penerapan SPBE Terintegrasi* | | |
| Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Timur yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi) | 2.100,0 | ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA |
| Instansi Pusat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi) | 1.000,0 | ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA |
| Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi) | 2.345,0 | ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA |
| *Prototipe Cloud Services* SPBE | 3.600,0 | BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT) |
| Penyelenggaraan Aplikasi Generik Berbasis *Cloud* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (baru, pengembangan, operasional dan pemeliharaan) | 31.700,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi | 1.000,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| *Aspek: Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (E-Services) yang Terintegrasi* | | |
| Sistem informasi pembangunan daerah (data pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev bangda) yang dikembangkan | 1.000,0 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| Fasilitasi Pembentukan Data Kelahiran dan Kematian yang Terintegrasi Antar Lembaga | 2.500,0 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| Daerah yang Menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam SIPD Bidang Perencanaan Anggaran | 1.450,0 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik | 2.036,1 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi | 4.200,0 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Pengembangan *National Logistic Ecosystem* (PN) | 1.055,4 | KEMENTERIAN KEUANGAN |
| *Core Tax System* (PN) | 545.256,8 | KEMENTERIAN KEUANGAN |
| *Masterplan Smart City* | 31.000,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Rancangan Portal Pelayanan Publik | 2.600,0 | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI |



SK No 168368 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| *Sub: Pendidikan* | | |
| *Aspek: Pemanfaatan TIK untuk Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran* | | |
| *Platform E-learning* Madrasah yang Dikelola | 9.250,0 | KEMENTERIAN AGAMA |
| Adopsi Teknologi Digital Sektor Staregis Pendidikan | 6.800,0 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| Program Studi dengan Inovasi Pembelajaran Digital dan Berkualitas | 68.863,4 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| *Platform* Digital Pendidikan Merdeka Belajar | 601.500,0 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI |
| *E-Journal* yang Dilanggan | 40.560,4 | PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA |
| Pojok Baca Digital di Daerah | 25.000,0 | PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA |
| Bahan Perpustakaan dan Naskah Kuno yang Dialih mediakan | 8.904,3 | PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA |
| Kanal Pendidikan dan Budaya | 5.778,5 | TELEVISI REPUBLIK INDONESIA |
| Dukungan BUMN | 9.106.180,0 | |
| Percepatan Pengembangan Digital PLN | | BUMN |
| Investasi Bank Himbara untuk Pengembangan Digital (IT) | | BUMN |
| Dukungan Swasta | 3.426.000,0 a) | |
| Pembangunan Data Center | | Swasta |
| PN 6 : MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM | | |
| 42) MP: Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 | | |
| Dukungan Belanja K/L | 142.462,4 | |
| *Sub: Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Terpadu* | | |
| *Aspek: Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Terpadu* | | |
| Persiapan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Spesifik secara Terpadu | 2.859,9 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| *Aspek: Enablers* | | |
| Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di sektor industri | 450,0 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| *Sub: Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dari Fasyankes* | | |
| *Aspek: Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis* | | |
| Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasyankes | 122.100,0 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| *Aspek: Enablers* | | |
| Bantuan Peralatan/Sarana Penyehatan Lingkungan (01) | 325,0 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| Data dan Informasi Publik Penyehatan Lingkungan (01) | 483,4 | KEMENTERIAN KESEHATAN |



SK No 168369 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dalam rangka penyehatan lingkungan (01) | 16.244,1 | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| 43) MP: Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana | | |
| Dukungan Belanja K/L dan DAK | 1.493.404,2 | |
| *Aspek: Penguatan Tata Kelola EWS Bencana* | | |
| Pemeliharaan operasional Jaringan informasi dan komunikasi MKG | 139.294,1 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA |
| Pengembangan sistem big data dan HPC melalui IDRIP | 60.636,0 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA |
| Jaringan komunikasi dan informasi MKG | 1.000,0 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA |
| Jaringan informasi dan komunikasi MKG melaui IDRIP | 9.485,4 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA |
| Pemeliharaan operasional aloptama MKG didaerah | 79.619,7 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA |
| Prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan | 3.000,0 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) |
| Analisis Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana | 2.150,0 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) |
| Rancang Bangun Sistem PB | 1.210,0 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) |
| Pembuatan dan Pemasangan Rambu, Papan Evakuasi dan Informasi Bencana (IDRIP) | 4.456,0 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) |
| Fasilitasi Penguatan Respon Sistem Peringatan Dini Bencana | 1.900,0 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) |
| Fasilitasi Penguatan Ketangguhan Masyarakat Berbasis Komunitas dan Keluarga | 85.850,5 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) |
| Geladi Penanggulangan Bencana Internasional | 6.000,0 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) |
| Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah | 1.320,0 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
| Program Produksi Siaran Tanggap Bencana Prioritas Nasional | 3.919,7 | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA |
| *Aspek: Penguatan EWS Bencana Lingkungan* | | |
| Pemeliharaan peralatan operasional informasi iklim terapan dan kualitas udara | 8.330,0 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA |
| Sistem operasional informasi kualitas Udara | 24.243,0 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1301 - Kab. Kepulauan Mentawai) | 1.634,7 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1605 - Kab. Musi Rawas) | 1.634,7 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (1902 - Kab. Belitung) | 2.758,0 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3304 - Kab. Banjarnegara) | 3.052,3 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3307 - Kab. Wonosobo) | 1.634,7 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3322 - Kab. Semarang) | 1.927,9 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3374 - Kota Semarang) | 1.927,9 | DAK |



SK No 168370 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3401 - Kab. Kulon Progo) | 2.029,4 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3508 - Kab. Lumajang) | 2.128,1 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (3602 - Kab. Lebak) | 1.400,0 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5105 - Kab. Klungkung) | 1.634,7 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (5106 - Kab. Bangli) | 1.634,7 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (6306 - Kab. Hulu Sungai Selatan) | 4.693,6 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7302 - Kab. Bulukumba) | 6.963,1 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (7471 - Kota Kendari) | 1.634,7 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9103 - Kab. Teluk Wondama) | 2.970,7 | DAK |
| Lingkungan Hidup - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (9107 - Kab. Sorong) | 2.368,2 | DAK |
| Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis | 274.000,0 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis | 15.000,0 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis | 53.481,0 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis | 9.000,0 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| *Aspek: Penguatan EWS Bencana Hidrometeorologi* | | |
| Layanan informasi meteorologi publik | 50.000,0 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA |
| Layanan Peringatan Dini Cuaca dengan *Scaling Up Weather Capacity* II | 38.489,1 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA |
| peralatan Penguatan *Strengthening climate* and *weather service capacity Phase* II (SIMM 2) | 50.000,0 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA |
| Layanan Informasi meteorologi maritim (*Strengthening of Marine Meteorology)* | 150.000,0 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA |
| Layanan Informasi iklim terapan melalui Sekolah lapang Iklim (SLI) | 5.991,6 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA |
| Pengadaan perangkat pengolah data informasi sistem operasional diseminasi informasi iklim terapan | 2.377,8 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA |
| Pembangunan Alat Pendeteksi Geser Angin (*Windshear*) melalui FIR | 1.000,0 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA |
| Layanan Informasi meteorologi maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) Wilayah Barat | 3.453,6 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA |
| Layanan Informasi meteorologi maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) Wilayah Tengah | 1.864,5 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA |
| Layanan Informasi meteorologi maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) Wilayah Timur | 1.003,8 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA |



SK No 168371 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| *Aspek: Penguatan EWS Bencana Geofisika, Tsunami, dan Gunung Api* | | |
| Stasiun Ina-CORS yang dibangun guna mendukung SRGI di Pulau Sumatera | 4.266,8 | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) |
| Stasiun Ina-CORS yang dibangun guna mendukung SRGI di Pulau Jawa | 3.405,2 | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) |
| Stasiun Ina-CORS yang dibangun guna mendukung SRGI di Pulau Papua | 2.007,7 | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) |
| Stasiun Ina-CORS yang dibangun guna mendukung SRGI di Kepulauan Maluku | 1.289,5 | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) |
| Stasiun Ina-CORS yang dibangun guna mendukung Ina-TEWS di Pulau Sulawesi | 1.837,7 | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) |
| Stasiun Ina-CORS yang dibangun guna mendukung Ina-TEWS di Pulau Sumatera | 1.242,3 | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) |
| Stasiun Ina-Cors yang dibangun guna mendukung Ina-TEWS di Pulau Jawa | 2.264,6 | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) |
| Stasiun Ina-CORS yang dibangun guna mendukung Ina-TEWS di Pulau Bali | 1.275,8 | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) |
| Stasiun Ina-CORS yang dibangun guna mendukung Ina-TEWS di Kepulauan Maluku | 1.286,3 | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) |
| Stasiun Pasang Surut Permanen Ina-TEWS yang dibangun di Pulau Sulawesi | 10.374,4 | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) |
| Stasiun Pasang Surut Permanen Ina-Tews yang dibangun Kepulauan Maluku | 1.820,7 | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) |
| Stasiun Pasang Surut Permanen Ina-Tews yang dibangun di Pulau Nusa Tenggara | 2.987,3 | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) |
| Stasiun Ina-CORS yang dibangun guna mendukung SRGI di Pulau Sulawesi | 2.499,1 | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) |
| Stasiun Pasang Surut Permanen Ina-Tews Yang Dibangun Pulau Jawa | 2.094,9 | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) |
| Stasiun Ina-CORS yang dibangun Guna Mendukung SRGI di Pulau Nusa Tenggara | 1.845,7 | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) |
| Pemeliharaan operasional layanan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang berkualitas | 81.049,6 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA |
| Peralatan seismograf untuk Informasi gempa bumi dan tsunami | 23.026,0 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA |
| Pengadaan perangkat pengolah data informasi geofisika potensial | 6.960,0 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA |
| Layanan Informasi Gempa bumi dan Peringatan Dini Tsunami yang berkualitas | 26.925,5 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA |
| Layanan Informasi kerentanan seismik di kota besar | 1.600,0 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA |
| Peralatan monitoring dampak akibat gempa bumi dengan peralatan intensitymeter dan accelerograph melului IDRIP | 3.101,5 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA |
| Peralatan monitoring gempa bumi dan tsunami melalui Indonesia *Disaster Resillience Initiatives Project* (IDRIP) | 76.777,1 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA |
| Pengadaan perangkat pengolah data informasi tanda waktu | 1.972,0 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA |
| Layanan Informasi gempa bumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang gempa bumi (SLG) Wilayah Barat | 1.337,8 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA |



SK No 168372 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| Layanan Informasi gempa bumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang gempa bumi (SLG) Wilayah Tengah | 1.966,0 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA |
| Layanan Informasi gempa bumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang gempa bumi (SLG) Wilayah Timur | 3.729,0 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA |
| Penguatan Instrumen Peringatan Dini Bencana Gunung Api | 1.890,0 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) |
| Sistem Mitigasi Bencana Geologi Yang Dikembangkan | 57.552,7 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| Pos Pengamatan Gunung api yang Dikembangkan | 27.017,3 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| Peta Kawasan Rawan Bencana Geologi | 1.286,6 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| Peta Zona Kerentanan Likuifaksi | 1.198,5 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |
| PN 7: MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK | | |
| 44) MP: Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT | | |
| Dukungan Belanja K/L | 232.658,8 | |
| *Aspek: Penyelesaian Kejahatan Siber* | | |
| Penanganan Perkara Siber | 4.547,2 | KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA |
| Penanganan Tindak Pidana Siber (PN) | 14.831,7 | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
| *Aspek: Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber* | | |
| Penguatan Operasi Intelijen Siber | 12.500,0 | BADAN INTELIJEN NEGARA |
| Peningkatan Kerjasama Intelijen Siber Antar Lembaga Intelijen Dunia | 2.000,0 | BADAN INTELIJEN NEGARA |
| *Aspek: Penguatan Infrastruktur, SDM, dan Regulasi Keamanan Siber* | | |
| Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen Siber | 2.500,0 | BADAN INTELIJEN NEGARA |
| *Integrasi Cyber Intelligent Analytics* (CIA) | 50.000,0 | BADAN INTELIJEN NEGARA |
| Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber K/L/D (RKP 2023) | 2.236,6 | BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA |
| Penguatan Ekosistem Keamanan Siber di Indonesia | 2.000,0 | BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA |
| Peningkatan Kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada K/L/D (RKP 2023) | 1.067,8 | BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA |
| Pengembangan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data SOC | 66.000,0 | KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA |
| Peningkatan Kapasitas SDM Siber melalui Sertifikasi CEH dan CHFI (PN) | 148,5 | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
| *Aspek: Pencegahan Kejahatan Siber dan Peningkatan Kerja Sama Internasional Bidang Siber* | | |
| Kerja Sama Regional, Bilateral, dan Multilateral Bidang Keamanan Siber (RKP 2023) | 1.591,1 | BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA |
| *Aspek: Pembangunan Pertahanan Siber* | | |
| Jumlah Pemeliharaan atau Perawatan atau Peningkatan Pertahanan Siber TNI AD | 7.500,0 | KEMENTERIAN PERTAHANAN |
| Siber | 54.835,0 | KEMENTERIAN PERTAHANAN |



SK No 168373 A

| Prioritas Nasional/ *Major Project* | Alokasi (Rp. Juta) | Instansi Pelaksana |
|---|---|---|
| *Aspek: Pembangunan dan Penguatan Tim Cepat Tanggap Keamanan Siber* | | |
| Pembentukan tim Respon Ancaman Intelijen Siber | 3.500,0 | BADAN INTELIJEN NEGARA |
| Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor Pemerintah Daerah yang teregistrasi (RKP 2023) | 2.506,3 | BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA |
| Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor Pemerintah yang teregistrasi (RKP 2023) | 4.894,7 | BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA |
| 45) MP: Penguatan Keamanan Laut di Natuna | | |
| Dukungan Belanja K/L | 178.058,7 | |
| *Aspek: Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut* | | |
| Pembangunan Pangkalan Setokok | 155.737,1 | BADAN KEAMANAN LAUT |
| *Aspek: Pembangunan Sarana-Prasarana Pertahanan* | | |
| Sarpras Militer Pulau Strategis | 22.321,6 | KEMENTERIAN PERTAHANAN |

KETERANGAN:
a) Data Proyek Prioritas Investasi Swasta per 24 November 2022.

CATATAN:
1. Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) *Major Project*;
2. Tidak seluruh RO/proyek pendukung *Major Project* ditampilkan;
3. Pada beberapa *Major Project* dilaksanakan melalui dukungan pendanaan dari BUMN/Swasta/Daerah sehingga belanja K/L hanya sebagai fasilitator contoh Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km);
4. *Major Project* didukung oleh pendanaan dan investasi yang bersumber dari Belanja K/L, Dana Transfer Khusus Fisik, KPBU, dan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
5. Proyek DAK merupakan pagu alokasi DAK Fisik per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2023;
6. Alokasi pendanaan/investasi KPBU bersifat indikatif;
7. Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L, DAK Fisik, dan KPBU pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman



SK No 157557 A